

Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022
Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 Agustus 2022

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**



## PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP)

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Grha 9, Lantai 6  
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320  
Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)  
Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

#### Kantor Perwakilan dan Cabang:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 8 Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang dan Surabaya

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0054493.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2022, Perseroan mengadakan program alokasi saham kepada karyawan sebanyak 0,247% (nol koma dua empat tujuh persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham (“Program ESA”). Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BNI Sekuritas



PT Sucor Sekuritas

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YAITU RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK. RISIKO LAINNYA SELINGKUPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 006/MTI/IPO/III/2022/EXT tanggal 22 Maret 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya ("UUPM").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek" atau "BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan surat No. S-03658/BEI.PP2/05-2022 tanggal 10 Mei 2022. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	xi
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.....	xii
<b>RINGKASAN</b> .....	xvi
1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	XVI
2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN.....	XVIII
3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	XX
4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN.....	XX
5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	XX
6. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	XXIV
7. RISIKO USAHA.....	XXV
8. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	XXV
<b>I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM</b> .....	1
1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	2
2. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM PEGAWAI PERSEROAN ( <i>EMPLOYEE STOCK ALLOCATION PROGRAM</i> ATAU PROGRAM ESA).....	3
3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI.....	6
4. PEMBASTAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM.....	6
<b>II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM</b> .....	7
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b> .....	9
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b> .....	37
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN.....	37
2. LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA.....	39
3. RASIO KEUANGAN.....	41
4. RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA.....	42
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b> .....	44
1. UMUR.....	44
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	46
3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN.....	48
4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	54
5. ANALISIS KEUANGAN.....	54
6. ANALISA SEGMENT OPERASI.....	64
7. LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, IMBAL HASIL RATA-RATA EKUITAS DAN IMBAL HASIL RATA-RATA ASET.....	66
8. PEMBASTAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA DALAM BENTUK DIVIDEN KEPADA PERSEROAN.....	67
9. BELANJA MODAL.....	67
10. BAHASAN MENGENAI PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG.....	68
11. ANALISIS RISIKO FLUKTUASI KURS DAN TINGKAT SUKU BUNGA.....	68
12. KEJADIAN KHUSUS YANG JARANG TERJADI.....	68
13. PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO PASAR.....	69
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b> .....	71
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b> .....	88
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	89
1. RIWAYAT PERSEROAN.....	89
2. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.....	90
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA.....	90
4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	91
5. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN.....	93
6. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING.....	95
7. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	120
8. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.....	127
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN.....	128
10. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	129
11. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH.....	129
12. PENGURUS DAN PENGAWASAN.....	136
13. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	141
14. SUMBER DAYA MANUSIA.....	155
15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK.....	160
16. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK.....	161
17. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	175
<b>IX. EKUITAS</b> .....	226
<b>X. KEBIJAKAN DIVIDEN</b> .....	228
<b>XI. PERPAJAKAN</b> .....	229
<b>XII. PENJAMINAN EMISI EFEK</b> .....	232
<b>XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b> .....	234
<b>XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM</b> .....	237
<b>XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS</b> .....	254
<b>XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS</b> .....	262
<b>XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b> .....	263
<b>XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b> .....	292

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Akuntan Publik : Berarti KAP Mirawati Sensi Idris (*An Independent Member of Moore Global Network Limited*) yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
- Bapepam dan LK atau Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Biro Administrasi Efek atau BAE : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.
- Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta, merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- Daftar Pemegang Saham atau DPS : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
- Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

ESA	: Berarti <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
Entitas Induk	: Berarti PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia
JIBOR	: Berarti suku bunga layar untuk Rupiah ( <i>Jakarta Interbank Offered Rate</i> ).
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadminstrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Sucor Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 dan POJK No. 41/2020.

- Masa Penawaran : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
- Menkumham atau Kemenkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- OJK : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
- Partisipan Admin : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41/2020, yaitu PT Sucor Sekuritas.
- Partisipan Sistem : Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari ojk atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
- Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemegang Saham : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Daftar Pemegang Saham Perseroan;
  - Rekening Efek pada KSEI; atau
  - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
- Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

- Penawaran Awal : Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkan Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
- Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham : Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Pengendali : Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan, yang dalam hal ini berarti PT Chandrakarya Multikreasi.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas yang masing-masing juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-028/SHM/KSEI/0322 tanggal 30 Maret 2022, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 45 tanggal 22 Maret 2022, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 68 tanggal 13 April 2022, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 17 tanggal 7 Juli 2022 dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 72 tanggal 20 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 46 tanggal 22 Maret 2022, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 69 tanggal 13 April 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 28 tanggal 20 Mei 2022, Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 112 tanggal 27 Juni 2022, Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 138 tanggal 30 Juni 2022, Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 17 tanggal 7 Juli 2022 dan Akta Addendum VI Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 71 tanggal 20 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Pernyataan Efektif : Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu:
  - a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
    - i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
    - ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* Pasal 1 ayat (2) POJK No. 7/2017 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- Perseroan : Berarti PT Mora Telematika Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat.

- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (21) UUPM.
- Perusahaan Publik : Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- POJK No. 4/2022 : Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 22 Maret 2022.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
- POJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
- POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 20 April 2020.
- POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- POJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

- POJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
- POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
- Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
- Rupiah atau Rp : Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Saham Baru : Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Saham Yang Ditawarkan : Berarti saham-saham atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama

yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada BEI.

- SEOJK No. 15/2020 : Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik tanggal 27 Juli 2020.
- SHGB : Sertifikat Hak Guna Bangunan.
- Sistem Penawaran Umum Elektronik : Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.
- Surat Kolektif Saham : Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- Tanggal Distribusi : Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
- Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- USD atau US\$ : Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608)
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756), sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.
- UU Cipta Kerja : Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573).

## **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

### **Singkatan Perusahaan Anak Yang Dimiliki Langsung**

MIPL	:	Moratel International Pte, Ltd.
OMI	:	PT Oxygen Multimedia Indonesia
PRB	:	PT Palapa Ring Barat
PTT	:	PT Palapa Timur Telematika
IPT	:	PT Indo Pratama Teleglobal

### **Singkatan Perusahaan Anak Yang Tidak Dimiliki Langsung Dan Penyertaan Lainnya**

OII	:	PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
-----	---	-----------------------------------

## DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

- Access* : Berarti bagian dari jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara pelanggan dengan penyedia layanan.
- Artificial Intelligence* : Berarti kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia.
- Backbone* : Berarti jaringan tulang punggung yang menghubungkan antara kota dan/atau antar provinsi dan/atau antar negara sebagai jalur utama yang dibangun oleh Perseroan.
- BDM* : Berarti nama project/jalur yaitu Batam – Dumai – Malaka dimana kabel serat *fiber optic (backbone)* baik *inland* maupun *submarine* tergelar sepanjang wilayah tersebut.
- B3JS* : Berarti nama project/jalur Batam – Bintan – Bangka – Jakarta – Singapura dimana kabel serat *fiber optic (backbone)* baik *inland* dan *submarine* tergelar sepanjang wilayah tersebut.
- Bandwidth* : Berarti luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
- Call Center* : Berarti kantor informasi yang terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon.
- Closed Circuit Television* atau CCTV : Berarti *Closed Circuit Television (CCTV)* yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan sinyal siaran. Pada umumnya CCTV digunakan sebagai pelengkap keamanan dan banyak dipakai di dalam industri-industri seperti militer, bandara, toko, kantor, pabrik dan bahkan sekarang perumahan pun telah banyak yang menggunakan teknologi ini.
- Cloud Computing* : Berarti gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). Awan (*cloud*) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer.
- Cloud Storage* : Berarti media penyimpanan *online*, di mana data tersimpan pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya *Cloud Storage* tidak perlu lagi menyimpan data pada *hard drive*, CD, ataupun hardware lainnya
- Colocation Service* : Berarti layanan pusat data di mana perangkat, ruangan, dan *bandwidth* disewakan ke pelanggan. Jasa layanan ini menyediakan ruangan, listrik, sistem pendingin, pengamanan bagi server, penyimpanan, dan perangkat - dan menghubungkannya dengan

jaringan telekomunikasi - dengan biaya dan kompleksitas yang minim.

- Content Delivery Network* : Berarti sebuah sistem jaringan server untuk mendistribusikan konten yang ada dalam sebuah aplikasi/web ke berbagai pengakses/pengguna di berbagai belahan dunia agar data/konten yang dikirim diterima lebih cepat. CDN diperuntukkan untuk website atau aplikasi yang pengaksesnya dari berbagai belahan dunia.
- Datacenter* : Berarti ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet. Ruang *datacenter* tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar aman dan stabil dari gangguan baik secara fisik maupun virtual sehingga data yang ditempatkan pada server di data center dapat selalu mudah dan cepat di akses oleh para pengguna.
- DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)* : Berarti salah satu teknologi multipleksing dalam komunikasi serat optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang cahaya laser yang berbeda.
- Facilities-Based Operations* atau FBO : Berarti lisensi yang diberikan berdasarkan pengoperasian jaringan telekomunikasi dengan tujuan menyediakan jasa telekomunikasi ke pihak lain, yang bisa saja melibatkan juga operator telekomunikasi lain, pelanggan atau publik.
- FTTH/FTTX (Fiber to the Home/X)* : Berarti suatu penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia (*provider*) ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantaran ke *last mile*.
- Hosting* : Berarti jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS.
- Indefeasible Rights of Use* atau IRU : Berarti perjanjian atas sewa kapasitas inti jaringan *fiber optic* jangka panjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan pembayaran sewa di muka. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan metode amortisasi.
- Inland Cable* : Berarti kabel serat optik yang digelar di darat.
- Interconnection Mobile Operator* : Berarti jaringan global yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya. Pada hal ini, Interconnection Mobile Operator merupakan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan untuk menghubungkan koneksi antara mobile operator dengan mobile operator lainnya.
- International Private Leased Circuit* atau IPLC : Berarti komunikasi jalur pribadi *point-to-point* antar kantor yang tersebar secara geografis di seluruh dunia, dengan jaringan yang

aman dan dapat diandalkan untuk tetap terhubung dengan kantor global, yang memungkinkan komunikasi *point-to-point* tanpa batasan geografis kapanpun dan dimanapun.

- Internet Dedicated* : Berarti jasa internet dengan kecepatan koneksi internet yang sesuai dengan kontrak yang ditawarkan dengan stabilitas yang terjamin.
- Internet of Things* atau IOT : Berarti suatu konsep dimana segala benda yang terdapat disekitar dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan internet.
- IP Transit* : Berarti sebuah layanan yang memungkinkan pengguna mendapatkan interkoneksi ke jaringan global.
- Internet Service Provider* atau ISP : Berarti sebuah penyedia jasa layanan sambungan internet.
- Jaringan Tetap Lokal atau JARTAPLOK : Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal.
- Jaringan Tertutup atau JARTUP : Berarti sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tertutup.
- Leased line* : Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan yang luas.
- Leased line domestic/metro* : Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan antar kota dengan layanan yang lebih terbatas.
- Local Loop* : Berarti saluran koneksi permanen antara dua titik yang disediakan oleh Perseroan dengan cakupan terbatas dengan layanan yang lebih luas dibandingkan dengan *Leased Line Metro*.
- Metro-e* : Berarti teknologi yang dimiliki oleh Perseroan yang ditawarkan kepada pelanggan dengan konten yang lebih terbatas.
- Moratelindo International Cable-system One* atau MIC- 1 : Berarti sistem kabel serat optik bawah laut yang dibangun oleh Perseroan yang menghubungkan Batam, Indonesia dengan Singapura.
- Mobile VPN* : Berarti perluasan dari konsep VPN yang memberikan keleluasaan kepada karyawan-karyawan suatu perusahaan (*mobile workers*) untuk dapat selalu terhubung dan mengakses berbagai informasi dan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan tersebut.
- Mora Internet Exchange* atau MORAIX : Berarti produk yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang memungkinkan penyedia layanan Internet (ISP) peserta untuk saling bertukar data yang ditujukan untuk jaringan masing-masing tanpa melalui jalur Internasional.

- NDC* atau *Nusantara Data Center* : Berarti nama *data center* yang dimiliki oleh Perseroan.
- Network Access Point* atau *NAP* : Berarti suatu titik penyediaan dan penyelenggaraan layanan Internet Internasional dan/atau bandwidth Internasional yang diberikan secara wholesale kepada penyelenggara Internet Service Provider (ISP) untuk diteruskan kepada pelanggannya masing-masing.
- Nusantara Internet Exchange* atau *NIX* : Berarti nama *data center* yang dimiliki oleh Perseroan.
- Point of Presence* atau *POP* : Berarti titik dimana terdapat dua atau lebih jaringan atau perangkat komunikasi yang berbeda, namun saling membangun koneksi satu sama lain, yang berfungsi memperluas jangkauan infrastruktur dan menghubungkan ISP (*Internet Service provider*) dengan pelanggan.
- Private Leased Circuit* : Berarti teknologi yang ditawarkan oleh Perseroan untuk pelanggan yang menginginkan konektivitas ke cabang atau *Data Center* dengan aman untuk melindungi data, informasi, atau aplikasi yang sangat penting dan rahasia.
- Serat Optik : Berarti saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
- Service Level Agreement* atau *SLA* : Berarti kesepakatan layanan yang disepakati oleh kedua pihak yang melaksanakan perjanjian di awal perjanjian tersebut.
- Small Office Home Office* atau *SOHO* : Berarti kategori pelanggan untuk ruko dan usaha kecil menengah
- Submarine Cable* : Berarti kabel serat optik yang digelar di bawah laut.
- UPS* : Berarti perangkat yang memungkinkan komputer tetap berjalan setidaknya dalam waktu singkat bila sumber daya utama hilang.
- Virtual Private Server* : Berarti teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, *VPS* sering digunakan untuk *Cloud Computing*, *software bot*, menjalankan *software robot forex* (untuk *trading*), dan sebagainya.
- Wifi* : Berarti sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel dengan menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan computer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

#### UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 ("**Akta No. 95/2022**").

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2000. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Panataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai "**Grup**") didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

#### KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022, adalah sebagai berikut:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;

- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Lebih lanjut, Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas *Call Centre* yang saat ini keduanya belum dijalankan oleh Perseroan.

## PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan sebuah prospek untuk Perseroan. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- a. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- b. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km<sup>2</sup> dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence* (AI) maupun semakin meningkatnya *bisnis e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.
- d. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbuan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbuan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.
- e. Dengan kemajuan telekomunikasi di Indonesia dengan jaringan kabel optik yang semakin luas terutama di kota-kota besar, sehingga mengakibatkan tata ruang kota oleh banyaknya jaringan kabel optik udara melalui tiang-tiang menjadi terlihat tidak indah dan rapih, selain itu penempatan kabel serat optik dengan menggunakan tiang-tiang menyebabkan resiko kerusakan kabel menjadi lebih tinggi oleh karena tidak adanya infrastruktur yang melindungi kabel tersebut. Oleh karena itu, Perseroan berencana membangun Kerja Sama dengan beberapa Kota

besar di Indonesia dalam Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi untuk proyek pembangunan pengoperasian, perusahaan dan penyediaan *U-ditch* (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf “U”) dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE *High-density polyethylene*) dan/atau media lainnya yang diputuskan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang mana prasarana pasif tersebut digunakan secara bersama-sama oleh pemilik kabel lainnya dengan beberapa syarat-syarat komersialnya yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

## 2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Jumlah Saham yang Ditawarkan	: Sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yang mana seluruhnya Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Nilai nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah)
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 2 – 4 Agustus 2022
Nilai Emisi	: Sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).
Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Agustus 2022

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham <sup>1)</sup>		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>		<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	-	-	-	2.525.464.300	252.546.430.000	10,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>21.121.204.391</b>	<b>2.112.120.439.100</b>	<b>100,00</b>	<b>23.646.668.691</b>	<b>2.364.666.869.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.547.104.500</b>	<b>1.154.710.450.000</b>		<b>9.021.640.200</b>	<b>902.164.020.000</b>	

**Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation Program* atau *Program ESA*)**

Berdasarkan Akta No. 33/2022, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,247% (nol koma dua empat tujuh persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan ("**Program ESA**").

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara pro forma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>		<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	-	-	-	2.519.217.800	251.921.780.000	10,65
5. ESA	-	-	-	6.246.500	624.650.000	0,03

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.121.204.391	2.112.120.439.100	100,00	23.646.668.691	2.364.666.869.100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.547.104.500	1.154.710.450.000		9.021.640.200	902.164.020.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 85% akan digunakan untuk kebutuhan investasi termasuk namun tidak terbatas pada ekspansi jaringan, termasuk *backbone, lastmile, capacity upgrades*, infrastruktur pasif; dan.
- Sekitar 15% akan digunakan untuk modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*general corporate purposes*).

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

### 4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan **Akta No. 33/2022** sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>21.121.204.391</b>	<b>2.112.120.439.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.547.104.500</b>	<b>1.154.710.450.000</b>	

### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit, namun, telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan

laporannya tertanggal 23 Juni 2022. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 4/2022 serta Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 Maret 2022 (“SEOJK No. 4/2022”). Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 23 Juni 2022 atas laporan keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2022 <sup>*)</sup>	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	3.311.518.529.128	3.442.650.087.617	2.779.603.714.290	3.730.066.559.985
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.103.371.965.837	11.122.751.010.461	10.615.918.806.294	9.065.871.336.896
<b>Jumlah Aset</b>	<b>14.414.890.494.965</b>	<b>14.565.401.098.078</b>	<b>13.395.522.520.584</b>	<b>12.795.937.896.881</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.280.622.831.933	3.434.466.972.634	1.932.789.258.012	3.178.349.312.376
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.389.951.647.012	6.572.556.418.461	8.255.273.214.084	7.424.817.546.364
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>9.670.574.478.945</b>	<b>10.007.023.391.095</b>	<b>10.188.062.472.096</b>	<b>10.603.166.858.740</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.744.316.016.020</b>	<b>4.558.377.706.983</b>	<b>3.207.460.048.488</b>	<b>2.192.771.038.141</b>
<b>Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas</b>	<b>14.414.890.494.965</b>	<b>14.565.401.098.078</b>	<b>13.395.522.520.584</b>	<b>12.795.937.896.881</b>

<sup>\*)</sup> Tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Maret	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2022 <sup>*)</sup>	2021 <sup>*)</sup>	2021	2020	2019
Pendapatan	1.026.069.255.358	981.056.795.176	4.180.073.066.155	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751
Beban Langsung	(364.796.780.775)	(365.061.124.112)	(1.642.782.786.475)	(1.288.520.781.590)	(2.131.216.394.841)
Laba Kotor	661.272.474.583	615.995.671.064	2.537.290.279.680	2.477.167.353.204	1.931.165.156.910
Beban Usaha	(239.523.205.514)	(209.972.751.361)	(993.298.500.196)	(905.750.667.916)	(595.939.695.578)
Laba Usaha	421.749.269.069	406.022.919.703	1.543.991.779.484	1.571.416.685.288	1.335.225.461.332
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	242.331.866.869	223.653.142.292	788.774.080.888	780.574.561.087	848.019.744.007
Laba Tahun Berjalan	183.619.439.119	182.050.908.151	671.378.603.195	679.677.575.440	676.050.093.399
Jumlah Penghasilan Komprehensif	185.938.309.037	187.060.275.000	682.762.219.331	1.014.718.610.347	662.843.615.764
Laba Tahun Berjalan per saham					
Dasar (Rupiah penuh)	32	50	119	183	187

<sup>\*)</sup> Tidak diaudit

Pada 2021 Perseroan melakukan pembagian dividen sejumlah Rp 1.964.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah) per lembar saham atau sejumlah Rp1.155.293.540.000 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah). Pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen diatas adalah PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi masing-masing sebesar Rp491.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dan Rp664.293.540.000 (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah).

## RASIO KEUANGAN

(dalam Persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2022 <sup>a)</sup>	2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	4,59%	11,00%	-7,30%	-12,89%
Laba Kotor	7,35%	2,43%	28,27%	30,29%
Jumlah Aset	-1,03%	8,73%	4,69%	40,65%
Jumlah Liabilitas	-3,36%	-1,78%	-3,91%	40,11%
Jumlah Ekuitas	4,08%	42,12%	46,27%	43,32%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	23,62	19,18%	20,95%	21,17%
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan terhadap total asset konsolidasian	6,72%	5,42%	5,83%	6,63%
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas konsolidasian	20,43%	17,30%	24,34%	38,67%
Pendapatan / Jumlah asset	28,47%	28,70%	28,11%	31,75%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	17,90%	16,06%	18,05%	16,64%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,10%	4,61%	5,07%	5,28%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	15,48%	14,73%	21,19%	30,83%
Pendapatan komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	18,12%	16,33%	26,95%	16,32%
Pendapatan komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap total asset konsolidasian	5,16%	4,69%	7,58%	5,18%
Beban penjualan dan pemasaran konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	1,27%	1,17%	1,04%	0,72%
Beban umum dan administrasi konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	23,34%	23,76%	24,05%	14,67%
Laba Kotor setelah beban penjualan dan pemasaran konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	63,17%	59,53%	64,74%	46,82%
EBITDA terhadap pendapatan konsolidasian	55,59%	49,88%	51,32%	37,58%
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman ( <i>Interest Coverage Ratio</i> )	304,98%	269,33%	236,53%	219,32%
Utang berbunga konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	160,91%	173,22%	224,65%	389,15%
Utang berbunga konsolidasian terhadap total asset konsolidasian	52,96%	54,21%	53,79%	66,69%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas ( <i>net debt to equity ratio</i> )	145,72%	149,99%	209,22%	323,84%
Total Liabilitas / Total Ekuitas (DER)	203,83%	219,53%	317,64%	483,55%
Total Liabilitas / Total Aset (DAR)	67,09%	68,70%	76,06%	82,86%

(dalam Persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2022*)	2021	2020	2019
Total Liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	134,69%	144,19%	257,38%	338,60%
Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Lancar	100,94%	100,24%	143,81%	117,36%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	178,43%	219,74%	144,61%	144,42%
Margin Laba Kotor terhadap pendapatan konsolidasian	64,45%	60,70%	65,78%	47,54%

\*) Tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

### PT Mora Telematika Indonesia Tbk - Konsolidasi

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Net Debt to Equity Ratio (Utang berbunga bersih / Jumlah Ekuitas)	Maksimal 500%	149,99%
Interest Coverage Ratio (EBITDA to Interest)	Minimal 100%	269,33%

### PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Rasio Debt dibanding Equity dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	156,54%
Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts) dibanding Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)	Maksimal 400%	373,35%
Rasio Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) dibanding Interest Expense	Minimal 110%	275,73%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 100%	327,96%
Current Ratio	Minimal 100%	107,40%

### PT Indo Pratama Teleglobal

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Current Ratio	Minimal 100%	118,14%
Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts) dibanding Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)	Maksimal 400%	145,79%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 120%	479,99%

### PT Palapa Ring Barat

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Rasio Debt dibanding Equity dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	53,26%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 100%	157,51%

## PT Palapa Timur Telematika

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
<i>Current Ratio</i>	Minimal 100%	244,82%
Rasio <i>Interest Bearing Debts (Net Debts)</i> dibanding Utang Pemegang Saham dan <i>Equity</i>	Maksimal 220%	119,02%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	Minimal 100%	145,12%

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian utang yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

## 6. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2021 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,9	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016
5.	IPT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	1999	65,00	Beroperasi	2021
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>							
6.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	Beroperasi	2016

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perusahaan anak terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

No.	Nama	Kontribusi terhadap Aset Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Liabilitas Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan (%)
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>				
1.	MIPL	1,92	2,55	2,16
2.	OMI	0,51	0,20	10,80
3.	PRB	7,94	11,32	7,78
4.	PTT	36,59	63,22	26,87
5.	IPT	3,37	6,80	1,49
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>				
6.	OII	1,17	1,58	10,49

## 7. RISIKO USAHA

### Risiko Utama

Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

### Risiko Usaha

1. Risiko Perizinan
2. Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik
3. Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi
4. Risiko Persaingan Usaha

### Risiko Umum

1. Risiko Makro Ekonomi
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
3. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

### Risiko bagi Investor

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Risiko likuiditas saham perseroan
3. Kepentingan pemegang saham pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan calon investor

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## 8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, investor yang memperoleh saham dalam Penawaran Umum akan memiliki hak yang sama dan setara dengan pemegang saham eksisting Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen diambil melalui keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi. Perseroan dapat menyatakan untuk membagikan dividen di setiap tahun jika Perseroan memiliki laba positif. Pengumuman, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang, ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris kami, dan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran dividen akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan,

kinerja operasi, arus kas, prospek usaha di masa mendatang dan kondisi keuangan Perseroan, dan (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana sebesar Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Rupiah).

Sesuai dengan Akta No. 33/2022, Perseroan akan mengadakan Program ESA sebanyak 0.247% (nol koma dua empat tujuh persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT.



### PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP)

#### Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Grha 9 Lantai 6

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)

Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YAITU RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK. RISIKO LAINNYA SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta 33/2022 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>21.121.204.391</b>	<b>2.112.120.439.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.547.104.500</b>	<b>1.154.710.450.000</b>	-

### 1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham  
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham <sup>1)</sup>		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>		<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	-	-	-	2.525.464.300	252.546.430.000	10,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>21.121.204.391</b>	<b>2.112.120.439.100</b>	<b>100,00</b>	<b>23.646.668.691</b>	<b>2.364.666.869.100</b>	<b>100,00</b>

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham <sup>1)</sup>		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.547.104.500	1.154.710.450.000		9.021.640.200	902.164.020.000	

## 2. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM PEGAWAI PERSEROAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION PROGRAM* ATAU PROGRAM ESA)

Berdasarkan Akta No. 33/2022, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,247% (nol koma dua empat tujuh persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan (“**Program ESA**”).

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan sebagai Saham Penghargaan kepada karyawan Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan.

Jumlah peserta yang berhak mengikuti Program ESA adalah 808 orang. Saham Penghargaan dalam Program ESA dapat dialokasikan kepada karyawan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh karyawan tetap Perseroan;
- b. Seluruh karyawan kontrak Perseroan;
- c. Karyawan sebagaimana dimaksud didalam huruf (a) sampai (b) berstatus aktif bekerja selama 1 (satu) tahun atau lebih secara penuh hingga tanggal Surat Keputusan Direksi ini;
- d. Karyawan sebagaimana dimaksud didalam huruf (a) sampai (b) tidak dalam keadaan : (i) mengajukan surat pengunduran diri; atau (ii) telah mengundurkan diri; atau (iii) dalam proses diberhentikan; atau (iv) telah diberhentikan; oleh Perseroan sebelum tanggal distribusi saham Program ESA ini.
- e. Karyawan sebagaimana dimaksud didalam huruf (a) sampai (b) tidak dalam status terkena sanksi administratif dan/atau surat peringatan dan/atau surat teguran (termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran Peraturan Perusahaan, *Code of Conduct*, Pedoman mengenai Keterbukaan Informasi Kepada Publik dan peraturan/kebijakan perusahaan lainnya) terhitung pada periode Program ESA ini yakni dari tanggal Surat Keputusan Direksi ini hingga tanggal distribusi saham. Karyawan yang tidak memenuhi ketentuan huruf (e) ini hanya berhak mendapatkan 1/2 dari Porsi Saham Karyawan Program ESA yang ditentukan dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- f. Saham yang tidak didistribusikan ke karyawan karena kondisi pada huruf (d) dan (e) akan didistribusikan ke karyawan lainnya yang memenuhi syarat Program ESA.

Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Karyawan tidak dikenakan biaya atas kepemilikan saham pada Program ESA ini, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh karyawan. Biaya yang ditimbulkan dari Program ESA akan menjadi beban Perseroan.

Saham yang berasal dari program ESA dikenakan *lock-up* dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana menjadi efektif sebagaimana dinyatakan oleh OJK.

Alokasi Saham Penghargaan untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti dengan lock-up period selama 1 (satu) tahun, dimana karyawan yang memperoleh Saham Penghargaan dari Program ESA tidak dapat menjual dan/atau mengalihkan dengan cara apapun Saham Penghargaan yang diperolehnya kepada pihak manapun selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana menjadi efektif sebagaimana dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini tetap berlaku bagi karyawan yang telah mengundurkan diri dari Perseroan atau meninggal dunia setelah memperoleh Saham Penghargaan. Kecuali dalam hal karyawan tersebut meninggal dunia akan dialihkan ke Ahli Warisnya yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta Program ESA dapat menghubungi *Human Resources Department* atas pelaksanaan Program ESA.

### **Aspek Perpajakan Program ESA**

Sehubungan dengan program Alokasi Saham Karyawan/*Employee Stock Allocation* (“ESA”) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, berikut adalah aspek perpajakan terkait:

- a. Terdapat konsekuensi perpajakan yang akan timbul baik untuk perusahaan maupun karyawan pada saat Perseroan memberikan saham penghargaan secara cuma-cuma terkait dengan program ESA.

Bagi Perseroan, nilai saham yang diberikan dianggap sebagai penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan kepada karyawan, sehingga sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, atas biaya kompensasi jasa karyawan tersebut dapat menjadi pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Sedangkan bagi karyawan/partisipan yang menerima saham dari program ESA, nilai saham tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang merupakan objek pajak penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh perusahaan.

- b. Apabila karyawan yang bersangkutan menjual atau mengalihkan saham yang dimiliki (saham terkait program ESA) kepada pihak lain (dalam hal opsi tersebut bersifat *transferrable*), maka atas penjualan saham tersebut merupakan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final dengan tarif PPh sebesar 0,1% dari nilai transaksi.

Karyawan tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan pada Program ESA, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh karyawan. Biaya yang ditimbulkan dari Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran pada Pasar Perdana, dimana dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan berasal dari kas Perseroan.

Karyawan yang memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh saham pada Program ESA ini wajib untuk melakukan pendaftaran sebagai peminat saham Penghargaan Program ESA melalui *Human Resource Department* (“HRD”) Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan. Kemudian, Perseroan akan menerbitkan Daftar Partisipan Karyawan Program ESA yang berhak mendapatkan penjatahan Saham Penghargaan

Program ESA yang akan dijadikan sebagai dasar pengisian Formulir Penjatahan yang akan dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) untuk digunakan sebagai dasar distribusi Saham Penghargaan pada Tanggal Distribusi.

Pembayaran atas Saham Penghargaan oleh Perseroan akan dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan Saham Penghargaan.

Tidak terdapat alokasi atas sisa saham dikarenakan biaya dari Program ESA ditanggung oleh Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara pro forma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- setiap saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>		<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78	7.135.484.421	713.548.442.100	30,17
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71	9.653.884.260	965.388.426.000	40,83
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51	4.331.835.710	433.183.571.000	18,32
4. Masyarakat	-	-	-	2.519.217.800	251.921.780.000	10,65
5. ESA	-	-	-	6.246.500	624.650.000	0,03
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>21.121.204.391</b>	<b>2.112.120.439.100</b>	<b>100,00</b>	<b>23.646.668.691</b>	<b>2.364.666.869.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.547.104.500</b>	<b>1.154.710.450.000</b>		<b>9.021.640.200</b>	<b>902.164.020.000</b>	

Program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebesar 0,247% (nol koma dua empat tujuh persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama ("**Program ESA**") dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima alokasi pemesanan Saham Baru melalui Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan menerima alokasi pemesanan Saham Baru melalui Program ESA.

### 3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan surat No. S-03658/BEI.PP2/05-2022 tanggal 10 Mei 2022, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham yang merupakan saham milik PT Gema Lintas Benua, PT Candrakarya Multikreasi dan PT Smart Telecom.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

### 4. PEMBATAAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Pemegang saham yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan yakni PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi memperoleh distribusi dividen berdasarkan : (i) Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020 PT Mora Telematika Indonesia tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta No. 53 tertanggal 21 Mei 2021 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (ii) Surat Keputusan Direksi tanggal 9 Desember 2021 (iii) Surat Pemberitahuan Distribusi Dividen tertanggal 21 Desember 2021, serta perolehan saham baru kepada pemegang saham PT Gema Lintas Benua, PT Candrakarya Multikreasi dan PT Smart Telecom berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang Saham Perseoran tertanggal 21 Desember 2021 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham Nomor 39 tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074543.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 22 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0489651 tertanggal 22 Desember 2021, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga tidak dapat menjual atau mengalihkan saham yang dimiliki di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Lebih lanjut, Ibu Farida Bau adalah sebagai Pemegang saham pengendali tidak langsung melalui CKM dan sebagai *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) Perseroan juga tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Farida Bau dengan Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2022.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan dipergunakan untuk Investasi, investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif serta pengembangan data center. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *inland cable*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. Backbone merupakan pembangunan jaringan backbone baik untuk *submarine cable* maupun *inland cable*. Saat ini Perseroan memiliki jaringan Backbone dari Jakarta – Singapura, yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable* yang melintasi sepanjang pulau Sumatera, yang disebut dengan Sumatera Backbone. Perseroan juga memiliki Backbone (*Inland Cable*) sepanjang pulau Jawa yang disebut dengan Java Backbone. Selain itu Perseroan juga memiliki Backbone dari Pulau Bali – Nusa Tenggara yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable*. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini akan digunakan untuk investasi pembangunan Backbone dan Access diluar jaringan yang ada serta *Ducting*, seperti rencana pembangunan *Submarine Cable* dan *Inland Cable* beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur di beberapa di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru. Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai persentase investasi pada *Backbone*, *Access*, *Ducting*, *Data Center* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur karena saat ini masih dalam tahap perencanaan awal, dimana panjang kabel atau *Ducting* masih dapat berubah tergantung hasil *desktop study*, *inland*, *marine survey*.; dan
- Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*General corporate purposes*), yaitu biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan yang diperoleh dari kegiatan operasi serta menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,8770% dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,5999%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,2000%; dan
- biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,2000%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,4737%, yang terdiri dari; Akuntan Publik sekitar 0,2650%; Konsultan Hukum sekitar 0,1787%; dan Notaris sekitar 0,0300%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0040%, yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain sekitar 0,3994% termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, pencatatan pada BEI, pendaftaran pada KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, iklan dan biaya lainnya.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 10.007.023.391.095,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah) 31 Desember 2021
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	
Pihak berelasi	13.872.719.930
Pihak ketiga	1.132.948.416.088
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	6.900.000
Pihak ketiga	89.334.175.024
Utang pajak	27.883.905.643
Beban akrual	99.990.940.519
Uang muka penjualan	2.399.196.299
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.164.750.861.401
Utang Obligasi	458.861.999.070
Sukuk Ijarah	346.332.585.924
Liabilitas Sewa	49.054.755.294
Utang Non-Bank	20.094.690.773
Pendapatan ditangguhkan	28.935.826.669
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.434.466.972.634</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Utang usaha – pihak ketiga	190.535.191.524
Liabilitas pajak tangguhan	26.754.761.296
Uang muka penjualan	222.925.986.194
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	3.944.836.394.413
Utang Obligasi	-
Sukuk Ijarah	1.808.992.237.627
Liabilitas Sewa	66.780.826.096
Utang Non-Bank	36.536.278.533
Pendapatan ditangguhkan	164.873.032.574
Utang kepada pemegang saham	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	110.321.710.204
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>6.572.556.418.461</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>10.007.023.391.095</b>

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Utang Usaha

### a. Berdasarkan pemasok

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Pihak berelasi	
Pengadaan aset tetap	13.872.719.930
Jasa telekomunikasi	-
<b>Sub jumlah</b>	<b>13.872.719.930</b>
Pihak ketiga	
Jangka pendek	
Pengadaan aset tetap	973.698.954.288
Jasa telekomunikasi	159.249.461.800
<b>Sub jumlah</b>	<b>1.132.948.416.088</b>
Jangka Panjang	
Pengadaan aset tetap	190.535.191.524
<b>Sub jumlah</b>	<b>190.535.191.524</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.337.356.327.542</b>

### b. Berdasarkan umur utang

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Pihak berelasi	
Belum jatuh tempo	2.012.798.039
Sudah jatuh tempo	
1 s/d 30 hari	6.968.375.000
31 s/d 60 hari	-
> 60 hari	4.891.546.891
<b>Sub jumlah</b>	<b>13.872.719.930</b>
Pihak ketiga	
Belum jatuh tempo	
Jangka pendek	902.803.240.117
Sudah jatuh tempo	
1 s/d 30 hari	152.705.648.712
31 s/d 60 hari	5.185.037.452
> 60 hari	72.254.489.807
<b>Sub jumlah</b>	<b>1.132.948.416.088</b>
Jangka Panjang	
Belum jatuh tempo	
Jangka Panjang	190.535.191.524
<b>Sub jumlah</b>	<b>190.535.191.524</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.337.356.327.542</b>

### c. Berdasarkan mata uang

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Pihak berelasi	
Rupiah	13.872.719.930
<b>Sub jumlah</b>	<b>13.872.719.930</b>
Pihak ketiga	

*(dalam Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Jangka pendek	
Rupiah	996.014.155.215
Dolar Amerika Serikat	128.276.012.852
Dolar Singapura	8.658.248.021
<b>Sub jumlah</b>	<b>1.132.948.416.088</b>
Jangka panjang	
Jangka panjang	
Rupiah	159.797.186.333
Dolar Amerika Serikat	30.738.005.191
<b>Sub jumlah</b>	<b>190.535.191.524</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.337.356.327.542</b>

Utang usaha jangka panjang merupakan utang usaha atas pengadaan atas barang dan jasa OLT dan ONT kepada PT Huawei Tech Investment dan PT ZTE Indonesia untuk pembangunan jaringan network Perseroan yang pembayarannya ditangguhkan tidak dikenakan bunga. Perseroan mengeluarkan surat janji bayar dengan jatuh tempo dalam 18 bulan dan 24 bulan sejak diterbitkan.

## 2. Utang lain-lain

### a. Berdasarkan pemasok

*(dalam Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Pihak berelasi	
Beban operasi	6.900.000
Sub jumlah	6.900.000
Pihak ketiga	
Beban Operasi	63.481.829.190
Lain-lain	25.852.345.834
Sub jumlah	89.334.175.024
<b>Jumlah</b>	<b>89.341.075.024</b>

### b. Berdasarkan mata uang

*(dalam Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Pihak berelasi	
Rupiah	6.900.000
Dolar Amerika Serikat	-
Sub jumlah	6.900.000
Pihak ketiga	
Rupiah	88.354.986.530
Dolar Amerika Serikat	979.188.494
Dolar Singapore	-
Sub jumlah	89.334.175.024
<b>Jumlah</b>	<b>89.341.075.024</b>

### 3. Utang pajak

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Pajak penghasilan badan	
Pasal 29 – Perseroan	
- Tahun 2021	1.989.209.886
Pasal 29 - Entitas anak	
- Tahun 2021	19.329.947.734
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	779.441.370
Pasal 21	1.618.413.150
Pasal 23	333.050.123
Pasal 25	615.919.030
Pasal 26	7.226.770
Pajak Pertambahan Nilai - Entitas anak	3.210.697.580
Jumlah	27.883.905.643

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

### 4. Beban akrual

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Akrual gaji	3.579.589.928
Akrual bunga	1.789.490.229
Akrual BHP – USO tahun 2021	94.621.860.362
Total Utang lain-lain	99.990.940.519

### 5. Uang muka penjualan

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
SKY Perfect JSAT	64.210.545.000
PT Huawei Tech Investment	28.775.765.818
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	132.338.871.675
Jumlah	225.325.182.493
Dikurangi bagian jangka pendek	2.399.196.299
Bagian jangka panjang	222.925.986.194

Akun ini merupakan uang muka penjualan yang diperoleh dari PT Oxygen Infrastruktur Indonesia yang melakukan beberapa perjanjian kerjasama masing-masing sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur serat optik, dimana sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, pekerjaan tersebut masih dalam proses penyelesaian dan uang muka PT Indo Pratama Teleglobal, entitas anak, terkait dengan jasa penyediaan *gateway service* VSAT.

### 6. Pendapatan ditangguhkan

Akun ini merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa kapasitas inti jaringan optik berdasarkan perjanjian *Indefeasible Right of Use* (IRU) dengan beberapa operator telekomunikasi selama lima belas (15) tahun.

Mutasi selama tahun-tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
Saldo awal	130.124.408.243
Penambahan selama tahun berjalan	416.349.694.150
Selisih kurs penjabaran	394.527.806
Amortisasi	(353.059.770.956)
Saldo akhir	193.808.859.243
Dikurangi bagian jangka pendek	28.935.826.669
Bagian jangka panjang	164.873.032.574

## 7. Utang Non-Bank

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
Cisco System Capital Asia, Ltd.	56.630.969.306
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	20.094.690.773
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	36.536.278.533

### ***Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.***

Pada 13 Januari 2021, perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. untuk pembiayaan investasi *backbone* sebesar USD 4.629.869 mengalami perubahan nilai menjadi USD 3.775.080.

Pada 16 September 2020, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. untuk pembiayaan investasi *backbone* sebesar USD 4.629.869. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun.

Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 2.023.541 dimana penandatanganan perjanjian tersebut pada tanggal 26 September 2017 dan 18 Desember 2017 dengan masing-masing nilai kontrak sebesar USD 1.023.541 dan USD 1.000.000. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 4,8% per tahun.

Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 1.276.508 dimana penandatanganan perjanjian tersebut pada tanggal 19 September 2017 dan 26 September 2017 dengan masing-masing nilai kontrak sebesar USD 579.446 dan USD 697.062. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 4,8% per tahun.

Pada 13 Oktober 2016, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 923.194. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun.

Pada tahun 2021, Perseroan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada 30 Maret 2015, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd. untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 1.100.000. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun.

Pada tahun 2019, Perseroan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan memiliki utang pinjaman masing-masing sebesar USD 3.968.810 (setara dengan Rp 56.630.969.306), USD 1.559.054 (setara dengan Rp 21.990.464.042) dan USD 2.528.941 (setara dengan Rp 35.154.808.142).

Pembayaran jumlah pokok utang non-bank untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD 1.376.407 (setara dengan Rp 19.639.949.088), USD 1.411.130 (setara dengan Rp 14.091.003.490) dan USD 1.237.441 (setara dengan Rp 67.247.824.396).

Bunga pinjaman adalah masing-masing sebesar Rp 2.326.534.221, Rp 1.819.622.248 dan Rp 1.813.065.043 pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

Pembatasan-pembatasan

Perusahaan membutuhkan persetujuan terkait merger dan akuisisi perusahaan atau anak usaha, mendirikan anak usaha, menjual aset atau bisnis, perubahan lingkup bisnis, membagi dividen ke pemegang saham, dan pelunasan utang pemegang saham.

## 8. Utang Bank

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i> 31 Desember 2021
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.738.887.536.358
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.399.297.758.968
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	18.000.000.000
Jumlah	5.156.185.295.326
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.164.750.861.401)
	3.991.434.433.925
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi	(46.598.039.512)
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	3.944.836.394.413

### ***PT Bank Mandiri (Persero)***

#### **Perseroan**

Pada tanggal 14 Oktober 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun fasilitas yang masih berjalan adalah sebagai berikut:

#### Kredit Modal Kerja

- a) Fasilitas kredit untuk modal kerja operasional sebesar Rp 20.000.000.000 memiliki periode jatuh tempo tahunan. Pada tanggal 18 Oktober 2015, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas modal kerja dari Bank Mandiri sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Fasilitas ini diperpanjang setiap tahun dan terakhir kalinya diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2021 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Saldo utang pokok bank atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebesar Rp 25.000.000.000.

- b) Selain fasilitas kredit investasi dan modal kerja, Perseroan juga memperoleh fasilitas *Non-Cash Loan* (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) dari Bank Mandiri yang memiliki limit sebesar Rp 5.000.000.000 dengan tenor maksimal selama 180 hari. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembelian sewa jaringan serat optik, material jaringan dan peralatan impor dan lokal dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Pada tanggal 21 Mei 2012, fasilitas ini diperpanjang dan Perseroan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 15.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 20.000.000.000.

Pada tanggal 16 Oktober 2013, fasilitas ini di perpanjang dan digabungkan dengan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Pada tanggal 13 Oktober 2015, fasilitas ini diperpanjang dan Perseroan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 60.000.000.000.

Pada tanggal 12 Oktober 2016, fasilitas ini diperpanjang, Perseroan memperoleh pengurangan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Pada tanggal 18 Oktober 2017, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 9 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 9 Juli 2018, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 10 Juli 2019, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 2 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 9 Juli 2020, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 10 Juli 2021, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas *Non Cash Loan*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 963.697.332, Rp 2.130.760.623 dan Rp 7.667.399.646.

- c) Disamping itu, Perseroan memperoleh fasilitas *treasury line* dari Bank Mandiri sebesar USD 1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah hedging transaksi usaha impor dan ekspor.

Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2021 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perseroan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 72.700.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan jaringan *fiber optic* di Sumatra, Jambi - Batam dan instalasi perlengkapan DWDM untuk jalur serat optik Jambi - Bumi Serpong Damai.

Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 13.328.333.333.

Pada tahun 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas ini.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 157.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan BTS *Backhaul* di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 2015, fasilitas kredit investasi ini mengalami perubahan limit fasilitas menjadi Rp 4.000.000.000.

Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 733.333.333 dan Rp 1.533.333.333.

Pada tahun 2021, Perseroan telah melunasi fasilitas ini.

Jaminan untuk fasilitas kredit investasi diatas adalah masing-masing perangkat yang akan dibangun dan seluruh agunan fasilitas kredit modal kerja.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 240.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower XL.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 104.391.594.313, Rp 143.628.218.718 dan Rp 174.945.696.991.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 50.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan kembali aset eksisting berupa jaringan serat optik Batam – Singapura.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama empat puluh delapan (48) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 2 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000 dan Rp 22.000.000.000. Pada tahun 2021, Perseroan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 21 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower PT Indosat Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia dan PT XL Axiata Tbk.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 5.036.698.603, Rp 6.122.592.338 dan Rp 6.931.236.609.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi berupa BTS *backhaul* untuk PT Smartfren Telecom Tbk dan/atau PT Smart Telecom.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 9 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 17.967.205.610, Rp 23.794.425.471 dan Rp 29.621.609.249.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp856.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purposes*.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp856.000.000.000 dan Perseroan telah melunasi pinjaman ini pada tahun 2020.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perseroan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp240.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purposes*.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 3 bulan.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perseroan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp500.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purposes*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp687.366.666.667 dan Rp 234.084.848.485.

Pembatasan Perseroan atas perjanjian kredit dengan Mandiri tersebut meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

Perusahaan diisyaratkan untuk memenuhi batasan umum dan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

#### Pembatasan-Pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Debt* dibanding *Equity* dan Utang Pemegang Saham kurang dari 300%;
- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dibanding *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* kurang dari 400%;
- Rasio *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* dibanding *Interest Expense* lebih dari 110%; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%.

#### PT Palapa Ring Barat (PRB) - Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Fasilitas *Non Cash Loan* (LC/SKBDN/BG) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) tanggal 25 Juli 2016, PRB memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

- a) Fasilitas Kredit Investasi (“KI”) sebesar Rp 875.785.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 8 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 2 tahun, yaitu sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 24 Juli 2024).
- b) Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Bank Garansi (BG)*) sebesar Rp 500.000.000.000 yang merupakan sub limit dari KI dan digunakan untuk pembiayaan penerbitan LC Impor/SKBDN/BG untuk pengadaan material dan peralatan proyek pembangunan Jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat. Jangka waktu fasilitas ini adalah 2 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan fasilitas ini sudah berakhir pada tahun 2018.
- c) Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Standby Letter of Credit (SBLC))* sebesar Rp 57.000.000.000 untuk jaminan pelaksanaan proyek pembangunan Jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan fasilitas ini telah berakhir pada bulan Juli 2018.
- d) Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Bank Garansi (BG))* sebesar Rp 26.000.000.000 untuk jaminan ketersediaan layanan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan fasilitas ini telah berakhir pada bulan Juli 2017.

PRB melakukan perjanjian baru pada tanggal 18 Desember 2018 untuk Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Bank Garansi (BG))* sebesar Rp 25.500.000.000 untuk jaminan ketersediaan layanan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan jangka waktu fasilitas ini adalah 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 391.423.220.879, Rp 540.423.220.879 dan Rp 683.423.220.881.

Fasilitas ini dijamin dengan pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional paket barat termasuk jaringan fiber optik dan tanah, piutang usaha kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI), pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), *corporate guarantee* dan *deficit cashflow* dari PT Mora Telematika Indonesia, gadai saham Perseroan atas nama PT Ketrosden Triasmitra dan PT Mora Telematika Indonesia, gadai saham PT Inovasi Mas Mobilitas atas nama Farida Bau dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Fasilitas ini mengharuskan Perseroan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan yang bersifat wajib untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan serta persyaratan tambahan lainnya, salah satunya adalah apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional paket barat telah selesai maka Perseroan wajib menyediakan pencadangan dana minimal sebesar Rp 7.000.000.000 yang dibatasi penggunaannya sebagai pencadangan atas risiko dari tidak ditutupnya asuransi jaringan *submarine cable*/serat optik milik Perseroan, apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat telah selesai.

Pembatasan PRB atas perjanjian kredit dengan Mandiri meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

Pembatasan-pembatasan

- Rasio *Debt* dibanding *Equity* dan Utang Pemegang Saham kurang dari 300%;
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%; and
- *Equity* selalu positif

Bahwa berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CMS/TTL.0055/SPPK/2022 tanggal 8 April 2022, untuk fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PRB, Bank Mandiri menghapus ketentuan mengenai larangan bagi PRB untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

#### **PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) - Entitas Anak**

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPKK) No. CM2.JTH/SPPK/0747/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a) Fasilitas Kredit Investasi 1 sebesar Rp 90.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan aset milik Perseroan berupa 47 Tower, 510 VSAT dan Sentra Komunikasi (HUB) atas Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi beserta sarana pendukung.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 43 bulan sejak berakhirnya 3 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 69.070.000.000.

- b) Fasilitas Kredit Investasi 2 sebesar Rp 60.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan Bowheer BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator *provider* atau *Bowheer* lainnya.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 34 bulan sejak berakhirnya 12 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 59.945.885.466.

- c) Penawaran fasilitas *Treasury Line* sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk Untuk melakukan *hedging* transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Pada tanggal 8 Desember 2021 fasilitas ini di perpanjang untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perseroan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/0253/2021 tanggal 8 Desember 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 3 sebesar Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk Pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan *Bowheer* BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator provider atau *Bowheer* lainnya. Fasilitas kredit ini memiliki periode Pelunasan 60 bulan Sejak berakhirnya 12 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 9,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 39.096.487.430.

- b. Selain fasilitas kredit investasi, Perseroan juga memperoleh fasilitas *Non-Cash Loan* (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) dari Bank Mandiri yang memiliki limit sebesar Rp 40.000.000.000 yang digunakan untuk untuk menjamin (*Payment Bond*) pembayaran akhir tahun ke BAKTI.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan sudah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 29.185.661.366.

- c. Perpanjangan fasilitas *Treasury Line* sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk Untuk melakukan *hedging* transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi, piutang usaha kepada *Bowheer*, gadai saham yang dimiliki oleh PT Mora Telematika Indonesia dan PT Telematika Cahaya Global pada IPT, entitas anak, *Corporate Guarantee* dan *Deficit Cash Flow Guarantee* dari PT Gema Lintas Benua dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh saldo utang pokok bank atas pinjaman Grup pada Bank Mandiri adalah masing-masing sebesar Rp 1.399.297.758.968, Rp 983.786.621.213 dan Rp 1.812.783.448.394.

Pembayaran jumlah pokok pinjaman oleh Grup pada Bank Mandiri untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 258.880.235.142, Rp 1.068.996.827.181 dan Rp 209.985.119.899.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 94.561.809.987, Rp 103.354.449.035 dan Rp 109.893.840.955 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, IPT diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Menghasilkan laba bersih;
- *Equity* selalu positif;
- *Current ratio* lebih dari 100%;
- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dibanding *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* kurang dari 4 (empat) kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali.

Bahwa berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CM2.JTH/0064/2022 tanggal 1 April 2022, untuk fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada IPT, Bank Mandiri menghapus ketentuan mengenai larangan bagi PRB untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

#### ***PT Bank Jtrust Indonesia Tbk***

Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 23 Desember 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 55.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek FTTX. Pada tahun 2016, Perseroan telah mencairkan fasilitas ini seluruhnya.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama enam puluh (60) bulan sejak pencairan kredit.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan peralatan telekomunikasi FTTX dan tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan data center di Medan, Palembang, Surabaya, dan Bali.

Pinjaman ini telah dibayar seluruhnya pada tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Surat Keterangan Lunas dengan Nomor 083/JTrust/CSME/JKT/IX/2019.

- b. Pada tanggal 18 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi *Non Revolving* sebesar Rp 100.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek *Ultimate Java Backbone* Ring 1, 2 dan 3. Pada tahun 2018, fasilitas ini telah dicairkan seluruhnya.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama tujuh puluh delapan (78) bulan sejak pencairan kredit.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan peralatan telekomunikasi *Ultimate Java Backbone* Ring 1,2,3 beserta pra sarana pendukungnya dan tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan data center di Medan, Palembang, Surabaya dan Bali, dan tanah dan bangunan

di Jakarta serta piutang perusahaan dan peralatan telekomunikasi NIX 1, FTTX dan *Ultimate Java Backbone* Ring 1, 2, 3.

Pinjaman ini telah dibayar seluruhnya pada tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Surat Keterangan Lunas dengan Nomor 083/Jtrust/CSME/JKT/IX/2019.

Pembatasan Perseroan atas perjanjian kredit dengan J-trust meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari bank lain.

Pembayaran pokok pinjaman masing- masing sebesar Rp 113.395.631.564 pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Perseroan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing- masing sebesar Rp 5.832.664.830 pada tahun 2019.

#### ***PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk***

Pada tanggal 18 April 2013, Perseroan memperoleh fasilitas wa'ad musyarakah, dimana Bank Panin Syariah memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 90.000.000.000. Fasilitas ini telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2014.

Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu enam puluh (60) bulan sejak masing-masing pencairan kredit.

Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan pengambil alihan (*take over*) dan investasi.

Pinjaman tersebut dijamin dengan bangunan shelter, perangkat BTS dan perangkat Serat Optik di Jawa Barat dan Jawa Tengah, deposito senilai Rp 1.700.000.000 serta tagihan piutang efektif kepada PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Telekomunikasi Selular serta jaminan perusahaan atas nama PT Gema Lintas Benua, pihak berelasi.

Pada tanggal 18 November 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan musyarakah, dimana Bank Panin Syariah memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk investasi upgrade *Java Ring Backbone* yang terdiri atas proyek Metro WDM Inner Jakarta dan Surabaya, *upgrade Java Network* dan *Protection*, *Java Access* dan Surabaya - Malang *Backbone*. Perseroan telah mencairkan keseluruhan jumlah fasilitas kredit yang diberikan tersebut.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama enam puluh (60) bulan sejak masing-masing pencairan kredit.

Pembatasan Perseroan atas perjanjian kredit dengan Bank Panin Syariah meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok atas fasilitas kredit sebesar Rp 16.187.313.707. Pada tahun 2020, Perseroan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 16.187.313.707 dan Rp 23.244.510.469.

Bagi hasil yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing- masing sebesar Rp 1.078.857.096 dan Rp 2.778.545.550 pada tahun 2020 dan 2019.

#### ***PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk***

Pada tanggal 29 November 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000 (*uncommitted loan*) yang digunakan untuk pembangunan jaringan fiber optik *ultimate java backbone* Ring 4 dan 5. Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini tahun 2018.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama tujuh puluh delapan (78) bulan sejak pencairan kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 18 bulan).

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan jaringan fiber optik *ultimate java backbone* ring 4 dan 5.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok atas fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp 18.000.000.000, Rp 30.000.000.000 dan Rp 42.000.000.000.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 12.000.000.000, Rp 12.000.000.000 dan Rp 12.000.000.000.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing- masing sebesar Rp 2.654.250.008, Rp 4.117.958.341 dan Rp 5.654.166.669 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

#### ***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)***

##### **Perseroan**

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 April 2019, Perseroan menerima fasilitas kredit investasi *refinancing* sebesar Rp 400.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan *refinancing* aset proyek *Ultimate Java Backbone* Ring 1,2,3 dan jaringan FTTB.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tahun 2019, Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk proyek pembangunan jalur kabel fiber optik Denpasar-Waingapu.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama tujuh puluh dua (72) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tahun 2019, Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 405.337.536.358, Rp 548.441.378.470 dan Rp 672.497.601.535.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021, 2020 dan 2019 sebesar Rp 143.103.842.113, Rp 124.056.223.066 dan Rp 27.502.398.458.

Pada tanggal 8 Februari 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 200.000.000.000 yang digunakan untuk refinancing Obligasi Moratelindo 1 tahun 2017 Seri A.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 166.666.666.667.

Pembayaran pokok pinjaman pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 33.333.333.333.

Pada tanggal 11 Mei 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 340.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal dan modal kerja tahun 2021.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 300.333.333.333.

Pembayaran pokok pinjaman pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 39.666.666.667.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 73.016.788.685, Rp 66.352.579.687 dan Rp 14.796.503.323 pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

- b. Fasilitas *derivative line* sebesar USD 3.000.000 atau ekuivalen dalam valuta asing lainnya dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Derivative Line (PPFDL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk transaksi *treasury* valuta asing non today dan transaksi *derivative* serta *structured product* dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perseroan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

- c. Plafond fasilitas *letter of credit*/ SKBDN dengan sublimit garansi bank/ SBL/C sebesar Rp 30.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung (PPFKTL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah

untuk pembukaan L/C import/ SKBDN sight and/atau usance/180 days after BL date dalam rangka pembelian barang dagangan/ bahan baku/ peralatan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 23.750.544.079, Rp 16.081.099.555 dan Rp 9.940.830.642.

#### Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* (di luar Bagian Lancar Utang Jangka Panjang) lebih dari 1 (satu) kali;
- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dan utang pemegang saham dibanding *Equity* kurang dari 3 (tiga) kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%.

Bahwa berdasarkan Surat BNI No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan menghapus pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

#### **PT Palapa Timur Telematika (PTT) - Entitas Anak**

Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) tanggal 16 Maret 2017, PTT memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi Paket 1 dan 2 ("KI paket 1 dan 2") masing-masing sebesar Rp 2.075.800.000.000 dan Rp1.667.200.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Timur 1 yang menghubungkan 35 kabupaten/kota di Nusa Tenggara timur, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan panjang sekitar 2.780 km (*inland*) dan 4.670 km (*submarine*). Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).
- b. Fasilitas Kredit Investasi - bunga dalam pembangunan (IDC) sebesar Rp 261.000.000.000 untuk pembiayaan bunga untuk kebutuhan pembayaran kewajiban bunga selama masa konstruksi. Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).

Fasilitas ini dijamin dengan peralatan serat optik dan infrastruktur sesuai perjanjian antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, tanah yang akan digunakan sebagai lokasi infrastruktur fiber optik milik PTT, tagihan termin selama masa sewa kredit 10 tahun antara antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), gadai saham Perseroan atas nama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan PT Mora Telematika Indonesia, dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok atas fasilitas ini dari BNI masing-masing sebesar Rp 2.866.550.000.000, Rp 3.412.526.000.000 dan Rp 3.958.502.000.000.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 311.764.707.958, Rp 366.780.615.500 dan Rp 348.795.160.871 pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

Pembatasan atas perjanjian kredit PTT dengan BNI meliputi pengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

Bahwa berdasarkan Surat BNI No. SSK/3.1/852 tanggal 1 April 2022, untuk fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PTT, Bank Mandiri menghapus ketentuan mengenai larangan bagi PRB untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

#### Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan perjanjian tersebut, PTT diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* lebih dari 1 (satu) kali;
- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dan utang pemegang saham dibanding Equity kurang dari 2,2 (dua koma dua) kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%.

Rincian biaya provisi yang belum diamortisasi untuk keseluruhan utang bank pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	1 Januari 2021	Biaya provisi belum diamortisasi dari entitas anak baru	Penambahan Provisi	Amortisasi	31 Desember 2021
Biaya provisi belum diamortisasi:					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.451.273.312	-	2.780.076.200	(16.894.787.300)	39.336.562.212
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.529.040.887	303.478.260	2.798.669.146	(2.399.582.558)	7.231.605.735
PT Bank China Construction Indonesia Tbk	76.467.157	-	-	(46.595.592)	29.871.565
<b>Jumlah</b>	<b>60.056.781.356</b>	<b>303.478.260</b>	<b>5.578.745.346</b>	<b>(19.340.965.450)</b>	<b>46.598.039.512</b>

## 9. Liabilitas Sewa

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	48.249.569.474
PT Verena Multi Finance Tbk	41.265.650.277
Lain-lain	26.320.361.639
<b>Jumlah</b>	<b>115.835.581.390</b>

Pada tahun 2019, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK No. 30. Sedangkan mulai tahun 2021 dan 2020, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73.

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:	
2022	57.204.972.834
2023	42.360.906.475
2024	15.570.307.629
2025	15.154.650.671
2026	947.836.138
Jumlah pembayaran sewa minimum	131.238.673.747
Bunga	(15.403.092.357)
Nilai sekarang pembayaran sewa minimum	115.835.581.390
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(49.054.755.294)
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	66.780.826.096

Pembayaran jumlah pokok utang non-bank untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 29.675.052.297, Rp 19.903.983.838 dan Rp 17.201.666.860.

Pada tanggal 19 September 2018, Perseroan melakukan perjanjian sewa dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) atas perolehan fiber optik dan peralatan telekomunikasi. Liabilitas sewa berjangka waktu lima (5) tahun dan akan jatuh tempo pada Oktober 2023, dengan suku bunga efektif 11,5% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa.

Pada tanggal 20 November 2020, Perseroan melakukan perjanjian sewa dengan PT Verena Multi Finance Tbk atas perolehan fiber optik dan peralatan telekomunikasi. Liabilitas sewa berjangka waktu lima (5) tahun dan akan jatuh tempo pada Desember 2025, dengan suku bunga efektif 10,5% per tahun.

Beban bunga sewa adalah masing-masing sebesar Rp 11.565.102.773, Rp 9.588.912.182 dan Rp 13.024.681.241 pada tahun 2021, 2020 dan 2019

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa antara Grup dan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) dan PT Verena Multi Finance Tbk:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:	
2022	40.522.798.883
2023	38.603.865.225
2024	12.895.824.000
2025	12.895.824.000
Jumlah pembayaran sewa minimum	104.918.312.108
Bunga	(15.403.092.357)
Nilai sekarang pembayaran sewa minimum	89.515.219.751
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(32.372.601.029)
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	57.142.618.722

## 10. Utang Obligasi

Perincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

Seri	Suku Bunga	Jatuh Tempo (Tahun)	Nilai Nominal	2021	2020	2019
Seri A	9,90%	3	540.000.000.000	-	-	540.000.000.000
Seri B	10,50%	5	460.000.000.000	460.000.000.000	460.000.000.000	460.000.000.000
<b>Jumlah utang obligasi</b>				<b>460.000.000.000</b>	<b>460.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi				( 1.138.000.930)	(2.159.868.068)	(5.071.591.716)
<b>Jumlah – bersih</b>				<b>4 58.861.999.070</b>	<b>457.840.131.932</b>	<b>994.928.408.284</b>

Pada bulan Desember 2017, Grup menerbitkan obligasi dalam Rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan suku bunga tetap, bunga dibayar setiap triwulanan, dan tanpa jaminan atas obligasi ini. Jangka waktu obligasi Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2020 dengan suku bunga tetap 9,9%. Jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022 dengan suku bunga tetap 10,5% per tahun. Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi biaya provisi dan biaya transaksi adalah masing-masing sebesar Rp 1.021.867.137, Rp 2.920.540.316 dan Rp 2.622.649.881 pada tahun 2021, 2020 dan 2019, disajikan sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan keuangan” dalam laba rugi.

Rencana penggunaan dana obligasi adalah untuk (i) 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan proyek FTTX (ii) 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, peringkat obligasi yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A, pada tanggal 10 Maret 2022, PT Pemeringkat Efek Indonesia menaikkan peringkat menjadi A+.

Jadwal pembayaran pokok di masa yang akan datang atas saldo utang obligasi adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam Rupiah)</i>			
	2020	2021	2022	Jumlah
Obligasi 1 Moratelindo 2017 Seri A	540.000.000.000	-	-	540.000.000.000
Obligasi 1 Moratelindo 2017 Seri B	-	-	460.000.000.000	460.000.000.000
	540.000.000.000	-	460.000.000.000	1.000.000.000.000

Perseroan telah melakukan pelunasan atas Obligasi Seri A sebesar Rp 540.000.000.000 pada bulan Desember 2020.

## 11. Sukuk Ijarah

Perincian sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

Seri	Imbal hasil sukuk ijarah/Profit	Jatuh Tempo (Tahun)	Nilai Nominal	2021	2020	2019
Seri A Tahap I	103.059.000.000	3	347.000.000.000	347.000.000.000	347.000.000.000	347.000.000.000
Seri B Tahap I	342.825.000.000	5	653.000.000.000	653.000.000.000	653.000.000.000	653.000.000.000
Seri A Tahap II	60.165.000.000	3	191.000.000.000	191.000.000.000	191.000.000.000	-
Seri B Tahap II	48.375.000.000	5	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000	-
Seri A Tahap III	105.009.975.000	3	333.365.000.000	333.365.000.000	333.365.000.000	-

Seri	Imbal hasil sukuk ijarah/Profit	Jatuh Tempo (Tahun)	Nilai Nominal	2021	2020	2019
Seri B Tahap III	31.584.375.000	5	56.150.000.000	56.150.000.000	56.150.000.000	-
Seri A Tahap IV	144.248.250.000	3	469.100.000.000	469.100.000.000	-	-
Seri B Tahap IV	16.995.000.000	5	30.900.000.000	30.900.000.000	-	-
<b>Jumlah sukuk ijarah</b>				<b>2.166.515.000.000</b>	<b>1.666.515.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap I				(4.022.910.307)	(6.197.867.119)	(8.315.748.798)
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap II				(1.448.513.447)	(1.918.898.083)	-
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap III				(2.272.424.348)	(3.167.495.226)	-
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap IV				(3.446.328.347)	-	-
<b>Jumlah – bersih</b>				<b>2.155.324.823.551</b>	<b>1.655.230.739.572</b>	<b>991.684.251.202</b>
<b>Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>				<b>346.332.585.924</b>	-	-
<b>Bagian sukuk ijarah yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun</b>				<b>1.808.992.237.627</b>	<b>1.655.230.739.572</b>	<b>991.684.251.202</b>

Pada bulan Juli 2019, Perseroan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I dalam Rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 2.539.956.811, Rp 2.292.881.679 dan Rp 1.103.440.130 pada tahun 2021, 2020 dan 2019, dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan keuangan” dalam laba rugi.

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 85% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur (ii) 15% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.

Pada bulan Agustus 2020, Perseroan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II dalam Rupiah sebesar Rp 277.000.000.000, dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 668.014.636 dan Rp 258.100.842 pada tahun 2021 dan 2020, dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan keuangan” dalam laba rugi.

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan access termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru (ii) 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.

Pada bulan Oktober 2020, Perseroan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap III dalam Rupiah sebesar Rp 389.515.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 dan jangka waktu

obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 1.109.078.728 dan Rp 207.726.467 pada tahun 2021 dan 2020, dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan keuangan” dalam laba rugi.

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 75% akan digunakan untuk refinancing Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A (ii) 25% untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan access termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru.

Pada bulan Mei 2021, Perseroan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap IV dalam Rupiah sebesar Rp 500.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2026. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah sebesar Rp 813.787.036 pada tahun 2021, dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan keuangan” dalam laba rugi.

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 80% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan access termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru 20% untuk untuk modal kerja.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, peringkat sukuk ijarah Perseroan yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A (sy), pada tanggal 10 Maret 2022, PT Pemeringkat Efek Indonesia menaikkan peringkat menjadi A+ (sy).

Jadwal pembayaran pokok di masa yang akan datang atas saldo sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam Rupiah)</i>					
		2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah
Sukuk	Ijarah	347.000.000.000	-	-	-	-	347.000.000.000
	Berkelanjutan 1						
	Moratelindo Tahap I						
	Tahun 2019 Seri A						
Sukuk	Ijarah	-	-	653.000.000.000	-	-	653.000.000.000
	Berkelanjutan 1						
	Moratelindo Tahap I						
	Tahun 2019 Seri B						
Sukuk	Ijarah	-	191.000.000.000	-	-	-	191.000.000.000
	Berkelanjutan 1						
	Moratelindo Tahap II						
	Tahun 2020 Seri A						
Sukuk	Ijarah	-	-	-	86.000.000.000	-	86.000.000.000
	Berkelanjutan 1						
	Moratelindo Tahap II						
	Tahun 2020 Seri B						
Sukuk	Ijarah	-	333.365.000.000	-	-	-	333.365.000.000
	Berkelanjutan 1						

	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah
Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1	-	-	-	56.150.000.000	-	56.150.000.000
Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1	-	-	469.100.000.000	-	-	469.100.000.000
Moratelindo Tahap IV Tahun 2020 Seri A Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1	-	-	-	-	30.900.000.000	30.900.000.000
	347.000.000.000	524.365.000.000	1.122.100.000.000	142.150.000.000	30.900.000.000	2.166.515.000.000

## 12. Utang kepada Pemegang Saham

Utang kepada pemegang saham merupakan uang muka setoran modal dari PT Candrakarya Multikreasi berdasarkan perjanjian mengenai uang muka setoran modal Perseroan No. 012/PKS/MTI-CKM-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang telah diamandemen pada tanggal 20 Desember 2018 dengan perjanjian No. 126/AMD/MTI-CKM/XII/2018.

Utang kepada pemegang saham ini akan dikonversi seluruhnya menjadi modal saham Perusahaan dan tidak ada pengenaan bunga.

Pada tahun 2021 Perseroan telah melunasi utang pemegang saham.

## 13. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2020 dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan paska kerja tersebut.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh Konsultan Arya Bagiastra, aktuaris independen, tertanggal 26 Januari 2022.

Jumlah karyawan Grup yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 1.431, 1.233 dan 1.198 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah) 31 Desember 2021
Biaya jasa kini	15.691.590.756
Biaya bunga	5.409.700.039
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	21.101.290.795
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:	
Keuntungan (kerugian) actuarial yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan	(2.956.127.585)
Penyesuaian pengalaman	(91.116.043)
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(3.047.243.628)
<b>Jumlah</b>	<b>18.054.047.167</b>

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari “Beban usaha” pada laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<i>(dalam Rupiah)</i> <b>31 Desember 2021</b>
Saldo awal tahun	90.526.628.604
Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada entitas anak yang akuisisi	2.172.979.463
Penyesuaian kerugian aktuarial atas akuisisi entitas anak	122.381.721
Biaya jasa kini	15.691.590.756
Biaya bunga	5.409.700.039
Imbalan dibayarkan	(554.326.751)
Kerugian (keuntungan) pengukuran Kembali	
kerugian (keuntungan) actuarial yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan	(2.956.127.585)
Penyesuaian pengalaman	( 91.116.043)
Saldo akhir tahun	110.321.710.204

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

		<b>2021</b>
Tingkat diskonto	6,05%-6,92% IGSYC ( <i>Durable</i> ) per tahun	
Tingkat kenaikan gaji	7%-8% per tahun	
Umur pensiun normal	55 - 56 tahun	
Tabel mortalitas	TMI IV 2019	
Tingkat pengunduran diri	6% - 10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun	
Tingkat cacat	10%	

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam Rupiah)</i> <b>31 Desember 2021</b>		
		<b>Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti</b>		
	<b>Perubahan asumsi</b>	<b>Kenaikan asumsi</b>	<b>Penurunan asumsi</b>	
Tingkat diskonto	1%	(10.976.593.231)		13.222.811.441
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	12.439.237.917		(10.569.775.191)

## 14. Komitmen dan Perjanjian

### PT Palapa Ring Barat

Pada bulan Februari 2016, Perseroan mendirikan entitas anak, PT Palapa Ring Barat (PRB) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung (backbone) Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) menandatangani perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung serat optik palapa ring paket barat. PRB diwajibkan untuk

membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati tertuang dalam perjanjian dan mengoperasikannya dengan jangka waktu 15 tahun.

Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir lima belas (15) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan dua (2) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 3.486.383.120.000 yang akan diterima oleh PRB sesuai jadwal yang telah disepakati. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, PRB harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada Kominfo dengan pembayaran oleh Kominfo kepada PRB sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) sehubungan dengan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat (Perjanjian Penjaminan). Dalam Perjanjian Penjaminan, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 12 (dua belas) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian Penjaminan, PRB berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.200.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 600.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif Perjanjian Penjaminan tersebut sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, PRB telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 1.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa.

#### **PT Palapa Timur Telematika**

Pada bulan Agustus 2016, Perseroan mendirikan entitas anak, PT Palapa Telematika Timur (PTT) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur.

Pada tanggal 29 September 2016, Perseroan selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) terkait dengan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. BUP diwajibkan untuk membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati dalam perjanjian dan mengoperasikan selama 15 tahun. Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan 2 (dua) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 14.068.866.350.000 yang akan diterima oleh Perseroan sesuai skedul yang sudah disepakati bersama. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, Perseroan sebagai badan pelaksana harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada PJPK dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 September 2016, Perseroan selaku BUP melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) atas pembangunan dan pengelolaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PKBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. Dalam perjanjian ini, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial PJPK kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu dua belas (12) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian ini, Perseroan berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.800.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 2.100.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 4.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

#### **PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda)**

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perseroan melakukan perjanjian Kerjasama operasi dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (BPS) terkait dengan penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang. Perseroan dan BPS akan membentuk manajemen KSO BPS-MORATELINDO untuk melaksanakan pembangunan dan pengoprasian proyek penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang selama 20 tahun. Perseroan dan BPS akan menerima bagi hasil dari pendapatan kotor masing-masing sebesar 80% dan 20% yang diterima atas proyek ini.

Hingga penyelesaian laporan konsolidasian ini, proyek tersebut masih dalam tahap proses penyelesaian.

#### **PT Indo Pratama Teleglobal**

Pada tanggal 30 Januari 2019, IPT, entitas anak, dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menandatangani perjanjian Kerjasama dalam rangka penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi yang memiliki spesifikasi teknologi High Throughput Satellite (HTS). Proyek ini untuk mendukung program KPU untuk memenuhi kebutuhan bandwidth satelit yang belum terlayani oleh penyelenggara komunikasi terestrial, khususnya pada daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar dan terdepan (3T).

Perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Nilai kontrak total atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 1.360.746.000.000 yang akan diterima sesuai jadwal yang telah disepakati.

### **15. Perkara Hukum**

Perseroan sebagai salah satu kreditur atas kasus pengadilan niaga dengan No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST sehubungan dengan penundaan pembayaran utang PT Bakrie Telecom Tbk.

Perseroan telah mendapatkan putusan pengadilan yang dinyatakan dalam putusan No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 9 Desember 2014 dimana PT Bakrie Telecom Tbk harus membayar piutang Perseroan sebesar Rp10.438.711.592 dengan kondisi sebagai berikut:

- I. Rp 3.000.000.000 pertama akan dibayarkan dalam kurun waktu 84 bulan secara bertahap sejak tanggal putusan pengadilan;
- II. 70% dari sisa nilai piutang akan dibayarkan melalui penerbitan sertifikat obligasi wajib konversi; dan
- III. Sisa nilai piutang akan dibayarkan dalam 66 bulan sejak tanggal putusan pengadilan.

Selama kurun waktu 84 bulan, PT Bakrie Telecom Tbk tidak dapat melakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000.000 sehingga berdasarkan hasil keputusan pengadilan tersebut, pembayaran tahap

1 tersebut akan dimasukkan ke dalam jadwal pembayaran tahap 3 yaitu 66 bulan sejak tanggal putusan pengadilan. Pada tanggal 28 Juni 2016, Perseroan menerima sertifikat Obligasi Wajib Konversi sebesar Rp 5.207.098.114 yang berjangka waktu 10 tahun sebagai bentuk pelunasan piutang tahap 2.

## 16. Liabilitas Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

	1 Januari 2021	Akuisisi Entitas Anak	Laba rugi	Penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2021
<b>Aset pajak tangguhan</b>					
<b>Perseroan</b>					
Imbalan kerja jangka panjang	15.608.369.458	-	3.225.815.994	(300.691.615)	18.533.493.837
Cadangan kerugian penurunan nilai	4.274.861.499	-	-	-	4.274.861.499
Sewa pembiayaan	(1.929.590.272)	-	(2.119.824.527)	-	(4.049.414.799)
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(18.481.045.859)	-	5.004.919.462	-	(13.476.126.397)
Surplus revaluasi aset tetap	(37.726.268.123)	-	-	7.781.051.155	(29.945.216.968)
Subjumlah	(38.253.673.297)	-	6.110.910.929	7.480.359.540	(24.662.402.828)
<b>Perusahaan Anak</b>					
Rugi fiskal	637.520.204	-	(637.520.204)	-	-
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(203.959.424)	3.643.488.619	109.618.582	-	270.007.777
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	698.372.122	363.049.422	-	1.061.421.544
Sewa pembiayaan	-	-	37.525.157	-	37.525.157
Imbalan kerja jangka panjang	3.611.166.481	3.630.494.220	1.161.707.709	(488.279.791)	7.915.088.619
Subjumlah	4.044.727.261	4.693.214.961	1.034.380.666	(488.279.791)	9.284.043.097
Aset pajak tangguhan – bersih	(34.208.946.036)	4.693.214.961	7.145.291.595	6.992.079.749	(15.378.359.731)
<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>					
<b>Perusahaan Anak</b>					
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(2.588.733.399)	-	496.374.931	-	(2.092.358.468)
Aset (liabilitas) pajak tangguhan – bersih	(36.797.679.435)	4.693.214.961	7.641.666.526	6.992.079.749	(17.470.718.199)

**SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.**

**TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.**

**DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasian.

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit, namun, telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya tertanggal 23 Juni 2022. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai POJK No. 4/POJK.04/2022 tertanggal 18 Maret 2022 serta Surat OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tertanggal 10 Maret 2022. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 23 Juni 2022 atas laporan keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

##### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022*)	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	720.261.581.808	1.059.195.935.019	494.777.973.772	1.432.164.203.492
Aset pengampunan pajak	1 00.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Piutang usaha :				
Pihak Berelasi	203.368.557.985	79.139.002.676	5.972.229.736	2.662.085.347
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 37.583.659.725, Rp 37.583.659.725, Rp 19.431.188.627 dan Rp 12.139.756.573 Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	517.839.931.294	343.086.673.252	390.055.126.311	365.489.488.383
Piutang lain-lain	17.184.222.388	18.488.239.621	9.425.879.616	12.096.550.469
Bagian piutang konsesi jasa yang jatuh tempo dalam setahun	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920
Uang muka	75.030.569.810	72.089.158.670	12.018.186.704	33.367.942.282
Biaya dibayar dimuka	93.841.196.168	100.285.225.550	102.262.438.098	76.569.478.392
Pajak dibayar dimuka	66.690.435.120	134.368.931.143	218.807.271.471	276.773.611.239
Aset yang dibatasi penggunaannya	2.881.000.000	32.148.574.941	-	-
Aset lancar lain-lain	108.156.275.635	97.583.587.825	40.019.849.662	24.678.441.461
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>3.311.518.529.128</b>	<b>3.442.650.087.617</b>	<b>2.779.603.714.290</b>	<b>3.730.066.559.985</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset yang dibatasi penggunaannya	3.663.031.750	3.644.167.725	5.203.306.285	5.904.094.734
Investasi	-	-	-	-
Piutang konsesi jasa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	4.448.198.040.953	4.541.712.843.560	4.805.930.010.713	4.985.198.283.185
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 859.165.043.085, Rp 721.269.881.783, Rp 156.430.889.561 dan Rp 763.833.897.971 pada tanggal 31	6.323.090.066.257	6.281.794.670.312	5.560.472.613.002	4.036.546.371.044

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022 <sup>)</sup>	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 701.084.880, Rp 668.221.526, Rp 536.768.111 dan Rp 405.314.696 pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	2.220.102.120	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 10.426.179.086, Rp 9.636.889.245, Rp 6.348.559.546, dan Rp 5.352.578.476 pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	6.828.589.854	7.364.203.492	734.940.030	190.784.834
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 112.988.217.667, Rp 102.684.604.048 dan Rp 58.666.842.937 pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020	136.467.793.277	144.173.481.642	163.479.750.575	-
Aset pajak tangguhan	9.499.852.943	9.284.043.097	4.044.727.261	7.250.865.308
Aset lain-lain	173.404.488.683	132.524.635.159	73.669.039.539	28.265.065.487
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>11.103.371.965.837</b>	<b>11.122.751.010.461</b>	<b>10.615.918.806.294</b>	<b>9.065.871.336.896</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>14.414.890.494.965</b>	<b>14.565.401.098.078</b>	<b>13.395.522.520.584</b>	<b>12.795.937.896.881</b>

#### LIABILITAS

##### Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha				
Pihak berelasi	17.386.360.192	13.872.719.930	14.260.920.100	6.005.330.539
Pihak ketiga	891.822.922.302	1.132.948.416.088	678.973.019.341	605.694.751.292
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	6.900.000	3.774.000	34.907.117
Pihak ketiga	84.401.673.332	89.334.175.024	112.673.177.534	116.453.885.870
Utang pajak	70.193.838.521	27.883.905.643	16.693.831.960	29.549.539.781
Beban akrual	116.508.087.622	99.990.940.519	70.345.694.169	38.169.028.516
Uang muka penjualan	2.399.196.299	2.399.196.299	2.540.358.909	26.350.846.961
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	1.185.093.088.891	1.164.750.861.401	954.401.804.443	1.760.476.321.040
Utang Obligasi	459.131.379.240	458.861.999.070	-	537.996.897.073
Sukuk Ijarah	346.615.078.329	346.332.585.924	-	-
Liabilitas sewa	46.452.995.258	49.054.755.294	48.421.582.510	19.266.814.917
Utang non-bank	19.291.522.053	20.094.690.773	11.270.769.682	13.482.391.473
Pendapatan ditangguhkan	41.326.689.894	28.935.826.669	23.204.325.364	24.868.597.797
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.280.622.831.933</b>	<b>3.434.466.972.634</b>	<b>1.932.789.258.012</b>	<b>3.178.349.312.376</b>

##### Liabilitas Jangka Panjang

Utang usaha – pihak ketiga	221.591.479.901	190.535.191.524	575.754.822.578	62.630.784.684
Liabilitas pajak tangguhan	26.062.943.726	26.754.761.296	40.842.406.696	2.090.170.498
Uang muka penjualan	268.554.428.059	222.925.986.194	405.507.785.560	135.809.718.725
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	3.678.144.555.904	3.944.836.394.413	3.960.295.413.884	4.661.859.827.918
Utang obligasi	-	-	457.840.131.932	456.931.511.211
Sukuk Ijarah	1.809.981.996.053	1.808.992.237.627	1.655.230.739.572	991.684.251.202
Liabilitas sewa	56.670.380.679	66.780.826.096	107.227.136.019	69.829.464.033
Utang non-bank	32.501.183.084	36.536.278.533	10.719.694.360	21.672.416.669
Pendapatan ditangguhkan	181.264.673.506	164.873.032.574	106.920.082.879	111.872.251.761
Utang kepada pemegang saham	-	-	844.408.372.000	844.408.372.000

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2022*)	2021	2020	2019
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	115.180.006.100	110.321.710.204	90.526.628.604	66.028.777.663
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>6.389.951.647.012</b>	<b>6.572.556.418.461</b>	<b>8.255.273.214.084</b>	<b>7.424.817.546.364</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>9.670.574.478.945</b>	<b>10.007.023.391.095</b>	<b>10.188.062.472.096</b>	<b>10.603.166.858.740</b>
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>				
Modal saham				
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor – 250.000 saham seri A, 338.235 saham seri B dan 764.490 saham seri C pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021				
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor – 250.000 saham seri A dan 338.235 saham seri B pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.112.120.439.015	2.112.120.439.015	298.750.159.015	298.750.159.015
Tambahan modal disetor	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi asset	326.037.718.116	345.024.461.741	431.812.510.351	104.324.191.232
Saldo laba				
ditentukan penggunaannya	59.750.031.803	59.750.031.803	59.750.031.803	25.000.000.000
belum ditentukan penggunaannya	1.822.773.395.768	1.646.354.820.803	2.126.186.016.166	1.576.248.449.298
Komponen ekuitas lainnya	25.746.657.373	25.132.712.831	23.788.420.072	22.847.979.351
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>4.343.898.153.163</b>	<b>4.185.852.377.281</b>	<b>2.937.757.048.495</b>	<b>2.024.640.689.984</b>
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>	<b>400.417.862.857</b>	<b>372.525.329.702</b>	<b>269.702.999.993</b>	<b>168.130.348.157</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.744.316.016.020</b>	<b>4.558.377.706.983</b>	<b>3.207.460.048.488</b>	<b>2.192.771.038.141</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>14.414.890.494.965</b>	<b>14.565.401.098.078</b>	<b>13.395.522.520.584</b>	<b>12.795.937.896.881</b>

\*) Tidak diaudit

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Maret	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.026.069.255.358</b>	<b>981.056.795.176</b>	<b>4.180.073.066.155</b>	<b>3.765.688.134.794</b>	<b>4.062.381.551.751</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	<b>(364.796.780.775)</b>	<b>(365.061.124.112)</b>	<b>(1.642.782.786.475)</b>	<b>(1.288.520.781.590)</b>	<b>(2.131.216.394.841)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>661.272.474.583</b>	<b>615.995.671.064</b>	<b>2.537.290.279.680</b>	<b>2.477.167.353.204</b>	<b>1.931.165.156.910</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	<b>(239.523.205.514)</b>	<b>(209.972.751.361)</b>	<b>(993.298.500.196)</b>	<b>(905.750.667.916)</b>	<b>(595.939.695.578)</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>421.749.269.069</b>	<b>406.022.919.703</b>	<b>1.543.991.779.484</b>	<b>1.571.416.685.288</b>	<b>1.335.225.461.332</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN</b>					
Penghasilan bunga	2.636.561.306	3.171.651.102	14.960.608.236	8.044.748.541	27.305.806.455
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(466.035.094)	3.725.663.483	4.383.672.982	(6.463.527.389)	1.753.620.682
Kerugian penjualan aset tetap	(90.512.289)	(9.455.458)	(249.118.437)	(26.775.755)	(73.715.924)
Beban bunga dan keuangan	(187.026.720.841)	(188.632.233.153)	(774.095.787.685)	(816.953.925.267)	(696.107.558.682)
Lain – lain - bersih	5.348.280.140	2.408.887.889	12.585.947.803	32.986.071.772	191.789.866.531
<b>Beban Lain-Lain – Bersih</b>	<b>(179.417.402.200)</b>	<b>179.335.486.137)</b>	<b>(742.414.677.101)</b>	<b>(782.413.408.098)</b>	<b>(475.331.980.938)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK</b>					
<b>PENGHASILAN</b>	<b>242.331.866.869</b>	<b>226.687.433.566</b>	<b>801.577.102.383</b>	<b>789.003.277.190</b>	<b>859.893.480.394</b>
Beban pajak final	-	3.034.291.274	12.803.021.495	8.428.716.103	11.873.736.387
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>					
<b>PENGHASILAN</b>	<b>242.331.866.869</b>	<b>223.653.142.292</b>	<b>788.774.080.888</b>	<b>780.574.561.087</b>	<b>848.019.744.007</b>

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022 <sup>*)</sup>	31 Maret 2021 <sup>*)</sup>	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>BEBAN</b>					
<b>(PENGHASILAN)</b>					
<b>PAJAK</b>					
Pajak kini	57.915.129.790	38.186.393.147	125.037.144.219	95.168.745.184	81.428.362.483
Pajak tangguhan	797.297.960	3.415.840.994	(7.641.666.526)	5.728.240.463	90.541.288.125
Beban Pajak – Bersih	58.712.427.750	41.602.234.141	117.395.477.693	100.896.985.647	171.969.650.608
<b>LABA TAHUN</b>					
<b>BERJALAN</b>	<b>183.619.439.119</b>	<b>182.050.908.151</b>	<b>671.378.603.195</b>	<b>679.677.575.440</b>	<b>676.050.093.399</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI)</b>					
<b>KOMPREHENSIF</b>					
<b>LAIN</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	377.262.681.230	-
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	1.704.925.376	2.047.955.255	7.781.051.155	(37.726.268.123)	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	-	-	3.047.243.628	(6.931.953.262)	(12.759.760.988)
	-	-	(788.971.406)	1.496.134.341	2.999.939.100
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	613.944.542	2.961.411.594	1.344.292.759	940.440.721	(3.446.655.747)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK</b>	<b>2.318.869.918</b>	<b>5.009.366.849</b>	<b>11.383.616.136</b>	<b>335.041.034.907</b>	<b>(13.206.477.635)</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>185.938.309.037</b>	<b>187.060.275.000</b>	<b>682.762.219.331</b>	<b>1.014.718.610.347</b>	<b>662.843.615.764</b>
Jumlah Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	155.726.905.964	157.162.603.345	578.928.827.717	578.003.431.371	591.495.494.441
Kepentingan non-pengendali	27.892.533.155	24.888.304.806	92.449.775.478	101.674.144.069	84.554.598.958
	183.619.439.119	182.050.908.151	671.378.603.195	679.677.575.440	676.050.093.399
Jumlah Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	158.045.775.882	162.171.970.193	590.018.588.786	913.116.358.511	578.843.815.708
Kepentingan non-pengendali	27.892.533.155	24.888.304.807	92.743.630.545	101.602.251.836	83.999.800.056
	185.938.309.037	187.060.275.000	682.762.219.331	1.014.718.610.347	662.843.615.764

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2022 <sup>*)</sup>	31 Maret 2021 <sup>*)</sup>	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM (Rupiah penuh) Dasar	32	50	119	183	187

\*) Tidak diaudit

Pada 2021 Perseroan melakukan pembagian dividen sejumlah Rp 1.964.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah) per lembar saham atau sejumlah Rp1.155.293.540.000 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah). Pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen diatas adalah PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi masing-masing sebesar Rp491.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dan Rp664.293.540.000 (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah).

### 3. RASIO KEUANGAN

(dalam Persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	4,59%	11,00%	-7,30%	-12,89%
Laba Kotor	7,35%	2,43%	28,27%	30,29%
Jumlah Aset	-1,03%	8,73%	4,69%	40,65%
Jumlah Liabilitas	-3,36%	-1,78%	-3,91%	40,11%
Jumlah Ekuitas	4,08%	42,12%	46,27%	43,32%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	23,62%	19,18%	20,95%	21,17%
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan terhadap total asset konsolidasian	6,72%	5,42%	5,83%	6,63%
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas konsolidasian	20,43%	17,30%	24,34%	38,67%
Pendapatan / Jumlah aset	28,47%	28,70%	28,11%	31,75%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	17,90%	16,06%	18,05%	16,64%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,10%	4,61%	5,07%	5,28%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	15,48%	14,73%	21,19%	30,83%
Pendapatan komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	18,12%	16,33%	26,95%	16,32%
Pendapatan komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap total asset konsolidasian	5,16%	4,69%	7,58%	5,18%
Beban penjualan dan pemasaran konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	1,27%	1,17%	1,04%	0,72%
Beban umum dan administrasi konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	23,34%	23,76%	24,05%	14,67%
Laba Kotor setelah beban penjualan dan pemasaran konsolidasian terhadap pendapatan konsolidasian	63,17%	59,53%	64,74%	46,82%
EBITDA terhadap pendapatan konsolidasian	55,59%	49,88%	51,32%	37,58%

(dalam Persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2022 <sup>*)</sup>	2021	2020	2019
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman (Interest Coverage Ratio)	304,98%	269,33%	236,53%	219,32%
Utang berbunga konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	160,91%	173,22%	224,65%	389,15%
Utang berbunga konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	52,96%	54,21%	53,79%	66,69%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net debt to equity ratio)	145,72%	149,99%	209,22%	323,84%
Total Liabilitas / Total Ekuitas (DER)	203,83%	219,53%	317,64%	483,55%
Total Liabilitas / Total Aset (DAR)	67,09%	68,70%	76,06%	82,86%
Total Liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	134,69%	144,19%	257,38%	338,60%
Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Lancar	100,94%	100,24%	143,81%	117,36%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	178,43%	219,74%	144,61%	144,42%
Margin Laba Kotor terhadap pendapatan konsolidasian	64,45%	60,70%	65,78%	47,54%

\*) Tidak diaudit

#### 4. RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

##### PT Mora Telematika Indonesia Tbk - Konsolidasi

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Net Debt to Equity Ratio (Utang berbunga bersih / Jumlah Ekuitas)	Maksimal 500%	149,99%
Interest Coverage Ratio (EBITDA to Interest)	Minimal 100%	269,33%

##### PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Rasio Debt dibanding Equity dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	156,54%
Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts) dibanding Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)	Maksimal 400%	373,35%
Rasio Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) dibanding Interest Expense	Minimal 110%	275,73%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 100%	327,96%
Current Ratio	Minimal 100%	107,40%

### PT Indo Pratama Teleglobal

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
<i>Current Ratio</i>	Minimal 100%	118,14%
Rasio <i>Interest Bearing Debts (Net Debts)</i> dibanding <i>Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)</i>	Maksimal 400%	145,79%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	Minimal 120%	479,99%

### PT Palapa Ring Barat

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
Rasio <i>Debt</i> dibanding <i>Equity</i> dan Utang Pemegang Saham	Maksimal 300%	53,26%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	Minimal 100%	157,51%

### PT Palapa Timur Telematika

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2021
<i>Current Ratio</i>	Minimal 100%	244,82%
Rasio <i>Interest Bearing Debts (Net Debts)</i> dibanding Utang Pemegang Saham dan <i>Equity</i>	Maksimal 220%	119,02%
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	Minimal 100%	145,12%

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian utang yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang di tetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasi.*

### 1. UMUM

PT Mora Telematika Indonesia (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dari Daniel Parganda Marpaung, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022.

Perseroan merupakan salah satu dari tiga penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta teratas di Indonesia dari segi total panjang dan kapasitas jaringan tulang punggung menurut Analysys Mason, dengan panjang jaringan sekitar 51.749 km, termasuk jaringan domestik daratan sepanjang 14.872 km, jaringan bawah laut sepanjang 12.689 km, dan jaringan akses sepanjang 24.188 km, serta total kapasitas 21.000G. Selain itu, jaringan Perseroan mencakup jaringan *Fiber-to-the-Home* (“FTTH”), yang melewati sekitar 413.025 rumah tangga di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontiana, Bali, dan berbagai kota lainnya di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021. Per tanggal 31 Desember 2021, solusi *Fiber-to-the-X* (“FTTX”) Perseroan menyediakan koneksi di 216 gedung dan kepada 6.700 entitas swasta dan pemerintah (di luar operator telekomunikasi). Perseroan mengoperasikan 385 titik kehadiran (*point of presence*, “POP”), yang mencakup tujuh dari sembilan wilayah utama di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021. Menurut Submarine Cable Map, Perseroan memiliki satu dari delapan kabel bawah laut internasional yang ada dengan titik pendaratan di Indonesia.

Indikator ekonomi makro dan demografi Indonesia, sebagai merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, menunjukkan permintaan yang kuat atas layanan telekomunikasi di masa depan. Seiring dengan pertumbuhan pasar telekomunikasi konsumen maupun korporasi yang diiringi dengan kenaikan penyerapan layanan data bernilai tinggi oleh pengguna, permintaan atas infrastruktur telekomunikasi seperti serat optik dan pusat data diperkirakan akan menguat. Sebagai pemain kunci dalam masa depan digital Indonesia, Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk menangkap permintaan yang semakin menguat tersebut. Menurut Analysys Mason, pasar layanan telekomunikasi wholesale Indonesia, terutama terdiri dari infrastruktur serat optik dan saluran, diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan pesat dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 16,6% dari 2021 hingga 2026, dan diperkirakan akan mencapai Rp22,5 triliun pada tahun 2026. Pasar layanan telekomunikasi retail, yang terutama terdiri dari layanan *Fiber-to-the-X* (“FTTX”) dan pusat data, diperkirakan akan mencapai Rp92,6 triliun pada tahun 2026,

menggambarkan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 10,5% dari tahun 2021 hingga 2026, menurut Analysys Mason.

Perseroan menawarkan serangkaian luas produk dan layanan, termasuk konektivitas, pusat data, grosir, ritel, korporasi, serta konsesi, melayani seluruh segmen utama pasar telekomunikasi di Indonesia. Perseroan menawarkan layanan berikut ini di keempat segmen pelanggannya: Telekomunikasi, *Wholesale*, *Retail & Enterprise*, dan Lain-lain. Perseroan meyakini bahwa berkat penawaran produk yang komprehensif dan pengalaman layanan berkualitas, Perseroan menikmati tingkat perpanjangan yang tinggi dan tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) yang rendah di seluruh segmen pelanggan Perseroan. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) bulanan di segmen Telekomunikasi, *Wholesale*, *Retail & Enterprise* Perseroan secara berturut-turut adalah 0,0%, 0,3%, dan 0,3% (0,5% untuk Segmen *Retail* dan 0,0% untuk Segmen *Enterprise*).

Perseroan memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi di seluruh segmen Telekomunikasi, *Wholesale*, dan *Retail & Enterprise*, mulai dari perusahaan seluler regional dan operator serat optik terkemuka hingga perusahaan multinasional. Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 110.000 pelanggan secara keseluruhan, termasuk lebih dari 30 klien perusahaan multinasional terkemuka. Berkat rekam jejak Perseroan yang telah terbukti sebagaimana terlihat dalam keberhasilan Perseroan melaksanakan proyek di wilayah geografis yang menantang, Perseroan dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan proyek strategis utama, seperti Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Barat, yang secara berturut-turut berhasil dirampungkan pada tahun 2018 dan 2019. Di samping itu, Perseroan telah mulai menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur tiang dan saluran bersama di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 di seluruh Indonesia.

Perseroan juga dibimbing oleh pemegang saham strategis Perseroan, Smartfren, satu-satunya penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia yang beroperasi murni menggunakan jaringan 4G dan juga telah mengumumkan peluncuran layanan 5G pada tahun 2022. Berkolaborasi dengan Smartfren, Perseroan telah meluncurkan produk seperti True QuadPlay, layanan internet yang memberikan akses kepada layanan dari Perseroan sendiri dan Smartfren, seperti internet pita lebar berkecepatan tinggi Oxygen.id, saluran TV kabel premium, telefoni tetap dan bergerak, dan IPTV.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat. Laju pertumbuhan pendapatan non-konsesi mencapai 33,0% selama tahun 2019 hingga 2020. Menurut Analysys Mason, laju pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan perusahaan sejawat yang dapat diperbandingkan dengan Perseroan. Perseroan juga telah menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat neraca Perseroan, melalui peningkatan total aset dari Rp12.795,9 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 hingga Rp14.565,4 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta menurunkan rasio utang bersih terhadap EBITDA (*Net Debt to EBITDA*) dari 4,65x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 ke 3,28x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp4.180,1 miliar dan EBITDA Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp2.084,9 miliar.

Di masa depan, Perseroan akan berupaya memperluas jaringan tulang punggung serat optik domestik dan internasional dengan cadangan proyek yang ekstensif untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar. Perseroan juga berencana mempercepat kegiatan konstruksi saluran dan tiang Perseroan untuk mencakup kota-kota terpilih, yang akan dengan segera memperoleh akses ke jaringan serat optik Perseroan serta layanan terbaru (seperti koneksi 5G) pada saat dirampungkan.

Pada segmen *Retail & Enterprise*, Perseroan berupaya memanfaatkan laju Perseroan yang mapan di segmen pita lebar ritel dengan mengembangkan jaringan FTTH Perseroan serta meningkatkan basis pelanggan ritel, di samping mengembangkan Segmen *Enterprise* Perseroan dengan mengembangkan layanan Awan dan kapabilitas pusat data yang tersedia. Dengan pertimbangan tersebut di atas, Perseroan juga bermaksud senantiasa memperbaharui kapabilitas teknis untuk memaksimalkan efektivitas biaya sekaligus berupaya mencapai keunggulan operasional. Pada tahun 2021, Perseroan merampungkan akuisisi PT Indo Pratama Teleglobal (“IPT”), yang menyediakan layanan *Very Small Aperture Terminal* (“VSAT”), yang akan melengkapi jaringan tulang punggung serat optik Perseroan yang telah ada. Perseroan juga berencana berkolaborasi lebih lanjut dengan Smartfren, serta menjalin dan mengembangkan hubungan strategis dengan para pemimpin industri lainnya, seperti mitra konten dan penyedia teknologi dan layanan Awan.

### Perkembangan Terkini

Pada tanggal 31 Januari 2020, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama operasi dengan pemerintah kota Semarang untuk Penyediaan Prasarana Pasif Telekomunikasi sehubungan dengan pembangunan dan penyelenggaraan saluran dan tiang bersama di Kota Semarang, dengan estimasi saluran bersama sepanjang 506.064 meter dan estimasi pembangunan sebanyak-banyaknya 230 tiang. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan menyelesaikan saluran bersama Semarang Tahap I dengan total 25.356 meter dan 7 tiang.

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama operasi dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (BPS) sehubungan dengan penyediaan prasarana telekomunikasi pasif untuk kota Semarang. Kedua belah pihak akan mendirikan KSO BPS-Moratelindo untuk menyelenggarakan proyek pembangunan dan penyelenggaraan prasarana telekomunikasi pasif untuk kota Semarang selama jangka waktu 20 tahun. Perseroan dan BPS secara berturut-turut akan menerima bagi hasil sebesar 80% dan 20% dari pendapatan bruto yang dihasilkan proyek tersebut.

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

				IKU Operasional		
				2019	2020	2021
<b>Umum</b>	<b>Total Jaringan Tulang Punggung</b>	<b>Km</b>		<b>23.601</b>	<b>25.951</b>	<b>27.561</b>
	Bawah laut	Km		11.328	12.673	12.689
	Darat	Km		12.273	13.278	14.872
	<b>Total akses</b>	<b>Km</b>		<b>16.841</b>	<b>22.565</b>	<b>24.188</b>
	<b>Total Panjang Kabel</b>	<b>Km</b>		<b>40.442</b>	<b>48.516</b>	<b>51.749</b>
<b>Enterprise/ Residensial</b>	Kota yang tercakup			4	10	12
	Gedung			215	216	216
	Pelanggan <i>Enterprise (Large)</i> <sup>(1)</sup>			1.120	1.518	1.881
	Pelanggan <i>Enterprise (FTTB)</i> <sup>(2)</sup>			915	1.113	1.254
	Pelanggan <i>Enterprise (UKM)</i> <sup>(3)</sup>			2.024	2.888	3.565
	<b>Pelanggan <i>Enterprise</i></b>			<b>4.059</b>	<b>5.519</b>	<b>6.700</b>
	ARPU <i>Enterprise (Large)</i>	Rp ‘000		15.292	13.948	13.221
	ARPU FTTB <i>Enterprise</i>	Rp ‘000		5.200	5.183	4.698
	ARPU <i>Enterprise (UKM)</i>	Rp ‘000		1.536	1.355	1.491

		IKU Operasional			
		2019	2020	2021	
	Tingkat perpindahan pelanggan <i>Enterprise</i> bulanan – campuran	%	0,07%	0,05%	0,04%
	<i>Homes passed</i>	'000	114,5	244,2	413,0
	Pelanggan	'000	44,9	72,6	112
	Tingkat penetrasi rumah tangga	%	39,2%	29,7%	27,1%
	ARPU FTTH Residensial	Rp '000	179,3	187,3	273,7
	Tingkat perpindahan pelanggan Residensial bulanan	%	0,67%	0,67%	0,52%
<b>Proyek Palapa Ring<sup>4</sup></b>	<b>Paket Barat</b>				
	Bawah laut	Km			1.727
	Darat	Km			404
	<b>Paket Timur</b>				
	Bawah laut	Km			4.557
	Darat	Km			2.446
<b>Lain-lain</b>	Lokasi VSAT		342	651	822
	Jumlah pusat data		6	6	6
	Kapasitas pusat data	MW	1,9	2,2	2,2
	Kapasitas pusat data	Rak	381	514	547
	Utilisasi Rak	%	69,8%	59,1%	70,0%

Catatan:

- (1) Pelanggan *Large Enterprise* membeli solusi konektivitas *bundled* yang disesuaikan secara khusus berdasarkan kebutuhan masing-masing lembaga.
- (2) Pelanggan *Enterprise* menengah/FTTB terutama membeli koneksi serat optik melalui FTTB dan terutama terdiri dari gedung bertingkat tinggi.
- (3) Perilaku pelanggan UKM lebih menyerupai pelanggan ritel, dengan koneksi yang dilakukan melalui FTTH karena kegiatan usaha keluarga dilakukan di lokasi perumahan.
- (4) Total panjang Proyek Palapa Ring telah dicakup dalam total panjang jaringan tulang punggung sepanjang 27.561 km.

### Tren segmen tertentu

Sehubungan dengan segmen *Enterprise*, Indikator Kerja Utama (“IKU”) terkait gedung terutama dipengaruhi oleh pergeseran ke pengaturan bekerja dari rumah (WFH) akibat pandemi COVID-19. ARPU Perseroan secara umum mengalami penurunan akibat strategi Perseroan yang menawarkan *bandwidth* yang lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah. Akan tetapi, hal ini tidak memengaruhi total pendapatan Perseroan, yang selama ini mengalami tren peningkatan selama periode dari tahun 2019 hingga 2021. Strategi tersebut juga mendukung Perseroan dalam memperoleh pelanggan baru di tengah pasar yang kompetitif.

Sehubungan dengan Segmen Residensial, IKU terkait kota-kota yang tercakup mengalami peningkatan selama periode dari tahun 2019 hingga 2021 berkat pengembangan FTTH yang disebabkan oleh meningkatnya pengadopsian pengaturan bekerja dari rumah (WFH) akibat pandemi COVID-19. Cakupan kota yang tercakup dalam segmen Residensial Perseroan mengalami kenaikan tiga kali lipat

dari 4 kota menjadi 12 kota selama tahun 2019 hingga 2021, dengan sebagian besar penggelaran kabel awal terlaksana pada tahun 2020 dan fokus yang lebih besar pada penetrasi dalam kota pada tahun 2021. Keberhasilan strategi ekspansi Perseroan untuk FTTH tercermin dalam IKU *homes passed* Perseroan yang mengalami kenaikan hampir empat kali lipat sejak tahun 2019 hingga 2021, mengingat Perseroan memperkirakan peningkatan ketergantungan pada jalur digital akan tetap bertahan pasca-pandemi. Pada saat yang sama, tingkat penetrasi rumah tangga Perseroan tetap mendekati 30% per 31 Desember 2021, yang merupakan indikasi positif atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan tingkat utilisasi jaringan yang sehat di samping pertumbuhan yang kuat dalam segmen ini. IKU terkait ARPU FTTH Residensial, yang terus meningkat selama periode dari tahun 2019 hingga 2021 juga mencerminkan ketergantungan pada jalur digital dan permintaan terhadap jasa Perseroan yang tetap berlanjut.

Perseroan mengakuisisi IPT pada tahun 2021 dan menerapkan IKU yang terkait dengan situs VSAT pada tahun 2021 untuk menangkap pasar bagi konektivitas telekomunikasi di wilayah terpencil. Perseroan mengalami penurunan utilisasi rak pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh penambahan non-rutin (*one-off*) sebanyak 133 rak di tahun yang sama, yang telah kembali normal pada tahun 2021 hingga mencapai 70%.

### 3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan selama ini dipengaruhi, dan akan tetap dipengaruhi, oleh sejumlah faktor penting, termasuk faktor-faktor berikut ini:

- ekspansi jaringan, belanja modal, dan ketersediaan pendanaan;
- permintaan atas produk dan layanan Perseroan serta harga;
- biaya pemeliharaan dan perbaikan jaringan;
- kemampuan memperoleh dan memperbaharui izin dan persetujuan;
- tingkat utang dan biaya untuk memenuhi kewajiban utang Perseroan;
- fluktuasi beban bunga;
- teknologi yang berkembang dan kenaikan terhadap beban amortisasi dan depresiasi Perseroan;
- pandemi COVID-19;
- perselisihan kontraktual yang berjalan dapat memengaruhi kinerja operasi di masa depan apabila putusan yang dijatuhkan merugikan Perseroan;
- peraturan pemerintah; dan
- pajak.

#### ***Ekspansi jaringan, belanja modal, dan ketersediaan pendanaan***

Bisnis Perseroan merupakan bisnis padat modal, mengingat dibutuhkan modal yang substansial untuk membangun dan mengembangkan jaringan dan tulang punggung telekomunikasi Perseroan. Penyampaian kebanyakan jaringan, produk dan layanan Perseroan bersifat pada modal dan Perseroan telah menanamkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur jaringan dan teknologi untuk menyediakan layanan Perseroan. Di masa depan, Perseroan mungkin membutuhkan modal dalam jumlah yang signifikan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mendistribusikan produk dan layanan Perseroan, untuk mengembangkan produk dan layanan baru, untuk memperoleh izin dan menanamkan investasi dalam peluang usaha baru. Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, belanja modal Perseroan terkait aset tetap mencapai Rp1.864,3 miliar, Rp1.614,3 miliar, dan Rp1.014,6 miliar. Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Perseroan sangat padat modal, demikian juga rencana Perseroan untuk mengembangkan jaringan Perseroan ke berbagai kota di seluruh Indonesia melalui strategi pembuatan saluran dan tiang telekomunikasi Perseroan. Keberhasilan Perseroan tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan mendanai perubahan teknologi yang pesat dalam industri Perseroan, termasuk perubahan dalam teknologi kabel serat optik, dengan cara senantiasa mengembangkan, memodernisasi, dan

memperbaharui teknologi Perseroan. Perubahan ini mungkin mengharuskan Perseroan untuk mengganti dan/atau memperbaharui infrastruktur jaringan Perseroan, dan sebagai akibatnya Perseroan harus mengeluarkan belanja modal tambahan (yang jumlahnya mungkin signifikan) guna mempertahankan standar teknologi terkini dan tetap mampu bersaing terhadap produk dan layanan baru.

Jumlah dan waktu terkait kebutuhan modal Perseroan di masa depan juga tergantung pada jadwal dan estimasi biaya untuk membangun, mengembangkan dan/atau memperbaharui jaringan Perseroan, untuk memperoleh izin dan hak, serta biaya terkait perubahan teknik dan desain. Dalam hal kebutuhan modal Perseroan melampaui sumber daya yang tersedia, Perseroan harus berupaya memperoleh pembiayaan berbasis utang atau ekuitas tambahan. Pembiayaan berbasis utang tambahan dapat meningkatkan beban bunga Perseroan dan mungkin mewajibkan Perseroan untuk mematuhi pembatasan lebih lanjut berdasarkan perjanjian pembiayaan Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tambahan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kondisi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas Perseroan, kondisi pasar secara umum bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor telekomunikasi, dan kondisi politik serta kondisi lainnya di pasar tempat Perseroan beroperasi di masa depan. Kemampuan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal dan memperoleh pembiayaan pada waktu diperlukan, dengan ketentuan yang dapat diterima, atau sama sekali, merupakan faktor kunci dalam menjalankan usaha Perseroan.

#### ***Permintaan atas produk dan layanan Perseroan serta harga***

Kinerja operasi Perseroan tergantung pada kelangsungan sukses dan pertumbuhan serta permintaan atas berbagai produk dan layanan Perseroan. Bagi pelanggan telekomunikasi, *wholesale, retail & enterprise*, Perseroan menarik dan mempertahankan pelanggan terutama berdasarkan jaringan berkualitas tinggi dan kinerja jaringan, SLA, layanan dengan skala yang dapat disesuaikan, dan harga. Selain itu, bagi pelanggan ritel, Perseroan memperkuat pengenalan merek Perseroan, Oxygen, dengan menawarkan program promosi bagi pelanggan baru dan untuk mempertahankan pelanggan guna memitigasi perpindahan pelanggan (*churn*). Perseroan meyakini bahwa pasar telekomunikasi Indonesia diuntungkan oleh tarif yang relatif stabil berkat perubahan dalam peta persaingan. Selama tiga tahun buku terakhir, kenaikan volume data telah membawa dampak positif terhadap pendapatan Perseroan. Selagi Perseroan mengembangkan penawaran produk dan layanan Perseroan, termasuk yang terkait dengan Segmen *Retail & Enterprise*, dan selagi Perseroan memperluas penawaran Perseroan di pasar baru, kesuksesan Perseroan dalam menghasilkan pendapatan tambahan sangat tergantung pada penerimaan dan retensi pelanggan.

#### ***Biaya pemeliharaan dan perbaikan jaringan***

Pengoperasian, administrasi, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan dan sistem Perseroan membutuhkan koordinasi dan integrasi peralatan dan teknologi perangkat lunak dan keras yang canggih dan sangat terspesialisasi, serta investasi dan belanja modal serta beban operasi yang signifikan. Meskipun Perseroan berupaya menggunakan teknologi canggih untuk memastikan keandalan jaringannya, jaringan Perseroan tetap menghadapi risiko yang bersifat inheren bagi sistem jaringan telekomunikasi berskala besar, termasuk, antara lain, cacat desain, kerusakan peralatan dan jaringan, dan kerusakan fisik terhadap jaringan dan peralatan Perseroan akibat bencana alam dan faktor manusia, termasuk kerusakan yang disebabkan oleh kapal barang dan kapal ikan, termasuk reklamasi tanah. Akibat faktor-faktor tersebut, sistem Perseroan mungkin tidak dapat tetap berfungsi sebagaimana diharapkan dengan cara yang efektif dari segi biaya. Terlebih lagi, masa manfaat aktual sistem Perseroan mungkin berbeda dari estimasi Perseroan, dan ketika elemen-elemen jaringan, infrastruktur terkait, aset tetap, dan sistem TI Perseroan menjadi usang atau mencapai akhir umur desainnya, beban operasi Perseroan dapat mengalami kenaikan signifikan, tergantung pada sifat dan tingkat perbaikan atau penggantian yang dibutuhkan. Pada tahun-tahun buku 2019, 2020, dan 2021, Perseroan secara berturut-turut mengeluarkan biaya sebesar Rp94,3 miliar, Rp285,1 miliar, dan

Rp244,3 miliar untuk beban perbaikan dan pemeliharaan jaringan serta beban operasi jaringan lainnya. Sehubungan dengan sebagian operasinya, Perseroan mengalihkan manajemen infrastruktur dan jaringan Perseroan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan, kepada pemasok dan kontraktor pihak ketiga di berbagai wilayah. Perseroan memperkirakan bahwa persentase beban operasi dan beban pemeliharaan relatif Perseroan terhadap jaringan secara keseluruhan akan menurun seiring dengan penyesuaian skala Perseroan.

#### ***Kemampuan memperoleh dan memperbaharui izin dan surat izin***

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan izin dan surat izin yang diberikan. Izin dan surat izin operasional tersebut tunduk pada pemeriksaan, interpretasi, modifikasi, atau pengakhiran oleh otoritas yang berwenang. Otoritas berwenang yang terkait mungkin mengambil tindakan yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, dan terdapat kemungkinan bahwa izin operasi dan persetujuan yang dimiliki Perseroan saat ini tidak dapat diperpanjang, atau tidak dapat diperpanjang dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial oleh Perseroan. Memenuhi seluruh ketentuan yang diperlukan untuk memperoleh izin atau surat izin tidak menjamin bahwa izin atau surat izin tersebut akan diberikan. Masalah administratif atau masalah lainnya dapat menyebabkan kegagalan memperoleh izin atau surat izin, mengingat otoritas yang berwenang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah suatu izin atau surat izin akan diberikan. Kegagalan memperoleh atau memperpanjang izin atau surat izin tersebut atau untuk mematuhi syarat dan ketentuan (termasuk sehubungan dengan batasan kepemilikan asing) yang diatur dalam izin atau surat izin yang berwenang mungkin menyebabkan Perseroan dapat dikenakan sanksi, termasuk dalam bentuk surat peringatan, pembekuan atau pencabutan izin Perseroan, penutupan sementara jaringan atau layanan yang terkait, denda, atau sanksi administratif lainnya.

#### ***Tingkat utang dan biaya untuk memenuhi kewajiban utang Perseroan***

Pinjaman merupakan sumber pendanaan Perseroan yang signifikan untuk membiayai ekspansi jaringan. Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, total utang Perseroan (tanpa mengurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi) secara berturut-turut mencapai Rp8.626,2 miliar, Rp7.278,9 miliar, Rp7.955,2 miliar.

Secara historis, Perseroan mengandalkan pinjaman, termasuk utang bank, penerbitan pembiayaan berbasis utang kepada publik dan pembiayaan pemasok, dan diperkirakan akan tetap demikian di masa depan. Kinerja operasi Perseroan dipengaruhi oleh jumlah beban bunga yang timbul terkait utang Perseroan. Perubahan merugikan di pasar keuangan dan/atau tingkat suku bunga dapat memengaruhi ketersediaan utang dan meningkatkan jumlah pembayaran bunga dan pokok pinjaman Perseroan, yang pada gilirannya akan memengaruhi profitabilitas Perseroan. Perseroan akan senantiasa memantau kondisi pasar dan kinerja usaha dalam upaya mengoptimalkan struktur modal Perseroan.

#### ***Fluktuasi beban bunga***

Beban bunga merupakan komponen signifikan dalam beban keuangan Perseroan dalam masing-masing tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2020, dan 2021. Tingkat suku bunga Perseroan pada tahun 2019, 2020, dan 2021, secara berturut-turut berkisar antara 9,75% hingga 11,5%, 9,5% hingga 11,0% , dan 8,5% hingga 11,0%. Persentase utang dengan suku bunga mengambang yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah 65% dengan suku bunga mengambang dan 35% dengan suku bunga tetap. Apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 1%, beban bunga Perseroan akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 10%. Tingkat suku bunga Perseroan mengalami penurunan selama dua tahun terakhir akibat penurunan tingkat suku bunga, terutama Suku Bunga Acuan Bank Indonesia, yang digunakan sebagai acuan bagi utang bank Perseroan, akibat langkah-langkah yang diterapkan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sebagian besar utang Perseroan tunduk pada suku bunga mengambang, yang telah menyebabkan, dan

diperkirakan akan tetap menyebabkan fluktuasi beban bunga Perseroan sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga.

### ***Teknologi yang berkembang dan kenaikan terhadap beban amortisasi dan depresiasi Perseroan***

Salah satu karakteristik industri telekomunikasi adalah perubahan teknologi, termasuk kenaikan laju perubahan sistem yang ada, standar industri, dan perbaikan berkesinambungan dalam kapasitas dan kualitas teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi baru, peralatan Perseroan mungkin perlu diganti atau diperbaharui untuk mempertahankan posisi kompetitif Perseroan. Selain itu, teknologi Perseroan dapat menjadi usang lebih cepat dari perkiraan. Akan tetapi, masa manfaat peralatan Perseroan saat ini berkisar antara empat hingga delapan tahun, yang memitigasi dampak perubahan teknologi. Perseroan juga perlu memperoleh teknologi baru yang diperlukan untuk bersaing dalam situasi yang berkembang pesat tersebut dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial.

### ***Pandemi COVID-19***

Perlambatan ekonomi global dan dampak negatif terhadap pasar keuangan utama yang disebabkan oleh penyebaran pandemi virus corona (“COVID-19”) telah menyebabkan peningkatan volatilitas nilai instrumen keuangan, gangguan perdagangan, gangguan pada kegiatan operasional perusahaan, ketidakstabilan pasar modal, kenaikan volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan pengetatan likuiditas di sektor-sektor tertentu di Indonesia, termasuk industri telekomunikasi. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia sangat tergantung pada mitigasi atas ancaman yang dihadirkan oleh pandemi COVID-19, serta langkah-langkah fiskal dan langkah-langkah lainnya yang telah dan akan diambil oleh otoritas pemerintah. Langkah-langkah, tindakan, dan peristiwa tersebut di atas berada di luar kendali Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami dampak signifikan dari pandemi COVID-19. Perseroan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home*, ‘WFH’) bagi semua karyawan, yang sesuai dengan peraturan Pemerintah mengenai pen jagaan jarak fisik. Perseroan juga menetapkan kebijakan pemantauan kesehatan karyawan, menyediakan persediaan desinfektan dan mengadakan program vaksinasi bagi karyawan Perseroan, keluarga dan orang-orang lainnya yang berinteraksi dengan karyawan Perseroan. Agar kegiatan usaha dapat tetap berlanjut, Perseroan mengadopsi rapat virtual, tanda tangan dan persetujuan internal digital melalui mekanisme daring, pelatihan melalui webinar, dan pemantauan secara daring. Penerapan pengaturan tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Akibat pembatasan yang ditetapkan atas jam kerja lembaga keuangan, transaksi penerimaan dan pembayaran Perseroan mengalami dampak, tetapi tidak material terhadap kondisi keuangan dan operasi Perseroan. Sebagian pelanggan Perseroan, terutama pelanggan yang bergerak di sektor pariwisata & perhotelan, mengajukan permohonan keringanan pembayaran biaya internet per bulan dengan pertimbangan penurunan lalu lintas internet. Keringanan pembayaran per bulan yang disetujui tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan operasi Perseroan.

### ***Perselisihan kontraktual yang berjalan dapat memengaruhi kinerja operasi di masa depan apabila putusan yang dijatuhkan merugikan Perseroan.***

Perseroan menghadapi perselisihan kontraktual yang berjalan, yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan operasi Perseroan apabila putusan yang dijatuhkan merugikan Perseroan. Hasil gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum secara inheren bersifat tidak pasti, dan dalam keadaan bagaimanapun, pembelaan terhadap gugatan tersebut dapat memakan biaya dan waktu serta dapat mengalihkan upaya dan sumber daya manajemen dan personel Perseroan lainnya secara signifikan.

### ***Peraturan Pemerintah***

Perseroan tunduk pada pengawasan dan pengaturan yang ekstensif dari badan pengatur Indonesia, termasuk Kominfo dan badan pemerintah lainnya yang terkait. Pengawasan dan pengaturan tersebut

meliputi izin dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten (dan izin dari otoritas pemerintah nasional maupun daerah sebagaimana diwajibkan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah), tergantung dari wilayah penggelaran jaringan. Peraturan dan pengawasan pemerintah tersebut, serta perubahan undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah di masa depan (atau perubahan interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dapat memengaruhi Perseroan, pesaing Perseroan atau industri secara umum, memberikan pengaruh yang kuat pada cara Perseroan beroperasi pada saat ini dan di masa depan. Pengadopsian undang-undang atau peraturan baru, atau perubahan dalam kerangka kerja hukum yang ada pada tingkat pusat, daerah, atau lokal, dapat membutuhkan penyesuaian signifikan dan berbiaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perseroan. Peraturan baru dapat menimbulkan biaya atau kebutuhan modal tambahan, membutuhkan pelaporan baru, dan berpotensi menciptakan hambatan untuk memasuki pasar baru atau untuk mengakuisisi lini usaha baru. Peraturan pemerintah juga dapat menyebabkan kenaikan beban operasi Perseroan, antara lain akibat kenaikan upah minimum yang diwajibkan di Indonesia. Kegagalan memenuhi peraturan yang berlaku saat ini atau di masa depan dapat menyebabkan pengenaan berbagai sanksi atas Perseroan, termasuk denda. Mematuhi peraturan yang berlaku merupakan proses yang memberatkan, dan perubahan di masa depan dapat meningkatkan beban operasi dan administrasi Perseroan serta membatasi pendapatan Perseroan.

### ***Perpajakan***

Profitabilitas Perseroan dipengaruhi oleh beban pajak yang ditanggung Perseroan. Tarif pajak efektif Perseroan pada tahun 2019, 2020, dan 2021, secara berturut-turut mencapai 25%, 22%, dan 22%. Pendapatan kena pajak Perseroan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan setelah dikoreksi dengan koreksi fiskal tertentu. Tarif pajak penghasilan badan Indonesia adalah 22% dari pendapatan kena pajak untuk tahun buku 2022 dan selanjutnya.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7/2021). Ketentuan UU No. 7/2021 menetapkan bahwa perusahaan tercatat berhak mendapatkan pengurangan tambahan sebesar 3% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, tunduk pada pemenuhan persyaratan berikut ini:

- a) Perusahaan merupakan perusahaan tercatat, dengan total saham yang diperdagangkan di BEI sekurang-kurangnya 40% dari total modal disetor; dan
- b) Memenuhi persyaratan tertentu lainnya. (Peraturan pelaksanaan yang mengatur persyaratan tersebut belum diterbitkan).

Berdasarkan pemenuhan ketentuan tersebut di atas, tarif pajak penghasilan badan yang berlaku akan menjadi 19% mulai tahun buku 2022 dan selanjutnya.

### ***Kebijakan Akuntansi Penting***

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian tersebut mengharuskan Perseroan membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada periode pelaporan. Perseroan menyusun estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya yang diyakini Perseroan wajar menurut kondisi yang ada. Perseroan senantiasa mengevaluasi estimasi dan pertimbangan tersebut, walaupun kondisi dan asumsi yang ada tentang perkembangan di masa depan mungkin mengalami perubahan akibat perubahan pasar atau kondisi yang berada di luar kendali Perseroan. Hasil sebenarnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut dalam asumsi yang berbeda atau dalam kondisi sebenarnya.

## **Pos-pos utama yang memengaruhi operasi Perseroan**

### Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan komponen pendapatan dalam jumlah dan persentase terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode yang dinyatakan:

Pendapatan Perseroan yang diakui dari segmen *Retail & Enterprise* dalam Prospektus ini merupakan pendapatan Perseroan dari segmen pasar ritel sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021. Perincian lebih lanjut disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

### Beban langsung

Beban langsung terdiri dari biaya penyelenggaraan telekomunikasi Perseroan seperti jaringan domestik, layanan internet, jaringan internasional dan VSAT, yang terutama terkait dengan biaya pita lebar satelit di wilayah terpencil. Selain itu, beban langsung juga timbul dari penyelenggaraan non-telekomunikasi, seperti biaya persediaan, BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) atau biaya hak operasi tahunan yang ditetapkan pemerintah, sejumlah sekitar 0,5% dari total pendapatan bruto dan kewajiban pelayanan universal (USO) yang berjumlah sekitar 1,25% dari total pendapatan bruto, biaya penyusutan dan beban konstruksi dari konsesi jasa dan proyek pelanggan. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, setiap operator jaringan telekomunikasi dan/atau operator jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi terhadap pelayanan universal. Kontribusi tersebut dapat berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan/atau kompensasi lainnya.

Beban langsung Perseroan yang diakui dari segmen *Retail & Enterprise* dalam Prospektus ini merupakan beban langsung Perseroan dari segmen pasar ritel sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021. Perincian lebih lanjut disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

### Beban Usaha

Beban usaha terdiri dari beban-beban berikut ini: beban gaji dan tunjangan, beban alih daya, terutama sehubungan dengan tenaga kerja, perbaikan dan pemeliharaan terkait pemeliharaan kabel dan peralatan, asuransi, pemasaran, sewa, komunikasi dan utilitas, penyusutan aset tetap, perjalanan dinas, imbalan kerja jangka panjang karyawan, jamuan, pajak, penyisihan piutang ragu-ragu, izin legal, amortisasi aset takberwujud, beban kantor, dan jasa profesional.

### Beban pajak

Pendapatan kena pajak dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan setelah dikoreksi dengan koreksi fiskal tertentu. Tarif pajak penghasilan badan Indonesia adalah 22% dari pendapatan kena pajak untuk tahun buku 2022 dan selanjutnya. Berdasarkan ketentuan UU No. 7/2021, perusahaan tercatat berhak mendapatkan pengurangan tambahan sebesar 3% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, tunduk pada pemenuhan persyaratan tertentu. Berdasarkan pemenuhan ketentuan tersebut di atas, tarif pajak penghasilan badan yang berlaku akan menjadi 19% mulai tahun buku 2022 dan selanjutnya.

## **Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih Perseroan**

Kenaikan dan penurunan pendapatan bersih Perseroan disebabkan oleh volume kapasitas *bandwidth* yang di jual kepada pelanggan sehingga perubahan harga dan inflasi tidak memiliki dampak material terhadap Pendapatan Perseroan. Selain itu, transaksi Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sehingga tidak terdapat dampak material atas perubahan kurs valuta asing.

#### 4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, termasuk dampak penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 71, 72 dan 73 yang telah diadopsi efektif 1 Januari 2020.

Dampak kumulatif dari penerapan awal PSAK No. 71 dan PSAK No. 72 tidak signifikan, sehingga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2020.

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Grup tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Dengan menerapkan standar ini pada tanggal 1 Januari 2020 aset hak-guna dan liabilitas sewa Grup meningkat sebesar Rp 161.892.455.825 yang terdiri dari reklasifikasi aset sewa pembiayaan sebesar Rp107.999.168.835 dan pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp53.893.286.990.

#### 5. ANALISIS KEUANGAN

##### A. Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lainnya

###### Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp414.384.931.361,- atau setara dengan 11% menjadi sebesar Rp4.180.073.066.155,- bila dibandingkan dengan Pendapatan usaha pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.765.688.134.794,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan jasa telekomunikasi Perseroan yang meningkat signifikan sebesar Rp341.696.149.280,- atau setara dengan 17% khususnya di pendapatan jasa internet dan VSAT yang masing-masing naik sebesar 30,8% dan 100% di tahun 2021. Selain itu, di tahun 2021, terdapat kenaikan permintaan volume kapasitas internet yang cukup signifikan karena adanya pergeseran *customer behavior*, diantaranya *work from home* (WFH) dan sekolah dengan sistem daring yang mana disebabkan oleh situasi pandemic COVID-19. Pergeseran *customer behavior* ini menyebabkan adanya kenaikan pendapatan, khususnya di segmen *wholesale*, *enterprise* dan *retail* sebesar 31,2% dan 39,9% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp296.693.416.957,- atau setara dengan 7,3% menjadi sebesar Rp3.765.688.134.794,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.062.381.551.751,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa seperti yang ada di tahun 2019 sebesar Rp 1.266.799.785.223,- dari jasa konsesi atas

penerapan standar akuntansi ISAK 16 mengenai “jasa konsesi”. Namun, pendapatan Perseroan selain yang berasal dari pendapatan konstruksi, tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 970.106.368.266,- atau 34,7% karena permintaan kapasitas internet yang naik secara signifikan.

### **Beban Langsung**

#### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, beban langsung Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp354.262.004.885,- atau setara dengan 27,49% menjadi sebesar Rp1.642.782.786.475,- bila dibandingkan dengan beban langsung pada 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.288.520.781.590,-. Hal tersebut terutama disebabkan penambahan atas pembangunan *backbone* dan *fiber to the home* (FTTH) *upgrade* kapasitas di tahun 2021, serta adanya revaluasi asset di akhir 31 Desember 2020, sehingga beban depresiasi naik sebesar Rp149.043.844.257,- atau setara dengan 49% menjadi Rp 453.437.321.676,- jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp167.023.778.838,-. Selain itu, biaya penyelenggaraan telekomunikasi untuk jaringan domestik, internet dan jaringan internasional, di luar VSAT, mengalami penurunan sebesar Rp 41.354.275.062 atau setara dengan 6% dikarenakan pembangunan jaringan telekomunikasi yang sudah selesai sehingga Perusahaan dapat memaksimalkan utilisasi jaringan milik sendiri.

#### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp842.695.613.251,- atau setara dengan 39,54% menjadi sebesar Rp1.288.520.781.590,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.131.216.394.841,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan beban konstruksi dari konsesi jasa dari penerapan standar akuntansi ISAK 16 mengenai “jasa konsesi”. Namun, terdapat kenaikan di beban langsung pada jaringan telekomunikasi yang sebagian besar berasal dari jaringan domestik untuk mendukung pendapatan jaringan domestik di tahun 2020. Selain itu, terdapat juga kenaikan beban penyusutan pada beban langsung tahun 2020 yang disebabkan oleh pembangunan *backbone*, *upgrade capacity* dan juga FTTH.

### **Beban Usaha**

#### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Beban usaha pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,7% hingga mencapai Rp993.298.500.196,- dari Rp905.750.667.916,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban gaji dan tunjangan, beban karyawan alih daya, dan beban penyusutan yang secara berturut-turut mengalami kenaikan sebesar Rp25.175.564.098,-, Rp26.869.174.631,-, dan Rp23.756.105.847,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan beban gaji dan karyawan alih daya terutama disebabkan oleh peluncuran FTTH dan transisi operasi perbaikan dan pemeliharaan Perseroan dari pemasok eksternal ke tim internal.

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Beban usaha pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 51,9% hingga mencapai Rp905.750.667.916,- dari Rp595.939.695.578,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan sehubungan dengan beban pemeliharaan Proyek Palapa Ring Paket Timur yang diakui penuh selama satu tahun pada tahun 2020, sementara pada tahun 2019, beban tersebut hanya diakui selama empat bulan mengingat tanggal beroperasi komersial Palapa Ring Paket Timur jatuh pada bulan Agustus 2019.

### **Beban Lain-lain Bersih**

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp39.998.730.997,- atau setara dengan 5,11% menjadi sebesar Rp742.414.677.101,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain pada 31 Desember 2020 sebesar Rp782.413.408.098,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan Keuangan sebesar Rp 42.858.137.582 atau setara dengan 5% yang disebabkan karena Perseroan sudah melunasi utang obligasi sebesar Rp 540.000.000.000 pada tahun 2020.

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban lain-lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp307.081.427.160,- atau setara dengan 64,60% menjadi sebesar Rp782.413.408.098,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp475.331.980.938,-. Peningkatan tersebut terutama yang paling signifikan disebabkan oleh beban imbalan atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 yang sudah diakui secara penuh pada tahun 2020.

### **Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan**

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,6% hingga mencapai Rp801.577.102.383,- dari Rp789.003.277.190,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan pendapatan Perseroan diimbangi oleh kenaikan depresiasi pada beban langsung dan beban operasional akibat penambahan konstruksi jaringan tulang punggung dan peningkatan kapasitas pada tahun 2021, serta pembukaan kantor cabang baru di sejumlah kota untuk mengembangkan penjualan jaringan FTTH pada tahun 2021. Hal ini juga menyebabkan kenaikan nilai aset tetap dan beban penyusutan. Beban penyusutan dalam beban langsung mengalami kenaikan sebesar Rp149.043.844.257,- atau 49%, sementara beban penyusutan dalam beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp23.756.105.847,- atau 73% dibandingkan tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 8,2% hingga mencapai Rp789.003.277.190,- dari Rp859.893.480.394,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan beban langsung penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan, serta pembagian imbalan hasil Sukuk Ijarah Tahap 1 Tahun 2019, yang diakui penuh pada tahun 2020.

**Beban pajak final**

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Beban pajak final pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 52,3% hingga mencapai Rp12.803.021.495,- dari Rp8.428.716.103,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan dalam pengakuan pendapatan konstruksi dari proyek pelanggan, karena Perseroan mengakui beban pajak final sehubungan dengan pendapatan konstruksi (pendapatan tidak berulang). Selain itu, kenaikan pajak juga disebabkan oleh konsolidasi IPT pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Beban pajak final pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 29,4% hingga mencapai Rp8.428.716.103,- dari Rp11.873.736.387,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 mengingat pengakuan beban pajak final setelah penyelesaian proyek pelanggan, sementara pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, proyek-proyek Perseroan masih berjalan dan dalam tahap konstruksi.

**Beban pajak - bersih**

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Beban pajak - bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,4% hingga mencapai Rp117.395.477.693,- dari Rp100.896.985.647,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan beban pajak penghasilan badan yang terkait dengan Palapa Ring Paket Timur karena Perseroan mengakui kerugian fiskal pada tahun 2020, sehingga beban pajak penghasilan badan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 lebih besar.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Beban pajak - bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 41,3% hingga mencapai Rp100.896.985.647,- dari Rp171.969.650.608,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 akibat penurunan pajak tangguhan dari kerugian pajak terkait Palapa Ring Paket Timur.

## **Laba Bersih**

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, laba bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp8.298.972.245,- atau setara dengan 1,22% menjadi sebesar Rp671.378.603.195,- bila dibandingkan dengan Laba bersih pada 31 Desember 2020 sebesar Rp679.677.575.440,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penambahan atas pembangunan backbone dan upgrade kapasitas di tahun 2021 dan pembukaan cabang-cabang baru di beberapa kota untuk memperluas penjualan jaringan FTTH di tahun 2021. Hal ini menyebabkan peningkatan nilai aset tetap dan beban penyusutan dimana beban penyusutan pada beban langsung meningkat sebesar Rp149.043.844.257 atau setara dengan 49%, sedangkan beban depresiasi pada beban operasional meningkat sebesar Rp17.310.080.816 atau setara dengan 70% dibandingkan tahun 2020.

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.627.482.041,- atau setara dengan 0,54% menjadi sebesar Rp679.677.575.440,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp676.050.093.399,-. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan juga penurunan pada biaya Non-Penyelenggara telekomunikasi yaitu pengakuan pendapatan bunga dan kontruksi dari konsesi jasa sesuai ISAK 16 atas proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur serta diiringi dengan peningkatan beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan dan penurunan pajak tangguhan di tahun 2020.

## **Total laba tahun berjalan**

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, total laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 1,22% hingga mencapai Rp671.378.603.195,- dari Rp679.677.575.440,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 akibat penambahan konstruksi jaringan tulang punggung dan peningkatan kapasitas pada 2021 serta pembukaan kantor cabang baru di sejumlah kota untuk meningkatkan penjualan jaringan FTTH pada tahun 2021. Faktor-faktor tersebut juga menyebabkan kenaikan nilai aset tetap dan beban penyusutan. Beban penyusutan dalam beban langsung mengalami kenaikan sebesar Rp149.043.844.257,- atau 49%, sementara beban penyusutan dalam beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp23.756.105.847,- atau 73% dibandingkan tahun 2020.

### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Akibat hal-hal tersebut di atas, total laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,54% hingga mencapai Rp679.677.575.440,- dari Rp676.050.093.399,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di samping penurunan biaya penyelenggaraan non-telekomunikasi, yang disebabkan oleh pengakuan bunga dan

pendapatan konstruksi dari konsesi jasa terkait Proyek Palapa Ring sesuai dengan ketentuan ISAK 16, kenaikan beban langsung penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan serta penurunan pajak tangguhan pada tahun 2020.

### **Jumlah Penghasilan Komprehensif**

#### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp331.956.391.016,- atau setara dengan 32,71% menjadi sebesar Rp682.762.219.331,- bila dibandingkan dengan Jumlah penghasilan komprehensif pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.014.718.610.347,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya keuntungan atas revaluasi aset tetap pada tahun 2020 sebesar Rp377.262.681.230,- sehingga di tahun 2021 terdapat penurunan di jumlah penghasilan komprehensif.

#### Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp351.874.994.583,- atau setara dengan 53,09% menjadi sebesar Rp1.014.718.610.347,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp662.843.615.764,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengakuan revaluasi aset di tahun 2020 dimana Perseroan terakhir melakukan revaluasi aset pada tahun 2016.

## **B. Laporan Posisi Keuangan**

### **Jumlah Aset**

#### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.169.878.577.494,- atau setara dengan 8,73% menjadi sebesar Rp14.565.401.098.078,- bila dibandingkan dengan Total aset pada 31 Desember 2020 sebesar Rp13.395.522.520.584,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp 564.417.961.247 atau setara dengan 114% jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan kenaikan aset tetap Perseroan sebesar Rp 721.322.057.310 atau setara dengan 13% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang disebabkan karena pengembangan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH), upgrade kapasitas bandwidth dan membangun cabang-cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2021.

#### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp599.584.623.703,- atau setara dengan 4,69% menjadi sebesar Rp13.395.522.520.584,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.795.937.896.881,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan backbone, *upgrade* kapasitas bandwidth dan jaringan fiber to the home (FTTH) selama tahun 2020.

#### **a. Aset Lancar**

##### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp663.046.373.327,- atau setara dengan 23,85% menjadi sebesar Rp3.442.650.087.617,- bila dibandingkan dengan Aset lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.779.603.714.290,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas Perusahaan yang sebelumnya Rp494.777.973.772 menjadi Rp1.059.195.935.019. Kenaikan kas ini disebabkan oleh pencairan fasilitas pinjaman bank sebesar Rp 1.093.446.423.074 dan penerbitan Sukuk Ijarah tahap 4 sebesar Rp 500.000.0000.000 di tahun 2021 yang sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH).

##### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp950.462.845.695,- atau setara dengan 25,48% menjadi sebesar Rp2.779.603.714.290,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.730.066.559.985,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas perusahaan yang sebelumnya Rp1.432.164.203.492,- menjadi Rp494.777.973.772,- penurunan cash ini disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020.

#### **b. Aset Tidak Lancar**

##### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp506.832.204.167,- atau setara dengan 4,77% menjadi sebesar Rp11.122.751.010.461,- bila dibandingkan dengan Aset tidak lancar pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.615.918.806.294,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan backbone dan fiber to the home (FTTH), *upgrade* kapasitas bandwidth dan membangun cabang-cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2021.

##### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.550.047.469.398,- atau setara dengan 17,10% menjadi sebesar Rp10.615.918.806.294,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.065.871.336.896. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan. Berupa pengembangan jaringan backbone, *upgrade* kapasitas bandwidth dan jaringan fiber to the home (FTTH) selama tahun 2020.

#### **Jumlah Liabilitas**

##### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp181.039.081.001,- atau setara dengan 1,78% menjadi sebesar Rp10.007.023.391.095,- bila dibandingkan dengan total Liabilitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp10.188.062.472.096,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dan Sukuk Ijarah tahap 4 dan pengembalian uang muka setoran modal yang dicatat sebagai utang pemegang saham di tahun 2021 sebesar Rp844.408.372.000,-.

### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp415.104.386.644,- atau setara dengan 3,91% menjadi sebesar Rp10.188.062.472.096,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.603.166.858.740,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020 serta diiringi dengan kenaikan atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan III tahun 2020 dan kenaikan utang bank.

#### **a. Liabilitas Jangka Pendek**

### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.501.677.714.622,- atau setara dengan 77,69% menjadi sebesar Rp3.434.466.972.634,- bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.932.789.258.012,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh utang obligasi seri B dan sukuk tahap I seri A yang akan jatuh tempo masing-masing pada bulan Juli 2022 dan Desember 2022 dengan total sebesar Rp805.194.584.994.

### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.245.560.054.364,- atau setara dengan 39,19% menjadi sebesar Rp1.932.789.258.012,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.178.349.312.376,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020.

#### **b. Liabilitas Jangka Panjang**

### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.682.716.795.623 atau setara dengan 20,38% menjadi sebesar Rp6.572.556.418.461,- bila dibandingkan dengan Liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2020 sebesar Rp8.255.273.214.084,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh utang obligasi seri B dan sukuk tahap I seri A yang akan jatuh tempo masing-masing pada bulan Juli 2022 dan Desember 2022 dengan total sebesar Rp805.194.584.994 yang dicatat sebagai bagian liabilitas jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan pengembalian uang muka setoran modal yang dicatat sebagai utang pemegang saham di tahun 2021 sebesar Rp844.408.372.000,-.

### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp830.455.667.720,- atau setara dengan 11,18% menjadi sebesar Rp8.255.273.214.084,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.424.817.546.364. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan III tahun 2020 dan kenaikan utang bank.

## Jumlah Ekuitas

### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.350.917.658.495,- atau setara dengan 42,12% menjadi sebesar Rp4.558.377.706.983,- bila dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.207.460.048.488,-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan saham baru seri C Perseroan sebanyak 764.490 lembar saham sehingga modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp 2.112.120.439.015 pada tanggal 31 Desember 2021.

### Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, Perseroan mencatat peningkatan total ekuitas sebesar Rp1.014.689.010.347,- atau setara dengan 46,27% menjadi sebesar Rp3.207.460.048.488,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.192.771.038.141,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dan revaluasi aset tetap yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020.

## C. Analisis Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan kas dari pelanggan	4.547.281.071.132	4.283.756.296.516	2.370.410.365.766
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.864.410.405.702)	(1.418.301.926.655)	(609.780.156.745)
Pembayaran kas kepada karyawan	(378.140.442.747)	(322.924.126.428)	(273.785.542.337)
Kas dihasilkan dari operasi bersih	2.304.730.222.683	2.542.530.243.433	1.486.844.666.684
Penerimaan dari pengembalian pajak	141.563.957.502	157.384.852.974	57.271.918.246
Penerimaan bunga	15.203.804.882	8.044.887.544	27.280.117.346
Pembayaran pajak penghasilan	(118.777.535.917)	(92.833.898.681)	(62.352.817.518)
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(726.876.317.038)	(750.950.274.483)	(615.821.966.219)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.615.844.132.112	1.864.175.810.787	893.221.918.539
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Arus kas masuk bersih pada tanggal akuisisi – setelah dikurangi pembayaran untuk akuisisi entitas anak	2.243.001.233	-	-
Pencairan Deposito	4.166.575.631	-	-
Pembayaran uang muka	-	(58.994.341.496)	(959.532.265.884)
Perolehan aset tak berwujud	(4.227.929.947)	(1.540.136.266)	-
Penempatan Deposito	(33.004.042.765)	-	-
Pembayaran bunga dan biaya - biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap	(42.925.277.176)	(27.196.275.579)	(19.754.874.340)
Perolehan aset lain-lain	(354.173.978.266)	(138.319.799.925)	(99.153.388.934)
Perolehan aset tetap	(1.002.906.786.623)	(1.139.994.788.165)	(1.765.189.035.634)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.430.828.437.913)	(1.366.045.341.431)	(2.843.629.564.792)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penerimaan setoran modal	1.813.370.280.000	-	-
Penerimaan utang bank	1.093.446.423.074	240.000.000.000	2.107.881.073.175
Penerimaan utang sukuk	500.000.000.000	666.515.000.000	1.000.000.000.000
Penerimaan utang Non-Bank	53.715.626.646	-	-
Pembayaran utang Non-Bank	(19.639.949.088)	(14.091.003.490)	(67.247.824.396)
Pembayaran utang sewa liabilitas	(29.675.052.297)	(19.903.983.838)	(17.201.666.860)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Pembayaran Utang Pemegang Saham	(844.408.372.000)	-	-
Pembayaran utang bank	(1.032.960.077.254)	(1.767.216.363.954)	(386.127.660.382)
Pembayaran dividen	(1.155.332.640.000)	-	-
Pembayaran utang obligasi	-	(540.000.000.000)	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	378.516.239.081	(1.434.696.351.282)	2.637.303.921.537
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	563.531.933.280	(936.565.881.926)	686.896.275.284
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	494.777.973.772	1.432.164.203.492	746.439.069.086
Selisih transaksi dalam mata uang asing	886.027.967	(820.347.794)	(1.171.140.878)
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	1.059.195.935.019	494.777.973.772	1.432.164.203.492

### ***Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi***

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, penerimaan dari pengembalian pajak, penerimaan bunga, pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran bunga dan beban keuangan.

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, penerimaan kas dari pelanggan mencapai Rp4.547.281.071.132,- dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan mencapai Rp2.242.550.848.449,-. Setelah memperhitungkan kas dihasilkan dari operasi bersih sebesar Rp2.304.730.222.683,-, penerimaan dari pengembalian pajak sebesar Rp141.563.957.502,-, penerimaan bunga sebesar Rp15.203.804.882,-, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp118.777.535.917,- dan pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp726.876.317.038,-, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp1.615.844.132.112,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, penerimaan kas dari pelanggan mencapai Rp4.283.756.296.516,- dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan mencapai Rp1.741.226.053.083,-. Setelah memperhitungkan kas dihasilkan dari operasi bersih sebesar Rp2.542.530.243.433,-, penerimaan dari pengembalian pajak sebesar Rp157.384.852.974,-, penerimaan bunga sebesar Rp8.044.887.544,-, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp92.833.898.681,- dan pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp750.950.274.483,-, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp1.864.175.810.787,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, penerimaan kas dari pelanggan mencapai Rp2.370.410.365.766,- dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan mencapai Rp883.565.699.082,-. Setelah memperhitungkan kas dihasilkan dari operasi bersih sebesar Rp1.486.844.666.684,-, penerimaan dari pengembalian pajak sebesar Rp57.271.918.246,-, penerimaan bunga sebesar Rp27.280.117.346,-, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp62.352.817.518,- dan pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp615.821.966.219,-, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp893.221.918.539,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

### ***Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi***

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari pembayaran uang muka, pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap, dan perolehan aset tetap dan aset lain-lain.

Pada tahun 2021, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp1.430.828.437.913,-, terdiri dari perolehan aset tak berwujud, aset tetap dan aset lain-lain sebesar Rp1.361.308.694.836,-, pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp42.925.277.176,-, dan penempatan deposito sebesar Rp33.004.042.765,-, yang sebagian diimbangi oleh arus kas masuk bersih pada tanggal akuisisi - setelah dikurangi pembayaran untuk akuisisi entitas anak (IPT) sebesar Rp2.243.001.233,- dan pencairan deposito yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp4.166.575.631,-.

Pada tahun 2020, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp1.366.045.341.431,-, terdiri dari perolehan aset tak berwujud, aset tetap dan aset lain-lain sebesar Rp1.279.854.724.356,-, pembayaran uang muka sebesar Rp58.994.341.496,-, dan pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp27.196.275.579,-.

Pada tahun 2019, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp2.843.629.564.792,-, terdiri dari perolehan aset tetap dan aset lain-lain sebesar Rp1.864.342.424.568,-, pembayaran uang muka sebesar Rp959.532.265.884,-, dan pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp19.754.874.340,-.

### ***Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan***

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan terutama terdiri dari penerimaan dari utang bank dan penerbitan sukuk, yang sebagian diimbangi oleh kas bersih dari pembayaran utang non-bank, liabilitas sewa, dan utang bank.

Pada tahun 2021, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp378.516.239.081,-, terdiri dari penerimaan dari penerbitan saham baru Seri C sebesar Rp1.813.370.280.000,-, penerimaan dari utang bank sebesar Rp1.093.446.423.074,-, penerimaan dari penerbitan sukuk sebesar Rp500.000.000.000,-, dan penerimaan dari utang non-bank sebesar Rp53.715.626.646,-, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran utang non-bank sebesar Rp19.639.949.088,-, pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp29.675.052.297,-, pembayaran utang pemegang saham sebesar Rp844.408.372.000,-, pembayaran utang bank sebesar Rp1.032.960.077.254,-, dan pembayaran dividen sebesar Rp1.155.332.640.000,-.

Pada tahun 2020, kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp1.434.696.351.282,-, terdiri dari penerimaan dari utang bank sebesar Rp240.000.000.000,-, dan penerimaan dari penerbitan sukuk sebesar Rp666.515.000.000,-, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran utang non-bank sebesar Rp14.091.003.490,-, pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp19.903.983.838,-, pembayaran utang bank sebesar Rp1.767.216.363.954,-, dan pembayaran utang obligasi sebesar Rp540.000.000.000,-.

Pada tahun 2019, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp2.637.303.921.537,-, terdiri dari penerimaan dari utang bank sebesar Rp2.107.881.073.175,-, dan penerimaan dari penerbitan sukuk sebesar Rp1.000.000.000.000,-, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran utang non-bank sebesar Rp67.247.824.396,-, pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp17.201.666.860,-, dan pembayaran utang bank sebesar Rp386.127.660.382,-.

## **6. ANALISA SEGMENT OPERASI**

Berikut merupakan informasi kinerja per segmen operasi Perseroan yang dijabarkan berdasarkan segmen pasar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

31 Desember 2021	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	1.199.223.356.053	29%	729.687.491.170	44%	469.535.864.883	19%
Wholesale	454.663.286.407	11%	185.510.656.121	11%	269.152.630.286	11%
Retail	661.720.025.988	16%	233.623.049.529	14%	428.096.976.459	17%
Lainnya	1.864.466.397.707	45%	493.961.589.655	30%	1.370.504.808.052	54%
<b>Jumlah</b>	<b>4.180.073.066.155</b>	<b>100%</b>	<b>1.642.782.786.475</b>	<b>100%</b>	<b>2.537.290.279.680</b>	<b>100%</b>

31 Desember 2020	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	1.246.009.460.827	33%	771.362.958.977	60%	474.646.501.850	19%
Wholesale	346.676.601.422	9%	117.194.827.177	9%	229.481.774.245	9%
Retail	472.703.890.019	13%	146.185.955.846	11%	326.517.934.173	13%
Lainnya	1.700.298.182.526	45%	253.777.039.590	20%	1.446.521.142.936	58%
<b>Jumlah</b>	<b>3.765.688.134.794</b>	<b>100%</b>	<b>1.288.520.781.590</b>	<b>100%</b>	<b>2.477.167.353.204</b>	<b>100%</b>

31 Desember 2019	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	614.159.417.085	15%	385.032.787.272	18%	229.126.629.813	12%
Wholesale	475.031.320.374	12%	175.176.282.398	8%	299.855.037.976	16%
Retail	343.798.624.369	8%	142.305.407.259	7%	201.493.217.110	10%
Lainnya	2.629.392.189.923	65%	1.428.701.917.912	67%	1.200.690.272.011	62%
<b>Jumlah</b>	<b>4.062.381.551.751</b>	<b>100%</b>	<b>2.131.216.394.841</b>	<b>100%</b>	<b>1.931.165.156.910</b>	<b>100%</b>

### Telco

Pendapatan dari segmen *telco* pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp46.786.104.774,- atau setara dengan 3,75% jika dibandingkan dengan tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh pengalihan permintaan pelanggan telekomunikasi dari sewa bandwidth ke sewa core selama tahun 2021. Sementara itu, pendapatan dari segmen *telco* pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp631.850.043.742,- atau setara dengan 102,88% jika dibandingkan dengan tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh permintaan sewa bandwidth dari pelanggan telekomunikasi yang cukup signifikan selama tahun 2020. Kontribusi pendapatan segmen telco tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 15%, 33%, dan 29%. Sedangkan untuk laba kotor segment telco tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 12%, 19%, dan 19%.

### Wholesale

Pendapatan dari segmen *wholesale* pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp107.986.684.985,- atau setara dengan 31,15% jika dibandingkan dengan tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan volume kapasitas internet internasional yang cukup signifikan. Sementara itu, pendapatan dari segmen *wholesale* pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp128.354.718.952,- atau setara dengan 27,02% jika dibandingkan dengan tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh persaingan ISP lokal yang meningkat. Kontribusi pendapatan segmen wholesale tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 12%, 9%, dan 11%. Sedangkan untuk laba kotor segment wholesale tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 16%, 9%, dan 11%.

### Retail

Pendapatan dari segmen *retail* pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp189.016.135.969,- atau setara dengan 39,99% jika dibandingkan dengan tahun 2020, begitu pula kenaikan terjadi pada tahun 2020 yang meningkat sebesar Rp128.905.265.650,- atau setara dengan 37,49% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penyebab peningkatan ini dikarenakan kenaikan permintaan volume kapasitas internet yang cukup signifikan karena adanya pergeseran *customer behavior*, diantaranya *work from home* (WFH) dan sekolah dengan sistem daring yang mana disebabkan oleh situasi pandemic COVID-19. Selain itu, pada tahun 2021, Perseroan membuka area

baru di beberapa kota besar di Indonesia sehingga penjualan internet rumah dan perusahaan. meningkat. Kontribusi pendapatan segmen retail tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 8%, 13%, dan 16%. Sedangkan untuk laba kotor segment retail tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 10%, 13%, dan 17%.

### **Lainnya**

Pendapatan dari segmen lainnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp164.168.215.181,- atau setara dengan 9,66% jika dibandingkan dengan tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang sudah selesai di tahun 2021 oleh salah satu entitas anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia. Selain itu, pada September 2021 Perseroan mengakuisisi entitas anak baru, PT Indo Pratama Teleglobal, sehingga terdapat kontribusi pendapatan usaha dari penjualan jasa VSAT dalam segmen ini. Sementara itu, pendapatan dari segmen lainnya pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp929.094.007.397,- atau setara dengan 35,33% jika dibandingkan dengan tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa seperti yang ada di tahun 2019 sebesar Rp 1.266.799.785.223,- dari jasa konsesi atas penerapan standar akuntansi ISAK 16 mengenai “jasa konsesi”. Kontribusi pendapatan segmen lainnya tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 65%, 45%, dan 45%. Sedangkan untuk laba kotor segment lainnya tahun 2019 – 2021 adalah masing-masing sebesar 62%, 58%, dan 54%.

## **7. LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, IMBAL HASIL RATA-RATA EKUITAS DAN IMBAL HASIL RATA-RATA ASET**

### **A. Likuiditas**

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek perusahaan.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 100%, 144% dan 117%.

Sumber likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan berasal dari internal dan eksternal Perseroan. Likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan digunakan untuk biaya operasional, modal kerja, belanja modal, serta pembayaran kewajiban Perseroan. Apabila Perseroan membutuhkan tambahan pembiayaan baik untuk modal kerja dan belanja modal, maka Perseroan akan mempergunakan sumber likuiditas eksternal berupa pinjaman bank jangka pendek dan/atau jangka panjang.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, belanja modal serta pembayaran kembali pembiayaan dari bank beserta bunganya. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

## B. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, yang dihitung dari rasio jumlah seluruh liabilitas perusahaan masing-masing terhadap jumlah aset dan terhadap ekuitas. Rasio seluruh liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 68,70%, 76,06% dan 82,86%. Sedangkan rasio seluruh liabilitas berbunga terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 219,53%, 317,64% dan 483,55%.

## C. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Total Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 14,73%, 21,19% dan 30,83%.

## D. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Total Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 4,61%, 5,07% dan 5,28%.

## 8. PEMBATAAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA DALAM BENTUK DIVIDEN KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana dalam bentuk dividen kepada Perseroan.

## 9. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Tanah	12.149.659.365	11.720.729.092	208.265.481.654
Bangunan	6.386.856.482	16.774.568.194	19.603.670.217
Peralatan dan Perabot Kantor	8.445.915.250	11.532.383.237	14.673.548.627
Peralatan Telekomunikasi	283.829.795.068	804.657.097.987	546.715.067.150
Kendaraan	4.955.396.268	483.503.837	1.881.670.835
Pekerjaan dalam Pelaksanaan	698.852.652.242	769.126.111.031	1.073.202.986.085
<b>Jumlah</b>	<b>1.014.620.274.675</b>	<b>1.614.294.393.378</b>	<b>1.864.342.424.568</b>

Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, 93,75% belanja modal Perseroan digunakan untuk penyelenggaraan jaringan tulang punggung dan akses (termasuk kabel dan peralatan) (54,3% jaringan tulang punggung, 24,6% jaringan akses, dan 21,1% untuk FTTH). Sisa belanja modal Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021 (6,25%) digunakan untuk belanja modal operasional. Belanja modal Perseroan pada umumnya didanai melalui utang.

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material.

## 10. BAHASAN MENGENAI PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah tabel pinjaman yang masih terhutang per tanggal 31 Desember 2021:

	≤ 1 tahun	1-2 Tahun	3-5 Tahun	Jumlah
Utang bank	1.164.750.861.401	1.191.019.534.672	2.753.816.859.741	5.109.587.255.814
Liabilitas sewa	49.054.755.294	51.382.777.473	15.398.048.623	115.835.581.390
Utang non-bank	20.094.690.773	23.184.402.021	13.351.876.512	56.630.969.306
Utang obligasi	458.861.999.070	-	-	458.861.999.070
<b>Jumlah</b>	<b>1.692.762.306.538</b>	<b>1.265.586.714.166</b>	<b>2.782.566.784.876</b>	<b>5.740.915.805.580</b>

Komposisi persentase pinjaman Perseroan saat ini dalam hal jatuh tempo terdiri dari 29,49% dibawah 1 tahun, 22,05% akan jatuh tempo dalam 1-2 tahun dan 48,47% akan jatuh tempo dalam 3-5 tahun. Perseroan memandang komposisi tersebut merupakan komposisi yang baik bagi Perseroan. Perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Perusahaan Anak serta untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

## 11. ANALISIS RISIKO FLUKTUASI KURS DAN TINGKAT SUKU BUNGA

Perseroan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan piutang usaha, utang usaha dan Utang Non-Bank. Selain piutang usaha, utang usaha dan Utang Non-Bank, Perseroan memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan.

Perseroan mendanai kegiatan usaha dengan berbagai pinjaman bank dan surat utang yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Karenanya, Perseroan menetapkan kebijakan untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

## 12. KEJADIAN KHUSUS YANG JARANG TERJADI

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri Telekomunikasi, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan

perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak belum merasakan dampak material sehubungan dengan adanya penyebaran virus Corona (Covid-19). Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan kebijakan *Work from Home* (WFH) bagi karyawan-karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap himbauan pemerintah mengenai *Physical Distancing*, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kemampuan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga yang jatuh tempo terhadap kreditur masih dapat dikelola dan dipenuhi.

Perseroan dan Perusahaan Anak akan melakukan pemantuan secara intensif atas dampak Covid-19 terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak dan melakukan tindakan untuk mengatasi dampak yang akan dialami Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak terus berupaya untuk menjaga fundamental dalam kondisi aman dan terkendali, Perseroan dan Perusahaan Anak tetap siaga menghadapi segala perubahan yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu kedepan.

### **13. PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO PASAR**

#### ***Risiko nilai tukar***

Mengingat bagian signifikan dari pendapatan dan beban Perseroan berdenominasi Rupiah, risiko nilai tukar yang dihadapi Perseroan terutama terkait dengan selisih penjabaran kurs atas saldo kas Perseroan, yang sebagian besar disimpan dalam deposito berjangka dalam AS\$, yang mewakili 29% dari total deposito berjangka Perseroan. Perseroan tidak menghadapi risiko material terkait perubahan nilai tukar, dan Perseroan tidak menggunakan instrumen keuangan derivatif apa pun untuk mengelola risiko nilai tukar yang dihadapi Perseroan. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, kenaikan atau penurunan nilai tukar Rupiah terhadap AS\$ sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan atau penurunan pendapatan sebelum pajak Perseroan sebesar Rp4,4 miliar, sementara kenaikan atau penurunan nilai tukar Rupiah terhadap AS\$ akan menyebabkan kenaikan atau penurunan pendapatan sebelum pajak sebesar Rp0,1 miliar.

Rupiah selama ini berfluktuasi terhadap dolar AS, terkadang secara signifikan dan tidak dapat diramalkan. Dampak kekuatan pasar atau kebijakan pemerintah Indonesia atau AS terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS di masa depan sulit untuk diramalkan. Dalam hal Perseroan perlu mengonversi dolar AS ke Rupiah untuk kegiatan operasi Perseroan, apresiasi Rupiah terhadap dolar AS dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap nilai Rupiah yang diterima Perseroan dalam konversi tersebut.

#### ***Risiko tingkat suku bunga***

Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kewajiban berbunga sebesar Rp7.896,2 miliar. 65% dari kewajiban utang Perseroan memiliki suku bunga mengambang dan menyebabkan Perseroan terpapar risiko fluktuasi tingkat suku bunga. 65% dari kewajiban utang Perseroan memiliki suku bunga mengambang dan menyebabkan Perseroan terpapar risiko fluktuasi tingkat suku bunga. Risiko suku bunga yang dihadapi Perseroan terutama terkait dengan pendapatan bunga yang dihasilkan dari kelebihan kas, yang terutama disimpan dalam deposito berjangka berbunga, kas yang dibatasi

penggunaannya, dan investasi jangka pendek. Instrumen berbunga mengandung risiko tingkat suku bunga hingga taraf tertentu. Perseroan tidak menghadapi risiko material terkait perubahan tingkat suku bunga, dan Perseroan tidak menggunakan instrumen keuangan derivatif apa pun untuk mengelola risiko tingkat suku bunga yang dihadapi Perseroan.

***Inflasi***

Hingga kini, inflasi di Indonesia tidak menimbulkan dampak material terhadap kinerja operasi Perseroan. Walaupun Perseroan tidak mengalami dampak material yang timbul dari inflasi di masa lalu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan terkena dampak tingkat inflasi yang lebih tinggi di Indonesia di masa depan.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam Saham yang Ditawarkan Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Sebelum memutuskan untuk membeli efek ini, Anda harus mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini secara seksama. Setiap risiko, risiko tambahan dan ketidakpastian yang tidak diketahui Perseroan pada saat ini atau yang saat ini diyakini Perseroan tidak material dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan. Hal-hal yang terkait dengan risiko-risiko tersebut atau pemberitaan atau peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau penyebab lain dapat menyebabkan penurunan pada harga perdagangan Saham yang Ditawarkan, dan Anda dapat mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh investasi Anda.*

### RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA DAN INDUSTRI PERSEROAN

#### 1. RISIKO UTAMA

##### Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik

***Apabila terjadi kegagalan dalam sistem kabel serat optik bawah laut Perseroan, kemampuan Perseroan untuk memulihkan layanan mungkin tertunda atau terbatas dengan cara lain.***

Sistem kabel serat optik bawah laut Perseroan menyangga sebagian besar lalu lintas Perseroan. Jaringan bawah laut Perseroan terpapar risiko yang bersifat inheren bagi sistem telekomunikasi serat optik bawah laut yang kompleks dan berskala besar (yang ditetapkan Perseroan sebagai sistem yang menyediakan solusi konektivitas tanpa hambatan dalam berbagai rute lalu lintas data, antar negara dan benua), termasuk cacat desain, kerusakan peralatan, pelanggaran keamanan, virus komputer, dan kerusakan fisik pada kabel bawah laut dan peralatan. Pengoperasian jaringan bawah laut Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan menghindari dan memitigasi gangguan layanan atau penurunan kapasitas bagi pelanggan. Kecuali diselesaikan sebagaimana mestinya, gangguan layanan atau masalah kinerja yang disebabkan oleh kerusakan fisik pada sistem kabel bawah laut akibat bencana alam, aktivitas gunung berapi, ketidakstabilan geologis, kehilangan daya, jaring ikan, jangkar, atau berbagai faktor dan alasan lainnya, dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan Perseroan serta menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan atau meningkatkan kesulitan dalam menarik pelanggan baru. Meskipun struktur jaringan yang digunakan dalam sistem jaringan bawah laut Perseroan dirancang untuk meminimalkan gangguan layanan dengan mengalihkan lalu lintas, pengalihan lalu lintas tersebut mungkin tidak selalu dapat dilakukan atau berhasil dilakukan. Dalam hal terjadi kegagalan atau kerusakan dalam sistem kabel serat optik bawah laut Perseroan, Perseroan mungkin membutuhkan waktu yang signifikan untuk melakukan perbaikan atau memulihkan layanan, yang dapat menyebabkan gangguan layanan berkepanjangan atau penurunan kapasitas.

Mengingat sebagian besar layanan Perseroan bersifat kritis bagi bisnis sebagian besar pelanggan Perseroan, seandainya suatu sistem kabel mengalami serangkaian pemadaman atau pemadaman yang berkepanjangan, dapat terjadi hilangnya kepercayaan terhadap sistem kabel tersebut. Apabila terjadi kegagalan dan Perseroan gagal memperoleh fasilitas alternatif, sebagian layanan komunikasi yang ditawarkan Perseroan kepada pelanggan dapat terganggu, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, posisi keuangan, kinerja operasi, atau likuiditas Perseroan.

## 2. RISIKO USAHA

### Risiko Perizinan

- a. Kegiatan usaha Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan apabila Perseroan tidak mampu memperpanjang izin yang dimilikinya atau menerapkan hak atas kekayaan intelektual yang menjadi dasar kegiatan usaha Perseroan.**

Perseroan mengandalkan izin dan perjanjian lainnya dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya untuk menetapkan dan mempertahankan hak atas kekayaan intelektual Perjanjian terkait teknologi serta produk dan layanan yang digunakan dalam operasi Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh atau tetap memperoleh lisensi dari pihak-pihak ketiga tersebut dengan ketentuan yang wajar, atau sama sekali.

Selain itu, akibat pesatnya perubahan teknologi, Perseroan mengembangkan produk dan layanan Perseroan sendiri dan juga mengandalkan teknologi yang dikembangkan atau dilisensikan oleh pihak ketiga. Akan tetapi, hak atas kekayaan intelektual Perseroan, atau hak-hak para pemasok Perseroan, dapat disanggah atau dibatalkan. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh lisensi untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual milik pihak ketiga, termasuk penyedia konten dan perangkat lunak. Selain itu, dari waktu ke waktu, Perseroan dan mitra usaha Perseroan, kepada siapa Perseroan mengalihdayakan sebagian layanan Perseroan, mungkin secara tidak sengaja melanggar hak pihak ketiga tersebut atau gagal membayar royalti kepada pihak ketiga tersebut, yang dapat menyebabkan pengajuan gugatan terhadap Perseroan. Gugatan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual sering kali diajukan dalam industri komunikasi dan hiburan, dan Perseroan mungkin merupakan pihak dalam tuntutan hukum yang memepersangkakan bahwa layanan atau teknologi Perseroan melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain.

Selain itu, klaim atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dapat mengharuskan Perseroan untuk mengadakan perjanjian royalti atau lisensi dengan ketentuan yang tidak menguntungkan, menimbulkan liabilitas moneter yang substansial, atau Perseroan mungkin dilarang, baik untuk sementara waktu atau seterusnya, menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang bersangkutan. Hal ini dapat menyebabkan Perseroan harus mengubah praktik usaha atau penawaran Perseroan dan membatasi kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif. Bahkan gugatan yang tidak berhasil pun dapat memakan waktu dan biaya terkait upaya pembelaan, dan dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya manajemen Perseroan dari kegiatan usaha Perseroan. Kerugian signifikan yang ditimbulkan dapat menyebabkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

- b. Perseroan tunduk pada lingkungan peraturan yang kompleks dan dipenuhi ketidakpastian dan Perseroan mungkin tidak berhasil memperoleh, atau mengalami penundaan yang material dalam memperoleh atau memperbaharui sertifikat, izin, surat izin, atau persetujuan pemerintah, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan, dan Perseroan menanggung biaya kepatuhan dan menghadapi pembatasan tertentu.**

Layanan komunikasi data dan pita lebar yang ditawarkan Perseroan tunduk pada peraturan yang lebih ekstensif dibandingkan sebagian besar industri lain. Perseroan tunduk pada pengawasan dan peraturan ekstensif di bawah berbagai otoritas berwenang Indonesia, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (“Kominfo”) dan badan pemerintah terkait lainnya. Peraturan tersebut termasuk UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Peraturan tersebut juga tunduk

pada perubahan dari waktu ke waktu. Peraturan dan pengawasan pemerintah tersebut, serta perubahan undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah di masa depan (atau perubahan interpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dapat memengaruhi Perseroan, pesaing Perseroan atau industri secara umum, memberikan pengaruh yang kuat pada cara Perseroan beroperasi pada saat ini dan di masa depan. Perubahan pesat dalam teknologi dan kondisi pasar menyebabkan perubahan dalam cara Pemerintah mengelola layanan telekomunikasi dan Internet. Pengadopsian undang-undang atau peraturan baru, atau perubahan dalam kerangka kerja hukum yang ada pada tingkat pusat, daerah, atau lokal, dapat membutuhkan penyesuaian signifikan dan berbiaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap rencana bisnis Perseroan. Peraturan baru dapat mengenakan biaya tambahan atau persyaratan modal, mempersyaratkan kewajiban pelaporan baru, menghambat peluang pendapatan, dan mungkin menghambat kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan dalam cara yang menarik bagi pelanggan Perseroan, serta mungkin menciptakan hambatan untuk memasuki pasar baru atau memperoleh lini bisnis baru.

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang merugikan dapat menempatkan kegiatan usaha Perseroan dalam sejumlah risiko. Peraturan mungkin membatasi operasi Perseroan dan memberikan tekanan persaingan lebih jauh terhadap Perseroan, termasuk:

- aturan mengenai perizinan, persetujuan, pernyataan, dan izin, sertifikat, dan pemberitahuan lainnya;
- aturan mengenai perlindungan data, perlindungan konsumen, dan e-niaga;
- aturan sehubungan dengan penyedia layanan internet, jaringan tetap lokal dan jaringan tetap tertutup; dan
- persyaratan lainnya yang mencakup berbagai bidang operasional, seperti perlindungan lingkungan hidup, retensi data, dan standar teknis.

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan tersebut melalui berbagai izin, sertifikasi, dan surat izin yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Izin dan surat izin operasional tersebut tunduk pada pemeriksaan, interpretasi, modifikasi, atau pengakhiran oleh otoritas yang berwenang. Tidak ada jaminan bahwa otoritas yang berwenang tidak akan mengambil tindakan yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan, dan Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa izin dan surat izin operasional yang ada akan dapat diperpanjang atau perpanjangan dengan ketentuan baru akan dapat diterima secara komersial oleh Perseroan atau akan tetap layak secara komersial, atau bahwa izin-izin tersebut akan tetap memberikan tingkat pengembalian yang sama bagi Perseroan.

Biaya memperoleh izin baru tersebut atau perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi Perseroan. Memenuhi seluruh ketentuan yang diperlukan untuk memperoleh izin atau surat izin tidak menjamin bahwa izin atau surat izin tersebut akan diberikan. Masalah administratif atau masalah lainnya dapat menyebabkan kegagalan memperoleh izin atau surat izin, mengingat otoritas yang berwenang memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apakah suatu izin atau surat izin akan diberikan.

Perubahan dalam peraturan dapat menyebabkan Perseroan harus mengubah atau memodifikasi surat izin yang ada atau mengajukan permohonan surat izin baru. Sebagian izin Perseroan saat ini tengah dalam proses persetujuan, perpanjangan, dan/atau pembaharuan guna memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebagai contoh, Perseroan sedang dalam proses memperoleh sertifikat standar dan operasional yang terverifikasi dan/atau izin komersial melalui Online Single Submission System (OSS).

Perseroan bergerak dalam kegiatan tertentu, seperti, antara lain, kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi sentral telekomunikasi dan peralatan yang terkait, tanpa sertifikasi standar dan izin operasional dan/atau komersial hingga saat ini dan tidak ada jaminan bahwa sertifikasi standar dan izin operasional dan/atau komersial tersebut, yang dibutuhkan bagi operasi Perseroan, akan diberikan kepada Perseroan tepat pada waktunya. Apabila Perseroan tidak berhasil memperoleh sertifikasi standar dan izin operasional dan/atau komersial yang diperlukan dan dinyatakan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat dikenakan sanksi, termasuk peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan sementara kegiatan usaha, pemutusan akses, paksaan polisi, pencabutan layanan, dan/atau pencabutan izin usaha lainnya, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

***c. Interpretasi dan penerapan undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia diliputi ketidakpastian dan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan.***

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beraneka ragam, meliputi beragam etnis, agama, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan nasional dan daerah. Periode setelah masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan tuntutan luas akan otonomi daerah yang lebih besar. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, pada tahun 1999, DPR Indonesia menerbitkan (i) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah pada tahun 2004, dan digantikan oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang hal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua pada UU No. 23 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja), dan (ii) UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian digantikan oleh UU No. 33 tahun 2004 tentang hal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh UU No. 2 tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang). Berdasarkan undang-undang tersebut, otonomi daerah diharapkan akan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan aset negara dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lingkungan hukum bagi perusahaan di Indonesia melalui desentralisasi kewenangan perundang-undangan, pajak dan kewenangan tertentu lainnya dari Pemerintah kepada pemerintah daerah. Meskipun berdasarkan hukum pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah yang bertentangan dengan hukum pada tingkatan yang lebih tinggi, penerapan otonomi tersebut menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut mencakup kurangnya peraturan pelaksanaan tentang otonomi daerah dan kekurangan personel pemerintah yang memiliki pengalaman sektor yang relevan di beberapa tingkat pemerintah daerah. Terlebih lagi, terdapat keterbatasan preseden atau panduan lainnya yang tersedia mengenai interpretasi dan implementasi undang-undang dan peraturan otonomi daerah

Di samping itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah oleh UU Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, beberapa pemerintah daerah tertentu telah menetapkan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi yang mungkin berbeda dari pembatasan, pajak dan retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lainnya dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan terletak di seluruh Indonesia dan dapat mengalami dampak merugikan yang timbul dari peraturan, pajak, dan retribusi tambahan atau yang saling bertentangan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku.

## Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik

***Apabila Perseroan tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan standar teknologi secara tepat waktu, daya saing Perseroan dapat terhambat, dan sebagai akibatnya, Perseroan akan kehilangan pelanggan.***

Keberhasilan Perseroan tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan mendanai perubahan teknologi yang pesat dalam industri Perseroan, termasuk perubahan dalam teknologi kabel serat optik. Perubahan ini mungkin mengharuskan Perseroan untuk mengganti dan/atau memperbaharui infrastruktur jaringan Perseroan, dan sebagai akibatnya Perseroan harus mengeluarkan belanja modal tambahan (yang jumlahnya mungkin signifikan) guna mempertahankan standar teknologi terkini dan tetap mampu bersaing terhadap produk dan layanan baru. Tidak ada jaminan bahwa akan tersedia sumber daya keuangan yang memadai untuk mendanai pembaharuan teknologi tersebut, dan Perseroan mungkin tidak mampu memulihkan biaya investasi yang dikeluarkan untuk menerapkan teknologi Perseroan pada saat ini atau di masa depan. Kegagalan Perseroan dalam mengadopsi teknologi baru atau keputusan Perseroan untuk memilih salah satu teknologi dibandingkan teknologi lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk bersaing atau memenuhi permintaan pelanggan. Perubahan teknologi dapat, antara lain, mengurangi hambatan masuk yang dihadapi para pesaing Perseroan yang menyediakan layanan lokal di wilayah layanan Perseroan. Laju perubahan teknologi dan kemampuan Perseroan untuk menerapkan teknologi baru mungkin terhambat oleh keterbatasan modal dan/atau kebutuhan untuk menghasilkan kas yang memadai untuk melakukan pembayaran bunga atas utang Perseroan.

Perkembangan teknologi mungkin menghasilkan produk dan layanan baru, dan kegagalan Perseroan untuk mengimbangi perkembangan tersebut dapat mengurangi daya tarik layanan Perseroan. Pengembangan produk dan layanan baru juga dapat menyebabkan Perseroan terpapar risiko tambahan. Sebagai contoh, pengembangan produk dan baru dapat menjadi suatu proses yang kompleks, dan Perseroan mungkin tidak mampu menerapkan produk dan layanan baru tersebut secara efektif, tepat waktu, atau secara ekonomis untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam mengembangkan layanan baru, Perseroan juga perlu menanamkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur jaringan Perseroan guna mendukung layanan tersebut. Produk dan layanan baru yang dikembangkan Perseroan mungkin tidak mencapai keberhasilan secara komersial, dan kegagalan produk dan layanan Perseroan dalam mencapai penerimaan secara komersial dapat memicu belanja modal tambahan. Sebagian pesaing Perseroan mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar untuk merespons perubahan teknologi dibandingkan Perseroan. Kegagalan Perseroan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi sebagaimana mestinya atau kegagalan memperoleh akses terhadap teknologi baru dapat menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan dan tidak mampu menarik pelanggan baru dan/atau menjual layanan baru kepada pelanggan Perseroan yang ada. Perseroan mungkin tidak mampu menghadirkan produk dan layanan baru dan Perseroan mungkin tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana diperkirakan sebelumnya dari produk atau layanan tersebut. Agar tetap bersaing, Perseroan perlu melangsungkan program investasi yang berjalan untuk senantiasa memperbaharui jaringan akses Perseroan. Perseroan mendefinisikan jaringan akses sebagai koneksi dari lokasi pengguna akhir - baik rumah maupun kantor - ke titik agregasi pertama dalam jaringan. Koneksi tersebut berupa serat optik dan titik agregasi pada umumnya merupakan kantor pusat atau simpul layanan jarak jauh. Jaringan akses menentukan kecepatan yang dapat ditawarkan Perseroan kepada pelanggan akhir. Perseroan mungkin tidak mampu mempertahankan tingkat investasi yang diperlukan untuk mempertahankan daya saing jangka panjang dalam penawaran kecepatan pita lebar ke seluruh segmen dalam pasar Perseroan.

Tren teknologi dan perkembangan dalam layanan TI dan awan dapat menjadi jauh lebih disruptif dan cenderung berubah dalam siklus yang lebih singkat dibandingkan teknologi telekomunikasi. Kemampuan Perseroan untuk menanamkan investasi dalam pelatihan, sertifikasi, dan keahlian yang diperlukan akan menjadi faktor penting yang menentukan kesuksesan Perseroan. Apabila Perseroan tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan dalam standar yang berlaku, daya saing Perseroan dapat terhambat, dan sebagai akibatnya, Perseroan akan kehilangan pelanggan, dan pada gilirannya hal ini akan memengaruhi kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan.

Pesaing Perseroan mungkin mampu mengembangkan atau memasarkan teknologi, produk, dan layanan secara lebih efektif, dan pesaing baru mungkin timbul akibat teknologi baru. Perseroan tidak dapat meramalkan secara akurat bagaimana perubahan teknologi di masa depan akan memengaruhi operasi Perseroan atau daya saing produk dan layanan Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu bersaing dengan pesaing Perseroan yang ada saat ini maupun di masa depan. Kegagalan untuk mengantisipasi atau beradaptasi terhadap teknologi dan perubahan secara efektif sebagai respons terhadap produk dan layanan yang ditawarkan para pesaing Perseroan dan sehubungan dengan ekspektasi dan perilaku pelanggan dapat menimbulkan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi persaingan Perseroan, dan pada gilirannya, pada kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan.

### **Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi**

#### ***a. Perseroan mungkin tidak berhasil menerapkan strategi saluran dan tiang (duct & pole) Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar.***

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan atau mempertahankan basis pelanggan dan mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk menggelar jaring ke lokasi baru atau mengembangkan jaringan serat optik Perseroan yang ada. Salah satu aspek kunci dalam strategi ekspansi Perseroan melibatkan peningkatan ducting dan tiang telekomunikasi terpasang. Terdapat risiko dan ketidakpastian yang mungkin menimbulkan penundaan dalam menerapkan strategi tersebut, gangguan pada layanan yang ada, dan meningkatkan biaya konstruksi dan pemeliharaan jaringan. Ketidakpastian tersebut meliputi bencana alam, sabotase, dan pencurian. Perseroan mungkin wajib memperoleh izin daerah dan nasional untuk meningkatkan jaringan Perseroan. Perizinan tersebut meliputi perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kantor Provinsi, Kantor Kota, dan Kantor Kabupaten (dan izin lainnya dari otoritas pemerintah daerah maupun pusat sebagaimana diwajibkan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah dan nasional), tergantung wilayah tempat jaringan diluncurkan.

Terdapat risiko bahwa di masa depan, Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh perizinan yang diperlukan dengan ketentuan yang dapat diterima secara komersial atau sama sekali. Kegagalan atau penundaan dalam memperoleh perpanjangan izin-izin tersebut dengan ketentuan yang dapat diterima juga dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Apabila Perseroan gagal mempertahankan dan mengembangkan jaringan Perseroan secara tepat waktu, Perseroan mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan atau mengembangkan basis pelanggan Perseroan.

## Risiko Persaingan Usaha

- a. Perseroan beroperasi dalam lingkungan usaha yang kompetitif, yang memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan serta dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi dan keuangan Perseroan.**

Perseroan beroperasi dalam industri jasa telekomunikasi, yang sangat kompetitif dan kian kompetitif dalam tahun-tahun belakangan. Sifat dan tingkat persaingan yang dihadapi Perseroan bervariasi untuk masing-masing layanan yang ditawarkan Perseroan. Akan tetapi, dalam setiap kasus, Perseroan bersaing atas dasar nilai (harga relatif terhadap produk dan layanan yang ditawarkan), pemasaran, kualitas jaringan, spesifikasi portofolio produk dan layanan, serta layanan pelanggan. Dalam beberapa kejadian, Perseroan bersaing dengan perusahaan yang memiliki akses terhadap pembiayaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih besar, sumber daya pemasaran yang lebih besar, dan pengenalan merek yang lebih unggul, serta hubungan jangka panjang dengan otoritas berwenang dan pelanggan.

Secara khusus, Telkom, yang merupakan penyedia layanan jaringan tetap utama di Indonesia, merupakan pesaing utama berbasis fasilitas untuk layanan jaringan tetap pita lebar (fixed broadband). Telkomsel, yang merupakan anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki TELKOM, juga merupakan operator telepon seluler terkemuka di Indonesia. TELKOM juga menyediakan berbagai jasa telekomunikasi, termasuk interkoneksi, jaringan, layanan data dan internet, serta layanan telekomunikasi lainnya. Dalam usaha dan pasar wholesale, TELKOM merupakan peserta aktif dan menempati posisi yang kuat dengan jaringan tengah berbasis serat optik, gelombang mikro, dan satelit yang ekstensif serta jaringan kabel serat optik bawah laut. Menurut Analysis Mason, TELKOM memimpin jauh dari segi cakupan dan kualitas jaringan di luar Jawa dibandingkan operator lainnya. Terlebih lagi, TELKOM menguasai pangsa pasar konsumen yang substansial dan menggabungkan layanan video kabel dengan suara, layanan pita lebar dan seluler, sehingga TELKOM mampu bersaing secara efektif dengan Perseroan.

Rencana penggelaran serat optik yang diumumkan oleh beberapa pesaing Perseroan dapat meningkatkan persaingan bisnis telekomunikasi Indonesia di masa depan. Dengan kondisi tersebut, Perseroan mungkin harus menawarkan nilai yang lebih baik melalui harga produk dan jasa yang lebih menarik dan Perseroan mungkin kehilangan pelanggan potensial maupun pelanggan yang ada. Pada gilirannya, kondisi ini akan menyebabkan penurunan pendapatan dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Layanan data dan internet Perseroan mengalami persaingan yang lebih ketat dari operator data dan internet lainnya, termasuk operator seluler. Terlebih lagi, dengan peningkatan popularitas ponsel pintar di Indonesia, layanan data dan internet menjadi ajang kompetisi yang ketat dalam industri Perseroan. Persaingan dapat menjadi semakin tajam di masa depan sehingga memengaruhi kinerja keuangan layanan data dan internet Perseroan, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan secara keseluruhan.

Di samping itu, dalam hal para pesaing Perseroan memperoleh alokasi spektrum yang lebih besar dibandingkan Perseroan di masa depan (sebagai contoh, untuk tujuan meningkatkan dan memperluas 4G/Evolusi Jangka Panjang (Long Term Evolution) dan potensi peluncuran layanan 5G), para pesaing tersebut mungkin berhasil meningkatkan kecepatan unduh dan ketersediaan layanan seluler serta

mampu bersaing secara lebih efektif dengan Perseroan. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

Dampak persaingan terhadap kegiatan usaha Perseroan melibatkan ketidakpastian yang tinggi dan akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi, perkembangan peraturan perundang-undangan, perilaku pelanggan dan pesaing, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil Perseroan sebagai respons terhadap persaingan yang dihadapi Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memenangkan persaingan tergantung pada layanan pelanggan, strategi pemasaran, dan kemampuan Perseroan untuk mengantisipasi dan merespons berbagai faktor-faktor persaingan yang memengaruhi industri Perseroan, termasuk peluncuran layanan dan teknologi baru, perubahan preferensi konsumen, tren demografis, kondisi ekonomi, dan strategi potongan harga yang dilakukan para pesaing. Apabila Perseroan tidak berhasil merespons persaingan dan mengimbangi penurunan harga dengan meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan penggunaan, dan menawarkan layanan baru, maka pendapatan dan profitabilitas Perseroan akan mengalami penurunan.

***b. Merger atau konsolidasi di antara pelanggan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan.***

Konsolidasi yang signifikan di antara pelanggan Perseroan, seperti merger Indosat-Hutchison 3, dapat menimbulkan penurunan permintaan dari perusahaan yang terkonsolidasi. Konsolidasi selama ini telah terjadi dan diperkirakan akan tetap terjadi dalam industri Perseroan di masa depan. Konsolidasi lebih lanjut di antara penyedia layanan selular dapat terjadi, yang mungkin didorong oleh faktor-faktor persaingan serta upaya untuk mengurangi biaya operasi dan memperoleh alokasi spektrum yang lebih luas. Selain itu, Pemerintah juga mendorong terjadinya konsolidasi, termasuk melalui diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur gugus telekomunikasi dalam upaya untuk mendorong persaingan yang lebih sehat di antara pemain industri yang lebih sedikit dengan profil efisiensi biaya yang lebih baik dan alokasi spektrum yang lebih luas. Konsolidasi dapat menyebabkan penurunan belanja modal di masa depan secara keseluruhan, apabila perusahaan-perusahaan yang terkonsolidasi tersebut memiliki rencana ekspansi yang serupa. Pelanggan Perseroan mungkin memutuskan untuk tidak memperbaharui perjanjian dengan Perseroan karena konsolidasi tersebut. Pengakhiran perjanjian akibat konsolidasi industri dapat menyebabkan dampak merugikan yang material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan likuiditas Perseroan.

***c. Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari sejumlah kecil pelanggan, dan pengakhiran, tidak dilakukannya perpanjangan, atau perubahan yang material atas perjanjian dengan para pelanggan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan.***

Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari sejumlah kecil pelanggan, terutama dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 34,8% dari pendapatan Perseroan berasal dari Bakti, sementara pelanggan terbesar Perseroan lainnya (Smartfren/Smarttel, Hutchinson 3 Indonesia, dan XL Axiata), 12,7% pendapatan Perseroan berasal dari (Smartfren/Smarttel), 2,6% berasal dari (Hutchinson 3 Indonesia) dan 2.2% berasal (XL Axiata). Apabila salah satu pelanggan tersebut tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Perseroan dengan para pelanggan tersebut, maka pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Terdapat kemungkinan bahwa perselisihan dengan pelanggan Perseroan dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian antara Perseroan dengan pelanggan yang bersangkutan atau perubahan yang material terhadap ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut. Salah satu dari hal-hal

tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perseroan. Apabila Perseroan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui tuntutan hukum, hubungan Perseroan dengan pelanggan yang bersangkutan mungkin berakhir atau terganggu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan atau kenaikan biaya, yang menghasilkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan likuiditas Perseroan.

Di samping itu, Perseroan mengandalkan, dan bagian signifikan dari pendapatan Perseroan berasal dari proyek-proyek yang berdiri sendiri seperti Proyek Palapa Ring, yang menyumbangkan 34,8% terhadap pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kegagalan Perseroan dalam menyelesaikan proyek-proyek yang berdiri sendiri sebagaimana mestinya, memenuhi kewajiban Perseroan yang berlaku atas proyek-proyek tersebut atau keengganan atau ketidakmampuan mitra Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian Perseroan dengan para mitra tersebut, dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan likuiditas Perseroan.

***d. Tingkat perpindahan pelanggan (churn rate) dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan***

Tingkat perpindahan pelanggan rata-rata per bulan Perseroan mencapai 0,3% per 31 Desember 2021 untuk total pelanggan di Segmen Wholesale, sementara tingkat perpindahan pelanggan rata-rata per bulan Perseroan secara berturut-turut mencapai 0,5% dan 0,04% di Segmen Retail dan Segmen Enterprise per 31 Desember 2021. Tingkat perpindahan pelanggan Perseroan dihitung per bulan dengan memperhitungkan jumlah pengakhiran oleh pelanggan dibandingkan total jumlah pelanggan keseluruhan. Kami meyakini bahwa tingkat perpindahan pelanggan terutama disebabkan oleh persaingan pasar yang semakin ketat. Tingkat perpindahan pelanggan yang tinggi dapat menyebabkan hilangnya pendapatan pada saat pelanggan beralih ke operator lain atau mengakhiri program berlangganan dengan Perseroan atau meningkatkan biaya akuisisi pelanggan Perseroan. Kenaikan dalam tingkat perpindahan Perseroan dapat menyebabkan fluktuasi arus kas dari kegiatan operasi Perseroan. Hal ini, pada gilirannya, dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk merencanakan dan menjalankan strategi, memantau dan memelihara sistem penagihan dan pengendalian kredit, memperkirakan pendapatan dan beban keuangan di masa depan atau untuk menghimpun modal baru dengan ketentuan yang menguntungkan. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan.

### **3. RISIKO UMUM**

#### **Risiko Makro Ekonomi**

***a. Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.***

Perekonomian Indonesia menderita dampak serius dari krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Di Indonesia, krisis tersebut ditandai oleh, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan PDB riil secara signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga menderita dampak serius dari krisis keuangan global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan merugikan yang terjadi memiliki karakteristik, antara lain, kelangkaan ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kebangkrutan lembaga keuangan global, jatuhnya pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan jatuhnya permintaan atas komoditas tertentu. Selanjutnya, meskipun perekonomian global telah

berkembang dalam tahun-tahun terakhir, penurunan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi lebih lanjut di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang luar biasa negatif tersebut telah menimbulkan dampak merugikan terhadap ekonomi negara maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, serta negara-negara berperekonomian maju di seluruh dunia, menderita dampak negatif dari kondisi ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara-negara maju. Di samping itu, Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang tinggi dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing Pemerintah rendah, Rupiah tetap bergejolak dengan likuiditas rendah, dan sektor perbankan menderita akibat tingkat kredit macet yang tinggi. Walaupun Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan keyakinan publik akan perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan berbagai aspek lainnya dalam perekonomian Indonesia. Apabila perekonomian Indonesia tetap bergejolak atau menurun, pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal, nilai tukar Rupiah dan berbagai aspek perekonomian Indonesia lainnya mungkin mengalami dampak negatif.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan terkini dalam kondisi perekonomian Indonesia akan tetap berlangsung. Secara khusus, perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang menyebabkan hilangnya keyakinan investor dalam sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas dalam pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, atau menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan atau resesi di Indonesia. Peningkatan volatilitas, perlambatan pertumbuhan atau pertumbuhan negatif dalam perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Secara khusus, ekonomi Indonesia masih terganggu oleh pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sifat dan luasnya dampak wabah ini secara penuh terhadap perekonomian Indonesia.

***b. Pasar berkembang seperti Indonesia menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan pasar yang lebih maju, dan apabila risiko-risiko tersebut terjadi, konsekuensinya dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Anda dapat menderita kerugian yang signifikan atas investasi Anda.***

Secara historis, seluruh pendapatan Perseroan diperoleh dari operasi Perseroan di Indonesia, dan Perseroan memperkirakan bahwa Perseroan akan tetap memperoleh sebagian besar pendapatannya dari Indonesia. Dalam hal Perseroan memperluas pendapatan di luar Indonesia, Perseroan memperkirakan pendapatan tersebut akan tetap diperoleh dari pasar berkembang di Asia Tenggara. Secara historis, karakteristik pasar berkembang seperti Indonesia dicirikan oleh volatilitas signifikan dan kondisi politik, sosial dan ekonomi mungkin memiliki perbedaan signifikan dibandingkan ekonomi yang lebih maju. Risiko-risiko spesifik yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan meliputi:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- Gejolak nilai tukar;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- peristiwa bencana, penyebaran penyakit menular, bencana alam, dan *acts of God* yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan (termasuk ketidakpastian yang timbul dari pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung);

- keamanan data dan serangan siber;
- intervensi negara, termasuk tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan struktur peraturan perundang-undangan, pajak dan hukum;
- Liabilitas untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan pertanggung jawaban asuransi yang memadai;
- kesulitan dan penundaan dalam memperoleh atau memperpanjang izin, surat izin, dan otorisasi;
- tindakan pemerintah dan penerapan peraturan yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- fluktuasi nilai tukar;
- transportasi, energi, dan infrastruktur lainnya yang tidak memadai; dan
- penyitaan aset.

Secara umum, investasi di pasar berkembang hanya cocok untuk investor yang cakap dan berpengalaman, yang sepenuhnya memahami pentingnya risiko-risiko yang terlibat dalam menanamkan investasi di pasar berkembang. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan politik dan sosial di Indonesia selama ini tidak dapat diprediksi, dapat berubah dengan cepat, dan oleh karenanya, informasi yang disajikan dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan dalam waktu yang relatif singkat. Apabila salah satu risiko-risiko terkait dengan investasi di pasar berkembang, terutama di Indonesia, menjadi nyata, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material, dan nilai investasi Anda dapat mengalami penurunan signifikan.

### **Risiko Tingkat Suku Bunga**

***Utang Perseroan dengan suku bunga mengambang menyebabkan Perseroan tunduk pada fluktuasi tingkat suku bunga, yang dapat memengaruhi biaya pinjaman dan kinerja operasi Perseroan.***

Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kewajiban berbunga sebesar Rp7.896,2 miliar. Sebagian kewajiban utang Perseroan memiliki suku bunga mengambang dan menyebabkan Perseroan terpapar risiko fluktuasi tingkat suku bunga. Beban bunga bagi Perseroan atas utang dengan suku bunga mengambang tersebut dapat berfluktuasi sesuai dengan tingkat suku bunga dasar. Kenaikan tingkat suku bunga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja operasi dan arus kas operasi Perseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian lindung nilai tingkat suku bunga untuk utang Perseroan dengan suku bunga mengambang; hal ini mungkin ternyata tidak menguntungkan atau dapat menciptakan risiko tambahan.

### **Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan**

***a. Penerapan peraturan benturan kepentingan OJK dapat menyebabkan Perseroan melewatkan transaksi yang menguntungkan bagi Perseroan.***

Guna melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“Peraturan OJK No. 42/2020”) memberikan hak suara kepada pemegang saham independen perusahaan publik di Indonesia untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap transaksi, baik material maupun tidak, yang mengandung “benturan kepentingan” berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, kecuali transaksi tersebut termasuk dalam pengecualian tertentu yang diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Transaksi antara Perseroan dan entitas lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan mungkin merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Akibatnya, persetujuan pemegang mayoritas saham yang tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi (“pemegang saham tidak memihak”) harus diperoleh apabila

terdapat benturan kepentingan. OJK memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan ini dan pemegang saham Perseroan mungkin juga berhak untuk memohon penegakan atau melaksanakan tindakan penegakan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Ketentuan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham tidak memihak dapat membebani Perseroan dari segi waktu dan biaya, dan dapat menyebabkan Perseroan melepaskan transaksi-transaksi tertentu yang dalam keadaan lain dipandang menguntungkan Perseroan. Terlebih lagi, tidak ada jaminan bahwa persetujuan pemegang saham tidak memihak akan diperoleh apabila diminta.

#### **Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

##### ***a. Perseroan mungkin menghadapi tuntutan hukum dan perkara hukum.***

Perseroan mungkin terlibat dalam tuntutan hukum dan perkara hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pihak ketiga dan klaim pelanggaran HaKI, klaim terkait perlindungan data dan privasi, kasus yang terkait dengan tenaga kerja, dan hal-hal lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, baik secara geografis ke seluruh Indonesia dan melalui penambahan kegiatan usaha baru, Perseroan telah mengalami, dan mungkin mengalami tuntutan-tuntutan sebagaimana tersebut di atas dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak. Sebagai contoh, Perseroan sedang berperkara di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan salah satu pelanggan Perseroan (BAKTI), yang timbul dari perselisihan mengenai interpretasi kontraktual sehubungan dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut interpretasi Perseroan atas peraturan pajak Indonesia, nilai komersial kontrak yang terkait seharusnya tidak termasuk jumlah yang terutang terkait PPN. Seluruh pembayaran PPN yang wajib dilakukan terkait dengan kontrak yang terkait telah dikenakan dan dibayarkan [oleh Perseroan] sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia. Tuntutan, gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum dapat merusak reputasi Perseroan, membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan usahanya dalam bidang-bidang yang terpengaruh, dan menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan. Hasil gugatan, penyelidikan, dan perkara hukum secara inheren bersifat tidak pasti, dan dalam keadaan bagaimanapun, pembelaan terhadap gugatan tersebut dapat memakan biaya dan waktu serta dapat mengalihkan upaya dan sumber daya manajemen dan personel Perseroan lainnya secara signifikan. Ketetapan yang merugikan dalam tuntutan, penyelidikan, atau perkara hukum dapat menyebabkan Perseroan harus membayar ganti rugi, mengeluarkan biaya hukum dan biaya lainnya, membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan usaha atau mengharuskan Perseroan untuk mengubah cara Perseroan beroperasi.

#### **4. RISIKO BAGI INVESTOR**

##### **Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari**

##### ***a. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan dan harga pasar Saham yang Ditawarkan.***

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia diberi peringkat “Baa2” (stabil) oleh Moody’s, “BBB” (stabil) oleh Fitch, dan “BBB” (negatif) oleh S&P. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya serta kemampuan dan kesediaan Pemerintah untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan peningkatan dibandingkan peringkat yang diberikan oleh badan pemeringkat kredit internasional tersebut atas Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1997.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Moody's, S&P, Fitch atau lembaga pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia. Secara khusus, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, mungkin mengalami penurunan lebih lanjut akibat dampak pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Pada 6 April 2020, S&P mengafirmasi peringkat utang jangka panjang dalam valuta asing Indonesia pada peringkat "BBB", akan tetapi menurunkan outlook dari stabil ke negatif. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang terus berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sifat dan luasnya dampak wabah ini secara penuh terhadap peringkat utang tersebut.

Penurunan peringkat utang Indonesia atau perusahaan Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap likuiditas terhadap pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah atau perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk memperoleh pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga atau ketentuan komersial lainnya yang tersedia bagi pembiayaan tambahan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan.

***b. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS atau mata uang lainnya akan memengaruhi nilai ekuivalen dalam mata uang asing atas nilai saham Perseroan dan dividen.***

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan memengaruhi nilai ekuivalen dalam mata uang asing dari harga saham Perseroan dalam Rupiah di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan memengaruhi jumlah konversi yang akan diterima pemegang saham Perseroan dalam mata uang asing atas (i) dividen tunai atau distribusi lainnya yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan atas saham Perseroan, dan (ii) penerimaan yang dibayarkan dalam Rupiah atas penjualan saham Perseroan di pasar sekunder. Nilai tukar Rupiah dan mata uang tertentu telah mengalami fluktuasi signifikan di masa lalu. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS (berdasarkan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia) adalah Rp14.481 - AS\$1,00 per 31 Desember 2018 dan Rp13.901 = AS\$1.00 per 31 Desember 2019. Meskipun Rupiah telah mengalami apresiasi cukup besar sejak titik terendah sekitar Rp17.000 per Dolar AS pada tahun 1998, Rupiah tetap mengalami volatilitas yang signifikan. Secara khusus, Rupiah mengalami pelemahan signifikan terhadap dolar AS selama paruh pertama tahun 2020, terdepresiasi sebesar 19,8% dari nilai tukar (berdasarkan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia) Rp13.662 - AS\$1,00 per 31 Januari 2020 menjadi Rp16.367 - AS\$1,00 per 31 Maret 2020, sebelum terapresiasi menjadi Rp14.105 = AS\$ per 31 Desember 2020, terutama akibat pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung.

Rupiah secara umum dapat dipertukarkan dan dialihkan secara bebas (dengan pengecualian bank-bank di Indonesia dilarang mengirim Rupiah kepada pihak di luar Indonesia dan dilarang melakukan transaksi dengan bukan penduduk). Akan tetapi, dari waktu ke waktu Bank Indonesia mungkin melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mendukung kebijakannya lebih lanjut, baik dengan menjual Rupiah atau menggunakan cadangan devisanya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas lebih lanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia saat ini tidak akan mengalami perubahan, bahwa depresiasi Rupiah lebih lanjut terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar AS, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk menstabilkan, mempertahankan, atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa dalam hal salah satu tindakan tersebut diambil, maka tindakan tersebut akan berhasil.

Perubahan kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku saat ini dapat menyebabkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi, kekurangan likuiditas, pembatasan modal atau mata uang asing, atau penundaan bantuan keuangan tambahan dari kreditur internasional. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan terdepresiasi terhadap dolar AS dan/atau mata uang lainnya. Depresiasi tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan bagi investasi Anda sebagaimana diuraikan di atas.

**c. Kondisi pasar dan ekonomi mungkin memengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Perseroan, yang mungkin berfluktuasi dengan signifikan.**

Pergerakan bursa efek internasional dan domestik, kondisi perekonomian, nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, bila ada, akan dikutip dan diumumkan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya akan memengaruhi, antara lain, nilai keuntungan yang akan diterima pemegang saham dari penjualan Saham Perseroan dalam mata uang asing dan nilai pembagian dividen dalam mata uang asing. Selain itu, terdapat kemungkinan diberlakukannya peraturan devisa yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah ke mata uang asing lainnya. Dividen juga mungkin tunduk pada pajak penghasilan Indonesia.

- Harga saham Perseroan setelah Penawaran mungkin berfluktuasi secara luas, tergantung pada berbagai faktor, termasuk:
- perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para pembeli dan analis;
- penambahan atau pengurangan personel kunci;
- keterlibatan dalam perkara hukum;
- pengumuman yang diterbitkan Perseroan terkait aksi korporasi yang signifikan, seperti akuisisi, aliansi strategis, atau ventura bersama;
- akuisisi yang dilakukan Perseroan atau pesaing Perseroan;
- pengumuman yang dibuat oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- perubahan rekomendasi atau persepsi analis tentang Perseroan atau Indonesia;
- perubahan dalam kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar secara umum di Indonesia;
- perubahan harga efek saham perusahaan di pasar asing (terutama Asia) dan di pasar berkembang;
- kapitalisasi pasar bukan merupakan indikasi valuasi bisnis Perseroan;
- peraturan pemerintah, termasuk peraturan yang menerapkan pembatasan perdagangan atas efek tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan ketentuan margin;
- permasalahan yang sebelumnya dihadapi oleh BEI tetap berlanjut atau terjadi kembali, termasuk penutupan bursa, pelanggaran dan pemogokan pialang saham, penundaan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI;
- tingkat kedalaman dan likuiditas pasar bagi Saham, termasuk likuiditas Saham dibandingkan saham lainnya di pasar pada waktu Penawaran;
- aktivitas perdagangan “short squeeze” baik yang terjadi maupun disangkakan;
- fluktuasi harga pasar saham; dan
- penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan dan/atau perubahan pengendalian atas Perseroan.

**d. Penjualan saham Perseroan di masa depan mungkin menimbulkan dampak merugikan terhadap harga pasar saham tersebut.**

Penjualan sejumlah besar saham Perseroan di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan demikian mungkin terjadi di masa depan, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk menggalang modal melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas atau efek berbasis ekuitas. Penjualan sejumlah besar saham Perseroan oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham baru oleh Perseroan setelah berakhirnya pembatasan tersebut, atau persepsi bahwa penjualan demikian mungkin terjadi di masa depan, dapat menyebabkan penurunan harga saham Perseroan dan menyulitkan Perseroan untuk menggalang modal.

### **Risiko likuiditas saham perseroan**

- a. Kondisi pasar surat berharga di Indonesia atau negara lainnya mungkin memengaruhi harga atau likuiditas Saham yang Ditawarkan dan ketiadaan pasar untuk saham tersebut sebelumnya mungkin menyebabkan kurangnya likuiditas.***

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, nilai kapitalisasi saham di pasar modal Indonesia tetap relatif kecil dibandingkan pasar modal yang lebih maju di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, atau Hong Kong. Harga-harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih bergejolak dibandingkan pasar lain sedemikian. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memperkirakan apakah pasar perdagangan untuk Saham yang Ditawarkan akan berkembang, dan dalam hal pasar tersebut berkembang, Perseroan tidak dapat memperkirakan likuiditas atau keberlanjutan pasar tersebut, atau apakah harga perdagangan Saham yang Ditawarkan tidak akan mengalami penurunan hingga lebih rendah dari Harga Penawaran. Apabila pasar perdagangan yang aktif tidak berkembang atau tidak dapat dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan Saham yang Ditawarkan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Walaupun Perseroan telah menerima Persetujuan Prinsip dari BEI, tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk Saham yang Ditawarkan akan berkembang, ataupun menjamin, dalam hal pasar tersebut berkembang, likuiditas dari pasar untuk Saham yang Ditawarkan tersebut.

### **Kepentingan pemegang saham pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan calon investor**

- a. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Perseroan mungkin bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham yang Ditawarkan.***

Pemegang Saham Pengendali Perseroan mungkin memiliki kepentingan bisnis di luar operasi Perseroan dan mungkin mengambil tindakan, baik melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan, yang mengutamakan atau menguntungkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan atau perusahaan lain dibandingkan Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mengadakan, dan berencana untuk tetap mengadakan, transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan/atau afiliasinya. Meskipun setiap transaksi benturan kepentingan yang dilakukan Penawaran dengan pihak berelasi setelah Penawaran wajib memperoleh persetujuan sesuai dengan peraturan OJK, tidak ada jaminan bahwa jumlah yang dibayarkan Perseroan dalam transaksi tersebut akan mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh pihak ketiga yang independen dalam transaksi yang dapat diperbandingkan.

- b. Pembeli mungkin tunduk kepada pembatasan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas.***

Urusan perusahaan Perseroan diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan, hukum yang mengatur perusahaan yang didirikan di Indonesia, undang-undang dan peraturan pasar modal Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dan OJK. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari standar yang berlaku dalam yurisdiksi lain secara signifikan, termasuk hal-hal yang terkait dengan independensi Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. Hak-hak pemegang saham Perseroan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku atas perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Kewajiban-kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris dan direktur terhadap para pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia kemungkinan lebih terbatas dibandingkan dengan kewajiban yang berlaku di negara-negara lain. Oleh karenanya, para pemegang saham minoritas mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini sampai sejauh yang berlaku di negara-negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, kewajiban fidusia yang dibebankan kepada pihak manajemen, Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas diatur di dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya, peraturan OJK (termasuk peraturan BAPEPAM-LK), peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut mungkin berbeda dengan prinsip-prinsip yang berlaku seandainya Perseroan didirikan di yurisdiksi selain Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep yang terkait dengan kewajiban fidusia manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan-tindakan direktur dan komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama perusahaan terkait atau diuji di hadapan pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru diatur pada tahun 1995 serta belum terbukti dalam praktiknya. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal tersebut dapat dilaksanakan, ketiadaan preseden pengadilan dapat menyebabkan proses gugatan perdata tersebut menjadi jauh lebih sulit. Oleh karenanya, tidak ada jaminan bahwa hak-hak hukum atau hak pemulihan pemegang saham minoritas akan setara atau seluas hak-hak hukum atau hak pemulihan yang tersedia dalam yurisdiksi lain, atau memadai untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

***c. Hak Anda untuk berpartisipasi dalam penawaran terbatas Perseroan di masa depan mungkin dibatasi, yang dapat menyebabkan kepemilikan saham Anda terdilusi.***

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi atas kepemilikan sahamnya apabila Perseroan menerbitkan Saham atau efek ekuitas baru di masa depan. Apabila dana dihimpun melalui penerbitan Saham atau efek bersifat ekuitas atau efek terkait ekuitas lainnya atas dasar selain pro-rata bagi pemegang saham lama, persentase kepemilikan pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Selain itu, Saham atau efek bersifat ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak, preferensi, atau keistimewaan yang melebihi hak, preferensi, atau keistimewaan Saham pemegang saham lama.

Selain itu, berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah oleh POJK No. 32/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang berlaku efektif pada tanggal 30 April 2019, perusahaan tercatat wajib menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan untuk mengambil bagian dan membayar saham dalam jumlah yang proporsional terhadap kepemilikan sahamnya untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya sebelum penerbitan saham baru, dengan pengecualian tertentu sebagaimana diatur oleh hukum. Sebagai contoh, dalam hal “kesulitan keuangan” sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, maka hak memesan efek terlebih dahulu bagi pemegang saham lama mungkin dikesampingkan. Perseroan juga dapat menerbitkan saham baru tanpa menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Penawaran dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham, yang wajib diperoleh dari pemegang saham independen dan pemegang saham tidak terafiliasi.

Dalam hal Perseroan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan untuk membeli atau memesan saham baru atau mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan dengan cara lain, Anda mungkin tidak dapat melaksanakan hak atas saham kecuali undang-undang sekuritas yang berlaku di yurisdiksi Anda telah dipatuhi. Sebagai contoh, pemegang saham dari yurisdiksi tertentu mungkin tidak dapat melaksanakan hak-hak tersebut atau Perseroan mungkin tidak dapat menawarkan hak-hak atas saham tersebut kecuali pernyataan pendaftaran

berdasarkan undang-undang sekuritas yang berlaku di yurisdiksi tersebut telah efektif sehubungan dengan saham baru atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan undang-undang tersebut telah tersedia.

Dalam hal Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan kewajiban potensial yang berhubungan dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi peraturan-peraturan di luar Indonesia serta faktor-faktor lainnya yang dipandang patut oleh Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan mungkin memilih untuk tidak mematuhi ketentuan undang-undang sekuritas di yurisdiksi tertentu, dan dalam hal demikian, dan apabila tidak tersedia pengecualian dari ketentuan pendaftaran atau persyaratan pencatatan yang tersedia, maka pemegang saham Perseroan dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran HMETD atau penawaran serupa, dan kepemilikan sahamnya akan terdilusi. Oleh karenanya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Anda akan mampu mempertahankan kepemilikan ekuitas secara proporsional dalam Perseroan. Di samping itu, mengingat penawaran umum terbatas di Indonesia umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan potongan harga yang besar dibandingkan harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan berpartisipasi dapat menyebabkan pemegang saham Perseroan menderita kerugian ekonomi yang material.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.**

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 23 Juni 2022 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasian sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali:

- Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CM5/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 400.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purpose*.
- Perseroan telah melakukan pelunasan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A sebesar Rp 347.000.000.000 pada tanggal 7 Juli 2022.

Laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit, namun, telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya tertanggal 23 Juni 2022. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 4/2022 serta SEOJK No. 4/2022. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 23 Juni 2022 atas laporan keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, kecuali:

- Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CM5/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 400.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purpose*.
- Perseroan telah melakukan pelunasan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A sebesar Rp 347.000.000.000 pada tanggal 7 Juli 2022.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000</b>	<b>500.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Sorta Regina Simanjuntak	525	52.500.000,-	35,00
2. Tediando Sukirman	150	15.000.000,-	10,00
3. Herald Hutauruk	825	82.500.000,-	55,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.500</b>	<b>150.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.500</b>	<b>350.000.000,-</b>	

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pemborong dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dibidang pemborong (Kontraktor) terutama dalam bidang pembangunan gedung-gedung, bidang perencanaan, pembuatan/pemasangan bangunan untuk keperluan jalan, jembatan, bendungan, dermaga, irigasi, instalasi listrik, air dan telekomunikasi.
- Menjalankan usaha dibidang jasa telekomunikasi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 33, tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0054493.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 21 Maret 2022, serta telah diberitahukan ke Menkumham dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2022 ("**Akta No. 33/2022**"). Akta No. 33/2022 memuat perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan modal Perseroan.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT

dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 (“Akta No. 95/2022”). Akta No. 95/2022 memuat perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Lebih lanjut, Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas *Call Centre* yang saat ini keduanya belum dijalankan oleh Perseroan.

## 2. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang saham pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta 33/2022 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	33,78
2. PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000	45,71
3. PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000	20,51
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>21.121.204.391</b>	<b>2.112.120.439.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.547.104.500</b>	<b>1.154.710.450.000</b>	-

## 3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA

Kejadian Penting utama Perseroan sejak pendirian Perseroan meliputi hal-hal berikut ini:

- 2000** • Perseroan resmi berdiri dan memulai usahanya sebagai penyedia layanan internet dan kartu telepon.
- 2007** • Bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik sepanjang 7,5 km di Pulau Jawa.
- 2008** • Pembukaan kantor internasional di Singapura yaitu Moratel International Pte, Ltd. serta membangun kabel laut Moratelindo *International Cable-System One* (MIC-1) yang menghubungkan Jakarta dengan Singapura.

- 2010** • Memperoleh lisensi *Facilities-Based Operations* (FBO) dari Pemerintah Singapura untuk membangun jaringan kedua yang menghubungkan Batam, Dumai dan Malaka (*submarine*) serta membangun jaringan *Sumatera backbone*.
- 2012** • Membangun jaringan kabel laut internasional ketiga yang menghubungkan Bangka, Bintan, Batam dan Singapura dan mendirikan 6 (enam) NDC
- 2014** • Membangun Metro-E (kabel serat optik dalam kota) pada 21 kota di Indonesia.
- 2015** • Membangun FTTX untuk pelanggan korporasi.
- 2016** • Dipercaya untuk menjalankan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Indonesia, yaitu Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur. Proyek Palapa Ring bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Kami juga meluncurkan *brand* “Oxygen.id” untuk pelanggan retail (FTTX).
- 2017** • Memasuki pasar ritel (FTTH) melalui *brand* “Oxygen.id”.  
• Melakukan Penawaran Umum Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 dengan kode “MORA” di Bursa efek Indonesia dengan nilai obligasi Rp1 triliun dengan peringkat *idA* (*Single A*) dari PEFINDO, yang terdiri dari obligasi Seri A senilai Rp540 miliar dan obligasi Seri B senilai Rp460 miliar.
- 2018** • Proyek Palapa Ring Barat mulai beroperasi.
- 2019** • Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo senilai Rp3 triliun, yang dibagi menjadi beberapa tahapan. Sampai dengan akhir tahun 2021, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo telah diterbitkan dalam 4 tahap.  
• Proyek Palapa Ring Paket Timur beroperasi.
- 2020** • memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang melalui KSO BPS-MORATELINDO yang merupakan joint operation antara Perusahaan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Persero) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi.
- 2021** • Peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor dari Rp658.750.971.015 menjadi Rp2.112.120.439.015 yang sebagian diambil oleh pemegang saham secara proporsional. Perseroan menerbitkan saham Seri C sebanyak 151.771 saham, yang seluruhnya diambil oleh PT Smart Telecom (anak perusahaan PT Smartfren Telecom Tbk) sebesar Rp 360 miliar pada tanggal 25 Mei 2021, sehingga PT Smart Telecom menjadi pemegang saham baru dengan kepemilikan 20,51%.  
• Akuisisi 145.730 saham IPT atau 65% dari total kepemilikan di IPT.  
• Memperluas FTTH di luar Jawa ke kota-kota baru seperti Jambi, Bandung, Semarang, dan memperluas FTTX ke kota-kota baru seperti Kupang dan Labuan Bajo.

#### 4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan serta kepemilikan saham dalam Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

##### 2019 dan 2020

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 88 tanggal 18 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0163578 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0102270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017 (“Akta No. 88/2017”).

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Nominal Seri A Rp100.000,-/saham Seri B Rp809.349,-/saham	%
		Seri A	Seri B		
<b>Modal Dasar</b>		<b>250.000</b>	<b>338.235</b>	<b>298.750.159.015,00</b>	
<b>Modal Disetor dan Ditempatkan</b>					
1.	PT Gema Lintas Benua (“GLB”)	250.000	-	25.000.000.000,00	42,50
2.	PT Candrakarya Multikreasi (“CKM”)	-	338.235	273.750.159.015,00	57,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>250.000</b>	<b>338.235</b>	<b>298.750.159.015,00</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>		-	-	-	

## 2021

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 49 tanggal 17 Juni 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 49/2021**”), para pemegang saham telah menyetujui perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) menjadi Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 17 Juni 2021, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0383297 tanggal 17 Juni 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107289.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Juni 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 49/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham			Nilai Nominal Seri A Rp100.000,- /saham Seri B Rp809.349,- /saham Seri C Rp2.372.000/saham	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
<b>Modal Dasar</b>		<b>250.000</b>	<b>338.235</b>	<b>151.771</b>	<b>658.750.971.015</b>	
<b>Modal Disetor dan Ditempatkan</b>						
1.	PT Gema Lintas Benua	250.000	-	-	25.000.000.000	33,78
2.	PT Candrakarya Multikreasi	-	338.235	-	273.750.159.015	45,71
3.	PT Smart Telecom	-	-	151.771	360.000.812.000	20,51
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>250.000</b>	<b>338.235</b>	<b>151.771</b>	<b>658.750.971.015</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>		-	-	-	-	

- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 39 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 39/2021**”), yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp658.750.971.015,- (enam ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah), menjadi sebesar Rp2.112.120.439.015,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 612.719 (enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan belas) lembar saham baru seri C dengan nilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per saham Seri C. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0489651 tanggal 22 Desember 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0227852.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 39/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham			Nilai Nominal Seri A Rp100.000,- /saham Seri B Rp809.349,- /saham Seri C Rp2.372.000/saham	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
<b>Modal Dasar</b>		<b>250.000</b>	<b>338.235</b>	<b>764.490</b>	<b>2.112.120.439.015</b>	
<b>Modal Disetor dan Ditempatkan</b>						
1.	PT Gema Lintas Benua	250.000	-	-	25.000.000.000	33,78
2.	PT Gema Lintas Benua	-	-	206.998	490.999.256.000	
3.	PT Candrakarya Multikreasi	-	338.235	-	273.750.159.015	45,71
4.	PT Candrakarya Multikreasi	-	-	280.056	664.292.832.000	
5.	PT Smart Telecom	-	-	277.436	658.078.192.000	20,51
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>250.000</b>	<b>338.235</b>	<b>764.490</b>	<b>2.112.120.439.015</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>		-	-	-	-	

## 5. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan bidang penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain sebagai berikut:

### 1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 838 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup tanggal 4 November 2015, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional yang berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

### 2) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 004/TEL.01.02/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup tanggal 11 Januari 2021, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup untuk menyelenggarakan jaringan tetap tertutup dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional. Izin ini berlaku tanpa batas waktu,

sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

3) **Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed Switched***

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 580 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed Switched* tanggal 5 November 2018, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed Switched* untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional. Izin ini berlaku tanpa batas waktu sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

4) **Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*)**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 73 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*) tanggal 15 Februari 2016, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*) ini untuk menyelenggarakan jasa interkoneksi internet yang disediakan oleh Perusahaan. Izin ini berlaku sampai jangka waktu tidak terbatas, sepanjang Perseroan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

5) **Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*)**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 78 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) tanggal 18 Februari 2016, Perseroan diberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) ini untuk menyelenggarakan jasa akses internet yang disediakan oleh Perusahaan dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional. Izin ini berlaku sampai jangka waktu tidak terbatas, sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

6) **Surat Persetujuan Operasional NIX Paket 13 (Jakarta)**

Berdasarkan Surat Persetujuan Operasional Penyediaan Nusantara Internet Exchange/ National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket 13 DKI Jakarta No. 002/BP3TI/PPK-IO/KOMINFO/4/2013 tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, yang menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi syarat dan diberikan persetujuan mulai pengoperasian Penyediaan Nusantara Internet Exchange/National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket 13 DKI Jakarta terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

7) **Surat Persetujuan Operasional NIX**

Berdasarkan Surat Persetujuan Operasional NIX Paket 2 (Batam) No. 2329/BP3TI.4/KOMINFO/12/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, yang menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi syarat dan diberikan persetujuan mulai pengoperasian Penyediaan Nusantara Internet Exchange/National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket 2 (Batam) terhitung mulai tanggal 21 Desember 2012 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

## 6. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

### A. Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
<b>PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("BPS")</b>			
1.	<b>Perjanjian Kerja Sama Operasi Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 001/PKS/SEKPER-MTI/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang ditegaskan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 30 tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang No. 25 tanggal 14 September 2020 dihadapan Soes Asmara Agrawati, SH., Notaris di Semarang.</b>	Dalam rangka untuk melaksanakan kerjasama dalam proyek pembangunan dan penyelenggaraan pasif telekomunikasi Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang, Para Pihak telah sepakat membentuk kerja sama operasi sebagai suatu badan yang khusus untuk pelaksanaan proyek dengan nama KSO BPS-MORATELINDO yang efektif berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama proyek, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, proyek ini masih dalam tahap proses konstruksi.	6 Desember 2019 sampai dengan hari terakhir di tahun ke-20 (dua puluh)
<b>PT Indosat Tbk. ("Indosat")</b>			
2.	<b>Indefeasible Right of Use (IRU) Agreement for Optical Core Fiber Link between Global Switch in Singapore and Batam in Indonesia No. 048/MTI/PKS-ISAT/V/2009 tertanggal 1 Juni 2009.</b>	Perseroan bersama dengan Indosat sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan memberikan Indosat IRU atas Optical Fiber Cores atas Global Switch dari Singapore ke Batam, yang mana kepemilikan Optical Fiber Cores tersebut tetap berada di Perseroan. Dalam Perjanjian ini, Perseroan juga akan menyediakan bahan dan jasa kerja yang dibutuhkan untuk menginterkoneksi Optical Fiber Core milik Perseroan di Singapore ke Optical Fiber Core milik Indosat di Batam. Nilai perjanjian ini adalah	15 tahun sejak 1 Juni 2009

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
		sebesar USD600.000, dengan biaya operasi dan pemeliharaan sebesar USD15.000 per tahun.	
3.	<b>Perjanjian Persilangan Kabel “Jakarta-Bangka-Batam-Singapore” Yang Melintasi Kabel Jakarta-Surabaya, SMW3 dan Jakabare No. 068/MTI/PKS-INDOSAT/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012.</b>	Perseroan bersama dengan Indosat sepakat dalam mengadakan Kerjasama untuk membangun kabel Jakarta-Bangka-Batam-Singapore dimana Perseroan akan melakukan pemasangan dan peletakan kabel Perseroan yang akan melintasi kabel indosat di 5 titik perlintasan kabel Indosat oleh kabel Perseroan.	Berlaku sejak 30 Juli 2012 sampai dengan usia operasional Kabel Moratel telah berakhir atau pada saat Kabel Moratel atau Kabel Indosat tidak dioperasikan lagi oleh Para Pihak yang bersangkutan. Saat ini, Perjanjian ini masih berlaku.
<b>PT AJN Solusindo (“AJN”)</b>			
4.	<b>Perjanjian Infeasible Right of Use for Submarine Core Jakarta - Singapore No. 082/PKS/MTI-AJN/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013.</b>	Perseroan memberikan IRU kepada AJN, yang mana kepemilikan sistem dimiliki oleh Perseroan. Nilai perjanjian antara kedua pihak adalah sebesar USD10.800.000.	15 tahun sejak 19 Desember 2013
<b>PT Graha Telekomunikasi Indonesia (“GTI”) dan PT Moimstone DasanIndonesia (“MD”)</b>			
5.	<b>Perjanjian Kerjasama Kemitraan No. 010/PKS/MTI-GTI-MDI/I/2017 tertanggal 16 Januari 2017</b>	Perseroan bersama dengan GTI dan MD sepakat dalam mengadakan kerjasama penyediaan, pembangunan, pemasaran, pengadaan dan instalasi layanan telekomunikasi dan multimedia di properti Puri Mansion milik Agung Sedayu Group.	15 tahun sejak 16 Januari 2017 sampai dengan 15 Januari 2032
<b>PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (“IBS”)</b>			
6.	<b>Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Jasa Jaringan Telekomunikasi No. 085/PKS/MTI-IBS/V/2017 tertanggal 3 Mei 2017</b>	Perseroan bersama dengan IBS sepakat dalam mengadakan kerjasama untuk sewa menyewa lokasi kepada IBS dan IBS menempatkan, memelihara dan mengoperasikan Peralatan Telekomunikasi miliknya dan pihak yang bekerja sama dengannya yang digunakan untuk keperluan operasional dalam pemberian fasilitas jasa pelayanan jaringan telekomunikasi untuk seluruh operator telekomunikasi dan perusahaan lain yang akan menggunakan jasa IBS.	5 tahun 4 bulan setelah perjanjian ini ditandatangani
<b>PT Smartfren Telecom Tbk (“SF”)</b>			
7.	<b>Perjanjian Infeasible Right of Use No. 160/PKS/MTI-</b>	Perseroan bersama dengan SF sepakat dalam mengadakan kerjasama untuk <i>Infeasible Right</i>	15 tahun sejak 8 November 2016

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
	<b>SMARTFREN/XI/2016 tertanggal 8 November 2016</b>	<i>of Use</i> dimana Perseroan akan memberikan kepada Smartfren IRU sepanjang durasi Perjanjian, yang mana kepemilikan Sistem tetap berada di Perseroan. Kemudian, Perseroan akan memasang fasilitas telekomunikasi dan peralatan untuk menginterkoneksi sistem komunikasi SF dari Bandung-Tajur, Bandung-MSC dan Bandung-MGW.	yaitu sampai dengan 8 November 2031
<b>PT Smart Telecom (“ST”)</b>			
8.	<b>Perjanjian Kerjasama Proyek Merah Putih No. 232A/PKS/MTI-ST/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019</b>	Perseroan bersama dengan ST sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan akan membangun dan mengembangkan jaringan telekomunikasi STSmart pada Deployment Area, yang termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan lahan untuk pembangunan Menara telekomunikasi berikut dengan Menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung lainnya, pekerjaan <i>Civil Mechanical Engineering</i> (CME), penyediaan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan installation, <i>commissioning and testing</i> (ICT).	5 tahun sejak 20 Agustus 2019 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 5 tahun berikutnya
<b>PT Indosat Tbk (“Indosat”) dan PT XL Axiata Tbk. (“XL”)</b>			
10.	<b>Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bersama Sistem Komunikasi Kabel Laut Jambi – Batam No. 088A/PKS/MORATEL-XL-INDOSAT/IX/2015 tertanggal 21 September 2015</b>	Perseroan bersama dengan Indosat dan XL sepakat dalam mengadakan kerjasama pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan bersama atas sistem komunikasi kabel laut Jambi – Batam.	25 tahun sejak 21 September 2015
<b>PT Hutchinson 3 Indonesia (“H3I”)</b>			
11.	<b>Perjanjian Induk Sewa Jaringan Kabel Serat Optik (Cores) No. 423/LGL-AGR/PT Mora Telematika Indonesia/MB-RSS/ICGR/VIII/16 tertanggal 1 Agustus 2016</b>	Perseroan bersama dengan H3I sepakat dalam mengadakan kerjasama pelaksanaan jaringan telekomunikasi tertutup dengan teknologi kabel serta serat optic dengan rute sepanjang Jakarta sampai dengan Surabaya melalui jalur utara dan selatan.	15 tahun sejak tanggal <i>ready for service date</i> yang disebutkan dalam berita acara sewa
<b>Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KSDAE”)</b>			

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
12.	Perjanjian Kerjasama No. 6/K5/TU/KUM 3/2/2021 / No. 018A/PKS/MTI-BKSDANTT/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021	Perseroan bersama dengan KSDAE sepakat dalam mengadakan kerjasama pelaksanaan optimalisasi pengelolaan Kawasan TWA Ruteng dengan tetap menjaga keutuhan, kelestarian dan manfaat Kawasan konservasi serta mendukung pembangunan strategis nasional yang tidak dapat dielakkan berupa pembangunan sarana komunikasi jaringan kabel fiber optic untuk menyediakan akses internet yang adil dan merata mencakup wilayah Flores sebagai upaya mengurangi kesenjangan digital, mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal sekaligus mendukung Proyek Strategis Nasional yaitu Palapa Ring.	10 tahun sejak 3 Februari 2021
<b>PT Visionet Internasional ("Visionet")</b>			
13.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet Nomor 189D/PKS/MTI-OVO/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018	Perseroan bersama dengan Visionet sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan menyediakan jasaKerjasama penyediaan internet termasuk internet IP/26, Metro E, IP Transit sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.	sejak 30 Juli 2018 hingga seluruh jangka waktu pada masing masing berita acara serah terima
<b>PT Eka Mas Republic ("Eka")</b>			
14.	Perjanjian Pemberian Layanan Nomor 041/PKS/MTI-EMR/III/2016 dan Nomor 011/EMR-MTI/PKS-Colocation/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016	Perseroan bersama dengan Eka sepakat dalam mengadakan kerjasama dimana Perseroan menyediakanKerjasama layanan penggunaan Nusantara Internet Exchange (NIX) di lokasi-lokasi berikut ini:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIX Jakarta;</li> <li>2. NIX Medan;</li> <li>3. NIX Batam;</li> <li>4. NIX Palembang;</li> <li>5. NIX Surabaya; dan</li> <li>6. NIX Bali.</li> </ol>	sejak 24 Maret 2016 hingga hingga seluruh jangka waktu pada masing-masing Berita Acara Serah Terima ("BAST") berakhir dan sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu Pihak dan/atau Para Pihak
<b>PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")</b>			

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup Perjanjian	Masa Berlaku
15.	<b>Perjanjian Berlangganan Jasa Internet, Sirkuit, dan Rack Collocation Nomor 240/PKS/MTI-AL/VIII/2019 dan Nomor 033/LA/PKS/40000/2019 tertanggal 27 Agustus 2019</b>	Perseroan bersama dengan Lintasarta mengadakan kerjasama layanan jasa internet, sirkuit dan rack collocation yang disediakan oleh Perseroan.	sejak pertama kalisejak Berita Acara Serah Terima (“BAST”) ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir hingga seluruh jangka waktu pada masing-masing BAST berakhir, sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu Pihak dan/atau Para Pihak
<b>PT MNC Kabel Mediacom (“MNCKM”)</b>			
16.	<b>Perjanjian Berlangganan Sirkuit Nomor 283A/MKM-MTI/LGL/XII/15 dan 106A/PKS/MTI-MKM/XI/2015 tertanggal 9 November 2015</b>	Perseroan bersama dengan MNCKM mengadakan kerjasama dimana Perseroan menyediakanKerjasama layanan jasa sirkuit kepada MNCKM.	Sejak 19 November 2015 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 dan jangka waktu ini akan diperpanjang secara otomatis jika tidak ada pemberitahuan dua bulan sebelum jangka waktu berakhir.

## B. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak afiliasi, antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 001A/MTI/PD-DIR/I/2017 dengan PTT, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan pemberian sejumlah dana pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada PTT dengan tujuan untuk menunjang kegiatan operasional PTT dengan nilai pinjaman sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dimana tidak terdapat bunga berikut juga jaminan atas pemberian pinjaman ini. Tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman adalah mengacu pada masing-masing Surat Permohonan Pinjaman, yang mana setiap surat permohonan pinjaman akan berlaku paling lambat 5.857 hari sejak tanggal surat permohonan pinjaman;
2. Pada tanggal 29 Juni 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 082/PKS/MTI-PRB/VI/16 dengan PRB, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan pemberian sejumlah dana pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada PRB dengan tujuan untuk menunjang kegiatan operasional PRB dengan nilai pinjaman sebesar Rp53.749.650.042,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat puluh dua Rupiah) dimana tidak terdapat bunga berikut juga jaminan atas

- pemberian pinjaman ini. Tanggal jatuh tempo pelunasan pinjaman belum ditentukan secara detail pada tanggal dan bulan di tahun 2024;
3. Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Internet No. 275D/PKS/MTI-IPT/X/2019 dengan IPT, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan Kerjasama pemberian jasa internet dari Perseroan kepada IPT dengan nilai perjanjian sebesar Rp466.200.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah). Perjanjian ini akan tetap berlaku sepanjang layanan tetap diberikan kepada IPT, dan sampai dengan tanggal prospektus ini, layanan kepada IPT masih tetap diberikan;
  4. Pada tanggal 31 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Layanan Pay TV No. 020B/PKS/MTI-OMI/I/2017 dengan OMI, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan pemasaran/penjualan paket-paket layanan Pay TV yang akan dibundling dengan produk layanan telekomunikasi Perseroan lainnya. Perjanjian ini akan tetap berlaku sepanjang BAST belum diakhiri;
  5. Pada tanggal 31 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Rack Colocation No. 020A/PKS/MTI-OMI/I/2017 dengan OMI, yang merupakan Perusahaan Anak Perseroan, sehubungan dengan rack colocation untuk digunakan sendiri. Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai seluruh layanan Pay TV berdasarkan FAB dan/atau sales order yang diajukan telah disetujui oleh OMI dalam jangka waktu order. Jangka waktu order otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya jika tidak ada pengakhiran jangka waktu order atau jangka waktu perjanjian dari salah satu pihak kepada pihak lainnya;
  6. Pada tanggal 8 November 2016, perjanjian Indefeasible Right of Use No. 160/PKS/MTI-SMARTFREN/XI/2016 dengan PT Smartfren Telecom Tbk. sehubungan dengan kepemilikan sistem yang berlaku sampai dengan 8 November 2031;
  7. Pada tanggal 18 Januari 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Pemeliharaan dan Perbaikan Dark Core No. 009A/PKS/MTI-IBS/I/2016 dengan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. ("IBST"), suatu perusahaan yang memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk, sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan atas dark core. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara pada tanggal 3 Maret 2015;
  8. Pada tanggal 10 Mei 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic No. 061A/PKS/MTI-IBS/V/2016 dengan IBST sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan pemeliharaan dan perbaikan atas dark core jaringan fiber optic. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak tanggal efektif atau hingga seluruh periode berlangganan dengan pelanggan masing-masing pihak berakhir (yang mana terlebih dahulu);
  9. Pada tanggal 5 Oktober 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kawasan No. 094B/PKS/MTI-IBS/X/2015 dengan IBST sehubungan dengan pembangunan dan pemanfaatan Infrastruktur dan Telekomunikasi secara bersama, yang mana Perseroan membangun dan melakukan penarikan Jaringan fiber optic dan IBST membangun atau menyediakan Menara dan infrastruktur BTS Hotel. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 10 tahun sejak tanggal 5 Oktober 2015;
  10. Pada tanggal 7 Agustus 2015, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Shaft dan Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 068/PKS/MORATEL-IBS/VIII/2015 dengan PT Infrastuktur Bisnis Sejahtera ("IBS"), suatu perusahaan yang memiliki hubungan melalui kepemilikan sebagian pemegang saham dengan Entitas Induk, sehubungan dengan penyewaan shaft dan penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan Gedung ST. Regis di Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pada Tanggal Prospektus, Perjanjian ini telah berakhir jangka waktunya dan masih dalam proses perpanjangan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak masih menjalankan masing-masing hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
  11. Pada tanggal 3 Mei 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Jasa Jaringan Telekomunikasi No. 085/PKS/MTI-IBS/V/2017 dengan IBS sehubungan dengan penyewaan lokasi peralatan telekomunikasi dengan nilai perjanjian sebesar Rp466.200.000,-

- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah). Perjanjian ini berlaku sejak 3 September 2017 sampai dengan 2 September 2022;
12. Pada tanggal 25 Januari 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Penggunaan Ruang No. 016/PKS/MTI-PAKKODIAN/I/2017 dengan PT Pakkodian, suatu perusahaan yang memiliki hubungan melalui kepemilikan sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk, sehubungan dengan penggunaan sebagian lahan atau ruang dalam rangka kegiatan operasional Perseroan. Pada saat ini Perjanjian masih dalam proses perpanjangan dan kerjasama masih berlangsung. Perseroan diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan ruangan kantor dan Gedung di wilayah Kapten Tendean, Jakarta Selatan;
  13. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Proyek Merah Putih No. MTI 232A/PKS/MTI-ST/VIII/2019 dengan PT Smart Telecom, yang merupakan pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan penyediaan menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung oleh Perseroan kepada PT Smart Telecom. Perjanjian ini berlaku sejak 6 Desember 2018 sampai dengan 5 Desember 2023;
  14. Pada tanggal 15 February 2021, Perseroan mengadakan perjanjian dengan IBST. Sebagian pemegang saham IBST juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang, dan berlaku selama 5 tahun dan akan berakhir dalam waktu perjanjian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penggunaan Site (BAPS);
  15. Pada tanggal 1 Februari 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan IBST. Sebagian pemegang saham IBST juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penggunaan jaringan kabel serat optik dan Metro-E Link. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun, dari 1 February 2017 hingga 31 Januari 2027;
  16. Pada tanggal 22 Juni 2020, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Triasmitra Multiniaga International (“TMI”), suatu perusahaan yang memiliki hubungan dengan Perseroan melalui kepemilikan sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang Pusat Operasi Jaringan (*Network Operations Center/NOC*) dan pengoperasiannya. Perjanjian ini berlaku hingga 26 Agustus 2034;
  17. Pada tanggal 1 November 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan penyewaan ruang NOC dan pengoperasiannya. Perjanjian ini berlaku hingga 21 Maret 2034;
  18. Pada tanggal 23 Agustus 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan inti serat optik pada Jaringan Telekomunikasi Jakarta – Surabaya, dan berlaku selama 15 tahun sejak Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) ditandatangani oleh Para Pihak;
  19. Pada tanggal 03 Oktober 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan TMI. Sebagian pemegang saham TMI juga merupakan pemegang saham MTI. Perjanjian ini terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan pasangan serat optik pada Jaringan Telekomunikasi/Sistem Kabel Surabaya - Denpasar. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun sejak 3 Oktober 2017, atau hingga 4 September 2032;
  20. Pada tanggal 15 Mei 2018, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Jejaring Mitra Persada (“JMP”) yang mana sebagian pemegang saham JMP juga merupakan pemegang saham Perseroan. Perjanjian ini terkait dengan hak pakai tanpa batas waktu atas sistem kabel bawah laut Batam – Dumai.

## C. Perjanjian Kredit

### A. Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
1.	Perjanjian Fasilitas No. Ref Z025000367 atas <i>Master Loan Agreement</i> Ref. No. SGP000009 tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana terakhir diamandemen pada tanggal 13 Januari 2021, oleh dan antara:  (a) Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. (" <b>Cisco</b> "); dan (b) Perseroan,  beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " <b>Perjanjian Master Kredit</b> ").	
	Batas Fasilitas	USD3.775.079,61 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh sembilan koma enam satu sen Dolar Amerika)
	Jatuh Tempo	60 bulan terhitung sejak tanggal penarikan (5 Juni 2018), yaitu tanggal 5 Juni 2023.
	Tanggal Akhir Periode Ketersediaan	Pendanaan harus terjadi sebelum tanggal 1 Februari 2021 dan berdasarkan keterangan dari Perseroan, pendanaan telah terjadi pada tanggal 1 Februari 2021.
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai solusi Teknologi Informasi.
	Suku Bunga	3% (persen)
	Suku Bunga Cidera Janji	1,5% (satu koma lima persen) per bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan setiap triwulan pada setiap tanggal 6 di triwulan yang bersangkutan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pelunasan dilakukan dengan cara mengangsur setiap triwulan pada setiap tanggal 6 di triwulan yang bersangkutan.
	Jaminan	Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 2 April 2015 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta atas peralatan telekomunikasi yang terlampir sebagai Lampiran A pada Akta Fidusia ini dengan nilai penjaminan sebesar USD1.100.000 (satu juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat).
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Singapura.
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. 003/MTI/PD-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan dan Perubahan, Cisco telah mengetahui, menyetujui dan menandatangani Surat Persetujuan dan Perubahan dengan mencabut ketentuan Pasal 7.2 Janji-Janji Negatif butir (d) dan (i).

### B. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
1.	Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CMS/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, oleh dan antara:  (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" <b>Bank Mandiri</b> "); dan (b) Perseroan  untuk selanjutnya disebut sebagai " <b>Perjanjian Kredit</b> ".	

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	29 Juni 2027
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas ini oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure</i> .
	Bunga	8,75% per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Jaminan	Jaringan fiber optic beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya atas nama Perseroan, yang akan diikat dengan fidusia dengan nilai minimal Rp200.000.000.000,00.
	Larangan ( <i>Negative Covenants</i> )	Selama Perjanjian Kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Memindahk tangankan barang jaminan kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;</li> <li>(b) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;</li> <li>(c) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman yang baru dari pihak lain;</li> <li>(d) Membuat suatu perikata, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau dokumen pengikatan agunan;</li> <li>(e) Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset Perseroan termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik yang sekarang sudah ada maupun yang aka nada di kemudian hari; dan</li> <li>(f) Melunasi hutang kepada pemegang saham.</li> </ul>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
2.	Perjanjian Kredit Modal Kerja Fixed Loan No. CRO.SLO/0098/KMK/2011 Akta No. 16 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) a.n PT Mora Telematika Indonesia (MORA) No. CMB.CM5/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("<b>Bank Mandiri</b>"); dan</li> <li>(b) Perseroan</li> </ul> beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " <b>Perjanjian Kredit</b> ").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Modal Kerja Non Revolving dengan limit sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	9 Juli 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Modal kerja operasional usaha industri telekomunikasi.
	Bunga	9,25% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun ( <i>floating rate</i> )
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	<p>(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000, Rp40.000.000.000, Rp6.900.000.000.</p> <p>(b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000 (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000 (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah).</p> <p>(c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah).</p> <p>(d) Personal Guarantee (<i>Borgtocht</i>) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak</p> <p>Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.</p>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan "fasilitas kredit" melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
3.	Perjanjian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.SLO/0003/NCL/2011 Akta No. 17 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) a.n PT Mora Telematika Indonesia (MORA) No. CMB.CM5/TTL.0147/SPPK/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:	
	(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" <b>Bank Mandiri</b> "); dan (b) Perseroan	
	beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " <b>Perjanjian Kredit</b> ").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	(a) Fasilitas Non Cash Loan dengan limit sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliarmiliar Rupiah).

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		(b) Fasilitas Bank Garansi dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	9 Juli 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pembelian jaringan fiber optik, material jaringan dan equipment impor serta local untuk menunjang usaha sewa jaringan fiber optik.
	Jaminan	<p>(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000, Rp40.000.000.000, Rp6.900.000.000.</p> <p>(b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000 (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000 (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah).</p> <p>(c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah).</p> <p>(d) Personal Guarantee (<i>Borgtocht</i>) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak</p> <p>Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.</p>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan "fasilitas kredit" melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
4.		<p>Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Perjanjian Fasilitas Treasury Line yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Addendum XII Perjanjian Fasilitas Treasury Line No. 19 tanggal 23 Juni 2021, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("<b>Bank Mandiri</b>"); dan</p> <p>(b) Perseroan</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kredit”).
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Treasury Line <i>Un-committed</i> dan <i>Advised</i> dengan limit sebesar USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).
	Jatuh Tempo	9 Juli 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	<i>Hedging</i> transaksi usaha.
	Jaminan	<p>(a) Agunan Non Fixed Asset berupa piutang yang diikat oleh jaminan fidusia sebesar Rp45.000.000.000, Rp40.000.000.000, Rp6.900.000.000.</p> <p>(b) Agunan Fixed Assets berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Panataran No. 9, Menteng, Jakarta dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perseroan, telah diikat SHT I senilai Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) dan SHT II senilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan SHT III sebesar Rp55.085.000.000 (lima puluh lima miliar delapan puluh lima juta Rupiah) atau total pengikatan senilai Rp86.085.000.000 (delapan puluh enam miliar delapan puluh lima juta Rupiah).</p> <p>(c) Agunan berupa deposito dengan bukti kepemilikan Bilyet Deposito No. AD165999, No. AD166000, No. AD165998, No. AD165999 dan No. AD165997 atas nama Perseroan, telah diikat dengan akta gadai deposito senilai Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah).</p> <p>(d) Personal Guarantee (<i>Borgtocht</i>) yang telah diikat atas nama Galumbang Menak</p> <p>Atas seluruh agunan akan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara <i>joint collateral</i> dengan klausula <i>cross default</i> untuk seluruh fasilitas kredit Perseroan.</p>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan “fasilitas kredit” melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
5.	Perjanjian Kredit Investasi-8 No. CRO.KP/105/KI/2017 Akta No. 26 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH, Notaris di Jakarta, oleh dan antara:	<p>(a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”); dan</p> <p>(b) Perseroan</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " <b>Perjanjian Kredit</b> ").
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi Non Revolving dengan limit sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	21 Desember 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai proyek fiberisasi tower XL.
	Bunga	11% (sebelas persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pelunasan fasilitas kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap triwulan tahun berjalan pada setiap tanggal 23 pada akhir periode triwulan yang bersangkutan.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga yang berlaku atas keterlambatan pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya.
	Jaminan	Objek yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi yaitu proyekk fiberisasi tower XL, termasuk namun tidak terbatas berupa Jaringan Fiber Optik terkait proyek Fiberisasi Tower XL yang akan diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp328.637.000.000 (tiga ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).  Aguinan kredit tersebut di atas turut menjamin ( <i>joint collateral</i> ) untuk seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dengan klausula <i>cross default</i> .
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak Bank Mandiri untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Perseroan di hadapan pengadilan negeri lainnya yang berwenang di wilayah Indonesia.
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
6.	Akta Perjanjian Kredit Investasi 10 Nomor: CRO.KP/KP/252/KI/2018 No. 92 tanggal 31 Juli 2018, oleh dan antara:  (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" <b>Bank Mandiri</b> "); dan (b) Perseroan  beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " <b>Perjanjian Kredit</b> ").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi Non Revolving dengan limit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).
	Jangka Waktu	78 (tujuh puluh delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit hingga jatuh tempo.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai proyek – proyek fiberisasi tower PT Indosat Tbk, PT Hutchinson 3 Indonesia, dan PT XL Axiata Tbk.
	Bunga	10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 10 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan	2% (dua persen) per bulan di atas suku bunga kredit fasilitas yang berlaku atas setiap keterlambatan pembayaran bunga.
	Jaminan	Fidusia atas aset milik Perseroan yang dibiayai oleh Bank Mandiri pada proyek fiberisasi tower Indosat, Hutchison 3 Indonesia, dan XL dengan total sebesar Rp435.916.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta Rupiah).  Seluruh aset Perseroan yang menjadi jaminan atas fasilitas-fasilitas kredit Perseroan, berlaku ketentuan <i>cross default</i> dan <i>joint collateral</i> .
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
7.	Akta Perjanjian Kredit Investasi 11 Nomor: CRO.KP/KP/253/KI/2018 No. 93 tanggal 31 Juli 2018, oleh dan antara:  (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“ <b>Bank Mandiri</b> ”); dan (b) Perseroan  beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “ <b>Perjanjian Kredit</b> ”).	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi dengan limit sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah).
	Jangka Waktu	75 (tujuh puluh lima) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit hingga jatuh tempo.
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Membiayai proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi berupa 160 BTS backhaul untuk PT Smartfren Telecom Tbk. dan/atau PT Smart Telecom.
	Bunga	10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 10 setiap bulannya.
	Jaminan	Fidusia atas aset milik Perseroan yang dibiayai oleh Bank Mandiri pada proyek BTS Backhaul senilai Rp96.150.000.000.  Seluruh aset Perseroan yang menjadi jaminan atas fasilitas-fasilitas kredit Perseroan, berlaku ketentuan <i>cross default</i> dan <i>joint collateral</i> .
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
8.	Akta Perjanjian Kredit Term Loan No. WCO.KP/0259/TLN/2020 No. 12 tanggal 20 Oktober 2020, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara:  (a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" <b>Bank Mandiri</b> "); dan (b) Perseroan  beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " <b>Perjanjian Kredit</b> ").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	20 Oktober 2025
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure</i> .
	Bunga	9% (Sembilan persen) per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.
	Jaminan	a. Piutang atas tagih kepada <i>costumer</i> Fiber Optik (FTTH) yang akan diikat fidusia minimal sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah); dan b. Jaringan Fiber Optik (FTTH) beserta perlengkapan dan peralatan pendukungnya dengan jumlah minimal homepass sebanyak 144.568 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan) homepass, yang terletak di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor, yang akan diikat fidusia dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
9.	Akta Perjanjian Kredit Term Loan 2 No. WCO.KP/0209/TLN/2021 No. 16 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara:  (c) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" <b>Bank Mandiri</b> "); dan (d) Perseroan  beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " <b>Perjanjian Kredit</b> ").	
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Kredit Term Loan (Baru) dengan limit sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	27 Mei 2026
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pemberian Fasilitas Term Loan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan bertujuan untuk <i>General Corporate Purposes</i> yang dapat digunakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis termasuk untuk <i>capital expenditure</i> .
	Bunga	8,50% per tahun.
	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga dibayarkan efektif pada tanggal 23 setiap bulan.
	Tanggal Pembayaran Pokok Pinjaman	Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur pada tanggal 23 setiap bulan berikutnya setelah penarikan pertama sampai dengan jatuh tempo.  Diperkenankan melakukan pelunasan/penurunan outstanding Fasilitas Term Loan lebih cepat dari jadwal angsuran yang ditetapkan, tanpa dikenakan penalti.
	Denda	2% (dua persen) di atas suku bunga kredit atas terjadinya tunggakan bunga dan angsuran pokok.
	Jaminan	a. Jaringan fiber optic beserta perangkat backbone jalur Sape Alor – Kupang dengan panjang 1.183 K, yang akan diikat dengan fidusia dengan nilai minimal Rp337.000.000.000,00; b. Jaringan fiber optic innercity yang terletak di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Makassar dan Kalimantan yang akan diikat fidusia dengan nilai minimal sebesar Rp289.000.000.000,00.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. CMB.CMS/TTL.0019/SPPK/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan Negative Covenant dan Perubahan Covenant a.n. PT Mora Telematika Indonesia, Bank Mandiri memberikan persetujuan untuk (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan, yaitu perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan pemegang saham, permodalan dan nilai saham dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana/ <i>Initial Public Offering</i> Perseroan, (iii) menghapus klausul terkait dengan permintaan persetujuan dari Bank Mandiri untuk membagikan dividen.

### C. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
10.	Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 1 Desember 2016, dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta	
	Pemberi Pinjaman	PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (sekarang PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.) (" <b>Bank China Construction</b> ")

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	a) Kredit Investasi (“KI”) 1 dengan jumlah pokok sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); b) KI 2 ( <i>uncommitted</i> ) dengan jumlah pokok sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan c) KI 3 dengan jumlah pokok sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah). Jumlah total fasilitas sebesar Rp Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah)
	Jatuh Tempo	1 Juni 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Ditujukan untuk pembangunan jaringan <i>Fiber Optic</i> Ultimate Java Back Bone (“UJB”) Ring 4 & 5
	Bunga	11,50% per tahun
	Jaminan	a) Hak tanggungan atas lahan SITAC sebesar minimal 125% dari harga transaksi setelah project UJB Ring 4 & 5 mencapai progres 100%; b) Piutang pembayaran dari <i>customer</i> jaringan <i>Fiber Optic</i> milik Perseroan senilai Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah); c) <i>Unconditional Irrevocable Payment Bond (Surety Bond)</i> dari Asuransi Sinarmas sebesar 50% dari nilai <i>outstanding</i> fasilitas kredit Perseroan di Bank China Construction. <i>Payment Bond</i> dapat diperpanjang setahun sekali, selama jangka waktu kredit berjalan 2 minggu sebelum masa jatuh tempo <i>Payment Bond</i> ; d) Pengalihan hak sewa atas 3 (tiga) lahan SITAC.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Negara Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. 006/MTI/PD-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan dari Bank dalam Perjanjian Kredit, Bank China Construction telah mengetahui, menyetujui dan menandatangani Surat Persetujuan dan Perubahan dengan (i) memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan anggaran dasar, terutama tentang perubahan usaha utama, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan susunan direksi dan komisaris, (ii) memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, (iii) mencabut Pasal 10 angka 8 terkait dengan perubahan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan, (iv) mencabut Pasal 11 angka 2 huruf c terkait dengan pembagian dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan.

#### D. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
11.	Akta Perjanjian No. 27 tanggal 30 April 2019 dibuat di Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) 27 tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:	(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”); dan (b) Perseroan.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai <b>"Perjanjian Kredit"</b> ).	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)
	Jatuh Tempo	29 April 2024
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Refinancing Aset Proyek Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3 dan jaringan FTTB beserta sarana pendukungnya.
	Suku Bunga	9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Ultimate Java Backbone (UJB)' Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</li> <li>(b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Fiber To The Building (FTTB)' yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp 254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</li> <li>(c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp 213.617.094.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</li> <li>(d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp 256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</li> <li>(e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</li> <li>(f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp 421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</li> <li>(g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebesar Rp 3.950.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</li> <li>(h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp 275.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</li> <li>(i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp 450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia.</li> <li>(j) Tanah dan Bangunan "Shelter Purwakarta" yang terletak di Gg. Labansari, Desa Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 322.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</li> <li>(k) Tanah dan bangunan "Shelter Sumedang" yang terletak di Jalan Parigi Lama, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 382.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</li> <li>(l) Tanah dan Bangunan "Shelter Ciamis" yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 562.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</li> <li>(m) Tanah dan Bangunan "Shelter Tegal" yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kel. Rundugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal,</li> </ul>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		<p>Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 463.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(n) Bangunan Ruko “Shelter Purwokerto” yang terletak di Jalan Supriyadi, Desa Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 1.097.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(o) Bangunan Ruko “Shelter Sukabumi” yang terletak di Jalan R.A. Kosasih, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.553.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(p) Bangunan Ruko “Shelter Ciranjang” yang terletak di Jalan Raya Cianjur - Bandung, Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp 1.078.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(q) Tanah dan Bangunan “Shelter Garut” yang terletak di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Prop. Jawa Barat, sebesar Rp 739.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(r) Tanah dan Bangunan “Shelter Gandrungmangu” yang terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah sebesar Rp292.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; dan</p> <p>(s) Tanah dan Bangunan “Subang” yang terletak di Kel. Padaasih, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp296.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</p>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 21 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
12.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 19 Desember 2019 dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“<b>BNI</b>”); dan</p> <p>(b) Perseroan.</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “<b>Perjanjian Kredit</b>”).</p>	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Investasi dengan maksimum kredit Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	18 Desember 2025

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pembiayaan proyek pembangunan jalur kabel fiber optik Denpasar-Waingapu milik Perseroan.
	Suku Bunga	9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan ‘Ultimate Java Backbone (UJB)’ Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</li> <li>(b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan ‘Fiber To The Building (FTTB)’ yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp 254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</li> <li>(c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp 213.617.094.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</li> <li>(d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp 256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</li> <li>(e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</li> <li>(f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp 421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</li> <li>(g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebesar Rp 3.859.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</li> <li>(h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp 275.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; dan</li> <li>(i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp 450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia.</li> </ul>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan																
13.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 9 Februari 2021 dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“<b>BNI</b>”); dan            (b) Perseroan.</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “<b>Perjanjian Kredit</b>”).</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="568 488 735 519">Pemberi Pinjaman</td> <td data-bbox="735 488 1401 519">BNI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 519 735 584">Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok</td> <td data-bbox="735 519 1401 584">Kredit <i>Term Loan</i> maksimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 584 735 616">Jatuh Tempo</td> <td data-bbox="735 584 1401 616">8 Agustus 2026</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 616 735 719">Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas</td> <td data-bbox="735 616 1401 719">Refinancing Obligasi Moratelindo 1 Tahun 2017 Seri A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 719 735 750">Suku Bunga</td> <td data-bbox="735 719 1401 750">9,50% (Sembilan koma lima persen) per tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 750 735 884">Jaminan</td> <td data-bbox="735 750 1401 884">Segala harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Perseroan yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 884 735 916">Hukum Yang Mengatur</td> <td data-bbox="735 884 1401 916">Hukum Republik Indonesia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 916 735 981">Pilihan Penyelesaian Sengketa</td> <td data-bbox="735 916 1401 981">Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</td> </tr> </table>	Pemberi Pinjaman	BNI	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit <i>Term Loan</i> maksimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).	Jatuh Tempo	8 Agustus 2026	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Refinancing Obligasi Moratelindo 1 Tahun 2017 Seri A	Suku Bunga	9,50% (Sembilan koma lima persen) per tahun	Jaminan	Segala harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Perseroan yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pemberi Pinjaman	BNI																	
Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit <i>Term Loan</i> maksimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).																	
Jatuh Tempo	8 Agustus 2026																	
Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Refinancing Obligasi Moratelindo 1 Tahun 2017 Seri A																	
Suku Bunga	9,50% (Sembilan koma lima persen) per tahun																	
Jaminan	Segala harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Perseroan yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.																	
Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia																	
Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat																	
	Keterangan	<p>Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.</p>																

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
14.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 11 Mei 2021 dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“<b>BNI</b>”); dan (b) Perseroan.</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “<b>Perjanjian Kredit</b>”).</p>	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Modal Kerja Term Loan dengan jumlah Rp340.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah)
	Jatuh Tempo	10 November 2026
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Corporate Loan untuk pembiayaan CAPEX dan OPEX tahun 2021
	Suku Bunga	9,50% per annum
	Jaminan	Segala harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh utang Perseroan yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 22 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
15.	<p>Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line Nomor 022/KPS1/PPFTL/2021 Maksimum US\$3.000.000 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (1) /22/KPS1/PPFTL/2021 tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:</p> <p>(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“<b>BNI</b>”); dan (b) Perseroan.</p> <p>beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai “<b>Perjanjian Kredit</b>”).</p>	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Fasilitas Treasury Line dengan jumlah maksimum US\$3.000.000 (tiga juta Dolar Amerika)
	Jatuh Tempo	29 April 2023
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Transaksi treasury valuta asing non today: Forward, Swap, dan transaksi Derivative, cross currency swap dan interest rate swap dalam rangka lindung nilai ( <i>hedging</i> ) terhadap risiko nilai tukar valuta asing, suku bunga dan tidak untuk tujuan spekulasi.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
	Jaminan	<p>(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan ‘Ultimate Java Backbone (UJB)’ Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan ‘Fiber To The Building (FTTB)’ yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp 254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp 213.617.094.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</p> <p>(d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp 256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp 421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok barat, provinsi ntb sebesar rp 3.950.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp 275.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp 450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia.</p> <p>(j) Tanah dan Bangunan “Shelter Purwakarta” yang terletak di Gg. Labansari, Desa Bungursari, Kecamatan Purwakarta, propinsi jawa barat, sebesar rp 322.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(k) Tanah dan bangunan “Shelter Sumedang” yang terletak di Jalan Parigi Lama, Kel. Situ, Kec. Sumedang utara, kab. sumedang, propinsi jawa barat, sebesar rp 382.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(l) Tanah dan Bangunan “Shelter Ciamis” yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 562.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(m) Tanah dan Bangunan “Shelter Tegal” yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kel. Rundugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 463.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(n) Bangunan Ruko “Shelter Purwokerto” yang terletak di Jalan Supriyadi, Desa Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 1.097.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(o) Bangunan Ruko “Shelter Sukabumi” yang terletak di Jalan RA Kosasih, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.553.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(p) Bangunan Ruko “Shelter Ciranjang” yang terletak di Jalan Raya Cianjur - Bandung, Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur,</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		<p>Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp 1.078.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(q) Tanah dan Bangunan "Shelter Garut" yang terletak di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Prop. Jawa Barat, sebesar Rp 739.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(r) Tanah dan Bangunan "Shelter Gandrungmangu" yang terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah sebesar Rp292.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; dan</p> <p>(s) Tanah dan Bangunan "Subang" yang terletak di Kel. Padaasih, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp296.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</p>
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 14 butir 11.7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
16.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit <i>Non Cash Loan/</i> Kredit Tidak Langsung No. 29 tanggal 30 April 2019 dibuat di Lenny Janis Ishak, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung (2) No. 29 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara:	
	(a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (" <b>BNI</b> "); dan (b) Perseroan.	
	beserta setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai " <b>Perjanjian Kredit</b> ").	
	Pemberi Pinjaman	BNI
	Jenis Pinjaman dan Jumlah Pinjaman Pokok	Kredit Tidak Langsung dengan maksimum kredit Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).
	Jatuh Tempo	29 April 2023.
	Tujuan Penggunaan Fasilitas / Sifat dan Tujuan Fasilitas	Pembukaan L/C <i>Import/SKBDN Sight</i> dan <i>Usance/180 days after BL date</i> dalam rangka pembelian barang dagangan/bahan baku/peralatan.
	Suku Bunga	2% (dua persen) per tahun
	Jaminan	<p>(a) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Ultimate Java Backbone (UJB)' Segment 1,2,3, yang ada di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sebesar Rp325.093.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(b) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan 'Fiber To The Building (FTTB)' yang ada di Jabodetabek, sebesar Rp 254.565.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		<p>(c) Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No. 48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, sebesar Rp 213.617.094.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.</p> <p>(d) Proyeksi pendapatan UJB selama masa kredit dengan taksasi sebesar Rp 256.400.000.000,- yang diikat oleh jaminan fidusia;</p> <p>(e) Proyeksi Pendapatan FTTB selama masa kredit (60 bulan), sebesar Rp302.400.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(f) Peralatan Fiber Optik dan Infrastruktur Jaringan Denpasar Waingapu sepanjang +/- 842km yang terletak di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp 421.465.940.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia;</p> <p>(g) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB sebesar Rp 3.950.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(h) Tanah dan bangunan Shelter yang terletak di Desa Jayamakmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB sebesar Rp 275.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(i) Proyeksi pendapatan jaringan Denpasar-Waingapu selama masa kredit sebesar Rp 450.000.000.000,- yang diikat dengan jaminan fidusia.</p> <p>(j) Tanah dan Bangunan "Shelter Purwakarta" yang terletak di Gg. Labansari, Desa Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 322.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(k) Tanah dan bangunan "Shelter Sumedang" yang terletak di Jalan Parigi Lama, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 382.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(l) Tanah dan Bangunan "Shelter Ciamis" yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebesar Rp 562.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(m) Tanah dan Bangunan "Shelter Tegal" yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kel. Rundugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 463.000.000,- yang diikat dengan jaminan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(n) Bangunan Ruko "Shelter Purwokerto" yang terletak di Jalan Supriyadi, Desa Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prop. Jawa Tengah, sebesar Rp 1.097.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(o) Bangunan Ruko "Shelter Sukabumi" yang terletak di Jalan RA Kosasih, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.553.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(p) Bangunan Ruko "Shelter Ciranjang" yang terletak di Jalan Raya Cianjur - Bandung, Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp 1.078.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p> <p>(q) Tanah dan Bangunan "Shelter Garut" yang terletak di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Prop. Jawa Barat, sebesar Rp 739.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama;</p>

No.	Subyek	Ketentuan Yang Relevan
		(r) Tanah dan Bangunan "Shelter Gandrungmangu" yang terletak di Jl. Raya Gandrungmangu, Desa Wringinharjo, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah sebesar Rp292.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama; dan (s) Tanah dan Bangunan "Subang" yang terletak di Kel. Padaasih, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp296.000.000,- yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama.
	Hukum Yang Mengatur	Hukum Republik Indonesia
	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Keterangan	Bahwa berdasarkan Surat No. KPS1/2.1/241 tanggal 25 Februari 2021 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perjanjian Kredit, BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham), sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menghapus Pasal 9 butir 7 Perjanjian terkait dengan pembatasan pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

## 7. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset yang material dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Peruntukkan
1.	SHGB No. 313/31 Maret 1993	15 Mei 2041	Desa Padangsambian Kajo, Kecamatan Denpasar Barat, Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Bali	920	NDC
2.	SHGB No.212/24 Agustus 1993	14 April 2031	Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara	520	NDC
3.	SHGB No. 66/9 Desember 1998	24 September 2046	Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	154	<i>Point of Presence</i>
4.	SHGB No. 792/19 November 2003	22 Agustus 2041	Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	866	NDC
5.	SHGB No. 7/6 Juli 2004	16 April 2039	Desa Tungkali, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi	798	<i>Point of Presence</i>
6.	SHGB No. 655/16 Februari 2005	15 Februari 2035	Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	1.373	HEAD OFFICE
7.	SHGB No. 03933/23 Februari 2009	24 Februari 2029	Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	50	REP OFFICE

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Peruntukkan
8.	SHGB No. 11/20 Maret 2009	20 Maret 2039	Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau	346	<i>Point of Presence</i>
9.	SHGB No. 70/6 Januari 2010	14 April 2041	Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	468	<i>Point of Presence</i>
10.	SHGB No. 164/3 Februari 2010	29 Desember 2039	Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	357	<i>Point of Presence</i>
11.	SHGB No. 1162/4 Desember 2012	6 September 2046	Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	124	<i>Point of Presence</i>
12.	SHGB No. 6/4 Oktober 2012	12 Oktober 2046	Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur	135	<i>Point of Presence</i>
13.	SHGB No. 514/20 Januari 2014	13 Januari 2047	Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah	93	<i>Point of Presence</i>
14.	SHGB No. 0285/6 Desember 2016	6 Desember 2046	Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	66	<i>Point of Presence</i>
15.	SHGB No. 00495/9 September 2016	24 Agustus 2046	Kelurahan Randuguntin, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah	134	<i>Point of Presence</i>
16.	SHGB No. 8/22 Juni 2017	21 Juni 2047	Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	162	<i>Point of Presence</i>
17.	SHGB No. 5/21 Maret 1992	24 September 2037	Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	422	<i>Point of Presence</i>
18.	SHGB No. 00002/3 Desember 1994	28 Oktober 2046	Desa Tempelemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah	415	<i>Point of Presence</i>
19.	SHGB No. 3961/ 27 Maret 1984	18 Mei 2047	Desa Padaasih, Kecamatan Subang, Kabupaten Subanga, Provinsi Jawa Barat	257	<i>Point of Presence</i>
20.	SHGB No. 855/19 April 2017	2 Desember 2046	Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	61	<i>Point of Presence</i>
21.	SHGB No. 168/15 September 2017	6 Juli 2047	Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupate Ciamis, Provinsi Jawa Barat	196	<i>Point of Presence</i>
22.	SHGB No. 00016/10 Juni 2004	28 Desember 2046	Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DYI Yogyakarta	469	<i>Point of Presence</i>

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Peruntukkan
23.	SHGB No. 83/13 Mei 2004	12 Mei 2034	Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	128	<i>Point of Presence</i>
24.	SHGB No. 00381/5 September 2017	5 Juli 2047	Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat	70	<i>Point of Presence</i>
25.	SHGB No. 01270/26 Juni 2013	8 September 2046	Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	145	<i>Point of Presence</i>
26.	SHGB No. 00162/17 September 2004	8 Juni 2046	Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	241	<i>Point of Presence</i>
27.	SHGB No. 3/16 Februari 2015	2 Mei 2046	Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali	90	<i>Point of Presence</i>
28.	SHGB No. 3/27 April 2009	26 April 2029	Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagal, Propinsi Sumatera Utara	426	<i>Point of Presence</i>
29.	SHGB No. 22/27 April 2009	26 April 2029	Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung, Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara	400	<i>Point of Presence</i>
30.	SHGB No. 1/27 April 2009	26 April 2029	Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cemin, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara	271	<i>Point of Presence</i>
31.	SHGB No. 7/27 April 2009	26 April 2029	Desa Kota Galih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagal, Propinsi Sumatera Utara	400	<i>Point of Presence</i>
32.	SHGB No. 580/5 Juli 2012	16 Desember 2029	Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	1.201	NDC
33.	SHGB No. 06194/ 18 Oktober 2017	15 Mei 2042	Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Riau	5.256	NDC
34.	SHGB No. 06195/18 Oktober 2017	15 Mei 2042	Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Riau	1.059	NDC
35.	SHGB No. 06196/18 Oktober 2017	4 Maret 2039	Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Riau	3.500	NDC
36.	SHGB No. 4015/28 Oktober 2008	12 Maret 2030	Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kita, Kota Batam, Kepulauan Riau	75	Rep OFFICE
37.	SHGB No. 1638/17 Desember 2017	7 Desember 2047	Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau	299	<i>Point of Presence</i>
38.	SHGB No. 02/20 September 2018	10 Oktober 2038	Desa Sidoruku, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	299	<i>Point of Presence</i>

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Peruntukkan
39.	SHGB No. 01/7 Desember 2018	4 Oktober 2043	Desa Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	526	<i>Point of Presence</i>
40.	SHGB No. 8639/29 Desember 1999	2 Juli 2038	Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta	282	REP OFFICE
41.	SHGB No. 00004/ 8 Maret 2018	24 Januari 2038	Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	859	<i>Point of Presence</i>
42.	SHGB No. 01/5 Oktober 2018	4 Oktober 2048	Desa Jaya Makmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provisini Nusa Tenggara Barat	400	<i>Point of Presence</i>
43.	SHGB No. 00039/8 Agustus 2017	8 Maret 2047	Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	213	<i>Point of Presence</i>
44.	SHGB No. 00003/19 Desember 2014	5 September 2046	Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	32	<i>Point of Presence</i>
45.	SHGB No. 00002/19 Desember 2014	27 Juni 2046	Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	32	<i>Point of Presence</i>
46.	SHGB No. 5/21 Maret 1992	24 September 2037	Desa Tambelang, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur	422	<i>Point of Presence</i>
47.	SHGB No. 00002/28 February 2020	28 February 2050	Desa Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	420	TOWER
48.	SHGB No. 00003/19 Oktober 2018	24 February 2050	Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	415	TOWER
49.	SHGB No. 00009/15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	561	TOWER
50.	SHGB No. 00004/12 February 2019	24 February 2050	Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	1.021	TOWER
51.	SHGB No. 00001/21 Desember 2018	24 February 2050	Desa Binjai, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	839	TOWER
52.	SHGB No. 00037/15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	250	TOWER
53.	SHGB No. 00005/15 Mei 2020	15 Mei 2050	Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	979	TOWER
54.	SHGB No. 0047/30 April 2020	29 April 2050	Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	267	<i>Point of Presence</i>

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Peruntukkan
55.	SHGB No. 02/23 Maret 1983	24 September 2047	Desa Guyungan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur	547	<i>Point of Presence</i>
56.	SHGB No. 2/ 13 Februari 2018	13 Februari 2038	Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	<i>Point of Presence</i>
57.	SHGB No. 00001/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	286	TOWER
58.	SHGB No. 00002/28 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	208	TOWER
59.	SHGB No. 00003/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Matak, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	324	TOWER
60.	SHGB No. 00022/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	572	TOWER
61.	SHGB No. 00001/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Mubur, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	1.175	TOWER
62.	SHGB No. 00035/ 28 Februari 2020	28 Februari 2050	Desa Ranai, Kecamatan Bungaran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	899	TOWER
63.	SHGB No. 550/13 November 2018	4 Februari 2049	Desa Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	362	<i>Point of Presence</i>
64.	SHGB No. 00035/8 Agustus 2017	8 Maret 2047	Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	213	<i>Point of Presence</i>
65.	SHGB No. 00047/30 April 2020	29 April 2050	Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	267	<i>Point of Presence</i>
66.	SHGB No. 00002/4 Desember 1994	28 Oktober 2046	Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah	415	<i>Point of Presence</i>
67.	SHGB No. 66/9 Desember 1998	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak pada dokumen	Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	154	<i>Point of Presence</i>
68.	SHGB No. 00014/19 Mei 2020	18 Mei 2050	Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah	808	<i>Point of Presence</i>

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Peruntukkan
69.	SHGB No. 514/20 Januari 2014	13 Januari 2047	Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah	93	<i>Point of Presence</i>
70.	SHGB No. 580/5 Juli 2012	6 Desember 2029	Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	2.266	NDC
71.	SHGB No. 01/5 Oktober 2018	4 Oktober 2048	Desa Jaya Makmur, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat	400	<i>Point of Presence</i>
72.	SHGB No. 2/13 Februari 2018	13 Februari 2038	Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur	100	<i>Point of Presence</i>
73.	SHGB No. 11/17 Juli 2012	Maret 2038	DesaAek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	400	<i>Point of Presence</i>
74.	SHGB No. 19/23 Mei 2019	29 April 2044	Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	344	<i>Point of Presence</i>
75.	SHGB No. 00001/29 Mei 2019	28 Mei 2049	Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	286	TOWER
76.	SHGB No. 00173/27 November 2018	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak pada dokumen	Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau	574	TOWER
77.	SHGB No. 00005/11 Maret 2020	23 April 2050	Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	666	TOWER
78.	SHGB No. 00006/15 Mei 2020	15 Mei 2050	Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	207	TOWER
79.	SHGB No. 02/11 Agustus 2020	11 Agustus 2050	Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur	866	<i>Point of Presence</i>
80.	SHGB No. 00001/1 Oktober 2020	1 Oktober 2050	Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur	239	<i>Point of Presence</i>
81.	SHGB No. 00002/27 Mei 2020	27 Mei 2050	Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur	129	<i>Point of Presence</i>
82.	SHGB No. 00001/7 Juli 2020	7 Juli 2050	Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur	288	<i>Point of Presence</i>

No.	Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Peruntukkan
83.	SHGB No. 00024/1 November 2019	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak pada dokumen	Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur	137	<i>Point of Presence</i>
84.	SHGB No. 01393/21 Januari 2021	Tidak terdapat tanggal berakhirnya hak pada dokumen	Desa Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	131	<i>Point of Presence</i>
85.	SHGB No. 01185/29 Oktober 2012	10 Oktober 2042	Desa SUkaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	80	<i>Point of Presence</i>
86.	SHGB No. 00077/16 Maret 2019	17 Februari 2050	Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	197	<i>Point of Presence</i>
87.	SHGB No. 8293/8 Oktober 2020	17 Februari 2051	Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cielungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	55	<i>Point of Presence</i>
88.	SHGB No. 2913/13 November 2002	22 Februari 2051	Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	80	<i>Point of Presence</i>
89.	SHGB No. 3280/13 November 2018	5 Oktober 2047	Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	54	BRANCH OFFICE
90.	SHGB No. 9402/11 Maret 2016	14 Januari 2050	Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten	79	<i>Point of Presence</i>
91.	SHGB No. 28/23 April 2002	3 Januari 2050	Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi	126	BRANCH OFFICE
92.	SHGB No. 17/26 Agustus 2016	22 Desember 2040	Kelurahan Kotamatsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	88	<i>Point of Presence</i>
93.	SHGB No. 16/26 Agustus 2016	22 Desember 2040	Kelurahan Kotamatsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	94	<i>Point of Presence</i>
94.	SHGB No. 00080/14 Juli 1993	22 Maret 2041	Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tanah Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	540	REP OFFICE
95.	SHGB No. 1002/23 Desember 2019	4 November 2049	Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	3.050	HEAD OFFICE
96.	SHGB No. 00101/23 November 2021	5 Oktober 2051	Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	528	REP OFFICE

## 8. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Perseroan dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melaksanakan Program CSR dalam bidang lingkungan dan turut serta melestarikan alam dalam skala kecil namun konsisten. Perusahaan juga telah meraih Sertifikasi Lingkungan Hidup ISO 14001:2015 yang masih berlaku hingga 3 September 2023, yang menyatakan bahwa Perseroan menjalankan Sistem Manajemen Lingkungan (Environment Management System) yang memenuhi persyaratan 14001:2015 untuk ruang lingkup Pengelolaan Sistem Manajemen Lingkungan dalam penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) di Nusantara Data Center Jakarta dan pelaksanaan proyek terkait.

Sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 189 tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perseroan wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), sehubungan dengan hal tersebut, adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang telah diperoleh Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut dari Jakarta-Bangka-Batam-Singapura Sepanjang ± 1.072,891 km (B2J-S Cable System) No. B-2772/Dep.I/LH/PDAL/03/2012 tanggal 14 Maret 2017.

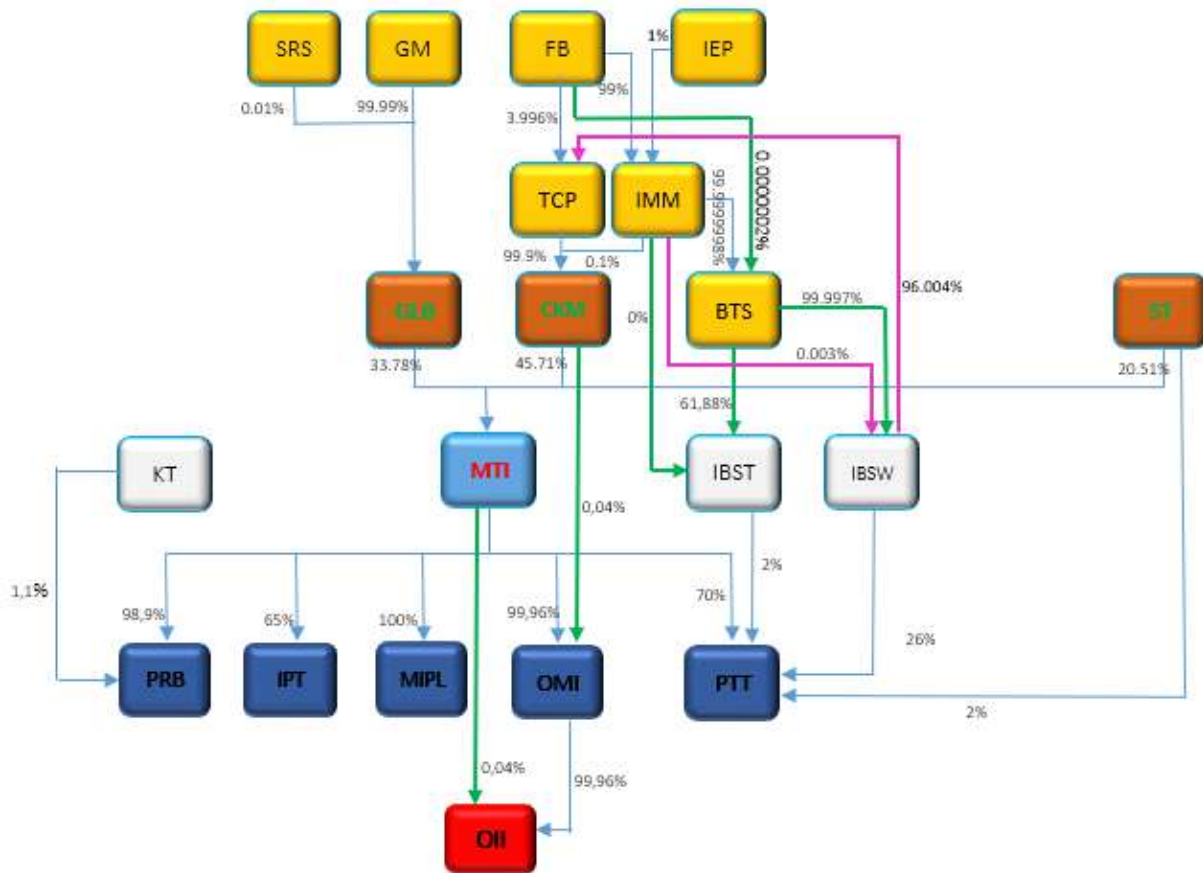
Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang wajib memiliki Analisis Dampak Mengenai Lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Program-program yang Perseroan jalankan diantaranya:

1. Mengantisipasi kemungkinan dampak lingkungan atas aktivitas Perusahaan terutama dalam membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi dengan memastikan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi di bidang lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui berbagai perizinan yang berhubungan dengan aktivitas operasi.
2. Kebijakan memanfaatkan air, listrik, dan kertas di kantor Perusahaan secara tidak berlebihan.
3. Larangan merokok, kecuali di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Pengelolaan sampah di kantor Perusahaan secara baik dengan memisahkan sampah organik dan non organik disertai anjuran yang keras kepada seluruh karyawan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan di manapun berada.

Tidak ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

## 9. STRUKTUR KEPEMILIKAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN



### Keterangan:

- MTI = PT Mora Telematika Indonesia
- PRB = PT Palapa Ring Barat
- IPT = PT Indo Pratama Teleglobal
- PTT = PT Palapa Timur Telematika
- OMI = PT Oxygen Multimedia Indonesia
- MIPL= Moratel International Pte. Ltd.
- OII = PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
- KT = PT Ketrosden Triasmitra
- IBST = PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
- IBSW = PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
- ST = PT Smart Telecom
- GLB = PT Gema Lintas Benua
- CKM= PT Candrakarya Multikreasi
- TCP = PT Tunas Citra Persada
- SRS = Sorta Regina Simanjuntak
- GM = Galumbang Menak
- FB = Farida Bau
- IMM = PT Inovasi Mas Mobilitas
- IEP = Immanuel Eka Putra
- BTS = PT Bakti Taruna Sejati

Ibu Farida Bau adalah sebagai Pemegang saham Pengendali tidak langsung melalui CKM dan sebagai *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) Perseroan.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi adalah Farida Bau melalui kepemilikan saham pada Perseroan sebesar 45,71% melalui PT Candrakarya Multikreasi.

Bahwa pada Tanggal Prospektus, Galumbang Menak yang merupakan Direktur Utama Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan 33,78% sahamnya pada PT Gema Lintas Benua.

## 10. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak Dengan Kepemilikan Di Atas 5% yaitu:

No.	Nama	Perseroan	GLB	CKM	ST	OII	OMI	PRB	PTT	MIP L	IPT
1.	Alex Irwanto	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
2.	Doktorandus Karim Panjaitan	K	-	-	-	K	K	-	-	-	-
3.	Galumbang Menak	DU	D	-	-	DU	DU	KU	-	-	-
4.	Immanuel Eka Putra	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-
5.	Indra Nathan Kusnadi	KU	-	K	-	KU	KU	K	-	-	KU
6.	Jimmy Kadir	WDU	-	D	-	WDU	WDU	WDU	D	-	DU
7.	Kanaka Puradiredja	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Leon Maximilian Kakisina	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-
9.	Lim Hock Koon	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
10.	Makmur Jaury	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-
11.	Syarif Lumintarjo	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-
12.	Siska Suryaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K
13.	Candra Bramono Indianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WDU
14.	Sorta Regina Simanjuntak	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Merza Fachys	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-
16.	Antony Susilo	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
17.	Djoko Tata Ibrahim	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
18.	Marco Paul Iwan Sumampouw	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-
19.	Lukmono Sutarto	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-

### Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- DU : Direktur Utama
- WDU : Wakil Direktur Utama
- D : Direktur

## 11. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH

### A. PT Candrakarya Multikreasi (CKM)

#### Riwayat Singkat CKM

CKM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 22 Februari 2007 dari Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07312HT.01.01-TH.2007 tanggal 2 Juli 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan),serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 30 Desember 2008.

Anggaran dasar CKM beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 22 November 2019 yang dibuat dihadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan

usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0099666.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 29 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dengan No. AHU-0230690.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 November 2019 (“Akta No. 14/2019”).

CKM beralamat di Jalan Riau nomor 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

### Kegiatan Usaha CKM

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CKM sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14/2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit adalah :

- a. Dalam bidang Perdagangan, yaitu melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
- b. Dalam bidang Jasa, yaitu melakukan kegiatan usaha:
  - Jasa Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
  - Jasa Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya (KBLI 70209)

Pada saat Prospektus ini diterbitkan CKM merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen.

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham CKM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham CKM sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 54 tanggal 29 Maret 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar CKM tanggal 30 Maret 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0041837.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat CKM No. 59 tanggal 12 April 2017 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CKM tanggal 15 April 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT berdasarkan No. AHU-0049254.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 April 2017, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Tunas Citra Persada	24.999	24.999.000.000	99,99
2. PT Inovasi Mas Mobilitas	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Pengurus dan Pengawasan CKM**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CKM pada Tanggal Pemeriksaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham CKM No. 12 tanggal 7 Juli 2017, tanggal 7 Juli 2017, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.030151633 tanggal 11 Juli 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0084465.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Indra Nathan Kusnadi

### **Direksi**

Direktur Utama : Makmur Jaury

Direktur : Jimmy Kadir

## **B. PT Gema Lintas Benua (GLB)**

### **Riwayat Singkat GLB**

GLB adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GLB No. 03 tanggal 7 November 2007, dibuat di hadapan Tahir Kamili, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0002987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008.

Anggaran dasar GLB beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0096235.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 ("Akta No. 08/2020").

GLB beralamat di Cervino Village Apartment, Jl. K.H. Abdullah Syafei Kav. 27 RT 12 RW 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

### **Kegiatan Usaha GLB**

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar GLB sebagaimana tercantum dalam Akta No. 08/2020, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, konstruksi, informasi dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi antara lain aktivitas perusahaan holding;

- b) menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi antara lain konstruksi sentral telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi;
- c) menjalankan usaha-usaha dibidang informasi dan komunikasi antara lain aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- d) menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan besar dan eceran, antara lain perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan GLB merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang investasi.

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham GLB

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GLB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat GLB No. 7 tanggal 18 Desember 2012 dibuat di hadapan Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0974253 tanggal 23 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-3569777.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0034162 tanggal 21 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012015.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Januari 2020, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Galumbang Menak	859.999	85.999.900.000	99,99
		0	
2. Sorta Regina Simanjuntak	1	100.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel</b>	<b>860.000</b>	<b>86.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>340.000</b>	<b>34.000.000.000</b>	

### Pengurus dan Pengawasan GLB

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GLB sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GLB No. 01 tanggal 4 Desember 2020, dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0416363 tanggal 7 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0206050.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Sorta Regina Simanjuntak

#### Direksi

Direktur : Galumbang Menak

## C. PT Smart Telecom (ST)

### Riwayat Singkat ST

ST adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. ST didirikan pertama kali dengan nama PT Indoprima berdasarkan Akta Perseroan Terbatas ST No. 60 tanggal 16 Agustus 1996, dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. 02-7023 HT.01.01.TH.97 tanggal 25 Juli 1997 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. TDP 09051634889 tanggal di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1209/BH.09.05/VIII/1997 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997, Tambahan No. 5282.

Anggaran dasar ST beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Bernadeta Mik Sritika Sugiharto, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penerbit untuk disesuaikan dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0041473.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0096235.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Juni 2020 ("**Akta No. 08/2020**").

### Kegiatan Usaha ST

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar ST sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 43 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0107378.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 20 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0247315.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019, yaitu berusaha dalam bidang Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI Nomor 61100), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200), Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI Nomor 61300), Internet Service Provider (KBLI Nomor 61921), Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (KBLI Nomor 61991), Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 61999), Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI Nomor 62012), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62019), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62029), Aktivitas Pengolahan Data (KBLI Nomor 63111), Aktivitas Hosting & YBDI (KBLI Nomor 63112), Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI Nomor 63122), Aktivitas Call Centre (KBLI Nomor 82200), Reparasi Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 95120), Instalasi Telekomunikasi (KBLI Nomor 43212), Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI Nomor 42217) , Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI Nomor 42219), Aktivitas Penerbitan Lainnya (KBLI Nomor 58190), Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 58200), Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (KBLI Nomor 61919), Jasa Sistem Komunikasi (KBLI Nomor 61922), Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI Nomor 61923), Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI Nomor 61924), Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Selular Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (KBLI Nomor 61925) , Jasa Multimedia Lainnya (KBLI Nomor 61929), Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 63990), Periklanan (KBLI Nomor 73100), Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri (KBLI Nomor 33200), Perdagangan Eceran

Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI Nomor 47919), Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI Nomor 46100), Perdagangan Besar Komputer & Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 46511), Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI Nomor 46512), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI Nomor 47411), Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 47413), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI Nomor 47414). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ST melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- i. Dalam Bidang Jasa:
  - a) Jasa telekomunikasi di dalam wilayah Republik Indonesia;
  - b) Jasa komunikasi radio;
  - c) Jasa komunikasi satelit;
  - d) Jasa komunikasi data paket ;
  - e) Jasa operator telephone selular;
  - f) Jasa internet provider;
  - g) Jasa voice over internet protocol, fax over internet protocol serta jasa komunikasi terkait;
  - h) Jasa business to business dan business to customers termasuk E-commerce serta jasa komunikasi terkait;
  - i) Jasa pelayanan jaringan global;
  - j) Jasa perawatan peralatan telekomunikasi;
  - k) Jasa konsultasi bidang telekomunikasi;
  - l) Jasa perencanaan pembangunan sarana dan pra-sarana telekomunikasi, termasuk menyewakan dan memiliki jaringan telekomunikasi terkait;
  - m) Jasa pengadaan sumber daya manusia dalam bidang telekomunikasi;
  - n) Jasa pengembangan jaringan telekomunikasi;
  - o) Jasa pemeliharaan jaringan;
  - p) Jasa penyimpanan uang elektronik e-money) baik dengan media kartu pra bayar (pre-paid card) maupun kartu pasca bayar (post-paid card);
  - q) Jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri (domestic and international money remittance services); dan
  - r) Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung voice services/data/image/dan jasa komersial mobile lainnya.
- ii. Dalam bidang Perdagangan Besar
  - a) Perdagangan lokal, baik bertindak sebagai agen, grosir, distributor, importir dan sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan perdagangan alat alat telekomunikasi, telepon selular, komputer genggam (handheld), komputer/laptop/netbook/tablet, perangkat-perangkat dan/atau produk produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada impor atas barang barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi tersebut serta alat pendukung kegiatan telekomunikasi tersebut seperti telepon selular, komputer genggam (handheld), komputer/laptop/netbook/tablet serta peralatan elektronik lainnya;

- b) Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi termasuk tetapi tidak terbatas pada produk pendukung lainnya seperti telepon selular, komputer genggam (handheld) komputer/laptop/netbook/tablet, serta peralatan elektronik lainnya; dan
- c) Menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada produk pendukung lainnya seperti telepon selular, komputer genggam (handheld) komputer/laptop/netbook/tablet, serta peralatan lainnya.

Kegiatan Usaha ST yang saat ini dijalankan adalah Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI Nomor 61100), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200), Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI Nomor 61300), Internet Service Provider (KBLI Nomor 61921), Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (KBLI Nomor 61991), Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 61999), Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI Nomor 62012), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62019), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62029), Aktivitas Pengolahan Data (KBLI Nomor 63111), Aktivitas Hosting & YBDI (KBLI Nomor 63112), Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI Nomor 63122), Aktivitas Call Centre (KBLI Nomor 82200), Reparasi Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 95120), Instalasi Telekomunikasi (KBLI Nomor 43212), Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI Nomor 42217), Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI Nomor 42219), Aktivitas Penerbitan Lainnya (KBLI Nomor 58190), Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 58200), Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (KBLI Nomor 61919), Jasa Sistem Komunikasi (KBLI Nomor 61922), Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI Nomor 61923), Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI Nomor 61924), Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Selular Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (KBLI Nomor 61925), Jasa Multimedia Lainnya (KBLI Nomor 61929), Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 63990), Periklanan (KBLI Nomor 73100), Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri (KBLI Nomor 33200), Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI Nomor 47919), Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI Nomor 46100), Perdagangan Besar Komputer & Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 46511), Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI Nomor 46512), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI Nomor 47411), Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 47413), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI Nomor 47414), namun Kegiatan Usaha ST yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah Jasa Internet Telephony untuk Keperluan Publik (IPKP) (KBLI Nomor 61923), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Jasa Nilai Tambah Telephony Lainnya (KBLI Nomor 61919), Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 46511), Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI Nomor 46512), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200).

### **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham ST**

Pada Tanggal Prospektus ini, struktur permodalan ST adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 44 tanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-

0022631.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 23 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0141165.AH.01.11.TAHUN.2018 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256087 tanggal 23 Oktober 2018 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat ST No. 19 tanggal 21 Juni 2021 dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0428798 tanggal 15 Juli 2021 dan didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0123921.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Juli 2021, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B	Seri A Rp1.000,- /saham Seri B Rp30/saham	
<b>Modal Dasar</b>	242.270.277	891.924.324.100	27.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
1. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	24.227.027	-	24.227.027.000	0,116
2. PT Smartfren Telecom Tbk	218.043.249	684.030.541.566	20.738.959.495.980	99,883
3. PT Wahana Inti Nusantara	1	-	1.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>242.270.277</b>	<b>684.030.541.566</b>	<b>20.763.186.523.980</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	<b>207.893.782.534</b>	-	-

### Pengurus dan Pengawasan ST

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ST pada Tanggal Pemeriksaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Rapat ST No. 18 tanggal 21 Juni Tahun 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. No. AHU-AH.01.03-0413219 tanggal 1 Juli 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0116470.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 Juli 2021, yaitu sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Marco Paul Iwan Sumampouw  
 Komisaris : Lukmono Sutarto

#### Direksi

Presiden Direktur : Merza Fachys  
 Direktur : Antony Susilo  
 Direktur : Djoko Tata Ibrahim

## 12. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat didalam database sistem administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0182075 tanggal 18 Maret 2022, dan didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan AHU-0053960.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi  
 Komisaris : Karim Panjaitan  
 Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

### **Direksi**

Direktur Utama : Galumbang Menak  
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### **DEWAN KOMISARIS**



**Indra Nathan Kusnadi**  
 Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 45 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta, Jurusan Litigasi dan Hukum Bisnis pada tahun 1999 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta, Jurusan Hukum Bisnis pada tahun 2012.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

1998 – 1999	:	<i>Paralegal</i> – Albert Hasibuan & Rekan
1999 – 2004	:	<i>Lawyer</i> – Kusnandar & Co.
2004 – 2008	:	<i>Lawyer</i> – Adnan Buyung Nasution & Partners
2008 – 2013	:	<i>Senior Lawyer</i> – Adnan Buyung Nasution & Partners
2014 - 2015	:	<i>Associate (Partner)</i> - Adnan Buyung Nasution & Partners
2013	–	Anggota Komite Audit – PT Bali Towerindo
Sekarang		Sentra Tbk
2015	–	<i>Equity Partner</i> – Adnan Buyung Nasution & Partners
Sekarang		Partners
2016	–	Komisaris – PT Candrakarya Multikreasi
Sekarang		
2016	–	Komisaris Utama – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
Sekarang		
2016	–	Komisaris – PT Palapa Ring Barat
Sekarang		
2016	–	Komisaris Utama – PT Mora Telematika Indonesia
Sekarang		
2017	–	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi – PT Mora Telematika Indonesia
Sekarang		
2017	–	Komisaris Utama – PT Oxygen Multimedia Indonesia
Sekarang		

Beliau menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2016. Beliau diangkat berdasarkan Akta No. 34/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Maret 2027.



### **Karim Panjaitan, B.AC, MM**

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 65 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Wiraswasta Indonesia pada tahun 1989 dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora pada tahun 2005.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

- 1992 – 2001 : *Section Chief of Telecommunication Rates* pada Ditjen Postel – Kementerian Perhubungan
- 2002 – 2008 : *Head of Sub Directorate of Telecommunication Rates* pada Ditjen Postel – Kominfo
- 2008 – 2011 : *Head of Sub Directorate of Universal Tariffs and Obligations* pada Ditjen Postel – Kominfo
- 2011 – 2013 : *Head of Sub Directorate of Universal Postal Service* pada Ditjen Postel – Kominfo
- 2015 – Sekarang : Komisaris – PT Mora Telematika Indonesia
- 2015 – Sekarang : Komisaris – PT Oxygen Multimedia Indonesia
- 2016 – Sekarang : Komisaris – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
- 2020 – Sekarang : Direktur – PT Petro Niaga Sukses

Beliau bergabung bersama Perseroan sebagai Komisaris pada tahun 2015. Beliau diangkat berdasarkan Akta No. 34/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Maret 2027.



### **Kanaka Puradiredja**

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 77 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1971.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

- 1971 – 1974 : *Auditor* - Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan
- 1975 – 1977 : *Auditor* dan mendapat pelatihan di Peat Marwick Mithell International – Melbourne, Australia
- 1978 – 1999 : Salah satu Pendiri dan salah satu Pimpinan KPMG Indonesia, Jabatan terakhir *Chairman*
- 2000 – 2007 : Pendiri dan *Senior Partner* – Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono
- 2002 – 2010 : Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia

- 2004 – 2005 : Anggota Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia
- 2004 – 2010 : Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia
- 2005 – 2009 : Anggota Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias
- 2010 – 2016 : Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Komite Audit Indonesia
- 2017 – Sekarang : Anggota Dewan Kehormatan Professionals in Risk Management Association (PRIMA)
- 2016 – 2019 : Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia – Sektor
- 2017 – 2019 : Ketua Tim Perumus Kebijakan Korporat Governance Nasional Indonesia
- 2013 – Sekarang : Ketua Lembaga Komisariss dan Direksi Indonesia (LKDI)
- 2016 – Sekarang : Ketua Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
- 2021 – Sekarang : Anggota Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governansi Indonesia
- 2012 – Sekarang : Komisariss Independen – PT Mora Telematika Indonesia

Menjadi Komisariss Independen Perseroan pada Oktober 2017. Beliau diangkat berdasarkan Akta No. 34/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Maret 2027.

## DIREKSI



**Ir. Galumbang Menak**  
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia fakultas teknik jurusan elektro pada tahun 1992.

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

- 1992 – 1996 : *Engineering* - PT Telekomunikasi Indonesia
- 1996 – 2000 : *Senior Manager Business Development* - PT Telekomindo Primabhakti (Rajawali Group)
- 2001 – 2004 : Direktur Operasional - PT Wahana Lintas Sentral Komunikasindo
- 2001 – Sekarang : Direktur Utama – PT Mora Telematika Indonesia
- 2007 – Sekarang : Direktur – PT Gema Lintas Benua
- 2012 : Komisariss - Nusatrip.Com
- 2015 – Sekarang : Direktur Utama – PT Oxygen Multimedia Indonesia

- 2016 – Sekarang : Direktur Utama – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
- 2016 – Sekarang : Komisaris Utama – PT Palapa Ring Barat

Beliau diangkat berdasarkan Akta No. 34/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Maret 2027.



**Jimmy Kadir**  
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 43 Tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2001. Pascasarjana (S2) Magister Manajemen dari Universitas Pancasila, Depok tahun 2022

Berikut Riwayat pekerjaan yang dimiliki:

- 2002 – 2003 : *Accounting Staff* – PT Astra Komponen Indonesia
- 2003 – 2004 : *Head of Accounting Division* – PT Astra Otoparts Tbk
- 2004 – 2008 : *Assistant of Accounting Manager* – PT Astra Otoparts Tbk
- 2008 – 2009 : *Assistant of Internal Audit Manager* – PT Astra Otoparts Tbk
- 2009 – 2010 : *Accounting Manager* – PT Gemala Kempa Daya
- 2010 – 2013 : *Accounting Consolidation Manager* – PT ABM Investama Tbk
- 2013 – 2014 : *Senior Manager* – Kantor Akuntan Publik AK Rahman
- 2014 – 2015 : *Direktur Independen* – PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
- 2015 – 2016 : *Komisaris Utama* – PT Mora Telematika Indonesia
- 2016 – Sekarang : *Direktur* – PT Palapa Timur Telematika
- 2016 – Sekarang : *Direktur* – PT Kreasi Teknologi Solusindo
- 2016 – Sekarang : *Komisaris* – PT Inovasi Mitra Sejahtera
- 2016 – Sekarang : *Wakil Direktur Utama* – PT Palapa Ring Barat
- 2017 – Sekarang : *Direktur* – PT Tunas Citra Persada
- 2017 – Sekarang : *Direktur* – PT Candrakarya Multikreasi
- 2018 – Sekarang : *Wakil Direktur Utama* – PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
- 2018 – Sekarang : *Wakil Direktur Utama* – PT Oxygen Multimedia Indonesia
- 2018 – Sekarang : *Wakil Direktur Utama* – PT Mora Telematika Indonesia
- 2021 – Sekarang : *Direktur Utama* – PT Indo Pratama Teleglobal

Pada 2016 menjabat sebagai direktur Perseroan setelah sebelumnya menjadi komisaris. Beliau diangkat berdasarkan Akta No. 34/2022 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Maret 2027.

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014. Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan; kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum; hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan; dan perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pengendali, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

### **13. TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Didalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra perusahaan. GCG dilengkapi *Code of Conduct*, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

#### **A. DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja Perseroan serta memberikan arahan kepada Direksi. Komunikasi formal antara Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan melalui pertemuan rutin untuk membahas kinerja Direksi pada periode sebelumnya dan rencana periode mendatang.

Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Mendapatkan penjelasan dari setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.368.154.910,-, Rp1.368.155.163,-, dan Rp1.346.706.768,-

### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2021.

<b>Nama</b>	<b>Frekuensi Rapat</b>	<b>Tingkat Kehadiran</b>	<b>Persentase Kehadiran (%)</b>
Indra Nathan Kusnadi	6	6	100
Karim Panjaitan Kanaka Puradiredja	6	6	100

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi:

<b>Nama</b>	<b>Frekuensi Rapat</b>	<b>Tingkat Kehadiran</b>	<b>Persentase Kehadiran (%)</b>
Indra Nathan Kusnadi	3	3	100
Karim Panjaitan Kanaka Puradiredja	3	3	100
Ir. Galumbang Menak	3	3	100
Jimmy Kadir	3	3	100

### Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

### Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No.33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Berikut uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilakukan oleh Dewan Komisaris:

- 5 Januari 2021, Pengesahan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah per 31 Desember 2020
- 24 Maret 2021, Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku per 31 Desember 2020
- 10 Mei 2021, Pembahasan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris Tahun Buku 2021
- 5 Juli 2021, Pengesahan Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah per 30 Juni 2021
- 20 September 2021, Penyusunan Rencana Aktivitas Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2022
- 15 November 2021, Evaluasi Kinerja Direksi Perseroan selama Tahun Buku 2021 dan Pembahasan Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Sukuk

## B. DIREKSI

Direksi bertanggung jawab atas kinerja operasional Perseroan serta kepatuhan terhadap seluruh kebijakan internal berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga bertanggung jawab atas penerapan strategi untuk menyesuaikan rencana Perseroan yang sedang maupun yang akan dijalankan sesuai dengan visi perusahaan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi direksi Perseroan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.417.390.613, Rp 7.417.434.380,-, dan Rp 6.139.461.635-.

### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi per tanggal 31 Desember 2021.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Ir. Galumbang Menak	12	12	100
Jimmy Kadir	12	12	100

### Masa Jabatan Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

### Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab</b>
Galumbang Menak	Direktur Utama	Galumbang Menak sebagai Direktur Utama menjalankan tugas dan fungsi di bidang operasional dan komersial
Jimmy Kadir	Wakil Direktur Utama	Jimmy Kadir sebagai Wakil Direktur Utama menjalankan tugas dan fungsi di bidang keuangan

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam UUPT dan Program Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi beserta jajarannya. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Program pelatihan yang diterima Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam menjalankan kegiatan usaha:

<b>Nama dan Jabatan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jenis Pelatihan</b>	<b>Materi Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>Tempat dan Waktu</b>	<b>Penyelenggara</b>
Galumbang Menak	Direktur Utama	Workshop	Embrace 5G, Connect Future	Daring, 4 Februari 2021	ZTE
Galumbang Menak	Direktur Utama	Workshop	Huawei 5G, Workshop	Daring, 8 Februari 2021	Huawei
Jimmy Kadir	Wakil Direktur Utama	Pendidikan Formal	Program Pascasarjana S2 Manajemen	Daring, 2021	Universitas Pancasila

### C. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Untuk memenuhi POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan 143/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Perseroan telah menunjuk Henry Rizard Rumopa sebagai Corporate Secretary Perseroan dengan riwayat hidup sebagai berikut :

**Henry Rizard Rumopa, S.H., M.H.**, Sekretaris Perusahaan. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katholik Atmajaya Jakarta, pada tahun 2007 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Beliau memulai karirnya sebagai Legal Staff di Kantor Notaris Misahardi Wilamarta pada tahun 2007, dimana pada akhirnya bergabung dengan Perseroan sebagai Senior Legal Officer (2011-2013), Assistant Legal Manager (2013-2014), Legal Manager (2014-2016), Senior Legal Manager (2016-2017) dan GM Corporate Legal (2017).

**Kontak Sekretaris Perusahaan**

Alamat: Grha 9, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia  
 Telepon: (021) 3199 8600  
 E-mail: corsec@moratelindo.co.id

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada website perusahaan, penyampaian laporan kepada OJK dan regulator lainnya secara tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen serta informasi yang bersifat rahasia, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Menjaga integritas dengan tidak mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- f. Mengatur pelaksanaan aksi korporasi terkait aspek hukum seperti: perubahan pengurus, perubahan akta/anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
- g. Mengkoordinasi bahan-bahan laporan untuk Rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
- h. Menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator atas perubahan susunan pengurus Perseroan (Anggota Direksi dan Dewan Komisaris); dan
- i. Menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator atas perubahan Pemegang Saham, Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 POJK No. 35/2014, dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan, lokakarya, seminar sebagai berikut:

<b>Pelatihan/Training/Seminar</b>	<b>Tempat dan Waktu</b>	<b>Penyelenggara</b>
Pendalaman Peraturan OJK No. 42/ POJK. 04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	Daring, 25 Maret 2021	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
<i>Be More Persuasive in Digital Era through The Right Public Speaking</i>	Daring, 30 Maret 2021	ICSA

Pelatihan/Training/Seminar	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Tugas dan Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Nominasi, Remunerasi, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan	Daring, 30 April 2021	ICSA
Pendalaman Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka & Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	Daring, 27 Mei 2021	ICSA
<i>From A to Z Media Relation, The Mutually Beneficial Relationship</i>	Daring, 17 Juni 2021	ICSA
Pendalaman Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal	Daring, 23 Juni 2021	ICSA
Pendalaman Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha	Daring, 22 Juli 2021	ICSA
<i>Powerful Writing for Media Communication</i>	Daring, 28 Juli 2021	ICSA
<i>Stock Split, Dividen Saham Saham Bonus dan Buyback Saham</i>	Daring, 19 Agustus 2021	ICSA
Tata Kelola Komunikasi <i>Corporate Secretary</i> di tengah Direksi dan Dewan Komisaris	Daring, 9 September 2021	ICSA
<i>How to Create A Solid Business Contingency Plan</i>	Daring, 11 November 2021	ICSA
Pengenalan Aspek ESG sebagai Salah Satu Penunjang Bisnis Keberlanjutan	Daring, 19 November 2021	ICSA

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

#### D. KOMITE AUDIT

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018, tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 139/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : **Kanaka Puradiredja**, Komisaris Independen

Anggota : **Drs. Mulyadi, M.Sc.**  
Mulyadi warga negara Indonesia, 75 tahun. Mendapat gelar Sarjana Muda Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1969, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 1971, *Master of Science Management and Administrative Science* dari The

University of Texas Dallas tahun 1983. Memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada 1972-sekarang, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 1995-sekarang, *Partner* Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan 2000-sekarang, Anggota Komite Audit PT Darma Henwa, Tbk 2007-2017, Anggota Komite Audit PT Bumi Resources 2012-sekarang, Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Mineral 2017-sekarang, Anggota Komite Audit PT Taman Wisata Candi Borobudur 2013-2016, Anggota Komite Audit PT China Construction Bank Indonesia, Tbk 2014-sekarang, Komisaris Utama PT Primissima 2007-2012, Asisten Direktur Pusat Antar-Universitas Universitas Gadjah Mada 1985-1990, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN 1994-1997.

Anggota : **Nenden Purwitasari**  
Nenden Purwitasari warga negara Indonesia, 56 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1989. Memiliki pengalaman kerja sebagai *Senior Manager Accounting* PT Bank International Indonesia 1989-2007, Direktur PT Ciptakarya Mitra Mandiri 2007-2014, Advisor PT Anugerah Mitra Sentosa 2015-2016, Direktur PT Nusa Danata Mahaloka 2016- sekarang.

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana termaksud dalam Piagam Komite Audit No. 001/MTI/PKA/I/2019 tanggal 22 Januari 2019. Pengangkatan Komite Audit telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan Publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan Publik.

#### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit per tanggal 31 Desember 2021.

<b>Nama</b>	<b>Frekuensi Rapat</b>	<b>Tingkat Kehadiran</b>	<b>Persentase Kehadiran</b>
Kanaka Puradiredja	9	9	100
Mulyadi	9	7	77,78
Nenden Purwitasari	9	9	100

Berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit per 31 Desember 2021:

1. Melakukan pengawasan Auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia;
2. Melakukan peninjauan berkala informasi keuangan, yang terdiri dari laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan akhir tahun untuk dipublikasikan. Pelaksanaan penelaahan laporan keuangan mencakup identifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian manajemen dan rekomendasi-rekomendasi untuk pengembangan usaha; dan
3. Melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya. Komite Audit telah meninjau hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Audit Internal.

#### **E. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2401/MTI/BOC/INT/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Perubahan Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan struktur organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : **Kanaka Puradiredja**, Komisaris Independen

Anggota : **Indra Nathan Kusnadi**, Komisaris Utama

Anggota : **Farel Sumandar Valentino Sinaga**

Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Indonesia. Saat ini berusia 38 tahun. Beliau mendapatkan gelar Sarjana (S1) jurusan Psikologi dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tahun kelulusan 2007) dan Magister (S2) jurusan Counseling Psychology dari De La Salle University, Philippines (tahun kelulusan 2010). Beliau memulai karirnya sebagai Dosen di Universitas Pelita Harapan (2010-2012) dan Dosen di Universitas Prasetya Mulya (2012-2018). Pada 2018 beliau kemudian bergabung dengan Perusahaan sebagai HR Learning and Development Manager. Saat ini beliau sebagai Head of Human Resource and General Affair Division.

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.34/2014. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan

- c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Struktur remunerasi;
  - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
  - c. Besaran atas remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 31 Desember 2021.

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kanaka Puradiredja	3	3	100
Indra Nathan Kusnadi	3	3	100
Farel Sumandar	3	3	100
Valentino Sinaga			

Berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2021:

Di tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Komite sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi dan remunerasi dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Program Pelatihan dalam rangka Meningkatkan Kompetensi:

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Farel Sumandar	Anggota Komite	Training	The Art and Science of Coaching	Daring 18 Maret 2021 s/d 28 Maret 2021	Vanaya Indonesia
Valentino Sinaga	Nominasi dan Remunerasi				
Farel Sumandar	Anggota Komite Nominasi	Training	Advanced Human Capital	Daring 3 Oktober 2021 s/d	Universitas Katolik Atma Jaya

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Valentino Sinaga	dan Remunerasi		Accomplished (AHCA)	20 November 2021	

## F. UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 56/2015 yaitu berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 142/MTI/PD-DIR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 203/MTI/PD-DIR/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Perubahan Kepala Unit Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, telah terjadi perubahan Kepala Unit Audit Internal Perusahaan, dimana Kepala Unit Audit Internal sebelumnya ialah Nurhayatul Arifin digantikan oleh Fatimah.

Fatimah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pada tahun 1997. Beliau memulai karirnya sebagai Co Assistant di RS Ridwan Maureksa dan Klinik Yadika (1992-1994), Accounting di PT Jehan Citra Chemical, PT Putra Surya Multidana (1997-2002). Kemudian, beliau bergabung dengan Perusahaan sebagai Accountung Assistant Manager (2004-2008), Finance Manager (2008-2010), Billing&Collection Senior Manager (2010-2013), dan Finance& Accounting General Manager PT Sarana Global Indonesia (2015-2018), Finance Customer Relation General Manager PT Palapa Timur Telematika (2018-2020), dan kembali bergabung dengan Perusahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal (2020- saat ini).

Pengangkatan Unit Audit Internal telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/2015.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertuang dalam Piagam Unit Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perusahaan secara umum meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Selama tahun 2021 Unit Audit Internal Perseroan telah melaksanakan audit terhadap Perseroan diantaranya sebagai berikut:

Audit Internal setiap tahun membuat Perencanaan Audit Tahunan yang dibagi secara kuartal. Sepanjang tahun 2021, Unit Audit Internal telah melaksanakan 15 tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengecekan dan *monitoring* terhadap prosedur dan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penugasan tersebut mencakup kegiatan audit, *review*, evaluasi, dan audit investigatif. Selain itu, Unit Audit Internal melaksanakan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan. Ringkasan kegiatan Internal Audit sebagai berikut:

Sub Audit	Audit	Review	Evaluasi	Audit Investigatif	Jumlah
Keuangan	3	5	3	-	11
Operasional	2	-	-	-	2
Investigasi	-	-	-	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>

#### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Nama	Frekuensi Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
Fatimah	56	56	100

#### Program Pelatihan dalam rangka Meningkatkan Kompetensi :

Pelatihan/Training/Seminar	Tempat dan Waktu	Penyelenggara
Fraud Detection Investigation for Internal Audit	Daring, 19-20 April 2021	Institute of Internal Auditors (IIA)
Financial Auditing for Internal Auditors	Daring, 24-25 Mei 2021	IIA
Internal Audit for New Internal Auditor	Daring, 12-13 Agustus 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Analyzing and Improving Business Process	Daring, 23-24 Agustus 2021	IIA
Data Analitik untuk Auditor Internal	Daring, 29-30 November 2021	YPIA

## G. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal di Perseroan dilaksanakan melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mengelola dan mengendalikan aspek keuangan, distribusi dan pelaksanaan operasional. Perseroan juga melaksanakan peninjauan berkala operasi masing-masing unit usaha untuk memastikan bahwa tingkat pengendalian internal yang didefinisikan oleh sistem yang sesuai dengan standar yang berlaku umum dan diterapkan secara efektif.

Tujuan dari sistem pengendalian Internal adalah memberikan keyakinan (*assurance*) kepada pemangku kepentingan bahwa segala sistem, prosedur, kaidah dan norma dijalankan dengan tepat dan benar. Pengendalian yang efektif akan meningkatkan keterandalan dari informasi keuangan, efisiensi dan efektifitas dari kegiatan operasional, serta kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal dapat mengarahkan Perusahaan guna mencapai *Good Corporate Government* (GCG), yang diwujudkan dengan prinsip Tranparansi, Akuntabilitas, Responibilitas, Independen dan kewajaran.

Penerapan sistem pengendalian internal meliputi;

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*); dan
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Secara umum pengendalian internal dijalankan oleh Unit Audit Internal sesuai dengan perintah dari Direktur Utama dengan *scope* audit berbasis keuangan, operasional, kepatuhan, dan risiko. Dalam melakukan audit, informasi ditelaah kemudian dilakukan pengujian sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit yang berlaku secara umum sehingga mampu meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal tidak dilanggar oleh organ maupun unit-unit kerja di dalam perusahaan.

## H. SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sejak awal berdiri, Perseroan telah membangun Sistem Manajemen Risiko dan terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan usaha. Sistem ini dijalankan sesuai dengan arahan Direksi dan di bawah pengawasan Dewan Komisaris untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, memadai, dan sesuai dengan karakteristik kompleksitas, dan profil risiko Perseroan.

Perseroan terus menerus melakukan penguatan Sistem Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh unit Audit Internal, yang merupakan unit pendukung pencapaian target yang telah ditentukan untuk menghasilkan kualitas aset yang sehat. Ada beberapa aspek penerapan manajemen risiko untuk memastikan pengawasan risiko yang berkelanjutan, yaitu:

1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Penetapan dan pengembangan secara terus menerus atas kebijakan serta prosedur manajemen risiko yang jelas dan menyeluruh; dan
3. Pengawasan agar proses identifikasi pengukuran dan pemantauan, dan pengendalian risiko dijalankan sesuai dengan perkembangan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan senantiasa berupaya untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh, terintegrasi, dan efektif dengan tujuan:

1. Mendukung pelaksanaan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Membantu manajemen dengan menyediakan informasi yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan yang tepat dan berbasis risiko;
3. Membantu dalam menetapkan pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur;
4. Menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar; dan
5. Mengidentifikasi dan memaksimalkan peluang yang ada.

## I. TANGGUNG JAWAB SOSIAL dan PEMBERDAYAAN SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR and SOCIAL EMPOWERMENT*)

Perseroan turut berperan aktif dalam mengelola lingkungan agar menjadi lebih baik. Perseroan menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berfokus pada penerapan, pemeliharaan, dan pengelolaan di lingkungan kantor dan sekitarnya dan menjalankan program *Social Empowerment* yang berfokus pada pemberdayaan sosial masyarakat sekitar.

Program CSR yang kami lakukan antara lain:

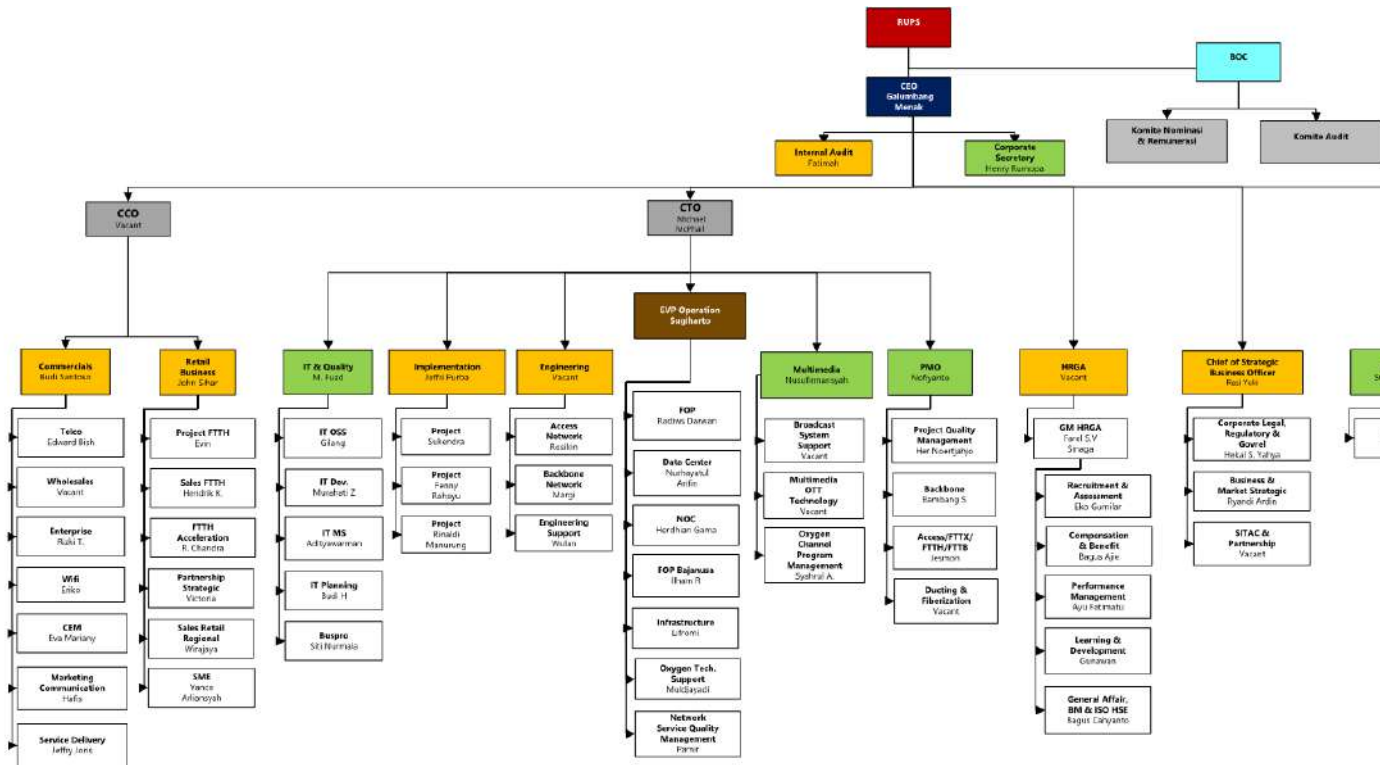
- Partisipasi dalam penggalangan dana di acara *Golf for Charity* di Piala Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang terkena dampak COVID-19.
- Donasi sepeda motor bekas, 26 CCTV, 2 unit smart tv kepada Pemerintah Kota Makassar dan 1 unit wireless keyboard dan mouse 1 unit 4K NVR (Network Video Recorder) dengan total nilai Rp.121.324.091,-
- Melaksanakan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 dengan mendistribusikan 2242 vaksin Covid-19 kepada seluruh karyawan Perseroan dan masyarakat

Program *Social Empowerment* yang kami lakukan antara lain:

- Melalui Oxygen.id, Perseroan bekerja sama dengan platform Kelas Pintar untuk menyediakan Paket Belajar Cerdas dengan akses internet yang lancar. Paket ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh melalui platform Kelas Pintar dan dapat diakses dengan lancar oleh siswa, guru, dan orang tua tanpa batasan kuota internet.
- Melalui anak usahanya yaitu PT Palapa Timur Telematika, pada 5 Oktober 2021, Perseroan membantu penggelaran layanan Palapa Ring Timur untuk akses wifi gratis kepada siswa/siswi SMPN 29 Klabil, Kabupaten Sorong yang mengikuti Penilaian Kompetensi Minimum (AKM). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi dan kualitas membaca dan menulis di tingkat SMP. Dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari (5-6 Oktober 2021), seluruh kegiatan AKM berhasil dilaksanakan.
- Pada 19 April 2021, PT Palapa Timur Telematika membantu SMK Negeri 2 Sabu Barat di Sabu, Nusa Tenggara Timur mengubah halaman belakang NOC (Network Operation Center) menjadi ruang kelas. Siswa sekolah terpaksa mengikuti ujian di halaman belakang NOC Sabu karena jaringan internet lokal rusak akibat banjir bandang dan angin kencang yang melanda Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada 4 April 2021. Secara keseluruhan, 81 siswa kelas 12 mengikuti ujian tersebut. ujian online dari tanggal 16 April – 20 April 2021 dengan memanfaatkan free wifi yang disediakan oleh PT Palapa Timur Telematika yang juga dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.
- Perseroan juga telah menyiapkan wifi berbasis fiber optic untuk 11 hotspot Palapa Ring Barat (Pulau Riau) dan 51 hotspot Palapa Timur Telematika (Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat), yang diberikan secara gratis kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek sehingga dapat mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah;
- Program Internet Gratis Belajar Online Jakarta di Area Publik Anak di Menteng (Jakarta) bersama Polsek Menteng.
- Program Internet Gratis di beberapa kawasan kumuh di Jakarta

## J. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut merupakan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.



## 14. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan meyakini bahwa kekuatan SDM sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan usaha guna menciptakan daya saing yang tinggi dalam industri telekomunikasi di tanah air. Perseroan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM seiring dengan rencana pengembangan Perseroan di masa depan.

Perseroan juga memandang bahwa SDM merupakan mitra usaha yang strategis. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompoten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perseroan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan. Dengan hal tersebut, maka Perseroan mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi harapan seluruh karyawan.

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.



Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (Perseroan, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Directorate Head</b>			
– Pejabat Eksekutif	2	2	2
– Direktur Non Akta	4	3	3
<b>Division Head</b>	7	9	9
<b>Department Head</b>	26	30	30
<b>Section Head</b>	225	217	182
<b>Staff</b>	336	332	283
<b>Total</b>	<b>600</b>	<b>593</b>	<b>509</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (Perseroan, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
S3	0	0	0
S2	24	22	22
S1	354	353	298
Diploma	136	137	125
Lain-lain	86	81	64
<b>Total</b>	<b>600</b>	<b>593</b>	<b>509</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (Perseroan, Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Diatas 55 tahun	10	8	8
> 51 – 55 tahun	13	14	9
> 46 – 50 tahun	35	35	28

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
> 41 – 45 tahun	91	90	74
> 36 – 40 tahun	141	143	132
> 31 – 35 tahun	157	155	141
> 26 – 30 tahun	143	138	108
> 21 – 25 tahun	10	10	9
<b>Total</b>	<b>600</b>	<b>593</b>	<b>509</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
<i>Business Development</i>	7	15	23
<i>Commercial</i>	123	117	113
<i>Engineering IT</i>	101	89	96
<i>Enterprise</i>	133	124	128
<i>Executive Officer</i>	7	7	7
<i>Finance</i>	81	75	68
<i>Government Relation &amp; SITAC</i>	19	17	16
<i>Human Resources</i>	10	10	12
<i>General Affairs</i>	30	25	20
<i>Legal</i>	10	8	8
<i>Marketing</i>	12	13	8
<i>Operation</i>	328	283	252
<i>Performance Analysis</i>	0	18	16
<i>Planning</i>	0	0	0
<i>Project</i>	54	89	74
<b>Total</b>	<b>915</b>	<b>890</b>	<b>841</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Bali	12	7	8
Bangka Belitung	3	3	3
Banten	0	1	2
DKI Jakarta	804	791	749
Jambi	4	4	4
Jawa Barat	16	19	16
Jawa Tengah	7	8	6
Jawa Timur	22	19	17
Lampung	1	1	1
Riau	12	12	12
Sulawesi Selatan	1	1	1
Sumatera Selatan	8	8	8
Sumatera Utara	15	12	11
Yogyakarta	2	1	1
Kalimantan Barat	1	1	1
Kalimantan Selatan	0	0	0

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Kalimantan Timur	1	1	0
Nusa Tenggara Timur	6	1	1
Nusa Tenggara Barat	0	0	0
Papua	0	0	0
<b>Total</b>	<b>915</b>	<b>890</b>	<b>841</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (Perseroan, Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	600	593	509
Karyawan Kontrak	315	297	332
<b>Total</b>	<b>915</b>	<b>890</b>	<b>841</b>

### Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki tenaga kerja asing sebagai berikut:

No	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. ITAS/ITAP	Masa Berlaku
1.	Michael Cruickshanks Mcphail	Inggris	Chief Technical Officer	2D21JE0042-W	16 Mei 2027
2.	Pamir Raza Mojiz	Pakistan	Research and Development Advisor	2C21JE8898-V	5 Oktober 2022

### PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah rincian jumlah karyawan Perusahaan selama 3 tahun terakhir:

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan (Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Directorate Head	10	8	7
Division Head	7	3	2
Department Head	49	10	9
Section Head	25	42	37
Staff	104	58	33
<b>Total</b>	<b>195</b>	<b>121</b>	<b>88</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
S3	0	0	0
S2	51	5	6

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
S1	69	61	54
Diploma	30	24	14
Lain-lain	45	31	14
<b>Total</b>	<b>195</b>	<b>121</b>	<b>88</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia (Karyawan Tetap)**

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Diatas 55 tahun	3	3	3
> 51 – 55 tahun	4	5	3
> 46 – 50 tahun	27	17	11
> 41 – 45 tahun	24	14	15
> 36 – 40 tahun	45	31	25
> 31 – 35 tahun	49	24	16
> 26 – 30 tahun	37	24	12
> 21 – 25 tahun	6	3	3
<b>Total</b>	<b>195</b>	<b>121</b>	<b>88</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
<i>Business Development</i>	0	0	0
<i>Commercial</i>	65	66	60
<i>Engineering IT</i>	11	10	11
<i>Enterprise</i>	2	2	2
<i>Executive Officer</i>	20	16	12
<i>Finance</i>	36	21	20
<i>Government Relation &amp; SITAC</i>	0	0	3
<i>Human Resources</i>	5	3	5
<i>General Affairs</i>	18	11	8
<i>Legal</i>	4	4	5
<i>Marketing</i>	0	0	0
<i>Operation</i>	477	356	308
<i>Performance Analysis</i>	0	0	0
<i>Planning</i>	0	0	0
<i>Project</i>	15	39	82
<b>Total</b>	<b>653</b>	<b>528</b>	<b>516</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Lokasi (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Bali	1	2	0
Bangka Belitung	1	1	1
Banten	2	2	2
DKI Jakarta	399	314	313
Jambi	1	0	0

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Jawa Barat	15	14	16
Jawa Tengah	3	3	0
Jawa Timur	0	1	1
Lampung	0	0	0
Riau	14	3	1
Sulawesi Selatan	2	1	0
Sumatera Selatan	2	2	2
Sumatera Utara	28	30	29
Yogyakarta	1	1	1
Kalimantan Barat	1	2	1
Kalimantan Selatan	0	0	0
Kalimantan Timur	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	3	3	3
Nusa Tenggara Barat	0	0	0
Papua	175	144	142
Singapura	5	5	4
<b>Total</b>	<b>653</b>	<b>528</b>	<b>516</b>

**Tabel Komposisi Karyawan Menurut Status (Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak)**

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	195	121	88
Karyawan Kontrak	458	407	428
<b>Total</b>	<b>653</b>	<b>528</b>	<b>516</b>

### **SERIKAT PEKERJA**

Saat ini di Perseroan belum terdapat serikat pekerja. Hal ini didasarkan dengan adanya hubungan yang harmonis antara Perseroan, dimana komunikasi yang terbuka antara Perseroan dengan memitigasi setiap permasalahan yang timbul.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk memiliki Peraturan Perusahaan yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 1206 tahun 2021 tanggal 27 April 2021, yang telah memberikan pengesahan dengan No. Pengesahan 323/PP/L/IV/D/2021 tanggal 27 April 2021. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 27 April 2023.

### **FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN BAGI KARYAWAN**

Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);

- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan
- Asuransi Kesehatan Swasta
- Tunjangan Hari Raya;
- Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
- Fasilitas mobil dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak;
- Koperasi Karyawan

## **PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Beberapa program pelatihan dan pendidikan yang diadakan selama tahun 2021 adalah:

1. In House Training (Soft Skill and Hard Skill)  
Merupakan bentuk program pelatihan, dimana materi pelatihan baik soft skills dan hard skill didesain sesuai dengan kebutuhan pengembangan karyawan dan goals perusahaan. In House Training diadakan setiap minggu dengan materi yang berbeda-beda sesuai dengan hasil Training Need Analysis (TNA).
2. Knowledge Sharing Forum  
Merupakan wadah bagi para karyawan untuk saling berbagi pengetahuan mengenai pekerjaan, skills, dan kompetensi di departemen mereka. Knowledge Sharing Forum diadakan setiap minggu dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan pematemi.
3. Leadership Enhancement Program  
Merupakan program pengembangan dalam membuat transformasi keterampilan karyawan di bidang leadership, yang bertujuan agar karyawan tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai leaders dengan lebih efektif. Leadership Enhancement Program yang diadakan di tahun 2021 ini adalah Coaching, Counseling, and Mentoring, dimana peserta diikutkan dalam program yang berjalan selama 3 bulan mulai dari pre activity – in class activity – post activity.
4. Webinar  
Merupakan kegiatan seminar yang dilakukan secara online dengan berbagai topik atau materi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan karyawan. Webinar yang diaplikasikan di Moratelindo sangatlah beragam, mulai dari free webinar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sampai dengan webinar yang diselenggarakan secara internal dengan mengundang pembicara yang kompeten di bidangnya.

## **15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK**

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan surat pernyataan dari masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 22 Maret 2022 menyatakan bahwa Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang berpotensi menjadi perkara yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan surat pernyataan dari masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 22 Maret 2022

menyatakan bahwa Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak terdapat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

## 16. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan sebagai Berikut:

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2021 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70	Beroperasi	2016
5.	IPT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	1999	65	Beroperasi	2021
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>							
6.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	Beroperasi	2016

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perusahaan anak terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

No.	Nama	Kontribusi terhadap Aset Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Liabilitas Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan (%)
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>				
1.	MIPL	1,92	2,55	2,16
2.	OMI	0,51	0,20	10,80

No.	Nama	Kontribusi terhadap Aset Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Liabilitas Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan (%)
3.	PRB	7,94	11,32	7,78
4.	PTT	36,59	63,22	26,87
5.	IPT	3,37	6,80	1,49
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>				
6.	OII	1,17	1,58	10,49

Di bawah ini disajikan alamat domisili masing-masing Perusahaan Anak sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

No.	Nama	Alamat Domisili
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>		
1.	MIPL	51 Bukit Batok Crescent #08-05 Unity centre Singapore – 658077
2.	OMI	Gedung Grha 9, Lantai 6, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.	PRB	Gedung Grha 9, Lantai 5, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
4.	PTT	Gedung Grha 9, Lantai 1, Jalan Panataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat
5.	IPT	Wisma BSG Lantai 9, Jl. Abdul Muis No. 40, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>		
6.	OII	Jalan Jatinegara Barat No. 44, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Berikut uraian tentang Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

#### A. PT OXYGEN MULTIMEDIA INDONESIA (OMI)

##### Riwayat Singkat

OMI berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas OMI No. 38 tanggal 9 September 2015, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-2457946.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 25 September 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-3558455.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 (“**Akta Pendirian OMI**”).

Anggaran Dasar OMI telah mengalami perubahan sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OMI No. 149 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-00064627.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0159910.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 4 September 2019 (“**Akta No. 149/2019**”).

## Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha OMI adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar OMI yang tercantum dalam Akta No. 149/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan OMI ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman (Kode KBLI: 60).
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OMI dapat melaksanakan kegiatan usaha penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga *station relay* (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung atau kombinasi keduanya); pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelis. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita olahraga Pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancar radio dan televisi secara langsung atau pemancar ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (*fee*) dan kontrak (Kode KBLI: 60202).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh OMI adalah bergerak di bidang penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, OMI telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

### 1) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”)

Berdasarkan IPP No. 309 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan masa berlaku hingga 23 Januari 2027.

### 2) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Berdasarkan NIB No.9120405221936 tanggal 13 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

## Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham OMI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian OMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Perseroan	2.499	2.499.000.000	99,96
2. PT Candrakarya Multikreasi	1	1.000.000	0,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500.000.000</b>	

## Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham OMI No. 27 tanggal 29 Juni 2017, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0149876 tanggal 4 Juli 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081985.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 4 Juli 2017 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham OMI No. 217 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237253 tanggal 29 Agustus 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0113590.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi OMI adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi  
 Komisaris : Karim Panjaitan

### Direksi

Direktur Utama : Galumbang Menak  
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting yang dikutip dalam Laporan Keuangan Konsolidasian OMI pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	242.507.722.192	511.727.430.880	269.382.530.768
Jumlah Liabilitas	117.348.045.877	393.525.034.109	189.813.041.616
Jumlah Ekuitas	125.159.676.315	118.202.396.771	79.569.489.152
Pendapatan Usaha	458.764.393.920	304.313.047.535	405.476.612.879
Laba Kotor	183.847.996.245	162.345.832.281	260.972.487.418
Laba (Rugi) Bersih	122.502.595.644	112.965.313.297	221.982.534.248

Per 31 Desember 2021, OMI mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp269.219.708.688,- atau setara dengan 52,61% menjadi sebesar Rp242.507.722.192,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp511.727.430.880,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan Piutang Pihak Berelasi sebesar Rp403.015.037.559 di tahun 2021.

Per 31 Desember 2020, OMI mencatat total aset mengalami peningkatan sebesar Rp242.344.900.112,- atau setara dengan 89,96% menjadi sebesar Rp511.727.430.880,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp269.382.530.768,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan piutang kepada pihak berelasi.

Per 31 Desember 2021, OMI mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp276.176.988.232,- atau setara dengan 70,18% menjadi sebesar Rp117.348.045.877,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp393.525.034.109,-. Hal ini disebabkan oleh penurunan uang muka penjualan atas proyek pembangunan fiberisasi yang telah selesai pada tahun 2021 pada perusahaan Anak (OII).

Per 31 Desember 2020, OMI mencatat total liabilitas mengalami peningkatan sebesar Rp203.711.992.493,- atau setara dengan 107,32% menjadi sebesar Rp393.525.034.109,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp189.813.041.616,-. Hal ini disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan atas proyek pembangunan fiberisasi pada perusahaan Anak (OII).

Per 31 Desember 2021, OMI mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp6.957.279.544,- atau setara dengan 5,89% menjadi sebesar Rp125.159.676.315,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp118.202.396.771,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba diatahan sebesar Rp 6.968.426.276 atau setara dengan 5,89% pada tahun 2021.

Per 31 Desember 2020, OMI mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp38.632.907.619,- atau setara dengan 48,55% menjadi sebesar Rp118.202.396.771,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp79.569.489.152,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021, pendapatan usaha OMI mengalami peningkatan sebesar Rp154.451.346.385,- atau setara dengan 50,75% menjadi sebesar Rp458.764.393.920,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp304.313.047.535,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang sudah selesai pada perusahaan Anak (OII).

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha OMI mengalami penurunan sebesar Rp101.163.565.344,- atau setara dengan 25% menjadi sebesar Rp304.313.047.535,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp405.476.612.879,-. Hal ini disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak (OII) terkait proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan pada perusahaan Anak (OII).

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba kotor dari OMI mengalami peningkatan sebesar Rp21.502.163.964,- atau setara dengan 13,24% menjadi sebesar Rp183.847.996.245,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp162.345.832.281,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang sudah selesai pada perusahaan Anak (OII).

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari OMI mengalami penurunan sebesar Rp98.626.655.137,- atau setara dengan 37,79% menjadi sebesar Rp162.345.832.281,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp260.972.487.418,-. Hal ini disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak (OII) terkait proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan pada perusahaan Anak (OII).

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba bersih dari OMI mengalami peningkatan sebesar Rp9.537.282.347,- atau setara dengan 8,40% menjadi sebesar Rp122.502.315.332,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp112.965.313.297,- Hal

ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan konstruksi atas proyek pembangunan fiberisasi yang sudah selesai pada perusahaan Anak (OII).

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari OMI mengalami penurunan sebesar Rp109.017.220.951,- atau setara dengan 49,11% menjadi sebesar Rp112.965.313.297,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp221.982.534.248,-. Hal ini disebabkan oleh pendapatan Perusahaan Anak (OII) terkait proyek pembangunan fiberisasi yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

## **B. PT PALAPA RING BARAT (PRB)**

### **Riwayat Singkat**

PRB berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PRB No. 38 tanggal 10 Februari 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0007857.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0018596.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 (“**Akta Pendirian PRB**”).

Anggaran Dasar PRB telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PRB No.15 tanggal 3 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0078110.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0185560.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Oktober 2019 (“**Akta No.15/2019**”) sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PRB tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017.

### **Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PRB yang tercantum dalam Akta No.15/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan PRB ialah berusaha dalam bidang:
  - (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42);
  - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43);
  - (iii) Telekomunikasi (Kode KBLI: 61);
  - (iv) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70);
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PRB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
  - (ii) Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro,

- stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI: 43212);
- (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI: 61100);
  - (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI: 70209).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh PRB adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PRB telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

**1) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 003/TEL.01.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PRB yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diberikan tanpa batas waktu, sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku.

**2) Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) Besar**

Berdasarkan SIUP Besar No. 45/24.1.PB/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 1 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham PRB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PRB No. 61 tanggal 5 Desember 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0023200.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0145323.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Desember 2016, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Perseroan	9.890	98.900.000.000	98,9
2. PT Ketrosden Triasmitra	110	1.100.000.000	1,1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PRB No. 07 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Andrea Aziz, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0468926 tanggal 3 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0192258.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 November 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PRB adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Galumbang Menak  
 Komisaris : Indra Nathan Kusnadi, S.H.

### Direksi

Direktur Utama : Syarif Lumintarjo  
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset	1.156.832.709.443	1.219.849.608.473	1.276.996.351.179
Jumlah Liabilitas	744.313.591.251	889.934.630.591	1.027.811.628.801
Jumlah Ekuitas	412.519.118.192	329.914.977.882	249.184.722.377
Pendapatan Usaha	214.632.743.156	227.748.901.105	251.531.526.064

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Laba Kotor	209.745.236.083	222.862.143.104	242.193.116.332
Laba (Rugi) Bersih	81.923.497.825	80.985.362.441	71.699.091.174

Per 31 Desember 2021, PRB mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp63.016.899.030,- atau setara dengan 5,17% menjadi sebesar Rp1.156.832.709.443,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.219.849.608.473,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring paket barat.

Per 31 Desember 2020, PRB mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp57.146.742.706,- atau setara dengan 4,48% menjadi sebesar Rp1.219.849.608.473,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.276.996.351.179,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring paket barat.

Per 31 Desember 2021, PRB mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp145.621.039.340,- atau setara dengan 16,36% menjadi sebesar Rp744.313.591.251,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp889.934.630.591,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring paket barat.

Per 31 Desember 2020, PRB mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp137.876.998.210,- atau setara dengan 13,41% menjadi sebesar Rp889.934.630.591,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.027.811.628.801,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring paket barat.

Per 31 Desember 2021, PRB mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp82.604.140.310,- atau setara dengan 25,04% menjadi sebesar Rp412.519.118.192,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp329.914.977.882,-. Hal ini disebabkan oleh laba bersih untuk tahun 2021.

Per 31 Desember 2020, PRB mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp80.730.255.505,- atau setara dengan 32,40% menjadi sebesar Rp329.914.977.882,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp249.184.722.377,-. Hal ini disebabkan oleh laba bersih untuk tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021, pendapatan usaha PRB mengalami penurunan sebesar Rp13.116.157.949,- atau setara dengan 5,76% menjadi sebesar Rp214.632.743.156,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp227.748.901.105,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha PRB mengalami penurunan sebesar Rp23.782.624.959,- atau setara dengan 9,46% menjadi sebesar Rp227.748.901.105,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp251.531.526.064,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa sesuai implementasi sesuai ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba kotor dari PRB mengalami penurunan sebesar Rp13.116.907.021,- atau setara dengan 5,89% menjadi sebesar Rp209.745.236.083,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp222.862.143.104,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari PRB mengalami penurunan sebesar Rp19.330.973.228,- atau setara dengan 7,98% menjadi sebesar Rp222.862.143.104,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp242.193.116.332. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba bersih dari PRB mengalami peningkatan sebesar Rp938.135.384,- atau setara dengan 1,16% menjadi sebesar Rp81.923.497.825,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp80.985.362.441,-. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa serta penurunan beban Keuangan pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari PRB mengalami peningkatan sebesar Rp9.286.271.267,- atau setara dengan 12,95% menjadi sebesar Rp80.985.362.441,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp71.699.091.174. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan.

### **C. PT PALAPA TIMUR TELEMATIKA (PTT)**

#### **Riwayat Singkat**

PTT, berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PTT No.83 tanggal 16 Agustus 2016, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0036614.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No.AHU-0095745.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Agustus 2017 ("**Akta Pendirian PTT**").

Anggaran Dasar PTT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PTT No.74 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0084396.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU.AH.01.03.0347959 tanggal 18 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0198206.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Oktober 2019 ("**Akta No.74/2019**") sehubungan dengan; (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar PTT tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; (ii) perubahan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar tentang Komposisi Dewan Komisaris PTT; dan (iii) perubahan susunan pengurus PTT.

## Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTT adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Anggaran Dasar PTT yang tercantum dalam Akta No. 74/2019, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan tujuan PTT ialah berusaha dalam bidang:
  - (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI: 42);
  - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI: 43);
  - (iii) Telekomunikasi (Kode KBLI: 61);
  - (iv) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI: 70);
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PTT dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:
  - (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI: 42217);
  - (ii) Instalasi Telekomunikasi, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 43212);
  - (iii) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI: 61100);
  - (iv) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat

dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI 70209)".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh PTT adalah bergerak di bidang konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PTT telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

**1) Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) – Besar**

- (1) SIUP - Besar No. 174/24.1PB/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 2 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- (2) SIUP No. 510/263/PB/DPMPSTP tanggal 6 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Surat Izin Tempat Usaha;

**2) Keputusan Lokasi Pembangunan Proyek**

Keputusan Bupati Rote Ndao No. 360/KEP/HK/2017 tentang Lokasi Pembangunan Proyek Strategis Nasional Palapa Ring Di Desa Nggodimedda Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 bersama dengan Lampiran Keputusan Bupati Rote Ndao.

**3) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 60/TEL.01.02/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PTT yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diberikan tanpa batas waktu, sepanjang Perseroan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan penyelenggaraan yang berlaku

**4) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi**

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/TEL01.02/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 058/TEL.01.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PTT, dan Keputusan Menkominfo No. 60/TEL.01.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika tertanggal 24 Juli 2019.

**5) Nomor Induk Berusaha (“NIB”)**

NIB dengan No. 8120417191847 tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

**Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Struktur permodalan dan Kepemilikan Saham PTT adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PTT, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Perseroan	770	7.700.000.000	70

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
2. PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	286	2.860.000.000	26
3. PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.	22	220.000.000	2
4. PT Smart Telecom	22	220.000.000	2
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.100</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>900</b>	<b>9.000.000.000</b>	

### Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 74/2019 juncto Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTT No. 06 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Andrea Aziz, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0468929 tanggal 3 November 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0192260.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 November 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTT adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Immanuel Eka Putra

#### Direksi

Direktur Utama : Leon Maximilian Kakisina

Direktur : Jimmy Kadir

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	5.329.998.939.474	5.524.270.015.881	5.743.598.042.305
Jumlah Liabilitas	4.154.953.433.442	4.637.587.002.787	5.192.478.934.811
Jumlah Ekuitas	1.175.045.506.032	886.683.013.094	551.119.107.494
Pendapatan Usaha	1.002.620.161.212	1.080.126.447.535	1.962.176.222.054
Laba Kotor	981.097.925.257	1.056.233.138.815	692.231.513.684
Laba (Rugi) Bersih	287.481.066.954	335.793.789.252	278.923.840.646

Per 31 Desember 2021, PTT mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp194.271.076.407,- atau setara dengan 3,52% menjadi sebesar Rp5.329.998.939.474,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.524.270.015.881 Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring timur.

Per 31 Desember 2020, PTT mencatat total aset mengalami penurunan sebesar Rp219.328.026.424,- atau setara dengan 3,82% menjadi sebesar Rp5.524.270.015.881,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.743.598.042.305,- Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang konsesi atas penerimaan jasa operasional proyek palapa ring timur.

Per 31 Desember 2021, PTT mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp482.633.569.345,- atau setara dengan 10,41% menjadi sebesar Rp4.154.953.433.442,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.637.687.002.787,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring timur.

Per 31 Desember 2020, PTT mencatat total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp554.891.932.023,- atau setara dengan 10,69% menjadi sebesar Rp4.637.687.002.787,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.192.478.934.810,-. Hal ini disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank atas pembiayaan proyek palapa ring timur.

Per 31 Desember 2021, PTT mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp288.362.492.938,- atau setara dengan 35,52% menjadi sebesar Rp1.175.045.506.032,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp886.683.013.094,-. Hal ini disebabkan oleh laba bersih untuk tahun 2021.

Per 31 Desember 2020, PTT mencatat total ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp335.563.905.599,- atau setara dengan 60,89% menjadi sebesar Rp886.683.013.094,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp551.119.107.495,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021, pendapatan usaha PTT mengalami penurunan sebesar Rp77.506.286.323,- atau setara dengan 7,18% menjadi sebesar Rp1.002.620.161.212,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.080.126.477.535,-. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha PTT mengalami penurunan sebesar Rp882.049.774.519,- atau setara dengan 44,95% menjadi sebesar Rp1.080.126.477.535,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.962.176.222.054,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan konstruksi dari konsesi jasa karena proyek palapa ring paket timur telah berakhir pada bulan Agustus 2019.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba kotor dari PTT mengalami penurunan sebesar Rp75.135.213.558,- atau setara dengan 7,11% menjadi sebesar Rp981.097.925.257,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp1.056.233.138.815. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba kotor dari PTT mengalami peningkatan sebesar Rp364.001.625.131,- atau setara dengan 52,58% menjadi sebesar Rp1.056.233.138.815,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp692.231.513.684. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan pendapatan dari jasa konsesi sesuai dengan ISAK 16 serta penurunan atas beban konstruksi.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laba bersih dari PTT mengalami penurunan sebesar Rp48.312.722.298,- atau setara dengan 14,39% menjadi sebesar Rp287.481.066.954,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp335.793.789.252. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pendapatan dari konsesi jasa sesuai implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa dan penurunan beban keuangan pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020, laba bersih dari PTT mengalami peningkatan sebesar Rp56.869.948.606,- atau setara dengan 20,39% menjadi sebesar Rp335.793.789.252,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp278.923.840.646. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan pendapatan dari jasa konsesi sesuai dengan ISAK 16 serta penurunan atas beban konstruksi dan adanya penghasilan atas pajak tangguhan di banding tahun 2019.

## **17. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

### **A. UMUM**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat dihadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 95 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 April 2022 ("**Akta No. 95/2022**"). Akta No. 95/2022 memuat perubahan ketentual Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

- m. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan
- n. Aktivitas *Call Centre*.

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Perseroan merupakan penyedia jaringan telekomunikasi *wholesale* yang berdiri sejak tahun 2000, dimana memulai bisnisnya sebagai ISP (*Internet Service Provider*) dan *Call Center*. Perseroan melakukan pengembangan usaha pada tahun 2007 sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan kabel serat optik di Pulau Jawa sepanjang 7,5 km. Perseroan mulai berkibrah secara global dengan dibangunnya kabel bawah laut internasional dengan nama MIC-1 (*Moratelindo International Cable-system One*) pada tahun 2008 yang menghubungkan dari Jakarta ke Singapura. Seperti diketahui Singapura merupakan gerbang internet di dunia, dimana Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan memiliki sendiri akses langsung melalui kabel bawah laut MIC-1 yang diperkuat dengan didirikannya Moratel International Pte. Ltd. di Singapura serta diperolehnya lisensi *Facilities-Based Operations* oleh pemerintah Singapura pada tahun 2010.

Pemerintah RI juga mempercayakan Perseroan untuk mendukung pengembangan infrastruktur lokal nasional dengan memberikan izin-ijin dan lisensi seperti JARTUP (Jaringan Tertutup), NAP (*Network Access Point*), ISP (*Internet Service Provider*), JARTAPLOK (Jaringan Tetap Lokal), serta Perseroan dipercaya untuk membangun dan mengoperasikan pusat data nasional yaitu *Nusantara Internet Exchange* (NIX). Sepanjang tahun 2010 hingga 2012 Perseroan sangat agresif dalam mengembangkan jaringan internasional dengan dibangunnya jaringan kabel serat optik bawah laut BDM (Batam-Dumai-Malacca) dan B3JS (Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore) sehingga pada 2012 jaringan kabel serat optik yang telah berhasil dibangun adalah sepanjang 7.600 km. Pada sisi domestik Moratelindo memperkuat jaringannya dengan membangun *Sumatera Backbone* pada tahun 2010, dan infrastruktur metro-e pada tahun 2014, sehingga total jaringan yang dimiliki pada tahun 2014 yang berhasil dicapai adalah sepanjang 9.700 km.

Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai pemenang tender Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur pada tahun 2016 yang mana Badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Barat, Perseroan mendirikan PT. Palapa Ring Barat sedangkan badan Usaha Pelaksana Palapa Ring Timur, Perseroan mendirikan PT. Palapa Timur Telematika. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi sedangkan Palapa Ring Timur mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Pada tahun 2016 Perseroan mulai merambah ke pasar FTTX dengan memperkenalkan brand "Oxygen.id" untuk ekspansi di sektor ritel perseroan juga sudah memperkenalkan brand "Oxygen Home" untuk perumahan dengan cakupan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jaringan serat optik Perseroan berkembang dari 48.515 km dengan kapasitas 18.360 Gigabyte pada tahun 2020 menjadi 51.749 km dengan kapasitas 21.000 Gigabyte pada tahun 2021 sepanjang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua untuk menunjang kegiatan operasi dan pemasaran Perseroan segmen *Telco, Wholesale, Enterprise, Retail* dan lainnya. Pada Januari 2020, Perseroan melalui Kerja Sama Operasi dengan PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("BPS") berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk berkerjasama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan *ducting Bersama* dan *Microcell pole* di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang. Dengan pelaksanaan proyek ini, dari sudut pandang desain jaringan dan estetika infrastruktur suatu kota akan mampu mempersiapkan Kota Semarang menuju *smart city* yang mendukung pembangunan ekonomi digital. Beberapa hal yang signifikan telah dicapai oleh Perseroan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Palapa Ring Barat pada bulan Maret tahun 2018 sudah mulai beroperasi;
2. Palapa Ring Timur pada bulan Agustus tahun 2019 sudah mulai beroperasi; dan
3. Penandatanganan Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi antara Perseroan melalui KSO BPS-MORATELINDO dengan Pemerintah Kota Semarang.
4. Pengembangan Fiber To The Home (FTTH) ke kota-kota baru seperti Jambi, Bandung, Semarang serta pengembangan FTTX ke kota baru seperti Kupang dan Labuan Bajo.

## B. KEGIATAN USAHA

Perseroan adalah Penyedia Akses Jaringan (NAP) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) yang berpengalaman sejak tahun 2000 dan sudah memiliki pelanggan di berbagai segmen termasuk Telco, ISP, Pemerintah, Perusahaan dan Residential. Perseroan juga merupakan salah satu penyedia Jaringan *Fiber Optic Backbone* yang terbesar di Indonesia, cakupan layanan domestik Moratelindo tersebar luas di sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua, dengan interkoneksi ke Singapura sebagai Cakupan Layanan Internasional.

Untuk memperkuat hubungan internasional ke Singapura, Perseroan membangun *Moratelindo Internasional Cable-sistem One* (MIC-1) dengan panjang sekitar 70 km di stasiun docking Changi dan Batam. MIC-1 adalah kabel bawah laut serat optik *repeaterless linear* (koneksi langsung di bawah laut) yang menghubungkan Singapura dan Pulau Batam.

Perseroan juga didukung infrastruktur fiber optik *backbone* bawah laut yang kuat di mana menghubungkan Batam – Dumai –Malaka (BDM), dengan 2 kabel bawah laut dari Singapura ke Batam, dan tiga sistem kabel dari Batam ke Jakarta. Diikuti dengan pengembangan terbaru dari kabel serat optik bawah laut internasional dari Jakarta – Bangka – Bintan & Singapore (B3JS) sepanjang 1.398,31 Km dengan kapasitas 400 Gbps.

Di tahun 2014, Moratelindo juga kembali membentuk jaringan untuk mengakses Jambi dan Batam (Jiba) sepanjang 304 Km dengan kapasitas 160 GBps. Melalui jaringan ini, Perseroan dapat memberikan akses ke koneksi internet kecepatan tinggi yang handal.

Pada saat Prospektus ini di terbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP).

Berikut adalah uraian umum untuk masing-masing segmen usaha/jasa yang di tawarkan Perseroan:

### 1. Konektivitas

Suatu layanan sewa kapasitas jaringan (sewa link) yang menghubungkan suatu node ke node tujuan lainnya baik lokal maupun international yang dipergunakan oleh Perusahaan Telco, ISP maupun Pelanggan Enterprise.

### 2. Jasa Internet

Suatu layanan koneksi dari pelanggan ke Internet Global dengan jalur koneksi yang bersifat Dedicated yang dipergunakan oleh pelanggan ISP, Pelanggan Enterprise maupun yang bersifat Broradband (Burstable) untuk pelanggan Enterprise dan Retail.

### 3. Jasa Pusat Data

Suatu layanan Pusat Data yang tersedia di 6 Data Center Moratelindo (Jakarta, Batam, Medan, Palembang, Surabaya dan Denpasar) untuk kebutuhan Perusahaan Telco, ISP maupun Enterprise untuk sewa Rack dan fasilitas2 di Data Center.

### 4. Solusi Nilai Tambah

Suatu layanan Nilai Tambah yang menjadi bagian Total Solusi yang disiapkan Moratelindo kepada seluruh pelanggan-pelanggan.

### 5. Infrastruktur

Suatu layanan dengan pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki atau telah dibangun oleh Moratelindo untuk dapat dimanfaatkan oleh Pelanggan-pelanggan baik Operator Telco dan ISP dengan skema sewa fasilitas infrastruktur, sehingga dapat menghemat biaya investasi dan waktu dalam penggunaan fasilitas infrastruktur tersebut.

Konektivitas (Connectivity)	Jasa Internet (Internet Services)	Jasa Pusat Data (Data Center)	Solusi Nilai Tambah (Value Added Solution)	Infrastruktur
<ul style="list-style-type: none"> <li>International Private Leased Circuit (IPLC)</li> <li>Domestic Leased Circuit (DLC) – MetroM</li> <li>IP-VPN / MPLS</li> <li>Cloud Connectivity – “Express Connect” (Direct Connect to AWS, Alibaba, GCP, Azure)</li> <li>Interconnection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IP Transit Global</li> <li>IP Transit Domestic</li> <li>IP Transit MIX</li> <li>Moratel Internet Exchange (Mora-IXP)</li> <li>OXYGEN.ID – Broadband Internet Access (Retail, Corporate &amp; Cluster/Apartment)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colocation</li> <li>VAS [DRC (Disaster Recovery Center), Remote Hand, Smart Hand, DC Consultant and DC Consultant and DC Construction)</li> <li>Cloud and Hosting [VPS (Virtual Private Server), Public Cloud, Private Cloud)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Managed Service (Wifi, Router Managed Service, Firewall Managed Service)</li> <li>Engineering on Site (EoS).</li> <li>IPTV/OTT Service for Media and Hospitality.</li> <li>Fixed Telephony Service for Retail &amp; Corporate (partnership with SmartFren, OFON and Telkom), Cloud Talk / Hosted Cloud PBX, Hosted / Cloud Call Center.</li> <li>OAM (Oxygen Access Manager) for Wifi Portal and Access Manager.</li> <li>Payment Gateway to E-Wallet, E-Commerce, Virtual Account and Retail Market and QRIS.</li> <li>Cloud Game (Game Content).</li> <li>SD-WAN (Software Define – Wide Area Network) Services</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pole Rental</li> <li>ducting rental</li> <li>Tower co-location for bts hotel.</li> </ul>

Kegiatan usaha Perseroan didukung dengan 6 (enam) *Nusantara Data Center* (NDC) dengan standard design *Tier 2*, yang saling terintegrasi di Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali. Semua NDC Perseroan terhubung dengan ratusan PoP dan High Rise Building serta seluruh jaringan Perseroan.

## **PROYEK PALAPA RING**

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah dan badan usaha yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh kabupaten/kota baik di wilayah komersial maupun non- komersial. Melalui proyek serat optik Palapa Ring, diperkirakan akan terjadi lonjakan kebutuhan trafik khususnya ke dan dari wilayah yang saat ini belum terjangkau oleh operator telekomunikasi. Proyek Palapa Ring mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru. Jaringan yang direncanakan tersebut akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu dapat memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman dan murah. Perseroan memperoleh mandat untuk mengerjakan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur.

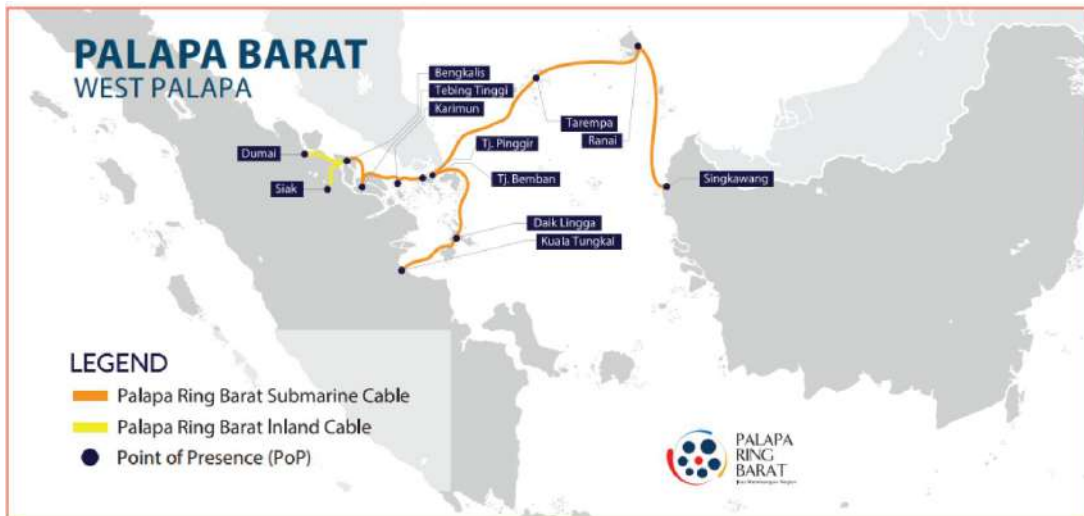
Saat ini Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018. Sedangkan, proyek Palapa Ring Paket Timur sudah beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Dengan demikian, pada saat ini seluruh proyek Palapa Ring yang dimandatkan oleh pemerintah sudah aktif beroperasi.

Pendanaan untuk kedua proyek tersebut seluruhnya telah diperoleh melalui perbankan. Pendanaan tersebut mendapatkan jaminan lewat skema *availability payment* (AP) dengan kontrak proyek selama 15 tahun. Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 yang mana merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (*demand risk*) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Kementerian Kominfo. Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat kepastian pengembalian investasi jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama.

Proyek Palapa Ring Paket Barat menelan dana AP sekitar Rp3,48 triliun, sedangkan proyek Palapa Ring Paket Timur sebanyak Rp14,06 triliun. Adapun sumber dana AP diperoleh dari Universal Service Obligation (USO) di bawah Kementerian Kominfo. Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam hal ini PT Palapa Ring Barat untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dan PT Palapa Timur Telematika untuk Proyek Palapa Ring Paket Timur menerima AP secara bulanan selama 15 Tahun dimana pembayaran AP tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Kedua proyek ini juga mendapatkan jaminan dari PII karena termasuk ke dalam 19 sektor infrastruktur ekonomi dan sosial, salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Penjaminan berlangsung selama 12 tahun atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, antara lain batalnya proyek dari pemerintah serta risiko-risiko lainnya.

- **PROYEK PALAPA RING PAKET BARAT**



Proyek Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Barat yang ditujukan demi pemerataan akses pital lebar (*broadband*). Proyek Palapa Ring Paket Barat dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo – PT Kestrodan Triasmitra yang dinyatakan secara resmi oleh Kementerian Kominfo pada 22 Januari 2016. Perseroan sebagai pemimpin konsorsium membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Ring Barat (PRB), yang berfokus menjalankan proyek ini. PRB melakukan penandatanganan kerjasama kredit investasi dengan Bank Mandiri.

Pemasangan kabel serat optik bawah laut dalam proyek Palapa Ring Paket Barat telah dimulai pada Agustus 2016 dan sudah menjangkau Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (hingga kepulauan Natuna) dengan total panjang kabel serat optik 2.131 km. Saat ini proyek Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018 dan memasuki tahap komersial dimana Perseroan telah mendapatkan availability payment selama +/- 4 tahun sejak tahun 2018.

Pekerjaan proyek Palapa Ring Paket Barat meliputi segmen Tanjung Bembam Batam – Tarempa; segmen Tarempa – Ranai; segmen Ranai – Singkawang; dan segmen Sekanah Daik Lingga – UQJ Bintan Tanjung Bembam. Tahap kedua adalah pembangunan kabel serat optik bawah laut dari Batam – Karimun – Tebing Tinggi – Bengkalis – Siak serta segmen Daik Lingga – Kuala Tungkal.

- **PROYEK PALAPA RING PAKET TIMUR**



Proyek Palapa Ring Paket Timur merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional Indonesia bagian Timur yang ditujukan demi pemerataan akses pitalebar (*broadband*). Proyek ini dimenangkan oleh konsorsium Moratelindo - PT Inti Bangun Sejahtera- PT Smart Telecom. Perseroan membentuk anak usaha, yaitu PT Palapa Timur Telematika (PTT), yang berfokus menjalankan proyek ini. Perjanjian Kerjasama proyek Palapa Ring Paket Timur diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan PT. Palapa Timur Telematika Nomor: 1425/M.KOMINFO/HK.03.02.09/2016 dan Nomor: 2901/PTT/PD-DIR/IX 2016 tanggal 29 September 2016, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Timur, yang dibuat antara Kementerian Kominfo dan PTT, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Amandemen Ketujuh Perjanjian Kerjasama No. 46/M.KOMINFO/HK.04.02/XI/2019 No. 2201/AMD/PTT-KOMINFO/XI/2019 tanggal 22 November 2019

Indonesia Timur memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, namun karena masih minimnya infrastruktur telekomunikasi di wilayah ini, membuatnya tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti bagian Barat dan Tengah. Dengan adanya program ini diharapkan Indonesia bagian Timur dapat mengejar perkembangan infrastruktur telekomunikasi, sehingga tidak ada lagi akses internet yang lambat dan mahal, dan kebutuhan konektivitas data dapat terpenuhi dengan baik. Diharapkan ini juga menjadi langkah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.

Pendanaan untuk proyek ini berasal dari sindikasi beberapa bank dengan *lead arranger* Bank BNI. Proyek Palapa Ring Paket Timur direncanakan dapat menjangkau 514 kabupaten yang tersebar dan menjangkau wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat. Total panjang jaringan *Submarine Cable* sepanjang 4.557 Km dan *Inland Cable* sepanjang 2.446 Km serta 52 *microwave links*. Pada Agustus 2019, PTT telah menyelesaikan pembangunan proyek Palapa Ring Paket Timur dan memasuki tahap operasi dan komersial.

Beroperasinya proyek Palapa Ring Timur berpotensi menghasilkan *revenue* sebesar 14,06 triliun Rupiah selama masa konsesi 15 tahun.

- **TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK**

Tahapan pelaksanaan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Timur antara lain:

1. *Marine survey and inland survey*
2. Akuisisi lahan untuk penempatan perangkat (NOC – *Network Operation Center*) dan pembangunan tower untuk penempatan *microwave* (khusus untuk proyek Palapa Ring Paket Timur)
3. Pemesanan material berupa kabel laut dan darat, perangkat aktif, *microwave* dan lain-lain
4. Penggelaran kabel darat dan laut serta pembangunan NOC
5. Pemasangan perangkat aktif
6. Uji layak operasi
7. Serah terima proyek

### **PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

Setelah sukses melaksanakan proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur yang keduanya merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat, Perseroan melalui KSO BPS MORATELINDO yang merupakan *joint operation* dibentuk pada tanggal 6 Desember 2019 oleh dan antara Perseroan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (“BPS”) berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang dengan berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 25 Tanggal 14 September 2020, dimana pada fase pertama diawali pada pembangunan di 8 ruas jalan prioritas kota semarang dengan total panjang jaringan 25km dan 7 Menara Telekomunikasi Selular.

Kerja Sama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang merupakan proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan *U-ditch* (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf “U”) dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE *High-density polyethylene*) bersama yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan *ducting* bersama dan menara telekomunikasi selular dengan perkiraan sepanjang 506.064 meter U-ditch dan/atau Makroduct di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 30 Tanggal 31 Januari 2020 yang mana diawali pada ruas-ruas jalan prioritas di kota Semarang yakni Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Bunderan Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pemuda.

Pola Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan KSO BPS-MORATELINDO didasarkan pada Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dalam hal penyediaan Pelayanan Publik, dengan periode kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial. Sebagai bentuk pengembalian investasi, KSO BPS-MORATELINDO akan menyewakan Aset Proyek ke operator-operator telekomunikasi selama 20 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

#### **KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.**

Pendapatan usaha Perseroan yang terkonsolidasi dengan jumlah yang signifikan berasal dari satu pihak yakni BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) melalui kontrak KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur, namun telah dimitigasi dengan adanya penjaminan dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero).

Sesuai dengan strategi bisnis perusahaan saat ini, Perseroan akan fokus pada segmen enterprises dan retail, sehingga dengan meningkatnya pendapatan disegmen tersebut akan mengurangi ketergantungan kepada Proyek Palapa Ring.

#### **KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP No. 22/2021”) yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP No. 27/2012”). Berdasarkan PP No. 22/2021, untuk memperoleh perizinan berusaha, setiap kegiatan usaha wajib untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud wajib dimiliki bagi setiap kegiatan usaha, baik yang memiliki dampak penting atau tidak penting bagi lingkungan hidup. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, wajib untuk memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan penilaian atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”). Lebih lanjut, untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup hanya wajib untuk memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”), yang disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam rangka pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”). Pada saat PP No. 22/2021 dikeluarkan, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto PP No. 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha.

Perseroan beserta dengan Perusahaan Anak, dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan mengenai lingkungan hidup yang berlaku. Perseroan dan Perusahaan Anak masih dalam proses melakukan kewajibannya dalam hal pelaporan secara periodik

mengenai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang. Sehubungan dengan hal tersebut, sampai dengan Tanggal Prospektus, Perseroan belum pernah menerima gugatan, tuntutan ataupun teguran, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, pihak kreditur Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan perubahan perubahan yang dilaksanakan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak pernah memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dai biaya sehubungan dengan pengeluaran atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

### C. SEGMENT PELANGGAN

Perseroan membagi segmen pelanggan menjadi 4 jenis sebagai berikut:

1. Segmen Telco (“Segmen Telco”);
2. Segmen *Wholesale* (“Segmen *Wholesale*”);
3. Segmen *Retail* dan *Enterprise* (“Segmen *Retail and Enterprise*”)
4. Segmen lainnya (“Others”)

Gambar di bawah menunjukkan layanan yang disediakan di bawah setiap segmen.



Tabel di bawah ini menyajikan penawaran produk Perseroan berdasarkan segmen pelanggan dan pesaing utama.

Segmen	Proyek	Internasional	Domestik	Internet	Pusat Data	VSAT	Lain-lain
<i>Telco</i>	Jaringan Tulang Punggung Internasional	√		√			
	Jaringan Tulang Punggung Domestik		√				
	Antar kota dan Dalam kota		√				

Segmen	Proyek	Internasional	Domestik	Internet	Pusat Data	VSAT	Lain-lain
	Internet			√			
	Pusat Data				√		
	<i>BTS Backhaul</i>		√				
<i>Wholesale</i>	IPLC	√					
	IP Transit	√					
	DLC		√				
	Antar kota dan Dalam kota		√				
	Internet			√			
	Pusat Data				√		
<i>Enterprise</i>	Internet			√			
	Pusat Data				√		
	Layanan Awan				√		
	Solusi (Layanan Bernilai Tambah)			√			
<i>Retail</i>	Internet			√			
	Telepon			√			
	TV Kabel			√			
	Wifi			√			
Lain-lain	Proyek Pelanggan (termasuk Konstruksi dan Layanan Serat Optik)						√
	VSAT					√	
	Proyek Palapa Ring						√

Di bawah ini adalah kontribusi pendapatan historis dari setiap segmen pelanggan Perseroan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Telco	1.199.223.356.053	1.246.009.460.827	614.159.417.085
<i>Wholesale</i>	454.663.286.407	346.676.601.422	475.031.320.374
<i>Retail &amp; Enterprise</i>	661.720.025.988	472.703.890.019	343.798.624.369
Lainnya	1.864.466.397.707	1.700.298.182.526	2.629.392.189.923
<b>Total</b>	<b>4.180.073.066.155</b>	<b>3.765.688.134.794</b>	<b>4.062.381.551.751</b>

### **Segmen Telco**

Segmen *Telco* Perseroan terdiri dari layanan jalur sewaan (leased line) untuk mengakomodasi konektivitas domestik dan internasional, yang menyediakan solusi konektivitas jaringan dan serat optik kepada operator telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Per 31 Desember 2021, Segmen *Telco* melayani 26 operator telekomunikasi. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) per bulan (mengacu kepada pengakhiran oleh pelanggan pada bulan yang bersangkutan dibagi dengan total jumlah pelanggan) dalam Segmen *Telco* adalah 0.0%. Segmen *Telco* mewakili 29,0% dari pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Produk-produk utama Perseroan dalam Segmen Telco meliputi Sewa Sirkuit Khusus Internasional (“IPLC”), produk Sewa Sirkuit Khusus Domestik (“DLC”), produk Jaringan Privat Virtual Protokol Internet (“MPLS”), layanan interkoneksi, layanan pusat data, layanan hosting dan Awan privat dan publik, layanan infrastruktur, termasuk penyewaan saluran dan kolokasi menara.

### Informasi Segmen Telco

(dalam Rupiah)

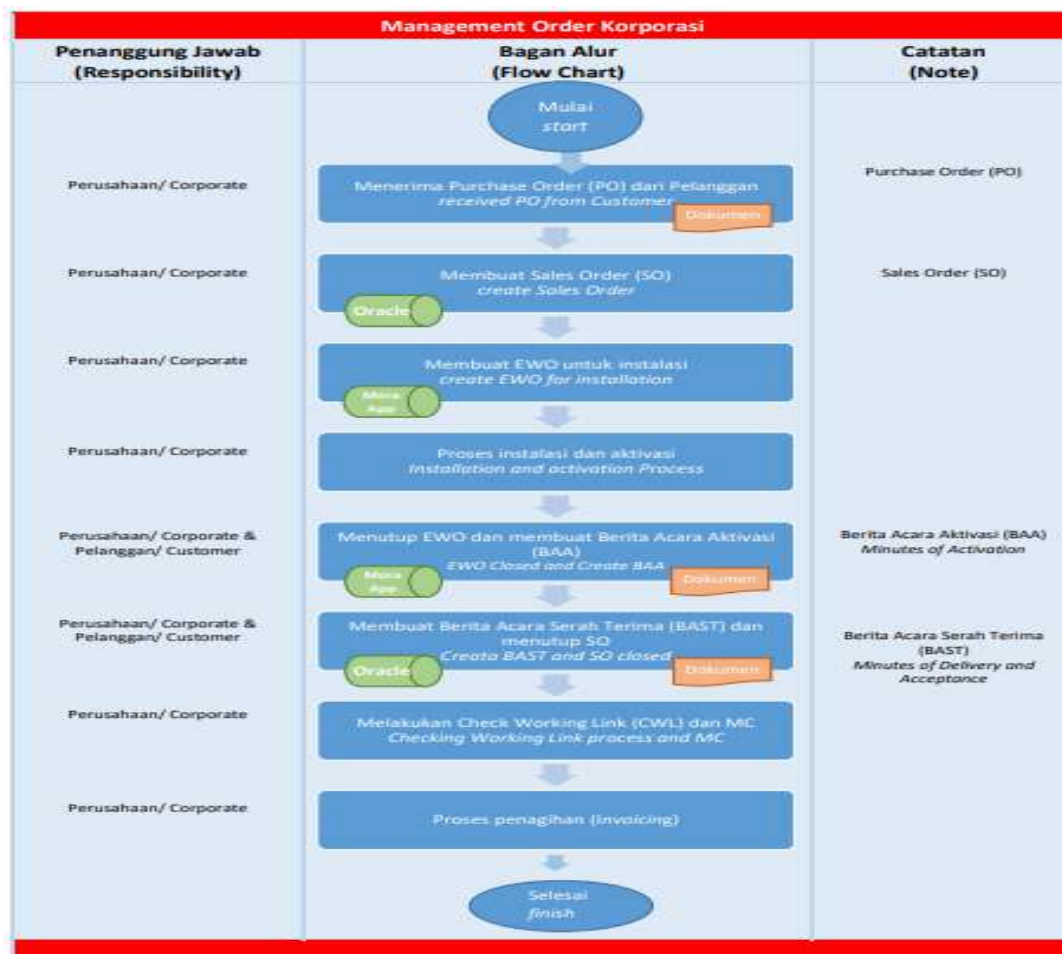
Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Pendapatan usaha Segmen	1.199.223.356.053	1.246.009.460.827	614.159.417.085
Beban Segmen	(729.687.491.170)	(771.362.958.977)	(385.032.787.272)
<b>Laba Kotor</b>	<b>469.535.864.883</b>	<b>474.646.501.850</b>	<b>229.126.629.813</b>

### Segmen Wholesale

Segmen Wholesale Perseroan menyediakan layanan internet (termasuk jalur sewa dan koneksi kapasitas, baik domestik maupun internasional) kepada operator telekomunikasi, terutama melalui skema penjualan *Business-to-Business* (“B2B”). Per 31 Desember 2021, Segmen *Wholesale* melayani 227 penjual grosir. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) per bulan dalam Segmen *Wholesale* adalah 0,32%. Segmen *Wholesale* mewakili 11,0% dari pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Produk dan layanan utama Perseroan dalam Segmen *Wholesale* meliputi *IP transit*, jaringan tulang punggung, produk IPLC, produk DLC, produk MPLS, layanan interkoneksi, layanan internet, layanan pusat data, layanan *hosting* dan awan swasta dan publik, layanan infrastruktur, termasuk penyewaan saluran dan kolokasi menara.

Alur skema kerja pada segmen *Telco* dan *Wholesale* adalah sebagai berikut:



Uraian:

1. Perseroan menerima *Purchase Order*/ Surat Perintah Kerja dari Pelanggan yang ingin berlangganan layanan.
2. Perseroan membuat *Sales Order* pada sistem.
3. Perseroan membuat *Execution Work Order* untuk proses instalasi.
4. Perseroan akan melakukan proses instalasi dan aktivasi pada pelanggan.
5. Perseroan menutup *Execution Work Order* dan membuat Berita Acara Aktivasi (BAA).
6. Perseroan membuat Berita Acara Serah terima (BAST) dan menutup *Sales order*.
7. Perseroan melakukan *check working Link* dan MC.
8. Perseroan membuat *invoice* untuk melakukan penagihan ke Pelanggan.
9. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan *invoice* yang diterima.

#### Informasi Segmen *Wholesale*

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Pendapatan usaha Segmen	454.663.286.407	346.676.601.422	475.031.320.374
Beban Segmen	(185.510.656.121)	(117.194.827.177)	(175.176.282.398)
<b>Laba Kotor</b>	<b>269.152.630.286</b>	<b>229.481.774.245</b>	<b>299.855.037.976</b>

## **Segmen Enterprise**

Segmen *Enterprise* adalah segmen untuk pasar perusahaan swasta, pemerintahan non-telekomunikasi / *provider*. Produk atau jasa yang ditawarkan adalah *Internet Dedicated, internet broadband Oxygen.id Soho, Datacenter, leased line domestic* (Metro). Pelanggan dari segmen Enterprise adalah termasuk institusi, sebagai berikut:

- 1) Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk Segmen *Government* dan *Oil Company* untuk pelanggan kategori Pemerintahan Pusat/Daerah, Lembaga Negara, BUMN, BUMD dan *Oil Company* (swasta dan Negeri). Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter (Collocation dan DRC)*.
- 2) Segmen *Education*: Segmen pelanggan khusus untuk sektor pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, akademi universitas. Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter, Wifi*.
- 3) Segmen *Media, Medical* dan *Hospitality*: Pelanggan perusahaan yang bergerak di bidang media, rumah sakit dan perhotelan. Produknya adalah *Internet dedicated, Leased line/Metro, Datacenter, Wifi*.
- 4) Segmen SME (*Small Medium Enterprise*): Pelanggan perusahaan yang mempunyai kategori bidang usahanya ukuran kecil, UKM. Produknya adalah *Oxygen.id Soho Internet Broadband dan VPS/Cloud Computing*.
- 5) Segmen HRB (*High Rise Building*): Pelanggan perusahaan yang berada di area gedung bertingkat. Produknya adalah *Oxygen.id Soho, Internet dedicated, Datacenter, Leased Line/Metro*.

Segmen Enterprise melayani badan usaha milik negara dan swasta selain operator telekomunikasi dan menyediakan solusi *Fiber-to-the-X* ("FTTX") menyeluruh, termasuk *Fiber-to-the-Building* ("FTTB") kepada badan usaha dan perusahaan menengah dan besar yang bergerak di bidang pendidikan, migas, multimedia, dan pariwisata & perhotelan serta lembaga negara. Per 31 Desember 2021, Segmen Enterprise menyediakan koneksi di 216 gedung dan kepada 6.700 pelanggan. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) per bulan dalam Segmen *Enterprise* adalah 0,04%

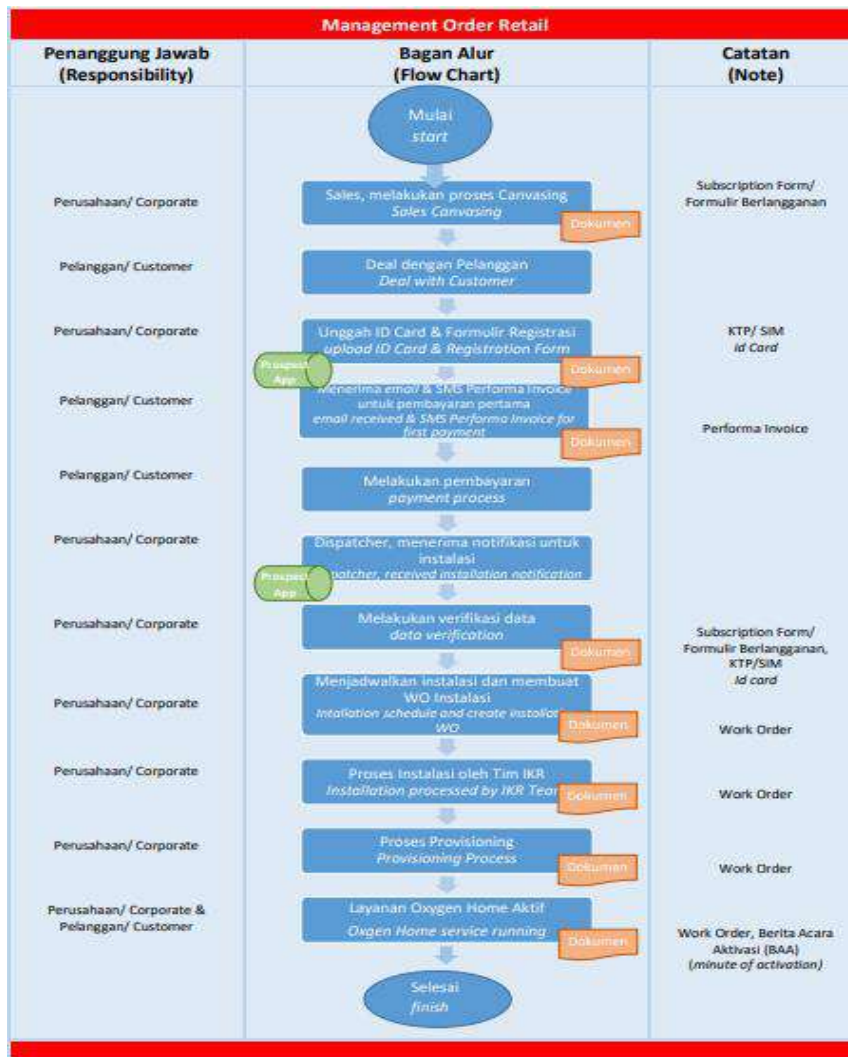
Produk utama Perseroan dalam Segmen Enterprise meliputi layanan internet terdedikasi, internet pita lebar Oxygen.id Soho, layanan pusat data, dan layanan jalur sewa domestik (Metro).

## **Segmen Retail**

Segmen Retail Perseroan menyediakan solusi *Fiber-to-the-Home* ("FTTH") menyeluruh secara langsung ke pelanggan ritel dalam pasar residensial dan apartemen. Per 31 Desember 2021, Segmen *Retail* menyediakan koneksi di 413.025 gedung dan kepada 111.968 pelanggan. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata tingkat perpindahan pelanggan (*churn rate*) per bulan dalam Segmen *Retail* adalah 0,52%.

Produk utama Perseroan dalam Segmen Retail meliputi layanan triple play, layanan internet, telefoni, dan TV kabel di bawah merek dagang Oxygen.id. Layanan Oxygen.id mencakup penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga bersaing. Total jumlah pelanggan Segmen *Retail* Perseroan pada tahun 2019, 2020, dan 2021, secara berturut-turut mencapai 44.858., 72.619, dan 111.968.

Alur skema kerja pada segmen *retail* adalah sebagai berikut:



Uraian :

1. Perseroan melakukan proses penjualan ke calon pelanggan *retail* (perumahan).
2. Calon Pelanggan yang ingin berlangganan akan mengisi data pribadi pada Formulir Berlangganan.
3. Perseroan melakukan penginputan data pelanggan tersebut pada sistem.
4. Perseroan akan melakukan proses verifikasi data dan proses penjadwalan untuk instalasi.
5. Perseroan melakukan proses instalasi dan aktivasi di rumah pelanggan.
6. Pelanggan akan menerima tagihan setelah proses aktivasi dilakukan.
7. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang diterima.

### Informasi Segmen Retail & Enterprise

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Pendapatan usaha Segmen	661.720.025.988	472.703.890.019	343.798.624.369
Beban Segmen	(233.623.049.529)	(146.185.955.846)	(142.305.407.259)
<b>Laba Kotor</b>	<b>428.096.976.459</b>	<b>326.517.934.173</b>	<b>201.493.217.110</b>

## Segmen lainnya

Segmen lainnya merupakan pendapatan konstruksi dan pendapatan keuangan dari konsesi jasa atas entitas anak, PT. Palapa Ring Barat (PRB) dan PT. Telematika Timur Indonesia (PTT) sesuai dengan implementasi ISAK 16 mengenai “Konsesi Jasa”. Proyek palapa ring paket barat dan timur merupakan operasi kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) yang bertujuan untuk membangun dan mengelola jaringan tulang punggung serat optic di wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, segmen lainnya juga merupakan pendapatan kontraktor entitas anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk pekerjaan pembangunan jaringan fiber optic.

## Informasi Segmen Lainnya

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Pendapatan usaha Segmen	1.864.466.397.707	1.700.298.182.526	2.629.392.189.923
Beban Segmen	(493.961.589.655)	(253.777.039.590)	(1.428.701.917.912)
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.370.504.808.052</b>	<b>1.446.521.142.936</b>	<b>1.200.690.272.011</b>

## D. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki dan menguasai, serta telah melakukan pendaftaran sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual dengan rincian sebagai berikut:

### (i) Merek

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
1.	IDM000416859, tanggal 31 Oktober 2021	Cepat Net Simply Connect	42	31 Oktober 2031
2.	IDM000416858, tanggal 31 Oktober 2021	Cepat Net Simply Connect	38	31 Oktober 2031
3.	IDM000588458, tanggal 9 Maret 2015	Movic Video Conference	38	tanggal 9 Maret 2025
4.	IDM000581813, tanggal 9 Maret 2015	Mora Hosting	38	9 Maret 2024
5.	IDM000416082, tanggal 31 Oktober 2021	Cepat Net Simply Connect	09	31 Oktober 2031
6.	IDM000676851 tanggal 16 November 2015	JIBA	38	16 November 2025
7.	IDM000677243 tanggal 16 November 2015	BDM	38	16 November 2025
8.	IDM000574414 tanggal 27 November 2014	Core Indonesia	38	27 November 2024
9.	IDM000676848 tanggal 16 November 2015	Mic – 1	42	16 November 2025
10.	IDM000676853 tanggal 16 November 2015	B3JS	38	16 November 2025
11.	IDM000676857 tanggal 16 November 2015	MIC-1	38	16 November 2025

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran		Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
12.	IDM000676852 tanggal 16 November 2015	16	JIBA	42	16 November 2025
13.	IDM000556626 tanggal 24 November 2014	24	MIC-1	09	24 November 2024
14.	IDM000519128 tanggal 11 Desember 2013	11	NDC Nusantara Data Center	42	11 Desember 2023
15.	IDM000454484 tanggal 31 Oktober 2011	31	Moratelindo Creative Telecom Innovation	38	31 Oktober 2031
16.	IDM000519129 tanggal 11 Desember 2013	11	Moratelindo Broadband Company	38	11 Desember 2023
17.	IDM000520455 tanggal 11 Desember 2013	11	Moratelindo Broadband Company	09	11 Desember 2023
18.	IDM000652235 tanggal 21 Oktober 2016	21	Oxygen.id	41	21 Oktober 2026
19.	IDM000609587 tanggal 27 November 2014	27	Oxygen.id	38	27 November 2024
20.	IDM000588411 tanggal 9 Maret 2015	9	Oxygen.id	42	9 Maret 2025
21.	IDM0000520382 tanggal 11 Desember 2013	11	NDC Nusantara Data Center	38	11 Desember 2023
22.	IDM000520631 tanggal 11 Desember 2013	11	NDC Nusantara Data Center	09	11 Desember 2023
23.	IDM000519130 tanggal 11 Desember 2013	11	Batam Techno Park	38	11 Desember 2023
24.	IDM000676538 tanggal 16 November 2015	16	B3J S	42	16 November 2025
25.	IDM000676856 tanggal 16 November 2015	16	Super Metro	42	16 November 2025
26.	IDM000661511 tanggal 16 November 2015	16	Super Metro	09	16 November 2025
27.	IDM000556940 tanggal 27 November 2014	27	B3JS	09	27 November 2024
28.	IDM000676855 tanggal 16 November 2015	16	BDM	42	16 November 2025
29.	IDM000546516 tanggal 27 November 2014	27	BDM	09	27 November 2024
30.	IDM000519131 tanggal 11 Desember 2013	11	Batam Techno Park	41	11 Desember 2023
31.	IDM000520456 tanggal 11 Desember 2013	11	Batam Techno Park	09	11 Desember 2023
32.	IDM000555069 tanggal 11 Desember 2013	11	Moratelindo Broadband Company	42	11 Desember 2023
33.	IDM000558384 tanggal 11 Desember 2013	11	Batam Techno Park	42	11 Desember 2023

(ii) Hak Cipta

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Jangka Waktu
1.	EC00202152285, tanggal 4 Oktober 2021	KARAKTER OXYGEN.ID HOME	Seni Rupa	4 Oktober 2071

E. TRANSAKSI AFILIASI

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi). Sifat hubungan dan sifat transaksi Perseroan dengan pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pihak Terafiliasi	Keterangan
1	PT Pakkodian	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
2	PT Gema Lintas Benua	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk.
3	PT Candrakarya Multikreasi	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk.
4	PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	Memiliki sebagian pemegang saham dengan Entitas Induk.
5	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
6	PT Smart Telecom	Pemegang saham Perusahaan.
7	PT Smartfren Telecom Tbk	Pemegang saham PT Smart Telecom.
8	PT Ketrosden Triasmitra	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
9	PT Triasmitra Multiniaga International	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.
10	PT Jejaring Mitra Persada	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk.

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Rincian Penjualan		
	2021	2020	2019
PT Smart Telecom	520.626.174.332	-	-
PT Smartfren Telecom Tbk	84.764.749.748	-	-
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	9.870.296.173	3.671.962.448	3.189.317.677
PT Jejaring Mitra Persada	6.012.958.000	-	-
PT Triasmitra Multiniaga International	5.532.897.755	-	-
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	2.384.926.829	1.208.468.834	1.170.880.406
PT Bali Towerindo Sentra Tbk	-	827.069.586	1.183.297.780
PT Graha Telekomunikasi Indonesia	-	1.366.584.984	1.296.305.646
PT Intercontinental Network Communication	-	-	388.018.180
<b>Jumlah</b>	<b>629.192.002.837</b>	<b>7.074.085.852</b>	<b>7.227.819.689</b>
	Rincian Pembelian		



Pihak Terafiliasi	Rincian Penjualan		
	2021	2020	2019
Jumlah	6.900.000	3.774.000	34.907.117
	Utang kepada Pemegang Saham		
PT Candrakarya Multikreasi	-	844.408.372.000	844.408.372.000

#### D. PERSAINGAN

Secara umum, berbagai perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan jasa yang dimilikinya. Saat ini, jaringan *backbone* telekomunikasi merupakan media yang digunakan berbagai perusahaan sebagai teknologi terbaru untuk menyalurkan jasa yang berkaitan dalam industri telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Perseroan memiliki infrastruktur utama industri telekomunikasi berupa *backbone* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan dengan kapasitas 21.000G dengan total panjang jaringan yang dimiliki Perseroan adalah sepanjang 51.749 km (sumber : Analysis Masson - *Independent telecoms market study, 2022*).

Industri telekomunikasi di Asia Tenggara sangat kompetitif. Perseroan menghadapi persaingan di setiap lini bisnis. Pesaing di Segmen Telco Perseroan termasuk PT Telekomunikasi Indonesia, XL, PT Icon Plus dan Indosat. Pesaing di Segmen *Wholesale* kami termasuk LinkNet (First Media), MNC Play Media, Lintas Arta, MyRepublic dan Icon Plus. Di Segmen *Enterprise* dan Segmen *Retail*, pesaing Perseroan meliputi LinkNet (First Media), Biznet, Lintas Arta, MNC Play Media, dan MyRepublic.

Dalam industri Perseroan, Persaingan terjadi dalam hal:

- Keandalan penyediaan layanan;
- Harga;
- Kualitas pengalaman pelanggan;
- Kemampuan kita untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan basis pelanggan kita;
- Kualitas dan pemilihan produk; dan
- Pengakuan dan reputasi merek.

Perseroan adalah perusahaan dengan *core business* pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Indonesia. Berikut merupakan informasi terkait posisi Perseroan di industri telekomunikasi Indonesia berdasarkan Analysis Masson pada tahun 2022:

Penyedia <i>Backhaul wholesale</i>	Panjang Jaringan (km)	Fokus Geografis	Jumlah Pelanggan	Deskripsi
Moratelindo	48.515 (2020) 51.749 (2021)	Infrastruktur yang kuat di Indonesia Timur (Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku dan Papua) dan Indonesia Barat (Jawa dan Sumatera)	Tidak disebutkan	Panjang jaringan terdiri dari 25.951 km (2020); 27.561 km (2021) <i>backbone</i> dan 22.565 km (2020); 24.188km (2021) <i>last mile access</i> Cakupan Moratelindo tersebar luas di seluruh negeri. Di luar Jawa (misalnya, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Papua), cakupannya lebih baik dibandingkan

Penyedia Backhaul wholesale	Panjang Jaringan (km)	Fokus Geografis	Jumlah Pelanggan	Deskripsi
				dengan yang lain kecuali Telkom kapasitas 18.360 G (2020) dan kapasitas 21.000 G 2021
Telkom Indonesia	>200.000 (2020)	Nasional	Tidak disebutkan	Wholesale Telkom berfokus pada backbone network yang dimilikinya. Tidak menyediakan retail akses. Akses jaringan hanya untuk penggunaan sendiri.
ICON+	~90.000 (2020)	Infrastruktur utama di Indonesia Barat (Jawa, Sumatera) namun beberapa infrastruktur di Sulawesi dan Kalimantan	>3.000	Cakupan jaringan terutama di Jawa dan Sumatera meskipun dapat memperluas dan menawarkan cakupan yang luas. Kemampuannya untuk mempergunakan infrastruktur dan RoW PLN membuatnya menarik bagi MNO karena menyelesaikan permasalahan dalam mendapatkan izin
Protelindo	~75.000 (2020)	Infrastruktur utama di Indonesia Barat (Jawa, Sumatera) namun terbatas di Kalimantan dan Sulawesi	>1.600	Jaringan mencakup backbone Jawa-Bali bersama dengan fiber >5.000 km di Jakarta dan Surabaya. Bisnis STP yang baru saja diakuisisi membawa jaringan fiber yang meliputi: >1.600 km di Jabodetabek, 558 km di Bandung, 102 km di Medan dan 68 km di Surabaya. Juga memiliki >600 km jaringan serat optik bawah laut
Fiberstar	~30.000 (2020)	Infrastruktur utama di Jawa dan Bali namun terbatas di sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi	Tidak disebutkan	Panjang jaringan sebesar ~60% backbone nasional dan ~40% access network.
IBS Towers	~11.000 (2020)	Infrastruktur utama di Jawa dan Bali	Tidak disebutkan	Cakupan jaringan mencakup kota-kota

Penyedia Backhaul wholesale	Panjang Jaringan (km)	Fokus Geografis	Jumlah Pelanggan	Deskripsi
		namun terbatas di sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi		utama seperti Jakarta, Medan dan Makassar
Alita	~7.759 (2020)	Infrastruktur utama di Jawa namun terbatas di Sulawesi	Kemungkinan <100	Cakupan jaringan terutama di Jawa Timur termasuk Malang dan Surabaya
Sokka Tama Fiber	N/A	Infrastruktur utama di Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara Timur dan Barat) namun terbatas di Jawa dan Sulawesi	<100	Berfokus kepada wilayah Lombok di mana memiliki hubungan dengan lokal yang kuat

## E. KEKUATAN PERSEROAN

1. Salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia, beroperasi dalam salah satu perekonomian dengan pertumbuhan terpesat dengan pasar telekomunikasi yang menarik.

Menurut Analysys Mason, Perseroan merupakan salah satu dari tiga penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta teratas di Indonesia dari segi total panjang dan kapasitas jaringan tulang punggung, dengan panjang jaringan sekitar 51.749 km dan kapasitas 21.000G per 31 Desember 2021. Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk menangkap peluang pertumbuhan yang diperkirakan dalam pasar internet Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa terdapat peluang digital signifikan di Indonesia, salah satu perekonomian dengan pertumbuhan terpesat di Asia Tenggara dengan PDB nominal yang diperkirakan bertumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 8,5% dari 2021 hingga 2026, dibandingkan dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan PDB Nominal wilayah Asia Tenggara sebesar 7,0% dalam periode yang sama. Perseroan juga mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki profil demografis yang menarik, dengan populasi yang besar sejumlah 274,9 juta penduduk pada tahun 2020, yang menghabiskan rata-rata delapan jam dan 52 menit online. Populasi Indonesia memiliki usia median 31 tahun dan diperkirakan akan semakin sejahtera, dengan pendapatan siap pakai per rumah tangga median yang diperkirakan akan meningkat sebesar 2,9% dari 2021 hingga 2026. Perseroan berpendapat kenaikan dalam pendapatan siap pakai diharapkan akan mendorong pengeluaran anggaran rumah tangga untuk layanan telekomunikasi, termasuk layanan pita lebar (*broadband*).

Sebagai respons terhadap ekspansi ekonomi digital di Indonesia, Perseroan meyakini terdapat ruang yang signifikan bagi perkembangan lebih lanjut dalam infrastruktur digital Indonesia. Pasar layanan telekomunikasi wholesale Indonesia, terutama terdiri dari infrastruktur serat optik dan saluran, diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan pesat dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 16,6% dari 2021 hingga 2026, dan diperkirakan akan mencapai Rp23,0 triliun pada tahun 2026, menurut Perseroan. Pasar layanan telekomunikasi retail, yang terutama terdiri dari layanan Fiber-to-the-X (“FTTX”) dan pusat data, diperkirakan akan mencapai Rp92,6 triliun pada tahun 2026, menggambarkan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 10,5% dari tahun 2021 hingga 2026, menurut Analysys Mason.

Menurut Analysys Mason, Indonesia memiliki salah satu tingkat penetrasi pita lebar rumah tangga terendah di antara pasar infrastruktur telekomunikasi di Asia Tenggara, yang diperkirakan akan meningkat hingga 28,0% pada tahun 2026, terutama didorong oleh kenaikan pengadopsian layanan telekomunikasi dan data. Selain itu, pandemi COVID-19 juga merupakan katalis dalam mempercepat konsumsi layanan digital (termasuk e-niaga, transportasi dan makanan, media dan jasa keuangan daring), dengan sekitar 37,0% dari seluruh konsumen layanan digital baru menggunakan layanan tersebut sejak 2020.

Dengan kebangkitan ekonomi digital global, Indonesia menyambut baik transformasi digital. Lalu lintas data bertumbuh dengan mapan, didorong oleh permintaan akan konten video, penggunaan media sosial, e-niaga, dan gaming. Perseroan menyatakan bahwa pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat ke delapan untuk waktu yang dihabiskan di Internet per hari (delapan jam dan 52 menit). Rata-rata penggunaan data bergerak per koneksi diperkirakan akan tetap bertumbuh kuat dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 21,0% dari tahun 2021 hingga 2026, dan diperkirakan akan mencapai 22GB/bulan pada tahun 2026. Perseroan juga mengindikasikan bahwa rata-rata penggunaan data tetap per koneksi bertumbuh dari 5,8GB/bulan pada 2016 menjadi 25,2GB/bulan pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat hingga 110GB/bulan pada 2026. Mempertimbangkan latar belakang ini, infrastruktur serat optik dan saluran memegang peranan kritis untuk mengakomodasi konsumsi data yang semakin meningkat di Indonesia. Secara khusus, Perseroan memperkirakan akan melihat permintaan tinggi yang terus berlanjut untuk serat optik. Hal ini dapat mendorong fiberisasi situs jaringan mengingat Perseroan memperkirakan kapabilitas pengalir jaringan (backhaul) akan membutuhkan peningkatan agar mampu mengakomodasi kenaikan lalu lintas data dalam jangka panjang.

Dari tahun 2016 hingga 2020, permintaan data global telah meningkat secara signifikan. Rata-rata lalu lintas internet per bulan per koneksi pita lebar di Indonesia meningkat hampir tiga kali lipat dan diperkirakan akan terus bertumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 23,0% hingga 2026. Kenaikan permintaan data tersebut mendorong infrastruktur serat optik semakin dekat dengan pengguna akhir. Teknologi serat optik belakangan ini semakin banyak digunakan untuk jaringan akses residensial (contohnya, FTTX), dan pasar pita lebar tetap residensial dan perusahaan Indonesia mengalami pertumbuhan stabil dengan prakiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan secara berturut-turut sebesar 7,0% dan 13,0% dari 2020 hingga 2026, terlepas dari sifat Indonesia sebagai negara kepulauan yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam penggelaran jaringan tetap. Ekonomi internet yang besar dan menggairahkan ini juga mendorong pertumbuhan pasar pusat data Indonesia. Kapasitas pusat data Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 74 MW pada tahun 2020 menjadi 328 MW pada tahun 2026, sebagai salah satu pasar terbesar dengan pertumbuhan paling pesat di antara negara-negara Asia Tenggara. Pasar pusat data diperkirakan akan meningkat dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 32,0% dan diperkirakan akan bertumbuh dari AS\$150,0 juta pada tahun 2020 menjadi AS\$780,0 juta pada tahun 2026, didorong oleh pertumbuhan ekonomi internet yang kuat berkat kenaikan permintaan dari ekosistem *start-up* Indonesia yang mapan dan cerah dan pertumbuhan berbagai industri (seperti lembaga keuangan, TMT, badan usaha dan pemerintah) yang terus berlangsung.

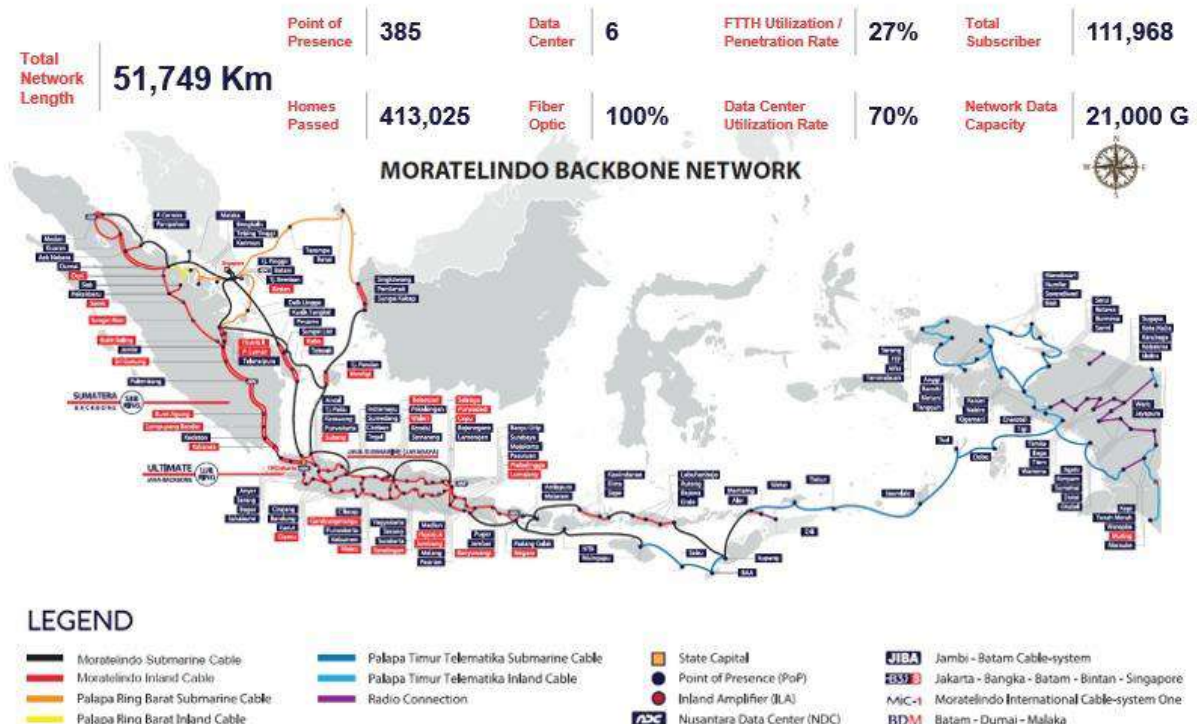
Layanan Awan (*Cloud*) semakin menjadi bagian integral dari portofolio produk badan usaha, dan penyedia konektivitas berada di posisi yang tepat untuk menangkap permintaan yang semakin berkembang tersebut. Secara rata-rata, 65,0% bisnis yang disurvei menyatakan akan mempertimbangkan membeli layanan Awan dari operator jaringan tetap mereka. Hal ini menggambarkan adanya peluang yang berarti dalam bidang ini bagi operator konektivitas enterprise. Dengan pola konsumsi yang berubah dengan cepat, baik rumah tangga maupun bisnis semakin memandang jaringan pita lebar tetap sebagai kebutuhan dengan pertimbangan kecepatannya yang lebih tinggi dibandingkan jaringan seluler. Pada bulan Desember 2021, kecepatan unduh median

jaringan seluler di Indonesia adalah 15,4 MB per detik, sementara kecepatan unduh median koneksi pita lebar tetap mencapai 20,2 MB per detik, menurut speedtest.net. Dinamika permintaan-penawaran juga meningkatkan permintaan tak terlayani yang signifikan, yang berpotensi menguntungkan pertumbuhan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan meyakini bahwa perubahan peraturan yang mengizinkan investasi asing dalam industri telekomunikasi Indonesia dapat mempercepat penggelaran jaringan telekomunikasi.

## 2. Pemain inti dalam masa depan digital Indonesia, dengan rekam jejak terbukti dalam mengembangkan infrastruktur digital Indonesia.

Perseroan merupakan salah satu dari tiga penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta teratas di Indonesia dari segi total panjang dan kapasitas jaringan tulang punggung. Sebagai pemain inti dalam masa depan digital Indonesia, Perseroan mengoperasikan 385 titik kehadiran (*point of presence*, "POP") yang mencakup tujuh dari sembilan wilayah utama di Indonesia per 31 Desember 2021. Perseroan juga mencapai standar perjanjian jaminan tingkat layanan yang tinggi dengan SLA (*uptime*) 99,8%, lebih tinggi dibandingkan standar SLA yang diatur dalam kontrak komersial Perseroan, yaitu 99,5% sebagaimana per 31 Desember, 2021.

Menurut Analysys Mason, Perseroan adalah salah satu jaringan terbesar entitas non-BUMN di Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, total panjang jaringan digital Perseroan berkembang dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 15,0%, mendukung pertumbuhan signifikan dalam kapasitas data Perseroan, yang bertumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan 100,0% dalam periode yang sama. Dengan memanfaatkan cakupan infrastruktur tulang punggung Perseroan yang efektif, Perseroan secara strategis merintis cakupan jaringan komprehensif di Indonesia Timur, yang secara historis merupakan pasar yang kurang terlayani oleh pemain pasar yang ada, dengan Telkom sebagai satu-satunya penyedia jaringan besar lainnya yang aktif di wilayah tersebut. Menurut Submarine Cable Map, Perseroan memiliki satu dari delapan kabel bawah laut internasional yang ada, dengan titik pendaratan (*landing point*) di Indonesia. Perseroan meyakini bahwa lisensi dan rangkaian penawaran layanan Perseroan yang komprehensif menempatkan Perseroan pada posisi yang tepat untuk menangkap peluang yang tersedia dalam bidang infrastruktur telekomunikasi digital.



Informasi sebagaimana pada 31 Desember 2021.

Perseroan memiliki keahlian selama lebih dari dua dekade dalam mengembangkan infrastruktur digital Indonesia. Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2000, Perseroan telah mengembangkan panjang jaringannya secara signifikan dan memiliki rekam jejak sebagai perintis pengembangan dan inovasi infrastruktur digital Indonesia. Dalam dekade terakhir, Perseroan telah meningkatkan panjang jaringannya secara signifikan, dari 6.020 km (per 31 Desember 2010) menjadi 51.749 km (per 31 Desember 2021). Berkat rekam jejak Perseroan yang telah terbukti sebagaimana terlihat dalam keberhasilan Perseroan melaksanakan proyek di wilayah geografis yang menantang, Perseroan dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan proyek strategis utama, yang berperan penting untuk mengembangkan basis pelanggan Perseroan lebih lanjut serta meningkatkan pangsa pasar Perseroan, memberikan Perseroan keunggulan tersendiri dibandingkan para pesaingnya.

Sebagai contoh, Perseroan dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dua proyek infrastruktur strategis nasional pada tahun 2016, yaitu Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur. Keberhasilan penyelesaian proyek-proyek tersebut menampilkan kemampuan Perseroan untuk menggelar dan mengoperasikan jaringan serat optik darat dan bawah laut di Indonesia, serta menara telekomunikasi dan koneksi radio. Di samping itu, Perseroan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik negara untuk mengembangkan infrastruktur tiang dan saluran bersama di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 di seluruh Indonesia. Melalui kerja sama tersebut, Perseroan mampu memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar dengan menyediakan kesiapan 5G, memperbaharui infrastruktur untuk mendukung digitalisasi, meningkatkan kinerja jaringan dan waktu penyampaian produk dan layanan ke pasar (time to market) Perseroan serta berkontribusi dalam pengembangan “Kota Pintar”. Kota Pintar dilandasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan efisiensi operasional, membagikan informasi secara efisien kepada masyarakat dan menyediakan layanan pemerintah berkualitas lebih baik. Saluran dan tiang bersama memegang peranan kunci bagi Kota Pintar, karena Kota Pintar mengandalkan infrastruktur tersebut untuk mendukung pengumpulan dan transmisi informasi secara efisien.

### **3. Penawaran layanan yang komprehensif, menggabungkan teknologi canggih dan terdepan untuk mencapai keandalan dan kinerja tinggi.**

Perseroan menawarkan serangkaian luas produk dan layanan, termasuk konektivitas, pusat data, wholesale, enterprise/retail, serta konsesi, melayani seluruh segmen utama pasar telekomunikasi di Indonesia.

Dengan memanfaatkan jaringan tulang punggung domestik Perseroan yang ekstensif, Perseroan dalam waktu singkat menggelar jaringan *Fiber to the Home* (“FTTH”) di berbagai kota utama di Indonesia untuk meningkatkan penawaran *retail* dan *enterprise* Perseroan lebih lanjut dan meraih pangsa pasar di pasar layanan pita lebar residensial dan *enterprise*. Jaringan Perseroan merupakan salah satu jaringan paling ekstensif di antara entitas non-BUMN di Indonesia dan Perseroan menggunakan teknologi terkini. Per 31 Desember 2021, Perseroan mengoperasikan sekitar 413.000 *home pass*, yang mewakili 27,0% dari total pelanggan Perseroan.

Salah satu penawaran layanan Perseroan, Oxygen.id, merupakan merek lokal terkemuka dengan basis pelanggan retail setia yang kuat, sebagaimana dicerminkan dalam rata-rata churn rate retail per bulan yang rendah sebesar 0,6% selama periode 2019 hingga 2021 dalam Segmen Retail. Perseroan meyakini hal ini diraih berkat penyediaan koneksi yang lebih cepat, latensi yang lebih rendah, dan jaringan yang lebih andal. Berdasarkan survei yang dilakukan *Steam Power* dan diterbitkan di detik.com pada tanggal 4 Juli 2020, Perseroan merupakan penyedia layanan pita lebar tetap independen tercepat di Indonesia dengan rata-rata laju unduh 40,1 Mbps. Untuk Segmen *Retail &*

*Enterprise* Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan telah menggelar jaringan POP di sebagian besar kota besar di Indonesia.

Perseroan telah mendirikan enam pusat data di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 di Indonesia dan juga terhubung dengan berbagai pusat data di Indonesia serta sentral (*exchange*) lokal. Perseroan meyakini bahwa lokasi strategis dan solusi pusat data Perseroan mampu mendukung Perseroan dalam menyampaikan layanan pusat data berkualitas tinggi. Pusat data Perseroan melengkapi jaringan tulang punggung dan FTTX, dan 70% dari rak yang terpasang di pusat data Perseroan saat ini telah terpakai sebagaimana per 31 Desember 2021, dengan tanpa *downtime*.

Berkat penawaran produk yang komprehensif dan pengalaman layanan berkualitas, Perseroan mampu mencapai standar SLA yang tinggi, dengan 99,8% waktu berfungsi selama tahun 2021. Dengan demikian, Perseroan menikmati tingkat perpanjangan yang tinggi dan tingkat churn yang rendah di seluruh lini bisnis, *Telco, Wholesale, Enterprise & Retail*. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, rata-rata *churn rate* per bulan Perseroan untuk Segmen *Telco*, Segmen *Wholesale* dan Segmen *Retail & Enterprise* secara berturut-turut adalah 0,00%, 0,32% dan 0,28% (0,52% untuk Segmen *Retail* dan 0,04% untuk Segmen *Enterprise*).

#### **4. Basis klien multinasional terkemuka yang terdiversifikasi, mulai dari operator telekomunikasi hingga penyedia layanan media *Over-the-Top*.**

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki basis klien badan usaha multinasional terkemuka yang terdiversifikasi, dalam berbagai lini vertikal, termasuk operator serat optik dan seluler regional terkemuka, perusahaan multinasional dan penyedia layanan media *Over-the-Top* (“*OTT*”), berkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki lebih dari 110.000 pelanggan secara keseluruhan, termasuk lebih dari 30 klien perusahaan multinasional terkemuka. Secara rata-rata, Operator Jaringan Seluler menyumbangkan 25,0% bagi total pendapatan Perseroan selama tiga tahun terakhir.

Perseroan menikmati tingkat perpanjangan yang tinggi dan tingkat churn yang rendah di seluruh Segmen *Telco*, Segmen *Wholesale*, dan Segmen *Enterprise & Retail* Perseroan. Perseroan meyakini hal ini dicapai berkat penawaran produk dan layanan yang kuat. Dalam Segmen *Telco*, Segmen *Wholesale*, dan Segmen *Retail & Enterprise*, secara berturut-turut 100,00%, 96,0%, dan 95,0% (99,0% dalam Segmen *Enterprise* dan 90,0% dalam Segmen *Retail*) dari pelanggan Perseroan (per tahun) memperpanjang kontraknya dengan jangka waktu layanan yang mencerminkan jenis produk dan segmen pelanggan. Perseroan meyakini bahwa secara historis Perseroan berfungsi sebagai penyedia layanan utama bagi mayoritas pelanggan Perseroan.

#### **5. Rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan kinerja keuangan yang kuat.**

Perseroan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan profil margin yang senantiasa meningkat, berkat keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan proyek serta kapabilitas operasional yang kuat. Laju pertumbuhan pendapatan non-konsesi mencapai 33,0% selama tahun 2019 hingga 2020. Laju pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan perusahaan sejawat yang dapat diperbandingkan dengan Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa profil keuangan Perseroan yang kuat dengan arus pendapatan yang semakin beragam tumbuh dari kontrak yang stabil dengan basis klien multinasional Perseroan yang laik kredit. Perseroan juga telah menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat neraca Perseroan, melalui peningkatan total aset dari Rp. 12.795,9 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2019 hingga Rp. 14.565,4 miliar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta menurunkan rasio utang bersih terhadap laba kotor (*Net Debt to EBITDA*) dari 4,65x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 ke 3,28x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Perseroan juga memperkuat struktur permodalan, sebagaimana tercermin dalam penurunan rasio utang terhadap modal (*debt to equity*) dari 3,24x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 ke 1,46x pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

#### **6. Tim manajemen berpengalaman yang terdiri dari ahli industri dengan beragam kompetensi.**

Perseroan memiliki tim manajemen berdedikasi dengan pengalaman pasar lokal dan wawasan industri yang ekstensif. Masing-masing anggota kunci tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman industri dalam infrastruktur digital selama rata-rata lebih dari 20 tahun. Secara keseluruhan, tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dalam berbagai bidang yang beragam, termasuk infrastruktur digital, telekomunikasi, pusat data, dan teknologi informasi, dengan demikian mendukung keunggulan kompetitif Perseroan di seluruh sisi bisnisnya. Perseroan dipandu oleh pemegang saham strategisnya, Smartfren, yang berkomitmen terhadap bisnis dan menyediakan ekosistem kemitraan potensial, termasuk memungkinkan Perseroan untuk merambah solusi akses nirkabel tetap dan layanan seluler. Perseroan meyakini bahwa potensi kesempatan pertumbuhan ini akan menyokong Perseroan dalam menawarkan layanan telekomunikasi dasar yang komprehensif kepada pelanggan Perseroan.

#### **F. PEMASARAN, PENJUALAN DAN DISTRIBUSI**

Dalam mengembangkan strategi pemasaran, Perseroan berfokus pada kedua aspek berikut ini. Pertama, meningkatkan kapasitas jaringan untuk memenuhi permintaan pelanggan sebagai bagian dari upaya pengembangan usaha, terutama dalam upaya melakukan penetrasi ke pasar ritel baru di berbagai kota. Kedua, dengan berkonsentrasi pada peningkatan penjualan. Guna meningkatkan pengenalan produk, Perseroan menjalankan kegiatan promosi di media, termasuk radio, media sosial, media daring, dan media cetak dengan tujuan menghasilkan penjualan. Perseroan juga menawarkan promosi yang melibatkan paket gabungan (*bundling*) layanan internet dan televisi kabel serta layanan tambahan lainnya. Guna meningkatkan pengenalan produk, Perseroan juga secara berkala turut berpartisipasi dalam pameran teknologi swasta maupun pemerintah. Upaya pemasaran dan penjualan Perseroan melibatkan prosedur terstandar yang diterapkan berdasarkan wilayah dan pada umumnya membutuhkan waktu satu tahun untuk mencapai titik optimal. Tim pemasaran internal Perseroan terdiri dari 196 karyawan yang berlokasi di Jakarta, Bogor, Medan, Bali, Palembang, Yogyakarta dan Riau. Perseroan juga mengalihkan sebagian upaya pemasaran, penjualan, dan distribusi.

Sistem penjualan dan distribusi Perseroan berdasarkan segmen adalah sebagai berikut:

- Segmen *Telco* dan Segmen *Wholesale*: Sistem penjualan Segmen *Telco* dan Segmen *Wholesale* terutama dilakukan melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta program penjualan berbasis B2B.
- Segmen *Enterprise*: Sistem penjualan Segmen *Enterprise* terutama dilakukan melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta promosi penjualan, termasuk pemberian diskon.
- Segmen *Retail*: Sistem penjualan Segmen Ritel berfokus pada promosi melalui iklan serta promosi penjualan, termasuk penggabungan (*bundling*) paket/produk.
- Segmen Lainnya merupakan:
  1. Pendapatan konsesi jasa atas proyek Palapa Ring dimana Perseroan hanya memberikan layanan berdasarkan kontrak dengan BAKTI selama periode kontrak kerjasama.

2. Pendapatan konstruksi dimana program penjualan berdasarkan order pembelian dari pelanggan.
3. Pendapatan usaha dari penjualan VSAT melalui program penjualan berkesinambungan yang disesuaikan secara personal serta program penjualan berbasis B2B untuk area yang tidak tercover oleh fiber optic.

Staf penjualan Perseroan untuk Segmen *Enterprise* dan Segmen *Retail* menerima insentif bulanan sebagai kompensasi. Sebagai contoh, staf penjualan Segmen *Retail* menerima skema insentif kompetitif apabila mengakuisisi pelanggan baru. Untuk Segmen *Telco* dan Segmen *Wholesale*, bonus dibayarkan per tahun kepada staf berdasarkan pencapaian target tertentu.

Dalam Segmen *Retail*, Perseroan berupaya memperoleh pelanggan dengan menciptakan paket dan harga yang kompetitif. Perseroan juga melakukan inisiatif pra-penjualan dan penganvasan untuk memperoleh pelanggan. Program loyalitas di Segmen *Retail* meliputi insentif seperti layanan WiFi gratis dan waktu instalasi yang cepat. Untuk Segmen *Telco*, Segmen *Wholesale*, dan Segmen Lain-Lain, Perseroan terkadang mengandalkan bantuan mitra dari pelanggan yang disasar.

Berikut merupakan informasi kinerja per segmen operasi Perseroan yang dijabarkan berdasarkan segmen pasar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

31 Desember 2021	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	1.199.223.356.053	29%	729.687.491.170	44%	469.535.864.883	19%
Wholesale	454.663.286.407	11%	185.510.656.121	11%	269.152.630.286	11%
Retail	661.720.025.988	16%	233.623.049.529	14%	428.096.976.459	17%
Lainnya	1.864.466.397.707	45%	493.961.589.655	30%	1.370.504.808.052	54%
<b>Jumlah</b>	<b>4.180.073.066.155</b>	<b>100%</b>	<b>1.642.782.786.475</b>	<b>100%</b>	<b>2.537.290.279.680</b>	<b>100%</b>

31 Desember 2020	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	1.246.009.460.827	33%	771.362.958.977	60%	474.646.501.850	19%
Wholesale	346.676.601.422	9%	117.194.827.177	9%	229.481.774.245	9%
Retail	472.703.890.019	13%	146.185.955.846	11%	326.517.934.173	13%
Lainnya	1.700.298.182.526	45%	253.777.039.590	20%	1.446.521.142.936	58%
<b>Jumlah</b>	<b>3.765.688.134.794</b>	<b>100%</b>	<b>1.288.520.781.590</b>	<b>100%</b>	<b>2.477.167.353.204</b>	<b>100%</b>

31 Desember 2019	Pendapatan		Beban Langsung		Laba Kotor	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telco	614.159.417.085	15%	385.032.787.272	18%	229.126.629.813	12%
Wholesale	475.031.320.374	12%	175.176.282.398	8%	299.855.037.976	16%
Retail	343.798.624.369	8%	142.305.407.259	7%	201.493.217.110	10%
Lainnya	2.629.392.189.923	65%	1.428.701.917.912	67%	1.200.690.272.011	62%
<b>Jumlah</b>	<b>4.062.381.551.751</b>	<b>100%</b>	<b>2.131.216.394.841</b>	<b>100%</b>	<b>1.931.165.156.910</b>	<b>100%</b>

## G. STRATEGI UTAMA

### 1. *Senantiasa mengembangkan usaha untuk memperkuat posisi terdepan.*

Perseroan berupaya memperluas jaringan tulang punggung serat optik domestik dan internasional dengan cadangan proyek yang ekstensif. Dalam waktu dekat, Perseroan bermaksud untuk berkonsentrasi pada kota-kota terpadat di Indonesia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kota-kota di Jawa, Sumatra, dan Bali. Dalam jangka panjang, Perseroan berencana untuk berkonsentrasi pada Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya, di mana terdapat lebih sedikit jaringan lama. Perseroan juga berencana melanjutkan ekspansi dan pengembangan jaringan tulang punggung internasionalnya. Perseroan juga berencana memperluas jaringan akses dan metro dengan membangun infrastruktur dan saluran bersama di kota-kota dan wilayah-wilayah utama untuk mengantisipasi komersialisasi 5G. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur tiang dan saluran bersama di kota-kota strategis padat penduduk di seluruh Indonesia dan berupaya membangun saluran serat optik dengan panjang yang signifikan dan jumlah unit tiang yang signifikan dalam lima tahun ke depan untuk mendukung penerapan jaringan 5G dan koneksi metro.

Perseroan berupaya menyediakan akses internet bagi sektor yang tidak dan/atau belum terlayani di pasar Indonesia, dengan memperkenalkan jasa satelit pita lebar. Pada tahun 2021, Perseroan merampungkan akuisisi PT Indo Pratama Teleglobal (“IPT”), yang menyediakan layanan *Very Small Aperture Terminal* (“VSAT”), yang akan melengkapi jaringan tulang punggung serat optik Perseroan yang telah ada.

Perseroan juga berencana mempercepat kegiatan konstruksi saluran & tiang Perseroan untuk mencakup kota-kota terpilih, yang akan dengan segera memperoleh akses ke jaringan serat optik Perseroan serta layanan terbaru (seperti koneksi 5G).

### 2. *Mengembangkan segmen **retail** dan **enterprise** lebih lanjut.*

Perseroan berupaya memanfaatkan laju Perseroan yang mapan di segmen pita lebar retail dengan mengembangkan jaringan FTTH Perseroan serta meningkatkan basis pelanggan retail. Secara khusus, Perseroan bermaksud mengembangkan jaringan layanan Oxygen.id di Jabodetabek, Jawa dan di luar pulau Jawa, terutama di Medan, Jambi, Pontianak, Pangkal Pinang, dan Bali, serta kota-kota besar lainnya. Di samping komitmen Perseroan untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dan andal kepada pelanggannya, Perseroan juga berkomitmen untuk memberikan layanan purnajual yang unggul untuk mendukung perjalanan pelanggan seutuhnya (seperti melalui aplikasi seluler Perseroan).

Perseroan bermaksud mencapai target tersebut melalui strategi pemasaran holistik yang menerapkan inisiatif *above-the-line* dan *below-the-line*, seperti acara ramah tamah pelanggan, iklan di media sosial, pameran, *roadshow*, bahan media pemasaran, iklan penjenamaan vinil menggunakan mobil.

Perseroan juga berupaya meningkatkan Segmen *Enterprise* dengan mengembangkan layanan Awan dan kapabilitas pusat data yang tersedia. Sebagai contoh, Perseroan berupaya mencapai solusi FTTX menyeluruh (*full suite*), termasuk *Fiber-to-the-Building* (“FTTB”).

Dari segi kapabilitas pusat data, Perseroan berencana untuk melakukan penjualan silang antara layanan Awan dan solusi pusat data kepada pelanggan *Enterprise* di kota-kota Tingkat 1 dan Tingkat 2 utama, dengan mengembangkan kapasitas pusat data Perseroan yang ada secara signifikan. Perseroan

juga mungkin berupaya mencari kemitraan strategis untuk membangun pusat data *hyperscale* di masa depan.

### 3. Melanjutkan fokus pada inovasi teknologi dan perbaikan struktur biaya.

Perseroan berencana untuk melanjutkan investasinya dalam kapabilitas internal dan merekrut karyawan berbakat dari berbagai universitas, lembaga, perusahaan teknologi dan telekomunikasi terkemuka untuk mengembangkan kumpulan talenta Perseroan dan membantu Perseroan mendorong terciptanya inovasi teknologi. Perseroan juga bermaksud senantiasa memperbaharui kapabilitas teknis untuk memaksimalkan efektivitas biaya sekaligus berupaya mencapai keunggulan operasional. Sebagai contoh, Perseroan akan terus meminimalkan opsi modul terpersonalisasi untuk mencapai skala ekonomi tertinggi.

### 4. Mengembangkan layanan inovatif dan bernilai tambah melalui kolaborasi strategis.

Pada tahun 2021, Perseroan menerbitkan saham Seri C sejumlah 151.771 saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Smart Telecom (anak perusahaan Smartfren) sehingga PT Smart Telecom menjadi pemegang saham baru dengan kepemilikan saham sebesar 20,51%. Perseroan berupaya untuk menjalin kolaborasi lebih lanjut dengan pemegang saham strategis Perseroan, Smartfren, satu-satunya penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia yang beroperasi murni menggunakan jaringan 4G dan juga telah mengumumkan peluncuran layanan 5G pada tahun 2022. Perseroan meyakini bahwa kolaborasi tersebut dapat menciptakan sinergi yang signifikan, dengan memanfaatkan jaringan serat optik Perseroan yang ekstensif dan kehadiran *wholesale* 4G/5G Smartfren secara berpasangan. Perseroan telah meluncurkan produk seperti True QuadPlay, layanan internet yang memberikan akses kepada layanan dari Perseroan sendiri dan Smartfren, seperti internet pita lebar berkecepatan tinggi Oxygen.id, saluran TV kabel premium, telefoni tetap dan bergerak, dan IPTV. Melalui True QuadPlay, pelanggan dapat menikmati berbagai layanan telekomunikasi dan internet dalam satu produk tunggal.

Perseroan juga berupaya memperkuat sinergi ini lebih lanjut dengan melengkapi produk True Quadplay dengan dukungan layanan penjualan dan layanan pelanggan tambahan.

Perseroan bermaksud menjalin dan mengembangkan hubungan strategis dengan pemimpin industri lainnya, seperti mitra konten dan penyedia teknologi dan Awan untuk memperkenalkan lebih banyak penawaran produk dan layanan inovatif dan bernilai tambah serta memperluas aliran pendapatan yang tersedia bagi Perseroan. Sebagai contoh: Perseroan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra konten untuk menyediakan layanan paket (*bundled*) yang menggabungkan layanan internet, layanan Awan IPTV dan HD1. Perseroan akan tetap menjajaki peluang untuk mengembangkan dan meluncurkan teknologi baru untuk meningkatkan layanan internet nirkabel yang dapat ditawarkan kepada pelanggannya

## JARINGAN PERSEROAN

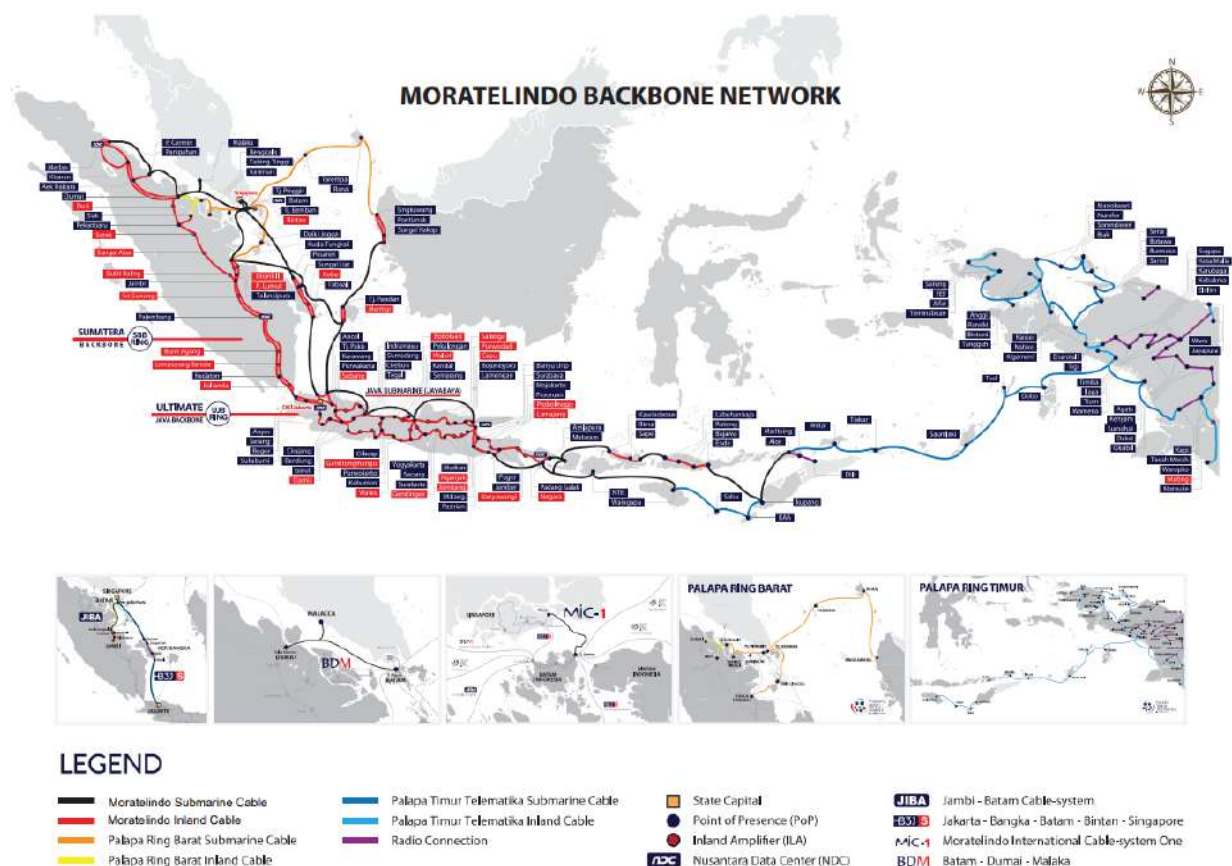
Jaringan tulang punggung nasional bertujuan meningkatkan kecepatan internet di seluruh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat digitalisasi di berbagai sektor strategis dan menghubungkan masyarakat, terutama masyarakat yang secara tradisional kurang terlayani. Perseroan memiliki 385 POP dan menyediakan layanan internet bagi berbagai macam pelanggan, mulai dari operator telekomunikasi hingga pelanggan ritel pengguna akhir.

Jaringan Perseroan terdiri dari kabel serat optik sepanjang 51.749 km per 31 Desember 2021. Jaringan ini terdiri dari 12.689 km jaringan bawah laut, termasuk kabel bawah laut yang membentang dari Pulau Papua, Indonesia, ke Singapura, 14.872 km jaringan domestik darat yang mencakup Pulau

Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Papua di Indonesia, dan 24.188 km jaringan perkotaan yang mencakup wilayah metropolitan di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia, per 31 Desember 2021. Masa manfaat kabel serat optik darat Perseroan adalah 20 tahun. Selain itu, jaringan Perseroan juga mencakup jaringan FTTH Perseroan, yang melewati sekitar 413.025 rumah di Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia, per 31 Desember 2021.

Jaringan bawah laut Perseroan, Moratelindo International Cable-System One (“MIC-1”) terdiri dari kabel bawah laut yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dengan total kapasitas terpasang 21.000G. Jaringan ini mengoperasikan rute lalu lintas internasional antara Pulau Batam, Indonesia, dan Singapura. Masa manfaat kabel serat bawah laut Perseroan adalah 25 tahun. Jaringan bawah laut Perseroan digunakan oleh pelanggan Perseroan untuk memindahkan, menyimpan, dan mengirim lalu lintas data dan internet antar lokasi.

Jaringan akses Perseroan membentang sepanjang 24.188 km, mencakup Jabodetabek, Medan, Pangkal Pinang, Pontianak, Bali, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Ilustrasi jaringan Perseroan disajikan di bawah ini:



Bagan berikut ini menyajikan perincian pertumbuhan jaringan tulang punggung trans-Indonesia Perseroan untuk masing-masing tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021.

Description	2019	2020	2021
<b>Total Backbone (Km)</b>	<b>23,601</b>	<b>25,951</b>	<b>27,561</b>
Submarine (Km)	11,328	12,673	12.689
Inland (Km)	12,273	13,278	14.872
<b>Total Access (Km)</b>	<b>16,841</b>	<b>22,565</b>	<b>24,188</b>
Lastmile (Km)	16.841	22.565	24.188
<b>TOTAL (Km)</b>	<b>40,442</b>	<b>48,515</b>	<b>51,749</b>
<b>Capacity (G)</b>	<b>14,220</b>	<b>18,360</b>	<b>21,000</b>

## TEKNOLOGI JARINGAN (*NETWORK TECHNOLOGY*)

Perseroan menerapkan teknologi terstandarisasi yang telah terbukti dalam memberikan layanan kepada pelanggan Perseroan, yang diperoleh dari pemasok pemasaran terkemuka, menerapkan solusi sesuai dengan kebutuhan segmen pasar. Secara umum, Perseroan membeli peralatan bersama-sama dengan lisensi perangkat lunak, baik yang bersifat permanen maupun dapat diperbaharui, untuk mengoptimalkan biaya Peralatan. Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan jaminan mutu serta layanan tambahan lainnya, seperti layanan jaminan purnajual, suku cadang yang siap tersedia, dan inovasi teknologi secara berkesinambungan.

Satu hal yang bersifat fundamental terhadap jaringan Perseroan adalah penggunaan teknologi serat optik, menerapkan spesifikasi standar yang telah ditetapkan sebelumnya tergantung pada kabel yang digunakan, yaitu kabel darat atau kabel bawah laut. Selain itu, Perseroan memastikan hierarki dan arsitektur jaringan Perseroan sangat kuat dan berketahanan tinggi dengan tujuan melampaui komitmen SLA Perseroan kepada pelanggan. Selanjutnya, jaringan Perseroan didesain secara internal guna memastikan Perseroan memiliki pengetahuan penuh, mampu mengelola kecepatan penggelaran koneksi pelanggan baru dan menjaga kualitas selama operasi.

Teknologi utama yang digunakan di seluruh jaringan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi produk/layanan utama berikut ini: *backbone and access networks optical transport networking, dense wavelength division multiplexing (DWDM), multi-protocol label switching (MPLS)* dan *gigabit ethernet passive optical network (GPON)*; pusat data dan TI (*hosting, Awan, dan DNS, di samping solusi lain*).

Selain mengelola desain jaringan, implementasi, dan operasi secara internal, Perseroan juga memiliki tim TI internal yang bertanggung jawab atas pengembangan dan manajemen aplikasi internal untuk mendigitalisasi proses dan sistem internal Perseroan. Tim IT juga bertanggung jawab untuk membuat dan memfasilitasi solusi untuk penawaran produk dan jasa Perseroan. Dengan demikian, Perseroan mampu merespons perubahan di pasar dengan tangkas dan beradaptasi dengan cepat.

## KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA (*DATA SECURITY AND PROTECTION*)

Perseroan memiliki tim keamanan data yang terdiri dari insinyur dan teknisi, termasuk tim karyawan keamanan bersertifikasi yang dikhususkan untuk melindungi keamanan data Perseroan. Perseroan juga mengadopsi kebijakan perlindungan data yang ketat untuk menjaga keamanan data hak milik Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan keamanan dan perlindungan data Indonesia. Perseroan melakukan enkripsi terhadap informasi pribadi yang dikumpulkan dari platform Perseroan sendiri. Guna menjaga keamanan data dan mencegah kebocoran data, Perseroan telah menetapkan protokol internal yang sangat ketat. Berdasarkan protokol tersebut, Perseroan memberikan akses rahasia terhadap data pribadi rahasia hanya kepada karyawan dalam jumlah

terbatas dengan otoritas akses yang ditetapkan dengan ketat dan berlapis-lapis. Perseroan secara ketat mengontrol dan mengelola penggunaan data oleh berbagai departemen dalam Perseroan dan tidak membagikan data kepada pihak ketiga, dan Perseroan tidak bekerja sama dengan pemasok pihak ketiga dalam melakukan analitik data. Basis data Perseroan dicadangkan setiap hari dan setiap minggu.

## PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (*RESEARCH AND DEVELOPMENT*)

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan material.

## H. PROSPEK INDUSTRI DAN USAHA PERSEROAN

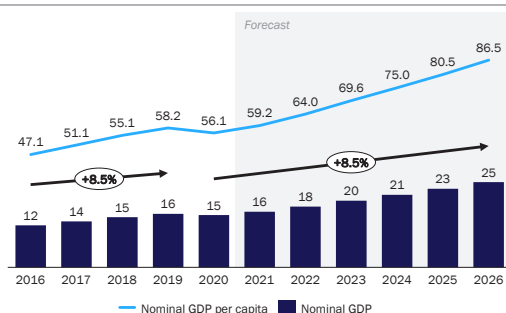
### 1. Latar Belakang Ekonomi Makro

#### 1.1. Ekonomi Makro Indonesia

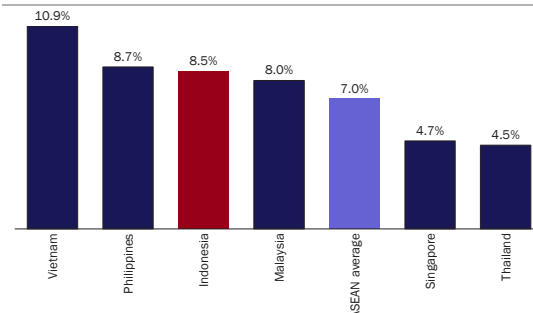
**Indonesia memiliki pertumbuhan PDB yang kuat yang diperkirakan akan berlanjut dalam lima tahun ke depan.**

PDB Nominal di Indonesia tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 8,5% dari 2016 hingga 2019, meskipun pandemi Covid-19 menghambat pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan PDB nominal turun 2,5% dari 2019 hingga 2020. Pemerintah Indonesia menerapkan fiskal darurat paket setara dengan 3,8% dari PDB pada tahun 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, memberikan bantuan kepada perusahaan dan rumah tangga, dan memfasilitasi peluncuran vaksin. Dengan latar belakang pandemi yang sedang berlangsung, Indonesia diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhannya yang kuat mulai tahun 2022, dengan PDB nominal ditetapkan untuk tumbuh pada CAGR sebesar 8,5% mulai tahun 2020 dan seterusnya hingga mencapai Rp25,2 kuadriliun (USD1,7 triliun) pada tahun 2026 (lihat Gambar 1.1). Ini lebih tinggi dari CAGR yang diharapkan sebesar 7,0% untuk kawasan Asia Tenggara Tenggara pada periode yang sama (lihat Gambar 1.2). PDB nominal per kapita diperkirakan akan mengikuti lintasan yang sama untuk mencapai Rp86 juta (USD5.900) pada tahun 2026, tumbuh pada CAGR sebesar 7,2% dari tahun 2020 hingga 2026. Di Indonesia, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam PDB per kapita dengan PDB per kapita di Indonesia. Wilayah Jakarta secara signifikan lebih tinggi daripada wilayah lain di Indonesia (lihat Gambar 1.3).

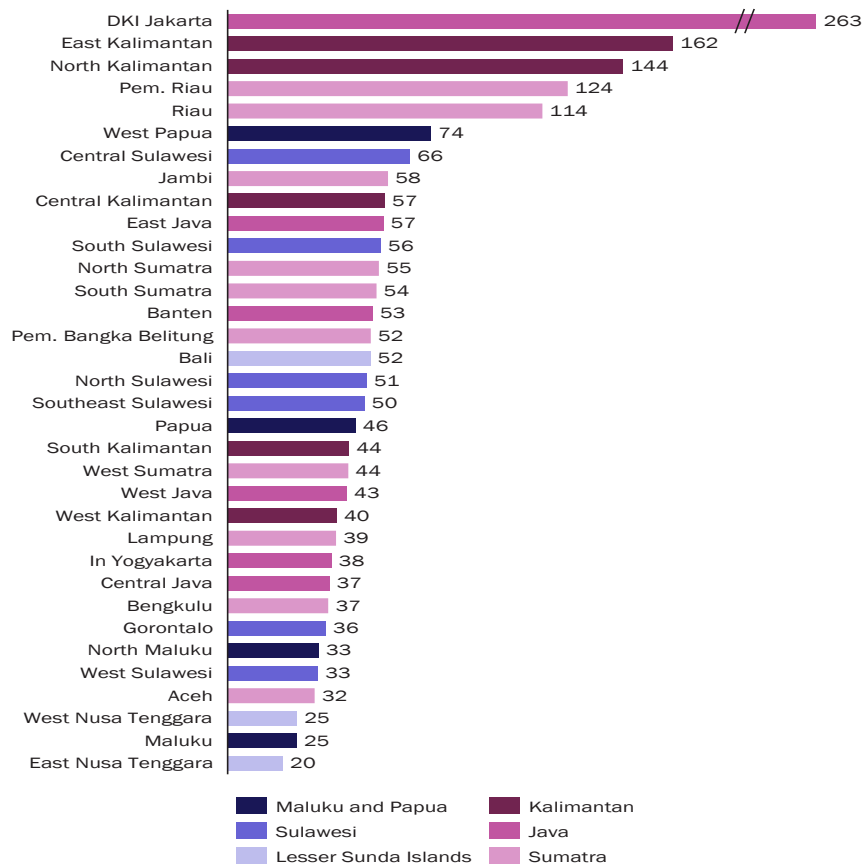
Gambar 1.1: PDB Nominal (Rp kuadriliun) dan PDB nominal per kapita (Rp juta) [Sumber: International Monetary Fund, United Nations, 2021]



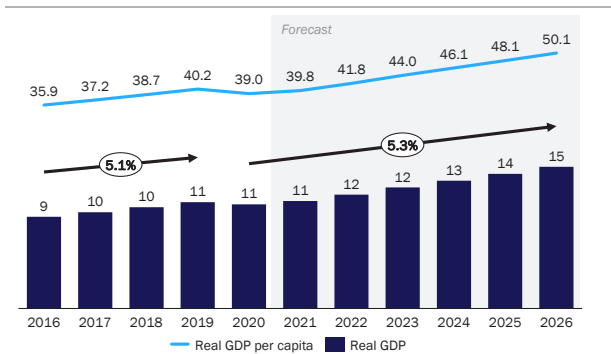
Gambar 1.2: Pertumbuhan PDB nominal di Asia Tenggara, CAGR 2020–26 [Sumber: International Monetary Fund, 2021]



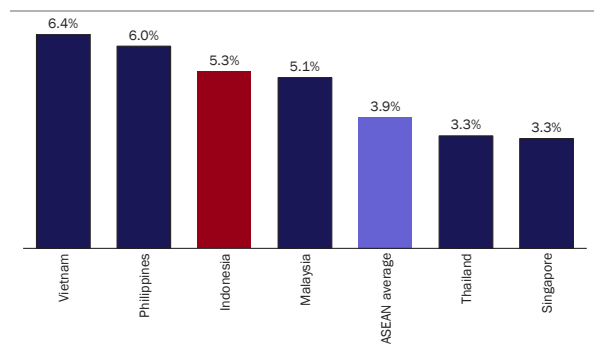
Gambar 1.3: PDB nominal per kapita (Rp juta) menurut provinsi, 2020 [Sumber: BPS, 2022]



Gambar 1VIII.4: PDB riil (Rp kuadriliun) dan PDB riil per kapita (Rp juta) [Sumber: International Monetary Fund, United Nations, 2021]



Gambar 1.5: Pertumbuhan PDB riil di Asia Tenggara, CAGR 2020–26 [Sumber: International Monetary Fund, 2021]

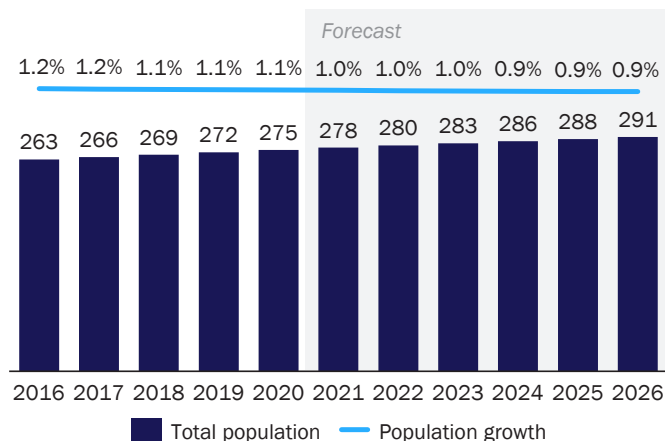


PDB riil dan PDB riil per kapita sebagian besar mengikuti lintasan yang sama dengan PDB nominal dan PDB nominal per kapita, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah. Secara historis, PDB riil telah tumbuh pada CAGR sebesar 5,1% dan pertumbuhan dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan berada pada CAGR sebesar 5,3%. Dari sisi PDB riil, pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan lebih tinggi dari rata-rata kawasan Asia Tenggara.

## 1.2. Populasi Dan Pertumbuhan Penduduk

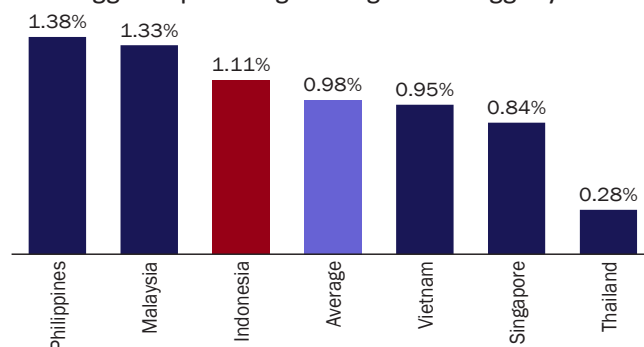
### Indonesia memiliki profil demografis yang menarik untuk layanan telekomunikasi – populasi besar yang sangat urban dan dengan usia rata-rata yang rendah

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dan negara terpadat di Asia Tenggara. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki populasi 274,9 juta, dan diperkirakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan masa lalunya sebesar 1% CAGR untuk mencapai 290,9 juta pada tahun 2026, menurut proyeksi oleh United Nations.



Gambar 1.6: Populasi di Indonesia (juta) dan tingkat pertumbuhan [Sumber: United Nations, 2021]<sup>1</sup>

Meskipun memiliki populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara tetangganya di kawasan ini.

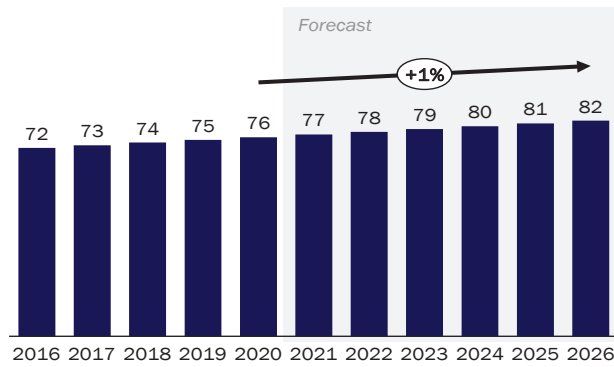


Gambar 1.7: Populasi CAGR (2016–20) di Indonesia dan negara-negara ASEAN<sup>2</sup> [Sumber: United Nations, 2021]

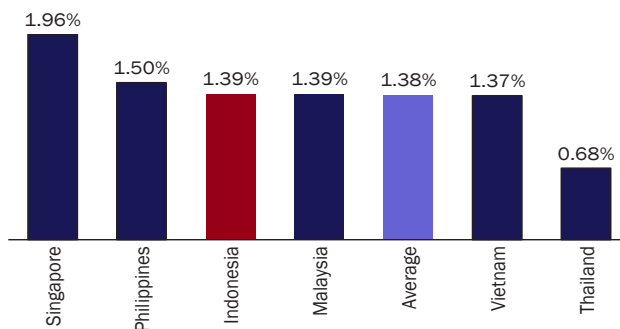
Selama lima tahun terakhir, jumlah rumah tangga di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang stabil, yang diperkirakan akan berlanjut pada CAGR 1% hingga 2026. Pertumbuhan di pasar yang dapat dialamatkan ini positif untuk layanan telekomunikasi yang dibeli per rumah tangga, mis. broadband tetap perumahan.

<sup>1</sup> Data populasi aktual tersedia hingga 2020

<sup>2</sup> Angka rata-rata mewakili rata-rata Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura

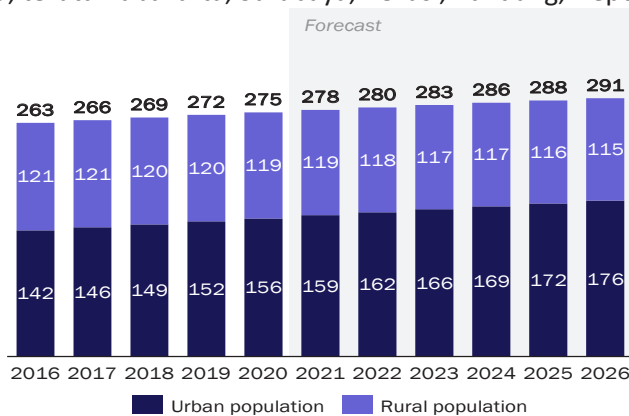


Gambar 1.8: Rumah tangga di Indonesia (juta)  
[Sumber: Analysys Mason Research, 2021]



Gambar 1.9: CAGR Rumah Tangga (2016–20) di Indonesia dan negara-negara ASEAN<sup>3</sup> [Sumber: Analysys Mason Research, 2021]

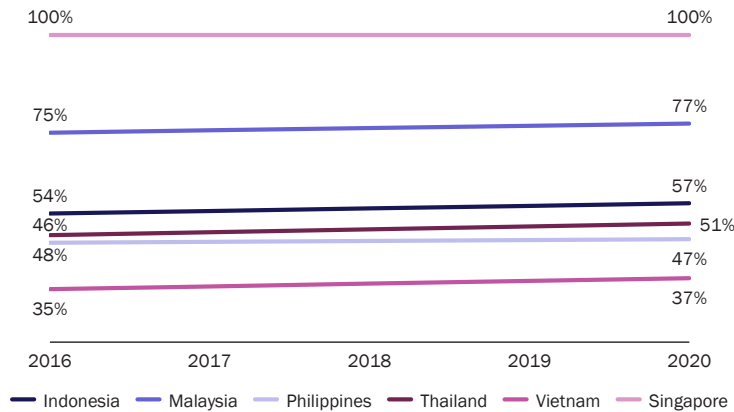
Indonesia juga menjadi semakin urban, dengan total populasi perkotaan diperkirakan akan tumbuh dari 156 juta pada tahun 2020 menjadi 176 juta pada tahun 2026 (CAGR sebesar 2,1%), yang akan meningkatkan pangsa penduduk perkotaan dari 57% pada tahun 2020 menjadi 60% pada tahun 2026 (lihat Gambar 1.10). Pertumbuhan ini kemungkinan akan terkonsentrasi di pusat-pusat kota terbesar di Indonesia, terutama Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Depok dan Medan.



Gambar 1.10: Penduduk Indonesia dibagi berdasarkan perkotaan/pedesaan (juta) [Sumber: United Nations 2021]

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, Indonesia berada tepat di belakang Malaysia dan negara kota Singapura dalam hal proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.11).

<sup>3</sup> Angka rata-rata mewakili rata-rata Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura

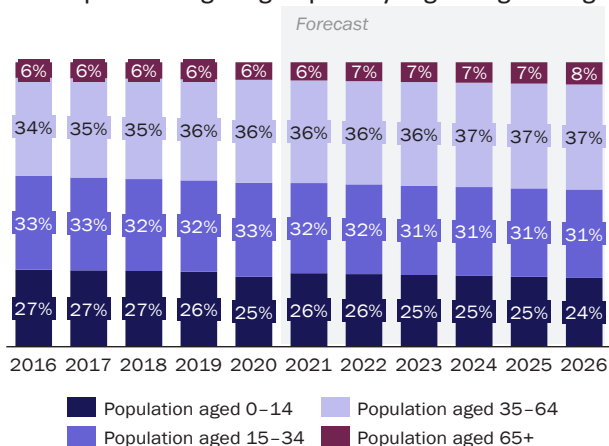


Gambar 1.11: Persentase penduduk perkotaan (2016–20) [Sumber: United Nations, 2021]

Tren urbanisasi yang kuat di Indonesia, ditambah dengan ruang yang cukup untuk pertumbuhan di masa depan, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi layanan telekomunikasi, karena urbanisasi cenderung meningkatkan pendapatan konsumen yang dapat dibelanjakan, membuat layanan telekomunikasi lebih terjangkau. Operator dapat mencapai penghematan biaya yang signifikan saat meluncurkan jaringan mereka di daerah perkotaan yang padat. Penerapan di daerah berpenduduk padat meningkatkan ketersediaan layanan lanjutan untuk audiens yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat memungkinkan operator untuk mengurangi harga layanan yang diberikan.

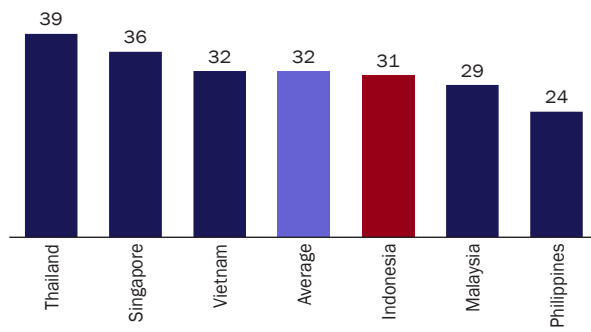
Indonesia juga memiliki populasi yang relatif muda, dengan 58% berusia di bawah 35 tahun pada tahun 2020. Penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15–64 tahun, mewakili 68% dari total pada tahun 2020 (lihat Gambar 1.12). Diproyeksikan akan meningkat dari 190 juta pada tahun 2020 menjadi 197 juta pada tahun 2026.

Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia juga memiliki populasi yang relatif muda dengan usia rata-rata nasional 31 tahun lebih rendah dari rata-rata Asia Tenggara. Tingginya proporsi penduduk usia muda dan usia kerja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan pasar yang menguntungkan untuk layanan telekomunikasi.



Gambar 1.112: Distribusi penduduk di Indonesia menurut kelompok umur [Sumber: BPS, 2021]

Di antara rekan-rekan regional, Indonesia memiliki populasi yang relatif muda (usia rata-rata 31, yang lebih rendah dari rata-rata di antara negara-negara Asia Tenggara (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.13) Proporsi penduduk yang masih muda dan usia kerja yang tinggi adalah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan pasar yang menguntungkan bagi layanan telekomunikasi.

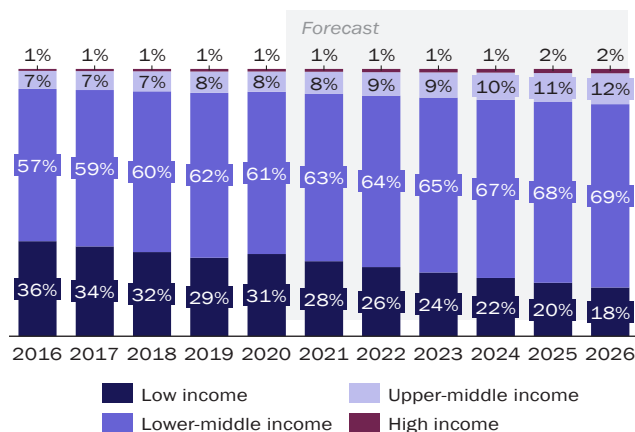


Gambar 1.123: Usia rata-rata di Indonesia dan negara-negara ASEAN<sup>4</sup>, 2021 [Sumber: World Factbook, 2021]

### 1.3. Pendapatan sekali pakai (*disposable income*) per kapita/rumah tangga

#### Pendapatan rumah tangga per kapita di Indonesia terus meningkat

Proporsi penduduk berpenghasilan rendah di Indonesia juga menyusut, dengan hanya 18% yang diperkirakan berpenghasilan kurang dari USD1.000 per tahun pada tahun 2026, dibandingkan dengan 31% pada tahun 2020 (lihat Gambar 1.14). Kenaikan tingkat pendapatan secara umum kemungkinan akan meningkatkan daya beli, yang kemungkinan akan mendorong konsumsi layanan telekomunikasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.

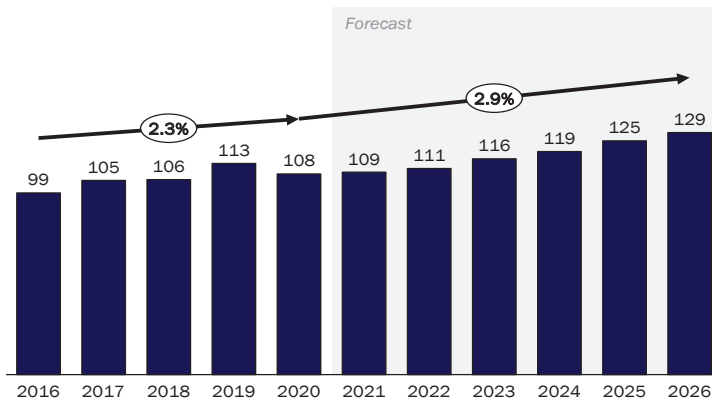


Gambar 1.134: Distribusi penduduk menurut tingkat pendapatan [Sumber: Economist Intelligence Unit, 2021]

Catatan: Jumlah individu dengan pendapatan tahunan dalam kelompok berikut: berpenghasilan rendah (USD<1.000), berpenghasilan menengah ke bawah (USD1.000–5.000), berpenghasilan menengah ke atas (USD5.00–15.000), berpenghasilan tinggi (USD>15.000)

Penurunan populasi berpenghasilan rendah juga tercermin dalam pertumbuhan pendapatan disposabel rata-rata selama periode 2016–20. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga lima tahun ke depan.

<sup>4</sup> Angka rata-rata mewakili rata-rata Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura



Gambar 1.15: Proyeksi pendapatan disposabel rata-rata per rumah tangga (Rp juta), 2016–26 [Sumber: Economist Intelligence Unit, Analysys Mason, 2022]

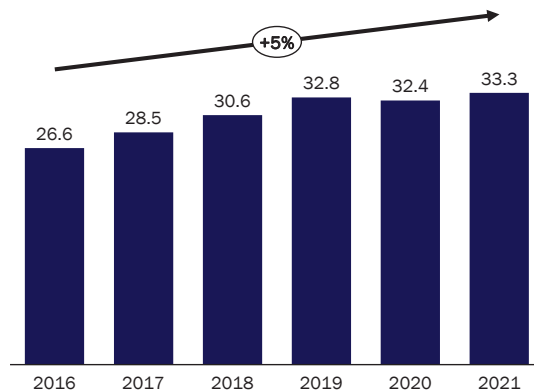
Pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan disposabel rata-rata akan membantu mendorong pengeluaran anggaran rumah tangga untuk layanan telekomunikasi, termasuk broadband. Konsumen baru dapat mendaftar ke layanan sementara konsumen yang sudah ada bermigrasi ke bandwidth yang lebih tinggi dan paket yang lebih mahal.

#### 1.4. Pengeluaran konsumsi tahunan per kapita

##### Pengeluaran konsumsi tahunan per kapita telah meningkat, meskipun ada perbedaan regional di seluruh Indonesia

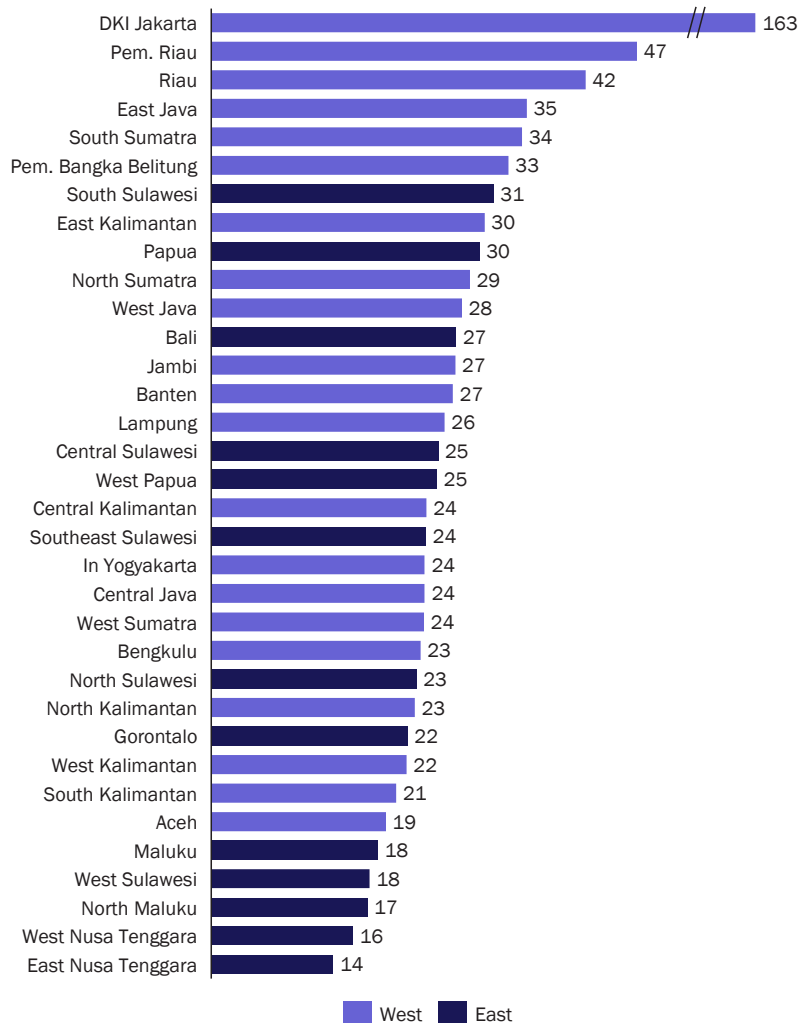
Layanan telekomunikasi, meskipun seringkali penting dalam kehidupan sehari-hari, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk penggunaan. Hal ini terutama berlaku untuk layanan bandwidth tinggi yang secara ekonomis lebih menarik bagi penyedia layanan. Rata-rata rumah tangga beranggotakan empat orang di Indonesia biasanya menghabiskan

~7–8% dari pendapatan sekali pakainya untuk layanan telekomunikasi. Meskipun terjadi penurunan kecil akibat pandemi Covid-19, pengeluaran konsumsi per kapita di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang stabil (CAGR 5% selama periode 2016–21).



Gambar 1.146: Pengeluaran konsumsi tahunan per kapita (Rp juta), Indonesia [Sumber: BPS, 2022]

Namun, ada perbedaan regional yang signifikan dalam tren konsumsi di Indonesia dengan wilayah timur biasanya tertinggal di belakang bagian barat negara yang lebih kaya; pengeluaran konsumsi tahunan rata-rata di wilayah barat Indonesia, sekitar Rp34 juta, lebih dari 50% lebih tinggi daripada di wilayah timur Indonesia (sekitar Rp22 juta), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.17. Jakarta memiliki keunggulan signifikan dibandingkan wilayah lain di negara ini dalam hal pendapatan disposabel yang tersedia.



Gambar 1.17: Pengeluaran konsumsi tahunan per kapita menurut provinsi (Rp juta), 2020 [Source: BPS, 2022]

Indonesia, saat ini ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang diperkirakan akan berlanjut selama lima tahun ke depan. Populasinya semakin urban dan memiliki usia rata-rata yang rendah, semua atribut menarik untuk penyedia layanan telekomunikasi. Kemakmuran juga meningkat dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga per kapita yang mengarah pada pengeluaran konsumsi per kapita yang lebih tinggi. Pasar diperkirakan akan tetap menarik bagi penyedia layanan telekomunikasi.

**Key Takeaway**

Indonesia, saat ini ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang diperkirakan akan berlanjut selama lima tahun ke depan. Populasinya semakin urban dan memiliki usia rata-rata yang rendah, semua atribut menarik untuk penyedia layanan telekomunikasi. Kemakmuran juga meningkat dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga per kapita yang mengarah pada pengeluaran konsumsi per kapita yang lebih tinggi. Pasar diperkirakan akan tetap menarik bagi penyedia layanan telekomunikasi.

**Tinjauan Industri Infrastruktur Kabel Fiber**

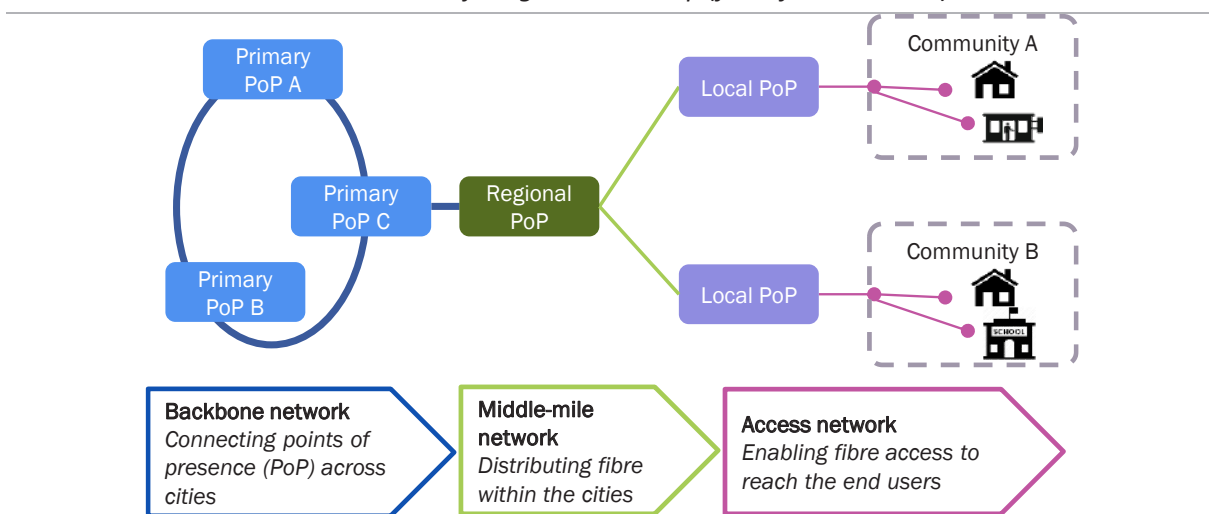
Permintaan kabel serat biasanya berasal dari berbagai segmen pelanggan seperti – (1) operator telekomunikasi yang menggunakan serat untuk menghubungkan situs jaringan, (2) penyedia layanan internet yang menyewa kabel serat untuk menyediakan layanan konektivitas, (3) pelanggan

perusahaan dan perumahan yang menggunakan sambungan kabel serat untuk kebutuhan konektivitas kecepatan tinggi untuk mereka sendiri. Penyedia layanan internet adalah segmen pelanggan utama lainnya untuk serat jaringan dan kapasitas sewa untuk menyediakan layanan yang berbeda kepada pelanggan perusahaan dan perumahan.

Penyedia jaringan serat untuk layanan internet dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen terpisah:

- Jaringan tulang punggung (*backbone network*)
- Jaringan jarak menengah (*middle-mile network*)
- Jaringan akses (*access network*)

Contoh ilustrasi jaringan serat tetap (*fixed fibre network*)



### Jaringan tulang punggung (*backbone network*) di Indonesia

Di Indonesia, beberapa jaringan backbone sudah tersedia dari berbagai provider (misalnya Telkom, Moratelindo, ICON+, XL). Pemain seperti Moratelindo, XL dan Indosat memiliki jaringan backbone yang dalam kombinasi secara luas sama dengan Telkom – meskipun mungkin ada jaringan backbone yang tumpang tindih di area tertentu. Palapa Ring dapat meningkatkan konektivitas antar pulau, meskipun dampaknya terhadap konektivitas masyarakat lokal mungkin tidak signifikan karena tantangan dalam membawa fiber dari *Point of Presence* (PoPs) ke kota-kota sasaran.

Karena penyedia layanan internet memperluas layanan berkecepatan tinggi di seluruh Indonesia, permintaan akan infrastruktur serat diperkirakan akan kuat. Pemain yang ada secara historis berinvestasi dalam beberapa serat tulang punggung untuk digunakan sendiri, meskipun pemain baru lebih cenderung menyewa tulang punggung untuk ekspansi ke area baru.

### Faktor Utama Pendorong Pasar

#### I. Meningkatnya persyaratan *backhaul* seiring kemajuan teknologi seluler (5G)

Backhaul mengacu pada koneksi point-to-point antara situs jaringan seluler dan jaringan inti dari operator seluler. Ini dapat disediakan dengan menggunakan berbagai teknologi, meskipun gelombang mikro dan serat adalah yang paling umum. Karena teknologi seluler memungkinkan kecepatan data yang lebih tinggi untuk pengguna akhir (5G, dll.), pertumbuhan berkelanjutan dalam persyaratan kapasitas backhaul akan diperlukan. Serat fiber, memberikan bandwidth yang lebih tinggi, kekebalan interferensi dan jangkauan yang lebih jauh, akan menjadi satu-satunya teknologi

yang layak untuk mendukung kapasitas ini meskipun biaya penyebaran kemungkinan akan tetap lebih tinggi daripada link microwave (biaya sewa backhaul serat sekitar 60% lebih mahal daripada microwave yang sesuai. tautan).

## II. Pertumbuhan langganan *broadband* tetap (*fixed broadband*) di segmen perumahan

Permintaan *broadband* tetap perusahaan diperkirakan akan tumbuh kuat – terutama dari UKM. Oleh karena itu, pemerintah aktif dalam mendidik usaha kecil dengan program 'UMKM Go Online' untuk mendorong kesadaran internet untuk bisnis mereka. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia juga telah menyediakan akses internet gratis secara uji coba kepada komunitas bisnis untuk mendorong usaha kecil menggunakan internet dan menjadi pengguna berbayar. Migrasi dari paket konsumen ke perusahaan juga cenderung mengarah pada pertumbuhan pasar.

Pendapatan dari koneksi khusus diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih bertahap namun stabil. Permintaan untuk koneksi dengan bandwidth yang lebih tinggi diproyeksikan akan tumbuh, terutama untuk mendukung layanan berbasis cloud seperti yang terlihat dengan masuknya pemain cloud terkemuka (misalnya Amazon Web Services (AWS) dan Google). Namun, peluncuran solusi SD-WAN (misalnya Telkomstra dan Indosat) dapat memberikan tekanan pada pertumbuhan pendapatan dengan meniadakan permintaan konektivitas khusus.

## III. Penggunaan data konsumen yang melonjak

Penggunaan data per koneksi diperkirakan akan tumbuh kuat dan mencapai ~20GB/bulan pada tahun 2025 berdasarkan perkiraan Analysys Mason Research, didorong oleh:

- Pertumbuhan penetrasi smartphone lebih lanjut, difasilitasi oleh peningkatan ketersediaan smartphone kelas bawah yang ditawarkan oleh produsen perangkat China.
- Meningkatkan konsumsi konten video melalui seluler dan dengan kualitas yang lebih tinggi (contoh. Full HD, video 4K).
- Popularitas platform media sosial, terutama yang melibatkan posting foto dan video dan dengan demikian mendorong penggunaan data (contoh. Indonesia memiliki >87 juta pengguna aktif di TikTok per Oktober 2021).
- Pertumbuhan pesat dalam ekonomi digital, dipimpin oleh unicorn lokal (contoh. GoTo, Traveloka dan Bukalapak) dan pertumbuhan yang dihasilkan dalam transaksi terkait (contoh. e-commerce, ride-hailing).

Pada tahun 2020, penggunaan data konsumen telah meningkat secara signifikan dalam beberapa aspek, yang terutama mencakup media sosial, game, dan e-commerce :

- Media sosial: pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menempati peringkat kedelapan secara global untuk waktu yang dihabiskan online setiap hari (8 jam 52 menit). Indonesia memiliki jumlah pengguna Facebook dan Instagram tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara – pengguna ini mendorong konsumsi data, karena kedua platform media sosial tersebut dikenal sebagai host konten gambar dan video.
- Media dan game: pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menempati peringkat kesembilan secara global untuk waktu yang dihabiskan setiap hari untuk bermain video game di konsol game (1 jam 16 menit) dan rata-rata 2 jam 50 menit setiap hari untuk menonton TV (siaran dan streaming). Banyaknya waktu yang dihabiskan menggunakan aplikasi intensif data ini kemungkinan akan mendorong konsumsi data.
- E-commerce: Indonesia adalah rumah bagi beberapa platform e-commerce terbesar di kawasan ini. Pasar konsumen e-commerce meningkat sebesar 49% pada tahun 2020 menjadi USD30,3 miliar. Saat konsumen memigrasikan lebih banyak aktivitas belanja online mereka, mereka akan

menghabiskan lebih banyak waktu untuk browsing dan membandingkan online, yang akan mendorong konsumsi data.

Namun, pada tahun 2020, menurut Analysys Mason Research, penggunaan data rata-rata di Indonesia saat ini lebih rendah daripada negara tetangga lainnya seperti Thailand (~11GB/bulan) dan Malaysia (~15GB/bulan) tetapi diperkirakan Indonesia akan menyusul dalam waktu dekat.

### **Key Takeaway**

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan data-intensif, operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet harus melakukan fiberisasi di semua jaringan mereka, sehingga memberikan peluang yang cukup besar bagi Perseroan. Demikian pula, pertumbuhan adopsi layanan broadband akan berdampak positif terhadap permintaan serat karena FTTx menjadi jenis koneksi yang paling umum. Peluang tersebut kemungkinan juga tersebar secara geografis dengan permintaan yang terus berpindah dari Jawa ke wilayah lain karena penyedia layanan mulai bersaing dengan pemain lama di pasar tersebut.

#### **1. Tinjauan Industri *Ducting* (*Ducting*)**

Sementara fiber di Indonesia umumnya disebarakan melalui udara, khususnya di dalam kota, pemerintah kota tertentu telah mengambil proyek strategis untuk menyalurkan semua fiber di dalam yurisdiksi mereka. Inisiatif ini telah diterapkan pada penyebaran baru serta serat yang saat ini digunakan baik di udara atau di bawah tanah tetapi tidak di-*ducting*.

Fiber *ducting* melibatkan penggalian parit sedalam 1-1,2 m untuk mengubur *ducting* dan menarik kabel fiber melalui *ducting*. Solusi ini melindungi fiber dari angin dan kondisi cuaca lainnya yang dengan demikian kecil kemungkinannya mengalami pemotongan. Namun, penyebarannya lebih sulit dan mahal, dan kelayakannya tergantung pada medannya. Setelah *ducting* disebarakan, sub-saluran disewakan ke penyedia fiber untuk kabel fiber mereka sendiri. Setiap sub-*duct* biasanya mampu mendukung hingga 96 fiber inti.

Ada beberapa motivasi untuk mendorong adopsi *ducting*:

- Meningkatkan kontrol dan visibilitas atas proses penyebaran fiber karena *ducting* adalah operasi berlisensi sementara penyebaran fiber di udara tidak
- Meningkatkan estetika di seluruh kota
- Membuat infrastruktur lebih tahan dalam jangka panjang karena lebih mudah untuk menambahkan layanan baru menggunakan fiber *ducted*. Beberapa pemerintah kota telah memandang *ducting* sebagai persyaratan yang diperlukan untuk menerapkan solusi kota pintar, seperti parkir pintar, meteran jalan pintar, dan lain-lain.

Namun, saat ini belum ada regulasi pemerintah secara nasional yang mengatur penyebaran fiber di Indonesia meskipun pemerintah pusat secara eksplisit telah mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan saluran *ducting*.

### **Tinjauan Industri**

***Pasokan pasar pada saat ini terkonsentrasi dengan hanya dua pemain yang aktif di pasar.***

Saat ini baru dua kota di Jawa – Jakarta dan Semarang – yang mulai memasang fiber *duct*. *Ducting* di Jakarta dipimpin oleh JakPro, sedangkan di Semarang dilakukan oleh Moratelindo. Upaya di Jakarta sebagian besar dilakukan sedikit demi sedikit, sementara Semarang mengikuti pendekatan yang lebih terstruktur. Di Semarang hanya fiber udara yang disalurkan, sedangkan Badan Usaha Milik Negara

di Jakarta telah mengamankan semua operator untuk memindahkan fiber yang ada (termasuk kabel dalam tanah yang ada) ke *ducting*.

Karena *ducting* membutuhkan kerjasama yang erat dengan pemerintah kota, pendekatan yang biasa dilakukan adalah dengan mendirikan sebuah *joint-venture* antara operator telekomunikasi dan perusahaan milik negara yang ditunjuk untuk mengawasi *ducting*. Hal ini juga membantu mendapatkan RoW. Misalnya, Moratelindo telah bekerja sama dengan pemerintah kota di Semarang untuk membangun *ducting* dan tiang dan mengadopsi skema bagi hasil.

### **Faktor Penggerak Pasar Utama**

***Ambisi sektor publik untuk menghadirkan visibilitas ke penyebaran ducting sambil meningkatkan daya tarik estetika kota adalah pendorong utama.***

- *Memfasilitasi penerapan solusi kota pintar yang lebih mudah di setiap kota*

Beberapa kota di Indonesia memiliki ambisi untuk menerapkan solusi kota pintar, mulai dari manajemen lalu lintas hingga membantu kepolisian dan manajemen publik. Fiber yang disalurkan jauh lebih mudah digunakan untuk skenario seperti itu dan hanya membutuhkan konektivitas ke sistem perangkat lunak yang sesuai.

- *Meningkatkan visibilitas ketersediaan ducting di pasar*

Penyebaran *ducting* memerlukan lisensi yang diperlukan sebelum pekerjaan dapat dilakukan, dan perjanjian sewa *wholesale* juga dilisensikan. Ini memberikan visibilitas yang jelas ke infrastruktur fiber yang tersedia di kota, yang saat ini tidak mungkin dilakukan dengan penyebaran udara tanpa izin.

- *Meningkatkan daya tarik estetika kota*

Fiber di saluran bawah tanah tidak terlihat dan menghindari penyebaran berantakan yang biasa terjadi pada kabel udara.

### **Market Size**

***Ukuran pasar yang relatif kecil pada saat ini meskipun permintaan dapat meningkat di tahun-tahun mendatang***

Moratelindo saat ini adalah penyedia utama yang bekerja sama dengan berbagai pemerintah kota yang berencana untuk menyebarkan *ducting* fiber di seluruh Indonesia. Berangkat dari keberhasilan penggelaran Palapa Ring dan Proyek Palapa Ring, dalam lima tahun mendatang Moratelindo berniat memasang *ducting* di beberapa kota besar di Indonesia.

### **Key Takeaway**

Fiber *ducting* telah diadopsi sebagai inisiatif strategis oleh beberapa pemerintah kota di Indonesia. Saat ini, Moratelindo adalah pemasok utama yang melakukan pekerjaan ini yang menempatkannya pada posisi yang baik untuk mendapatkan kendali atas infrastruktur kota serta membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah. Meskipun peluang dalam waktu dekat mungkin tidak tampak signifikan, karena kota-kota selanjutnya mengambil inisiatif ini, pasar ini diperkirakan akan tumbuh lebih jauh.

## 2. Tinjauan Industri Data Center (Data Center)

Pusat data adalah fasilitas fisik yang digunakan organisasi untuk menampung aplikasi dan data penting mereka. Pusat data dirancang untuk mendukung aplikasi dan aktivitas bisnis. Komponen kunci dari desain pusat data termasuk router, switch, firewall, sistem penyimpanan, server dan pengontrol pengiriman aplikasi.

Bersama-sama, mereka menyediakan:

- Infrastruktur jaringan: untuk menghubungkan server (fisik dan virtual), layanan pusat data, penyimpanan, dan konektivitas eksternal ke lokasi pelanggan
- Infrastruktur penyimpanan: untuk menahan tempat pelanggan data di pusat data
- Sumber daya komputasi: untuk menyediakan pemrosesan, memori, penyimpanan lokal, dan konektivitas jaringan yang mendorong aplikasi.

Ada berbagai jenis pusat data, masing-masing melayani kelompok pelanggan yang berbeda.

Tabel: Tipe data centre [Source: Analysys Mason, 2022]

Tipe Data Center	Deskripsi	Basis Customer	Persyaratan Konektivitas	Jumlah tenant/customer
<i>Hyperscale</i>	Umumnya, pusat data yang dibuat khusus yang dimiliki dan dioperasikan oleh hyperscaler atau pihak ketiga	Hyperscale	Jaringan fiber berkecepatan sangat tinggi	1–3
<i>Wholesale co-location</i>	Dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga yang menyewakan ruang untuk perusahaan besar/pelanggan <i>hyperscale</i>	Customer Enterprise/hyperscale	Jaringan fiber berkecepatan tinggi	<100
<i>Retail co-location</i>	Dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga yang menyewakan ruang kepada pelanggan perusahaan kecil	Customer SMEs/retail	Interkoneksi ke SaaS dan PaaS	100–1.000
<i>Enterprise</i>	Dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan yang didukungnya. Biasanya ditempatkan di lokasi dan dikelola oleh tim IT perusahaan	-	-	1
<i>Telecoms</i>	Dimiliki oleh penyedia layanan telekomunikasi yang menyewakan ruang kepada perusahaan yang memiliki persyaratan konektivitas yang sangat tinggi	Penyedia konten, penyedia layanan seluler	Diperlukan bandwidth besar untuk pengiriman konten	~100

Dalam jangka panjang, penggunaan *data center* terdepan diharapkan lebih bervariasi, melibatkan aplikasi yang membutuhkan pemrosesan *real-time* dan respons tepat waktu seperti aplikasi dan game berbasis *augmented reality* dan *virtual reality*, kendaraan yang terhubung dan infrastruktur jalan, serta otomasi industri. (misalnya mesin *vision*).

Ekonomi internet Indonesia yang besar dan dinamis mendorong pertumbuhan pasar *data centre* nya. Investasi ke pasar *data centre* telah menyaksikan pertumbuhan tinggi pada 2019–21, yang diperkirakan akan berlanjut meskipun pada tingkat yang lebih lambat. Menurut perkiraan Analysys Mason, kapasitas *data centre* diperkirakan akan meningkat dari 74MW pada tahun 2020 menjadi 328MW pada tahun 2026, Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di antara negara-negara Asia Tenggara.

Pertumbuhan masa depan di pasar hyperscale diharapkan datang dari perluasan hyperscaler – dengan Alibaba Cloud dan GCP meluncurkan wilayah cloud masing-masing pada 2019 dan 2020, Tencent meluncurkan dua wilayah pada 2021 dan AWS melakukan hal yang sama pada 2022; Microsoft Azure juga berencana untuk meluncurkannya dalam waktu dekat. Selain hyperscaler, beberapa penyedia layanan pusat data juga hadir di pasar, dengan fokus pada layanan *co-location* ke beberapa perusahaan.

Pendapatan *data centre* diperkirakan akan terus tumbuh karena pertumbuhan ekonomi internet Indonesia tetap kuat dan operator terus meluncurkan kapasitas potensial. Menurut perkiraan Analysys Mason, *market size* diperkirakan akan meningkat pada CAGR sebesar 32%, dari USD150 juta pada tahun 2020 menjadi USD780 juta pada tahun 2026. Pendapatan dari segmen *hyperscale* diperkirakan akan tumbuh dari tahun ke tahun. Periode yang sama dan melebihi pendapatan dari segmen tradisional (yang meliputi lokasi bersama *wholesale/retail*, *data centre* perusahaan dan telekomunikasi) pada tahun 2022.

### **Faktor Penggerak Pasar Utama**

#### ***Meningkatnya permintaan dari ekosistem start-up diharapkan dapat mendorong pertumbuhan di segmen hyperscaler***

- **Permintaan dari ekosistem start-up yang dinamis**

Indonesia memiliki ekosistem *start-up* yang dinamis dengan beberapa unicorn lokal dan bukan regional yang secara aktif mengandalkan cloud untuk kebutuhan infrastruktur mereka dan memiliki persyaratan TI yang berkembang pesat.

Ekonomi internet Indonesia yang kuat telah mendorongnya menjadi pasar terbesar untuk pembelanjaan cloud di kawasan ini. Saat ini, pembelanjaan untuk server cloud di Indonesia terutama ditujukan melalui wilayah cloud Singapura dan dengan demikian pusat data Singapura – hal ini diharapkan secara bertahap bergerak menuju pusat data Indonesia seiring dengan dimulainya wilayah cloud Indonesia (misalnya Microsoft mengumumkan niatnya untuk mendirikan pusat data wilayah di Indonesia pada Februari 2021).

- **Perubahan persepsi tentang co-location dan layanan cloud dari industri yang sudah mapan**

Banyak industri warisan diharapkan untuk mengadopsi pendekatan *hybrid-cloud* dengan beberapa permintaan untuk lokasi bersama karena masalah privasi data.

*Tabel: Change in reliance on co-location and cloud services from 2019 [Source: Analysys Mason, 2022]*

Segmen Industri	Perubahan pada ketergantungan sejak 2019		Outlook
	Co-location	Cloud	
Institusi Finansial	Tidak ada/perubahan minimal	Peningkatan sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diekspektasi untuk mempertahankan permintaan mereka untuk server lokal selama lima tahun ke depan karena</li> </ul>

Segmen Industri	Perubahan pada ketergantungan sejak 2019		Outlook
	Co-location	Cloud	
			kebutuhan untuk menjaga keamanan data keuangan yang sensitif <ul style="list-style-type: none"> <li>Migrasi <i>cloud</i> yang berkaitan dengan persyaratan data untuk data operasional dan aplikasi yang tidak sensitif diperkirakan akan meningkat selama lima tahun ke depan karena bank semakin mendigitalkan solusi mereka; pertumbuhan pemain <i>fintech</i> juga berkontribusi pada adopsi <i>cloud</i> melalui layanan <i>co-location</i></li> </ul>
Telco	Peningkatan sedang	Tidak ada/perubahan minimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terus sangat bergantung pada <i>co-location</i>; pengenalan teknologi 5G tervirtualisasi akan meningkatkan kebutuhan akan <i>co-location</i>.</li> </ul>
Hyperscalers (i.e. ekonomi internet, sosial dan media online)	Tidak ada/perubahan minimal	Peningkatan yang ditandai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekosistem start-up yang dinamis dipimpin oleh unicorn yang berfokus pada lokal (seperti GoTo, Traveloka, Bukalapak) yang menghasilkan data dalam jumlah besar dan cenderung mengandalkan <i>cloud</i> untuk kebutuhan IT mereka mengingat skalabilitas tinggi yang ditawarkannya</li> <li>Namun, mereka diekspektasi untuk bermigrasi secara bertahap ke wilayah <i>cloud</i> lokal karena penghematan biaya dan manfaat kinerja, tetapi ini akan melibatkan proses bertahap karena tantangan migrasi</li> </ul>
Enterprises	Peningkatan sedang	Peningkatan sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diekspektasi untuk lebih <i>mengandalkan cloud/co-location</i> dari waktu ke waktu untuk mengurangi investasi mereka di aset lokal dan mereka meningkatkan kecanggihan IT mereka</li> </ul>
Pemerintah	Peningkatan sedang	Tidak ada/perubahan minimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa diekspektasi migrasi ke <i>co-location</i>, dengan migrasi yang lebih bertahap ke <i>cloud</i> karena kekhawatiran pemerintah yang diperkirakan atas penyimpanan data sensitif di <i>cloud</i></li> </ul>

• **Permintaan untuk cache konten saat lalu lintas melonjak**

Penggunaan konten online telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir memicu permintaan untuk cache konten lokal yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Jaringan distribusi konten (*Content Distribution Network/CDN*) biasanya digunakan untuk menyimpan konten populer dan mengandalkan *data centre* lokal untuk mengurangi latensi. Saat ini, sebagian besar penyedia CDN hanya memiliki PoP di Jakarta – Akamai adalah satu-satunya penyedia CDN dengan PoP di luar ibu kota. Karena penyedia konten seperti platform media sosial dan penyedia OTT terus meningkatkan operasi mereka di Indonesia dan melayani pelanggan di luar Jakarta, akan ada peningkatan permintaan untuk lebih banyak layanan CDN dan *data centre* di seluruh negeri untuk menyimpan konten di dekat pengguna akhir.

- **Peraturan dan kebijakan tentang penyimpanan data sensitif (misalnya kedaulatan data, undang-undang/peraturan perlindungan data baru) dapat meningkatkan permintaan *data centre* lokal, meskipun masih ada beberapa ketidakpastian**

Berdasarkan Peraturan No. 71 (GR71) yang baru saja disahkan, Penyelenggara Sistem Elektronik Publik (ESO) harus menempatkan sistem dan data elektronik mereka di Indonesia kecuali jika teknologi penyimpanan tidak tersedia secara lokal. Ini mencakup lembaga negara atau lembaga lain yang ditunjuk oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem elektronik. ESO swasta tidak tunduk pada persyaratan yang sama saat ini.

Ada persyaratan tambahan di mana pemerintah akan menentukan lembaga swasta/publik mana yang memiliki 'data elektronik strategis' dan harus dilindungi dengan menghubungkan dokumen elektronik/rekaman cadangan mereka ke pusat data tertentu, dengan perincian yang akan ditentukan melalui peraturan selanjutnya. Meskipun tidak didefinisikan secara eksplisit, 'data elektronik strategis' diharapkan mencakup institusi yang memiliki informasi penting dari berbagai sektor (misalnya layanan keuangan, telekomunikasi, IT, dll.).

Selain itu, terdapat persyaratan tersendiri yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, dimana penggunaan *data center* di luar negeri oleh bank umum hanya diperbolehkan dengan persetujuan terlebih dahulu.

Dengan munculnya peraturan ini dan persyaratan terkaitnya, permintaan lokal untuk ruang *data centre* diperkirakan akan tetap kuat.

### **Key Takeaway**

Pasar *data centre* di Indonesia masih dalam tahap awal dan diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tahun-tahun mendatang. Masuknya *hyperscaler* ke pasar dan permintaan untuk penyimpanan data lokal, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dalam beberapa skenario, akan mendorong pertumbuhan yang stabil dalam permintaan layanan *co-location*. Pemain internasional yang mapan telah mengidentifikasi peluang ini dan baru-baru ini telah terjadi arus masuk modal untuk membangun *data centre* di negara tersebut. Sementara keandalan pasokan listrik yang stabil dan ketersediaan tenaga kerja terampil tetap menjadi tantangan yang harus dicari solusi oleh penyedia layanan, pertumbuhan ekonomi digital dan permintaannya untuk infrastruktur pendukung akan memastikan permintaan tetap stabil selama bertahun-tahun yang akan datang.

### **3. Tinjauan Industri FTTX / FTTH**

Fiber optik terutama digunakan dalam rute panjang untuk jaringan inti dan *backhaul* karena keunggulannya sebagai berikut:

- Kapasitas tinggi
- Biaya penyisipan rendah per unit kapasitas
- Ketahanan dan kekebalan terhadap gangguan elektro-magnetik dan masuknya air
- Skalabilitas untuk teknologi baru.

Antara 2016 dan 2020, permintaan data global meningkat secara signifikan – rata-rata lalu lintas internet bulanan per koneksi broadband hampir tiga kali lipat dan diperkirakan akan terus tumbuh pada CAGR 23% hingga 2026 menurut Analysys Mason Research.

Permintaan data yang melonjak ini mendorong infrastruktur fiber lebih dekat ke pengguna akhir. Teknologi fiber semakin banyak digunakan untuk jaringan akses perumahan (misalnya FTTx) karena manfaat berikut:

- **Kecepatan lebih cepat:** internet fiber optik berkali-kali lebih cepat daripada koneksi internet tembaga berkecepatan tertinggi
- **Degradasi sinyal lebih sedikit:** sinyal jalur tembaga menurun saat pengguna menjauh dari sakelar, sementara kekuatan sinyal fiber tidak menurun karena jarak.

Ada beberapa cara di mana fiber dapat diberikan kepada pelanggan. Penerapan alternatif seperti *fibre to the local exchange* (FTTLE), *fibre to the cabinet* (FTTC), *fibre to the building* (FTTB) dan *fibre to the home/premises* (FTTH/P), masing-masing membawa koneksi fiber lebih dekat dan lebih dekat ke tempat pelanggan.

- **Koneksi Perumahan**

Di Indonesia, pasar *broadband* tetap perumahan telah berkembang pesat dengan FTTP sebagai teknologi penyebaran utama. Rumah tangga *fixed broadband* telah tumbuh pada CAGR ~27% antara 2016 dan 2020, sebagian besar didukung oleh penyebaran infrastruktur jaringan yang telah memfasilitasi peningkatan adopsi *broadband* berkecepatan tinggi. Migrasi dari ADSL lawas oleh Telkom juga menjadi alasan pertumbuhan.

Penetrasi rumah tangga telah tumbuh secara signifikan tetapi tetap rendah karena peluncuran jaringan *fixed-line* oleh operator sebagian besar terjadi di kota-kota besar karena ekonomi yang menguntungkan. Dukungan dari pemerintah Indonesia untuk menginvestasikan USD22 miliar dalam infrastruktur *broadband* tetap di bawah Rencana Pita Lebar Nasional lima tahun 2014–2019 juga telah berkontribusi pada penerimaan FTTP yang kuat.

Penyedia *broadband* tetap utama telah secara agresif memperluas jaringan mereka selama lima tahun terakhir. Misalnya, Telkom telah meningkatkan jumlah rumah yang dilewati 2–4 juta per tahun antara 2016 dan 2020, sementara beberapa pemain kecil juga telah menyebarkan secara agresif, masing-masing menambahkan antara ~20.000 dan 250.000 rumah yang dilewati setiap tahun selama beberapa tahun terakhir. Investasi dalam perluasan jaringan diperkirakan akan terus berlanjut dengan para pemain utama mengumpulkan dana untuk penyebaran lebih lanjut.

### **Key Takeaway**

Karena permintaan untuk koneksi *bandwidth* tinggi tumbuh dan jaringan tembaga lama dihentikan, fiber menjadi cara yang lebih disukai untuk menyediakan konektivitas ke perusahaan dan rumah. Meskipun penyebaran dapat menjadi tantangan, pasar sangat kurang ditembus, menyisakan ruang untuk ekspansi yang signifikan dalam jumlah koneksi. Persaingan dari teknologi seluler baru juga kemungkinan akan terbatas dalam waktu dekat, memberikan pemasok infrastruktur fiber lapangan bermain yang menarik. Koneksi *broadband*, baik untuk segmen *enterprise* dan *retail*, diharapkan menjadi mesin pertumbuhan utama.

## **4. Dampak COVID-19 pada Sektor Telekomunikasi dan Usaha Perseroan**

Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbuan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbuan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat. Pengaturan kerja dari rumah dan sekolah di rumah, yang dapat bertahan pasca-Covid-19, juga dapat menambah permintaan untuk *broadband* tetap perumahan. Hal ini membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.

## 5. Prospek Industri dan Usaha Perseroan

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan sebuah prospek untuk Perseroan. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- a. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data (sumber: Analysis Mason Research, 2021).
- b. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km<sup>2</sup> dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata (sumber: Analysis Mason Research, 2021). Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia (sumber: Analysis Mason Research, 2021), sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence* (AI) maupun semakin meningkatnya *bisnis e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat *mobile* lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.
- d. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbuan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah (sumber: Analysis Mason Research, 2021). Himbuan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.
- e. Dengan kemajuan telekomunikasi di Indonesia dengan jaringan kabel optik yang semakin luas terutama di kota-kota besar, sehingga mengakibatkan tata ruang kota oleh banyaknya jaringan kabel optik udara melalui tiang-tiang menjadi terlihat tidak indah dan rapih, selain itu penempatan kabel serat optik dengan menggunakan tiang-tiang menyebabkan resiko kerusakan kabel menjadi lebih tinggi oleh karena tidak adanya infrastruktur yang melindungi kabel tersebut. Oleh karena itu, Perseroan berencana membangun Kerja Sama dengan beberapa Kota besar di Indonesia dalam Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi untuk proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan *U-ditch* (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf “U”) dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE *High-density polyethylene*) dan/atau media lainnya yang diputuskan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, yang mana prasarana pasif tersebut digunakan secara bersama-sama oleh pemilik kabel lainnya dengan beberapa syarat-syarat komersialnya yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat

optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang bersumber dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
<b>Ekuitas yang Dapat</b>			
<b>    Distribusikan kepada</b>			
<b>    Pemilik Entitas Induk</b>			
Modal saham			
Modal dasar	2.112.120.439.015	298.750.159.015	298.750.159.015
Tambah modal disetor	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi asset	345.024.461.741	431.812.510.351	104.324.191.232
Cadangan umum	59.750.031.803	59.750.031.803	25.000.000.000
Saldo laba	1.646.354.820.803	2.126.186.016.166	1.576.248.449.298
Komponen ekuitas lainnya	25.132.712.831	23.788.420.072	22.847.979.351
<b>    Jumlah ekuitas yang dapat</b>			
<b>    distribusikan kepada</b>			
<b>    Pemilik Entitas Induk</b>	4.185.852.377.281	2.937.757.048.495	2.024.640.689.984
<b>    Kepentingan Nonpengendali</b>	372.525.329.702	269.702.999.993	168.130.348.157
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.558.377.706.983</b>	<b>3.207.460.048.488</b>	<b>2.192.771.038.141</b>

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

### Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Perseroan Anak karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga yang ditawarkan Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum	Posisi ekuitas proforma pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>			
Modal saham			
Modal dasar	2.112.120.439.015	252.546.430.000	2.364.666.869.015
Tambahan modal disetor	(2.530.088.912)	747.537.432.800	745.007.343.888
Biaya Emisi	-	(18.771.788.851)	(18.771.788.851)
Surplus revaluasi asset	345.024.461.741	-	345.024.461.741
Cadangan umum	59.750.031.803	-	59.750.031.803
Saldo laba	1.646.354.820.803	-	1.646.354.820.803
Komponen ekuitas lainnya	25.132.712.831	-	25.132.712.831
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>4.185.852.377.281</b>	<b>981.312.073.949</b>	<b>5.167.164.451.230</b>
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>	<b>372.525.329.702</b>	<b>-</b>	<b>372.525.329.702</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.558.377.706.983</b>	<b>981.312.073.949</b>	<b>5.539.689.780.932</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, investor yang memperoleh saham dalam Penawaran Umum akan memiliki hak yang sama dan setara dengan pemegang saham eksisting Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen diambil melalui keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi. Kecuali ditentukan lain dalam RUPS, Perseroan dapat membagikan dividen setiap tahunnya dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba positif dan penggunaan laba bersih dalam jumlah tertentu telah disisihkan untuk cadangan. Pengumuman, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang, ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran dividen akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha di masa mendatang dan kondisi keuangan Perseroan, dan (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebelum tahun buku berakhir, dividen interim dapat dibagikan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diikutsertakan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah sebelumnya disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan. Apabila, setelah akhir tahun buku yang bersangkutan, Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tidak dikembalikan.

Dengan memperhatikan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud untuk mengumumkan pembagian dividen untuk disetujui oleh para pemegang saham setelah Perseroan memperoleh laba positif. Sepanjang Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, pembagian dividen akan dibayarkan dalam bentuk Rupiah. Pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal pencatatan memiliki hak penuh atas jumlah dividen yang disetujui, dengan tunduk pada pemotongan pajak Indonesia yang berlaku. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri atas saham akan dikenakan pemotongan pajak yang berlaku di Indonesia sebesar 20%. Untuk informasi lebih lanjut terkait perpajakan Indonesia.

Pada 2021 Perseroan melakukan pembagian dividen sejumlah Rp 1.964.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah) per lembar saham atau sejumlah Rp1.155.293.540.000 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah). Pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen diatas adalah PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi masing-masing sebesar Rp491.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dan Rp664.293.540.000 (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah).

Sampai dengan saat ini selain hal-hal yang telah disampaikan pada bab ini, Perseroan belum memiliki rencana untuk membagikan dividen di masa yang akan datang. Jumlah dividen dan kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan bergantung pada arus kas, laba ditahan, kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja, dan rencana investasi Perseroan di masa depan, serta batasan yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, undang-undang, atau persyaratan lainnya.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham**

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 (dengan tarif pajak 22 % untuk tahun fiskal 2020 dan seterusnya untuk pemegang saham perusahaan). Selanjutnya pendiri wajib melaporkan pilihannya kepada Direktur Jenderal Pajak dan pengurus bursa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dikecualikan dari Objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal dividen yang diterima diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh sementara selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh dengan tarif 10% dan wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh.

Lebih lanjut, terkait tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai par (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Form DGT;
- b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
- c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
- f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
- g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dalam Part II Form DGT dapat diganti dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan bahasa Inggris;
- b. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
  - 1) nama WPLN;
  - 2) tanggal penerbitan;
  - 3) tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
  - 4) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Dalam hal WPLN tidak menyampaikan form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memanfaatkan tariff P3B, maka tarif atas pemotongan pajak dividen yang dibayarkan kepada WPLN dikenai tariff sebesar 20% dari jumlah dividen yang dibayarkan.

## **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		Persentase
	Jumlah Saham	Rp	(%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
PT Sucor Sekuritas	1.545.429.700	611.990.161.200	61,19
PT BNI Sekuritas	980.034.600	388.093.701.600	38,81
<b>Total</b>	<b>2.525.464.300</b>	<b>1.000.083.862.800</b>	<b>100,00</b>

PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin adalah PT Sucor Sekuritas.

### Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 18 Juli 2022. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp368,- (tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa *bookbuilding*, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah).

Penetapan Harga Penawaran setiap saham juga mempertimbangkan hasil dari *bookbuilding* yang dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri bidang telekomunikasi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;

- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik** : **KAP Mirawati Sensi Idris (An Independent Member of Moore Global Network Limited)**

Intiland Tower Lantai 7  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 32  
 Jakarta 10220  
 Telepon : (021) 570 8111  
 Faksimili : (021) 570 8012

Nama Rekan : Ahmad Syakir  
 Nomor STTD : No. STTD.AP-100/PM.22/2018  
 Tanggal STTD : 5 Februari 2018  
 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik  
 Nomor IAPI : Institut Akuntan Publik Indonesia dengan No. Reg IAI 1903  
 Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

**Konsultan Hukum** : **Makes and Partners**  
 Menara Batavia, Lantai 7  
 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126  
 Jakarta 10220  
 Telepon : (021) 574 7181  
 Faksimili : (021) 574 7180

Nama Rekan : Iwan Setiawan, S.H.  
 Nomor STTD : STTD.KH 145/PM.2/2018  
 Tanggal STTD : 18 Mei 2018  
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.  
 Nomor Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia dengan No. Anggota: 200924

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang mengangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**Notaris** : **Aulia Taufani, SH.**  
Menara Sudirman Lantai 17D  
Jl. Jend. Sudirman Kav.60  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (021) 5289 2366  
Faksimili : (021) 520 4780

Nomor STTD : STTD.N-5/PM.22/2018  
Tanggal STTD : 27 Februari 2018  
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia  
Nomor Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719  
Tugas Pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

**Biro Administrasi Efek** : **PT Sinartama Gunita**  
Menara Tekno Lt. 7  
Jl. Fachrudin No. 19 Rt. 01 / Rw. 07  
Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10250

Izin Usaha : KEP-82/PM/1991  
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (BAE)  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan

yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

#### **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Bab ini mengungkapkan ringkasan hal-hal penting yang diatur dalam Anggaran Dasar Emiten dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu sebagaimana diubah secara keseluruhan dengan Akta No. 33/2022. Anggaran Dasar Emiten tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 dan POJK No. 15/2020 serta UUPT.

##### **A. Nama Dan Tempat Kedudukan**

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk.** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

##### **B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah konstruksi bangunan sipil, konstruksi khusus, perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, telekomunikasi, aktivitas jasa informasi, real estat, aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen dan aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama Perseroan antara lain:
  - i. **Konstruksi Sentral Telekomunikasi**, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;
  - ii. **Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan**, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;
  - iii. **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi**, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;
  - iv. **Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel**, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk

- pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum;
- v. **Internet Service Provider**, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet;
  - vi. **Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)**, mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi;
  - vii. **Jasa Interkoneksi Internet (NAP)**, mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet;
  - viii. **Jasa Multimedia Lainnya**, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya;
  - ix. **Aktivitas Pengolahan Data**, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*);
  - x. **Aktivitas Hosting dan YBDI**, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*);
  - xi. **Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial**, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* dan Fintech jasa pembayaran;

- xii. **Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa**, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- i. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
  - ii. **Aktivitas Call Centre**, mencakup usaha jasa *call center*, seperti *inbound call centre* (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; *outbond call centre* (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan.

### C. Permodalan

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah) terbagi atas 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing Saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 64,65% (enam puluh empat koma enam lima persen) oleh para pemegang saham sebesar Rp. 2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus Rupiah) atau sejumlah 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham.
3. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

- c. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
5. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
  - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
    - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
    - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
  - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama;
  - f. Ketentuan di atas berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan Obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang, sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus - disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar -wajib dilakukan dalam jangka paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 11 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

#### **D. Dividen Saham**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dalam hal setelah tahun buku berakhir, Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

#### **E. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

1. RUPS Perseroan terdiri dari:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi wajib menyampaikan:
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan RUPS.
  - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau.
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
  - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
    - alasan pendelegasian kewenangan; dan
    - kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
  - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

6. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
  - dilakukan dengan itikad baik;
  - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS Perseroan. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan dengan menggunakan:
  - e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
  - sistem yang disediakan oleh Perseroan;
8. Penyedia e-RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) merupakan :
  - Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK, atau
  - Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK;
9. Dalam hal RUPS secara elektronik diselenggarakan oleh:
  - a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh OJK; atau
  - b. Perseroan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS.
10. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib :
  - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan RUPS dan pemanggilan RUPS; dan
  - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
    1. Pimpinan RUPS;
    2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
    3. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
11. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.
12. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik dengan persetujuan OJK atau sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
14. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris, Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

15. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
16. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
17. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  - a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cumacuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
  - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

#### **F. Kuorum RUPS**

1. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
  - dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
  - dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
2. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS pada point 2 di atas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

5. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

#### **G. Direksi**

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lainnya yang menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 dan 9 Pasal ini;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

#### **H. Tugas dan Wewenang Direksi**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
  1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 apabila membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang menakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnyakerugian tersebut.
4. Direksi berwenang menjalankan pengurusan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk membuat dan/atau menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk nilai perjanjian di atas atau melebihi jumlah sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan;
  - b. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - c. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk melakukan pembelian atau pengambilalihan seluruh atau sebagian besar aset pihak lain;
  - d. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas aset-aset Perseroan yang melebihi jumlah atau nilai dan/atau yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris;
  - e. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan (Corporate Guarantee) atau untuk melakukan pembebanan jaminan atas aset-aset Perseroan, baik untuk menjamin pemenuhan kewajiban oleh Perseroan maupun pihak lain, termasuk tetap tidak terbatas pada pinjaman dalam rangka pembukaan fasilitas Letter of Credit;
  - f. Perseroan untuk melakukan segala bentuk corporate action, termasuk tetapi tidak erbatas pada akuisisi, penggabungan usaha (merger), divestasi dan pembentukan anak perusahaan;
  - g. Perseroan untuk melakukan penyertaan modal pada pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - h. Perseroan atau anak perusahaan untuk menerbitkan saham atau efek lain atau menyebabkan perubahan struktur permodalan perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada peningkatan atau pengurangan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan;
  - i. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menghapus piutang Perseroan pada suatu tahun buku yang melebihi jumlah sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan;
  - j. Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk melakukan merger, konsolidasi dan/atau akuisisi;
  - k. Perseroan dan/atau Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diputuskan dalam satu atau lebih Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

6. Perbuatan hukum melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang dibidang Pasar Modal.
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) trasaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuroum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama atau Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
11. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan

## **Rapat Direksi**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.
6. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
14. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Selain penyelenggaraan Rapat, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi

#### **I. Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Masa jabatannya berakhir atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
  - e. Dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.

### **Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
9. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.
10. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi batal.

11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

### **Rapat Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
14. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
17. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
18. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

## XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

### 1. Pemesanan Pembelian atas Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Sucor Sekuritas.

Penyampaian pemesanan pembelian atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)).

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- b) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- c) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik;

- c. Melalui perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perseroan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perseroan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) Pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

### **1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian pemesanan pembelian atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

## **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. *Single Investor Identification* ("SID");
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### 3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

## 6. Harga Dan Jumlah Efek

Sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

## 7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu 2 – 4 Agustus 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Agustus 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 3 Agustus 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 4 Agustus 2022	00.00 WIB – 12.00 WIB

## 8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui *Sistem Penawaran Umum Elektronik* harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 9. Tanggal Penjatahan

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Sucor Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Agustus 2022.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Partisipan Admin sekaligus Manajer Penjatahan akan melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin a. termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan berikut:
  - a) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

## B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15 /2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel dibawah ini.

### Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. (IPO $\leq$ Rp250 Miliar)	Min. (15% atau Rp20 M)	17,5%	20%	25%
II. (Rp250 Miliar < IPO $\leq$ Rp500 Miliar)	Min. (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15%	20%
III. (Rp500 Miliar < IPO $\leq$ Rp1 Triliun)	Min. (7,5% atau Rp50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV. (IPO > 1 Triliun)	Min. (2,5% atau Rp75 M)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana target dihimpun sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sejumlah Rp75.000.420.000,- (tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh ribu Rupiah) atau 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk Porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - (ii) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; danpenjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di poin a.(i), a.(ii) dan a.(iii) di atas dengan memperhatikan ketentuan penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No. 41/2020 (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut).

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2

## **10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id). Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu 2 – 4 Agustus 2022.

### **PARTISIPAN ADMIN**

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel.: (021) 8067 3000  
Fax.: (021) 2788 9288  
Email : [ib@sucorsekuritas.com](mailto:ib@sucorsekuritas.com)  
Website: [www.sucorsekuritas.com](http://www.sucorsekuritas.com)

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910, Indonesia  
Tel.: (62 21) 2554 3946  
Fax.: (62 21) 5793 6934  
Email : [ibdiv@bnisekuritas.co.id](mailto:ibdiv@bnisekuritas.co.id)  
Website: [www.bnisekuritas.co.id](http://www.bnisekuritas.co.id)

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel.: (021) 8067 3000  
Fax.: (021) 2788 9288  
Email : [ib@sucorsekuritas.com](mailto:ib@sucorsekuritas.com)  
Website: [www.sucorsekuritas.com](http://www.sucorsekuritas.com)

## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Kepada Yth.:

**PT Mora Telematika Indonesia Tbk.**

Gedung Grha 9

Jl. Penataran No. 9

Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng

Jakarta Pusat

**U.p.: Yth. Direksi**

**Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana PT Mora Telematika Indonesia Tbk.**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PM.2/2018 yang diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2018 atas nama Iwan Setiawan; dan STTD.KH-365/PM.223/2019 yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2019 atas nama Antonius Herri Setianto, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Mora Telematika Indonesia Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat Perseroan No. 010/MTI/PD-DIR/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 perihal Penunjukan Selaku Konsultan Hukum, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan hukum termasuk untuk melakukan uji tuntas terhadap aspek hukum atau *legal due diligence* (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**UTAH**") atas Perseroan, menyampaikan laporan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**LHUTAH**"), serta memberikan Pendapat Segi Hukum, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 2.525.464.300 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan dengan harga penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana sebesar Rp396,- (tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham ("**Harga Penawaran**") serta jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp1.000.083.862.800,- (satu triliun delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya disebut sebagai "**Saham-Saham**", dan penawaran umum perdana Saham-Saham selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Perdana**"). Saham-Saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Sesuai dengan Akta No. 33/2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan Surat Keputusan Direksi No. 011/MTI/PD-DIR/IV/2022 tanggal 11 April 2022, Perseroan mengadakan program alokasi saham kepada karyawan sebesar 0,247% (nol koma dua empat tujuh persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebesar 6.246.500 (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus) saham.

Penawaran Umum Perdana akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek yang namanya dan bagian penjaminannya telah dicantumkan di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 33 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 69 tanggal 13 April 2022, Addendum Kedua Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 28 tanggal 20 Mei 2022, Addendum Ketiga Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 112 tanggal 27 Juni 2022, Addendum Keempat Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 138 tanggal 30 Juni 2022, Addendum Kelima Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 17 tanggal 7 Juli 2022 dan Addendum Keenam dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 71 tanggal 20 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT BNI Sekuritas dan PT Sucer Sekuritas ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Seluruh Saham-Saham dan saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana akan dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI atas permohonan pencatatan saham yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI, sebagaimana ternyata dalam surat BEI Nomor S-03658/BEI.PP2/05-2022 tertanggal 10 Mei 2022.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana ("**Prospektus**"), setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham yang menjadi kewajiban Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, seluruh dana yang akan diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana akan digunakan untuk tujuan sebagai berikut:

- Sekitar 85% (delapan puluh lima persen) akan dipergunakan untuk Investasi, investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif serta pengembangan data center. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *inland cable*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastuktur. Backbone merupakan pembangunan jaringan backbone baik untuk *submarine cable* maupun *inland cable*. Saat ini Perseroan memiliki jaringan Backbone dari Jakarta – Singapura, yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable* yang melintasi sepanjang pulau Sumatera, yang disebut dengan Sumatera Backbone. Perseroan juga memiliki Backbone (*Inland Cable*) sepanjang pulau Jawa yang disebut dengan Java Backbone. Selain itu Perseroan juga memiliki Backbone dari Pulau Bali – Nusa Tenggara yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable*. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini akan digunakan untuk investasi pembangunan Backbone dan Access diluar jaringan yang ada serta *Ducting*, seperti rencana pembangunan *Submarine Cable* dan *Inland Cable* beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur di beberapa di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru. Perseroan belum dapat

mengungkapkan lebih rinci mengenai persentase investasi pada *Backbone, Access, Ducting, Data Center* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur karena saat ini masih dalam tahap perencanaan awal, dimana panjang kabel atau *Ducting* masih dapat berubah tergantung hasil *desktop study, inland, marine survey*. Dan rencana penggunaan dana Penawaran umum ini juga dipergunakan untuk akuisisi perusahaan baru dan penyertaan modal pada *Joint Venture Company*; dan

- Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha Perseroan (*General corporate purposes*), yaitu biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas "*branding*" dan promosi;

(seluruhnya disebut sebagai "**Rencana Penggunaan Dana**").

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini tidak mencukupi untuk memenuhi Rencana Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan yang diperoleh dari kegiatan operasi serta menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas perizinan Perseroan dan peraturan perundang-undangan terkait serta didukung dengan surat pernyataan Perseroan tertanggal 28 Juli 2022 ("**Pernyataan Perseroan**"), Perseroan telah memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk dapat merealisasikan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, yaitu Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dan Izin Penyelenggaraan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang keduanya berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dan apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan hukum serta Pernyataan Perseroan, tidak terdapat izin-izin material lainnya yang diperlukan untuk dapat merealisasikan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Sesuai dengan POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) di bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Penawaran Umum Perdana telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2022 yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 33/2022**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**"). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar perusahaan terbuka sebagaimana tercantum

dalam Akta No. 33/2022 telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) dengan Keputusan No. AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 21 Maret 2022, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0182075 tanggal 21 Maret 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana sebagian diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”) dengan No. AHU-0054493.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Maret 2022.

Akta No. 33/2022 menyetujui, (i) rencana Penawaran Umum Perdana dan pencatatan Saham-Saham di BEI, (ii) perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Mora Telematika Indonesia menjadi PT Mora Telematika Indonesia Tbk., (iii) perubahan klasifikasi atau seri saham Perseroan dari yang semula terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B, Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masingnya yang berbeda-beda menjadi seluruhnya saham biasa dan karenanya para pemegang saham Perseroan menyetujui penghapusan hak-hak khusus apapun yang sebelumnya melekat pada masing-masing klasifikasi atau seri saham dimaksud, (iv) perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, (v) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.015,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), yang akan terdiri dari 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham biasa atas nama, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan; (vi) rencana pengeluaran sebanyak-banyaknya 2.368.000.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) saham baru dari simpanan Perseroan yang akan diambil bagian oleh PT Smart Telecom, (vii) pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 11.547.104.500 (sebelas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) (“**Saham Baru**”), dimana (a) sebanyak-banyaknya 9.179.104.500 (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat ribu lima ratus) Saham Baru akan ditawarkan dengan Harga Penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau secara internasional di luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana, yang di dalamnya sudah termasuk program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) (“**Program ESA**”) sebanyak-banyaknya 0,25% (nol koma dua lima persen) saham dari Saham-Saham dalam Penawaran Umum Perdana atau sebesar 22.947.800 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) saham untuk dicatatkan di BEI; dan (b) sebanyak-banyaknya 2.368.000.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) saham biasa atas nama akan diambil bagian oleh PT Smart Telecom, (viii) pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI, (ix) pemberian Program ESA dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku, (x) penetapan PT Candrakarya Multikreasi sebagai pemegang saham Pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK

No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal (“**POJK 3/2021**”), serta (xi) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, serta penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan IX.J.1**”), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”).

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam pelaksanaan UTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Perdana yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Makes No. Ref.: 0311/LPSH/MP/IS/AH/CE/MT/sp/07/22 tanggal 28 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Mora Telematika Indonesia Tbk. sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum tersebut berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut “**Laporan Hasil Uji Tuntas**” atau “**LHUTAH**”) yang disampaikan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, dengan tembusan kepada OJK.

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat Makes No. Ref. 0287/PSH/MP/IS/AH/CE/MT/sp/07/22 tanggal 20 Juli 2022.

## **I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM**

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini.
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek perpajakan dengan mengingat Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan.
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut secara investigatif atas informasi-informasi serta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Entitas Anak (sebagaimana dirujuk dan didefinisikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun dalam LHUTAH) maupun atas fakta-fakta maupun pelaksanaan syarat dan/atau ketentuan sebagaimana tercantum dalam informasi-informasi maupun dokumen-dokumen tersebut. Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka pelaksanaan UTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Anak terkait rencana Penawaran Umum Perdana.

4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam Bagian III Pendapat Segi Hukum ini.
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), serta khusus untuk hal-hal di bawah ini:
  - a. anggaran dasar Perseroan dan Entitas Anak, hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
  - b. struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Entitas Anak, hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran kepada OJK yaitu tanggal 22 Maret 2022. Jika selama jangka waktu tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir,

hal mana adalah sesuai dengan Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.

6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran dan/atau aspek komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi Penawaran Umum Perdana maupun transaksi lainnya dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak merupakan pihak atau mempunyai kepentingan atau dimana harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak terikat atau terkait, (ii) aspek komersial dan/atau finansial terkait rencana dan/atau pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, (iii) aspek risiko-risiko usaha yang dapat diderita sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, serta (iv) harga penawaran Saham-Saham dalam Penawaran Umum Perdana.
7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik dalam bentuk lisan, tertulis maupun bentuk lainnya) diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, maupun atas sebagian atau seluruh hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH.

9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
10. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK.

## II. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana serta dengan memperhatikan Bagian I Pendapat Segi Hukum ini, serta dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam Bagian III Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 8 Agustus 2000, dibuat di hadapan Daniel P. M., S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-25621.HT.01.01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“**UUWDP**”) di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan TDP No. 090416415210 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Perseroan telah didirikan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 33/2022, yang menyetujui (i) rencana Penawaran Umum Perdana dan pencatatan Saham-Saham di BEI, (ii) perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Mora Telematika Indonesia menjadi PT Mora Telematika Indonesia Tbk., (iii) perubahan klasifikasi atau seri saham Perseroan dari yang semula terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B, Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masingnya yang berbeda-beda menjadi seluruhnya saham biasa dan karenanya para pemegang saham Perseroan menyetujui penghapusan hak-hak khusus apapun yang sebelumnya melekat pada masing-masing klasifikasi atau seri

saham dimaksud, (iv) perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, (v) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.015,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), yang akan terdiri dari 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham biasa atas nama, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan; (vi) rencana pengeluaran sebanyak-banyaknya 2.368.000.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) saham baru dari simpanan Perseroan yang akan diambilbagian oleh PT Smart Telecom, (vii) pengeluaran 11.547.104.500 (sebelas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dimana (a) sebanyak-banyaknya 9.179.104.500 (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat ribu lima ratus) saham akan ditawarkan dengan Harga Penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau secara internasional di luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana, yang di dalamnya sudah termasuk Program ESA untuk dicatatkan di BEI; dan (b) sebanyak-banyaknya 2.368.000.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) saham biasa atas nama akan diambil bagian oleh PT Smart Telecom, serta (ix) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, serta penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020, POJK 16/2020 dan POJK 33/2014.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020, POJK 16/2020 dan POJK 33/2014 serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum dan didukung dengan Pernyataan Perseroan, rencana pengeluaran sebanyak-banyaknya 2.368.000.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) saham baru dari simpanan Perseroan yang pada awalnya direncanakan akan diambilbagian oleh PT Smart Telecom dengan tunduk kepada persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta No. 33/2022, tidak akan dan tidak jadi dilaksanakan, yang mana salah satunya dikarenakan rencana pengeluaran saham-saham baru tersebut tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan saham-saham baru Perseroan kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana dan/atau harus tunduk kepada peraturan lainnya yang berlaku di pasar modal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan tidak memerlukan dilakukannya klarifikasi atas hal tersebut dalam RUPS yang akan datang, khususnya dikarenakan terdapat syarat-syarat dari para pemegang saham yang tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan, sehingga resolusi terkait di dalam Akta No. 33/2022 menjadi tidak dapat dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 33/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
- (i) Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI 42);
  - (ii) Konstruksi Khusus (Kode KBLI 43);
  - (iii) Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (Kode KBLI 46);
  - (iv) Telekomunikasi (Kode KBLI 61);
  - (v) Aktivitas Jasa Informasi (Kode KBLI 63);
  - (vi) Real Estat (Kode KBLI 68);
  - (vii) Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI 70); dan
  - (viii) Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (Kode KBLI 82).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- (i) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air (Kode KBLI 42206);
- (ii) Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan, yang mana mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil, dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawa tanah dan di dalam air (Kode KBLI 43212);
- (iii) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi. (Kode KBLI 46523);
- (iv) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan

teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI 61100);

- (v) Internet Service Provider, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet. (Kode KBLI 61921);
- (vi) Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP), mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 61923);
- (vii) Jasa interkoneksi internet (NAP), Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melelukkan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet (Kode KBLI 61924);
- (viii) Jasa Multimedia Lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya (Kode KBLI 61929);
- (ix) Aktivitas Pengelolaan Data, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*) (Kode KBLI 63111);
- (x) Aktivitas Hosting dan YBDI, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*) (Kode KBLI 63112);
- (xi) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang

mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dan Fintech jasa pembayaran (Kode KBLI 63122); dan

- (xii) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68111).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- (i) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (Kode KBLI 70209); dan
- (ii) Aktivitas *Call Centre*, mencakup usaha jasa *call center*, seperti *inbound call centre* (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; *outbond call centre* (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan (Kode KBLI 82200).

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagaimana

perizinan-perizinan yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu kegiatan usaha dengan konstruksi khusus dengan kode KBLI 43, real estat dengan kode KBLI 68, aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen dengan kode KBLI 70, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya dengan kode KBLI 82.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen- dokumen yang disampaikan kepada kami oleh Perseroan termasuk Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian III (Kualifikasi dan Observasi) huruf e Pendapat Segi Hukum ini) sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**").

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 33/2022, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.266.830.889.100,- (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ratus sembilan puluh satu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus ribu Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp2.112.120.439.100,- (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham;

Modal Disetor : Rp2.112.120.439.100,- (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

5. Berdasarkan Akta No. 33/2022 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana diuraikan dalam Angka 4 di atas adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100,00	%
<b>Modal Dasar</b>		<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>				
1.	PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000,00	45,71
2.	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100,00	33,78
3.	PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000,00	20,51
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>21.121.204.391</b>	<b>2.112.120.439.100,00</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>11.547.104.500</b>	<b>1.154.710.450.000,00</b>	

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan tercantum dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik tersebut dengan No. 00013/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 ("**Laporan Keuangan Desember 2021**") dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021 adalah PT Candrakarya Multikreasi.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**") adalah Farida Bau, yang telah dilaporkan pada tanggal 21 Juni 2022 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019.

6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 17 Maret 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0182075 tanggal 18 Maret 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0053960.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Maret

2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi  
Komisaris : Doktorandus Karim Panjaitan  
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

**Direksi**

Direktur Utama : Galumbang Menak  
Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK 33/2014.

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diatas berlaku sejak tanggal 18 Maret 2022 untuk jangka waktu sampai dengan 16 Maret 2027.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah mengangkat Henry Rumopa sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 143/MTI/PD-DIR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 026/MTI/PD-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 139/MTI/PD-DIR/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja  
Anggota : Drs. Mulyadi, M.Sc  
Anggota : Nenden Purwitasari

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dikepalai oleh Nurhayatul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 203/MTI/PD-DIR/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 142/MTI/PD-DIR/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan

Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2401/MTI/BOC/INT/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja  
Anggota : Indra Nathan Kusnadi  
Anggota : Farel Sumandar Valentino Sinaga

7. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan untuk Tahun Buku 2021 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2021 Perseroan tanggal 13 April 2022, yang telah diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki Izin-Izin Material sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dimana masing-masing Izin-Izin Material tersebut masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan Perseroan telah melakukan setiap kewajiban yang timbul atas kepemilikan Izin-Izin Material tersebut kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki Harta Kekayaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian III huruf e (Kualifikasi dan Observasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, berupa hak atas merek, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor serta mesin dan peralatan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak menjadi objek sengketa dalam suatu perkara pada lembaga peradilan dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di wilayah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara negatif material dan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku dan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas beberapa Harta Kekayaan Material sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, eksekusi atas Harta Kekayaan Material yang dibebani jaminan sebagaimana tersebut di atas dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan meskipun tidak akan berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, namun demikian Perseroan akan selalu melakukan hal-hal yang diperlukan sebagai pencegahan dan/atau mitigasi sebagaimana mestinya untuk meminimalisir dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan tersebut. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan tidak pernah mengalami hal-hal yang dapat menyebabkan Harta Kekayaan Material Perseroan yang menjadi jaminan dieksekusi oleh pihak ketiga manapun.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, pembebanan dengan jaminan atas beberapa Harta Kekayaan Material sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH telah dilakukan secara tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

10. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan: (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (“UUWLTK”); (b) berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 27 April 2023; (d) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta telah memenuhi kewajiban untuk membayar iuran BPJS Kesehatan untuk periode April 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode April 2022, Mei 2022 dan Juni 2022; dan (e) sehubungan dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Notifikasi tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atas nama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk mempekerjakan seluruh tenaga kerja asing yang dipekerjakannya dan masing-masing tenaga kerja asing tersebut juga telah memperoleh Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, Perseroan telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 1057 Tahun 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan tanggal 25 April 2022, yang masa kerja keanggotaannya berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan ini.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, Perseroan sedang dalam proses untuk melakukan

pelaporan UKL-UPL untuk setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai Laporan Pelaksanaan UKL-PKL Kegiatan Pemasangan Ducting untuk Jaringan Kabel Bawah Tanah di Kota Semarang Semester I Tahun 2022.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”), Perseroan dapat dikenakan sanksi atas kelalaian dan/atau pelanggaran pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan hidup, yaitu berupa pembatalan perizinan berusaha.

11. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas, yang dilakukan melalui penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perseroan terbatas dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
- a. PT Oxygen Multimedia Indonesia (“**OMI**”) secara langsung sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam OMI;
  - b. PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (“**OII**”) secara (i) langsung sebanyak 1 (satu) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan (ii) tidak langsung melalui OMI sebanyak 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam OII;
  - c. PT Palapa Ring Barat (“**PRB**”) secara langsung sebanyak 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp98.900.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan 98,9% (sembilan puluh delapan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PRB;
  - d. PT Palapa Timur Telematika (“**PTT**”) secara langsung sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah), yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PTT; dan
  - e. PT Indo Pratama Teleglobal (“**IPT**”) secara langsung sebanyak 145.730 (seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp7.286.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), yang merupakan 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam IPT,

(OMI, OII, PRB, PTT dan IPT selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Entitas Anak**”).

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan: (a) penyertaan Perseroan dalam

Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Entitas Anak dan UUPT; dan (b) saham milik Perseroan dalam Entitas Anak tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, selain atas saham IPT dan PRB yang sedang dijaminakan oleh Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Bank Mandiri**") dan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, penjaminan atas saham Perseroan dalam IPT dan PRB telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing Entitas Anak adalah perseroan terbatas yang didirikan secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak sebagaimana tercantum dalam masing-masing Anggaran Dasar Entitas Anak.

Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki penyertaan pada suatu perusahaan asing yang berkedudukan di Singapura, yaitu Moratel International Pte. Ltd. ("**MIPL**"), yaitu sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham yang merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MIPL sebagaimana ternyata dalam pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Allen & Gledhill dengan No. GDFOO/NTEHY/1022001776 tanggal 17 Maret 2022.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk berdasarkan surat pernyataan masing-masing Entitas Anak tertanggal 28 Juli 2022 ("**Pernyataan Entitas Anak**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak telah sesuai ruang lingkup kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam masing-masing Anggaran Dasar Entitas Anak dan Izin-Izin Material yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH Entitas Anak.

Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Entitas Anak yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan masing-masing Anggaran Dasar Entitas Anak sehubungan dengan penyesuaian redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak dengan KBLI 2020 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing Anggaran Dasar Entitas Anak.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing Anggaran Dasar Entitas Anak dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing Entitas Anak telah memiliki Izin-Izin Material yang telah diuraikan dalam LHUTAH Entitas Anak, sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini berdasarkan masing-masing Anggaran Dasar Entitas Anak, dimana masing-masing Izin-Izin Material tersebut masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan Entitas Anak telah melakukan setiap kewajiban yang timbul atas kepemilikan Izin-Izin Material tersebut kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan: (a) masing-masing Entitas Anak telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan UUWLTK; (b) berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) masing-masing Entitas Anak telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan; (d) masing-masing Entitas Anak telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta telah memenuhi kewajiban untuk membayar iuran BPJS Kesehatan untuk periode April 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode April 2022, Mei 2022 dan Juni 2022; dan (e) Entitas Anak telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Entitas Anak kepada Makes serta sebagaimana didukung dengan Pernyataan Entitas Anak, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Entitas Anak memiliki Harta Kekayaan Material yang dimiliki secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Entitas Anak serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas perizinan Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan terkait serta didukung dengan Pernyataan Entitas Anak, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pada lembaga peradilan dan/atau Badan Arbitrase Nasional (BANI) di wilayah negara Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Entitas Anak secara negatif material dan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Entitas Anak telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dari Entitas Anak dengan polis asuransi yang masih berlaku dan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali atas polis asuransi PTT yang telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Entitas Anak, Harta Kekayaan Material Entitas Anak tersebut tidak sedang diagunkan dengan jaminan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas beberapa Harta Kekayaan Material IPT, PRB dan PTT sebagaimana diuraikan secara rinci dalam

LHUTAH masing-masing IPT, PRB dan PTT.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan IPT, PRB dan PTT, dalam hal IPT, PRB dan PTT melakukan eksekusi terhadap Harta Kekayaan Material IPT, PRB dan PTT yang dibebani sebagai jaminan sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan IPT, PRB dan PTT, eksekusi atas Harta Kekayaan Material yang dibebani sebagai jaminan sebagaimana tersebut di atas dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha IPT, PRB dan PTT meskipun tidak akan berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha IPT, PRB dan PTT, namun demikian masing-masing dari IPT, PRB dan PTT akan selalu melakukan hal-hal yang diperlukan sebagai pencegahan dan/atau mitigasi sebagaimana mestinya untuk meminimalisir dampak terhadap kelangsungan usaha IPT, PRB dan PTT tersebut. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, IPT, PRB dan PTT tidak pernah mengalami hal-hal yang dapat menyebabkan Harta Kekayaan Material IPT, PRB dan PTT yang menjadi jaminan dieksekusi oleh pihak manapun.

12. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dalam kerangka menjalankan kegiatan usahanya dan sehubungan dengan Harta Kekayaan Material atas Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Perseroan ("**Perjanjian Material Perseroan**"). Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, (a) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) sehubungan dengan Perjanjian Material Perseroan yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan; dan (b) Perseroan secara material tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Material Perseroan dan Perjanjian Material Perseroan masih berlaku.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Material Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Perseroan yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana maupun hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan setelah efektifnya Penawaran Umum Perdana.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, perjanjian-perjanjian afiliasi yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak afiliasinya sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan dan Entitas Anak dan perjanjian-

perjanjian tersebut masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perjanjian-perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Perseroan dengan masing-masing PRB, PTT dan OMI, sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Entitas Anak, dibuat dengan itikad baik dan Perseroan mendukung keberlangsungan kegiatan usaha PRB, PTT dan OMI sehingga Perseroan tidak mengenakan biaya berupa pembayaran bunga atas pinjaman yang diberikannya kepada PRB, PTT dan OMI. Dengan mengingat hubungan antara Perseroan dengan PRB, PTT dan OMI yang merupakan satu grup usaha serta memperhatikan azas itikad baik, maka perjanjian – perjanjian pinjam meminjam tersebut secara hukum telah dibuat secara wajar dan dengan mengingat prinsip kebebasan berkontrak antara Perseroan dengan PRB, PTT dan OMI.

13. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Entitas Anak terkait telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dan sehubungan dengan Harta Kekayaan Material atas Entitas Anak sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Entitas Anak (“**Perjanjian Material Entitas Anak**”). Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Entitas Anak, (a) Entitas Anak terkait tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) sehubungan dengan Perjanjian Material Entitas Anak yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Entitas Anak terkait; dan (b) Entitas Anak terkait secara material tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Material Entitas Anak serta Perjanjian Material Entitas Anak masih berlaku.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Entitas Anak, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh masing-masing Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan, PRB, IPT dan PTT telah menandatangani dan/atau memperoleh fasilitas kredit sebagaimana diuraikan secara rinci dalam masing-masing LHUTAH Perseroan, PRB, IPT dan PTT (“**Perjanjian-Perjanjian Kredit**”).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan, PRB, IPT dan PTT telah memperoleh persetujuan dari krediturnya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana melalui surat yang diberikan oleh krediturnya dimana surat yang diberikan oleh kreditur tersebut mengikat para pihak dan setiap addendum yang sedang dilakukan oleh para pihak hanya bersifat administratif dan berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, akan diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pernyataan efektif diterima oleh Perseroan, dengan demikian surat yang diberikan oleh kreditur lah yang mengikat para pihak. Lebih lanjut, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian-perjanjian kredit yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak yang dapat merugikan hak pemegang saham publik, rencana Penawaran Umum Perdana dan Rencana Penggunaan Dana. Bahwa pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perjanjian-Perjanjian Kredit tersebut masih berlaku dan mengikat masing-masing Perseroan, PRB, IPT dan PTT.

15. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada kami termasuk atas Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, tidak terdapat somasi atau klaim yang diterima Perseroan dan Entitas Anak, yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan, Entitas Anak dan rencana Penawaran Umum Perdana.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 14 April 2022 ("**Pernyataan Direksi**") dan surat pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 14 April 2022 ("**Pernyataan Dewan Komisaris**"), anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak – baik dalam kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana Penawaran Umum Perdana.

16. Sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, Rencana Penggunaan Dana bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"). Selanjutnya, Perseroan menyatakan bahwa nilai dari belanja modal dan modal kerja yang akan dilakukan dengan menggunakan Rencana Penggunaan Dana diperkirakan tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Desember 2021 yang digunakan oleh Perseroan untuk Penawaran Umum Perdana. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan belanja modal dan modal kerja tersebut bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sehingga Perseroan tidak perlu memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020. Dalam hal kedepannya pelaksanaan dari Rencana Penggunaan Dana merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan atau transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, antara lain yaitu, (i) wajib mengumumkan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan atau transaksi material

tersebut kepada masyarakat dan dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi tersebut, (ii) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, (iii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi serta memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan).

17. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 33 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 69 tanggal 13 April 2022, Addendum Kedua Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 28 tanggal 20 Mei 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 112 tanggal 27 Juni 2022, Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 138 tanggal 30 Juni 2022, Addendum Kelima Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 17 tanggal 7 Juli 2022 dan Addendum Keenam dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 71 tanggal 20 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
  - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 45, tanggal 22 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 68 tanggal 13 April 2022, Addendum Kedua Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 16 tanggal 7 Juli 2022 dan Addendum Ketiga Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 72 tanggal 20 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia. Lebihlanjut, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana diuraikan dalam huruf a di atas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan dan Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

### III. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

#### Asumsi

- a. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan dan/atau konfirmasi oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak termasuk berdasarkan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, dimana disebutkan bahwa: (a) dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan oleh Perseroan dan Entitas Anak secara tepat, benar, akurat dan tidak menyesatkan dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini, dan (b) dalam hal menurut pendapat Perseroan dan/atau Entitas Anak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes dan karenanya tidak diterima atau tidak diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat, tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan/atau menyesatkan.
- b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa: (a) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (b) dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan (c) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak- pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.
- c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan, Pernyataan Entitas Anak, Pernyataan Direksi dan Pernyataan Dewan Komisaris) untuk melaksanakan UTAH serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Entitas Anak maupun atas maksud dan tujuan Perseroan dan Entitas Anak, struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak, susunan pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, Izin-Izin Material Perseroan dan Entitas Anak, Harta Kekayaan Material Perseroan dan Entitas Anak, Perjanjian Material Perseroan dan/atau Perjanjian Material Entitas Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH masing-

masing Perseroan dan Entitas Anak maupun Pendapat Segi Hukum ini.

- d. Pendapat Segi Hukum ini diperkuat antara lain dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan serta wakil-wakil Perseroan (termasuk Pernyataan Perseroan, Pernyataan Entitas Anak, Pernyataan Direksi dan Pernyataan Dewan Komisaris), dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, akurat, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.
- e. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan database yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan suatu pihak dalam suatu perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan maupun Entitas Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian material) maupun pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada, untuk maupun atas nama Perseroan dan Entitas Anak atau yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan maupun Entitas Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan (termasuk Izin-Izin Material), persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen tersebut kepada Perseroan, Entitas Anak dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
- g. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan atau Entitas Anak merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan atau Entitas Anak yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.

### **Kualifikasi dan Observasi**

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad

baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus mengenai Risiko Usaha maupun bagian-bagian terkait lainnya dari Prospektus.
- c. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat keterbukaan-keterbukaan sebagaimana tercantum atau diuraikan dalam Prospektus (termasuk namun tidak terbatas pada keterbukaan sebagaimana tercantum dalam Bab VI (Faktor Risiko) Prospektus.
- d. Bahwa sebagaimana disyaratkan dan diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, beberapa pendapat segi hukum yang terdapat dalam Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan bergantung dan didasarkan pada Pernyataan Perseroan, Pernyataan Entitas Anak serta Pernyataan Direksi dan Pernyataan Dewan Komisaris, termasuk Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam butir 14 bagian II Pendapat Segi Hukum ini.
- e. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Izin-Izin Material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha faktual yang dijalankan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak (sebagaimana relevan).
- f. Masing-masing Perseroan dan Entitas Anak telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan: (a) perjanjian-perjanjian di mana Perseroan maupun Entitas Anak merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Material Perseroan, Perjanjian Material Entitas Anak serta perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH); (b) perizinan dan/atau persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, maupun yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan maupun Entitas Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH), (c) Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Entitas Anak, dan (d) peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPS Perseroan maupun Entitas Anak serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan, maupun Entitas Anak sejak Perseroan maupun Entitas Anak didirikan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan maupun Entitas Anak yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Entitas Anak) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Seluruh keputusan-

keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPS tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan maupun Entitas Anak.

- h. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**Mahkamah Konstitusi**”) mengeluarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (“**Putusan MK 91/2020**”) dengan putusan penting yang mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan UU Cipta Kerja. Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 (“**Periode Perbaikan**”). Namun, UU Cipta Kerja harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja akan dianggap “tidak konstitusional permanen” pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja.

Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Masa Perbaikan.

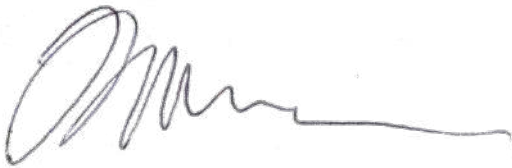
Meskipun demikian, tidak ada kepastian bahwa: (a) pemerintah dan parlemen akan dapat memperbaiki dan mengubah UU Cipta Kerja dalam Masa Perbaikan, atau (b) jika pemerintah atau parlemen akan memiliki pemahaman yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan terkait UU Cipta Kerja yang harus diubah atau diperbaiki, atau (c) Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang dikeluarkan berdasarkan atau sesuai dengan UU Cipta Kerja (termasuk semua izin usaha terkait dokumen yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan untuk Perseroan sesuai dengan hal tersebut) karena Putusan MK 91/2020 tidak mengatur tentang hal tersebut, atau (d) publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan uji materi terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang sudah ada selama Periode Perbaikan; atau (e) pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi serupa dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang “bersifat strategis dan berdampak luas”, yang harus ditangguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja. Selain itu, jika UU Cipta Kerja akan dianggap “tidak konstitusional permanen” pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan, maka semua peraturan perundang-undangan yang diubah, dicabut dan/atau diganti dengan UU Cipta Kerja dianggap secara otomatis tidak berlaku lagi. dipulihkan dan akan kembali memiliki keberlakuan dan efek penuh

- i. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini, karena sebab apapun dan dalam kondisi apapun, tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang

terkait dengan pajak.

- j. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik, data industri maupun aspek-aspek lain di luar aspek hukum.
- k. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- l. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan khusus dan terbatas dalam rangka Penawaran Umum Perdana, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya dan demi hukum apabila rencana Penawaran Umum Perdana karena sebab apapun tidak terlaksana.
- m. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,  
Untuk dan atas nama  
**Makes & Partners Law Firm**



---

**Iwan Setiawan, S.H.**  
*Senior Partner*

**Tembusan:**

Kepada:  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3  
Kompleks Departemen Keuangan R.I  
Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710  
Jakarta Pusat

**U.p. Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan**

## **XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

# **PT Mora Telematika Indonesia dan Entitas Anak/*and Its Subsidiaries***

Laporan Keuangan Konsolidasian/  
*Consolidated Financial Statements*  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 /  
*For the Years Ended*  
*December 31, 2021, 2020 and 2019*

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**  
**DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

---

	<u>Halaman/ Page</u>
<b>Laporan Auditor Independen/Independent Auditor's Report</b>	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia dan Entitas Anak Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019/ <i>The Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Mora Telematika Indonesia and Its Subsidiaries for the Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019</i>	
<b>LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019</b>	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>	6
<b>Lampiran/Attachments</b>	
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Financial Position Parent Entity</i>	i.1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	i.3
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Changes in Equity</i>	i.4
Laporan Arus Kas Entitas Induk/ <i>Parent Entity Statements of Cash Flows</i>	i.5

**Laporan Auditor Independen****No. 000743/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/VI/2022****Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi****PT Mora Telematika Indonesia Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

***Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

***Tanggung jawab auditor***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Independent Auditors' Report****No. 000743/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/VI/2022****The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors****PT Mora Telematika Indonesia Tbk**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

***Management's responsibility for the financial statements***

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

***Auditors' responsibility***

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Hal lain**

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Mora Telematika Indonesia Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan entitas induk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas induk, laporan perubahan ekuitas entitas induk, dan laporan arus kas entitas induk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00642/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/V/2022 bertanggal 19 Mei 2022 atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum dilakukan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terlampir oleh Perusahaan dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 50 atas laporan keuangan konsolidasian.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### **Opinion**

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Mora Telematika Indonesia Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

### **Other Matter**

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Mora Telematika Indonesia Tbk (parent entity), which comprise the parent entity statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and the parent entity statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. 00642/2.1090/AU.1/06/0153-1/1/V/2022 dated May 19, 2022 on the consolidated financial statements as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended, prior to the reissuance by the Company of the accompanying consolidated financial statements with several changes and additional disclosure as described in Note 50 to the consolidated financial statements.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal Indonesia serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely in connection with the proposed Initial Public Offering in Capital Market in Indonesia and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir  
Izin Akuntan Publik No. AP.0153/  
*Certified Public Accountant License No. AP.0153*

23 Juni 2022/*June 23, 2022*



00743

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019**

**DIRECTOR'S STATEMENT  
REGARDING  
THE RESPONSIBILITY FOR THE  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019**

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK/  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/Name  
Alamat Kantor/Office Address  
  
Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu  
Identitas lain/Residential Address  
*/in accordance with Personal Identity Card*  
Nomor Telepon/Telephone Number  
Jabatan/Title

: Ir. Galumbang Menak  
: Grha 9, Jl. Penataran No. 9 Menteng,  
Jakarta Pusat 10320  
: Jl. Denpasar Barat Blok C-6/18,  
Jakarta Selatan  
: 021-31998600  
: Direktur Utama / *President Director*

2. Nama/Name  
Alamat Kantor/Office Address  
  
Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu  
Identitas lain/Residential Address  
*/in accordance with Personal Identity Card*  
Nomor Telepon/Telephone Number  
Jabatan/Title

: Jimmy Kadir  
: Grha 9, Jl. Penataran No. 9 Menteng,  
Jakarta Pusat 10320  
: Jl. Gading Elok Timur V  
RT 011 RW 009, Kelapa Gading Timur,  
Jakarta Utara  
: 021-31998600  
: Wakil Direktur Utama / *Vice President Director*

menyatakan bahwa:

State that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan  
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019.
2. The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's consolidated financial statements, and  
b. The Company consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

23 Juni 2022/June 23, 2022



**Ir. Galumbang Menak**  
Direktur Utama/*President Director*

**Jimmy Kadir**  
Wakil Direktur Utama / *Vice President Director*

PT. Mora Telematika Indonesia

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	5	1.058.195.935.019	484.777.973.772	1.432.184.203.492	Cash and cash equivalents
Aset pengampunan pajak	4	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Tax amnesty assets
Piutang usaha	6				Trade accounts receivable
Pihak berelasi	41	79.139.002.676	5.972.229.739	2.662.085.347	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 37.583.659.725, Rp 13.431.188.627 dan Rp 12.139.756.573 Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019		343.086.673.252	380.055.126.311	365.489.488.383	Third parties - net of allowance for impairment of Rp 37,583,659,725, Rp 13,431,188,627 and Rp 12,139,756,573 as of December 31, 2021, 2020 and 2019 respectively
Piutang lain-lain		18.468.239.621	8.425.879.616	12.096.550.469	Other accounts receivable
Bagian piutang konsesi jasa yang jatuh tempo dalam setahun	7	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	Current portion of service concessions receivable
Uang muka	8	72.089.158.670	12.018.186.704	33.367.942.282	Advances
Biaya dibayar dimuka	9	100.285.225.550	102.262.439.098	76.569.478.392	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	10	134.368.931.143	218.807.271.471	276.773.611.236	Prepaid taxes
Aset yang dibatasi penggunaannya	11	32.148.574.941	-	-	Restricted assets
Aset lancar lain-lain	16	97.583.587.625	40.019.649.662	24.678.441.461	Other current assets
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>3.442.650.387.617</b>	<b>2.779.603.714.290</b>	<b>3.730.068.559.985</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NONCURRENT ASSETS</b>
Aset yang dibatasi penggunaannya	11	3.644.187.725	5.203.308.285	5.904.094.734	Restricted assets
Investasi	12	-	-	-	Investments
Piutang konsesi jasa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	7	4.541.712.843.560	4.805.930.010.713	4.885.198.283.185	Service concession receivable - net of current portion;
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 721.268.881.783, Rp 156.430.889.561 dan Rp 763.833.897.971 Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	13	5.281.794.870.312	5.580.472.613.002	4.035.548.371.044	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 721,268,881,783, Rp 156,430,889,561 and Rp 763,833,897,971 as of December 31, 2021, 2020, and 2019 respectively
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 668.221.526, Rp 536.768.111 dan Rp 405.314.696 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	4	2.252.865.474	2.384.418.888	2.515.872.304	Tax amnesty assets - net of accumulated depreciation of Rp 668,221,526, Rp 536,768,111 and Rp 405,314,696 as of December 31, 2021, 2020 and 2019 respectively
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 9.636.889.245, Rp 6.348.558.546 dan Rp 5.352.578.476 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	15	7.364.203.492	734.640.030	190.784.834	Intangible assets - net of accumulated amortization of Rp 9,636,889,245, Rp 6,348,558,546 and Rp 5,352,578,476 as of December 31, 2021, 2020, and 2019 respectively
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 102.684.804.048 dan Rp 58.866.842.937 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	14	144.173.481.642	163.479.750.575	-	Right-of-use assets - net of accumulated depreciation of Rp 102,684,804,048 and Rp 58,866,842,937 as of December 31, 2021 and 2020, respectively
Aset pajak tangguhan	37	9.284.043.987	4.044.727.261	7.250.865.308	Deferred tax assets
Aset lain-lain	16	132.524.635.159	73.659.039.539	26.265.065.487	Other assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>11.122.751.010.461</b>	<b>10.615.918.806.294</b>	<b>9.065.871.336.896</b>	<b>Total Noncurrent Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>14.565.401.098.078</b>	<b>13.395.522.520.584</b>	<b>12.795.937.896.881</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	17				Trade accounts payable
Pihak berelasi	41	13.872.719.930	14.260.920.100	6.005.330.539	Related parties
Pihak ketiga		1.132.948.416.088	678.973.019.341	605.694.751.292	Third parties
Utang lain-lain	18				Other accounts payable
Pihak berelasi	41	6.900.000	3.774.000	34.907.117	Related parties
Pihak ketiga		89.334.175.024	112.673.177.534	116.453.885.870	Third parties
Utang pajak	19	27.883.905.643	16.693.831.960	28.549.539.781	Taxes payable
Beban akrual		99.990.940.519	70.345.694.169	38.169.028.516	Accrued expenses
Uang muka penjualan	20	2.399.196.269	2.540.358.809	26.350.848.981	Advances from customers
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.					Current portion of long-term liabilities:
Utang bank	23	1.164.750.861.401	954.401.804.443	1.780.478.321.040	Bank loans
Utang obligasi	25	458.861.999.070	-	537.996.897.073	Bonds payable
Sukuk ijarah	26	348.332.585.824	-	-	Sukuk ijarah
Liabilitas sewa	24	49.054.755.284	48.421.582.510	19.286.814.917	Lease liabilities
Utang non-bank	22	20.094.690.773	11.270.769.682	13.482.391.473	Non-bank loans
Pendapatan ditangguhkan	21	28.635.826.669	23.204.325.364	24.858.597.797	Deferred income
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>3.434.468.972.634</b>	<b>1.932.789.258.012</b>	<b>3.178.349.312.376</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NONCURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha - pihak ketiga	17	190.535.191.524	575.754.822.578	62.630.784.684	Trade account payable - third parties
Liabilitas pajak langgahan	37	28.754.761.286	40.842.406.896	2.090.170.498	Deferred tax liabilities
Uang muka penjualan	20	222.925.888.194	405.507.785.550	135.809.718.725	Advances from customers
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank	23	3.944.836.394.413	3.960.295.413.884	4.581.859.827.918	Bank loans
Utang obligasi	25	-	457.840.131.932	456.931.511.211	Bonds payable
Sukuk ijarah	26	1.809.992.237.827	1.655.230.739.572	991.684.251.202	Sukuk ijarah
Liabilitas sewa	24	86.780.826.098	107.227.138.019	69.829.464.033	Lease liabilities
Utang non-bank	22	36.536.276.533	10.719.694.360	21.872.415.668	Non-bank loans
Pendapatan ditangguhkan	21	164.873.032.574	106.920.082.879	111.872.251.761	Deferred income
Utang kepada pemegang saham	27	-	844.408.372.000	844.408.372.000	Shareholder loan
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	38	110.321.710.204	90.526.628.604	66.028.777.693	Long-term employee benefits liability
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>6.572.556.418.481</b>	<b>8.255.273.214.084</b>	<b>7.424.817.546.364</b>	<b>Total Noncurrent Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>10.007.025.391.095</b>	<b>10.188.062.472.096</b>	<b>10.603.166.858.740</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>					<b>Equity Attributable to Owners of the Parent Company</b>
<b>Modal Saham</b>					<b>Capital Stock</b>
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham seri A, 338.235 saham seri B dan 764.480 saham seri C pada tanggal 31 Desember 2021					Authorized, issued and paid-up - 250,000 series A shares, 338,285 series B shares and 764,480 series C shares as of December 31, 2021
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham seri A dan 338.235 saham seri B pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	29	2.112.120.439.015	298.750.159.015	298.750.159.015	Authorized, issued and paid-up - 250,000 series A shares and 338,285 series B shares as of December 31, 2020 and 2019
Tambahan modal disetor	30	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	Additional paid-in capital
Surplus revaluasi aset		345.024.461.741	431.812.510.351	104.324.191.232	Revaluation surplus of property and equipment
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	39	59.750.031.803	59.750.031.803	25.000.000.000	Appropriate
Belum ditentukan penggunaannya		1.846.354.820.803	2.128.186.016.166	1.576.248.449.298	Unappropriate
Komponen ekuitas lainnya		25.132.712.831	23.788.420.072	22.847.978.351	Others equity component
<b>Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>		<b>4.185.852.377.281</b>	<b>2.937.757.048.495</b>	<b>2.024.640.689.984</b>	<b>Total Equity Attributable to Owners of the Parent Company</b>
<b>Kepegantingan Nonpengendali</b>	31	372.625.329.702	269.702.999.993	166.130.348.157	<b>Non-controlling Interest</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>4.558.477.706.983</b>	<b>3.207.460.048.488</b>	<b>2.190.771.038.141</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>14.565.401.098.078</b>	<b>13.395.522.520.584</b>	<b>12.793.937.896.881</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
PENDAPATAN	32	4.180.073.066,155	3.765.688.134,794	4.062.381.551,751	REVENUES
BEBAN LANGSUNG	33	(1.642.782.788,475)	(1.288.520.781,590)	(2.131.216.384,641)	DIRECT COSTS
LABA KOTOR		2.537.290.279,680	2.477.167.353,204	1.931.165.158,910	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	34	(993.288.500,198)	(905.750.867,916)	(595.939.695,576)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		1.543.991.779,484	1.571.416.885,288	1.335.225.461,332	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (EXPENSES)
Penghasilan bunga		14.880.608,236	6.044.748,541	27.305.808,455	Interest income
Laba (rugi) selisih kurs - bersih		4.383.672,982	(6.483.527,389)	1.753.620,882	Gain (loss) on foreign exchange - net
Rugi pelepasan aset tetap	13	(249.118,437)	(26.775,755)	(73.715,924)	Loss on disposal of property and equipment
Beban bunga dan keuangan	35	(774.095.787,685)	(816.953.925,267)	(698.107.558,682)	Interest expense and financial charges
Lain-lain bersih	36	12.585.947,803	32.986.071,772	191.789.866,531	Others - net
Beban Lain-Lain - Bersih		(742.414.677,101)	(782.413.428,098)	(475.331.680,938)	Other Expenses - Net
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN		801.577.102,383	789.003.277,190	859.893.480,394	PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX
Beban pajak final		(2.803.021,495)	8.428.718,103	11.873.735,387	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		788.774.080,888	780.574.561,087	848.019.744,007	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK	37				TAX EXPENSE
Pajak kini		125.037.144,219	95.188.745,184	81.428.362,483	Current tax
Pajak tangguhan		(7.641.666,526)	5.728.240,463	90.541.288,125	Deferred tax
Beban Pajak - Bersih		117.395.477,693	100.896.985,647	171.969.650,608	Tax Expense - Net
LABA TAHUN BERJALAN		671.378.603,195	679.677.575,440	676.050.093,399	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	13	-	377.262.681,230	-	Gain on revaluation of property and equipment
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	37	7.781.051,155	(37.725.268,123)	-	Deferred tax of revaluation assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	38	3.047.243,628	(6.931.953,262)	(12.759.760,988)	Remeasurement of defined benefit liability
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	37	(788.971,406)	1.496.134,341	2.999.939,100	Tax relating to remeasurement of defined benefit liabilities
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will be reclassified subsequently to profit and loss
Selisih kurs penerjemahan kegiatan usaha luar negeri		1.344.292,759	940.440,721	(3.448.655,747)	Exchange difference on translation of foreign operation
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK		11.383.618,136	335.041.034,907	(13.206.477,635)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		682.762.219,331	1.014.718.610,347	662.843.615,764	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		578.928.827,717	578.003.431,371	591.495.494,441	Owners of the Parent Company
Keperwakilan non-pengendali	31	92.449.775,478	101.674.144,069	84.554.598,958	Non-controlling interests
		671.378.603,195	679.677.575,440	676.050.093,399	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: distribusikan kepada:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		590.018.588,786	913.116.358,611	578.843.815,708	attributable to:
Keperwakilan non-pengendali	31	92.743.630,545	101.602.251,836	83.999.800,056	Owners of the Parent Company Non-controlling interests
		682.762.219,331	1.014.718.610,347	662.843.615,764	
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM Dasar	40	119	183	187	EARNING PER SHARE FROM PROFIT FOR THE YEAR Basic

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Catatan/Notes	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Ekuitas Instrum Equity Attributable to Owners of the Parent Company									
	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Modal Disertaan/ Additional Paid-in Capital	Reservasi Reservasi	Komponen Ekuitas Lainnya/ Others Equity Components	Sisa Laba Ditahan/ Yang Didukung/ Penggunaan/ Aprovokasi	Dewan Direksi/ Pengawasan/ Gubernur/Supervisor	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	Kepentingan Non-Parenting/ Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
	298.750.159.015	(2.530.088.912)	127.652.880.967	26.234.835.398	-	955.829.288.106	1.448.795.874.276	84.205.224.706	1.500.000.098.982	Balance as of January 1, 2019
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	-	881.195.484.441	391.495.494.441	84.534.588.946	678.030.083.389	Comprehensive income Profit for the year
Bekal kompensasi pensiun Bekal kompensasi kesehatan untuk hari tua Pengukuran kembali liabilitas angsuran kerja Jangka panjang/bekal	-	-	(9.448.853.717)	-	-	(3.448.853.717)	(3.448.853.717)	-	(3.448.853.717)	Other comprehensive income (loss) Exchange difference on translation of foreign operation Remeasurement of long-term employee benefits liability - net
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	(9.448.853.717)	-	-	877.546.630.689	(3.448.853.717)	-	(3.448.853.717)	Total comprehensive income
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	22.847.878.851	-	-	1.577.818.728.563	2.024.840.689.964	189.203.024.792	2.192.843.714.746	Transfer from surplus revaluation to retained earnings
Transfer dengan pemfak Debit dan kredit aset non produktif Pembentukan cadangan umum	-	-	(20.328.888.725)	-	-	23.120.688.735	-	(72.675.605)	(72.675.605)	Transfers with owners Dividends from subsidiary to non-controlling interest Appropriation for general reserve
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	298.750.159.015	(2.530.088.912)	127.652.880.967	26.234.835.398	-	955.829.288.106	1.448.795.874.276	84.205.224.706	1.500.000.098.982	Balance as of December 31, 2019
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan	-	-	324.324.199.739	-	-	25.300.000.000	2.024.840.689.964	189.203.024.792	2.192.843.714.746	Comprehensive income Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain Laba tahun berjalan	-	-	338.536.413.167	-	-	(5.983.902.688)	(4.363.395.668)	(71.892.233)	(5.435.818.921)	Other comprehensive income (loss) Gain of asset revaluation net of tax Exchange difference on translation of foreign operation Remeasurement of long-term employee benefits liability - net
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba Transfer ke rekening pemfak Denda dan denda aset non produktif Pembentukan cadangan umum	-	-	(12.044.093.888)	-	-	12.048.093.888	-	(29.850.000)	(29.850.000)	Transfer from surplus revaluation to retained earnings Transfers with owners Dividends from subsidiary to non-controlling interest Appropriation for general reserve
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	338.536.413.167	-	-	27.314.191.200	(4.363.395.668)	(71.892.233)	(5.435.818.921)	Total comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	298.750.159.015	(2.530.088.912)	431.872.310.351	21.788.420.072	-	2.386.198.018.186	2.024.752.048.485	269.702.889.393	2.207.860.048.488	Balance as of December 31, 2020
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	849.978.837.717	578.828.827.317	92.445.775.478	671.378.603.195	Comprehensive income Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain Denda pajak atas revaluasi aset tetap Denda pajak pendapatan kegiatan usaha dan kegiatan Pengukuran kembali liabilitas angsuran kerja jangka panjang/bekal	-	-	7.781.051.145	-	-	1.344.292.759	7.781.051.145	-	7.781.051.145	Other comprehensive income Tax effect of revaluation property and equipment Exchange difference on translation of foreign operation Remeasurement of long-term employee benefits liability - net
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	7.781.051.145	-	-	1.344.292.759	7.781.051.145	-	7.781.051.145	Total comprehensive income
Kepentingan non-parenting dan saham entitas anak	-	-	7.781.051.145	-	-	1.344.292.759	7.781.051.145	-	7.781.051.145	Non-controlling interest from acquisition of a subsidiary
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba Transfer dengan pemfak Pembentukan cadangan umum Dividen dari entitas anak non-parenting	-	-	(94.863.098.765)	-	-	94.568.088.765	-	(46.080.000)	(46.080.000)	Transfer from surplus revaluation to retained earnings Transfers with owners Issuance of shares of stock Dividends from subsidiary to non-controlling interest
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	2.112.122.439.015	(2.530.088.912)	345.024.467.741	25.132.717.811	-	1.948.354.320.803	4.188.882.377.281	372.526.233.702	4.568.377.708.983	Balance as of December 31, 2021

Unit catatannya adalah laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Note	2021	2020	2019	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan		4.547.261.071.132	4.283.756.296.516	2.370.410.365.766	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(1.864.410.405.702)	(1.418.301.926.655)	(609.780.156.745)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(378.140.442.747)	(322.924.126.428)	(273.785.542.337)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan dari operasi bersih		2.304.730.222.683	2.542.530.243.433	1.486.844.666.684	Net cash generated from operations
Penerimaan dari pengembalian pajak	10	141.563.967.502	157.384.652.974	57.271.918.248	Cash receipt from tax refund
Penerimaan bunga		15.203.804.882	8.044.887.544	27.280.117.346	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan		(118.777.535.917)	(92.833.698.681)	(62.352.817.516)	Income tax paid
Pembayaran bunga dan beban keuangan		(726.876.317.038)	(750.950.274.483)	(615.821.966.219)	Interest and financial charges paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		1.615.844.132.112	1.864.175.810.787	893.221.918.539	Net Cash Provided by Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Arus kas masuk bersih pada tanggal akuisisi - setelah dikurangi pembayaran untuk akuisisi entitas anak	1b	2.243.001.233	-	-	Net cash in flow at acquisition date - net of cash balance of acquired subsidiary
Pencairan deposito		4.166.576.631	-	-	Withdrawal of restricted deposits
Pembayaran uang muka		-	(58.994.341.496)	(959.532.265.884)	Advance payment
Perolehan aset takberwujud	15	(4.227.929.947)	(1.540.136.266)	-	Acquisitions of intangible assets
Penempatan deposito		(33.004.042.765)	-	-	Placement of deposits
Pembayaran bunga dan biaya - biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap	13	(42.925.277.176)	(27.196.275.579)	(19.754.874.340)	Interest paid and other expense capitalized to property and equipment
Perolehan aset lain-lain		(354.173.978.266)	(138.319.799.925)	(99.153.388.934)	Acquisitions of other assets
Perolehan aset tetap		(1.002.905.786.623)	(1.139.694.788.165)	(1.765.189.035.634)	Acquisitions of property and equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(1.430.828.437.913)	(1.366.045.341.431)	(2.843.629.584.782)	Net Cash Used in Investing Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari:					Proceeds from:
Saluran modal	29	1.813.370.280.000	-	-	Paid in capital
Utang bank	23	1.093.446.423.074	240.000.000.000	2.107.881.073.175	Bank loans
Penerbitan sukuk	26	500.000.000.000	886.515.000.000	1.000.000.000.000	Issuance of sukuk ijarah
Utang non-bank		53.715.826.646	-	-	Non-bank loans
Pembayaran:					Payment of:
Utang non-bank	22	(19.639.949.088)	(14.091.003.490)	(67.247.624.396)	Non-bank loans
Liabilitas sewa		(29.675.052.297)	(19.903.983.838)	(17.201.666.860)	Lease liabilities
Utang pemegang saham	27	(844.408.372.000)	-	-	Shareholder loan
Utang bank	23	(1.032.950.077.254)	(1.767.216.363.954)	(386.127.660.382)	Bank loans
Dividen		(1.155.332.640.000)	-	-	Dividends
Utang obligasi	25	-	(540.000.000.000)	-	Bonds
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		378.516.239.081	(1.434.696.351.282)	2.637.303.921.537	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>563.531.933.280</b>	<b>(936.565.881.926)</b>	<b>686.896.275.284</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		<b>494.777.973.772</b>	<b>1.432.164.203.492</b>	<b>746.439.069.086</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
Selisir transaksi dalam mata uang asing		886.027.967	(820.347.794)	(1.171.140.878)	Effect of changes in foreign exchange rates
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>		<b>1.059.195.935.019</b>	<b>494.777.973.772</b>	<b>1.432.164.203.492</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**1. Umum**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dari Daniel Parganda Marpaung, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tertanggal 20 Juli 2007. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 39 tanggal 21 Desember 2021 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, mengenai penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0074543.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang jasa teknologi dan telekomunikasi, pengembang, perdagangan, industri komputer, pertambangan, transportasi, pertanian, percetakan dan perbengkelan. Saat ini Perusahaan menjalankan bidang usaha internet, sewa jaringan interkoneksi, domestik maupun internasional. Perusahaan menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri.

Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2001. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Lantai 1, 2, dan 6, Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320.

PT Candrakarya Multikreasi merupakan entitas induk Perusahaan. Pemegang saham akhir Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut sebagai Grup) adalah Ir. Galumbang Menak dan Farida Bau. Grup didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan operasionalnya di Indonesia dan Singapura.

**1. General**

**a. Establishment and General Information**

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (the Company) was established based on the Notarial Deed No. 30 dated August 8, 2000 of Daniel Parganda Marpaung, S.H., a public notary in Jakarta. The deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 dated December 21, 2000 and published in the State Gazette No. 58 dated July 20, 2007. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 39 dated December 21, 2021 of Aulia Taufani, S.H., a public notary in Jakarta, concerning additional of the authorized, issued and paid-up shares. These amendments have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0074543.AH.01.02. Tahun 2021 dated December 22, 2021.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in the business of technology and telecommunication services, developer, trading, computer industry, mining, transportation, agricultural, printing and maintenance. The Company is currently engaged in the internet, rental link of interconnection, domestic and international. The Company sells its products in domestic and foreign markets.

The Company started its commercial operations in 2001. The Company is domiciled in Jakarta and its office is located at Graha 9 Building 1st, 2nd, and 6th floor, Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320.

PT Candrakarya Multikreasi is the parent company. Ir. Galumbang Menak and Farida Bau are the ultimate shareholders of the Company and its subsidiaries (herein after referred to as the Group). The Group is incorporated in Indonesia and conduct its operations in Indonesia and Singapore.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**b. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan**

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan, adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun awal Operasi/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)		
				2021	2020	2019	2021	2020	2019
Entitas anak langsung/ Directly subsidiaries									
Moratel International Pte. Ltd. (MIPL)	Singapura/ Singapore	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2008	100%	100%	100%	279.293.488.542	154.978.439.040	118.102.234.453
PT Palapa Ring Barat (PRB)	Indonesia/ Indonesia	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2016	98,9%	98,9%	98,9%	1.156.832.709.443	1.219.849.608.473	1.276.996.351.179
PT Palapa Timur Telematika (PTT)	Indonesia/ Indonesia	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2016	70%	70%	70%	5.329.998.939.474	5.524.270.015.881	5.743.598.042.305
PT Oxygen Multimedia Indonesia (OMI)	Indonesia/ Indonesia	Televisi kabel/ Cable television	2015	99,96%	99,96%	99,96%	242.507.722.192	511.727.430.880	269.382.530.768
PT Indo Pratama Teleglobal (IPT)	Indonesia/ Indonesia	Jasa teknologi dan telekomunikasi/ Technology and telecommunication services	2021	65%	-	-	491.068.052.211	-	-
Entitas anak tidak langsung melalui OMI/Indirectly subsidiary through OMI									
PT Oxygen Infrastruktur Indonesia (OI)	Indonesia/ Indonesia	Pembangunan sarana dan prasaranan jaringan telekomunikasi/ Construction of facilities and infrastructure of communication networks	2016	0,04%	0,04%	0,04%	170.863.375.455	461.143.123.675	229.102.967.199

Informasi keuangan entitas anak yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali dalam jumlah material pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**b. Consolidated Subsidiaries**

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the subsidiaries which were consolidated, including the respective percentages of ownership held by the Company, are as follows:

Financial information of a subsidiary that has material non-controlling interest as of December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021

Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest			
Nama entitas anak Name of Subsidiary	Bagian Kepentingan Kepemilikan/ Equity Interest Held %	Saldo Akumulasi/ Accumulated Balance	Bagian laba/ Share in Profit
PT Palapa Timur Telematika (PTT)	30	266.026.452.667	86.487.199.141

31 Desember 2020/December 31, 2020

Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest			
Nama entitas anak Name of Subsidiary	Bagian Kepentingan Kepemilikan/ Equity Interest Held %	Saldo Akumulasi/ Accumulated Balance	Bagian laba/ Share in Profit
PT Palapa Timur Telematika (PTT)	30	165.357.280.986	100.669.171.681

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

31 Desember 2019/December 31, 2019

Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest			
Nama entitas anak <i>Name of Subsidiary</i>	Bagian Kepentingan Kepemilikan/ <i>Equity Interest Held</i> %	Saldo Akumulasi/ <i>Accumulated Balance</i>	Bagian laba/ <i>Share in Profit</i>

PT Palapa Timur Telematika (PTT)	30	82.229.454.571	83.127.826.415
----------------------------------	----	----------------	----------------

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan dari PTT. Jumlah-jumlah tersebut sebelum dieliminasi dengan transaksi antar entitas dalam Grup.

The summarized financial information of PTT is provided below. This information is based on amounts before inter-company eliminations.

Ringkasan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Summarized statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

	2021	2020	2019	
Jumlah aset	5.329.998.939.474	5.524.270.015.881	5.743.598.042.305	Total assets
Jumlah liabilitas	4.154.953.433.442	4.637.587.002.787	5.192.478.934.811	Total liabilities
Jumlah ekuitas	1.175.045.506.032	886.683.013.094	551.119.107.494	Total equity
Teratribusikan pada:				Attributable to:
Pemilik entitas induk	822.531.854.224	620.656.560.427	385.761.826.507	Owners of parent company
Kepentingan nonpengendali	352.513.651.808	266.026.452.667	165.357.280.987	Non-controlling interest

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Summarized statement of profit or loss and other comprehensive income for 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Pendapatan	1.002.620.161.212	1.080.126.447.535	1.962.176.222.054	Revenues
Laba sebelum pajak	332.666.437.611	363.916.809.933	389.657.052.559	Profit before tax
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	881.425.984	(229.883.649)	(1.831.085.924)	Other comprehensive gain (loss)
Jumlah penghasilan komprehensif	288.362.492.938	335.563.905.603	277.092.754.721	Total comprehensive income
Teratribusikan pada kepentingan non pengendali	86.487.199.141	100.669.171.681	83.127.826.415	Attributable to non-controlling interests

Ringkasan informasi arus kas pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Summarized cash flow information for 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Operasi	564.191.001.455	144.506.140.915	113.036.676.195	Operating
Investasi	(2.848.915.896)	(21.010.090.400)	(959.058.764.819)	Investing
Pendanaan	(534.976.000.000)	(272.988.000.000)	1.101.896.749.099	Financing
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	26.366.085.559	(149.491.949.485)	255.874.660.475	Net increase (decrease) cash on hand and in banks

***Akuisisi Entitas Anak***

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 72 tanggal 24 September 2021, dari Aulia Taufani S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan mengakuisisi 65% saham PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) dengan imbalan atas pembelian sebesar Rp 18.216.250.000.

Setelah akuisisi tersebut, Grup berharap untuk dapat meningkatkan eksistensi pasar, serta menurunkan biaya dengan skala ekonomis.

Tabel berikut adalah rekonsiliasi imbalan kas yang dialihkan dan arus kas dari penggabungan usaha:

	24 September 2021/ <u>September 24, 2021</u>
Imbalan kas yang dialihkan	18.216.250.000
Dikurangi saldo kas entitas anak yang diakuisisi	<u>20.459.251.233</u>
Arus kas masuk - bersih	<u><u>(2.243.001.233)</u></u>

Rincian aset yang diakuisisi serta liabilitas yang dialihkan adalah sebagai berikut:

	24 September 2021/ <u>September 24, 2021</u>
	Nilai Wajar/ <u>Fair Value</u>
Kas dan setara kas	20.459.251.233
Aset tetap	201.727.166.051
Aset tidak berwujud	5.671.663.214
Uang muka	41.118.062.862
Piutang usaha	119.922.849.442
Aset lain-lain	30.915.282.650
Utang usaha	(183.523.201.893)
Utang lain-lain	(1.215.368.677)
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(2.172.979.463)
Utang bank jangka panjang	(120.641.471.561)
Liabilitas lain-lain	<u>(83.053.811.899)</u>
Aset bersih teridentifikasi	<u>29.207.441.959</u>
Kepentingan nonpengendali	<u>10.222.604.686</u>
Kepentingan pengendali	<u>18.984.837.274</u>
Imbalan atas pembelian	<u>(18.216.250.000)</u>
Keuntungan dari akuisisi saham	<u><u>768.587.274</u></u>

***Acquisitions of New Subsidiary***

Based on Notarial Deed No.72 of Aulia Taufani, S.H. dated September 24, 2021, notary in Jakarta, the Company acquired 65% of the share capital of PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) for purchase consideration amounting to Rp 18,216,250,000.

As a result of the acquisition, the Group is expected to increase its presence in this market. It also expects to reduce costs through economies of scale.

The following table is the reconciliation of cash consideration and cash flows from business combinations:

Cash consideration	
Less cash balance of acquired subsidiary	
Cash inflows – net	

Recognized amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed are as follows:

Cash and cash equivalents	
Property and equipment	
Intangible assets	
Advances	
Trade accounts receivable	
Other assets	
Trade accounts payable	
Other accounts payable	
Long-term employee benefits liability	
Long-term bank loans	
Other liabilities	
Net identifiable assets	
Non-controlling interests	
Controlling interest	
Purchase consideration	
Gain on bargain purchase of subsidiary	

Keuntungan yang timbul dari akuisisi IPT tersebut telah diakui pada laba rugi tahun 2021.

Gain on bargain purchase of IPT has been recognized in profit and loss in 2021.

Biaya-biaya terkait akuisisi sebesar Rp 290.000.000 dibukukan pada akun beban administrasi dalam laba rugi tahun 2021.

Acquisition related costs of Rp 290,000,000 have been charged to administrative expenses in the profit or loss in 2021.

**c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan**

**c. Board of Commissioners, Directors, and Employees**

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan tanggal 29 Agustus 2018, yang didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 215 dari Ryan Chandra, S.H.,Mkn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Board of Commissioners and Board of Directors based on a resolution during the Extraordinary Stockholders Meeting held on August 29, 2018, as documented in Notarial Deed No. 215, of Ryan Chandra, S.H.,Mkn., a public notary in Jakarta, consists of the following:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi  
Komisaris : Doktorandus Karim Panjaitan  
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

Board of Commissioners

: President Commissioner  
: Commissioner  
: Independent Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama : Ir. Galumbang Menak  
Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

Board of Directors

: President Director  
: Vice President Director

Jumlah karyawan Grup adalah 1.570, 1.420 dan 1.359 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Number of employees of the Group are 1,570, 1,420 and 1,359 employees (unaudited), respectively, as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

**d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian**

**d. Completion of the Consolidated Financial Statements**

Laporan keuangan konsolidasian PT Mora Telematika Indonesia dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 23 Juni 2022 oleh Direksi Perusahaan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

The consolidated financial statements of PT Mora Telematika Indonesia and its subsidiaries for the years ended December 31, 2021 were completed and authorized for issuance on June 23, 2022 by the Company's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting**

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, termasuk dampak penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 71, 72 dan 73 yang telah diadopsi efektif 1 Januari 2020 (Catatan 50).

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

**2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies**

**a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement**

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI), Board of Sharia Accountants of IAI, and OJK Regulation No. VIII.G.7. Such consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019, including the impact of statements of Financial Accounting Standards (SAK) No. 71, 72 and 73 which had been adopted effective January 1, 2020 (Note 50).

The currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is also the functional currency of the Company.

**b. Prinsip Konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

**b. Principles of Consolidation**

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

- power over the investee;
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

NCI are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

**c. Kombinasi Bisnis**

Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Efektif 1 Januari 2021, saat penerapan amandemen PSAK No. 22 "Kombinasi Bisnis", Grup dapat memilih untuk menerapkan 'pengujian konsentrasi nilai wajar' yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis. Pengujian konsentrasi dapat diterapkan secara terpisah untuk setiap transaksi. Pengujian konsentrasi opsional terpenuhi jika secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi dalam aset teridentifikasi tunggal atau kelompok aset teridentifikasi serupa. Jika pengujian terpenuhi, rangkaian aktivitas dan aset ditentukan bukan merupakan suatu bisnis dan tidak diperlukan penilaian lanjutan. Jika pengujian tidak terpenuhi atau jika Grup memilih untuk tidak menerapkan pengujian tersebut, penilaian yang detail harus dilakukan sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK No. 22.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

**c. Accounting for Business Combination**

Business combinations, except business combination among entities under common control, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are changed to profit or loss.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date. Effective January 1, 2021, upon adoption of the Amendment to PSAK No. 22 "Business Combination", the Group has an option to apply a 'fair value concentration test' that permits a simplified assessment of whether an acquired set of activities and assets is not a business. The concentration test can be applied on a transaction-by-transaction basis. The optional concentration test is met if substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a single identifiable asset or group of similar identifiable assets. If the test is met, the set of activities and assets is determined not to be a business and no further assessment is needed. If the test is not met, or if the Group elects not to apply the test, a detailed assessment must be performed applying the normal requirements in PSAK No. 22.

Pada tanggal akuisisi, jika nilai agregat dari imbalan yang dialihkan lebih kecil dari nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

**d. Penjabaran Mata Uang Asing**

***Mata Uang Fungsional dan Pelaporan***

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

***Transaksi dan Saldo***

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14.269	14.105	13.901	1 United States Dollar (U.S)
1 Dolar Singapura (SGD)	10.534	10.644	10.321	1 Singapore Dollar (SGD)
1 Euro (EUR)	16.127	17.330	15.589	1 Euro (EUR)

***Kelompok Usaha Grup***

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan, dijabarkan pada mata uang pelaporan sebagai berikut:

- a. aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;

At acquisition date, if the aggregate of the consideration transferred is lower than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

**d. Foreign Currency Translation**

***Functional and Reporting Currencies***

Items included in the financial statements of each of the Group's companies are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional and the Group's presentation currency.

***Transactions and Balances***

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

***Group's Companies***

The results and financial position of all the Group's companies that have a functional currency different from the reporting currency are translated into the reporting currency as follows:

- a. assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date of the statement of financial position;

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

- b. penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan comprehensive lain dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- c. seluruh selisih kurs yang timbul diakui sebagai komponen ekuitas yang terpisah.

- b. income and expenses for each statement of profit or loss and other comprehensive income are translated at average exchange rates; and
- c. all resulting exchange differences are recognized as a separate component of equity.

Mata uang fungsional dari Moratel International Pte. Ltd. (MIPL) adalah Dolar Amerika Serikat. Laporan keuangan MIPL telah dijabarkan kedalam mata uang pelaporan dengan menggunakan kurs berikut ini:

The functional currency of Moratel International Pte. Ltd. (MIPL) is U.S. Dollar. The financial statements of MIPL were translated into reporting currency using the following exchange rates:

	2021	2020	2019	
Akun-akun laporan posisi keuangan				Statement of financial position accounts
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.269	13.901	13.901	United States Dollar (USD)
Akun-akun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Statement of profit or loss and other comprehensive income accounts
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.187	14.003	14.191	United States Dollar (USD)

Selisih kurs yang timbul dari penjabaran investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri disajikan dalam ekuitas. Jika kegiatan usaha luar negeri tersebut dilepaskan, maka selisih kurs yang berasal dari penjabaran investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri tersebut, yang sebelumnya disajikan dalam ekuitas, diakui dalam laba rugi, sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian penjualan.

The translation of the net investment in foreign entity is taken to equity. When a foreign operation is sold, exchange differences arising from the translation of the net investment in such foreign operation taken to equity are recognized in profit or loss, as part of the gain or loss on sale.

**e. Transaksi Pihak Berelasi**

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**e. Transactions with Related Parties**

A person or entity is considered a related party of the Group if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

**f. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar**

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;

**f. Current and Non-current Classification**

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i. expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle;

ii. untuk diperdagangkan; atau

iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,

ii. untuk diperdagangkan,

iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau

iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menanggukkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**g. Kas dan Setara Kas**

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

**h. Aset yang Dibatasi Penggunaannya**

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sejak tanggal penempatan yang digunakan Grup sebagai dana jaminan dicatat sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya.

**i. Instrumen Keuangan**

Efektif 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

ii. held primarily for the purpose of trading; or

iii. expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

i. expected to be settled in the normal operating cycle,

ii. held primarily to the purpose of trading,

iii. due to be settled within 12 months after the reporting period, or

iv. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

**g. Cash and Cash Equivalents**

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

**h. Restricted Assets**

Time deposits with restricted usage from the date of placement, are used by the Group as collateral fund and recorded as Restricted Assets.

**i. Financial Instruments**

From January 1, 2020, The Group has applied PSAK No. 71, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup memiliki instrumen keuangan pada kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, serta liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tidak diungkapkan.

#### **Aset Keuangan**

##### Sejak 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan

##### Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

As December 31, 2021 and 2020, the Group has financial instruments classified as financial assets at fair value through profit or loss and financial assets and liabilities at amortized cost. Thus, accounting policies related to financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial liabilities at fair value through profit or loss were not disclosed.

#### **Financial Assets**

##### From January 1, 2020

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Group's business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets

##### Financial assets at amortized cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang jasa konsesi, piutang lain-lain, aset yang dibatasi penggunaannya dan setoran jaminan dalam akun aset lain-lain yang dimiliki oleh Grup.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi investasi Grup dalam obligasi wajib konversi.

Sebelum 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Aset keuangan diklasifikasikan menjadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, dan tersedia untuk dijual. Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal berdasarkan intensi manajemen untuk memegang instrumen keuangan tersebut.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group's cash and cash equivalents, trade accounts receivable, service concession receivable, other accounts receivable, restricted assets and security deposit included in other assets account are included in this category.

Financial assets at fair value through profit or loss

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group's mandatory convertible bond are included in this category.

Prior to January 1, 2020

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Financial assets are classified into financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held to maturity, and available for sale. Classifications of financial assets are determined at initial recognition based on the management's intention to hold the financial assets.

*Pinjaman yang Diberikan dan Piutang*

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurang cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset pengampunan pajak-kas, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang konsesi jasa, aset yang dibatasi penggunaannya dan setoran jaminan dalam akun aset lain-lain yang dimiliki oleh Grup.

*Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi*

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi investasi Grup dalam obligasi wajib konversi.

***Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas***

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

***Liabilitas Keuangan***

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Sejak 1 Januari 2020, Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

*Loans and Receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less any allowance for any impairment.

As of December 31, 2019, the Group's cash and cash equivalents, tax amnesty assets-cash, trade accounts receivable, other accounts receivable, service concession receivable, restricted assets and security deposit included in other assets account are included in this category.

*Financial assets at fair value through profit or loss*

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through comprehensive income.

Financial assets at FVPL are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss.

As of December 31, 2019, the Group's mandatory convertible bond are included in this category.

***Financial Liabilities and Equity Instruments***

Financial liabilities and equity instruments of the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

***Financial Liabilities***

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities.

From January 1, 2020, Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as financial liabilities at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Sebelum 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Liabilitas keuangan diklasifikasikan menjadi liabilitas keuangan lain-lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

*Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi*

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kategori ini meliputi utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang non-bank, utang obligasi, dan utang kepada pemegang saham yang dimiliki oleh Grup.

***Saling Hapus Instrumen Keuangan***

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

***Reklasifikasi Aset Keuangan***

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Prior to January 1, 2020, the Group classifies its financial liabilities in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Financial liabilities are classified as other liabilities are measured at amortized cost.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

*Financial liabilities at amortized cost*

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group's bank loans, trade accounts payable, other accounts payable, accrued expenses, non-bank loans, bonds payable, and shareholder loan are included in this category.

***Offsetting of Financial Instruments***

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

***Reclassification of Financial Assets***

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Group reclassifies its financial assets when, and only when, the Group changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

***Penurunan nilai aset keuangan***

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Sebelum 1 Januari 2020

Grup menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, sebagai berikut:

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif atau individual untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

***Impairment of financial assets***

From January 1, 2020

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Prior to January 1, 2020

The Group applies measurement for impairment of financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments, as follows:

The management first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui di dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

#### ***Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan***

##### **(1) Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Grup tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate (i.e., the effective interest rate computed at initial recognition). The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

#### ***Derecognition of Financial Assets and Liabilities***

##### **(1) Financial Assets**

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b. the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

- c. Grup telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- c. the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

**j. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

**j. Fair Value Measurement**

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or;
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Ketika Grup menggunakan teknik penilaian, maka Grup memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

**k. Perjanjian Konsesi Jasa**

PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Timur Telematika (PTT), entitas-entitas anak, mengadopsi ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa", dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan". Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan sektor publik lainnya (Grantor) mengkontrak perusahaan swasta (Operator) untuk membangun (atau meningkatkan), mengoperasikan dan memelihara infrastruktur publik.

Grantor mengendalikan atau mengatur jasa apa yang harus disediakan Operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya, dan juga mengendalikan atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

When the Group uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

**k. Service Concession Arrangements**

PT Palapa Ring Barat (PRB) and PT Palapa Timur Telematika (PTT), adopted ISAK No. 16, "Service Concession Arrangement", and ISAK No. 22, "Service Concession Arrangements: Disclosures". Service concession arrangement is an arrangement whereby a government or other public sector body (the "Grantor") contracts with a private entity (the "Operator") to develop (or upgrade), operate and maintain public infrastructure.

The Grantor controls or regulates what services the Operator must provide using the assets, to whom, and at what price, and also controls any significant residual interest in the assets at the end of the term of the arrangement.

Sifat dari aset Operator bergantung pada siapa yang memiliki tanggung jawab utama untuk membayar Operator atas jasa yang diberikan. Operator mengakui aset keuangan ketika Grantor memiliki tanggung jawab utama untuk membayar Operator atas jasa yang diberikan. Operator mengakui aset takberwujud dalam hal lainnya.

#### **Model Aset Keuangan**

Operator mengakui aset keuangan sejauh memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari atau atas arahan Grantor atas jasa konstruksi. Operator memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas jika Grantor menjamin untuk membayar jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima dari pengguna jasa publik dan jumlah tertentu atau dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran bergantung pada apakah operator telah memastikan infrastruktur memenuhi persyaratan kualitas atau efisiensi tertentu.

Operator mengukur aset keuangan pada nilai wajar.

Pada saat akhir masa konsesi, seluruh akun yang berhubungan dengan hak konsesi dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui dalam laba rugi.

PRB dan PTT berkeyakinan bahwa perjanjian konsesi jasa sehubungan dengan pembangunan jaringan fiber optik dimana jasa tersebut dimaksudkan untuk penggunaan publik memenuhi kualifikasi sebagai model aset keuangan berdasarkan ISAK No. 16.

#### **I. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat atau periode kontrak masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

The nature of the Operator's asset depends on who has the primary responsibility to pay the Operator for the service. The Operator recognizes a financial asset when the Grantor has the primary responsibility to pay the Operator for the service. The Operator recognizes an intangible asset in all other cases.

#### **Financial Asset Model**

The Operator recognizes a financial asset to the extent that it has an unconditional contractual right to receive cash or another financial asset from or at the direction of the Grantor for the construction services. The Operator has an unconditional right to receive cash if the Grantor contractually guarantees to pay the Operator specified or determinable amounts or the shortfall, if any, between amounts received from users of the public service and specified or determinable amounts, even if payment is contingent on the Operator ensuring that the infrastructure meets specified quality or efficiency requirements.

The Operator measures the financial asset at fair value.

At the end of service concession arrangement, all accounts relating to the service concession arrangement are derecognized.

Gain or loss resulting from derecognition or disposal of concession asset is recognized in profit or loss.

PRB and PTT believes that the service concession arrangement in relation to installation of fiber optic network, which services are intended for public use qualifies under ISAK No. 16 using the financial asset model.

#### **I. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

**m. Aset Tetap**

***Pemilikan Langsung***

Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap, kecuali tanah dan aset tetap dalam pembangunan, dinyatakan berdasarkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, jika ada. Kenaikan nilai wajar akibat revaluasi dikreditkan ke akun "Selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Penurunan nilai yang menghapuskan kenaikan nilai sebelumnya atas aset yang sama diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sedangkan penurunan nilai lainnya langsung dibebankan ke laba rugi. Pada setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset tetap yang dibebankan ke laba rugi dan penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dialihkan dari "Selisih penilaian kembali aset tetap" ke "Saldo laba".

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa periode ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-belan yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-belan tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-belan tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

**m. Property and Equipment**

***Direct Acquisition***

Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

Property and equipment, except land, and construction in progress, are stated at appraised values less subsequent depreciation and any impairment in value. The net appraisal increment resulting from the revaluation was recognized as "Revaluation surplus of property and equipment" shown under equity section in the consolidated statement of financial position and consolidated statement of changes in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are recorded as part of other comprehensive income and all other decreases are charged to profit or loss. Each reporting period, the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset charged to profit or loss and depreciation based on the asset's original cost is transferred from "Revaluation surplus of property and equipment" to "Retained earnings".

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is computed on a straight-line basis over the property and equipment's useful lives as follows:

	<u>Tahun/ Years</u>	<u>Persentase/ Percentage</u>
Bangunan/ <i>Buildings</i>	20	5%
Perangkat dan perabot kantor/ <i>Office furniture and fixtures</i>	4	25%
Peralatan telekomunikasi/ <i>Telecommunication facilities</i>	4 - 25	25% - 4%
Kendaraan/ <i>Vehicles</i>	4 - 5	25% - 20%
Aset sewaan - peralatan/ <i>Leased equipment</i>	4	25%

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

When each major inspection performed, its cost recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection costs are capitalized and amortized over the next major inspection activity.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

An item of property and equipment derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from derecognition of property and equipment is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

#### **Aset Tetap Dalam Pembangunan**

#### **Construction In Progress**

Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut siap digunakan sesuai tujuannya.

Construction in progress represents property and equipment under construction which is stated at cost, and is not depreciated. The accumulated costs will be reclassified to the respective property and equipment account and will be depreciated when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

**n. Transaksi Sewa**

Sejak 1 Januari 2020

Grup menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau yang telah berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

*Sebagai penyewa*

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:

1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

**n. Lease Transactions**

From January 1, 2020

The Group has applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after January 1, 2020.

*As lessee*

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:

1. The Group has the right to operate the asset;
2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variable yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

The Group recognizes right-of-use assets and lease liabilities at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

#### Sewa jangka-pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka- pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

#### Sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

#### **o. Aset Takberwujud**

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi manfaat 8-20 tahun. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka, nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

#### Short-term leases

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

#### As lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

#### **o. Intangible Assets**

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and any impairment. Intangible assets are amortized over their useful lives of 8-20 years. The Group estimates the recoverable value of its intangible assets. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written-down to its estimated recoverable amount.

**p. Sukuk Ijarah**

Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dan disajikan sebagai liabilitas. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai beban penerbitan sukuk ijarah menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

Imbalan hasil sukuk ijarah kepada pemegang sukuk diakui sebagai beban ijarah pada saat terutang.

**q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode-periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode-periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode-periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**p. Sukuk Ijarah**

Sukuk ijarah is recognized initially at nominal amount, adjusted with premium or discount and the related transaction costs incurred and presented as liability. Any differences between the carrying amount and nominal value is recognized in the consolidated statements of profit or loss as sukuk ijarah issuance costs using the straight line method over the period of sukuk ijarah.

Profit sharing of sukuk ijarah paid to holder is recognized as cost of ijarah when it is due.

**q. Impairment of Non-Financial Assets**

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**r. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau

**r. Revenue and Expense Recognition**

From January 1, 2020, the Group has applied PSAK No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. here these are not directly observable, the relative stand- alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan ditangguhkan".

Kewajiban Grup terhadap kontrak dengan pelanggan sehubungan dengan pendapatan dibawah ini ditentukan sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal:

- Pendapatan atas jasa pemasangan baru diakui pada saat terminal pelanggan siap untuk digunakan.
- Pendapatan dari internet, penyediaan jaringan telekomunikasi (domestik dan internasional) dan jasa telekomunikasi lainnya diakui pada saat jasa diberikan.

Sewa diterima dimuka sehubungan dengan perjanjian *Indefeasible Right of Use* (IRU) ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan. Pendapatan sewa diakui secara garis lurus sepanjang masa sewa.

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade accounts receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred revenue".

The obligation of the Group from the contracts with customers relating to below revenues are determined to be a single performance obligation:

- Revenue from new installations is recognized when the terminal is completed and ready for use by the customer.
- Revenues from internet, telecommunication network (domestic and international) and other telecommunication services are recognized when the services are rendered.

Rental fees received in advance in relation to the Indefeasible Rights of Use (IRU) arrangements are deferred and recognized as deferred income. Rental income is recognized on straight-line basis over the lease term.

Interest income and interest expense are recognized in profit or loss as it accrues using the effective interest rate method.

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

#### **Pendapatan dan Beban Konstruksi**

Pada entitas anak, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, pengakuan pendapatan dan beban kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban pada saat penyerahan barang yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani kedua belah pihak.

#### **s. Biaya Pinjaman**

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

#### **t. Imbalan Kerja**

##### ***Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek***

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-diskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

#### **Construction Revenues and Expenses**

In a subsidiary, PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, contract revenues and costs recognition associated with the construction contract are recognized as revenues and expenses respectively at the time of delivery of the goods as declared in the form of minutes of hand over signed by both parties.

#### **s. Borrowing Costs**

Borrowing costs which are directly attributable to the acquisition, construction, or production of qualifying assets are capitalized as part of the acquisition cost of the qualifying assets. Other borrowing costs are recognized as expense in the period in which they are incurred

To the extent that the Group borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity determines the amount of borrowing costs eligible for capitalization as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the year less any investment income on the temporary investment of those borrowings.

The Group suspends capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset.

The Group ceases capitalizing borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.

#### **t. Employee Benefits**

##### ***Short-term Employee Benefits Liability***

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the consolidated statement of financial position and as an expense in profit or loss.

#### Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

#### u. Pajak Penghasilan

##### **Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

##### **Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

#### Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the *Projected Unit Credit*. Remeasurement is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law no. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees.

#### u. Income Tax

##### **Current Tax**

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

##### **Deferred Tax**

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

**v. Aset Pengampunan Pajak**

Pada saat pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Aset pengampunan pajak dikreditkan pada akun tambahan modal disetor. Uang tebusan yang dibayarkan untuk pengampunan pajak diakui dalam laba rugi.

Pengukuran setelah pengakuan awal aset pengampunan pajak mengacu pada masing-masing kebijakan akuntansi relevan yang diterapkan Grup untuk aset serupa.

**w. Laba Per Saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

**v. Tax Amnesty Assets**

At initial recognition, tax amnesty assets are measured at cost, based on Letter of Tax Amnesty Annotation issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Tax amnesty assets are recognized with corresponding credit to additional paid-in capital. Fees paid for obtaining tax amnesty is recognized in profit or loss.

Subsequent measurement of tax amnesty assets is in accordance with subsequent measurement provision of each relevant accounting policies applied by the Group for similar assets.

**w. Earnings Per Share**

Earnings per share are computed by dividing profit attributable to owners of the Parent Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, maka perhitungan laba per saham dasar dan dilusi untuk seluruh periode yang disajikan disesuaikan secara retrospektif.

Jika perubahan tersebut terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan konsolidasian diotorisasi untuk terbit, maka penghitungan laba per saham untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya disajikan berdasarkan jumlah saham yang baru.

**x. Segmen Operasi**

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

**y. Provisi**

Provisi diakui jika Grup mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Grup harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

**z. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

If the number of ordinary shares or potentially ordinary stock instruments outstanding increases as a result of capitalization, issuance of bonus shares or stock splits, or decreases as a result of a merger of shares, then the calculation of basic earnings per share and dilution for the entire period presented is retrospectively adjusted.

If such changes occur after the reporting period but before the consolidated financial statements are authorized to be issued, then the calculation of earning per share for the current period and each previous serving period is presented based on the new number of shares.

**x. Operating Segment**

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

**y. Provisions**

Provisions are recognized when Group has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

**z. Events After the Reporting Period**

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

***Pertimbangan***

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

**a. Mata Uang Fungsional**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional entitas anak luar negeri.

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 (sebelum 1 Januari 2020: PSAK No. 55). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions**

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

***Judgments***

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**a. Functional Currency**

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made judgment on the determination of functional currency of the foreign subsidiary.

The functional currency of the Company and its subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

**b. Classification of Financial Assets and Liabilities**

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71 (prior to January 1, 2020: PSAK No. 55). Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

- c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Grup mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Grup mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Grup mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Sebelum 1 Januari 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

- c. Allowance for Impairment of Financial Assets

From January 1, 2020

At each financial position reporting date, the Group shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Group shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Group shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Group shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Prior to January 1, 2020

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables. The Group assesses specifically at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapus-bukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi (2019: Pinjaman yang Diberikan dan Piutang)				Financial assets at amortized cost (2019: Loans and Receivables)
Kas dan setara kas	1.043.159.953.514	485.960.996.991	1.414.112.274.883	Cash and cash equivalents
Aset pengampunan pajak - kas	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	Tax amnesty asset - cash
Piutang usaha - bersih	422.225.675.928	396.027.356.047	368.151.573.730	Trade accounts receivable - net
Piutang lain-lain	18.488.239.621	9.425.879.616	12.096.550.469	Other accounts receivable
Aset yang dibatasi penggunaannya	35.792.742.666	5.203.306.285	5.904.094.734	Restricted assets
Piutang konsesi jasa	6.047.877.602.480	6.312.094.769.633	6.491.363.042.105	Service concession receivable
Setoran jaminan dalam akun "Aset tidak lancar lain-lain"	4.035.261.259	3.839.245.540	2.219.244.734	Security deposits under "Other assets"
<b>Jumlah</b>	<b><u>7.571.679.475.468</u></b>	<b><u>7.212.651.554.112</u></b>	<b><u>8.293.946.780.655</u></b>	<b>Total</b>

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions have been taken. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying values of the Group's financial assets at amortized cost as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

d. Transaksi Sewa

**Grup sebagai Lessee**

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan serta perjanjian sewa sejumlah mesin dan peralatan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa.

**Grup sebagai Lessor**

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Grup menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

f. Perjanjian Konsesi Jasa

Dalam menerapkan ISAK No. 16, PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Timur Telematika (PTT), entitas-entitas anak, telah membuat pertimbangan bahwa jaringan fiber optiknya termasuk dalam ruang lingkup ISAK No. 16 terutama karena Grantor (Kementerian Komunikasi dan Informatika), badan sektor publik, mengatur atau mengendalikan jasa apa yang harus diberikan oleh PRB dan PTT dengan infrastruktur sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dimana jasa ditujukan untuk penggunaan publik.

d. Lease Transactions

**Group as Lessee**

The Group has entered into various lease agreements for commercial spaces and commercial machineries and equipment. The Group has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-of-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 73, Leases.

**Group as Lessor**

The Group has entered into various commercial lease agreements. The Group has determined that those are operating leases since the Group bears substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

e. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of this matter is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

f. Service Concession Arrangement

In applying ISAK No. 16, PT Palapa Ring Barat (PRB) and PT Palapa Timur Telematika (PTT), have made a judgment that its fiber optic network is within the scope of ISAK No. 16 primarily because the Grantor (Ministry of Communication and Information Technology), a public sector entity, regulates or controls what services should be provided by PRB and PTT with the infrastructure pursuant to the Cooperation Agreement, which services are intended for public use.

PRB dan PTT juga berkeyakinan bahwa jaringan fiber optik tersebut memenuhi kualifikasi sebagai aset keuangan dimana aset konsesi diakui sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Dalam model aset keuangan, PRB dan PTT mengakui imbalan yang diterima atau ditagihkan sebagai ganti jasa konstruksi infrastruktur atau akuisisi infrastruktur yang digunakan dalam perjanjian sebagai aset keuangan sejauh PRB dan PTT memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya atas jasa konstruksinya dari atau atas arahan Grantor.

#### ***Estimasi dan Asumsi***

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 28.

PRB and PTT also believe that the fiber optic network qualifies under the financial asset model wherein the concession asset is recognized as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". Under the financial asset model, PRB and PTT had recognized the consideration received or receivable in exchange for its infrastructure construction services or its acquisition of infrastructure to be used in the arrangements as a financial asset to the extent that PRB and PTT has an unconditional contractual right to receive cash or other financial asset for its construction services from or at the direction of the Grantor.

#### ***Estimates and Assumptions***

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Asset and Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial asset and liabilities are set out in Note 28.

b. Revaluasi Aset Tetap

Grup mengukur bangunan, perangkat dan perabot kantor, kendaraan, dan peralatan telekomunikasi pada nilai revaluasi, dan perubahan nilai wajar aset tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Nilai revaluasi aset tersebut pada 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan laporan penilai independen dari KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan tanggal 30 Desember 2020 dan nilai revaluasi pada 31 Desember 2019 berdasarkan KJPP Herly, Ariawan dan Rekan tanggal 23 Desember 2015. Berdasarkan penilaian manajemen tidak terdapat perubahan yang signifikan atas nilai aset dari laporan valuasi terakhir. Asumsi-asumsi utama yang digunakan untuk menentukan nilai wajar bangunan, perangkat dan perabot kantor, kendaraan, dan peralatan telekomunikasi diungkapkan dalam Catatan 13.

c. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

b. Revaluation of Property and Equipment

The Group measures buildings, office furniture and fixtures, vehicles, and telecommunication facilities at revalued amounts with changes in fair value being recognized in other comprehensive income. The revaluated amount of these assets as of December 31, 2021 and 2020 were based on independent appraisal reports of KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan dated December 30, 2020 and the revaluated amount as of December 31, 2019 was based on KJPP Herly, Ariawan dan Rekan dated December 23, 2015. Based on assessment from management that property and equipment recorded as of December 31, 2021 and 2019 there are no significant changes in revaluated amount of the assets from the last valuation reports. The key assumptions used to determine the fair value of buildings, office furniture and fixtures, vehicles, and telecommunication facilities, are further explained in Note 13.

c. Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each of the item of the Group's property and equipment estimated based on the period over which the asset expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Aset pengampunan pajak - aset tetap	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304	Tax amnesty - property and equipment
Aset tetap	<u>6.281.794.670.312</u>	<u>5.560.472.613.002</u>	<u>4.036.546.371.044</u>	Property and equipment
Jumlah	<u>6.284.047.635.786</u>	<u>5.562.857.031.891</u>	<u>4.039.062.243.348</u>	Total

The carrying values of these assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

d. Penurunan Nilai Aset Takberwujud Lainnya

Aset takberwujud, selain goodwill, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset tak berwujud, disajikan dalam Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian.

e. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

d. Impairment of Other Intangible Assets

Intangible assets, other than goodwill, are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (CGU) and a suitable discount rate in order to calculate the present value

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumption may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of the Group's operations.

The carrying values of intangible assets, are described in Note 15 to the consolidated financial statements.

e. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Aset pengampunan pajak - aset tetap	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304	Tax amnesty - property and equipment
Aset tetap	6.281.794.670.312	5.560.472.613.002	4.036.546.371.044	Property and equipment
Jumlah	<u>6.284.047.635.786</u>	<u>5.562.857.031.891</u>	<u>4.039.062.243.348</u>	Total

The carrying values of non-financial assets as of December 31, 2021, 2020 and 2019, are as follows:

f. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 38 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing sebesar Rp 110.321.710.204, Rp 90.526.628.604 dan Rp 66.028.777.663 (Catatan 38).

g. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui, berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Long-term Employee Benefits Liability

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 38 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of Government bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, long-term employee benefits liability amounted to Rp 110,321,710,204, Rp 90,526,628,604 and Rp 66,028,777,663, respectively (Note 38).

g. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp 9.284.043.097, Rp 4.044.727.261 dan Rp 7.250.865.308 (Catatan 37).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, deferred tax assets amounted to Rp 9,284,043,097, Rp 4,044,727,261 and Rp 7,250,865,308 (Note 37).

#### 4. Aset Pengampunan Pajak

Pada tanggal 13 Desember 2016, Perusahaan menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk pengampunan pajak ke kantor pajak sehubungan dengan keikutsertaan Perusahaan dalam program pengampunan pajak Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 2016, Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan dengan No. KET-14930/PP/WPJ.20/2016 sebagai bukti pemberian pengampunan pajak.

Rincian aset pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Aset lancar				Current assets
Kas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Cash
Aset tidak lancar				Noncurrent assets
Peralatan telekomunikasi	2.921.187.000	2.921.187.000	2.921.187.000	Telecommunication facilities
Akumulasi penyusutan	(668.221.526)	(536.768.111)	(405.314.696)	Accumulated depreciation
Subjumlah	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304	Subtotal
Jumlah	2.352.965.474	2.484.418.889	2.615.872.304	Total

#### 4. Tax Amnesty Assets

On December 13, 2016, the Company submitted Letter of Assets Declaration for tax amnesty to tax office in relation to the Company's participation in tax amnesty program of the Government of Indonesia. On December 16, 2016, the Company received Letter of Tax Amnesty Annotation from the Minister of Finance No. KET-14930/PP/WPJ.20/2016 as proof that tax amnesty has been granted to.

The details of tax amnesty assets are as follows:

Beban penyusutan aset pengampunan pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 131.453.415 yang dicatat pada akun lain-lain sebagai "Beban Usaha – Lain-lain" dalam laba rugi (Catatan 34).

Depreciation expense of tax amnesty assets for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounting to Rp 131,453,415, is recorded in as part of "Operating Expense - others" in profit or loss (Note 34).

Kas dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Peralatan telekomunikasi dikategorikan sebagai aset tetap dan disusutkan dengan metode seperti dijelaskan pada Catatan 2.

Cash is categorized as financial asset at amortized cost. Telecommunication facilities are measured as property and equipment and measured on a basis as stated in Note 2.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**5. Kas dan Setara Kas**

**5. Cash and Cash Equivalents**

	2021	2020	2019	
Kas	632.716.401	473.053.500	430.750.818	Cash on hand
Bank - Pihak ketiga				Cash in banks - Third parties
Rupiah				Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	406.971.255.274	274.048.699.112	327.239.430.445	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	243.456.779.004	34.942.667	14.339.430.741	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	135.416.746.699	122.643.120.416	933.688.030.809	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	5.758.516.289	270.804.482	116.242.929	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	5.506.494.573	859.317.934	597.915.286	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	3.395.633.130	3.343.044.422	2.592.119.699	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	1.486.950.620	2.381.746.884	45.277.893	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	547.191.169	443.178.135	139.502.059	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk *)	385.945.505	612.395.753	422.462.368	PT Bank Syariah Indonesia Tbk *)
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	374.502.764	219.461.047	177.356.784	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Syariah KB Bukopin	347.016.543	3.960.838	4.028.289	PT Bank Syariah KB Bukopin
PT Bank Sinarmas - unit Syariah	195.538.345	8.102.873.576	82.432.581	PT Bank Sinarmas - Sharia unit
PT Bank CIMB Niaga Tbk	158.767.891	108.184.864	64.256.555	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank NTT	146.781.612	-	-	PT Bank NTT
PT Bank Permata Tbk	125.503.523	6.000.000	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	108.203.406	88.323.456	71.256.022	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	107.481.112	97.746.614	843.005.371	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank MNC Internasional	5.080.931	22.622.958	55.684.801	PT Bank MNC Internasional
PT POS Indonesia	1.000.000	-	-	PT POS Indonesia
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)				U.S. Dollar (Note 42)
United Overseas Bank Ltd	92.874.026.544	-	-	United Overseas Bank Ltd
PT Bank KB Bukopin Tbk	63.620.533.532	43.734.120	282.311.756	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.762.527.540	14.050.457.561	4.214.490.155	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	15.340.037	16.016.092	16.687.044	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	11.402.505	12.893.526	14.375.168	PT Bank Sinarmas Tbk
Citibank Singapore Ltd.	-	38.061.861.048	27.092.406.217	Citibank Singapore Ltd.
Dolar Singapura (Catatan 42)				Singapore Dollar (Note 42)
United Overseas Bank Ltd	6.202.920.258	-	-	United Overseas Bank Ltd
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.791.073.776	2.879.911.536	93.903.872	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Citibank Singapore Ltd.	2.613.753.529	2.887.304.115	1.565.163.495	Citibank Singapore Ltd.
PT Bank DBS Indonesia	879.431.169	350.056.463	197.685.148	PT Bank DBS Indonesia
Euro (Catatan 42)				Euro (Note 42)
PT Bank KB Bukopin Tbk	14.462.711	16.568.986	14.891.629	PT Bank KB Bukopin Tbk
Jumlah kas di bank	976.280.859.991	471.605.226.605	1.313.970.347.116	Total cash in banks
Deposito berjangka - Pihak ketiga				Time deposits - Third parties
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	59.208.558.627	19.233.875.627	44.693.457.559	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah KB Bukopin	10.000.000.000	-	5.000.000.000	PT Bank Syariah KB Bukopin
PT Bank Sinarmas Tbk	8.000.000.000	-	-	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Sinarmas - unit Syariah	5.000.000.000	-	-	PT Bank Sinarmas - unit Syariah
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	73.800.000	201.800.000	201.800.000	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	366.834.780	30.366.834.780	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia	-	-	10.000.000.000	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	-	-	3.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	-	-	1.700.000.000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	-	5.000.000.000	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)				U.S. Dollar (Note 42)
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	-	12.510.904.500	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	2.435.129.402	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dolar Singapura (Catatan 42)				Singapore Dollar (Note 42)
Citibank Singapore Ltd.	-	2.897.183.260	2.854.979.317	Citibank Singapore Ltd.
Jumlah deposito berjangka	82.282.358.627	22.699.693.667	117.763.105.558	Total time deposits
Jumlah	1.059.195.935.019	494.777.973.772	1.432.164.203.492	Total
Suku bunga deposito berjangka per tahun				Interest rates per annum on time deposits
Rupiah	0,50% - 6,00%	1,80% - 6,00%	4,00% - 7,00%	Rupiah
Dolar Singapura	-	0,10%	0,10%	Singapore Dollar
Nisbah deposito Syariah per tahun				Nisbah per annum on Sharia time deposits
Rupiah	3,50% - 5,13%	2,75% - 7,75%	2,12% - 5,13%	Rupiah

\*) Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

\*) On February 1, 2021, PT Bank Mandiri Syariah and PT Bank BNI Syariah have been merged with PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kas dan setara kas atas bank dan unit bisnis syariah masing-masing sebesar Rp 16.035.981.505, Rp 8.816.976.781 dan Rp 18.051.928.609.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, cash and cash equivalents in banks and sharia business unit amounted to Rp 16,035,981,505, Rp 8,816,976,781 and Rp 18,051,928,609, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kas dan setara kas milik Grup tidak dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, cash and cash equivalents is not restricted.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kas dan setara kas yang dijamin oleh Grup dicatat sebagai aset dibatasi penggunaannya (Catatan 11).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, cash and cash equivalents used as collateral by the Group recorded in restricted assets (Note 11).

**6. Piutang Usaha**

**6. Trade Accounts Receivable**

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Debtor

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Telco	78.965.783.476	3.972.073.619	1.575.254.657	Telco
Wholesale	173.219.200	2.000.156.117	1.086.830.690	Wholesale
Sub jumlah	79.139.002.676	5.972.229.736	2.662.085.347	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Telco	144.890.089.809	285.004.173.888	264.807.889.567	Telco
Wholesale	158.110.250.526	68.543.307.494	71.387.414.168	Wholesale
Retail	71.943.730.867	55.321.817.208	41.433.941.221	Retail
Lain-lain	5.726.261.775	617.016.348	-	Others
Subjumlah	380.670.332.977	409.486.314.938	377.629.244.956	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37.583.659.725)	(19.431.188.627)	(12.139.756.573)	Allowance for impairment
Bersih	343.086.673.252	390.055.126.311	365.489.488.383	Net
Jumlah	422.225.675.928	396.027.356.047	368.151.573.730	Total

b. Berdasarkan Umur

b. By Age

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Belum jatuh tempo	54.181.611.095	580.032.438	739.346.172	Not past due
Jatuh tempo				Past due
31 - 60 hari	16.484.878.719	893.009.144	930.976.225	31 - 60 days
61 - 90 hari	8.339.030.163	4.008.125.280	127.930.455	61 - 90 days
91 - 120 hari	133.482.699	491.062.874	863.832.495	91 - 120 days
Sub jumlah	79.139.002.676	5.972.229.736	2.662.085.347	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Belum jatuh tempo	144.169.002.410	194.815.386.615	152.251.738.701	Not past due
Jatuh tempo				Past due
31 - 60 hari	101.228.713.857	109.098.109.981	93.333.019.631	31 - 60 days
61 - 90 hari	47.204.771.103	60.419.603.106	56.666.782.634	61 - 90 days
91 - 120 hari	78.576.542.747	33.077.267.592	47.805.369.596	91 - 120 days
Jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	9.491.302.860	12.075.947.644	27.572.334.394	Past due and impaired
Sub jumlah	380.670.332.977	409.486.314.938	377.629.244.956	Sub total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37.583.659.725)	(19.431.188.627)	(12.139.756.573)	Allowance for impairment
Bersih	343.086.673.252	390.055.126.311	365.489.488.383	Net
Jumlah	422.225.675.928	396.027.356.047	368.151.573.730	Total

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

c. Berdasarkan Mata Uang

c. By Currency

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Rupiah	79.132.581.624	5.936.458.866	2.622.868.402	Rupiah
Dollar Amerika Serikat (Catatan 42)	6.421.052	35.770.870	39.216.945	U.S. Dollar (Note 42)
Sub jumlah	<u>79.139.002.676</u>	<u>5.972.229.736</u>	<u>2.662.085.347</u>	Sub total
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah	266.369.538.364	385.001.096.398	359.994.176.490	Rupiah
Dollar Amerika Serikat (Catatan 42)	114.213.877.399	24.485.218.540	17.628.359.985	U.S. Dollar (Note 42)
Dolar Singapura (Catatan 42)	86.917.214	-	6.708.481	Singapore Dollar (Note 42)
Subjumlah	380.670.332.977	409.486.314.938	377.629.244.956	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(37.583.659.725)</u>	<u>(19.431.188.627)</u>	<u>(12.139.756.573)</u>	Allowance for impairment
Subjumlah	<u>343.086.673.252</u>	<u>390.055.126.311</u>	<u>365.489.488.383</u>	Subtotal
Jumlah Bersih	<u><u>422.225.675.928</u></u>	<u><u>396.027.356.047</u></u>	<u><u>368.151.573.730</u></u>	Total Net

Perubahan dalam kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment are as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal	19.431.188.627	12.139.756.573	7.600.134.998	Beginning balance
Cadangan penurunan nilai dari akuisisi entitas anak	18.152.471.098	-	-	Allowance from acquired subsidiary
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34)	<u>-</u>	<u>7.291.432.054</u>	<u>4.539.621.575</u>	Provision for impairment (Note 34)
Saldo akhir	<u><u>37.583.659.725</u></u>	<u><u>19.431.188.627</u></u>	<u><u>12.139.756.573</u></u>	Ending balance

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk menghitung cadangan kerugian ekspektasian pada yang disyaratkan oleh PSAK No. 71 yang berlaku efektif 1 Januari 2020, yang memperbolehkan penerapan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur cadangan kerugian ekspektasian tersebut, piutang usaha dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan pola tunggakan atau gagal bayar.

The Group applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK No. 71 effective January 1, 2020, which permits the use of the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Untuk periode pelaporan sebelum 1 Januari 2020, manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut berdasarkan penelaahan piutang usaha secara individual dan kolektif pada akhir tahun.

For reporting period prior to January 1, 2020, the Group management believes that the provision for receivables impairment is adequate to cover losses from uncollectible accounts based on the review of the status of the individual and collective accounts receivable at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade accounts receivable from third parties.

Piutang usaha kepada pelanggan tertentu digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

Certain trade accounts receivable from third parties are used as collaterals for bank loans.

7. Piutang Konsesi Jasa

Fitur utama perjanjian konsesi PT Palapa Ring Barat (PRB) dan PT Palapa Timur Telematika (PTT), entitas anak, adalah sebagai berikut (Catatan 2):

7. Service Concession Receivable

The main features of the concession arrangement from PT Palapa Ring Barat (PRB) and PT Palapa Timur Telematika (PTT), subsidiaries, are summarized as follows (Note 2):

Nama Konsesi/ Name of Concession	Deskripsi Perjanjian/ Description of Arrangement	Persyaratan Signifikan Perjanjian/Significant Terms of Arrangement	Piutang Konsesi/ Concession Receivable
<p>Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat dan Paket Timur/ <i>Cooperation Agreement on the Construction and Management of Fiber Optic Backbone Network of Palapa Ring Western Package and Eastern Package</i></p>	<p>Pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian, uji coba sistem, kepemilikan, pengoperasian, pengelolaan, pemeliharaan dan pengalihan fasilitas jaringan tulang punggung telekomunikasi/ <i>Development, financing, design, engineering, procurement, construction, installation, testing, system testing, ownership, operation, management, maintenance and transfer of the telecommunication network facilities</i></p>	<p>Periode konsesi 15 tahun sejak operasi komersial/ <i>Period of concession 15 years since commercial operation</i></p> <p>Pembayaran ketersediaan layanan oleh Grantor kepada PRB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 25.347.084.543/ bulan (Tahun 1-5),</li> <li>• Rp19.010.333.583/ bulan (Tahun 6-10) dan</li> <li>• Rp 13.748.967.167/ bulan (Tahun 11-15)/</li> </ul> <p><i>Availability payment by Grantor to PRB :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 25,347,084,543/ month (Year 1-5),</li> <li>• Rp 19,010,333,583/ month (Year 6-10) and</li> <li>• Rp 13,748,967,167/ month (Year 11-15)</li> </ul> <p>- Pembayaran ketersediaan layanan oleh Grantor kepada PTT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 112.718.018.318/ bulan (Tahun 1-5),</li> <li>• Rp 85.414.656.877/ bulan (Tahun 6-10) dan</li> <li>• Rp 35.053.187.771/ bulan (Tahun 11-15)/</li> </ul> <p><i>Availability payment by Grantor to PTT:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 112,718,018,318/ month (Year 1-5),</li> <li>• Rp 85,414,656,877/ month (Year 6-10) and</li> <li>• Rp 35,053,187,771/ month (Year 11-15)</li> </ul>	<p>Rp 6.047.877.602.480 pada tanggal 31 Desember 2021/ <i>Rp 6,047,877,602,480 as of December 31, 2021</i></p> <p>Rp 6.312.094.769.633 pada tanggal 31 Desember 2020/ <i>Rp 6,312,094,769,633 as of December 31, 2020</i></p> <p>Rp 6.491.363.042.105 pada tanggal 31 Desember 2019/ <i>Rp 6,491,363,042,105 as of December 31, 2019</i></p>

Nama Konsesi/ Name of Concession	Deskripsi Perjanjian/ Description of Arrangement	Persyaratan Signifikan Perjanjian/Significant Terms of Arrangement	Piutang Konsesi/ Concession Receivable
		Pengalihan jaringan serat optik kepada Grantor pada akhir perjanjian dengan pembayaran sebesar Rp 1.000/Transfer of fiber optic network to Grantor at the end of agreement with payment of Rp 1,000	

PRB dan PTT mengalihkan pekerjaan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik kepada pihak ketiga dan tidak memperoleh keuntungan (*margin*) atas proses pembangunan.

PRB and PTT subcontracted the construction of the fiber optic backbone network to third parties and do not have margin from the construction process.

Penambahan piutang konsesi jasa pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.325.636.611.500, Rp 1.307.875.348.515 dan Rp 2.213.707.748.127.

Additions in service concession receivable in 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 1,325,636,611,500, Rp 1,307,875,348,515 and Rp 2,213,707,748,127, respectively.

PRB telah melakukan penagihan ketersediaan layanan kepada *grantor* pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 303.980.467.016, Rp 304.165.014.991 dan Rp 304.165.014.991.

PRB already sent the invoices for the services to the grantor in 2021, 2020 and 2019 amounting to Rp 303,980,467,016, Rp 304,165,014,991 and Rp 304,165,014,991, respectively.

PTT telah melakukan penagihan ketersediaan layanan kepada pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.325.636.611.500, Rp 1.331.692.968.108 dan Rp 337.956.860.115.

PTT already sent the invoices for the services to the grantor in 2021, 2020 and 2019 amounting to Rp 1,325,636,611,500, Rp 1,331,692,968,108 and Rp 337,956,860,115, respectively.

	2021	2020	2019	
Piutang konsesi jasa	6.047.877.602.480	6.312.094.769.633	6.491.363.042.105	Service concession receivable
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam setahun:	<u>1.506.164.758.920</u>	<u>1.506.164.758.920</u>	<u>1.506.164.758.920</u>	Less current portion
Bagian jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u><u>4.541.712.843.560</u></u>	<u><u>4.805.930.010.713</u></u>	<u><u>4.985.198.283.185</u></u>	Long-term portion

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang konsesi dapat tertagih sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang tersebut.

Management believes that service concession receivables are fully collectible, thus no allowance for impairment was provided.

**8. Uang Muka**

	2021	2020	2019	
Pemasok	60.208.544.698	4.456.310.723	20.175.865.956	Suppliers
Karyawan	10.372.383.598	6.434.503.914	10.042.943.803	Employee
Perjalanan dinas	1.508.230.374	1.127.372.067	3.143.205.959	Travel
Lain-lain	-	-	5.926.564	Others
<b>Jumlah</b>	<b>72.089.158.670</b>	<b>12.018.186.704</b>	<b>33.367.942.282</b>	<b>Total</b>

**8. Advances**

**9. Biaya Dibayar Dimuka**

	2021	2020	2019	
Asuransi	45.410.730.521	41.932.041.105	37.694.938.982	Insurance
Sewa	35.082.593.326	32.806.810.863	28.387.932.596	Rent
Jasa	14.594.864.296	5.240.010.010	6.710.040.689	Services
Jaringan	3.326.355.924	10.794.328.843	88.775.385	Link
Infrastruktur	1.870.681.483	11.489.247.277	3.687.790.740	Infrastructure
<b>Jumlah</b>	<b>100.285.225.550</b>	<b>102.262.438.098</b>	<b>76.569.478.392</b>	<b>Total</b>

**9. Prepaid Expenses**

**10. Pajak Dibayar Dimuka**

	2021	2020	2019	
Pajak penghasilan				Income tax
Pasal 28A - Perusahaan (Catatan 37)				Article 28A - the Company (Note 37)
- Tahun 2019	-	12.358.764.080	14.910.812.409	- Year 2019
- Tahun 2018	-	-	18.727.084.797	- Year 2018
Pasal 28A - Entitas Anak				Article 28A - Subsidiaries
- Tahun 2019	-	6.144.670.181	-	- Year 2019
Pajak final dibayar dimuka	863.272.975	10.073.107.424	4.941.581.486	Prepaid final tax
Pajak pertambahan nilai - bersih	133.505.658.168	190.230.729.786	238.194.132.547	Value added tax - net
<b>Jumlah</b>	<b>134.368.931.143</b>	<b>218.807.271.471</b>	<b>276.773.611.239</b>	<b>Total</b>

**10. Prepaid Taxes**

**Perusahaan**

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan Perusahaan tahun 2019. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan pajak penghasilan bersih Perusahaan sebesar Rp 12.358.764.080 dan sisanya sebesar Rp 2.552.048.329 dicatat pada "Beban Lain-Lain" dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Pengembalian dana diterima tanggal 19 Januari 2021.

**Company**

In 2021, the Company received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) and Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) for the Company's Corporate Income Tax in 2019. Based on the tax decree, the tax office has agreed to pay the Company's net income tax overpayment amounting to Rp 12,358,764,080 and the difference amounting to Rp 2,552,048,329 recorded to "Other Expenses" in profit or loss statement for the year ended December 31, 2020. The refund received on January 19, 2021.

Pada tahun 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2019. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan pajak pertambahan nilai Perusahaan sebesar Rp 94.505.333.424 dan sisanya sebesar Rp 2.550.007 dicatat pada "Beban Lain-Lain" dalam laporan laba rugi. Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 94.505.333.424 tanggal 19 Januari 2021 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN bulan Januari 2019 hingga Desember 2019.

Pada tanggal 18 Februari 2020, kantor pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No.00010/406/18/073/20 untuk pajak penghasilan badan Perusahaan tahun 2018. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan pajak penghasilan Perusahaan sebesar Rp 18.845.780.420 dan mencatat Rp 50.776.750 sebagai "Beban Lain-lain" dalam laba rugi.

Pada tanggal yang sama Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No.00004/201/18/073/20 atas pajak penghasilan pasal 21 dan No.00009/203/18/073/20 atas pajak penghasilan pasal 23 dengan nilai masing-masing Rp 80.036.277 dan Rp 38.659.346.

Penyelesaian atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut atas pajak penghasilan 21 dan 23 dikompensasikan dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas penghasilan Badan tahun 2018.

Pada tahun 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2018. Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 47.142.638.798 tanggal 24 Februari 2020 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN bulan April 2018 hingga November 2018.

#### **PT Palapa Ring Barat (PRB) - Entitas Anak**

Pada tahun 2021, PRB, entitas anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2020. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 3.375.474.671 dan sisanya sebesar Rp 10.710.000 dicatat pada "Beban Lain-Lain" dalam laporan laba rugi. Entitas anak juga telah menerima pengembalian pajak tersebut tanggal 12 Agustus 2021 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN bulan Januari 2020 hingga Juni 2020.

In 2020, the Company received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2018 value added tax. Based on the tax decree, the tax office has agreed to pay the Company's value added tax overpayment amounting to Rp 94,505,333,424 and the difference amounting to Rp 2,550,007 recorded to "Other Expenses" in profit or loss statement. The Company received tax refund amounting to Rp 94,505,333,424 on January 19, 2021 deducted from several Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of value added tax for period Januari 2019 until December 2019.

On February 18, 2020, the tax office has issued the Overpayment Tax Assessment Letter No.00010/406/18/073/20 for the Company's Corporate Income Tax in 2018. Based on the tax decree, the tax office has agreed to pay the Company's income tax overpayment amounting to Rp 18,845,780,420 and reported the difference amounting to Rp 50,776,750 as part of "Other Expenses" in profit or loss.

On the same date, the Company also received the Underpayment Tax Assessment Letter No.00004 / 201/18/073/20 for income tax article 21 and No.00009 / 203/18/073/20 for income tax article 23 amounting to Rp 80,036,277 and Rp 38,659,346, respectively.

The settlement of the underpayment Tax Assessment Letter on income tax 21 and 23 compensated with the Overpayment Tax Assessment Letter on Company's income tax overpayment in 2018.

In 2020, the Company received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2018 value added tax. The Company received tax refund amounting to Rp 47,142,638,798 on February 24, 2020 deducted from several Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of value added tax for period the April 2018 until November 2018.

#### **PT Palapa Ring Barat (PRB) - a Subsidiary**

In 2021, PRB, a subsidiary, received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2020 of value added tax. The tax office has agreed to pay the restitution of value added tax of amounting to Rp 3,375,474,671 and the difference amounting to Rp 10,710,000 recorded to "Other Expenses" in profit or loss statement. A subsidiary received tax refund on August 12, 2021 which has deducted from Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of value added tax for the period January 2020 until June 2020.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2020, PRB, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2019. PRB telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 3.241.531.117 tanggal 26 Agustus 2020 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak pertambahan nilai untuk tahun 2019.

In 2020, PRB, a subsidiary, received several Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2019 value added tax. The Company received tax refund amounting to to Rp 3,241,531,117 on August 26, 2020 after deducting from 2019 several Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Value added tax year 2019.

Pada tahun 2019, PRB, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2018. PRB telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 19.115.571.156 tanggal 28 Mei 2019.

In 2019, PRB, a subsidiary, received several Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2018 value added tax. The Company received tax refund amounting to Rp 19,115,571,156 on May 28, 2019

Pada tahun 2018, PRB, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2017 dan 2016. PRB telah menerima pengembalian pajak Rp 96.793.022.732 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak pertambahan nilai untuk tahun 2016 beserta sanksi administrasi masing-masing pada tanggal 2 Februari 2018 dan 4 Mei 2018.

In 2018, PRB, a subsidiary, received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2017 and 2016 value added tax. PRB received tax refund amounting to Rp 96,793,022,732 deducted from 2016 several Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) including tax penalty on February 2, 2018 and May 4, 2018, respectively.

**PT Palapa Timur Telematika (PTT) -  
Entitas Anak**

**PT Palapa Timur Telematika (PTT) -  
a Subsidiary**

Pada tahun 2021, entitas anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan entitas anak tahun 2019 dan pajak pertambahan nilai bulan Januari 2020 hingga September 2020. Berdasarkan surat keputusan pajak tersebut, kantor pajak telah menyetujui membayarkan kelebihan pajak penghasilan entitas anak sebesar Rp 25.242.450.053 dan sisanya sebesar Rp 12.139.949.257 dicatat Perusahaan pada "Beban Lain-Lain" dalam laporan laba rugi atas pemeriksaan pajak tahun 2019. Entitas anak telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 9.999.522.739 tanggal 02 Agustus 2021 dan Rp 4.308.561.954 tanggal 23 September 2021 setelah dikurangi beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas sanksi pajak masa Januari 2019 hingga Desember 2019.

In 2021, a subsidiary, receive Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for Corporate Income Tax 2019 and Value Added Tax for period January 2020 until September 2020. The tax office has agreed to pay restitution of Corporate Income Tax amounted to Rp 25,242,450,053 and the difference amounting to Rp 12,139,949,257 recorded to "Other Expenses" in profit or loss statement. A subsidiary received tax refund amounted to Rp 9,999,522,739 on August 02, 2021 and Rp 4,308,561,954 on September 23, 2021 which has deducted from Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of value added tax for period January 2019 until December 2019.

Pada tahun 2020, PTT, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk masa Maret, Juni, September, Desember Tahun 2019 dan masa Maret Tahun 2020. PTT telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 88.273.598.162 atas surat ketetapan tersebut masing-masing pada tanggal 11 Februari 2020, 9 April 2020, 24 Agustus 2020 dan 28 Agustus 2020.

In 2020, PTT, a subsidiary, receive several Tax Assessments for Overpayment (SKPLB) value added tax for period March, June, September, December 2019 and March 2020. PTT received tax refund amounted to Rp 88,273,598,162 based on those tax assessments on February 11, 2020, April 9, 2020, August 24, 2020 and August 28, 2020, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pada tahun 2019, PTT, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2018. PTT telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 38.156.347.090 atas surat ketetapan tersebut masing-masing pada tanggal 9 April 2019 dan 4 Juli 2019.

In 2019, PTT, a subsidiary, receive several Tax Assessments for Overpayment (SKPLB) for 2018 value added tax. PTT received tax refund amounted to Rp 38,156,347,090 based on those tax assessments on April 9, 2019 and July 4, 2019, respectively.

Pada tahun 2018, PTT, entitas anak, menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp 306.713.911.214 setelah dikurangi Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak pertambahan nilai untuk tahun 2017 beserta sanksi administrasi.

In 2018, PTT, a subsidiary, receive Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) for 2018 and 2017 value added tax amounting to Rp 306,713,911,214 after deducting the Tax Collection Letter (STP) for 2017 value added tax including tax penalty.

**11. Aset yang Dibatasi Penggunaannya**

**11. Restricted Assets**

	2021	2020	2019	
Aset Lancar				Current Assets
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	32.148.574.941	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	<u>32.148.574.941</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Total
Aset Tidak Lancar				Non current Assets
Rupiah				Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	852.720.000	1.965.714.960		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	416.908.800	416.908.800	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dolar Singapura (Catatan 42)				Singapore Dollar (Note 42)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.791.447.725	2.820.682.525	5.487.185.934	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	<u>3.644.167.725</u>	<u>5.203.306.285</u>	<u>5.904.094.734</u>	Total

Aset dibatasi penggunaannya merupakan jaminan berupa deposito terkait proyek yang dikerjakan oleh Grup.

Restricted assets are guarantee deposits related to projects undertaken by the Group.

**12. Investasi**

**12. Investments**

	2021	2020	2019	
Obligasi w ajib konversi				Mandatory convertible bond
PT Bakrie Telecom Tbk	5.207.098.114	5.207.098.114	5.207.098.114	PT Bakrie Telecom Tbk
Penurunan nilai	(5.207.098.114)	(5.207.098.114)	(5.207.098.114)	Write-down in value
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Total

Pada tahun 2016, Perusahaan memperoleh sertifikat Obligasi Wajib Konversi sebagai pelunasan piutangnya dari PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), sesuai dengan surat putusan No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT. PST tanggal 9 Desember 2014 dimana PT Bakrie Telecom Tbk harus membayar piutang Perusahaan sebesar Rp 10.438.711.592 dengan kondisi sebagai berikut:

- I. Rp 3.000.000.000 pertama akan dibayarkan dalam kurun waktu 84 bulan secara bertahap sejak tanggal putusan pengadilan;
- II. 70% dari sisa nilai piutang akan dibayarkan melalui penerbitan sertifikat obligasi wajib konversi; dan
- III. Sisa nilai piutang akan dibayarkan dalam 66 bulan sejak tanggal putusan pengadilan.

Selama kurun waktu 84 bulan, PT Bakrie Telecom Tbk tidak dapat melakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000.000 sehingga berdasarkan hasil keputusan pengadilan tersebut, pembayaran tahap 1 tersebut akan dimasukkan kedalam jadwal pembayaran tahap 3 yaitu 66 bulan sejak tanggal putusan pengadilan. Pada tanggal 28 Juni 2016, Perusahaan menerima sertifikat Obligasi Wajib Konversi sebesar Rp 5.207.098.114 yang berjangka waktu 10 tahun sebagai bentuk pelunasan piutang tahap 2.

Selanjutnya pada tahun 2017, berdasarkan penelaahan manajemen, nilai investasi pada obligasi wajib konversi adalah nihil, dan cadangan atas penurunan nilai sebesar Rp 5.207.098.114 telah diakui pada tahun 2017.

In 2016, the Company obtained Mandatory Convertible Bond as payment of its receivable from PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), as stated in verdict letter No. 59/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA JKT. PST dated December 9, 2014 where PT Bakrie Telecom Tbk, has to pay the Company's receivables amounting to Rp 10,438,711,592 with the following conditions:

- I. The first Rp 3,000,000,000 will be paid within 84 months step-up payments from the date of such verdict letter;
- II. 70% of the remaining receivables amount will be paid through issuance of Convertible Bond; and
- III. The remaining receivables amount will be paid within 66 months step-up payments from the date of such verdict letter.

Within 84 months, PT Bakrie Telecom Tbk could not pay the Rp 3,000,000,000 so based on court verdict, the step payment phase 1 will be included in step payment phase 3 for 66 months step up payments from the date of such verdict letter. On June 28, 2016, the Company obtained the Mandatory Convertible Bond amounting to Rp 5,207,098,114 with term of 10 years as realization of step payment phase 2.

Further in 2017, based on management's assessment, the value of these investments in mandatory convertible bonds is already nil, thus, provision write-down in value amounting to Rp 5,207,098,114 has been recognized in 2017.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**13. Aset Tetap**

**13. Property and Equipment**

Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021							
	1 Januari/ January 1, 2021	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Saldo Entitas Anak yang Diakuisisi dan Dikonolidasikan *) Balance of Acquired and Consolidated Subsidiary *)	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2021
<b>Pemilikan langsung:</b>							
<b>Biaya perolehan:</b>							
Tanah	259.641.935.311	-	12.149.659.365	-	-	27.635.275.797	299.426.870.473
<b>Nilai revaluasi:</b>							
Bangunan	96.362.602.280	-	6.386.856.482	-	-	13.239.003.939	115.988.462.701
Perangkat dan perabot kantor	54.865.995.434	29.024.464	8.445.915.250	13.120.874.705	-	(226.856.140)	76.234.953.713
Peralatan telekomunikasi	4.994.730.528.859	1.975.692.987	283.829.795.068	188.082.740.905	(96.744.042)	609.717.869.459	6.078.239.883.236
Kendaraan	14.496.471.023	-	4.955.396.268	-	(412.741.988)	-	19.039.125.303
Pekerjaan dalam pelaksanaan	296.805.969.656	-	698.852.652.242	68.841.927.826	-	(650.365.293.055)	414.135.256.669
Jumlah	5.716.903.502.563	2.004.717.451	1.014.620.274.675	270.045.543.436	(609.486.030)	-	7.003.064.552.095
<b>Akumulasi penyusutan:</b>							
<b>Nilai revaluasi:</b>							
Bangunan	2.251.894.805	-	4.162.407.470	-	-	5.547.263	6.419.849.538
Perangkat dan perabot kantor	4.267.281.706	11.988.373	22.201.921.501	12.470.199.348	(33.248.427)	(772.878.744)	38.145.263.757
Peralatan telekomunikasi	148.827.271.176	1.355.713.222	465.097.156.010	55.848.178.037	(170.028.647)	691.888.500	671.650.178.298
Kendaraan	1.084.441.874	-	3.894.705.335	-	-	75.442.981	5.054.590.190
Jumlah	156.430.889.561	1.367.701.595	495.356.190.316	68.318.377.385	(203.277.074)	-	721.269.881.783
Nilai Tercatat	5.560.472.613.002	-	-	-	-	-	6.281.794.670.312

\*) merupakan nilai tercatat aset tetap entitas anak pada tanggal akuisisi (Catatan 1C)  
represent net carrying value of property and equipment of acquired company on acquisition date (Note 1C)

Perubahan selama tahun 2020/ Changes during 2020								
	1 Januari/ January 1, 2020	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Eliminasi Akumulasi Penyusutan/ Elimination of Accumulated Depreciation	Surplus Revaluasi/ Gain on Revaluation	31 Desember/ December 31, 2020
<b>Pemilikan langsung:</b>								
<b>Biaya perolehan:</b>								
Tanah	247.176.206.219	-	11.720.729.092	-	745.000.000	-	-	259.641.935.311
<b>Nilai revaluasi:</b>								
Bangunan	104.344.788.029	-	16.774.568.194	-	2.862.076.218	(10.998.571.172)	(16.620.258.989)	96.362.602.280
Perangkat dan perabot kantor	48.835.512.763	308.606.850	11.532.383.237	(44.657.888)	15.736.597.902	(44.026.549.333)	22.524.101.903	54.865.995.434
Peralatan telekomunikasi	3.700.765.173.466	2.020.575.038	804.657.097.987	(70.520.000)	974.887.551.750	(859.310.889.852)	371.781.540.470	4.994.730.528.859
Kendaraan	9.293.148.688	-	483.503.837	-	10.055.209.582	(4.912.688.930)	(422.702.154)	14.496.471.023
Pekerjaan dalam pelaksanaan	581.966.271.015	-	769.126.111.031	-	(1.054.286.412.390)	-	-	296.805.969.656
Jumlah	4.692.381.100.180	2.329.181.888	1.614.294.393.378	(115.177.888)	(49.999.976.938)	(919.248.699.287)	377.262.681.230	5.716.903.502.563
<b>Akumulasi penyusutan:</b>								
<b>Nilai revaluasi:</b>								
Bangunan	9.007.723.947	-	6.231.791.513	-	(1.989.049.483)	(10.998.571.172)	-	2.251.894.805
Perangkat dan perabot kantor	28.479.199.131	303.943.339	8.333.115.209	(18.398.916)	11.195.972.276	(44.026.549.333)	-	4.267.281.706
Peralatan telekomunikasi	708.801.890.569	1.240.628.532	312.011.615.967	(49.564.269)	(11.866.669.791)	(859.310.889.852)	-	148.827.271.176
Kendaraan	3.575.603.271	-	2.425.742.534	-	(4.215.001)	(4.912.688.930)	-	1.084.441.874
Jumlah	747.864.416.918	1.544.771.871	329.002.265.243	(67.963.185)	(2.663.901.999)	(919.248.699.287)	-	156.430.889.561
Nilai Tercatat	3.944.516.683.262	-	-	-	-	-	-	5.560.472.613.002

Perubahan selama tahun 2019/ Changes during 2019						
	1 Januari/ January 1, 2019	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019
<b>Pemilikan langsung:</b>						
<b>Biaya perolehan:</b>						
Tanah	38.910.724.565	-	208.265.481.654	-	-	247.176.206.219
<b>Nilai revaluasi:</b>						
Bangunan	69.202.079.331	-	19.603.670.217	-	15.539.038.481	104.344.788.029
Perangkat dan perabot kantor	30.571.732.672	(11.840.024)	14.673.548.627	(264.420.257)	3.866.491.745	48.835.512.763
Peralatan telekomunikasi	1.718.004.728.724	(6.602.447.207)	546.715.067.150	(498.908.570)	1.443.146.733.369	3.700.765.173.466
Kendaraan	5.263.016.799	-	1.881.670.835	-	2.148.461.054	9.293.148.688
Pekerjaan dalam pelaksanaan	973.585.232.270	-	1.073.202.986.085	(121.222.691)	(1.464.700.724.649)	581.966.271.015
Aset sewaan - peralatan	107.999.168.835	-	-	-	-	107.999.168.835
Jumlah	2.943.536.683.196	(6.614.287.231)	1.864.342.424.568	(884.551.518)	-	4.800.380.269.015

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	1 Januari/ January 1, 2019	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Perubahan selama tahun 2019/ Changes during 2019			31 Desember/ December 31, 2019	
			Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<b>Akumulasi penyusutan:</b>							<b>Accumulated depreciation:</b>
Nilai revaluasian							At revalued amount:
Bangunan	6.230.977.359	-	2.776.746.588	-	-	9.007.723.947	Buildings
Perangkat dan perabot kantor	22.903.912.916	(11.560.442)	5.850.419.164	(263.572.507)	-	28.479.199.131	Office furniture and fixtures
Peralatan telekomunikasi	540.205.532.646	(3.952.138.644)	171.036.931.185	(488.434.618)	-	706.801.890.569	Telecommunication facilities
Kendaraan	3.095.667.922	-	479.935.349	-	-	3.575.603.271	Vehicles
Aset sewaan - peralatan	4.733.097.113	-	11.236.383.940	-	-	15.969.481.053	Leased equipment
Jumlah	577.169.187.956	(3.963.699.086)	191.380.416.226	(752.007.125)	-	763.833.897.971	Total
Nilai Tercatat	2.366.367.495.240					4.036.546.371.044	Net Book Value

Dampak dari penerapan awal PSAK No. 73 terhadap rincian kelas aset adalah sebagai berikut :

The impact of initial application PSAK No. 73 to the details of asset class are as follows:

	Biaya perolehan/Cost			Saldo awal yang disesuaikan/ Adjusted beginning balance	
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penyesuaian PSAK 73/ PSAK 73 adjustment			
		Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Aset sewa pembiayaan: Peralatan	107.999.168.835	-	(107.999.168.835)	-	Finance lease asset: Lease equipment
Aset hak guna: Peralatan telekomunikasi	-	-	107.999.168.835	107.999.168.835	Right-of-use assets: Telecommunication facilities
	Akumulasi Penyusutan /Accumulated Depreciation			Saldo awal yang disesuaikan/ Adjusted beginning balance	
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penyesuaian PSAK 73/ PSAK 73 adjustment			
		Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Aset sewa pembiayaan: Peralatan	15.969.481.053	-	(15.969.481.053)	-	Finance lease asset: Lease equipment
Aset hak guna: Peralatan telekomunikasi	-	-	15.969.481.053	15.969.481.053	Right-of-use assets: Telecommunication facilities

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2021	2020	2019	
Beban langsung (Catatan 33)	453.437.321.676	304.393.477.419	167.023.778.838	Direct cost (Note 33)
Beban usaha (Catatan 34)	41.918.868.640	24.608.787.824	24.356.637.388	Operating expense (Note 34)
Jumlah	495.356.190.316	329.002.265.243	191.380.416.226	Subtotal

Pengurangan selama tahun 2021, 2020 dan 2019 merupakan pelepasan aset tetap.

Deductions in 2021, 2020 and 2019 pertain to the disposal of certain property and equipment.

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan revaluasi atas aset tetap, kecuali tanah, yang dilakukan oleh KJPP Sugianto Prasadjo & Rekan, penilai independen, dengan Putri Sekarningrum S.MB., MAPPI sebagai penanggungjawab, dalam laporannya tertanggal 30 Desember 2020. Penentuan nilai wajar dilakukan dengan metode pendekatan data pasar dan pendekatan biaya. Perusahaan membukukan surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp 377.262.681.230.

Revaluasi aset tetap, kecuali tanah, adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 191/ PMK.010/2015, tanggal 15 Oktober 2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.03/2015, tanggal 21 Desember 2015).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo surplus revaluasi aset tetap setelah dikurangi selisih penyusutan aset tetap berdasarkan nilai revaluasi dan harga perolehan masing-masing adalah sebesar Rp 345.024.461.741, Rp 431.812.510.351 dan Rp 104.324.191.232.

Biaya pinjaman dan biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi yang siap digunakan dikapitalisasi sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 42.925.277.176, Rp 35.708.806.880 dan Rp 38.654.670.262.

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan infrastruktur telekomunikasi dan peralatan penunjang lainnya dalam rangka ekspansi Perusahaan berupa pembangunan *Fiber Optic*.

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan infrastruktur telekomunikasi dan peralatan penunjang lainnya dalam rangka ekspansi Perusahaan berupa pembangunan *Fiber Optic* dengan persentase penyelesaian masing-masing berkisar antara 15% - 89%, 20% - 85% dan 33% - 90% pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 30 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2035 sampai dengan 2039. Manajemen berpendapat tidak terdapat permasalahan dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

In 2020, the Company revalued its property and equipment except land which was performed by KJPP Sugianto Prasadjo & Rekan, independent valuers, in its report, Putri Sekarningrum S.MB., MAPPI as report person, dated December 30, 2020. Market data and cost approach methods were used in determining of fair value. The Company recognized net gain on revaluation amounting to Rp 377,262,681,230.

Revaluation of property and equipment except land is in accordance with the Finance Minister Regulation (PMK No. 191/PMK.010/2015, dated October 15, 2015, as amended by PMK No. 233/PMK.03/2015, dated December 21, 2015).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, gain on asset revaluation after deducting the difference between depreciation based on the revalued carrying amount and depreciation based on original cost amounted of Rp 345,024,461,741, Rp 431,812,510,351 and Rp 104,324,191,232, respectively.

Borrowing costs and other expenses that are necessary to bring an asset to its working condition capitalized to construction in progress for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 42,925,277,176, Rp 35,708,806,880 and Rp 38,654,670,262, respectively.

The construction in progress represents the telecommunication infrastructure and other supporting equipment under installation for business expansion, in which the Company's construction of *Fiber Optic*.

The construction in progress represents the telecommunication infrastructure and other supporting equipment under installation for business expansion, in which the Company's construction of *Fiber Optic* has completion percentage of 15% - 89%, 20% - 85% and 33% - 90%, respectively, as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

The Group owns several parcels of land located in Jakarta with Building Use Rights (Hak Guna Bangunan or HGB) for 30 years until 2035 to 2039. Management believes there will be no difficulty in the extension of the landrights since all of the parcels of land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Tanah, bangunan, dan fasilitas telekomunikasi dijadikan jaminan untuk utang bank (Catatan 23).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mengasuransikan peralatan telekomunikasi kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT KB Insurance Indonesia, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Central Asia, dan PT Asuransi Wahana Tata, pihak ketiga, terhadap gempa bumi dan *property all risk* dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 13.031.063.603.110, Rp 12.024.888.989.457 dan Rp 6.972.115.019.383.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, berdasarkan penelaahan manajemen Grup, tidak terdapat penurunan nilai tercatat aset tetap.

Harga perolehan aset tetap yang telah di susutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp 14.672.441.224, Rp 1.533.583.081 dan Rp 1.458.165.026 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

Nilai jumlah tercatat untuk aset tetap seandainya aset tetap tersebut dicatat dengan model biaya adalah sebesar Rp 5.904.531.989.082, Rp 5.183.209.931.772 dan Rp 3.802.158.249.439 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Land, buildings, and telecommunication facilities are used as collaterals for bank loans (Note 23).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group insured its telecommunication facilities with various insurance companies, including PT KB Insurance Indonesia, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, PT Asuransi Asoka Mas, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Central Asia, and PT Asuransi Wahana Tata, third parties, against earthquake and property all risk for Rp 13,031,063,603,110, Rp 12,024,888,989,457 and Rp 6,972,115,019,383, respectively.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, based on the Group's management assessment, there is no impairment in values of the aforementioned property and equipment.

The cost of property and equipment that have been fully depreciated but are still in used amounting to Rp 14,672,441,224, Rp 1,533,583,081 and Rp 1,458,165,026 as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

The carrying amount of property and equipment if those assets were accounted as cost model is amounting to Rp 5,904,531,989,082, Rp 5,183,209,931,772 and Rp 3,802,158,249,439 as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are not property and equipment are not used temporarily.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are not property and equipment discontinued from active use and are not classified as available for sale.

**14. Aset Hak Guna**

**14. Right-of-use Assets**

	Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021						31 Desember/ December 31, 2021	
	1 Januari/ January 1, 2021	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions	Saldo Entitas Anak yang Dakuisisi dan Dikonsolidasikan *)/ Balance of Acquired and Consolidated Subsidiary *)	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<b>Aset Hak Guna</b>								<b>Right of use assets</b>
Jaringan	37.319.391.668	145.473.220	499.620.078	-	-	-	37.964.484.966	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	26.828.056.071	39.572.541	19.674.655.204	2.239.671.135	(1.198.440.000)	3.310.940.000	50.894.454.951	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	157.999.145.773	-	-	-	-	-	157.999.145.773	Telecommunication facilities
<b>Jumlah</b>	<b>222.146.593.512</b>	<b>185.045.761</b>	<b>20.174.275.282</b>	<b>2.239.671.135</b>	<b>(1.198.440.000)</b>	<b>3.310.940.000</b>	<b>246.858.085.690</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi penyusutan:</b>								<b>Accumulated depreciation:</b>
Jaringan	15.820.772.117	71.473.800	12.262.954.326	-	-	-	28.155.200.243	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	12.440.522.229	44.085.952	14.181.614.208	1.899.945.483	(1.186.920.000)	1.356.855.000	28.736.102.872	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	30.405.548.591	-	15.387.752.342	-	-	-	45.793.300.933	Telecommunication facilities
<b>Jumlah</b>	<b>58.666.842.937</b>	<b>115.559.752</b>	<b>41.832.320.876</b>	<b>1.899.945.483</b>	<b>(1.186.920.000)</b>	<b>1.356.855.000</b>	<b>102.684.604.048</b>	<b>Total</b>
Nilai Tercatat	163.479.750.575						144.173.481.642	Net Book Value

\*) merupakan nilai tercatat aset tetap entitas anak pada tanggal akuisisi (Catatan 1C)/  
represent net carrying value of property and equipment of acquired company on acquisition date (Note 1C)

	Perubahan selama tahun 2020/ Changes during 2020				31 Desember/ December 31, 2020	
	1 Januari/ January 1, 2020	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions			
<b>Aset hak guna:</b>						<b>Right-of-use assets:</b>
Jaringan	39.207.492.721	(1.956.080.812)	67.979.759		37.319.391.668	Link
Ruangan peralatan	14.685.794.269	25.100.388	12.117.161.414		26.828.056.071	Equipment space
Peralatan telekomunikasi	107.999.168.835	-	49.999.976.938		157.999.145.773	Telecommunication facilities
<b>Jumlah</b>	<b>161.892.455.825</b>	<b>(1.930.980.424)</b>	<b>62.185.118.111</b>		<b>222.146.593.512</b>	<b>Total</b>

	Perubahan selama tahun 2020/ Changes during 2020				31 Desember/ December 31, 2020	
	1 Januari/ January 1, 2020	Selisih penjabaran kurs/ Translation Adjustments	Penambahan/ Additions			
<b>Akumulasi penyusutan:</b>						<b>Accumulated depreciation:</b>
Jaringan	7.080.874.489	(2.302.024.660)	11.041.922.288		15.820.772.117	Link
Ruangan peralatan	4.270.881.443	32.911.610	8.136.729.176		12.440.522.229	Equipment space
Peralatan telekomunikasi	15.969.481.053	-	14.436.067.538		30.405.548.591	Telecommunication facilities
<b>Jumlah</b>	<b>27.321.236.985</b>	<b>(2.269.113.050)</b>	<b>33.614.719.002</b>		<b>58.666.842.937</b>	<b>Total</b>
Nilai Tercatat	134.571.218.840				163.479.750.575	Net Book Value

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa peralatan telekomunikasi. Periode sewa tiga (3) tahun dan sebagian besar perjanjian sewa tersebut diperpanjang kembali pada akhir masa sewa dengan penyesuaian ke harga pasar kini.

The Group entered into various lease agreements for use of telecommunication. The lease terms are three (3) years and the majority of the lease agreements are renewable at the end of the lease period at the market rate.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income shows the following amounts related to leases:

	2021	2020	
Penyusutan aset hak-guna:			Depreciation of right-of-use assets:
Jaringan	12.262.954.326	11.041.922.288	Link
Ruangan peralatan dan ruangan kantor	14.181.614.208	8.136.729.176	Equipment space and office space
Peralatan telekomunikasi	15.387.752.342	14.436.067.538	Telecommunication facilities
Subjumlah	<u>41.832.320.876</u>	<u>33.614.719.002</u>	Subtotal
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 35)	2.976.018.724	5.374.911.785	Interest expense on lease liabilities (Note 35)
Beban berkaitan dengan sewa jangka pendek (Catatan 33 dan 34)	42.233.460.876	30.950.817.003	Expenses relating to short-term leases (Note 33 and 34)
	<u>87.041.800.476</u>	<u>69.940.447.790</u>	

**15. Aset Takberwujud**

**15. Intangible Assets**

	Perubahan selama tahun 2021/ Changes during 2021				
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Saldo Entitas Anak yang Diakuisisi dan Dikonsolidasikan *)/ Balance of Acquired and Consolidated Subsidiary *)		31 Desember 2021/ December 31, 2021
<b>Biaya perolehan:</b>				<b>At cost:</b>	
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	3.187.538.210	Intranet license
PKS dan lisensi	3.168.980.346	4.227.929.947	5.689.663.214	13.086.573.507	PKS and license
Lisensi clarent	726.981.020	-	-	726.981.020	Clarent license
Jumlah	<u>7.083.499.576</u>	<u>4.227.929.947</u>	<u>5.689.663.214</u>	<u>17.001.092.737</u>	Total
<b>Amortisasi:</b>					<b>Amortization:</b>
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	3.187.538.210	Intranet license
PKS dan lisensi	2.467.145.756	3.261.496.895	5.500.000	5.734.142.651	PKS and license
Lisensi clarent	693.875.580	21.332.804	-	715.208.384	Clarent license
Jumlah	<u>6.348.559.546</u>	<u>3.282.829.699</u>	<u>5.500.000</u>	<u>9.636.889.245</u>	Total
Nilai Tercatat	<u>734.940.030</u>			<u>7.364.203.492</u>	Net Carrying Value

\*) merupakan nilai tercatat aset tak berwujud entitas anak pada tanggal akuisisi (Catatan 1C)  
represent net carrying value of intangible assets of acquired company on acquisition date (Note 1C)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	1 Januari 2020/ <i>January 1, 2020</i>	Perubahan selama tahun 2020/ <i>Changes during 2020</i>		31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	
		Penambahan/ <i>Additions</i>			
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	3.187.538.210	Intranet license
PKS dan lisensi	1.628.844.080	1.540.136.266	-	3.168.980.346	PKS and license
Lisensi clarent	726.981.020	-	-	726.981.020	Clarent license
Jumlah	5.543.363.310	1.540.136.266	-	7.083.499.576	Total
<u>Amortisasi:</u>					<u>Amortization:</u>
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	3.187.538.210	Intranet license
PKS dan lisensi	1.511.897.231	955.248.525	-	2.467.145.756	PKS and license
Lisensi clarent	653.143.035	40.732.545	-	693.875.580	Clarent license
Jumlah	5.352.578.476	995.981.070	-	6.348.559.546	Total
Nilai Tercatat	190.784.834	-	-	734.940.030	Net Carrying Value

	1 Januari 2019/ <i>January 1, 2019</i>	Perubahan selama tahun 2019/ <i>Changes during 2019</i>		31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
		Penambahan/ <i>Additions</i>			
<u>Biaya perolehan:</u>					<u>At cost:</u>
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	3.187.538.210	Intranet license
PKS dan lisensi	1.628.844.080	-	-	1.628.844.080	PKS and license
Lisensi clarent	726.981.020	-	-	726.981.020	Clarent license
Jumlah	5.543.363.310	-	-	5.543.363.310	Total
<u>Amortisasi:</u>					<u>Amortization:</u>
Lisensi jaringan tertutup	3.187.538.210	-	-	3.187.538.210	Intranet license
PKS dan lisensi	1.470.840.982	41.056.249	-	1.511.897.231	PKS and license
Lisensi clarent	563.021.596	90.121.439	-	653.143.035	Clarent license
Jumlah	5.221.400.788	131.177.688	-	5.352.578.476	Total
Nilai Tercatat	321.962.522	-	-	190.784.834	Net Carrying Value

Beban amortisasi aset tidak berwujud yang dicatat sebagai beban usaha masing-masing sebesar Rp 3.282.829.699, Rp 995.981.070 dan Rp 131.177.688 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan dicatat sebagai "Beban Usaha" dalam laba rugi (Catatan 34).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud.

Amortization of intangible assets amounted to Rp 3,282,829,699, Rp 995,981,070 and Rp 131,177,688 for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively and is recorded as part of "Operating Expenses" in profit or loss (Note 34).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, management believes that there is no impairment in values of the aforementioned intangible assets.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**16. Aset lain-lain**

**16. Other Assets**

	2021	2020	2019	
<b>Aset lancar</b>				<b>Current assets</b>
Persediaan perlengkapan				Supplies inventories
Peralatan dan perlengkapan	17.466.622.049	15.389.685.961	14.214.375.583	Equipment and supplies
Perangkat	59.462.576.339	14.708.330.193	2.992.187.090	Device
Suku cadang	11.642.098.126	8.457.967.478	7.471.878.788	Spare parts
Biaya proyek ditangguhkan	1.463.866.030	1.463.866.030	-	Deferred charges of project
Uang jaminan (Catatan 42)	7.548.425.281	-	-	Security deposits (Note 42)
<b>Jumlah</b>	<b>97.583.587.825</b>	<b>40.019.849.662</b>	<b>24.678.441.461</b>	<b>Total</b>
<b>Aset tidak lancar</b>				<b>Non current assets</b>
Proyek dalam proses konstruksi				Project in progress
Saldo awal	50.311.580.266	26.045.820.753	51.591.101.388	Beginning balance
Penambahan	325.384.837.453	159.783.178.717	115.894.999.064	Additions
Pengurangan	(265.300.381.020)	(135.517.419.204)	(141.440.279.699)	Deduction
Saldo akhir	110.396.036.699	50.311.580.266	26.045.820.753	Ending balance
Biaya proyek ditangguhkan	18.093.337.201	19.518.213.733	-	Deferred charges of project
Uang jaminan (Catatan 42)	4.035.261.259	3.839.245.540	2.219.244.734	Security deposits (Note 42)
<b>Jumlah</b>	<b>132.524.635.159</b>	<b>73.669.039.539</b>	<b>28.265.065.487</b>	<b>Total</b>

Proyek dalam proses konstruksi merupakan aset lain-lain yang dikerjakan oleh PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, entitas anak.

Project in progress represent other assets from PT Oxygen Infrastruktur Indonesia, a subsidiary.

**17. Utang Usaha**

**17. Trade Accounts Payable**

a. Berdasarkan Pemasok

a. By Creditor

	2021	2020	2019	
<b>Pihak berelasi (Catatan 41)</b>				<b>Related parties (Note 41)</b>
Pengadaan aset tetap	13.872.719.930	14.260.920.100	-	Fixed assets acquisition
Jasa telekomunikasi	-	-	6.005.330.539	Telecommunications service
Sub jumlah	13.872.719.930	14.260.920.100	6.005.330.539	Subtotal
<b>Pihak ketiga</b>				<b>Third parties</b>
Jangka pendek				Short - term
Pengadaan aset tetap	973.698.954.288	517.168.270.129	478.418.808.674	Fixed assets acquisition
Jasa telekomunikasi	159.249.461.800	161.804.749.212	127.275.942.618	Telecommunications service
Sub jumlah	1.132.948.416.088	678.973.019.341	605.694.751.292	Subtotal
Jangka panjang				Long-term
Pengadaan aset tetap	190.535.191.524	575.754.822.578	62.630.784.684	Fixed assets acquisition
<b>Jumlah</b>	<b>1.337.356.327.542</b>	<b>1.268.988.762.019</b>	<b>674.330.866.515</b>	<b>Total</b>

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

b. Berdasarkan Umur	b. By Age			
	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Belum jatuh tempo	2.012.798.039	4.025.635.050	5.034.630.200	Not yet due
Sudah jatuh tempo				Past due
1 s/d 30 hari	6.968.375.000	316.974.350	33.220.000	1 to 30 days
31 s/d 60 hari	-	64.295.000	178.420.000	31 to 60 days
> 60 hari	4.891.546.891	9.854.015.700	759.060.339	> 60 days
Sub jumlah	<u>13.872.719.930</u>	<u>14.260.920.100</u>	<u>6.005.330.539</u>	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Jangka pendek				Short-term
Belum jatuh tempo	902.803.240.117	514.379.732.031	516.723.840.109	Not yet due
Sudah jatuh tempo				Past due
1 s/d 30 hari	152.705.648.712	45.143.992.625	50.174.903.865	1 to 30 days
31 s/d 60 hari	5.185.037.452	34.430.486.455	17.932.617.257	31 to 60 days
> 60 hari	72.254.489.807	85.018.808.230	20.863.390.061	> 60 days
Sub jumlah	<u>1.132.948.416.088</u>	<u>678.973.019.341</u>	<u>605.694.751.292</u>	Subtotal
Jangka panjang				Long-term
Jangka panjang				Long-term
Belum jatuh tempo	190.535.191.524	575.754.822.578	62.630.784.684	Not yet due
Sub jumlah	<u>190.535.191.524</u>	<u>575.754.822.578</u>	<u>62.630.784.684</u>	Subtotal
Jumlah	<u>1.337.356.327.542</u>	<u>1.268.988.762.019</u>	<u>674.330.866.515</u>	Total
c. Berdasarkan Mata Uang	c. By Currency			
	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Rupiah	13.872.719.930	14.260.920.100	6.005.330.539	Rupiah
Pihak ketiga				Third parties
Jangka pendek				Short-term
Rupiah	996.014.155.215	671.797.009.052	600.016.240.709	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)	128.276.012.852	2.111.887.953	5.614.136.515	U.S. Dollar (Note 42)
Dolar Singapura (Catatan 42)	8.658.248.021	5.064.122.336	64.374.068	Singapore Dollar (Note 42)
Sub jumlah	<u>1.132.948.416.088</u>	<u>678.973.019.341</u>	<u>605.694.751.292</u>	Subtotal
Jangka panjang				Long-term
Jangka panjang				Long-term
Rupiah	159.797.186.333	575.754.822.578	62.630.784.684	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)	30.738.005.191	-	-	U.S. Dollar (Note 42)
Sub jumlah	<u>190.535.191.524</u>	<u>575.754.822.578</u>	<u>62.630.784.684</u>	Subtotal
Jumlah	<u>1.337.356.327.542</u>	<u>1.268.988.762.019</u>	<u>674.330.866.515</u>	Total

Utang usaha jangka panjang merupakan utang atas pengadaan barang dan jasa OLT dan ONT kepada PT Huawei Tech Investment dan PT ZTE Indonesia untuk pembangunan jaringan network Perusahaan yang pembayarannya ditangguhkan tidak dikenakan bunga. Perusahaan mengeluarkan surat janji bayar dengan jatuh tempo dalam 18 bulan dan 24 bulan sejak diterbitkan.

Trade accounts payable represent payables for procurement of OLT's and ONT's materials and services of MTI, the Company, to PT Huawei Tech Investment dan PT ZTE Indonesia, for network construction with deferred payment arrangement with no interest. The Company issues Promisory Notes with maturity period of 18 months and 24 months since issuance.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**18. Utang Lain-lain**

a. Berdasarkan Pemasok:

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Beban operasi	6.900.000	3.774.000	34.907.117	Operational expenses
Pihak ketiga				Third parties
Beban operasi	63.481.829.190	86.155.977.534	99.300.885.870	Operational expenses
Lain-lain	25.852.345.834	26.517.200.000	17.153.000.000	Others
Sub jumlah	<u>89.334.175.024</u>	<u>112.673.177.534</u>	<u>116.453.885.870</u>	Subtotal
Jumlah	<u><u>89.341.075.024</u></u>	<u><u>112.676.951.534</u></u>	<u><u>116.488.792.987</u></u>	Total

b. Berdasarkan Mata Uang

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 41)				Related parties (Note 41)
Rupiah	6.900.000	3.774.000	30.887.919	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)	-	-	4.019.198	U.S. Dollar (Note 42)
Sub jumlah	<u>6.900.000</u>	<u>3.774.000</u>	<u>34.907.117</u>	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Rupiah	88.354.986.530	111.987.392.191	112.284.149.880	Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 42)	979.188.494	685.785.343	4.126.956.522	U.S. Dollar (Note 42)
Dolar Singapore (Catatan 42)	-	-	42.779.468	Singapore Dollar (Note 42)
Sub jumlah	<u>89.334.175.024</u>	<u>112.673.177.534</u>	<u>116.453.885.870</u>	Subtotal
Jumlah	<u><u>89.341.075.024</u></u>	<u><u>112.676.951.534</u></u>	<u><u>116.488.792.987</u></u>	Total

**18. Other Accounts Payable**

a. By Creditor:

	2021	2020	2019
Related parties (Note 41)			
Operational expenses	6.900.000	3.774.000	34.907.117
Third parties			
Operational expenses	63.481.829.190	86.155.977.534	99.300.885.870
Others	25.852.345.834	26.517.200.000	17.153.000.000
Subtotal	<u>89.334.175.024</u>	<u>112.673.177.534</u>	<u>116.453.885.870</u>
Total	<u><u>89.341.075.024</u></u>	<u><u>112.676.951.534</u></u>	<u><u>116.488.792.987</u></u>

b. By Currency

	2021	2020	2019
Related parties (Note 41)			
Rupiah	6.900.000	3.774.000	30.887.919
U.S. Dollar (Note 42)	-	-	4.019.198
Subtotal	<u>6.900.000</u>	<u>3.774.000</u>	<u>34.907.117</u>
Third parties			
Rupiah	88.354.986.530	111.987.392.191	112.284.149.880
U.S. Dollar (Note 42)	979.188.494	685.785.343	4.126.956.522
Singapore Dollar (Note 42)	-	-	42.779.468
Subtotal	<u>89.334.175.024</u>	<u>112.673.177.534</u>	<u>116.453.885.870</u>
Total	<u><u>89.341.075.024</u></u>	<u><u>112.676.951.534</u></u>	<u><u>116.488.792.987</u></u>

**19. Utang Pajak**

Pajak penghasilan badan (Catatan 37)

	2021	2020	2019	
Pasal 29 - Perusahaan				Corporate income tax (Note 37)
- Tahun 2021	1.989.209.886	-	-	Article 29 - Company
- Tahun 2020	-	1.043.406.631	-	- Year 2021
Pasal 29 - Entitas anak				Article 29 - Subsidiaries
- Tahun 2021	19.329.947.734	-	-	- Year 2021
- Tahun 2020	-	8.426.494.068	-	- Year 2020
- Tahun 2019	-	-	22.059.842.121	- Year 2019
Pajak penghasilan:				Income taxes:
Pasal 4 (2)	779.441.370	1.468.812.196	2.500.076.186	Article 4 (2)
Pasal 15	-	31.537.979	-	Article 15
Pasal 21	1.618.413.150	2.083.948.292	1.296.188.401	Article 21
Pasal 23	333.050.123	2.522.642.458	346.219.258	Article 23
Pasal 25	615.919.030	914.524.387	3.309.988.833	Article 25
Pasal 26	7.226.770	50.528.736	37.224.982	Article 26
Pajak Pertambahan Nilai - Entitas anak	3.210.697.580	151.937.213	-	Value Added Tax - Subsidiary
Jumlah	<u><u>27.883.905.643</u></u>	<u><u>16.693.831.960</u></u>	<u><u>29.549.539.781</u></u>	Total

**19. Taxes Payable**

	2021	2020	2019
Corporate income tax (Note 37)			
Article 29 - Company			
- Year 2021	1.989.209.886	-	-
- Year 2020	-	1.043.406.631	-
Article 29 - Subsidiaries			
- Year 2021	19.329.947.734	-	-
- Year 2020	-	8.426.494.068	-
- Year 2019	-	-	22.059.842.121
Income taxes:			
Article 4 (2)	779.441.370	1.468.812.196	2.500.076.186
Article 15	-	31.537.979	-
Article 21	1.618.413.150	2.083.948.292	1.296.188.401
Article 23	333.050.123	2.522.642.458	346.219.258
Article 25	615.919.030	914.524.387	3.309.988.833
Article 26	7.226.770	50.528.736	37.224.982
Value Added Tax - Subsidiary	3.210.697.580	151.937.213	-
Total	<u><u>27.883.905.643</u></u>	<u><u>16.693.831.960</u></u>	<u><u>29.549.539.781</u></u>

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

The filed tax returns are based on the Group's own calculation of tax liabilities (*self-assessment*). The time limit for the tax authorities to assess or amend taxes is determined in accordance with provisions of the prevailing Law.

**20. Uang Muka Penjualan**

	2021	2020	2019
SKY Perfect JSAT	64.210.545.000	-	-
PT Huaw ei Tech Investment	28.775.765.818	208.997.759.562	77.238.357.255
PT ZTE Indonesia	-	126.772.488.076	58.571.361.473
Ditlantas Polda Metro Jaya	-	-	16.092.365.066
PT Batutua Tembaga Raya	-	-	5.507.871.920
PT Smart Telecom	-	-	1.617.111.876
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	132.338.871.675	72.277.896.831	3.133.498.096
Jumlah	225.325.182.493	408.048.144.469	162.160.565.686
Dikurangi bagian jangka pendek	2.399.196.299	2.540.358.909	26.350.846.961
Bagian jangka panjang	222.925.986.194	405.507.785.560	135.809.718.725

**20. Advances from Customers**

	2021	2020	2019
SKY Perfect JSAT	-	-	-
PT Huaw ei Tech Investment	-	-	-
PT ZTE Indonesia	-	-	-
Ditlantas Polda Metro Jaya	-	-	-
PT Batutua Tembaga Raya	-	-	-
PT Smart Telecom	-	-	-
Others (each below Rp 1,000,000,000)	-	-	-
Total	-	-	-
Less Current portion	-	-	-
Long portion	-	-	-

Uang muka penjualan terkait perjanjian kerjasama sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur serat optik dan jasa penyediaan *gateway service* VSAT.

Advance from customers related to agreement of construction of fiber optic infrastruktur and gateway service VSAT.

**21. Pendapatan Ditangguhkan**

Akun ini merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa kapasitas inti jaringan optik berdasarkan perjanjian *Indefeasible Right of Use* (IRU) dengan beberapa operator telekomunikasi selama lima belas (15) tahun.

**21. Deferred Income**

This account represents advance rental fees received from several telecommunication operators for the rental of capacity of optical fiber core based on Indefeasible Right of Use (IRU) for a term of fifteen (15) years.

Mutasi selama tahun-tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements for the years ended are as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal	130.124.408.243	136.740.849.558	95.277.307.356	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	416.349.694.150	154.123.329.014	246.885.748.615	Additions during the year
Selisih kurs penjabaran	394.527.806	477.976.508	(1.114.399.377)	Translation adjustment
Amortisasi	(353.059.770.956)	(161.217.746.837)	(204.307.807.036)	Amortization
Saldo akhir	193.808.859.243	130.124.408.243	136.740.849.558	Ending balance
Dikurangi bagian jangka pendek	28.935.826.669	23.204.325.364	24.868.597.797	Less current portion
Bagian jangka panjang	164.873.032.574	106.920.082.879	111.872.251.761	Noncurrent portion

**22. Utang Non-Bank**

**22. Non-Bank Loans**

	2021	2020	2019	
Cisco System Capital Asia, Ltd.	56.630.969.306	21.990.464.042	35.154.808.142	Cisco System Capital Asia, Ltd.
Dikurangi:				Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	20.094.690.773	11.270.769.682	13.482.391.473	Current portion
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	36.536.278.533	10.719.694.360	21.672.416.669	Noncurrent portion

***Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.***

Pada 16 September 2020, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. untuk pembiayaan investasi backbone sebesar USD 4.629.869. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 3% per tahun. Pada 13 Januari 2021, perjanjian tersebut mengalami perubahan pada nilai pembiayaan menjadi USD 3.775.080.

Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi dengan total sebesar USD 2.023.541 dimana penandatanganan perjanjian tersebut pada tanggal 26 September 2017 dan 18 Desember 2017 dengan masing-masing nilai kontra sebesar USD 1.023.541 dan USD 1.000.000. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama 5 tahun dengan bunga 4,8% pertahun.

Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi dengan jumlah sebesar USD 1.276.508 dimana penandatanganan perjanjian tersebut pada tanggal 19 September 2017 dan 26 September 2017 dengan masing-masing nilai kontrak sebesar USD 579.446 dan USD 697.062. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 4,8% pertahun.

Pada 13 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd. Untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 923.194. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 5% pertahun. Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

***Cisco System Capital Asia, Pte. Ltd.***

On September 16, 2020, the Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd. to finance backbone investment amounting to US\$ 4,629,869. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 3% per year. On January 13, 2021, this agreement has been amended changing the facility to US\$ 3,775,080.

The Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd to finance Information Technology solution amounting to US\$ 2,023,541, which these agreement signed on September 26, 2017 and December 18, 2017 amounting to USD 1,023,541 and USD 1,000,000, respectively. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 4.8% per year.

The Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd to finance Information Technology solution amounting to US\$ 1,276,508, which these agreement signed on September 19, 2017 and September 26, 2017 amounting to USD 579,446 and USD 697,062, respectively. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 4.8% per year.

On October 13, 2016, the Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd to finance Information Technology solution amounting to US\$ 923,194. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 5% per year. In 2021, the Company had fully paid this loan facilities.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pada 30 Maret 2015, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd. untuk pembiayaan solusi Teknologi Informasi sebesar USD 1.100.000. Pembayaran cicilan dilakukan setiap triwulan selama lima (5) tahun dengan bunga 3,5% per tahun. Pada tahun 2019, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki utang masing-masing sebesar USD 3.968.810 (setara dengan Rp 56.630.969.306), USD 1.559.054 (setara dengan Rp 21.990.464.042) dan USD 2.528.941 (setara dengan Rp 35.154.808.142).

Pembayaran jumlah pokok utang non-bank untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar USD 1.376.407 (setara dengan Rp 19.639.949.088), USD 1.411.130 (setara dengan Rp 14.091.003.490) dan USD 1.237.441 (setara dengan Rp 67.247.824.396).

Bunga pinjaman adalah masing-masing sebesar Rp 2.326.534.221, Rp 1.819.622.248 dan Rp 1.813.065.043 pada tahun 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35).

**Pembatasan-pembatasan**

Perusahaan membutuhkan persetujuan terkait merger dan akuisisi perusahaan atau anak usaha, mendirikan anak usaha, menjual aset atau bisnis, perubahan lingkup bisnis, membagi dividen ke pemegang saham, dan pelunasan utang pemegang saham.

Perusahaan disyaratkan untuk memenuhi batasan umum. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi batasan umum yang dipersyaratkan.

On March 30, 2015, the Company entered into a loan agreement with Cisco Systems Capital Asia, Pte. Ltd. to finance Information Technology solution amounting to US\$ 1,100,000. The loan shall be paid on a quarterly basis for five (5) years with an interest rate of 3.5% per year. In 2019, the Company had fully paid this loan facilities.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's outstanding loans amounted to 3,968,810 (equivalent to Rp 56,630,969,306), USD 1,559,054 (equivalent to Rp 21,990,464,042) and USD 2,528,941 (equivalent Rp 35,154,808,142), respectively.

Total payments of the principal non-bank loan balance of Bank Mandiri amounted to USD 1,376,407 (equivalent to Rp 19,639,949,088), USD 1,411,130 (equivalent to Rp 14,091,003,490) and USD 1,237,441 (equivalent to Rp 67,247,824,396) in 2021, 2020 and 2019, respectively.

Interest expense paid on these loans amounted to Rp 2,326,534,221, Rp 1,819,622,248 and Rp 1,813,065,043, in 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 35).

**Covenants**

The company requires consent regarding merger, acquisition of another a company or a subsidiary, establishment of a subsidiary, selling of assets or business, change the scope of business, distributing dividend to shareholders and payment of shareholder loans.

The Company is required to fulfill general covenant. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company complied with the required general covenant.

**23. Utang Bank**

	2021	2020	2019
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.738.887.536.358	3.960.967.378.470	4.630.999.601.536
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.399.297.758.968	983.786.621.213	1.812.783.448.394
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	18.000.000.000	30.000.000.000	42.000.000.000
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	-	-	16.187.313.707
Jumlah	5.156.185.295.326	4.974.753.999.683	6.501.970.363.637
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.164.750.861.401)	(954.401.804.443)	(1.760.476.321.040)
	3.991.434.433.925	4.020.352.195.240	4.741.494.042.597
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi	(46.598.039.512)	(60.056.781.356)	(79.634.214.679)
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	3.944.836.394.413	3.960.295.413.884	4.661.859.827.918

**23. Bank Loans**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.630.999.601.536
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.812.783.448.394
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	42.000.000.000
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	16.187.313.707
Total	6.501.970.363.637
Less: current portion	(1.760.476.321.040)
Unamortized provision fee and transaction costs	(79.634.214.679)
Noncurrent portion	4.661.859.827.918

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)***

**Perusahaan**

Pada tanggal 14 Oktober 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun fasilitas yang masih berjalan adalah sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit untuk modal kerja operasional sebesar Rp 20.000.000.000 memiliki periode jatuh tempo tahunan. Pada tanggal 18 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas modal kerja dari Bank Mandiri sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Fasilitas ini diperpanjang setiap tahun dan terakhir kalinya diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2021 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Saldo utang pokok bank atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 25.000.000.000.

- b) Perusahaan memperoleh fasilitas *Non-Cash Loan* (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) yang memiliki *limit* sebesar Rp 5.000.000.000 dan tenor maksimal selama 180 hari. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembelian sewa jaringan serat optik, material jaringan dan peralatan impor dan lokal dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perusahaan.

Pada tanggal 21 Mei 2012, fasilitas ini diperpanjang dan Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 15.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 20.000.000.000.

Pada tanggal 16 Oktober 2013, fasilitas ini di perpanjang dan digabungkan dengan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 5.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

Pada tanggal 13 Oktober 2015, fasilitas ini diperpanjang dan Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 60.000.000.000.

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)***

**The Company**

On October 14, 2011, the Company obtained loan facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The current facilities as follows:

- a) The working capital credit facility obtained from Bank Mandiri amounting to Rp 20,000,000,000 has a term of one (1) year. On October 18, 2015, the Company obtained additional working capital credit facility from Bank Mandiri amounting to Rp 5,000,000,000 bringing the total facility to Rp 25,000,000,000.

This facility has been renewed every year with latest renewal made on July 10, 2021 for twelve (12) months.

The outstanding balance of bank loan from these facilities as of December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 25,000,000,000.

- b) The Company obtained Non-Cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Bank Guarantee (BG) with a maximum credit amounting to Rp 5,000,000,000 and a term of 180 days. This facility will be used to purchase fiber optic lease network, network material and imported and local equipment in order to support the Company's operating activity.

On May 21, 2012, this facility was extended. The Company obtained additional facility amounting to Rp 15,000,000,000, bringing the total facility to Rp 20,000,000,000.

On October 16, 2013, this facility was extended and combined with the facilities of Bank Guarantee facility amounting to Rp 5,000,000,000 bringing the total facility to Rp 25,000,000,000.

On October 13, 2015, this facility was extended. The Company obtained additional facility amounting to Rp 35,000,000,000 bringing the total facility to Rp 60,000,000,000.

Pada tanggal 12 Oktober 2016, fasilitas ini diperpanjang, Perusahaan memperoleh pengurangan fasilitas sebesar Rp 35.000.000.000 sehingga jumlah fasilitas menjadi Rp 25.000.000.000.

On October 12, 2016, this facility was extended. The Company reduced its facility amounting to Rp 35,000,000,000, reducing the total facility to Rp 25,000,000,000.

Pada tanggal 18 Oktober 2017, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 9 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan *sub limit* dari fasilitas *Non Cash Loan*.

On October 18, 2017, this facility was extended for 9 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 10,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 9 Juli 2018, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan *sub limit* dari fasilitas *Non Cash Loan*.

On July 9, 2018, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 10,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 10 Juli 2019, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 2 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000 merupakan *sub limit* dari fasilitas *Non Cash Loan*.

On July 10, 2019, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 10,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 9 Juli 2020, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan *sub limit* dari fasilitas *Non Cash Loan*.

On July 9, 2020, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 25,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 10 Juli 2021, fasilitas ini telah diperpanjang untuk periode selama 12 bulan dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 25.000.000.000 dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan sub limit dari fasilitas Non Cash Loan.

On July 10, 2021, this facility was extended for 12 months amounting to Rp 25,000,000,000 and the Bank Guarantee facility amounting to Rp 25,000,000,000 is sub limit of Non Cash Loan Facility.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 963.697.332, Rp 2.130.760.623 dan Rp 7.667.399.646.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has utilized these credit facilities amounting to Rp 963,697,332, Rp 2,130,760,623 and Rp 7,667,399,646, respectively.

- c) Fasilitas *treasury line* sebesar USD 1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah *hedging* transaksi usaha impor dan ekspor.

- c) A line treasury facility amounting to US\$ 1,000,000 for a period of 12 months, the purpose of this facility is to support the import and export hedging transactions.

Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 10 Juli 2021 untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

This facility has been renewed on July 10, 2021 for twelve (12) months.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

As of date of completion of the consolidated financial statements, the Company has not utilized these credit facilities.

Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

On October 31, 2014, the Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 72.700.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan jaringan fiber optic di Sumatera, Jambi - Batam dan instalasi perlengkapan DWDM untuk jalur serat optik Jambi - Bumi Serpong Damai.

- a) Investment credit facility amounting to Rp 72,700,000,000 which will be used to finance fiber optic development project in Sumatera, Jambi - Batam and DWDM equipment on Jambi - Bumi Serpong Damai fiber optic lane.

Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 12-month withdrawal period.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 13.328.333.333.

As of December 31, 2019, the outstanding balance of bank loan from these facilities amounted to Rp 13,328,333,333.

Pada tahun 2020, Perusahaan telah melunasi fasilitas ini.

On 2020, the Company fully paid this facility.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 157.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan *BTS Backhaul* di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 2015, fasilitas kredit investasi ini mengalami perubahan *limit* fasilitas menjadi Rp 4.000.000.000.

- b) Investment credit facility amounting to Rp 157,000,000,000 which will be used to finance BTS Backhaul development project in Indonesia. On October 18, 2015, the credit investments facility limit was changed to Rp 4,000,000,000.

Fasilitas kredit investasi ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 12 bulan masa penarikan kredit.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 12-month withdrawal period.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 733.333.333 dan Rp 1.533.333.333.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 733,333,333 and Rp 1,533,333,333, respectively.

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi fasilitas ini.

On 2021, the Company fully paid this facility.

Jaminan untuk fasilitas kredit investasi diatas adalah masing-masing perangkat yang akan dibangun dan seluruh agunan fasilitas kredit modal kerja.

The collaterals for these credit facilities are the project itself and all of the working capital collaterals.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 240.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower XL.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 104.391.594.313, Rp 143.628.218.718 dan Rp 174.945.696.991.

- b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 50.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan kembali aset eksisting berupa jaringan serat optik Batam – Singapura.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama empat puluh delapan (48) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 2 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000 dan Rp 22.000.000.000. Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 21 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek fiberisasi tower PT Indosat Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia dan PT XL Axiata Tbk.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak berakhirnya 18 bulan *grace period*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 5.036.698.603, Rp 6.122.592.338 dan Rp 6.931.236.609.

On June 20, 2017, the Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

- a) Investment credit facility amounting to Rp 240,000,000,000 which will be used to finance XL tower fiberization project.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 18-month grace period.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 104,391,594,313, Rp 143,628,218,718 and Rp 174,945,696,991, respectively.

- b) Investment credit facility amounting to Rp 50,000,000,000 which will be used to refinance existing assets fiber optic Batam - Singapore.

This credit facility has a term of forty-eight (48) months from the 2-month withdrawal period.

As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 10,000,000,000 and Rp 22,000,000,000, respectively. In 2021, the Company had fully paid this loan facility.

On June 21, 2018, the Company obtained loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

- a) Investment credit facility amounting to Rp 300,000,000,000 which will be used to finance tower fiberization project for PT Indosat Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia and PT XL Axiata Tbk.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the 18-month grace period.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 5,036,698,603, Rp 6,122,592,338 and Rp 6,931,236,609, respectively.

b) Fasilitas kredit investasi sejumlah Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi berupa *BTS backhaul* untuk PT Smartfren Telecom Tbk dan/atau PT Smart Telecom.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 9 bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp 17.967.205.610, Rp 23.794.425.471 dan Rp 29.621.609.249.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 856.000.000.000 dengan tujuan General Corporate Purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 856.000.000.000 dan Perusahaan telah melunasi pinjaman ini pada tahun 2020.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 240.000.000.000 dengan tujuan *General Corporate Purposes*.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak berakhirnya masa penarikan. Masa penarikan adalah 3 bulan.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perusahaan menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 500.000.000.000 dengan tujuan General Corporate Purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 687.366.666.667 dan Rp 234.084.848.485.

Pembatasan Perusahaan atas perjanjian kredit dengan Mandiri tersebut meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

b) Investment credit facility amounting to Rp 70,000,000,000 which will be used to construction project of telecommunication infrastructure of *BTS backhaul* for PT Smartfren Telecom Tbk and/or PT Smart Telecom

This credit facility has a term of sixty six (66) months from the 9-month withdrawal period.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 17,967,205,610, Rp 23,794,425,471 and Rp 29,621,609,249, respectively.

As of December 31, 2019, the Company entered into an agreement with Bank Mandiri of Rp 856,000,000,000 for General Corporate Purposes.

As of December 31, 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 856,000,000,000 and the Company has fully paid in 2020.

On October 22, 2020, the Company entered into an agreement with Bank Mandiri of Rp 240,000,000,000 for General Corporate Purposes.

This credit facility has a term of sixty six (66) months from the 3-month withdrawal period.

On May 28, 2021, the Company entered into an agreement with Bank Mandiri of Rp 500,000,000,000 for General Corporate Purposes.

As of December 31, 2021, the Company fully drawdown of this facility.

As of December 31, 2021 and 2020, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 687,366,666,667 and Rp 234,084,848,485, respectively.

The covenant of the Company's credit facility from Mandiri is that the Company is not allowed to be debt guarantors/pledging assets to other parties and obtaining credit/loan facilities from other parties.

#### **Pembatasan-pembatasan**

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dibanding *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* kurang dari 400%;
- Rasio *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* dibanding *Interest Expense* lebih dari 110%; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%.

Perusahaan disyaratkan untuk memenuhi batasan umum dan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

#### **PT Palapa Ring Barat (PRB) - Entitas Anak**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Fasilitas *Non Cash Loan (LC/SKBDN/BG)* dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) tanggal 25 Juli 2016, PRB memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi ("KI") sebesar Rp 875.785.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 8 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 2 tahun, yaitu sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 24 Juli 2024).
- b. Fasilitas Kredit *Non Cash Loan* (Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Bank Garansi (BG)) sebesar Rp 500.000.000.000 yang merupakan sub limit dari KI dan digunakan untuk pembiayaan penerbitan LC Impor/SKBDN/BG untuk pengadaan material dan dan peralatan proyek pembangunan Jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat. Jangka waktu fasilitas ini adalah 2 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan fasilitas ini sudah berakhir pada tahun 2018.

#### **Covenants**

Based on the agreement, the Company is required to comply with several terms and conditions, including maintaining financial ratios as follows:

- Interest Bearing Debts (Net Debts) to Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) ratio is less than 400%;
- Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) to Interest Expense ratio is more than 110%; and
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of more than 100%.

The Company is required to fulfill certain general covenant and financial ratio. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company complied with the required general covenant and financial ratio.

#### **PT Palapa Ring Barat (PRB) - a Subsidiary**

Based on Investment Credit (KI) and Non Cash Loan Facility (LC/SKBDN/BG) Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) dated July 25, 2016, the PRB obtained the following credit facilities:

- a. Investment Credit Facility ("KI") amounted to Rp 875,785,000,000 used to finance the construction of Backbone network of National Fiber Optic West Package. The period of credit facilities is 8 years from the signing of the Credit Agreement (include grace period and availability period within 2 years, which is dated from July 25, 2016 until July 24, 2024).
- b. Non Cash Loan Credit Facility (Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Bank Guarantee (BG)) amounted to Rp 500,000,000,000 which is sub limit of KI to finance the issuance of LC Import/SKBDN/BG for purchasing the material and equipment construction of Backbone network of National Fiber Optic West Package project. Time period of this facility is 2 years from the signing of the Credit Agreement and this facility has ended on 2018.

- c. Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Standby Letter of Credit (SBLC))* sebesar Rp 57.000.000.000 untuk jaminan pelaksanaan proyek pembangunan Jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan fasilitas ini telah berakhir pada bulan Juli 2018.
- d. Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Bank Garansi (BG))* sebesar Rp 26.000.000.000 untuk jaminan ketersediaan layanan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan fasilitas ini telah berakhir pada bulan Juli 2017.

PRB melakukan perjanjian baru pada tanggal 18 Desember 2018 untuk Fasilitas Kredit *Non Cash Loan (Bank Garansi (BG))* sebesar Rp 25.500.000.000 untuk jaminan ketersediaan layanan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan jangka waktu fasilitas ini adalah 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 391.423.220.879, Rp 540.423.220.879 dan Rp 683.423.220.881.

Fasilitas ini dijamin dengan pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional paket barat termasuk jaringan fiber optik dan tanah, piutang usaha kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI), pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), *corporate guarantee* dan *deficit cashflow* dari PT Mora Telematika Indonesia, gadai saham Perusahaan atas nama PT Ketrosden Triasmitra dan PT Mora Telematika Indonesia, gadai saham PT Inovasi Mas Mobilitas atas nama Farida Bau dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

- c. Non Cash Loan Credit Facility (*Standby Letter of Credit (SBLC)*) amounted to Rp 57,000,000,000 to guarantee the execution of construction of Backbone network of National Fiber Optic West Package project addressed to the Ministry of Communications and Information Technology Republic of Indonesia and this facility expired in July 2018.
- d. Non Cash Loan Credit Facility (*Bank Guarantee (BG)*) amounted to Rp 26,000,000,000 to guarantee the availability of services addressed to the Ministry of Communications and Information Technology Republic of Indonesia and this facility has expired in July 2017.

PRB entered into a new agreement on December 18, 2018 for Non Cash Loan Credit Facility (*Bank Guarantee (BG)*) amounted to Rp 25,500,000,000 to guarantee the availability of services addressed to the Ministry of Communications and Information Technology Republic of Indonesia with time period of this facility is 2 months from the signing of the Credit Agreement.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 391,423,220,879, Rp 540,423,220,879 and Rp 683,423,220,881, respectively.

These facilities are secured by the construction of national fiber optic backbone network western package including fiber optic network and land, trade receivables to Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo/BP3TI), claim payments to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), *corporate guarantee* and *deficit cashflow* from PT Mora Telematika Indonesia, pledges of shares of the Company on behalf PT Ketrosden Triasmitra and PT Mora Telematika Indonesia, pledges of shares PT Inovasi Mas Mobilitas on behalf Farida Bau and *Personal Guarantee* of Galumbang Menak, a related party.

Fasilitas ini mengharuskan Perusahaan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan yang bersifat wajib untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan serta persyaratan tambahan lainnya, salah satunya adalah apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional paket barat telah selesai maka Perusahaan wajib menyediakan pencadangan dana minimal sebesar Rp 7.000.000.000 yang dibatasi penggunaannya sebagai pencadangan atas risiko dari tidak ditutupnya asuransi jaringan *submarine cable*/serat optik milik Perusahaan, apabila proyek pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) Serat Optik Nasional Paket Barat telah selesai.

Pembatasan PRB atas perjanjian kredit dengan Mandiri meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

#### **Pembatasan-pembatasan**

- Rasio Debt dibanding Equity dan Utang Pemegang Saham kurang dari 300%;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih dari 100%; and
- Equity selalu positif

PRB disyaratkan untuk memenuhi batasan umum dan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, PRB telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

#### **PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) - Entitas Anak**

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPKK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0747/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 1 sebesar Rp 90.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan aset milik perusahaan berupa 47 Tower, 510 VSAT dan Sentra Komunikasi (HUB) atas Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi beserta sarana pendukung.

The facilities agreement required the Company to comply with several requirements, such as requirements which are compulsive and matters which are not to be done without approval and other additional requirements, one of them is that when the construction of national fiber optic backbone network western package are completed then the Company must provide a minimum restricted funds amounting to Rp 7,000,000,000 to cover the risk of uninsured of submarine cable/fiber optic owned by the Company when construction of backbone network of National Optical Fiber West Package project had finished.

The PRB's Covenant for credit facility with Mandiri is that PRB is not allowed to be debt guarantor/pledge assets to other parties and obtain new credit/loan facilities from other parties.

#### **Covenants**

- Debt to Equity and Shareholder Loan ratio of less than 300%;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of more than 100%; and
- Equity is always positive.

PRB is required to fulfill certain general covenant and financial ratio. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, PRB complied with the required general covenant and financial ratio.

#### **PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) - a Subsidiary**

Based on the Letter of Approval for Granting Credit (SPKK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0747/2020 dated December 22, 2020, the Company obtained a loan facility as follows:

- a. Investment Credit Facility 1, amounting to Rp 90,000,000,000 which is used to finance the Company's existing assets in the form of 47 towers, 510 VSAT and Communication Centers (HUB) for the provision of capacity for telecommunications satellites and supporting facilities.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 43 bulan sejak berakhirnya 3 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 10,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 69.070.000.000.

- b. Fasilitas Kredit Investasi 2 sebesar Rp 60.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan Bowheer BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator provider atau Bowheer lainnya.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 34 bulan sejak berakhirnya 12 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 10,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 59.945.885.466.

- c. Penawaran fasilitas Treasury Line sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk Untuk melakukan hedging transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Pada tanggal 8 Desember 2021 fasilitas ini di perpanjang untuk jangka waktu dua belas (12) bulan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0253/2021 tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi 3 sebesar Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk Pembiayaan proyek pengadaan Tower Power, VSAT dan perangkat telekomunikasi lainnya dengan Bowheer BUMN, Lembaga Pemerintah, perusahaan operator provider atau Bowheer lainnya.

Fasilitas kredit ini memiliki periode Pelunasan 60 bulan Sejak berakhirnya 12 bulan *grace period* dan dikenakan bunga 9,5% per tahun.

The credit facility has a term of forty three (43) months from the 3-months grace period and bears interest of 10.5% per annum.

As of December 31, 2021, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 69,070,000,000.

- b. Investment Credit Facility 2, amounting to Rp 60,000,000,000 which is used for financing procurement projects of Tower Power, VSAT and other telecommunications equipment with Bowheer BUMN, Government Institutions, provider operators or other Bowheer companies.

The credit facility has a term of thirty four (34) months from the 12-months grace period and bears annual interest at 10.5%.

As of December 31, 2021 the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 59,945,885,466.

- c. Offering of Treasury Line facility of USD 1,000,000 which is used for hedging foreign currency transactions related to the company's operational activities. The term of this facility is 12 months.

On December 8th, 2021 the facility is extended for 12 months.

As of date of completion of the consolidated financial statements, the Company has not utilized these credit facilities.

Based on the Letter of Approval for Granting Credit (SPPK) No. CM2.JTH/ SPPK/ 0253/2021 dated December 8, 2021, the Company obtained a loan facility as follows:

- a. Investment Credit Facility 3, amounting to Rp 70,000,000,000 which is used to finance procurement projects of Tower Power, VSAT and other telecommunications equipment with Bowheer BUMN, Government Institutions, provider operators or other Bowheer companies.

The credit facility has a term of sixty (60) months from the 12-months grace period and this facility bears interest of 9.5% per annum.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 39.096.487.430.

- b. Selain fasilitas kredit investasi, Perusahaan juga memperoleh fasilitas Non-Cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Bank Garansi (BG) dari Bank Mandiri yang memiliki limit sebesar Rp 40.000.000.000 yang digunakan untuk untuk menjamin (Payment Bond) pembayaran akhir tahun ke BAKTI.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan sudah menggunakan fasilitas kredit ini sebesar Rp 29.185.661.366.

- c. Perpanjangan fasilitas Treasury Line sebesar USD 1.000.000 yang digunakan untuk Untuk melakukan hedging transaksi valuta asing yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan.

Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan aset yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi, piutang usaha kepada Bowheer, gadai saham yang dimiliki oleh PT Mora Telematika Indonesia dan PT Telematika Cahaya Global pada IPT, entitas anak, Corporate Guarantee dan Deficit Cash Flow Guarantee dari PT Gema Lintas Buana dan Personal Guarantee dari Galumbang Menak.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh saldo utang pokok bank atas pinjaman Grup pada Bank Mandiri adalah masing-masing sebesar Rp 1.399.297.758.968, Rp 983.786.621.213 dan Rp 1.812.783.448.394.

Pembayaran jumlah pokok pinjaman oleh Grup pada Bank Mandiri untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 258.880.235.142, Rp 1.068.996.827.181 dan Rp 209.985.119.899.

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, suku bunga yang dikenakan masing-masing berkisar antara 8,5% dan 10,5% per tahun, 9% dan 10,25% per tahun dan antara 10% dan 11,5% per tahun.

As of December 31, 2021 the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 39,096,487,430.

- b. Beside the investment facility, the Company also obtain Non-cash Loan (NCL) LC/SKBDN/Revolving Line Guarantee Bank Facility Rp 40,000,000,000 used to guarantee (Payment Bonds) year end payment to BAKTI.

The term of this facility is 1 year and renew yearly.

As of December 31, 2021 the Company has utilized this facility amounting to Rp 29,185,661,366.

- c. Renewal of Treasury Line facility of USD 1,000,000 which is used for hedging foreign currency transactions related to the company's operational activities.

The term of this facility is 12 months.

These facilities are secured by the assets financed by the credit facility, trade receivables to customers, pledges of shares owned by PT Mora Telematika Indonesia and PT Telematika Cahaya Global to IPT, a subsidiary, corporate guarantee and deficit cash flow guarantee from PT Gema Lintas Buana and Personal Guarantee of Galumbang Menak.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the total outstanding balances of bank loan of the Group from these facilities in Bank Mandiri amounted to Rp 1,399,297,758,968, Rp 983,786,621,213 and Rp 1,812,783,448,394, respectively.

Total payments made by the Group for the principal loan balance of Bank Mandiri amounted to Rp 258,880,235,142, Rp 1,068,996,827,181 and Rp 209,985,119,899 in 2021, 2020 and 2019, respectively.

In 2021, 2020 and 2019, the interest rate is between 8.5% and 10.25% per annum, between 9% and 10.25% per annum and 10% and 11.5% per annum, respectively.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 94.561.809.987, Rp 103.354.449.035 dan Rp 109.893.840.955 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35 dan 13).

#### **Pembatasan-pembatasan**

Berdasarkan perjanjian tersebut, IPT diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Menghasilkan laba bersih;
- Equity selalu positif;
- Current *ratio* lebih dari 100%;
- Rasio *Interest Bearing Debts (Net Debts)* dibanding *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* kurang dari 4 (empat) kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali.

IPT disyaratkan untuk memenuhi batasan umum dan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, IPT telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

#### **PT Bank Jtrust Indonesia Tbk (Bank Jtrust)**

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 23 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 55.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek FTTX. Pada tahun 2016, Perusahaan telah mencairkan fasilitas ini seluruhnya.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama enam puluh (60) bulan sejak pencairan kredit.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan peralatan telekomunikasi FTTX dan tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan data center di Medan, Palembang, Surabaya, dan Bali (Catatan 13).

Pinjaman ini telah dibayar seluruhnya pada tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Surat Keterangan Lunas dengan Nomor 083/JTrust/CSME/JKT/IX/2019.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 94,561,809,987, Rp 103,354,449,035 and Rp 109,893,840,955 for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively (Notes 35 and 13).

#### **Covenants**

Based on the agreement, IPT is required to comply with several terms and conditions, including maintaining financial ratios as follows:

- Generate net income;
- Equity is always positive;
- Current ratio of more than 100%;
- Interest Bearing Debts (Net Debts) to Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) ratio is less than 4 (four) times; and
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of more than 1.2 (one point two) times.

IPT is required to fulfill certain general covenant and financial ratio. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, IPT complied with the required general covenant and financial ratio.

#### **PT Bank Jtrust Indonesia Tbk (Bank Jtrust)**

The Company obtained several loan facilities from PT Bank Jtrust Indonesia Tbk as follows:

- a. On December 23, 2015, the Company obtained credit investment facility amounting to Rp 55,000,000,000 which were used to finance FTTX project. In 2016, the Company has made full drawdown of the facility.

The credit facility has a term of sixty (60) months from the approval of credit agreement.

This loan is secured by telecommunication facilities of FTTX and land and building and machine and equipment of data center in Medan, Palembang, Surabaya, and Bali (Note 13).

This loan has been fully paid on May 19, 2019, based on letter of payment with No. 083/JTrust/CSME/JKT/IX/2019.

- b. Pada tanggal 18 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi *Non Revolving* sebesar Rp 100.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan proyek *Ultimate Java Backbone*, Ring 1, 2 dan 3. Pada tahun 2018, fasilitas ini telah dicairkan seluruhnya.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama tujuh puluh delapan (78) bulan sejak pencairan kredit.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan peralatan telekomunikasi *Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3* beserta pra sarana pendukungnya dan tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan data center di Medan, Palembang, Surabaya dan Bali, dan tanah dan bangunan di Jakarta serta piutang perusahaan dan peralatan telekomunikasi NIX 1, FTTX dan *Ultimate Java Backbone Ring 1, 2, 3* (Catatan 13).

Pinjaman ini telah dibayar seluruhnya pada tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Surat Keterangan Lunas dengan Nomor 083/JTrust/CSME/JKT/IX/2019.

Pembatasan Perusahaan atas perjanjian kredit dengan J-trust meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari bank lain.

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan pelunasan pokok pinjaman sebesar Rp 113.395.631.564.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 5.832.664.830 pada tahun 2019 (Catatan 35).

***PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Bank Panin Syariah)***

Pada tanggal 18 April 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas wa'ad musyarakah, dimana Bank Panin Syariah memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 90.000.000.000. Fasilitas ini telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2014.

Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu enam puluh (60) bulan sejak masing-masing pencairan kredit.

Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan pengambil alihan (*take over*) dan investasi.

- b. On May 18, 2016, the Company obtained Non Revolving investment loan facility amounting to Rp 100,000,000,000 which were used to finance *Ultimate Java Backbone Ring 1, 2 and 3* project. In 2018, the facility has been fully availed.

The credit facility has a term of seventy eight (78) months from the approval of credit agreement.

This loan is secured by telecommunication facilities *Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3* with its supporting facilities and land and building and machine and equipment of data center in Medan, Palembang, Surabaya and Bali, and land and building in Jakarta and also receivables of the Company and telecommunication facilities of Nix 1, FTTX and *Ultimate Java Backbone project Ring 1, 2, 3* (Note 13).

This loan has been fully paid on May 13, 2019, based on letter of payment with Number 083/JTrust/CSME/JKT/IX/2019.

The covenant of the Company's credit facility from J-trust is that the Company is not allowed to be debt guarantors/pledging assets to other parties and obtaining credit/loan facilities from other bank.

In 2019, the Company had fully paid principal of this loan amounted to Rp 113,395,631,564.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 5,832,664,830 in 2019 (Note 35).

***PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Bank Panin Syariah)***

On April 18, 2013, the Company obtained "wa'ad musyarakah" facility, a financing facility granted by Bank Panin Syariah to the Company amounting to Rp 90,000,000,000. This facility has been fully withdrawn in 2014.

The facility bears a floating profit sharing rate and has a term of sixty (60) months from the each of withdrawal date.

The proceeds was used to finance the existing credit investment facilities.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pinjaman tersebut dijamin dengan bangunan shelter, perangkat BTS dan perangkat Serat Optik di Jawa Barat dan Jawa Tengah (Catatan 13), deposito senilai Rp 1.700.000.000 (Catatan 5) serta tagihan piutang efektif kepada PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Telekomunikasi Selular (Catatan 6) serta jaminan perusahaan atas nama PT Gema Lintas Benua, pihak berelasi.

Pada tanggal 18 November 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan musyarakah, dimana Bank Panin Syariah memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk investasi upgrade *Java Ring Backbone* yang terdiri atas proyek *Metro WDM Inner* Jakarta dan Surabaya, *upgrade Java Network* dan *Protection, Java Access* dan Surabaya - Malang *Backbone*. Perusahaan telah mencairkan keseluruhan jumlah fasilitas kredit yang diberikan tersebut.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama enam puluh (60) bulan sejak masing-masing pencairan kredit.

Pembatasan Perusahaan atas perjanjian kredit dengan Bank Panin Syariah meliputi mengikatkan diri sebagai penjamin utang/ menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang pokok atas fasilitas kredit sebesar Rp 16.187.313.707. Pada tahun 2020, Perusahaan telah melunasi secara penuh fasilitas pinjaman ini.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 16.187.313.707 dan Rp 23.244.510.469.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tingkat bagi hasil yang diharapkan mengambang dikenakan 11% - 14,25% per tahun.

Bagi hasil yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 1.078.857.096 dan Rp 2.778.545.550 pada tahun 2020 dan 2019 (Catatan 35).

The above loans are secured by telecommunication facilities BTS and Fiber Optic in West Java and Central Java (Note 13), time deposit amounting to Rp 1,700,000,000 (Note 5), trade accounts receivable from PT Smartfren Telecom Tbk and PT Telekomunikasi Selular (Note 6) and corporate guarantee of PT Gema Lintas Benua, a related party.

On November 18, 2014, the Company obtained musyarakah facility, from Bank Panin Syariah amounting to Rp 70,000,000,000 which were used to upgrade investment in Java Ring Backbone consists of Inner Metro WDM project in Jakarta and Surabaya, upgrade Java Network and Protection, Java Acces and Surabaya - Malang backbone. These facilities were fully availed by the Company.

The credit facility has a term of sixty (60) months from each of withdrawal date.

The Covenant of the Company's credit facility from Bank Panin Sharia is that the Company is not allowed to be debt guarantors/pledging assets to other parties.

As of December 31, 2019, the outstanding loan balances from this credit facility amounted to Rp 16,187,313,707. In 2020, the Company had fully paid this loan facility.

Payment of loan principal in 2020 and 2019 amounted to nil, Rp 16,187,313,707 and Rp 23,244,510,469.

As of December 31, 2020 and 2019, the floating profit sharing rate is 11% - 14.25% per annum.

Total payment of the profit sharing on these loan facilities amounted to Rp 1,078,857,096 and Rp 2,778,545,550 in 2020 and 2019, respectively (Note 35).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

***PT Bank China Construction Bank  
Indonesia Tbk***

Pada tanggal 29 November 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000 (*uncommitted loan*) yang digunakan untuk pembangunan jaringan fiber optik *ultimate java backbone* Ring 4 dan 5. Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini tahun 2018.

Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama tujuh puluh delapan (78) bulan sejak pencairan kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama 18 bulan).

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan jaringan fiber optik *ultimate java backbone ring 4 dan 5* (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok atas fasilitas kredit masing-masing sebesar Rp 18.000.000.000, Rp 30.000.000.000 dan Rp 42.000.000.000.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 12.000.000.000, Rp 12.000.000.000 dan Rp 12.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, suku bunga yang dikenakan masing-masing adalah 9,5%, 11% dan 11,5% per tahun.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 2.654.250.008, Rp 4.117.958.341 dan Rp 5.654.166.669 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35).

***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
(BNI)***

**Perusahaan**

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 April 2019, Perusahaan menerima fasilitas kredit investasi *refinancing* sebesar Rp 400.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan *refinancing* aset proyek *Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3* dan jaringan FTTB.

***PT Bank China Construction Bank  
Indonesia Tbk***

On November 29, 2016, the Company obtained credit investments facility amounting to Rp 50,000,000,000 and Rp 10,000,000,000 (*uncommitted loan*) which were used to finance the network construction of *ultimate java backbone ring 4 and 5*, respectively. The Company has fully availed these facilities in 2018.

The credit facility has a term seventy eight (78) months from the approval of credit agreement (including 18 months *grace period* and *availability period*).

This loan is secured by fiber optic network of *ultimate java backbone ring 4 and 5* (Note 13).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding loan balances from this credit facility amounted to Rp 18,000,000,000, Rp 30,000,000,000 and Rp 42,000,000,000, respectively.

Payment of loan principal in 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 12,000,000,000, Rp 12,000,000,000 and Rp 12,000,000,000, respectively.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the interest rate is 9.5%, 11% and 11.5% per annum.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 2,654,250,008, Rp 4,117,958,341 and Rp 5,654,166,669, for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 35).

***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
(BNI)***

**The Company**

The Company obtained loan facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- a. On April 30, 2019, the Company obtained the *Investment refinancing credit facility* amounting to Rp 400,000,000,000 which will be used to *refinancing Ultimate Java Backbone Ring 1,2,3 project and FTTB network*.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh (60) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

This credit facility has a term of sixty (60) months from the approval credit agreement.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

In 2019, the Company made fully drawdown from this facility.

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 300.000.000.000 yang digunakan untuk proyek pembangunan jalur kabel fiber optik Denpasar-Waingapu.

On December 19, 2019, the Company obtained Credit investment facility from BNI amounting to Rp 300,000,000,000 which will be used to construction fiber optic Denpasar-Waingapu.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama tujuh puluh dua (72) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

This credit facility has a term of seventy two (72) months from the approval credit agreement.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

In 2019, the Company made fully drawdown from this facility.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok bank atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 405.337.536.358, Rp 548.441.378.470 dan Rp 672.497.601.535.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 405,337,536,358, Rp 548,441,378,470 and Rp 672,497,601,535, respectively.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021, 2020 dan 2019 sebesar Rp 143.103.842.113, Rp 124.056.223.066 dan Rp 27.502.398.458.

Payment of loan principal in 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp 143,103,842,113, Rp 124,056,223,066 and Rp 27,502,398,458, respectively.

Pada tanggal 8 Februari 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 200.000.000.000 yang digunakan untuk refinancing Obligasi Moratelindo 1 tahun 2017 Seri A.

On February 8, 2021, the Company obtained Credit investment facility from BNI amounting to Rp 200,000,000,000 which will be used to refinancing Bonds 1 Moratelindo 2017 Serie A.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

This credit facility has a term of sixty six (66) months from the approval credit agreement.

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

On February 17, 2021, the Company made fully drawdown from this facility.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 166.666.666.667.

As of December 31, 2021 the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 166,666,666,667.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 sebesar Rp 33.333.333.333.

Payment of loan principal in 2021 amounted to Rp 33,333,333,333.

Pada tanggal 11 Mei 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi pinjaman dari BNI sebesar Rp 340.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal dan modal kerja tahun 2021.

Fasilitas kredit ini memiliki periode pelunasan selama enam puluh enam (66) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perusahaan telah mencairkan seluruh fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo utang pokok bank atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 300.333.333.333.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 39.666.666.667.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, suku bunga yang dikenakan sebesar 9%, 10,5% dan 10,5% per tahun.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 73.016.788.685, Rp 66.352.579.687 dan Rp 14.796.503.323 pada tahun 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35).

- b. Fasilitas *derivative line* sebesar USD 3.000.000 atau ekuivalen dalam valuta asing lainnya dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas *Derivative Line* (PPFDL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk transaksi treasury valuta asing *non today* dan transaksi *derivative* serta *structured product* dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

- c. Plafond fasilitas *letter of credit/ SKBDN* dengan sublimit garansi bank/ *SBL/C* sebesar Rp 30.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung (PPFKTL). Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembukaan *L/C import/ SKBDN sight* and/atau *usance/180 days after BL date* dalam rangka pembelian barang dagangan/ bahan baku/ peralatan.

On May 11, 2021, the Company obtained Credit investment facility from BNI amounting to Rp 340,000,000,000 which will be used to financing capital expenditure and working capital for year 2021.

This credit facility has a term of sixty six (66) months from the approval credit agreement.

On May 31, 2021, the Company made fully drawdown from this facility.

As of December 31, 2021 the outstanding balances of bank loan from these facilities amounted to Rp 300,333,333,333.

Payment of loan principal in 2021 amounted to Rp 39,666,666,667.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the interest rate is 9%, 10.5%, and 10.5% per annum.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 73,016,788,685, Rp 66,352,579,687 and Rp 14,796,503,323, in 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 35).

- b. Derivative line facility amounting to USD 3,000,000 or equivalent in another foreign currency for a period of 12 months since signing Derivative Line Facility Agreement (PPFDL). The purpose of this facility is to non today foreign exchange transaction and other derivative transaction also structured product for hedging.

As of December 31, 2021, the Company has not utilized these credit facilities.

- c. Plafond letter of credit/ SKBDN with sublimit bank guarantee/ SBL/C facility amounting to Rp 30,000,000,000 for a period of 12 months since signing of Indirect Credit Facility Agreement (PPFKTL). The purpose of this facility is for opening L/C import/ SKBDN sight and/or usance/180 days after BL date in order to purchase merchandise/ raw material/ equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah menggunakan fasilitas kredit ini masing-masing sebesar Rp 23.750.544.079, Rp 16.081.099.555 dan Rp 9.940.830.642.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has utilized these credit facilities amounting to Rp 23,750,544,079, Rp 16,081,099,555 and Rp 9,940,830,642, respectively.

#### **Pembatasan-pembatasan**

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* (di luar Bagian Lancar Utang Jangka Panjang) lebih dari 1 (satu) kali;
- *Rasio Interest Bearing Debts (Net Debts)* dan utang pemegang saham dibanding *Equity* kurang dari 3 (tiga) kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih dari 100%.

Perusahaan disyaratkan untuk memenuhi batasan umum dan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi batasan umum dan rasio keuangan yang dipersyaratkan.

#### **PT Palapa Timur Telematika (PTT) - Entitas Anak**

Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) tanggal 16 Maret 2017, PTT memperoleh fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi Paket 1 dan 2 ("KI paket 1 dan 2") masing-masing sebesar Rp 2.075.800.000.000 dan Rp 1.667.200.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional Paket Timur 1 yang menghubungkan 35 kabupaten/kota di Nusa Tenggara timur, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan panjang sekitar 2.780 km (*inland*) dan 4.670 km (*submarine*). Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).

#### **Covenants**

Based on the agreement, the Company is required to comply with several terms and conditions, including maintaining financial ratios as follows:

- Current ratio (exclude Current Portion Long Term Debts) of more than 1 (one) time;
- Interest Bearing Debts (Net Debts) and Shareholder Loan to Equity ratio is less than 3 (three) times; and
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of more than 100%.

The Company is required to fulfill certain general covenant and financial ratio. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company complied with the required general covenant and financial ratio.

#### **PT Palapa Timur Telematika (PTT) - a Subsidiary**

Based on Credit Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dated March 16, 2017, PTT obtained the following credit facilities:

- a. Investment Credit Facility package 1 and 2 ("KI package 1 and 2") amounted to Rp 2,075,800,000,000 and Rp 1,667,200,000,000, respectively, used to finance the construction of Backbone network of National Fiber Optic East Package 1 which connected 35 towns/cities in East Nusa Tenggara, Maluku, Papua and West Papua with length around 2,780 km (*inland*) and 4,670 km (*submarine*). The term of credit facilities is ten (10) years from the signing of the Credit Agreement (include grace period and availability period within two (2) years, which is from March 16, 2017 until March 16, 2027).

- b. Fasilitas Kredit Investasi - bunga dalam pembangunan (IDC) sebesar Rp 261.000.000.000 untuk pembiayaan bunga untuk kebutuhan pembayaran kewajiban bunga selama masa konstruksi. Jangka waktu fasilitas kredit adalah sepuluh (10) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk *grace period* dan *availability period* selama dua (2) tahun, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2027).

Fasilitas ini dijamin dengan peralatan serat optik dan infrastruktur sesuai perjanjian antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, tanah yang akan digunakan sebagai lokasi infrastruktur fiber optik milik PTT, tagihan termin selama masa sewa kredit 10 tahun antara antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, pembayaran klaim kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), gadai saham Perusahaan atas nama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan PT Mora Telematika Indonesia, dan *Personal Guarantee* dari Galumbang Menak, pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo utang pokok atas fasilitas ini dari BNI masing-masing sebesar Rp 2.866.550.000.000, Rp 3.412.526.000.000 dan Rp 3.958.502.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, suku bunga yang dikenakan sebesar 9,75% per tahun.

Bunga pinjaman yang dibayarkan atas keseluruhan fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 311.764.707.958, Rp 366.780.615.500 dan Rp 348.795.160.871 pada tahun 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35).

Pembatasan atas perjanjian kredit PTT dengan BNI meliputi pengikatkan diri sebagai penjamin utang/menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain dan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.

- b. Investment Credit Facility – Interest During Construction (IDC) amounted to Rp 261,000,000,000 used to finance the interest in obligation for interest payment during construction. The term of credit facilities is ten (10) years from the signing of the Credit Agreement (including grace period and availability period within two (2) years, which is from March 16, 2017 until March 16, 2027).

These facilities are secured by the equipment of fiber optic and infrastructure as stated in an agreement between Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo/BP3TI) and PTT, land which used as infrastructure location of fiber optic owned by PTT, receivable during rental credit period for 10 years between antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo/BP3TI) dan PTT, claim payments to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), pledges of shares of the Company on behalf PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera and PT Mora Telematika Indonesia, and Personal Guarantee of Galumbang Menak, a related party.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the outstanding balances of bank loans from these facilities from BNI amounted to Rp 2,866,550,000,000, Rp 3,412,526,000,000 and Rp 3,958,502,000,000, respectively.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the interest rate is 9.75% per annum.

Total payment of interest expense on these loan facilities amounted to Rp 311,764,707,958, Rp 366,780,615,500 and Rp 348,795,160,871 in 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 35).

The covenant for credit facility from BNI is that PTT not allowed to be debt guarantors/pledging assets to other parties and obtaining credit/loan facilities from other parties.



**24. Liabilitas Sewa**

**24. Lease Liabilities**

	2021	2020	2019	
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	48.249.569.474	69.829.464.032	89.096.278.950	PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia
PT Verena Multi Finance Tbk	41.265.650.277	49.360.808.016	-	PT Verena Multi Finance Tbk
Lain-lain	26.320.361.639	36.458.446.481	-	Others
<b>Jumlah</b>	<b>115.835.581.390</b>	<b>155.648.718.529</b>	<b>89.096.278.950</b>	<b>Total</b>

Pada tahun 2019, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK No. 30. Sedangkan mulai tahun 2021 dan 2020, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73.

In 2019, transactions that met finance lease criteria under PSAK No. 30 were recorded as lease liabilities. While in 2021 and 2020, transactions were recorded as lease liabilities if it met lease criteria in accordance with PSAK 73.

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (*future minimum lease payment*) berdasarkan perjanjian sewa:

The following are the future minimum lease payments based on the lease agreement:

	2021	2020	2019	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:				Payments due in:
2020	-	-	28.701.626.883	2020
2021	-	59.976.716.363	28.701.626.883	2021
2022	57.204.972.834	54.571.428.103	28.701.626.883	2022
2023	42.360.906.475	40.442.773.901	25.708.041.227	2023
2024	15.570.307.629	14.156.526.491	-	2024
2025	15.154.650.671	13.826.764.616	-	2025
2026	947.836.138	-	-	2026
<b>Jumlah pembayaran sewa minimum</b>	<b>131.238.673.747</b>	<b>182.974.209.474</b>	<b>111.812.921.876</b>	<b>Total minimum lease liabilities</b>
Bunga	(15.403.092.357)	(27.325.490.945)	(22.716.642.926)	Interest
Nilai sekarang pembayaran sewa minimum	115.835.581.390	155.648.718.529	89.096.278.950	Present value of minimum lease liabilities
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(49.054.755.294)	(48.421.582.510)	(19.266.814.917)	Less: Current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	66.780.826.096	107.227.136.019	69.829.464.033	Long-term portion of lease liabilities - net of current portion

Pembayaran jumlah pokok utang liabilitas sewa untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 29.675.052.297, Rp 19.903.983.838 dan Rp 17.201.666.860.

Total payments of the principal lease liabilities amounted to Rp 29,675,052,297, Rp 19,903,983,838 and Rp 17,201,666,860 in 2021, 2020 and 2019, respectively.

Pada tanggal 19 September 2018, Perusahaan melakukan perjanjian sewa dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) atas perolehan fiber optik dan peralatan telekomunikasi. Liabilitas sewa berjangka waktu lima (5) tahun dan akan jatuh tempo pada Oktober 2023, dengan suku bunga efektif 11,5% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa (Catatan 13).

On September 19, 2018, the Company entered into lease agreement with PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) for the acquisition of fiber optic and telecommunication equipment. This liability has terms of five (5) years and will be due on October 2023, with effective interest rates at 11.5% per annum which are collateralized with the related leased assets (Note 13).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 20 November 2020, Perusahaan melakukan perjanjian sewa dengan PT Verena Multi Finance Tbk atas perolehan fiber optik dan peralatan telekomunikasi. Liabilitas sewa berjangka waktu lima (5) tahun akan jatuh tempo pada Desember 2025, dengan suku bunga efektif 10,5% per tahun (Catatan 13).

Beban bunga sewa adalah masing-masing sebesar Rp 11.565.102.773, Rp 9.588.912.182 dan Rp 13.024.681.241 pada tahun 2021, 2020 dan 2019 (Catatan 35).

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (future minimum lease payment) berdasarkan perjanjian sewa antara Grup dan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) dan PT Verena Multi Finance Tbk:

On November 20, 2020, the Company entered into lease agreement with PT Verena Multi Finance Tbk for the acquisition of fiber optic and telecommunication equipment. This liability has terms of five (5) years and will be due on December 2025, with effective interest rates at 10.5% per annum (Note 13).

The lease interest expense amounted to Rp 11,565,102,773, Rp 9,588,912,182 and Rp 13,024,681,241 in 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 35).

The following are the future minimum lease payments based on the lease agreement between the Group and PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia (MULI) and PT Verena Multi Finance Tbk:

	2021	2020	2019	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:				Payments due in:
2020	-	-	28.701.626.883	2020
2021	-	40.522.798.883	28.701.626.883	2021
2022	40.522.798.883	41.597.450.883	28.701.626.883	2022
2023	38.603.865.225	38.603.865.227	25.708.041.227	2023
2024	12.895.824.000	12.895.824.000	-	2024
2025	12.895.824.000	12.895.824.000	-	2025
Jumlah pembayaran sewa minimum	104.918.312.108	146.515.762.993	111.812.921.876	Total minimum lease liabilities
Bunga	(15.403.092.357)	(27.325.490.945)	(22.716.642.926)	Interest
Nilai sekarang pembayaran sewa minimum	89.515.219.751	119.190.272.048	89.096.278.950	Present value of minimum lease liabilities
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(32.372.601.029)	(28.967.665.030)	(19.266.814.917)	Less: current portion
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	57.142.618.722	90.222.607.018	69.829.464.033	Long-term portion of lease liabilities - net of current portion

## 25. Utang Obligasi

Perincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

Seri/ Series	Suku Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo (Tahun)/ Due Date (Year)	Nilai Nominal/ Nominal Value	2021	2020	2019
Seri A/Series A	9,90%	3	540.000.000.000	-	-	540.000.000.000
Seri B/Series B	10,50%	5	460.000.000.000	460.000.000.000	460.000.000.000	460.000.000.000
Jumlah utang obligasi/Total outstanding bonds				460.000.000.000	460.000.000.000	1.000.000.000.000
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi/ Unamortized provision fee and transaction costs				(1.138.000.930)	(2.159.868.068)	(5.071.591.716)
Jumlah - bersih/net				458.861.999.070	457.840.131.932	994.928.408.284

## 25. Bonds Payable

The following are the details of bonds payable:

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pada bulan Desember 2017, Grup menerbitkan obligasi dalam Rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan suku bunga tetap, bunga dibayar setiap triwulanan, dan tanpa jaminan atas obligasi ini. Jangka waktu obligasi Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2020 dengan suku bunga tetap 9,9%. Jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022 dengan suku bunga tetap 10,5% per tahun. Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.

In December 2017, the Group issued denominated bonds in Rupiah amounting to Rp 1,000,000,000,000 with fixed interest rate payable quarterly, and without collateral. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2020. Interest rate is fixed at 9.9% per annum. The Series B bonds have a term of five (5) years until 2022. Interest rate is fixed at 10.5% per annum. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank Mega Tbk as trustee.

Amortisasi biaya provisi dan biaya transaksi adalah masing-masing sebesar Rp 1.021.867.137, Rp 2.920.540.316 dan Rp 2.622.649.881 pada tahun 2021, 2020 dan 2019, disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 35).

Amortization of provision fee and transactions costs amounted to Rp 1,021,867,137, Rp 2,920,540,316 and Rp 2,622,649,881 in 2021, 2020 and 2019, respectively, were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 35).

Rencana penggunaan dana obligasi adalah untuk (i) 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone dan proyek FTTX (ii) 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan.

Usage plan of obligation fund is used for (i) 90% for investment of backbone network construction and Project FTTX (ii) 10% for working capital of the Company.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, peringkat obligasi yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, based on the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia, the bonds are rated is A.

Jadwal pembayaran pokok di masa yang akan datang atas saldo utang obligasi adalah sebagai berikut:

The future scheduled principal payments of the bond outstanding are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Jumlah/Total</u>
Obligasi 1 Moratelindo 2017 Seri A	540.000.000.000	-	-	540.000.000.000
Obligasi 1 Moratelindo 2017 Seri B	-	-	460.000.000.000	460.000.000.000
	<u>540.000.000.000</u>	<u>-</u>	<u>460.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000.000</u>

Perusahaan telah melakukan pelunasan atas Obligasi Seri A sebesar Rp 540.000.000.000 pada bulan Desember 2020.

The Company has paid Obligation Series A amounting Rp 540,000,000,000, in December 2020.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**26. Sukuk Ijarah**

Perincian sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

Seri/ Series	Imbalan hasil sukuk ijarah/Profit sharing of sukuk ijarah	Jatuh Tempo (Tahun/ Due Date (Year)	Nilai Nominal/ Nominal Value	2021	2020	2019
Seri A Tahap I/Series A Phase I	103.059.000.000	3	347.000.000.000	347.000.000.000	347.000.000.000	347.000.000.000
Seri B Tahap I/Series B Phase I	342.825.000.000	5	653.000.000.000	653.000.000.000	653.000.000.000	653.000.000.000
Seri A Tahap II/Series A Phase II	60.165.000.000	3	191.000.000.000	191.000.000.000	191.000.000.000	-
Seri B Tahap II/Series B Phase II	48.375.000.000	5	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000	-
Seri A Tahap III/Series A Phase III	105.009.975.000	3	333.365.000.000	333.365.000.000	333.365.000.000	-
Seri B Tahap III/Series B Phase III	31.584.375.000	5	56.150.000.000	56.150.000.000	56.150.000.000	-
Seri A Tahap III/Series A Phase IV	144.248.250.000	3	469.100.000.000	469.100.000.000	-	-
Seri B Tahap III/Series B Phase IV	16.995.000.000	5	30.900.000.000	30.900.000.000	-	-
Jumlah sukuk ijarah/Total outstanding sukuk ijarah				2.166.515.000.000	1.666.515.000.000	1.000.000.000.000
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap I/ <i>Unamortized provision fee and transaction costs Phase I</i>				(4.022.910.307)	(6.197.867.119)	(8.315.748.798)
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap II/ <i>Unamortized provision fee and transaction costs Phase II</i>				(1.448.513.447)	(1.918.898.083)	-
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap III/ <i>Unamortized provision fee and transaction costs Phase III</i>				(2.272.424.348)	(3.167.495.226)	-
Biaya provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi Tahap IV/ <i>Unamortized provision fee and transaction costs Phase IV</i>				(3.446.328.347)	-	-
Jumlah - bersih/net				2.155.324.823.551	1.655.230.739.572	991.684.251.202
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun/ <i>Less current portion</i>				346.332.585.924	-	-
Bagian sukuk ijarah yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun/ <i>Long-term portion of sukuk ijarah - net of current portion</i>				1.808.992.237.627	1.655.230.739.572	991.684.251.202

**26. Sukuk Ijarah**

The following are the details of sukuk ijarah:

Pada bulan Juli 2019, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I dalam Rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 2.539.956.811, Rp 2.292.881.679 dan Rp 1.103.440.130 pada tahun 2021, 2020 dan 2019, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 35).

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 85% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan backbone termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable, Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur (ii) 15% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan.

In July 2019, the Company issued sustainable sukuk ijarah in Rupiah amounting to Rp 1.000.000.000.000, with fixed ijarah installments payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2022 and the Series B bonds have a term of five (5) years until 2024. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization on sukuk ijarah amounted to Rp 2,539,956,811, Rp 2,292,881,679 and Rp 1,103,440,130 in 2021, 2020 and 2019, respectively, and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 35).

Usage plan of obligation fund is used for (i) 85% for investment of backbone network construction including passive and active devices and infrastructure. The proceeds are also be used for the construction of *Inland Cable, Ducting*, and supporting devices for active and passive infrastructure (ii) 15% for working capital of the Company.

Pada bulan Agustus 2020, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II dalam Rupiah sebesar Rp 277.000.000.000, dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 668.014.636 dan Rp 258.100.842 pada tahun 2021 dan 2020, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 35).

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 90% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan *backbone* dan *access* termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable, Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru (ii) 10% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan.

Pada bulan Oktober 2020, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap III dalam Rupiah sebesar Rp 389.515.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah masing-masing sebesar Rp 1.109.078.728 dan Rp 207.726.467 pada tahun 2021 dan 2020, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 35).

In August 2020, the Company issued sustainable sukuk ijarah in Rupiah amounting to Rp 277,000,000,000 sustainable sukuk ijarah I phase II, with fixed ijarah instalment payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2023 and the Serie B bonds have a term of five (5) years until 2025. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization on sukuk ijarah amounted to Rp 668,014,636, and Rp 258,100,842 in 2021 and 2020, respectively, and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 35).

Usage plan of obligation fund is used for (i) 90% for investment of backbone network construction and access including passive and active devices and infrastructure. This also be used for the construction of *Inland Cable, Ducting*, and supporting devices for active and passive in several islands in Indonesia, it's used to increase the capacity of existing networks and addition new capacity (ii) 10% for working capital of the Company.

In October 2020, the Company issued sustainable sukuk ijarah in Rupiah amounting to Rp 389,515,000,000 sustainable sukuk ijarah I phase III, with fixed ijarah instalment payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2023 and the Serie B bonds have a term of five (5) years until 2025. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization on sukuk ijarah amounted to Rp 1,109,078,728 and Rp 207,726,467 in 2021 and 2020, respectively, and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 35).

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 75% akan digunakan untuk *refinancing* Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A (ii) 25% untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan *backbone* dan *access* termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable, Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru.

Pada bulan Mei 2021, Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap IV dalam Rupiah sebesar Rp 500.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah tetap dibayar setiap triwulanan. Jangka waktu Seri A adalah tiga (3) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024 dan jangka waktu obligasi Seri B adalah lima (5) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2026. Seluruh sukuk ijarah dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat.

Amortisasi sukuk ijarah adalah sebesar Rp 813.787.036 pada tahun 2021, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban bunga dan keuangan" dalam laba rugi (Catatan 35).

Rencana penggunaan dana sukuk ijarah adalah untuk (i) 80% akan digunakan untuk kebutuhan investasi pembangunan jaringan *backbone* dan *access* termasuk perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable, Ducting*, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif di beberapa pulau di Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada maupun penambahan kapasitas baru 20% untuk untuk modal kerja.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, peringkat sukuk ijarah Perusahaan yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A (sy).

Jadwal pembayaran pokok di masa yang akan datang atas saldo sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah/Total
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A	347.000.000.000	-	-	-	-	347.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	-	-	653.000.000.000	-	-	653.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri A	-	191.000.000.000	-	-	-	191.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri B	-	-	-	86.000.000.000	-	86.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A	-	333.365.000.000	-	-	-	333.365.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B	-	-	-	56.150.000.000	-	56.150.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap IV Tahun 2020 Seri A	-	-	469.100.000.000	-	-	469.100.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan 1 Moratelindo Tahap IV Tahun 2020 Seri B	-	-	-	-	30.900.000.000	30.900.000.000
	<u>347.000.000.000</u>	<u>524.365.000.000</u>	<u>1.122.100.000.000</u>	<u>142.150.000.000</u>	<u>30.900.000.000</u>	<u>2.166.515.000.000</u>

Usage plan of obligation fund is used for (i) 75% for refinancing Obligation Moratelindo 2017 Series A (ii) 25% for investment of backbone network construction and access including passive and active devices and infrastructure. This also be used for the construction of Inland Cable, Ducting, and supporting devices for active and passive in several islands in Indonesia, it's used to increase the capacity of existing networks and addition new capacity.

In May 2021, the Company issued Rupiah amounting to Rp 500,000,000,000 sustainable sukuk ijarah I fase IV, with fixed ijarah instalment payable quarterly. The Series A bonds have a term of three (3) years until 2024 and the Serie B bonds have a term of five (5) years until 2026. All the bonds were sold at its nominal value and are listed at the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank KB Bukopin Tbk as trustee.

Amortization on sukuk ijarah amounted to Rp 813,787,036 in 2021 and were presented as part of "Interest expense and financial charges" in profit or loss (Note 35).

Usage plan of obligation fund is used for (i) 80% for investment of backbone network construction and access including passive and active devices and infrastructure. This also be used for the construction of Inland Cable, Ducting, and supporting devices for active and passive in several islands in Indonesia, it's used to increase the capacity of existing networks and addition new capacity and 20% for capital expenditure.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, based on the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia, the sukuk ijarah are rated is A (sy).

The future scheduled principal payments of the sukuk ijarah outstanding are as follows:

## 27. Utang Kepada Pemegang Saham

Utang kepada pemegang saham merupakan uang muka setoran modal dari PT Candrakarya Multikreasi berdasarkan perjanjian mengenai uang muka setoran modal Perusahaan No. 012/PKS/MTI-CKM-I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang telah diamandemen pada tanggal 20 Desember 2018 dengan perjanjian No. 126/AMD/MTI-CKM/XII/2018.

Utang kepada pemegang saham ini akan dikonversi seluruhnya menjadi modal saham Perusahaan dan tidak ada pengenaan bunga.

Pada tahun 2021 Perusahaan telah melunasi utang pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo utang kepada pemegang saham sebesar Rp 844.408.372.000.

## 28. Pengukuran Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Grup:

31 Desember/ December 31, 2021			
Pengukuran nilai wajar menggunakan/ Fair value measurement using:			
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasian dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)
<b>Aset yang diukur pada nilai wajar:</b>			
<b>Aset tetap dengan model revaluasi</b>			
Bangunan	109.568.613.163	-	109.568.613.163
Perangkat dan perabot kantor	38.089.689.956	-	38.089.689.956
Peralatan telekomunikasi	5.406.589.704.938	-	5.406.589.704.938
Kendaraan	13.984.535.113	-	13.984.535.113
<b>Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan</b>			
Pinjaman dan utang dengan bunga			
Utang bank (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	5.109.587.255.814	-	5.109.587.255.814
Liabilitas sewa (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	89.515.219.751	-	89.515.219.751
Utang obligasi (bagian jangka pendek)	458.861.999.070	-	458.861.999.070
Utang pinjaman (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	56.630.969.306	-	56.630.969.306
<b>Assets measured at fair value:</b>			
<b>Revalued property and equipment</b>			
			Buildings
			Office furniture and fixtures
			Telecommunication facilities
			Vehicles
<b>Liabilities for which fair values are disclosed:</b>			
Interest-bearing loans and borrowings:			
			Bank loans (including current and noncurrent portion)
			Lease liabilities (including current and noncurrent portion)
			Bonds payable (including current portion)
			Loan payable (including current and noncurrent portion)

## 27. Shareholder Loan

Shareholder loan represents deposit for future stock subscription of PT Candrakarya Multikreasi based on an agreement regarding providing deposit for future stock subscription of the Company with No. 012/PKS/MTI-CKMI/2017 dated January 18, 2017 which was amended on December 20, 2018 with agreement No. 126/AMD/MTI-CKM/XII/2018.

Shareholder loan will be converted into the Company's share capital and is non-interest bearing.

In 2021, Company has fully paid the shareholder loan.

As of December 31, 2020 and 2019, the balance of shareholder loan amounted to Rp 844,408,372,000.

## 28. Fair Value Measurement

The following table provides the fair value measurement of the Group's certain assets and liabilities:

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

		31 Desember 2020/December 31, 2020				
		Pengukuran nilai wajar menggunakan: Fair value measurement using:				
		Harga kuotasian dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)		
Nilai Tercatat/ Carrying Values						
<b>Aset yang diukur pada nilai wajar:</b>						
<b>Aset tetap dengan model revaluasi</b>						
Bangunan	94.110.707.475	-	94.110.707.475	-	<b>Assets measured at fair value:</b>	
Perangkat dan perabot kantor	50.598.713.728	-	50.598.713.728	-	<b>Revalued property and equipment</b>	
Peralatan telekomunikasi	4.845.903.257.683	-	4.845.903.257.683	-	Buildings	
Kendaraan	13.412.029.149	-	13.412.029.149	-	Office furniture and fixtures	
					Telecommunication facilities	
					Vehicles	
<b>Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan</b>						
<b>Pinjaman dan utang dengan bunga</b>						
Utang bank (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	4.914.697.218.327	-	4.914.697.218.327	-	<b>Liabilities for which fair values are disclosed:</b>	
Utang obligasi (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	457.840.131.932	-	457.840.131.932	-	Interest-bearing loans and borrowings:	
Utang pinjaman (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	21.990.464.042	-	21.990.464.042	-	Bank loans (including current and noncurrent portion)	
					Bonds payable (including current and noncurrent portion)	
					Loan payable (including current and noncurrent portion)	
<b>31 Desember 2019/December 31, 2019</b>						
		Pengukuran nilai wajar menggunakan: Fair value measurement using:				
		Harga kuotasian dalam pasar aktif/ (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)		
Nilai Tercatat/ Carrying Values						
<b>Aset yang diukur pada nilai wajar:</b>						
<b>Aset tetap dengan model revaluasi</b>						
Bangunan	95.337.064.082	-	95.337.064.082	-	<b>Assets measured at fair value:</b>	
Perangkat dan perabot kantor	20.356.313.627	-	20.356.313.627	-	<b>Revalued property and equipment</b>	
Peralatan telekomunikasi	2.993.963.282.897	-	2.993.963.282.897	-	Buildings	
Kendaraan	5.717.545.414	-	5.717.545.414	-	Office furniture and fixtures	
					Telecommunication facilities	
					Vehicles	
<b>Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan</b>						
<b>Pinjaman dan utang dengan bunga</b>						
Utang bank (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	6.406.148.835.252	-	6.406.148.835.252	-	<b>Liabilities for which fair values are disclosed:</b>	
Utang obligasi (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	994.928.408.284	-	994.928.408.284	-	Interest-bearing loans and borrowings:	
Utang pinjaman (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang)	35.154.808.142	-	35.154.808.142	-	Bank loans (including current and noncurrent portion)	
					Bonds payable (including current and noncurrent portion)	
					Loan payable (including current and noncurrent portion)	

## Hirarki Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Jika satu atau lebih input signifikan tidak diambil dari data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki level 3.

## Fair Value Hierarchy

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan seperti analisa arus kas diskonto, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan.

Specific valuation techniques used to value financial instruments such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value of the financial instruments.

Pengukuran nilai wajar berulang aset non keuangan termasuk dalam Level 2 hirarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2.

The fair value measurement for recurring non-financial assets falls within level 2 of the fair value hierarchy outlined in Note 2.

Informasi tentang pengukuran nilai wajar yang menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 2) adalah pendekatan harga pasar pembandingan untuk bangunan, perangkat dan perabot kantor, peralatan telekomunikasi dan kendaraan.

The information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 2) is market comparable approach for building, office furniture and fixtures, telecommunication facilities and vehicles.

Seluruh aset dimanfaatkan pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

All assets are based on their highest and best use.

Aset-aset tertentu telah dinilai oleh penilai independen sebagaimana diungkapkan pada Catatan 13.

These assets have been valued by independent valuers as mentioned in Note 13.

## **29. Modal Saham**

## **29. Capital Stock**

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 21 Desember 2021 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.813.370.280.000 sehingga menjadi sebesar Rp 2.112.120.439.015 dengan menerbitkan saham Seri C. Penambahan tersebut berasal dari PT Candrakarya Multikreasi, PT Gema Lintas Benua, dan PT Smart Telecom masing-masing sebesar Rp 664.292.832.000, Rp 490.999.256.000, dan Rp 658.078.192.000.

Based on Notarial Deed No. 39 dated December 21, 2021 of Aulia Taufani, S.H., a public notary in Jakarta, the Company increased its authorized, issued and paid-up capital by Rp 1,813,370,280,000 so paid-up capital becomes Rp 2,112,120,439,015 by issuing Series C shares. The increase was paid by PT Candrakarya Multikreasi, PT Gema Lintas Benua, and PT Smart Telecom amounted to Rp 664,292,832,000, Rp 490,999,256,000, and Rp 658,078,192,000, respectively.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-007453.AH.01.02.TAHUN.2021 tanggal 22 Desember 2021. Rencana penggunaan dana ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan.

These amendment have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-007453.AH.01.02.TAHUN.2021 dated December 22, 2021. Usage plan of this fund for strengthening capital structure of the Company.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's stockholders as of December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:

Pemegang Saham	Jenis Saham	Nilai Nominal/ Nominal Value	31 Desember 2021/ December 31, 2021			Name of Stockholder	Series shares
			Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Total/ Paid-up Capital Stock Rp		
PT Gema Lintas Benua	Seri A	100.000	250.000	33,78	25.000.000.000	PT Gema Lintas Benua	Series A shares Series C shares
	Seri C	2.372.000	206.998		490.999.256.000		
PT Candrakarya Multikreasi	Seri B	809.349	338.235	45,71	273.750.159.015	PT Candrakarya Multikreasi	Series B shares Series C shares
	Seri C	2.372.000	280.056		664.292.832.000		
PT Smart Telecom	Seri C	2.372.000	277.436	20,51	658.078.192.000	PT Smart Telecom	Series C shares
Jumlah			1.352.725	100,00	2.112.120.439.015	Total	

Pemegang Saham	Nilai Nominal/ Nominal Value	31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019/ December 31, 2020 and December 31, 2019			Name of Stockholder
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah Total/ Paid-up Capital Stock Rp	
Saham seri A					Series A shares
PT Gema Lintas Benua	100.000	250.000	42,50	25.000.000.000	PT Gema Lintas Benua
Saham seri B					Series B shares
PT Candrakarya Multikreasi	809.349	338.235	57,50	273.750.159.015	PT Candrakarya Multikreasi
Jumlah		588.235	100,00	298.750.159.015	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 49 tanggal 17 Juni 2021 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 658.750.971.015 dengan menerbitkan saham Seri C sebesar 151.771 lembar saham yang memiliki nilai nominal sebesar Rp 2.372.000 per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 360.000.812.000. Seluruh saham Seri C ini diambil dan disetor penuh oleh PT Smart Telecom. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0034815.AH.01.02 tanggal 17 Juni 2021. Rencana penggunaan dana ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan.

Based on Notarial Deed No.49 dated June 17, 2021 of Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, the Company increased the authorized, issued and paid-up capital to Rp 658,750,971,015 by issuing of 151.771 Series C shares with par value of Rp 2,372,000 per share or a total of Rp 360,000,812.000. All of these Series C shares were taken and fully paid up by PT Smart Telecom. The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republik Indonesia in His Decision Letter No. AHU-0034815.AH.01.02 dated June 17, 2021. Usage plan of this fund for strengthening capital structure of the Company.

### Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

### Capital Management

The primary objective of Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Grup memantau modalnya dengan menggunakan analisa rasio utang terhadap modal, yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. The Group monitors its capital using debt to equity ratio, by dividing net debt with the total equity.

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity as of December 31, 2021, 2020 and 2019 follows:

	2021	2020	2019	
Jumlah pinjaman	7.896.240.629.131	7.205.407.272.402	8.533.199.895.535	Total borrowings
Dikurangi: kas dan setara kas	1.059.195.935.019	494.777.973.772	1.432.164.203.492	Less: cash and cash equivalents
Utang bersih	6.837.044.694.112	6.710.629.298.630	7.101.035.692.043	Net debt
Jumlah ekuitas	4.558.377.706.983	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141	Total equity
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	149,99%	209,22%	323,84%	Net debt to equity

**30. Tambahan Modal Disetor**

**30. Additional Paid-in Capital**

Akun ini merupakan tambahan modal disetor sehubungan dengan:

This account represents additional paid-in capital in connection with the following:

	2021	2020	2019	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali	(5.551.275.912)	(5.551.275.912)	(5.551.275.912)	Difference in value of restructuring transactions among entities under common control
Penambahan dari program pengampunan pajak	3.021.187.000	3.021.187.000	3.021.187.000	Additional from tax amnesty program
Saldo akhir	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	Ending balance

Tambahan modal disetor sebesar Rp 5.551.275.912 merupakan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat investasi di PT Indo Pratama Teleglobal, yang diakuisisi untuk entitas sepengendali.

Additional paid in capital amounting to Rp 5,551,275,912 represents the difference between the consideration transferred and the carrying amount of investment in PT Indo Pratama Teleglobal, an associate acquired from an entity under common control.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**31. Kepentingan Nonpengendali**

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

**31. Non-controlling Interest**

This account represents the share of non-controlling stockholders on the net assets of the subsidiaries, with details as follows:

31 Desember/ December 31, 2021							
Entitas Anak/ Subsidiary	Modal Saham/ Capital Stock	Saldo Laba/ Retained Earnings	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a Subsidiary	Laba periode berjalan/ Profit for the year	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive Income	Dividen/ Dividends	Jumlah/ Total
PT Palapa Ring Barat	1.100.000.000	2.529.267.322	-	901.158.476	7.284.502	-	4.537.710.300
PT Oxygen Multimedia Indonesia	1.000.000	46.280.004	-	48.982.679	(209.480)	(46.000.000)	50.053.203
PT Palapa Timur Telematika	3.300.000.000	262.726.452.667	-	86.244.320.086	242.879.055	-	352.513.651.808
PT Indo Pratama Teleglobal *)	3.923.500.000	-	6.201.199.164	5.255.314.237	43.900.990	-	15.423.914.391
<b>Jumlah/Total</b>	<b>8.324.500.000</b>	<b>265.301.999.993</b>	<b>6.201.199.164</b>	<b>92.449.775.478</b>	<b>293.855.067</b>	<b>(46.000.000)</b>	<b>372.525.329.702</b>

\*) Diakuisisi di tahun 2021/ Acquired in 2021

31 Desember/December 31, 2020							
Entitas Anak/ Subsidiary	Modal Saham/ Capital Stock	Saldo Laba/ Retained Earnings	Laba periode berjalan/ Profit for the year	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive Income	Dividen/ Dividends	Jumlah/ Total	
PT Palapa Ring Barat	1.100.000.000	1.641.234.511	890.838.987	(2.806.176)	-	3.629.267.322	
PT Oxygen Multimedia Indonesia	1.000.000	30.832.660	45.168.306	(120.962)	(29.600.000)	47.280.004	
PT Palapa Timur Telematika	3.300.000.000	162.057.280.986	100.738.136.776	(68.965.095)	-	266.026.452.667	
<b>Jumlah/Total</b>	<b>4.401.000.000</b>	<b>163.729.348.157</b>	<b>101.674.144.069</b>	<b>(71.892.233)</b>	<b>(29.600.000)</b>	<b>269.702.999.993</b>	

31 Desember/December 31, 2019							
Entitas Anak/ Subsidiary	Modal Saham/ Capital Stock	Saldo Laba/ Retained Earnings	Laba periode berjalan/ Profit for the year	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive Income	Dividen/ Dividends	Jumlah/ Total	
PT Palapa Ring Barat	1.100.000.000	857.640.996	788.690.003	(5.096.488)	-	2.741.234.511	
PT Oxygen Multimedia Indonesia	1.000.000	15.129.139	88.756.762	(376.636)	(72.676.605)	31.832.660	
PT Palapa Timur Telematika	3.300.000.000	78.929.454.571	83.677.152.193	(549.325.778)	-	165.357.280.986	
<b>Jumlah/Total</b>	<b>4.401.000.000</b>	<b>79.802.224.706</b>	<b>84.554.598.958</b>	<b>(554.798.902)</b>	<b>(72.676.605)</b>	<b>168.130.348.157</b>	

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**32. Pendapatan**

**32. Revenues**

	2021	2020	2019	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan				Revenue from contracts with customers
Penyelenggaraan telekomunikasi				Telecommunication operations
Jaringan domestik	1.124.618.347.830	1.107.461.784.585	656.836.496.844	Domestic link
Internet	811.755.666.704	620.655.372.188	544.501.706.145	Internet
Jaringan internasional	325.288.088.540	297.871.817.108	201.851.318.185	International link
VSAT	106.023.020.087	-	-	VSAT
Sub Jumlah	<u>2.367.685.123.161</u>	<u>2.025.988.973.881</u>	<u>1.403.189.521.174</u>	Subtotal
Non- penyelenggaraan telekomunikasi				Non-telecommunication operations
Pendapatan dari proyek konsesi	1.217.252.904.368	1.307.875.348.640	946.907.962.899	Revenue from concession project
Pusat data	37.606.592.683	26.472.355.803	23.909.148.323	Data Center
Pendapatan konstruksi dari konsesi jasa	-	-	1.266.799.785.223	Construction revenue from concession project
Lain-lain	541.190.473.252	392.052.833.872	415.684.441.800	Others
Sub Jumlah	<u>1.796.049.970.303</u>	<u>1.726.400.538.315</u>	<u>2.653.301.338.245</u>	Subtotal
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	<u>4.163.735.093.464</u>	<u>3.752.389.512.196</u>	<u>4.056.490.859.419</u>	Total revenue from contracts with customers
Indefeasible Right of Use (IRU) (Catatan 21)	<u>16.337.972.691</u>	<u>13.298.622.598</u>	<u>5.890.692.332</u>	Indefeasible Rights of Use (IRU) (Note 21)
Jumlah pendapatan	<u>4.180.073.066.155</u>	<u>3.765.688.134.794</u>	<u>4.062.381.551.751</u>	Total revenue

Pendapatan non-penyelenggara telekomunikasi - lain-lain merupakan pendapatan dari proyek pembangunan fiberisasi.

Revenues from non-telecommunication operations - others represents revenues derived from fiberization project.

**33. Beban Langsung**

**33. Direct Costs**

Rincian dari beban langsung adalah sebagai berikut:

The details of direct costs are as follows:

	2021	2020	2019	
<b>Penyelenggaraan telekomunikasi</b>				<b>Telecommunication operations</b>
Jaringan domestik	531.617.921.944	588.722.724.034	428.075.756.653	Domestic link
Internet	69.587.483.782	53.136.010.425	40.541.915.211	Internet
VSAT	64.749.833.566	-	-	VSAT
Jaringan internasional	30.329.380.188	31.030.326.517	36.151.640.610	International link
Sub jumlah	<u>696.284.619.480</u>	<u>672.889.060.976</u>	<u>504.769.312.474</u>	Subtotal
<b>Non - penyelenggaraan telekomunikasi</b>				<b>Non - telecommunication operations</b>
Penyusutan (Catatan 13)	453.437.321.676	304.393.477.419	167.023.778.838	Depreciation (Note 13)
BHP - USO	64.964.735.200	60.010.448.387	33.531.929.736	BHP - USO
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	27.650.706.669	22.814.087.827	-	Depreciation of right-of-use assets (Note 14)
Biaya persediaan	24.449.601.472	21.450.967.315	7.419.890.396	Inventory cost
Beban konstruksi dari konsesi jasa	-	-	1.266.799.785.223	Construction cost of concession project
Lain-lain	375.995.801.978	206.962.739.666	151.671.698.174	Others
Sub jumlah	<u>946.498.166.995</u>	<u>615.631.720.614</u>	<u>1.626.447.082.367</u>	Subtotal
Jumlah	<u>1.642.782.786.475</u>	<u>1.288.520.781.590</u>	<u>2.131.216.394.841</u>	Total

Beban langsung non-penyelenggara telekomunikasi - lain-lain merupakan beban dari proyek pembangunan fiberisasi.

Direct cost from non-telecommunication operations - others represents cost derived from fiberization project.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**34. Beban Usaha**

Rincian dari beban usaha adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Gaji dan tunjangan	247.433.566.077	222.258.001.979	179.624.419.267	Salaries and allowances
Perbaikan dan pemeliharaan	244.281.121.481	285.109.762.631	94.261.617.299	Repairs and maintenance
Karyawan alih daya	105.691.301.866	78.822.127.235	65.265.283.745	Outsourcing employee
Asuransi	82.750.937.427	77.212.914.607	54.565.930.017	Insurance
Pemasaran	48.721.933.656	39.199.408.386	29.282.044.247	Marketing
Sewa	45.367.125.131	33.411.976.781	24.724.114.182	Rental
				Depreciation of property and equipment (Note 13)
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	41.918.868.640	24.608.787.824	24.356.637.388	
Komunikasi dan utilitas	33.050.330.044	29.096.715.175	22.534.668.696	Communication and utilities
Perjalanan dinas	25.015.574.804	21.843.997.214	28.895.839.325	Business travel expenses
Imbalan kerja jangka panjang karyawan (Catatan 38)	21.101.290.795	19.519.398.700	13.588.567.399	Long-term employee benefits (Note 38)
Pajak	21.066.671.753	7.790.019.587	2.712.781.111	Tax
Jasa profesional	19.346.886.913	12.625.556.215	16.219.843.989	Professional fees
Beban kantor	17.212.401.064	9.774.629.579	6.148.829.610	Office expenses
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	14.582.754.207	8.136.729.176	-	Depreciation right of use assets (Note 14)
Jamuan dan representasi	11.015.472.030	9.026.151.888	16.501.942.000	Entertainment and representation
Penyisihan piutang ragu-ragu (Catatan 6)	-	7.404.534.305	4.539.621.575	Provision for impairment (Note 6)
Izin legal	6.678.416.422	6.071.300.311	4.292.985.460	Legal license
Amortisasi aset tak berwujud	3.282.829.699	995.981.070	131.177.688	Amortization of intangible asset
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200 juta)	4.781.018.187	12.842.675.253	8.293.392.580	Others (each below Rp 200 million)
Jumlah	<u>993.298.500.196</u>	<u>905.750.667.916</u>	<u>595.939.695.578</u>	Total

**34. Operating Expenses**

The details of operating expenses are as follows

**35. Beban Bunga dan Keuangan**

	2021	2020	2019	
Bunga atas:				Interest on:
Utang bank (Catatan 23)	481.944.022.317	541.684.459.659	480.301.448.295	Bank loans (Note 23)
Sukuk ijarah	179.697.429.640	101.627.293.261	42.882.500.000	Sukuk ijarah
Utang obligasi	48.300.000.000	101.760.000.000	101.760.000.000	Bond payable
Liabilitas sewa (Catatan 24)	11.565.102.773	9.588.912.182	13.024.681.241	Lease liabilities (Note 24)
Aset hak-guna	2.976.018.724	5.374.911.785	-	Right-of-use Assets
Utang non-bank (Catatan 22)	2.349.378.073	1.819.622.248	8.023.109.359	Non-bank loans (Note 22)
Amortisasi utang bank	19.340.965.450	21.427.433.323	18.348.653.976	Amortization bank loans
Amortisasi biaya sukuk ijarah (Catatan 26)	5.130.837.211	2.758.708.988	1.103.440.130	Amortization cost of sukuk ijarah (Note 26)
Amortisasi biaya obligasi (Catatan 25)	1.021.867.138	2.920.540.316	2.622.649.881	Amortization cost of bonds (Note 25)
Provisi	21.770.166.359	27.992.043.505	28.041.075.800	Provision
Jumlah	<u>774.095.787.685</u>	<u>816.953.925.267</u>	<u>696.107.558.682</u>	Total

**35. Interest Expense and Financial Charges**

**36. Lain-lain Bersih**

**36. Others – net**

	2021	2020	2019	
Penghasilan Lain-lain				Other Income
Sewa ruangan	343.174.997	323.562.758	641.192.846	Space rent
Pendapatan pinalti	-	-	215.977.886.597	Penalty income
Pendapatan lain-lain	<u>20.107.385.237</u>	<u>39.237.886.880</u>	<u>3.974.450.000</u>	Other income
Subjumlah	<u>20.450.560.234</u>	<u>39.561.449.638</u>	<u>220.593.529.443</u>	Subtotal
Beban Lain-lain				Other Expense
Beban pinalti	-	-	(21.932.295.000)	Penalty expense
Administrasi bank	(1.221.069.003)	(997.550.195)	(660.294.376)	Bank administration
Beban lain-lain	<u>(6.643.543.428)</u>	<u>(5.577.827.671)</u>	<u>(6.211.073.536)</u>	Other expense
Subjumlah	<u>(7.864.612.431)</u>	<u>(6.575.377.866)</u>	<u>(28.803.662.912)</u>	Subtotal
Jumlah- net	<u>12.585.947.803</u>	<u>32.986.071.772</u>	<u>191.789.866.531</u>	Total - net

Selama tahun 2019, PTT, entitas anak, menerima pendapatan penalti sebagai kompensasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 215.977.886.597 sebagai bagian dari pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi.

In 2019, PTT, a subsidiary, received penalty fees from vendor as compensation for the delay in the finalization of the project amounted to Rp 215,977,886,597 recorded as part of other income-others in the statements of profit or loss.

**37. Pajak Penghasilan**

**37. Income Tax**

Beban pajak Grup terdiri dari:

Tax expense of Group consists of the following:

	2021	2020	2019	
Pajak kini				Current tax
Perusahaan	52.408.989.380	50.444.663.060	41.014.766.500	The Company
Entitas anak	72.628.154.839	44.724.082.124	40.413.595.983	Subsidiaries
Pajak tangguhan	<u>(7.641.666.526)</u>	<u>5.728.240.463</u>	<u>90.541.288.125</u>	Deferred tax
Jumlah	<u>117.395.477.693</u>	<u>100.896.985.647</u>	<u>171.969.650.608</u>	Total

**Pajak Kini**

**Current Tax**

Rekonsiliasi laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company follows:

	2021	2020	2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	801.577.102.383	789.003.277.190	859.893.480.394	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	<u>(612.742.108.065)</u>	<u>(583.184.293.091)</u>	<u>(693.636.517.958)</u>	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>188.834.994.318</u>	<u>205.818.984.099</u>	<u>166.256.962.436</u>	Profit before tax of the Company

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	2021	2020	2019	
Perbedaan temporer:				Temporary differences:
Beban imbalan pasca kerja	15.217.126.724	14.031.724.073	10.196.272.563	Provision for long-term employee
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	22.749.633.917	(26.925.811.609)	(13.335.083.076)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Liabilitas sewa	(9.635.566.031)	(5.709.632.736)	4.539.621.574	Leased liabilities
Pembayaran Pesangon	(554.326.751)	(1.953.501.020)	(1.946.516.288)	Payment of benefit
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	7.291.432.054	(5.728.758.367)	Allowance for impairment
Bersih	<u>27.776.867.859</u>	<u>(13.265.789.238)</u>	<u>(6.274.463.594)</u>	Net
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:				Permanent differences:
Beban jamuan dan representasi	32.970.743.560	26.060.105.036	26.004.634.286	Entertainment and representation
Beban pajak	2.260.921.488	3.678.389.906	798.886.759	Tax expenses
Beban perayaan dan ucapan	450.442.210	1.666.257.671	3.335.930.751	Celebrations and honorings
Beban telepon seluler	11.941.684	13.129.087	10.793.014	Mobile phone expenses
Laba yang telah dikenakan pajak final	(14.498.505.677)	(6.797.274.911)	(25.945.238.403)	Income already subjected to final tax
Lain-lain	415.274.188	12.120.121.796	(128.438.476)	Others
Bersih	<u>21.610.817.453</u>	<u>36.740.728.585</u>	<u>4.076.567.931</u>	Net
Laba kena pajak	<u>238.222.679.630</u>	<u>229.293.923.446</u>	<u>164.059.066.773</u>	Taxable income

Perhitungan beban pajak dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	2021	2020	2019	
Beban pajak kini				Current tax expense
Perusahaan	52.408.989.380	50.444.663.060	41.014.766.500	The Company
Entitas anak	72.628.154.839	44.724.082.124	40.413.595.983	Subsidiaries
Subjumlah	<u>125.037.144.219</u>	<u>95.168.745.184</u>	<u>81.428.362.483</u>	Subtotal
Dikurangi pembayaran dimuka pajak penghasilan				Less prepaid taxes
Perusahaan	50.419.779.494	49.401.256.429	55.925.578.909	The Company
Entitas anak	53.298.207.105	36.297.588.056	18.353.753.862	Subsidiaries
Subjumlah	<u>103.717.986.599</u>	<u>85.698.844.485</u>	<u>74.279.332.771</u>	Subtotal
Kurang bayar pajak kini	<u>21.319.157.620</u>	<u>9.469.900.699</u>	<u>7.149.029.712</u>	Current tax under payment
Rincian kurang (lebih) bayar pajak				Details of under (over) tax payment
Perusahaan (Catatan 10 dan 19)	1.989.209.886	1.043.406.631	(14.910.812.409)	The Company (Note 10 and 19)
Entitas anak (Catatan 19)	19.329.947.734	8.426.494.068	22.059.842.121	Subsidiaries (Note 19)
Jumlah	<u>21.319.157.620</u>	<u>9.469.900.699</u>	<u>7.149.029.712</u>	Total

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 which has been passed into UU No. 2 year 2020 dated May 16, 2020 relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Grup telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah dihitung dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

Laba kena pajak dan beban pajak Grup tahun 2021, 2020 dan 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Grup kepada Kantor Pelayanan Pajak.

#### Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a subsidiary	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2021/ December 31, 2021
<b>Aset pajak tangguhan</b>					
<b>Perusahaan</b>					
Imbalan kerja jangka panjang	15.608.369.458	-	3.225.815.994	(300.691.615)	18.533.493.837
Cadangan kerugian penurunan nilai	4.274.861.499	-	-	-	4.274.861.499
Sewa pembiayaan	(1.929.590.272)	-	(2.119.824.527)	-	(4.049.414.799)
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(18.481.045.859)	-	5.004.919.462	-	(13.476.126.397)
Surplus revaluasi aset tetap	(37.726.268.123)	-	-	7.781.051.155	(29.945.216.968)
Subjumlah	(38.253.673.297)	-	6.110.910.929	7.480.359.540	(24.662.402.828)
<b>Entitas anak</b>					
Rugi fiskal	637.520.204	-	(637.520.204)	-	-
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(203.959.424)	364.348.619	109.618.582	-	270.007.777
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	698.372.122	363.049.422	-	1.061.421.544
Sewa pembiayaan	-	-	37.525.157	-	37.525.157
Imbalan kerja jangka panjang	3.611.166.481	3.630.494.220	1.161.707.709	(488.279.791)	7.915.088.619
Subjumlah	4.044.727.261	4.693.214.961	1.034.380.666	(488.279.791)	9.284.043.097
Aset pajak tangguhan - bersih	(34.208.946.036)	4.693.214.961	7.145.291.595	6.992.079.749	(15.378.359.731)
<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>					
<b>Entitas anak</b>					
Perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal	(2.588.733.399)	-	496.374.931	-	(2.092.358.468)
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	(36.797.679.435)	4.693.214.961	7.641.666.526	6.992.079.749	(17.470.718.199)

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

The Group has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

The Group's deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2021, 2020 dan 2019 have been calculated at the tax rates that are expected to apply when realized.

The taxable income and tax expense of the Group in 2021, 2020 and 2019 are in accordance with the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

#### Deferred Tax

The details of the Group's deferred tax assets (liabilities) follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021
<b>Deferred tax asset</b>	
<b>The Company</b>	
Long-term employee benefits liability	18.533.493.837
Allowance for impairment	4.274.861.499
Finance lease	(4.049.414.799)
Difference between commercial and fiscal depreciation	(13.476.126.397)
Revaluation surplus on property and equipment	7.781.051.155
Subtotal	(24.662.402.828)
<b>Subsidiary</b>	
Fiscal loss	-
Difference between commercial and fiscal depreciation	270.007.777
Allowance for impairment	1.061.421.544
Finance lease	37.525.157
Long-term employee benefits liability	7.915.088.619
Subtotal	9.284.043.097
Deferred tax asset - net	(15.378.359.731)
<b>Deferred tax liability</b>	
<b>Subsidiary</b>	
Difference between commercial and fiscal depreciation	(2.092.358.468)
Deferred tax asset (liability) - net	(17.470.718.199)



**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara jumlah beban (manfaat) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense (benefit) and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax follows:

	2021	2020	2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	801.577.102.383	789.003.277.190	859.893.480.394	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	<u>(612.742.108.065)</u>	<u>(583.184.293.091)</u>	<u>(693.636.517.958)</u>	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>188.834.994.318</u>	<u>205.818.984.099</u>	<u>166.256.962.436</u>	Profit before tax of the Company
Beban pajak berdasarkan tarif pajak	41.543.698.750	45.280.176.502	41.564.240.609	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas beda tetap:				Tax effect of permanent difference:
Beban jamuan dan representasi	7.253.563.583	5.733.223.108	6.501.158.571	Entertainment and representation
Beban pajak	497.402.727	809.245.779	199.721.690	Tax expenses
Beban perayaan dan ucapan	99.097.286	366.576.688	833.982.688	Celebrations and honorings
Beban telepon seluler	2.627.170	2.888.399	2.698.254	Mobile phone expenses
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(3.189.671.249)	(1.495.400.480)	(6.486.309.601)	Income already subjected to final tax
Lain-lain	91.360.184	2.666.426.696	(32.109.816)	Others
Bersih	46.298.078.451	53.363.136.692	42.583.382.395	Net
Penyesuaian atas perubahan tarif	-	1.951.474.535	-	Adjustment for changes in tax rates
Penyesuaian pajak tangguhan	-	-	-	Adjustment of deferred tax
Beban pajak entitas anak	<u>71.097.399.242</u>	<u>45.582.374.420</u>	<u>129.386.268.213</u>	Subsidiaries tax expense
Beban (penghasilan) pajak - bersih	<u>117.395.477.693</u>	<u>100.896.985.647</u>	<u>171.969.650.608</u>	Tax expense (benefit) - net

### 38. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2020 dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh Konsultan Arya Bagiastra, aktuaris independen, tertanggal 26 Januari 2022.

Jumlah karyawan Grup yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut masing-masing sebanyak 1.431, 1.233 dan 1.198 karyawan (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

### 38. Long-Term Employee Benefits Liability

The amount of long-term employee benefits is determined based on Law No. 11 Year 2020 and Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding of benefits has been made to date. No funding of the benefits has been made to date.

The latest actuarial valuation upon the long-term employee benefits liability was from Consultant Arya Bagiastra, an independent actuary, dated January 26, 2022.

The number of employees of the Group entitled to employee benefits totaled to 1,431, 1,233 and 1,198 (unaudited) as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans follows:

	2021	2020	2019	
Biaya jasa kini	15.691.590.756	14.858.650.134	9.885.217.922	Current service costs
Biaya bunga	5.409.700.039	4.660.748.566	3.703.349.477	Net interest expense
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	21.101.290.795	19.519.398.700	13.588.567.399	Components of defined benefit costs recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:				Remeasurement on the defined benefit liability:
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari:				Actuarial losses (gains) arising from:
Perubahan asumsi keuangan	(2.956.127.585)	8.512.184.410	7.630.572.848	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(91.116.043)	(1.580.231.148)	5.129.188.140	Experience adjustments
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(3.047.243.628)	6.931.953.262	12.759.760.988	Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive income
Jumlah	18.054.047.167	26.451.351.962	26.348.328.387	Total

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban usaha" pada laba rugi (Catatan 34).

The current service cost and the net interest expense for the year are included in the "Operating expenses" in profit or loss (Note 34).

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements of present value of defined benefit obligation follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal tahun	90.526.628.604	66.028.777.663	41.894.962.800	Balance at the beginning of the year
Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada entitas anak yang akuisisi	2.172.979.463	-	-	Balance of long-term employee benefits liability of the acquired subsidiary
Penyesuaian kerugian aktuarial atas akuisisi entitas anak	122.381.721	-	-	Adjustment of actuarial losses on acquisitions of subsidiary
Biaya jasa kini	15.691.590.756	14.858.650.134	9.885.217.922	Current service costs
Biaya bunga	5.409.700.039	4.660.748.566	3.703.349.477	Interest expense
Imbalan dibayarkan	(554.326.751)	(1.953.501.020)	(2.214.513.523)	Benefit paid
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:				Remeasurement losses (gains)
Perubahan asumsi keuangan	(2.956.127.585)	8.512.184.410	7.630.572.848	Actuarial losses (gain) arising from:
Penyesuaian pengalaman	(91.116.043)	(1.580.231.148)	5.129.188.140	Changes in financial assumptions
Saldo akhir tahun	110.321.710.204	90.526.628.604	66.028.777.663	Balance at the end of the year

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2021	2020	2019	
Tingkat diskonto	6,05%-6,92% IGSYC (Durable) per tahun/annum	5,76%-6,04% IGSYC (Durable) per tahun/annum	6,94%-7,14% IGSYC (Durable) per tahun/annum	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7%-8% per tahun/annum	8% per tahun/annum	8% per tahun/annum	Future salary increment rate
Umur pensiun normal	55 - 56 tahun/years	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age
Tabel mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality table
Tingkat pengunduran diri	6% - 10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun/10% up to age 29 and decreasing linearly by 10%	10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun/10% up to age 29 and decreasing linearly by 0.25%	10% sampai dengan 29 tahun, menurun 0,25% secara linear setiap tahun sampai 1% pada usia 54 tahun/10% up to age 29 and decreasing linearly by 0.25% for each year up to 1%	Resignation rate
Tingkat cacat	10%	10%	10%	Disability

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions are as follows

31 Desember/ December 31, 2021				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti/				
Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(10.976.593.231)	13.222.811.441	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	12.439.237.917	(10.569.775.191)	Salary growth rate
31 Desember/December 31, 2020				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti/				
Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(3.576.382.609)	28.260.831.416	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	27.368.418.110	(4.069.632.342)	Salary growth rate
31 Desember/December 31, 2019				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti/				
Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(6.685.088.622)	7.881.863.665	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	7.432.585.086	(6.445.489.337)	Salary growth rate

### 39. Dividen dan Cadangan Umum

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 tertanggal 20 Mei 2021 sebagaimana telah diaktakan dalam akta No. 53 tertanggal 21 Mei 2021 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui antara lain:

- i. Membagikan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 224.474.772.872 sebagai dividen kepada pemegang saham Perseroan dan menetapkan untuk tidak menempatkan cadangan karena telah mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- ii. Menyetujui untuk membagikan dividen yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 958.663.976.130 kepada pemegang saham Perseroan.

Pembagian dividen tersebut di atas sejumlah Rp 1.964.000 per lembar saham atau sejumlah Rp 1.155.293.540.000.

Pelaksanaan pembagian dividen yang diumumkan dan disetujui oleh Para Pemegang Saham di atas dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.242A/MTI/PD-DIR/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 tentang Pembagian Dividen Tahunan PT Mora Telematika Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari para kreditur Perseroan dan telah dibayar seluruhnya oleh Perseroan dan dinyatakan diterima seluruhnya oleh pemegang saham pada bulan Desember 2021.

Pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen diatas adalah PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreas masing-masing sebesar Rp 491.000.000.000 dan Rp 664.293.540.000. PT Smart Telecom yang saat ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan yang belum menjadi pemegang saham pada 31 Desember 2020. Bahwa pemegang saham yang menerima dividen yaitu PT Gema Lintas Benua dan PT Candrakarya Multikreasi menyetorkan kembali dividen yang telah dibagikan sebagai modal saham Perseroan sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan modal dasar dan ditempatkan atau disetor Perseroan sesuai pengungkapan pada Catatan 29 atas laporan Keuangan.

### 39. Dividend and General Reserve

Based on Decision Letter of Shareholders in Annual General Meeting of shareholders for 2020 dated May 20, 2021 which stated in the notarial deed No. 53 dated May 21, 2021 by Aulia Taufani, Notarial in South Jakarta, the shareholders agreed to:

- i. Distribute the Company profit as of December 31, 2020 amounting to Rp 224,474,772,872 as dividends to shareholders of the Company and determined not to appropriate general reserve because the Company has fulfilled the requirement of a general reserve of 20% of the total issued and paid-up capital.
- ii. Distribute dividends from retained earning of the Company as of December 31, 2019 amounting to Rp 958,663,976,130 to shareholders.

The dividends distribution as mentioned above is for Rp 1,964,000 per share or equivalent to Rp 1,155,293,540,000.

The distribution of dividends which was announced and approved by the Shareholders stated in the Decree of the Board of Directors No. 242A/MTI/PD-DIR/XII/2021 dated December 9, 2021 regarding the Annual Dividend Distribution of PT Mora Telematika Indonesia and has obtained approval from creditors of the Company and has been fully paid by the Company and declared fully received by the shareholders in December 2021.

The shareholders entitled to the above dividend distribution are PT Gema Lintas Benua and PT Candrakarya Multikreasi amounting to Rp 491,000,000,000 and Rp 664,293,540,000, respectively. PT Smart Telecom currently is a shareholder of the Company but was not a shareholder as of December 31, 2020. The shareholders who received the dividends, PT Gema Lintas Benua and PT Candrakarya Multikreasi, returned the dividends as the Company's share capital which resulted to to an increase in the authorized and issued or paid-up capital of the Company which stated in Note 29 to financial statements.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 29 Mei 2019, Perusahaan membentuk cadangan umum berdasarkan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 25.000.000.000.

Pada tahun 2020, Perusahaan telah meningkatkan cadangan umum berdasarkan jumlah modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 59.750.031.803 berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 17 Juni 2020.

Cadangan umum tersebut dibentuk sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan untuk membentuk cadangan umum sedikitnya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Tidak terdapat batas waktu yang ditetapkan atas pemenuhan kewajiban tersebut.

Based on the Extraordinary General Stockholders' Meeting dated May 29, 2019, the Company provided general reserve based on the total issued and paid up capital amounting to Rp 25,000,000,000.

In 2020, the Company has increased general reserve based on the total issued and paid up capital to Rp 59,750,031,803 based on the Extraordinary General Stockholders' Meeting dated June 17, 2020

This general reserve was provided in relation with the Law of Republic of Indonesia No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company, which requires companies to set up general reserve equivalent to at least 20% of the total issued and paid up capital. There is no timeline over which this amount should be appropriated.

#### 40. Laba Per Saham

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian berdasarkan pada informasi berikut:

	2021	2020	2019
Jumlah laba yang digunakan dalam perhitungan laba persaham dasar:			
Jumlah laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	578.928.827.717	578.003.431.371	591.495.494.441
Rata-rata tertimbang jumlah saham (dalam lembar saham penuh)	4.869.099.510	3.163.016.039	3.163.016.039
Laba per saham	119	183	187

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, rata-rata terimbang jumlah saham telah memperhitungkan pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp 100 per lembar saham sesuai dengan Akta Notaris No. 33 tanggal 17 Maret 2022 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta (Catatan 46).

#### 40. Earnings Per Share

The computation of basic and diluted earnings per share is based on the following data:

Profit for computation basic earnings per share:
Profit attributable to owners of the Parent Company
Weighted average number of shares outstanding (in full number of shares)
Earning per share

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the weighted average number of shares has calculated the stock split to become Rp 100 per share in accordance with the Notarial Deed No. 33 dated March 17, 2022 from Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta (Note 46).

#### 41. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

##### Sifat Pihak Berelasi

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat dan hubungan/ <i>Nature and relationship</i>	Jenis transaksi/ <i>Transaction type</i>
PT Pakkodian	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trade accounts payable, and direct costs</i>

#### 41. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

##### Nature of Relationships

The nature of the relationship with the related parties are as follows:

<b>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</b>	<b>Sifat dan hubungan/ Nature and relationship</b>	<b>Jenis transaksi/ Transaction type</b>
PT Gema Lintas Benua	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Stockholders and has same management with the Parent Entity</i>	Piutang dari pihak berelasi, utang lain-lain dan beban usaha/ <i>Due from a related party, other accounts payable and operating expenses</i>
PT Candrakarya Multikreasi	Pemegang saham dan manajemen yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Stockholders and has same management with the Parent Entity</i>	Utang lain-lain dan utang kepada pemegang saham / <i>Other accounts payable and shareholder loan</i>
PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera	Memiliki sebagian pemegang saham dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trader accounts payables, revenue and direct costs</i>
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha dan pendapatan/ <i>Trade accounts receivable, trade accounts payables and revenue</i>
PT Smart Telecom	Pemegang saham Perusahaan/ <i>Stockholders of the Company</i>	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trader accounts payables, revenue and direct costs</i>
PT Smartfren Telecom Tbk	Pemegang saham PT Smart Telecom/ <i>Stockholders of PT Smart Telecom</i>	Piutang usaha dan pendapatan / <i>Trade accounts receivable and revenue</i>
PT Ketrosden Triasmitra	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trader accounts payables, revenue and direct costs</i>
PT Triasmitra Multiniaga International	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trader accounts payables, revenue and direct costs</i>
PT Jejaring Mitra Persada	Memiliki sebagian pemegang saham yang sama dengan Entitas Induk/ <i>Has partly the same stockholders with the Parent Entity</i>	Piutang usaha, utang usaha pendapatan dan beban langsung/ <i>Trade accounts receivable, trader accounts payables, revenue and direct costs</i>

Pada tahun 2021, PT Mora Advertising Contents, PT Bali Tower Indonesia Tbk, PT Sarana Global Indonesia, PT Intercontinental Network Communication sudah tidak menjadi pihak berelasi Perusahaan.

In 2021, PT Mora Advertising Contents, PT Bali Tower Indonesia Tbk, PT Sarana Global Indonesia, PT Intercontinental Network Communication are no longer related party to the Company.



- b. Transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang setara dengan transaksi yang wajar.
- c. Perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada direksi dan anggota manajemen kunci lainnya pada tahun 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Imbalan jangka pendek	13.542.921.670	13.533.124.970	13.834.576.770	Short-term benefits
Imbalan kerja jangka panjang	15.905.246.599	13.042.893.594	10.825.671.596	Long-term employee benefits
Jumlah	<u>29.448.168.269</u>	<u>26.576.018.564</u>	<u>24.660.248.366</u>	Total

- b. The transactions with related parties are made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions.
- a. The Company provides compensation to its key management personnel. The remuneration of directors and other members of key management in 2021, 2020 and 2019 follows:

#### 42. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas.

##### Risiko Mata Uang Asing

Grup terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan piutang usaha, utang usaha dan utang non-bank.

Selain piutang usaha, utang usaha dan utang non-bank, Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan.

#### 42. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including currency risk and fair value interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors (BOD). The BOD has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk.

##### Foreign Exchange Risk

The Group is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the U.S. Dollar and Singapore Dollar. Foreign exchange risk arises from future settlement of commercial transactions and recognized assets and liabilities.

The Group's exposures to the foreign exchange risk relate primarily to trade accounts receivable, trade accounts payable and non-bank loan.

Other than trade accounts receivable, trade accounts payable and non-bank loan, the Group has transactional currency exposures. Such exposure arises when the transaction is denominated in currencies other than the functional currency of the operating unit or the counterparty.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group has monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2021		2020		2019			
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent in Rp	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent in Rp		
<b>Aset</b>								
Kas dan setara kas	USD	11.162.925	159.283.830.158	3.699.748	52.184.962.347	3.349.853	46.566.304.242	Cash and cash equivalents
	SGD	1.185.443	12.487.178.732	846.898	9.014.455.374	456.530	4.711.731.832	
	EUR	897	14.462.711	956	16.568.986	955	14.891.629	
Piutang usaha	USD	8.004.784	114.220.298.451	1.738.460	24.520.989.410	1.270.957	17.667.576.930	Trade accounts receivable
	SGD	8.251	86.917.214	-	-	650	6.708.481	
Aset yang dibatasi penggunaannya	USD	-	-	-	-	531.666	5.487.185.934	Restricted assets
	SGD	265.000	2.791.447.725	265.000	2.820.682.525	-	-	
Setoran jaminan dalam akun "Aset lain-lain"	USD	98.126	1.400.160.385	4.533	63.944.608	4.600	63.944.608	Securities deposit included in "Other assets"
Jumlah Aset			<u>290.284.295.376</u>		<u>88.621.603.250</u>		<u>74.518.343.656</u>	Total Assets
<b>Liabilitas</b>								
Utang usaha	USD	11.144.016	159.014.018.043	149.726	2.111.887.953	403.866	5.614.136.515	Trade accounts payable
	SGD	821.952	8.658.248.021	475.769	5.064.122.336	6.237	64.374.068	
Utang lain-lain	USD	68.623	979.188.494	48.620	685.785.343	297.171	4.130.975.720	Other accounts payable
	SGD	-	-	-	-	4.145	42.779.468	
Utang non-bank	USD	3.968.810	<u>56.630.969.306</u>	1.559.054	<u>21.990.464.042</u>	2.528.941	<u>35.154.808.142</u>	Non-bank loans
Jumlah Liabilitas			<u>225.282.423.864</u>		<u>29.852.259.674</u>		<u>45.007.073.913</u>	Total Liabilities
Jumlah Aset (Liabilitas) - bersih			<u>65.001.871.512</u>		<u>58.769.343.576</u>		<u>29.511.269.743</u>	Net Assets (Liabilities)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jika mata uang melemah/menguat sebesar 3% terhadap Rupiah dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk periode dan tahun-tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 1.462.542.109, Rp 1.323.402.396 dan Rp 664.003.569 terutama diakibatkan keuntungan (kerugian) selisih kurs karena penjabaran aset dan liabilitas moneter.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, if the currencies had weakened/strengthened by 3% against the Rupiah with all other variables held constant, post-tax profit for the year would have been higher/lower by Rp 1,462,542,109, Rp 1,323,402,396 and Rp 664,003,569, respectively, mainly as a result of foreign exchange gains (losses) on translation of foreign currency denominated monetary assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kurs konversi yang digunakan Grup diungkapkan pada Catatan 2 dalam laporan keuangan konsolidasian.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the conversion rates used by the Group were disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements.

**Risiko Suku Bunga Arus Kas dan Nilai Wajar**

**Cash Flow and Fair Value Interest Rate Risk**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank.

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company's exposures to interest rate risk relates primarily to bank loans.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

To minimize interest rate risk, the Company manages interest cost through variable-rate debts, by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments among interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before it takes any decision to enter a new loan agreement.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company's financial liability that are exposed to interest rate risk as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

31 Desember/ December 31, 2021							
Rata-rata							
Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/ In the 2 <sup>nd</sup> Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/ In the 3 <sup>rd</sup> Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/ In the 4 <sup>th</sup> Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/ In the 5 <sup>th</sup> Year	Jumlah/ Total	
%							
<b>Liabilitas/Liability</b>							
<b>Bunga Mengambang/Floating Rate</b>							
Utang bank/Bank loans	8,50 - 11,00	1.164.750.861.401	1.191.019.534.672	1.052.721.146.556	897.011.090.912	804.084.622.273	5.109.587.255.814
31 Desember/December 31, 2020							
Rata-rata							
Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/ In the 2 <sup>nd</sup> Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/ In the 3 <sup>rd</sup> Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/ In the 4 <sup>th</sup> Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/ In the 5 <sup>th</sup> Year	Jumlah/ Total	
%							
<b>Liabilitas/Liability</b>							
<b>Bunga Mengambang/Floating Rate</b>							
Utang bank/Bank loans	9,50 - 11,00	954.401.804.444	938.172.295.850	950.616.606.522	773.710.472.336	1.297.796.039.175	4.914.697.218.327
31 Desember/December 31, 2019							
Rata-rata							
Suku Bunga Efektif/ Average Effective Interest Rate	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Within One (1) Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2/ In the 2 <sup>nd</sup> Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3/ In the 3 <sup>rd</sup> Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4/ In the 4 <sup>th</sup> Year	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5/ In the 5 <sup>th</sup> Year	Jumlah/ Total	
%							
<b>Liabilitas/Liability</b>							
<b>Bunga Mengambang/Floating Rate</b>							
Utang bank/Bank loans	9,75 - 11,50	1.747.017.921.036	886.712.663.110	886.318.480.626	898.611.077.871	1.987.488.692.609	6.406.148.835.252

### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

Kas dan setara kas dinilai sebagai kelas tinggi karena disimpan di bank-bank terkemuka di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Direksi dan yang memiliki probabilitas rendah kebangkrutan.

### Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customer, client and other parties who failed to meet their contractual obligations. There is no significant concentration of credit risk. The Group manages and controls credit risk by setting limits of acceptable risk for individual customers and monitors the exposure associated with these restrictions.

The Group conducts business relationships only with recognized and credible third parties. The Group has a policy to go through customer's credit verification procedures. In addition, the amount of receivables is monitored continuously to reduce the risk for impairment.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates.

Cash and cash equivalents are assessed as high grade since those are deposited in reputable banks in the country as approved by the Board of Directors and which have low probability of insolvency.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Piutang dinilai sebagai berikut:

Receivables are assessed as follows:

	2021	2020	2019	
Piutang usaha				Trade accounts receivable
Pihak law an tanpa peringkat kredit eksternal				Counterparties w ithout external credit rating
Grup A	53.462.464.995	28.624.606.052	10.233.776.876	Group A
Grup B	359.271.908.073	355.326.802.351	330.345.462.460	Group B
Jumlah piutang usaha yang tidak mengalami penurunan nilai	<u>412.734.373.068</u>	<u>383.951.408.403</u>	<u>340.579.239.336</u>	Total unimpaired trade accounts receivable
Piutang Lain-lain				Other accounts receivable
Grup B	<u>18.488.239.621</u>	<u>9.425.879.616</u>	<u>12.096.550.469</u>	Group B

- Grup A - pelanggan baru/pihak berelasi (kurang dari enam (6) bulan).
- Grup B - pelanggan yang sudah ada/pihak berelasi (lebih dari enam (6) bulan) tanpa kasus gagal bayar di masa terdahulu.

- Group A - new customers/related parties (less than six (6) months).
- Group B - existing customers/related parties (more than six (6) months) with no defaults in the past.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan konsolidasian yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The table below shows consolidated statements of financial position maximum exposures related to credit risk as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

	2021	2020	2019	
<i>Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (2019: Pinjaman yang diberikan dan piutang)</i>				<i>Financial assets at amortized cost (2019: Loans and receivables)</i>
Kas dan setara kas*)	1.042.527.237.113	485.487.943.491	1.413.681.524.065	Cash and cash equivalents*)
Aset pengampunan pajak - kas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Tax amnesty asset - cash
Piutang usaha - bersih	422.225.675.928	396.027.356.047	368.151.573.730	Trade accounts receivable - net
Piutang lain-lain	18.488.239.621	9.425.879.616	12.096.550.469	Other accounts receivable
Aset yang dibatasi penggunaannya	35.792.742.666	5.203.306.285	5.904.094.734	Restricted assets
Piutang konsesi jasa	6.047.877.602.480	6.312.094.769.633	6.491.363.042.105	Service concession receivable
Setoran jaminan dalam akun "Aset tidak lancar lain-lain"	4.035.261.259	3.839.245.540	2.219.244.734	Security deposits under "Other assets"
<i>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</i>				<i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>
Investasi	-	-	-	Investments
Jumlah	<u>7.571.046.759.067</u>	<u>7.212.178.500.612</u>	<u>8.293.516.029.837</u>	Total

\*) Tidak termasuk kas dan unit Syariah/Not Include cash on hand and Sharia Unit.

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan konsolidasian berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan tidak termasuk bunga pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

**Liquidity Risk**

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below summarizes the maturity profile of consolidated financial liabilities based on contractual undiscounted payment excluding interest as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

	31 Desember/ December 31, 2021				Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported	
	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years			
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Utang usaha	1.146.821.136.018	190.535.191.524	-	-	1.337.356.327.542	1.337.356.327.542	Trade accounts payable
Utang lain-lain	89.341.075.024	-	-	-	89.341.075.024	89.341.075.024	Other accounts payable
Beban akrual	99.990.940.519	-	-	-	99.990.940.519	99.990.940.519	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang							Long-term liabilities
Utang bank	1.164.750.861.401	1.191.019.534.672	2.753.816.859.741	-	5.109.587.255.814	5.109.587.255.814	Bank loans
Liabilitas sewa a	49.054.755.294	51.382.777.473	15.398.048.623	-	115.835.581.390	115.835.581.390	Lease liabilities
Utang non-bank	20.094.690.773	23.184.402.021	13.351.876.512	-	56.630.969.306	56.630.969.306	Non-bank loans
Utang obligasi	458.861.999.070	-	-	-	458.861.999.070	458.861.999.070	Bonds payable
<b>Jumlah</b>	<b>3.028.915.458.099</b>	<b>1.456.121.905.690</b>	<b>2.782.566.784.876</b>	<b>-</b>	<b>7.267.604.148.665</b>	<b>7.267.604.148.665</b>	<b>Total</b>

	31 Desember 2020/December 31, 2020				Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported	
	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years			
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Utang usaha	693.233.939.441	575.754.822.578	-	-	1.268.988.762.019	1.268.988.762.019	Trade accounts payable
Utang lain-lain	112.676.951.534	-	-	-	112.676.951.534	112.676.951.534	Other accounts payable
Beban akrual	70.345.694.169	-	-	-	70.345.694.169	70.345.694.169	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang							Long-term liabilities
Utang bank	954.401.804.443	938.172.295.850	3.022.123.118.034	-	4.914.697.218.327	4.914.697.218.327	Bank loans
Liabilitas sewa	48.421.582.510	46.053.965.515	61.173.170.504	-	155.648.718.529	155.648.718.529	Lease liabilities
Utang non-bank	11.270.769.682	9.214.230.008	1.505.464.352	-	21.990.464.042	21.990.464.042	Non-bank loans
Utang obligasi	-	457.840.131.932	-	-	457.840.131.932	457.840.131.932	Bonds payable
Utang kepada pemegang saham	-	844.408.372.000	-	-	844.408.372.000	844.408.372.000	Shareholder loan
<b>Jumlah</b>	<b>1.890.350.741.779</b>	<b>2.871.443.817.883</b>	<b>3.084.801.752.890</b>	<b>-</b>	<b>7.846.596.312.552</b>	<b>7.846.596.312.552</b>	<b>Total</b>

	31 Desember 2019/December 31, 2019				Jumlah/ Total	Nilai Tercatat/ As Reported	
	<= 1 Tahun/ <= 1 Year	1-2 Tahun/ 1-2 Years	3-5 Tahun/ 3-5 Years	> 5 Tahun/ > 5 Years			
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Utang usaha	611.700.081.831	62.630.784.684	-	-	674.330.866.515	674.330.866.515	Trade accounts payable
Utang lain-lain	116.488.792.987	-	-	-	116.488.792.987	116.488.792.987	Other accounts payable
Beban akrual	38.169.028.516	-	-	-	38.169.028.516	38.169.028.516	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang							Long-term liabilities
Utang bank	1.760.476.321.040	899.441.576.812	2.506.405.467.070	1.266.012.784.036	6.422.336.148.958	6.422.336.148.958	Bank loans
Liabilitas sewa	19.266.814.917	45.750.565.791	24.078.898.242	-	89.096.278.950	89.096.278.950	Lease liabilities
Utang non-bank	13.482.391.473	11.107.761.090	10.564.655.579	-	35.154.808.142	35.154.808.142	Non-bank loans
Utang obligasi	537.996.897.073	456.931.511.211	-	-	994.928.408.284	994.928.408.284	Bonds payable
Utang kepada pemegang saham	-	844.408.372.000	-	-	844.408.372.000	844.408.372.000	Shareholder loan
<b>Jumlah</b>	<b>3.097.580.327.837</b>	<b>2.310.270.571.588</b>	<b>2.541.049.020.891</b>	<b>1.266.012.784.036</b>	<b>9.214.912.704.352</b>	<b>9.214.912.704.352</b>	<b>Total</b>

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**43. Segmen Operasi**

Grup menjalankan dan mengelola usahanya mengelompokkan segmen pasar dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya sebagai berikut:

**43. Operating Segment**

The Group operates and maintains its business by grouping market segment in order to give services to the customer as follow:

	31 Desember/ December 31, 2021					
	Telco/ Telco	Wholesale/ Wholesale	Retail/ Retail	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan</b>						<b>Consolidated Statement of Profit or Loss and</b>
<b>Komprehensif Lain Konsolidasian</b>						<b>Comprehensive Income</b>
Pendapatan Usaha						Revenue
Pendapatan usaha segmen - pihak eksternal	1.199.223.356.053	454.663.286.407	661.720.025.988	1.864.466.397.707	4.180.073.066.155	Segment sales - external parties
Beban Segmen						Segment Expenses
Beban langsung	(729.687.491.170)	(185.510.656.121)	(233.623.049.529)	(493.961.589.655)	(1.642.782.786.475)	Direct cost
Laba Kotor	469.535.864.883	269.152.630.286	428.096.976.459	1.370.504.808.052	2.537.290.279.680	Gross Profit
Beban usaha yang entitas anak dapat dialokasikan	-	-	-	(391.695.143.713)	(391.695.143.713)	Allocated Subsidiaries' operating expenses
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(601.603.356.483)	Unallocated operating expenses
Beban lain-lain - bersih yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(742.414.677.101)	Unallocated other expenses - net
Laba sebelum pajak pajak final dan pajak penghasilan	-	-	-	-	801.577.102.383	Profit before final tax and tax income
Beban pajak final	-	-	-	-	(12.803.021.495)	Final tax
Beban pajak - bersih	-	-	-	-	(117.395.477.693)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	671.378.603.195	Profit for the year
<b>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</b>						<b>Consolidated Statement of Financial Position</b>
<b>Aset Segmen</b>						<b>Segment Assets</b>
Piutang usaha	196.661.264.097	153.546.801.739	66.291.348.317	5.726.261.775	422.225.675.928	Trade accounts receivable
Piutang konsesi jasa	-	-	-	6.047.877.602.480	6.047.877.602.480	Service concession receivable
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	Unallocated assets
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	9.284.043.097	Deferred assets
Lain-lain	-	-	-	-	8.086.013.776.573	Others
Jumlah aset	196.661.264.097	153.546.801.739	66.291.348.317	6.053.603.864.255	14.565.401.098.078	Total assets
<b>Liabilitas Segmen</b>						<b>Segment Liabilities</b>
Uang muka penjualan	-	-	-	225.325.182.493	225.325.182.493	Advance from customers
Pendapatan ditangguhkan	15.368.582.209	170.743.088.751	7.697.188.283	-	193.808.859.243	Deferred income
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	Unallocated liabilities
Utang pajak	-	-	-	-	27.883.905.643	Taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	-	26.754.761.296	Deferred liabilities
Lain-lain	-	-	-	-	9.533.250.682.420	Others
Jumlah liabilitas	15.368.582.209	170.743.088.751	7.697.188.283	225.325.182.493	10.007.023.391.095	Total liabilities
<b>31 Desember/December 31, 2020</b>						
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan</b>						<b>Consolidated Statement of Profit or Loss and</b>
<b>Komprehensif Lain Konsolidasian</b>						<b>Comprehensive Income</b>
Pendapatan Usaha						Revenue
Pendapatan usaha segmen - pihak eksternal	1.246.009.460.827	346.676.601.422	472.703.890.019	1.700.298.182.526	3.765.688.134.794	Segment sales - external parties
Beban Segmen						Segment Expenses
Beban langsung	(771.362.958.977)	(117.194.827.177)	(146.185.955.846)	(253.777.039.590)	(1.288.520.781.590)	Direct cost
Laba Kotor	474.646.501.850	229.481.774.245	326.517.934.173	1.446.521.142.936	2.477.167.353.204	Gross Profit
Beban usaha yang entitas anak dapat dialokasikan	-	-	-	(404.797.798.610)	(404.797.798.610)	Allocated Subsidiaries' operating expenses
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(500.952.869.306)	Unallocated operating expenses
Beban lain-lain - bersih yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(782.413.408.098)	Unallocated other expenses - net
Laba sebelum pajak pajak final dan pajak penghasilan	-	-	-	-	789.003.277.190	Profit before final tax and income tax
Beban pajak final	-	-	-	-	(8.428.716.103)	Final tax
Beban pajak - bersih	-	-	-	-	(100.896.985.647)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	679.677.575.440	Profit for the year
<b>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</b>						<b>Consolidated Statement of Financial Position</b>
<b>Aset Segmen</b>						<b>Segment Assets</b>
Piutang usaha	277.303.402.073	67.136.497.710	50.970.439.916	617.016.348	396.027.356.047	Trade accounts receivable
Piutang konsesi jasa	-	-	-	6.312.094.769.633	6.312.094.769.633	Service concession receivable
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	Unallocated assets
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	4.044.727.261	Deferred assets
Lain-lain	-	-	-	-	6.683.355.667.643	Others
Jumlah aset	277.303.402.073	67.136.497.710	50.970.439.916	6.312.711.785.981	13.395.522.520.584	Total assets
<b>Liabilitas Segmen</b>						<b>Segment Liabilities</b>
Uang muka penjualan	-	-	-	408.048.144.469	408.048.144.469	Advance from customers
Pendapatan ditangguhkan	19.245.946.416	104.032.689.389	6.845.772.438	-	130.124.408.243	Deferred income
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	Unallocated liabilities
Utang pajak	-	-	-	-	16.693.831.960	Taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	-	40.842.406.696	Deferred liabilities
Lain-lain	-	-	-	-	9.592.353.680.728	Others
Jumlah liabilitas	19.245.946.416	104.032.689.389	6.845.772.438	408.048.144.469	10.188.062.472.096	Total liabilities

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	31 Desember/December 31, 2019					
	Telco/ Telco	Wholesale/ Wholesale	Retail/ Retail	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan</b>						<b>Consolidated Statement of Profit or Loss and</b>
<b>Komprehensif Lain Konsolidasian</b>						<b>Comprehensive Income</b>
Pendapatan Usaha						Revenue
Pendapatan usaha segmen - pihak eksternal	614.159.417.085	475.031.320.374	343.798.624.369	2.629.392.189.923	4.062.381.551.751	Segment sales - external parties
Beban Segmen						Segment Expenses
Beban langsung	(385.032.787.272)	(175.176.282.398)	(142.305.407.259)	(1.428.701.917.912)	(2.131.216.394.841)	Direct cost
Laba Kotor	229.126.629.813	299.855.037.976	201.493.217.110	1.200.690.272.011	1.931.165.156.910	Gross Profit
Beban usaha yang entitas anak dapat dialokasikan	-	-	-	(185.866.149.565)	(185.866.149.565)	Allocated Subsidiaries' operating expenses
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(410.073.546.013)	Unallocated operating expenses
Beban lain-lain - bersih yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	(475.331.980.938)	Unallocated other expenses - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	-	-	-	-	859.893.480.394	Profit before final tax and income tax
Beban pajak final	-	-	-	-	(11.873.736.387)	Final tax
Beban pajak - bersih	-	-	-	-	(171.969.650.608)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	676.050.093.399	Profit for the year
<b>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</b>						<b>Consolidated Statement of Financial Position</b>
Aset Segmen						Segment Assets
Piutang usaha	261.011.174.343	68.183.758.517	38.956.640.870	-	368.151.573.730	Trade accounts receivable
Piutang konsesi jasa	-	-	-	6.491.363.042.105	6.491.363.042.105	Service concession receivable
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	7.250.865.308	Unallocated assets
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	5.929.172.415.738	Deferred assets
Lain-lain	-	-	-	-	-	Others
Jumlah aset	261.011.174.343	68.183.758.517	38.956.640.870	6.491.363.042.105	12.795.937.896.881	Total assets
Liabilitas Segmen						Segment Liabilities
Uang muka penjualan	-	-	-	162.160.565.686	162.160.565.686	Advance from customers
Pendapatan ditangguhkan	10.077.848.065	31.707.855.198	94.955.146.295	-	136.740.849.558	Deferred income
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	29.549.539.781	Unallocated liabilities
Utang pajak	-	-	-	-	2.090.170.498	Taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	-	10.272.625.733.217	Deferred liabilities
Lain-lain	-	-	-	-	-	Others
Jumlah liabilitas	10.077.848.065	31.707.855.198	94.955.146.295	162.160.565.686	10.603.166.858.740	Total liabilities

#### 44. Komitmen dan Perjanjian

##### PT Palapa Ring Barat

Pada bulan Februari 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak, PT Palapa Ring Barat (PRB) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung (backbone) Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) menandatangani perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung serat optik palapa ring paket barat. PRB diwajibkan untuk membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati tertuang dalam perjanjian dan mengoperasikannya dengan jangka waktu 15 tahun.

#### 44. Commitments and Agreements

##### PT Palapa Ring Barat

In February 2016, the Company established a subsidiary, PT Palapa Ring Barat (PRB) to fulfil the requirement from the project of Constuction and Management of Fiber Optic Backbone Palapa Ring for West Package.

On February 29, 2016, PRB and Ministry of Communications and Information Technology (Kominfo) signed a Cooperation Agreement for the construction and management of fiber optic backbone network of palapa ring western package. PRB is required to build a fiber optic network with a certain capacity to areas that have been agreed as stated in the agreement and operate them for a period of 15 years.

Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir lima belas (15) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan dua (2) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 3.486.383.120.000 yang akan diterima oleh PRB sesuai jadwal yang telah disepakati. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, PRB harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada Kominfo dengan pembayaran oleh Kominfo kepada PRB sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 Februari 2016, PRB selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) sehubungan dengan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Barat (Perjanjian Penjaminan). Dalam Perjanjian Penjaminan, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 12 (dua belas) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian Penjaminan, PRB berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.200.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 600.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif Perjanjian Penjaminan tersebut sampai dengan berakhirnya Perjanjian Penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, PRB telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 1.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa.

#### **PT Palapa Timur Telematika**

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak, PT Palapa Telematika Timur (PTT) yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atas proyek pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur.

This agreement will expire in fifteen (15) years from the date of commercial operation, which was preceded by two (2) years of project construction period. The total contract value of this agreement amounted to Rp 3,486,383,120,000 to be received by PRB in accordance with the agreed schedule. At the end of the agreement, PRB must transfer the fiber optic network to Kominfo with payment of Rp 1,000 to be made by Kominfo to PRB.

On February 29, 2016, PRB as a Business Entity Executive (BUP) performs a guarantee agreement with PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) in relation to Governments and Enterprises Partnership Projects (KPBU) Fiber Optic Backbone Network Palapa Ring Western Package (Guarantee Agreement). Under this Guarantee Agreement, PII has been mandated and trusted by the Government to conduct the infrastructure guarantee in relation to financial obligations of the Partnership Project Owner (PJPK) to BUP based on the Cooperation Agreement as mentioned above.

This agreement will expire in twelve (12) years from the date of commercial operation. In the Guarantee Agreement, PRB is obliged to pay an upfront fee to PII of Rp 4,200,000,000 and the recurring fee of Rp 600,000,000 every six (6) months from the effective date of the agreement until the end of this Guarantee Agreement. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, PRB has made payment to PII amounting to Rp 1,200,000,000, respectively and recorded it as part of concession service receivable.

#### **PT Palapa Timur Telematika**

In August 2016, the Company established a subsidiary, PT Palapa Telematika Timur (PTT) to fulfil the requirement of project of Constuction and Management of Fiber Optic Backbone Palapa Ring for East Package.

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) terkait dengan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. BUP diwajibkan untuk membangun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk daerah-daerah yang telah disepakati dalam perjanjian dan mengoperasikan selama 15 tahun. Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal operasional komersial, yang didahului dengan 2 (dua) tahun masa pembangunan proyek. Nilai total kontrak atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 14.068.866.350.000 yang akan diterima oleh Perusahaan sesuai skedul yang sudah disepakati bersama. Pada saat berakhirnya periode perjanjian ini, Perusahaan sebagai badan pelaksana harus mengalihkan jaringan serat optik tersebut kepada PJPK dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan selaku BUP melakukan perjanjian penjaminan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) atas pembangunan dan pengelolaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PKBU) Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring untuk Paket Timur. Dalam perjanjian ini, PII telah mendapatkan mandat dan amanat dari Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sehubungan dengan kewajiban finansial PJPK kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Perjanjian ini akan berakhir dalam waktu dua belas (12) tahun sejak tanggal operasional komersial. Dalam Perjanjian ini, Perusahaan berkewajiban membayar imbal jasa dimuka kepada PII sebesar Rp 4.800.000.000 dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp 2.100.000.000 setiap enam (6) bulan sejak tanggal efektif perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian penjaminan ini. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah melakukan pembayaran kepada PII masing-masing sebesar Rp 4.200.000.000 dan dicatat sebagai bagian dari akun piutang konsesi jasa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On September 29, 2016, the Company as Implementing Business Entity (BUP) entered into an agreement with Communication and information Ministry of Indonesia as Responsible Project Cooperation (PJPK) in relation with Construction and Management of Fiber Optic Backbone Palapa Ring for East Package. BUP must build fiber optic backbone with a certain capacity for areas as agreed in an agreement and operate for 15 years. This agreement will expire within 15 (fifteen) years from the date of commercial operation, which was preceded by 2 (two) years of construction projects. The contract value of this agreement amounted to Rp 14,068,866,350,000 which will be received by the Company in accordance with the schedule that has been agreed. At the end of this agreement, Company as implementing business entity should handover the fiber optic network to PJPK with value of Rp 1,000.

On September 29, 2016, the Company as BUP entered into a guarantee agreement with the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Persero) (PII) for the Construction and management of Partnership Projects Governments and Entity (PKBU) of Backbone Network Fiber Optic Palapa Ring for East Package. In this agreement, PII has an instruction from the Government to implement the infrastructure assurance in relation with financial obligations of PJPK to BUP based on Cooperation Agreement mentioned above.

This agreement will expire within twelve (12) years from the date of commercial operation. In this Agreement, the Company is obliged to pay an upfront fee to PII amounting to Rp 4,800,000,000 and the guarantee services fee amounting to Rp 2,100,000,000 for every six (6) months from the effective date of the agreement until the end of this agreement. As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company has made payment to PII amounting to Rp 4,200,000,000, respectively and recorded it as part of concession service receivable consolidated statements of financial position.

### **Perusahaan**

Pada tanggal 6 Desember 2019 Perusahaan melakukan perjanjian Kerjasama operasi dengan PT Bhumi Pandanara Sejahtera (Perseroda) (BPS) terkait dengan penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang. Perusahaan dan BPS akan membentuk manajemen KSO BPS-MORATELINDO untuk melaksanakan pembangunan dan pengoprasian proyek penyelenggaraan pasif telekomunikasi kota Semarang selama 25 tahun. Perusahaan BPS akan menerima bagi hasil dari pendapatan kotor masing-masing sebesar 80% dan 20% yang diterima atas proyek ini.

Hingga penyelesaian laporan konsolidasian ini, proyek tersebut masih dalam tahap proses penyelesaian.

### **PT Indo Pratama Teleglobal**

Pada tanggal 30 Januari 2019, IPT, entitas anak, dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menandatangani perjanjian Kerjasama dalam rangka penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi yang memiliki spesifikasi teknologi *High Throughput Satellite* (HTS). Proyek ini untuk mendukung program KPU untuk memenuhi kebutuhan bandwidth satelit yang belum terlayani oleh penyelenggara komunikasi terestrial, khususnya pada daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar dan terdepan (3T).

Perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Nilai kontrak total atas perjanjian ini adalah sebesar Rp 1.360.746.000.000 yang akan diterima sesuai jadwal yang telah disepakati.

### **The Company**

On December 6, 2019, the Company entered into an agreement with PT Bhumi Pandanara Sejahtera (Perseroda) (BPS) in relation with implementation of passive telecommunication in Semarang City. The Company and BPS will jointly operate and manage Semarang Pasive Infrastructure Telecommunication to Construction and Management Semarang Pasive Infrastructure Telecommunication for 25 years. The Company and BPS will share in gross revenue of 80% and 20%, respectively, to be generated from this project.

Until the completion date of the consolidated financial statements, the project is under construction process.

### **PT Indo Pratama Teleglobal**

On January 30, 2019, IPT, a subsidiary, and the Telecommunications and Information Accessibility Agency (BAKTI) signed a Cooperation agreement in the framework of providing Telecommunication Satellite Capacity which has High Throughput Satellite (HTS) technology specifications. This project is to support the KPU program to meet the bandwidth needs of satellites that have not been served by terrestrial communication, especially in areas that fall into the lagging, outermost and leading category (3T).

This cooperation agreement will expire on December 31, 2024. The total contract value of this agreement is Rp 1,360,746,000,000 will be received according to the agreed schedule.

#### 45. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri Telekomunikasi, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Grup. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Grup.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Grup belum merasakan dampak material sehubungan dengan adanya penyebaran virus Corona (Covid-19). Grup telah menerapkan kebijakan *Work from Home (WFH)* bagi karyawan-karyawan Grup yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap himbauan pemerintah mengenai *Physical Distancing*, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi Grup dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari sisi eksternal, terdapat pembatasan jam operasional bank, sehingga transaksi dari sisi penerimaan dan pembayaran berpengaruh terhadap arus kas Grup meskipun pembatasan tersebut sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan tidak berpengaruh secara material bagi Grup dan tidak menghambat kegiatan operasional Grup. Terdapat permintaan dari pelanggan (terutama pelanggan yang terdampak Covid-19 seperti industri perhotelan) kepada Grup untuk menurunkan biaya berlangganan disebabkan turunnya penggunaan internet, penurunan biaya berlangganan tersebut sampai dengan saat ini tidak berpengaruh secara material bagi Grup.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan kemampuan keuangan Grup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga yang jatuh tempo terhadap kreditur masih dapat dikelola dan dipenuhi.

#### 45. Economic Environment Uncertainty

The global economic slowdown and negative impact on major financial market caused by the pandemic spread of coronavirus (Covid-19) has resulted to increased volatility in the value of financial instruments, trading interruptions, disruptions to operations of companies, unstable stock market, volatility of foreign currency exchange rates, and tight liquidity in certain sectors in Indonesia, including the Telecommunication industry, which may continue and result to unfavorable financial and operating impact to the Group. Indonesia's ability to minimize the impact of the global economic slowdown on the country's economy is largely dependent on the eradication of Covid-19 threat, as well as the fiscal and other measures that are being taken and will be undertaken by the government authorities. These measures, actions and events are beyond the Group's control.

As of date of completion of the consolidated financial statement, the Group has not been significantly affected by the Corona virus (Covid-19). the Group has implemented Work from Home (WFH) policy for all the Group's employees, to comply with government's regulation regarding physical distancing, but this implementation is not an obstacle for the Group to operate its business activity. For the external side, there is a limitation of bank's operational hour, hence receipt and payment transaction affected the Group's cash flow, even though, until reporting release date, this limitation has not affected the Group and obstructed the Group's operational activity. There were requests from customers (especially affected by Covid-19, such as hotel industry) for downgrade of monthly payment of internet due to the decline of internet traffic. The decreasing of this monthly payment has not material impacted to the Group until now.

As of date of completion of the consolidated financial statements, the Group's financial capability to comply the payment obligation of principal and/or interest due to the creditor has been managed and fulfilled.

Adapun kemungkinan dampak yang akan dialami oleh Grup dalam hal penyebaran Covid-19 ini berlangsung secara terus menerus adalah sebagai berikut:

- I. Dari segi pengadaan dan operasional hal ini dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan operasional proyek yang diakibatkan oleh faktor adanya keterlambatan ketersediaan bahan baku atau tenaga kerja yang tidak diizinkan untuk memasuki wilayah tertentu karena adanya larangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- II. Dari segi keuangan, Grup mempunyai kewajiban pembayaran terhadap kreditur jika dampak Covid-19 membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* dan berlangsung secara terus menerus, maka hal tersebut dapat mempengaruhi arus kas Grup yang akan berdampak kepada kewajiban pembayaran Grup terhadap kreditur.

Grup akan melakukan pemantauan secara intensif atas dampak Covid-19 terhadap kinerja operasional dan keuangan Grup dan melakukan tindakan untuk mengatasi dampak yang akan dialami Grup. Grup terus berupaya untuk menjaga fundamental dalam kondisi aman dan terkendali, Grup tetap siaga menghadapi segala perubahan yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu kedepan.

#### **46. Peristiwa setelah laporan keuangan**

##### **Perusahaan**

Pada tanggal 17 Februari 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Nilai tahun 2020 dengan nilai bersih lebih bayar sebesar Rp 70.246.496.831.

Pada tanggal 14 Maret 2022, Perusahaan menerima pengembalian dana atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Nilai tahun 2020.

Pada tanggal 10 Maret 2022 peringkat obligasi dan sukuk ijarah Perusahaan yang dibuat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah A+ dan A+ (sy).

Furthermore, there are possibilities that the Group will be affected due to continuous Covid-19 spread as follows:

- I. From the procurement and operational perspective, this may have impact on delayed operational project, which is caused by delayed raw material availability or manpower who are not allowed to enter certain region due to Central Government or Regional Government's prohibition.
- II. From the financial perspective, the Group still has payment obligation to the creditor. If this Covid-19 spread will trigger implementation of lockdown policy by the Government, so it will affect the Group's cash flows, which also has impact to settlement of Group's obligation to the creditors as well.

The Group will monitor intensively its operational and financial performance as the effect of Covid-19 and take action to overcome the impacts to the Group. The Group will frequently maintain the condition which safe and controllable. The Group will stay alert for any changes that will occur in the future.

#### **46. Events after the Reporting Period**

##### **The Company**

On February 17, 2022, the Company received Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) of and Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Value Added Tax year 2020 amounted to Rp 70,246,496,831.

On March 14, 2022, the Company received tax refund of Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) of and Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) for Value Added Tax year 2020.

On March 10, 2022, based on the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia, the bond and sukuk ijarah are rated is A+ and A+ (sy), respectively.

Pada tanggal 17 Maret 2022, Perusahaan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah di aktakan oleh Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Maret 2022, Notaris Aulia Taufani, SH di Jakarta. Berdasarkan hasil RUPSLB tersebut para pemegang saham setuju dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) atas saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Saham Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Mora Telematika Indonesia menjadi PT Mora Telematika Indonesia Tbk.
3. Menyetujui perubahan klasifikasi atau seri saham Perseroan dari yang semula terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B, Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masingnya yang berbeda-beda menjadi seluruhnya saham biasa dan karenanya Para Pemegang Saham menyetujui penghapusan hak-hak khusus apapun yang sebelumnya melekat pada masing-masing klasifikasi atau seri saham dimaksud.
4. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula:
  - a. Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham untuk saham Seri A;
  - b. Rp 809.349 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) per saham untuk saham Seri B; dan
  - c. Rp 2.372.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per saham untuk saham Seri C;

On March 17, 2022, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders which has been documented by Notarial Deed No. 33 dated March 17, 2022 of Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta. Based on the results of the EGMS, the shareholders agreed and decided the following:

1. Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares to the public ("Initial Public Offering") and list the Company's shares at the Indonesia Stock Exchange.
2. Approved the change in the Company's status from a Closed Limited Liability Company to an Open Limited Liability Company and approve the change of Article 1 of the Company's Articles of Association related to the change of the Company's name from previous name PT Mora Telematika Indonesia to PT Mora Telematika Indonesia Tbk.
3. Approved the change of classifications or series of shares of the Company from the original Series A Shares, Series B Shares, and Series C Shares with their respective nominal values that varies to all common shares and therefore, the shareholders agreed to the removal of any special rights previously attached to each classification or series of shares in question.
4. Approved the change in the par value of the shares from the existing:
  - a. Rp 100,000 (one hundred thousand Rupiah) per share for Series A shares;
  - b. Rp 809,349 (eight hundred nine thousand three hundred and forty-nine Rupiah) per share for Series B shares; and
  - c. Rp 2,372,000 (two million three hundred and seventy-two thousand Rupiah) per share for Series C shares;

Menjadi seluruhnya bernilai nominal saham, yaitu senilai Rp 100 (seratus Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah jumlah saham (redenominasi) yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebanyak 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham biasa atas nama atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.112.120.439.100 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dimana terhadap pembulatan sebesar Rp 85 (delapan puluh lima Rupiah) akan dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

5. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 2.112.120.439.015 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp 3.266.830.889.100 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), yang akan terdiri dari 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham biasa atas nama, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
6. Menyetujui rencana pengeluaran sebanyak-banyaknya 2.368.000.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) saham baru dari simpanan Perseroan yang akan diambil bagian oleh PT Smart Telecom, dimana pengeluaran saham kepada PT Smart Telecom tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pengeluaran saham-saham baru tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan saham-saham baru Perseroan kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana; dan
  - b. Pengeluaran saham-saham baru tersebut akan dilaksanakan dengan batasan sebesar 20,51% (dua puluh koma lima satu persen) dari jumlah seluruh saham yang Perseroan termasuk saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana; dan

To become entirely the nominal value of shares, at Rp 100 (one hundred Rupiah) per share, thereby changing the number of shares (redenomination) that have been placed and fully paid to as much as 21,121,204,391 (twenty-one billion one billion twenty-one million two hundred four thousand three hundred and ninety-one) common shares in the name of or with a total face value of Rp 2,112,120,439,100 (two trillion one hundred twelve billion one hundred twenty million four hundred thirty-nine thousand one hundred one hundred one Rupiah), where against rounding of Rp 85 (eighty-five Rupiah) will be carried out an increase in the issued capital and paid-up capital of the Company.

5. Approved the increase in the Company's authorized capital from the original amount of Rp 2,112,120,439,015 (two trillion one hundred twelve billion one hundred twenty million four hundred thirty nine thousand fifteen Rupiah) to Rp 3,266,830,889,100 (three trillion two hundred sixty six billion eight hundred thirty million eight hundred eighty nine thousand one hundred one hundred Rupiah), which will consist of 32,668,308,891 (thirty-two billion six hundred and sixty-eight million three hundred eight thousand eight hundred and ninety-one) common shares in the name, each of which share is worth a nominal value of Rp 100.00 (one hundred Rupiah).
6. Approved the plan of issuing 2,368,000,000 (two billion three hundred and sixty-eight million) new shares of the Company's deposits to be taken part by PT Smart Telecom, where the issuance of shares to PT Smart Telecom will be carried out under the following conditions:
  - a. The issuance of the new shares will be carried out in conjunction with the issuance of new shares of the Company to the public in the framework of the Initial Public Offering; and
  - b. The issuance of the new shares will be carried out with a limit of 20.51% (twenty-one percent) of the total number of shares that the Company includes shares issued in the framework of the Initial Public Offering; and

- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>c. Penyetoran atas modal atas saham-saham baru tersebut akan dilakukan secara tunai (<i>in good funds</i>) kedalam kas Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana; dan</p> <p>d. Harga saham-saham baru yang akan dikeluarkan kepada PT Smart Telecom adalah sama dengan harga saham-saham baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana.</p> <p>7. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 11.547.104.500 (sebelas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) ("Saham Baru"), dimana (a) sebanyak-banyaknya 9.179.104.500 (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat ribu lima ratus) Saham Baru akan ditawarkan dengan harga penawaran ("Harga Penawaran") yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau secara internasional di luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yang di dalamnya sudah termasuk program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation/"ESA") untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"); dan (b) sebanyak-banyaknya 2.368.000.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) saham biasa atas nama akan diambil bagian oleh PT Smart Telecom sesuai dengan Keputusan VII dari Keputusan Sirkuler ini.</p> <p>8. Menyetujui bahwa rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.</p> | <p>c. Deposit of capital from the new shares will be carried out in cash (in good funds) into the Company's cash no later than the date of allocation in the framework of the Initial Public Offering; and</p> <p>d. The price of the new shares to be issued to PT Smart Telecom is the same as the price of the new shares to be offered in the Initial Public Offering.</p> <p>7. Approved the issuance of shares in the Company's deposits/portepel of 11,547,104,500 (eleven billion five hundred and forty-seven million one hundred one hundred) common shares in the new name with a nominal value of Rp 100 (one hundred Rupiah) per share ("New Shares"), where (a) a maximum of 9,179,104,500 (nine billion one hundred and seventy-nine million one hundred four thousand five hundred) New Shares will be offered at the offer price (the "Offer Price") to be determined by the Board of Directors of the Company after obtaining written approval from the Board of Commissioners of the Company, to be offered to people in the territory of Indonesia and/or internationally outside Indonesia subject to any provisions of applicable laws and regulations in which such shares are offered through the Company's Initial Public Offering, which includes the Employee Stock Allocation ("ESA") program to be listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX"); and (b) a maximum of 2,368,000,000 (two billion three hundred and sixty-eight million) common shares on behalf of PT Smart Telecom will be taken part by PT Smart Telecom in accordance with Decision VII of this Circular Decree.</p> <p>8. Agreed that the plan for the use of funds from the Initial Public Offering will be determined by the Board of Directors of the Company in accordance with the requirements of the Company.</p> |
|---|---|

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>9. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.</p> <p>10. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation) dengan jumlah sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya 22.947.800 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) saham biasa atas nama ("Program ESA") dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima alokasi pemesanan Saham Baru melalui Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan menerima alokasi pemesanan Saham Baru melalui Program ESA.</p> <p>11. Menyetujui penetapan PT Candrakarya Multikreasi sebagai pemegang saham Pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal.</p> | <p>9. Agreed to list all shares of the Company, after the conducting the Initial Public Offering of shares offered and sold to the public through the Capital Market, as well as shares owned by shareholders (other than public shareholders) of the Company, on the IDX (Company Listing) and agreed to register the Company's shares in the Shares Registry which is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations in the field of the Indonesian Capital Market.</p> <p>10. Agreed to provide a stock allocation program to the Company's employees (Employee Stock Allocation) of 0.25% (zero comma two five percent) of the number of shares to be offered by the Company through the Initial Public Offering or as many as 22,947,800 (twenty-two million nine hundred and forty-seven thousand eight hundred) common shares on behalf of (the "ESA Program") with regard to IDX regulations and applicable legislation. Furthermore, it authorizes the Board of Directors to take all necessary actions in the implementation of the ESA Program, including but not limited to determining the certainty of the number of shares of the ESA Program, determining the procedures for implementing the ESA Program, and determining the criteria for employees who are entitled to receive the allocation of New Stock orders through the ESA Program.</p> <p>11. Approved the determination of PT Candrakarya Multikreasi as the Controlling Shareholder of the Company in order to fulfill the provisions of Article 85 of the Financial Services Authority Regulation Number 3 /POJK.04/2021 concerning the Implementation of Capital Market Activities.</p> |
|---|--|

12. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sirkuler ini yang telah disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**PT Palapa Ring Barat (PRB) - entitas anak**

- a. Pada bulan 19 Januari 2022, PRB, entitas anak, telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 426.776.887 atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai untuk periode Juli hingga Desember tahun 2020.
- b. Pada tanggal 11 Februari 2022, PRB, entitas anak, yang merupakan entitas anak Perseroan mengajukan permohonan arbitrase kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) yang merupakan penanggung jawab proyek kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat selaku termohon melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa No.45016/II/ARB-BANI/2022 tanggal 11 Februari 2022.

12. In order to comply with applicable laws and regulations, especially in the field of capital markets, in connection with the Initial Public Offering of Shares, agreed to change all provisions of the Company's Articles of Association in the form and content as stated in this Adjusted Circular Decision Attachment, among others, with laws and regulations in the field of capital markets including but not limited to (i) Bapepam & LK Regulation No. IX.J.1 concerning The Articles of Association of The Company Conducting Public Offering of Equity securities and Public Companies, Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam & LK No. Kep-179 / BL / 2008 dated May 14, 2008; (ii) Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies; (iii) OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of The General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically; and (iv) OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

**PT Palapa Ring Barat (PRB) - a subsidiary**

- a. On January 19, 2022, PRB, a subsidiary, received tax refund amounting to Rp 426,776,887 from Assessment Letter of Tax Overpayment (SKPLB) of July until December 2020.
- b. On February 11, 2022, PRB, a subsidiary, of the Company submitted arbitration request to the Ministry of Communication and Information of Republic Indonesia (Kemenkominfo) as project owner of Development and Management of Palapa Ring Fiber Optic Backbone west package through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) with registration No. 45016/II/ARB-BANI/2022 dated February 11, 2022.

Permohonan penyelesaian sengketa diajukan oleh PRB (Pemohon) kepada Kemenkominfo (Termohon) sehubungan dengan perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perbedaan pengenaan PPN pada nilai Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara PRB dan Kemenkominfo.

Adapun nilai yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp 105.831.458.839 dimana nilai tersebut kurang dari 20% dari nilai ekuitas Perseroan terkonsolidasi, sehingga berdasarkan pertimbangan batasan nilai dimaksud, manajemen Perseroan berpandangan bahwa nilai yang menjadi sengketa tidak material bagi PRB.

Nilai PPN tersebut di atas seluruhnya telah dipungut oleh Kemenkominfo, sehingga apabila sengketa dimenangkan oleh Kemenkominfo, PRB tidak memiliki kewajiban pembayaran lagi.

The Resolution letter was submitted by PRB to Kemenkominfo related with the dispute of interpretations of the provisions in the agreement about Value Added Tax (PPN) and the difference in the imposition of VAT as a payment of service availability as stated in Attachment 11 of the Cooperation Agreement which signed by PRB and Kemenkominfo.

The value of dispute is Rp 105,831,458,839 where the value is less than 20% of the Consolidated Company's equity value, so that based on the consideration of the value limit, the Company's management opinion the value is immaterial to PRB.

The afore mentioned VAT above has been fully collected by Kemenkominfo, so if the dispute is won by the Kemenkominfo, PRB has no obligation to make anymore payment.

#### 47. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas Konsolidasian

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas:

	2020	2019
Penambahan aset tetap melalui utang bank	-	259.858.141.117
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	310.323.665.975	-
Penambahan aset hak guna usaha melalui liabilitas sewa	62.185.118.111	-
Kenaikan utang lain-lain dari pembayaran dividen kepada kepentingan non pengendali	-	29.580.000

#### 47. Supplemental Disclosures for Consolidated Statements of Cash Flows

The following are the noncash investing and financing activities of the Group:

	2020	2019
Addition to property and equipment through bank loan	-	259.858.141.117
Acquisition of property and equipment through trade account payable	310.323.665.975	-
Acquisition of property and equipment through lease liabilities	62.185.118.111	-
Increase in other accounts receivable arising from dividend to noncontrolling interest	-	29.580.000

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**48. Rekonsiliasi Kewajiban Konsolidasian yang  
Timbul dari Kegiatan Pendanaan**

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

	31 Desember/ December 31, 2021							31 Desember/ December 31, 2021	
	31 Desember/ December 31, 2020	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a Subsidiary	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Pergerakan valuta asing/ Changes in foreign exchange	Perubahan nilai wajar/Fair value adjustment	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Perubahan lainnya/ Other changes		
Utang bank	4.914.697.218.327	120.641.471.563	60.486.345.820	-	-	13.762.220.104	-	5.109.587.255.814	Bank loans
Liabilitas sewa	119.190.272.048	-	(29.675.052.297)	-	-	-	-	89.515.219.751	Lease liabilities
Utang non-bank	21.990.464.042	-	34.075.677.558	564.827.706	-	-	-	56.630.969.306	Non-bank loans
Utang obligasi	457.840.131.932	-	-	-	-	1.021.867.138	-	458.861.999.070	Bonds payable
Sukuk ijarah	1.655.230.739.572	-	500.000.000.000	-	-	5.130.837.211	(5.036.753.232)	2.155.324.823.551	Sukuk ijarah
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	7.168.948.825.921	120.641.471.563	564.886.971.081	564.827.706	-	19.914.924.453	(5.036.753.232)	7.869.920.267.492	Total liabilities from financing activities

**48. Reconciliation of Consolidated Liabilities  
Arising from Financing Activities**

The table below details changes in the Group liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes:

	31 Desember/ December 31, 2020							31 Desember/ December 31, 2020	
	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Pergerakan valuta asing/ Changes in foreign exchange	Perubahan nilai wajar/Fair value adjustment	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Perubahan lainnya/ Other changes			
Utang bank	6.422.336.148.958	(1.527.216.363.954)	-	-	-	19.577.433.323	4.914.697.218.327	Bank loans	
Liabilitas sewa	89.096.278.950	29.844.003.214	-	-	-	249.989.884	119.190.272.048	Lease liabilities	
Utang non-bank	35.154.808.142	(14.091.003.490)	926.659.390	-	-	-	21.990.464.042	Non-bank loans	
Utang obligasi	994.928.408.284	(540.000.000.000)	-	-	2.920.540.316	(8.816.668)	457.840.131.932	Bonds payable	
Sukuk ijarah	991.684.251.202	666.515.000.000	-	-	2.758.708.988	(5.727.220.618)	1.655.230.739.572	Sukuk ijarah	
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	8.533.199.895.536	(1.384.948.364.230)	926.659.390	-	5.679.249.304	14.091.385.921	7.168.948.825.921	Total liabilities from financing activities	

	31 Desember/ December 31, 2019							31 Desember/ December 31, 2019	
	1 Januari/ January 1, 2019	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Pergerakan valuta asing/ Changes in foreign exchange	Perubahan nilai wajar/Fair value adjustment	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs	Perubahan lainnya/ Other changes			
Utang bank	4.414.878.387.259	1.721.753.412.793	-	-	18.348.653.976	267.355.694.930	6.422.336.148.958	Bank loans	
Liabilitas sewa	106.297.945.810	(17.201.666.860)	-	-	-	-	89.096.278.950	Lease liabilities	
Utang non-bank	104.250.548.544	(67.247.824.396)	(1.847.916.006)	-	-	-	35.154.808.142	Non-bank loans	
Utang obligasi	992.305.758.403	-	-	-	2.622.649.881	-	994.928.408.284	Bonds payable	
Sukuk ijarah	-	1.000.000.000.000	-	-	(8.315.748.798)	-	991.684.251.202	Sukuk ijarah	
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	5.617.732.640.016	2.637.303.921.537	(1.847.916.006)	-	12.655.555.059	267.355.694.930	8.533.199.895.536	Total liabilities from financing activities	

**49. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan  
Konsolidasian**

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan disertai beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan arus kas konsolidasian dan Catatan 2w, 15, 29 dan 40 atas laporan keuangan konsolidasian untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**49. Reissuance of the Consolidated Financial  
Statements**

In respect to the Company's plan to conduct Initial Public Offering, the Company has reissued the financial statements for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, with some changes and additional disclosures in consolidated statements of cashflows and Notes 2w, 15, 29 and 40 to the financial statements in order to comply to Financial Services Authority's Regulation.

**50. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Penyesuaian atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2021

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Grup tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amendemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis
- Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19

Diterapkan pada tahun 2020

Penerapan PSAK No. 71, PSAK No. 72, dan PSAK No. 73

Grup menerapkan PSAK No. 71, PSAK No. 72, dan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Dampak kumulatif dari penerapan awal PSAK No. 71 dan PSAK No. 72 tidak signifikan, sehingga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2020.

**50. New Financial Accounting Standards and Adjustment of Consolidated Financial Statements**

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Adopted during 2021

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2021 and relevant for the Group, did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements:

- Amendment to PSAK No. 22, Business Combination regarding Definition of Business
- Amendments to PSAK No. 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2
- Amendments to PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2
- Amendments to PSAK No. 71: Financial Instruments, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2
- Amendments to PSAK No. 73: Leases, on Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2
- Amendments to PSAK No. 73: Leases, on Covid-19-related Rent Concessions

Adopted during 2020

Application of PSAK No.71, PSAK No.72, and PSAK No. 73

The Group has applied PSAK No. 71, PSAK No. 72, and PSAK No. 73 effective for the financial year beginning January 1, 2020.

The cumulative effect of initially applying PSAK No. 71 and No. 72 is insignificant so that those were recognized in the consolidated statement profit or loss 2020.

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Grup tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

#### PSAK No. 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 11%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini pada tanggal 1 Januari 2020 aset hak-guna dan liabilitas sewa Grup meningkat sebesar Rp 161.892.455.825 yang terdiri dari reklasifikasi aset sewa pembiayaan sebesar Rp 107.999.168.835 dan pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 53.893.286.990.

Saat penerapan pertama PSAK No. 73, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- tidak melakukan penilaian ulang untuk definisi sewa dalam kontrak yang sebelumnya telah diidentifikasi mengandung sewa.
- liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental pada tanggal 1 Januari 2020.
- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa untuk perhitungan liabilitas sewa.
- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek.

For application of PSAK No. 73 effective for the financial year beginning January 1, 2020, the Group has not restated comparative for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.

#### PSAK No. 73: Leases

On the application of PSAK No. 73, the Group recognized right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as 'operating lease' under the principles of PSAK No. 30, Leases. These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate on January 1, 2020. The weighted average of incremental borrowing rate applied was 11%. Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the consolidated statement of financial position as at December 31, 2019.

By applying this standard, as of January 1, 2020 the Group's right-to-use assets and leased liabilities increased by Rp 161,892,455,825 which comprised reclassification of finance lease amounting to Rp 107,999,168,835 and recognition of leases that were previously recognized as operating lease amounting to Rp 53,893,286,990.

In applying PSAK No. 73 for the first time, the Group used the following practical expedients permitted by the standard:

- do not perform reassessment of lease definition on contract were previously identified as containing lease.
- lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted at incremental borrowing rate as at January 1, 2020.
- the use of a single discount rate to a portfolio of leases in calculating lease liability.
- operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at January 1, 2019 are treated as short-term lease.

- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal.
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.
- menerapkan pengecualian untuk sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal:

1 Januari 2022

- Amandemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- Amandemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Grup masih mengevaluasi dampak penerapan amandemen PSAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian dari penerapan amandemen PSAK tersebut belum dapat ditentukan.

- the exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use assets at the date of initial application.
- the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease.
- apply the exemption on leases of low-value assets.

Issued but not yet effective

Amendments to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2022

- Amendment to PSAK No. 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks
- Amendment to PSAK No. 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts – Contract Fulfillment Costs
- 2020 Annual Improvements - PSAK No. 71: Financial Instruments - Fees in the '10 per cent' test for derecognition of financial liabilities

January 1, 2023

- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current

The Group is still evaluating the effects of the amendment to PSAK and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

\*\*\*\*\*

	2021	2020	2019	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	558.509.195.681	150.842.378.736	1.000.801.922.405	Cash and cash equivalents
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Tax amnesty assets
Piutang usaha				Trade accounts receivable
Pihak berelasi	116.579.679.800	8.953.472.652	2.702.335.176	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan masing-masing sebesar Rp 19.431.188.627, Rp 19.431.188.627 dan Rp 12.139.758.573 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	193.286.349.977	370.483.205.773	357.538.008.074	Third parties - net of allowance for doubtful accounts of Rp 19,431,188,627, Rp 19,431,188,627 and Rp 12,139,758,573 as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively
Piutang lain-lain	19.606.562.255	12.725.882.999	11.990.089.397	Other accounts receivable
Uang muka	2.606.122.023	2.830.751.155	4.825.242.522	Advances
Biaya dibayar dimuka	46.992.930.023	44.791.921.866	36.083.559.884	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	71.357.977.790	177.124.314.383	172.111.842.772	Prepaid taxes
Aset lancar lain-lain	68.603.744.289	27.082.625.302	18.570.513.650	Others Current Assets
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.077.722.581.788</b>	<b>794.734.452.866</b>	<b>1.604.723.513.880</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NONCURRENT ASSETS</b>
Aset yang dibatasi penggunaannya	2.791.447.725	2.820.682.525	5.487.185.934	Restricted assets
Piutang kepada pihak berelasi	1.604.881.137.995	1.513.581.137.995	1.501.081.137.995	Due from related parties
Investasi pada entitas asosiasi	133.975.037.808	114.990.200.534	114.990.200.534	Investment in associated entity
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 497.249.744.305, Rp 31.798.425.263 dan Rp 858.196.624.794 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	5.948.866.945.859	5.503.300.334.404	4.013.079.389.269	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 497,249,744,305, Rp 31,798,425,263 and Rp 858,196,624,794 as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 668.221.526, Rp 536.768.111 dan Rp 405.314.696 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	2.252.965.474	2.384.418.889	2.515.872.304	Tax amnesty asset - net of accumulated depreciation of Rp 668,221,526 , Rp 536,768,111 and Rp 405,314,696 as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 9.430.382.835, Rp 6.158.178.136 dan Rp 5.185.624.095 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	1.623.290.278	667.565.030	99.982.805	Intangible assets - net of accumulated amortization of Rp 9,430,382,835, Rp 6,158,178,136 and Rp 5,185,624,095 December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 87.415.305.085 dan Rp 50.811.039.386 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	128.546.769.487	155.420.472.453	-	Right-of-use assets - net of accumulated depreciation of Rp 87,415,305,085 and Rp 50,811,039,386 as of December 31, 2021 and 2020, respectively
Aset pajak tangguhan	-	-	3.031.449.423	Deferred tax assets
Aset lain-lain	3.426.777.689	3.824.551.040	2.202.994.734	Other assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>7.824.366.372.316</b>	<b>7.298.789.362.870</b>	<b>5.642.488.212.998</b>	<b>Total Noncurrent Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>8.902.088.954.103</b>	<b>8.093.523.815.736</b>	<b>7.247.211.726.878</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

\*) Menggunakan metode biaya

\*) Using cost method

	2021	2020	2019	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS LANCAR</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha				Trade accounts payable
Pihak berelasi	4.148.687.355	14.290.965.319	15.368.292.936	Related parties
Pihak ketiga	874.168.124.433	823.590.677.469	548.191.929.129	Third parties
Utang lain-lain				Other accounts payable
Pihak berelasi	-	-	5.327.117	Related parties
Pihak ketiga	56.921.208.548	62.352.491.658	43.798.625.585	Third parties
Utang pajak	4.314.510.437	8.913.842.635	6.045.455.105	Taxes payable
Beban akrual	39.064.827.424	35.255.777.105	24.925.575.233	Accrued expenses
Uang muka penjualan	2.399.196.299	2.540.358.909	28.350.846.961	Advances from customer
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current portion of long term-liabilities:
Utang Bank	434.588.192.470	274.792.402.450	1.089.603.834.863	Bank loans
Utang obligasi	458.881.999.070	-	537.996.897.073	Bonds payable
Sukuk ijarah	346.332.585.924	-	-	Sukuk ijarah
Liabilitas sewa	42.992.200.061	45.532.444.462	19.266.814.917	Lease liabilities
Utang non-bank	20.094.690.773	11.270.769.682	13.482.391.473	Non-bank loans
Pendapatan ditangguhkan	22.445.331.651	18.325.845.489	18.720.651.873	Deferred income
<b>Jumlah Liabilitas Lancar</b>	<b>2.306.331.554.445</b>	<b>1.094.865.575.378</b>	<b>2.343.758.641.865</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS TIDAK LANCAR</b>				<b>NONCURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha - pihak ketiga	159.797.186.333	575.754.822.578	62.630.784.984	Trade account payable - third parties
Liabilitas pajak tangguhan	24.662.402.828	38.253.673.297	-	Deferred tax liabilities
Utang kepada pihak berelasi	-	403.015.037.559	171.750.033.562	Due to related parties
Uang muka penjualan	129.939.676.375	69.737.537.925	-	Advances from customer
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities net of current portion:
Utang bank	1.285.145.459.289	738.051.036.277	759.946.976.266	Bank loans
Utang obligasi	-	457.840.131.932	456.931.511.211	Bonds payable
Sukuk ijarah	1.808.992.237.827	1.855.230.739.572	991.684.251.202	Sukuk ijarah
Liabilitas sewa	57.785.115.528	101.484.702.657	69.629.464.032	Lease liabilities
Utang non-bank	36.536.278.533	10.719.694.360	21.672.416.669	Non-bank loans
Pendapatan ditangguhkan	139.478.773.483	86.503.056.899	86.342.342.887	Deferred income
Utang kepada pemegang saham	-	844.408.372.000	844.408.372.000	Shareholder loan
Liabilitas imbalan pasca kerja	84.243.153.802	70.947.133.895	52.909.394.613	Post-employment benefits reserve
<b>Jumlah Liabilitas Tidak Lancar</b>	<b>3.726.580.282.778</b>	<b>5.051.945.938.951</b>	<b>3.518.105.546.926</b>	<b>Total Noncurrent Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>6.032.911.837.223</b>	<b>6.146.811.514.329</b>	<b>5.861.862.188.791</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal saham				Capital Stock
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham seri A, 338.235 saham seri B dan 764.490 saham seri C pada tanggal 31 Desember 2021				Authorized, issued and paid-up - 250,000 series A shares, 338,285 series B shares and 764,490 series C shares as of December 31, 2021
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 250.000 saham seri A dan 338.235 saham seri B pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.112.120.439.015	298.750.159.015	298.750.159.015	Authorized, issued and paid-up - 250,000 series A shares and 338,285 series B shares as of December 31, 2020 and 2019
Tambahan modal disetor	(2.530.086.912)	(2.530.086.912)	(2.530.086.912)	Additional paid-in capital
Surplus revaluasi aset	345.024.461.741	431.812.510.351	104.324.191.232	Surplus asset revaluation
Komponen ekuitas lainnya	1.141.300.622	1.141.300.622	1.141.300.622	Others equity component
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	59.750.031.803	59.750.031.803	25.000.000.000	Appropriate
Belum ditentukan penggunaannya	353.670.952.611	1.155.788.388.528	956.663.976.130	Unappropriate
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.869.177.096.880</b>	<b>1.944.712.301.407</b>	<b>1.385.349.538.087</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>8.902.088.934.103</b>	<b>8.091.523.815.736</b>	<b>7.247.211.726.878</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

\*) Menggunakan metode biaya

\*) Using cost method

	2021	2020	2019	
<b>PENDAPATAN</b>	2.302.493.871.809	2.172.757.383.691	1.469.748.161.488	<b>REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	(1.214.593.356.166)	(1.153.057.118.085)	(747.992.489.180)	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA KOTOR</b>	1.087.900.515.643	1.019.700.265.606	721.755.672.308	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	(539.960.639.681)	(467.065.169.388)	(373.528.367.694)	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>	547.939.875.962	552.635.096.218	348.227.304.612	<b>INCOME FROM OPERATIONS</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	4.231.281.833	(6.435.766.958)	1.652.244.197	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan bunga	14.174.025.677	6.472.794.912	25.375.425.403	Interest income
Rugi pelepasan aset tetap	(29.900.224)	(9.735.380)	(73.715.924)	Loss on disposal of property and equipment
Beban bunga dan keuangan	(382.030.850.931)	(346.118.138.873)	(218.385.459.977)	Interest expense and financial charges
Lain-lain-bersih	119.574.562.001	73.245.134.180	191.080.000.022	Others-net
<b>Beban Lain-Lain - Bersih</b>	(244.060.861.644)	(272.845.712.119)	(351.506.279)	<b>Other Expenses - Net</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	303.838.994.318	279.789.384.099	347.675.798.333	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN (MANFAAT) PAJAK</b>				<b>TAX (INCOME) EXPENSE</b>
Pajak kini	52.408.989.380	50.444.663.060	41.014.766.500	Current tax
Pajak tangguhan	(6.110.910.929)	4.869.948.167	1.568.615.697	Deferred tax
<b>BEBAN PAJAK - Bersih</b>	46.298.078.451	55.314.611.227	42.583.382.397	<b>TAX EXPENSE - Net</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	257.540.915.867	224.474.772.872	305.292.415.936	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	377.262.681.230	-	Gain on revaluation of property and equipment
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	7.761.051.155	(37.726.268.123)	-	Deferred tax of asset revaluation
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	1.366.780.086	(5.959.516.229)	(8.098.436.867)	Remeasurement of defined benefit liability
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	Gain on revaluation of fixed asset
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(300.691.615)	1.311.093.570	2.174.609.217	Tax relating to remeasurement of defined benefit liabilities
<b>Jumlah</b>	8.847.139.606	334.887.990.448	(8.523.827.650)	<b>Total</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	266.388.055.473	559.362.763.320	298.768.588.286	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>

\*) Menggunakan metode biaya

\*) Using cost method

	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Modal disetor/ Additional Paid in Capital	Surplus Revaluasi/ Ases/ Surplus Revaluation Assets	Saldo laba/Retained Earnings Yang Ditetapkan Penggunaan/ Appropriate	Komponen Ekuitas lainnya/ Others Equity Component	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019	298.750.159.015	(2.530.088.912)	127.652.860.967	661.566.698.109	1.141.300.622	1.065.590.949.801	Balance as of January 1, 2019
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan	-	-	-	305.292.415.935	-	305.292.415.935	Total comprehensive income Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain-lain	-	-	-	(6.523.827.650)	-	(6.523.827.650)	Other comprehensive income Remeasurement of long-term employee benefits liability
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	298.768.588.286	-	298.768.588.286	Total comprehensive income
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	-	298.768.588.286	-	298.768.588.286	
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba Transaksi dengan pemilik	-	-	(23.328.669.735)	-	-	-	Transfer from revaluation surplus to retained earnings Transactions with owners
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	(25.000.000.000)	-	-	Appropriation for general reserve
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	298.750.159.015	(2.530.088.912)	104.324.191.232	968.643.976.130	1.141.300.622	1.385.349.539.087	Balance as of December 31, 2019
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan	-	-	-	224.474.772.872	-	224.474.772.872	Total comprehensive income Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain-lain	-	-	-	(4.648.422.659)	-	(4.648.422.659)	Other comprehensive income Gain of asset revaluation net of tax Remeasurement of long-term employee benefits liability
Keuntungan revaluasi aset tetap setelah dampak pajak	-	-	339.536.413.107	-	-	339.536.413.107	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	219.826.350.213	-	219.826.350.213	Total comprehensive income
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	-	219.826.350.213	-	219.826.350.213	
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba Transaksi dengan pemilik	-	-	(12.048.093.988)	-	-	-	Transfer from revaluation surplus to retained earnings Transactions with owners
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	(34.750.031.803)	-	-	Appropriation for general reserve
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	298.750.159.015	(2.530.088.912)	431.812.510.351	1.155.768.388.528	1.141.300.622	1.944.712.301.407	Balance as of December 31, 2020
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan	-	-	-	257.540.915.867	-	257.540.915.867	Total comprehensive income Profit for the year
Rugi komprehensif lain-lain	-	-	-	(1.066.068.451)	-	(1.066.068.451)	Other comprehensive loss Tax effect of revaluation property and equipment Remeasurement of long-term employee benefits liability
Dampak pajak atas revaluasi aset tetap	-	-	7.781.051.155	-	-	7.781.051.155	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	257.507.004.318	-	257.507.004.318	Total comprehensive income
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	-	257.507.004.318	-	257.507.004.318	
Transfer surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba Transaksi dengan pemilik	-	-	(84.568.099.785)	-	-	-	Transfer from revaluation surplus to retained earnings Transactions with owners
Penerbitan saham	1.813.370.280.000	-	-	-	-	1.813.370.280.000	Issuance of shares of stock
Dividen	-	-	-	(1.155.293.540.000)	-	(1.155.293.540.000)	Dividends
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	2.112.120.439.015	(2.530.088.912)	345.024.461.741	353.670.922.611	1.141.300.622	2.869.177.068.860	Balance as of December 31, 2021

\*) Menggunakan metode biaya

\*) Using cost method

	2021	2020	2019	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	2.584.478.117,192	2.187.606.060,146	1.407.188.791,009	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(988.875.386,817)	(846.316.906,140)	(533.076.777,188)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(254.044,022,105)	(218.020.779,317)	(191.766.811,294)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan dari operasi bersih	1.321.758.709,259	1.123.268.374,689	682.323.202,547	Net cash generated from operations
Penerimaan dari pengembalian pajak	106.864.097,504	85.869.723,595	-	Cash Receipt from tax refund
Penerimaan bunga	14.375.634,996	6.472.794,811	25.349.907,817	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan	(54.295,055,023)	(78.389.114,401)	(51.659.433,830)	Income tax paid
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(364.307.803,079)	(321.459.109,994)	(212.506.432,959)	Interest and financial charges paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.024.393.582,657	785.762.668,600	443.507.243,575	Net Cash Provided by Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan deviden	-	-	11.602.605,654	Dividends received
Perolehan aset takberwujud	(4.227.929,947)	(1.540.136,266)	-	Acquisitions of intangible assets
Pembayaran investasi ke entitas anak	(18.216.250,000)	-	-	Payment of investment in subsidiary
Pembayaran bunga dan biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset tetap	(42.825.277,176)	(27.196.275,579)	(19.754.874,340)	Interest paid and other expense capitalized to property and equipment
Penambahan (penurunan) piutang pihak berelasi	(339.652.915,241)	282.102.781,680	(344.150.000,000)	Increase (decrease) in due from related parties
Perolehan aset lain-lain	(325.157.322,553)	(127.400.356,631)	(93.277.487,254)	Acquisitions of other assets
Perolehan aset tetap	(913.281.949,688)	(1.034.715.254,008)	(1.495.533.257,987)	Acquisitions of property and equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.643.461.644,605)	(885.749.239,804)	(1.941.113.013,727)	Net Cash Used in Investing Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari:				Proceeds from:
Seloran modal	1.813.370.280,000	-	-	Paid in capital
Utang bank	1.040.000.000,000	240.000.000,000	1.366.634.324,076	Bank loans
Penerbitan sukuk ijarah	500.000.000,000	666.515.000,000	1.000.000.000,000	Issuance of sukuk ijarah
Utang non-bank	53.715.628,648	-	-	Non-bank loans
Pembayaran:				Payment of:
Utang non-bank	(19.639.949,088)	(14.091.003,490)	(67.247.824,396)	Non-bank loans
Liabilitas sewa	(29.675.052,297)	(19.903.983,838)	(17.201.666,860)	Lease liabilities
Utang bank	(331.705.077,254)	(1.076.240.363,952)	(249.127.860,382)	Bank loans
Utang kepada pemegang saham	(844.408.372,000)	-	-	Shareholder loan
Dividen	(1.155.293.540,000)	-	-	Dividends
Utang obligasi	-	(540.000.000,000)	-	Bonds payable
Utang pihak berelasi	-	-	(98.787.146,941)	Due to related parties
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan	1.026.363.916,007	(745.720.351,280)	1.934.270.025,497	Net Cash Provided (Used) by Financing Activities
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	407.295.954,059	(848.706.922,284)	436.664.255,345	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
Selisi transaksi caian mata uang asing	370.952,886	(1.252.621,385)	(706.159,186)	Effect of changes in foreign exchange rates
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	150.842.378,736	1.000.801.922,405	564.843.826,248	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	558.509.185,681	150.842.378,736	1.000.801.922,405	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>

\*) Menggunakan metode biaya

\*) Using cost method



**Kantor Pusat:**

Grha 9, Lantai 6  
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta  
10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)  
Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)